

**Seno**

**Efrianto**

**Ajisman**

**Zusneli Zubir**

**BUNGA RAMPAI**

# **SEJARAH BENGKULU**

**Bengkulu Dari Masa Kolonial Hingga Era Otonomi Daerah**

**BPSNT Padang  
Press**



# BUNGA RAMPAI SEJARAH BENGKULU

**“BENGKULU DARI MASA KOLONIAL HINGGA  
ERA OTONOMI DAERAH”**

SENO, EFRIANTO A., AJISMAN, ZUSNELI ZUBIR

---

**SEJARAH BENGKULU  
“BENGKULU DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA  
OTONOMI DAERAH”**

©2012 BPSNT PadangPress  
Cetakan Pertama: Oktober 2012

---

Hak Penerbitan pada BPSNT PadangPress

*Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau  
memperbayak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
Penerbit (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)*

---

**Editor**

DR. MHD. NUR, MS

**Desain cover**

Zusneli Zubir

**Lay-out**

CV. FAURA ABADI

**Percetakan**

CV. FAURA ABADI

**ISBN 978-602-8742-53-5**

---

**Penerbit:**

BPSNT PadangPress

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faks: 0751-496181 [www.bpsnt-padang.info](http://www.bpsnt-padang.info)

# BUNGA RAMPAI

SEJARAH BENGKULU

**“BENGKULU DARI MASA KOLONIAL HINGGA  
ERA OTONOMI DAERAH”**

SENO  
EFRIANTO A.  
AJISMAN  
ZUSNELI ZUBIR

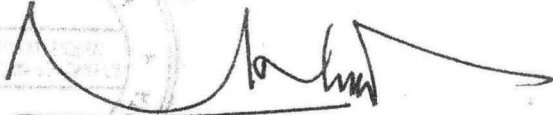
BPSNT PADANG PRESS



Akhirnya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Bengkulu.

Jakarta, Juli 2012

Setdirjen, NBSF  
Kemenbudpar



Drs. Mumus Muslim, MM.

NIP. 19630502 198403 1 001

**SAMBUTAN**  
**SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM**  
**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Diiringi puji dan syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti pada Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Karya ini sebagai bentuk tanggungjawab ilmiah para peneliti Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang, yakni dapat mempublikasikan hasil kajiannya kepada masyarakat.

Karya yang berupa Bunga Rampai hasil penelitian para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang ini berupaya menjelaskan tentang berbagai hal tentang sejarah masyarakat yang ada di daerah Bengkulu. Dari perspektif sejarah daerah ini memiliki sejarah yang panjang, dan ini telah menghiasi perjalanan panjang dari kehidupan masyarakat yang hidup di bumi Rafflesia ini. Kemudian dari perspektif budaya, hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia, masyarakatnya juga heterogen tentu memiliki kompleksitas budaya yang unik dan menarik untuk dikaji dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam rangka itulah, para peneliti dari Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang mempublikasikan beberapa buah hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai. Bunga Rampai tersebut dalam bingkai : *Bengkulu dari Masa Kolonial Hingga Era Reformasi Daerah*. Bingkai tersebut dengan beberapa hasil kajian yakni : (1) Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Propinsi Bengkulu (1945-1950) oleh Seno, (2) Dinamika Sejarah Asal Usul Nama Daerah di Kabupaten Rejang Lebong oleh Efrianto, 3) Peranan Masyarakat dalam Pembentukan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu oleh Ajisman, dan (4) Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan : Kabupaten Seluma Dari Wacana Hingga Realita 2003 – 2007 Oleh : Zusneli Zubir.

Karya tersebut meretas kearah pengetahuan kita terhadap berbagai persoalan, mulai dari persoalan sejarah Perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Propinsi Bengkulu, peranan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiyang, dan dinamika pasar Kepahiyang.

## PENGANTAR REDAKSI

Bunga rampai dengan tema *Bengkulu dari Masa Kolonial Hingga Era Otonomi Daerah* memuat karya, yakni karya pertama dari Seno dengan judul : *Perjuangan Rakyat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Provinsi Bengkulu (1945-1950)* .Karya ini merupakan uraian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan 1945-1950 di Provinsi Bengkulu. Penelitian dan penulisan ini dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan yang berbeda, tetapi bertalian satu sama lain. Pertama lebih bersifat praktis, yaitu untuk mendokumentasikan pengalaman historis yang terjadi di Provinsi Bengkulu sehingga tidak hilang dari memori kolektif generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang

*Kedua*, karya Efrianto dengan judul : *Dinamika Pasar Kepahiang 1958 – 2009*. Karya tersebut menjelaskan bahwa pasar Kepahiang merupakan salah satu pusat ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Sebelum tahun 2003 pasar Kepahiang hanya sebuah pasar di ibukota Kecamatan Kepahiang. Namun pada tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Mulai saat itulah status Pasar Kepahiang mengalami perubahan dari pasar kecamatan menjadi pasar ibukota kabupaten. Perubahan status pasar dengan sendirinya berdampak terhadap dinamika kehidupan ekonomi yang berlangsung dalam pasar. Sebelum menjadi ibukota kabupaten jumlah pedagang, jenis komoditi yang diperdagangkan, intensitas ekonomi di pasar Kepahiang masih terbatas sebab keberadaan pasar hanya untuk masyarakat di Kecamatan Kepahiang. Ketika pasar berubah status menjadi pasar ibukota kabupaten dengan sendirinya Pasar Kepahiang mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari bertambahnya areal pasar dan bertambahnya orang-orang yang terlibat dalam sektor ekonomi di Pasar Kepahiang.

*Ketiga*, karya Ajisman dengan judul : *Peranan Masyarakat Dalam Pembentukan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu*. Ajisman menjelaskan bahwa wacana pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu muncul sebagai respon dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberi peluang bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah, salah satu wilayah yang perlu untuk dimekarkan adalah kepahiang. Lahirnya Undang-Undang tersebut masyarakat Eks Kewedanaan Kepahiang dan

daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Tujuan pemekaran daerah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat bekas Kewedanaan Seluma dan Kaur selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia. Setelah resmi menjadi Daerah Otonom Baru, telah banyak kemajuan yang berhasil diraih Kabupaten Seluma, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam bidang sosial, kemajuan yang berhasil diraih di antaranya adalah pengiriman mahasiswa ke luar daerah untuk melanjutkan studi, program magang bagi pengusaha industri mikro, program pelatihan tenaga kerja, dan program-program peningkatan sumberdaya lainnya, seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Pembangunan sumberdaya manusia tersebut, tidak hanya dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah saja, melainkan juga dilaksanakan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, sehingga kemampuan atau *skill* dapat ditingkatkan secara optimal.

Karya tersebut meretas kearah pengetahuan kita terhadap berbagai persoalan, mulai dari *Bengkulu dari Masa Kolonial Hingga Era Otonomi Daerah* memuat karya, yakni karya *pertama* dari Seno dengan judul : *Perjuangan Rakyat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Provinsi Bengkulu (1945-1950)*, *Dinamika Pasar Kepahiang*, *Peranan Masyarakat dalam Pembentukan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu*, serta *Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan : Kabupaten Seluma dari Wacana Hingga Realita*.

Akhirnya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk bunga rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Bengkulu.

***Penulis***



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii

Bab I : Perjuangan Rakyat Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Provinsi Bengkulu (1945-1950) Oleh : Seno.....	1
Bab II : Pasar Kepahiang di Provinsi Bengkulu ; Dari Kalangan ke Pasar Induk (1958 – 2009) Oleh : Efrianto A.....	159
Bab III : Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu Oleh : Ajisman.....	214
Bab IV : Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan : Kabupaten Seluma Dari Wacana Hingga Realita (2003 – 2007) Oleh : Zusnelli Zubir.....	280

**BAB I**  
**PERJUANGAN RAKYAT DALAM MEMPERTAHANKAN**  
**KEMERDEKAAN INDONESIA DI PROVINSI BENGKULU**  
**(1945-1950)<sup>1</sup>**  
**Seno<sup>2</sup>**

**A. Pendahuluan**

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bengkulu melibatkan berbagai kelompok, baik militer maupun sipil atau pelbagai kelompok organisasi pemuda dan anggota masyarakat yang terlibat atau melibatkan diri ke dalam berbagai macam institusi atau badan-badan perjuangan yang dibentuk pada masa itu. Tiga kelompok utama yang menjadi motor penggerak revolusi fisik di Bengkulu ialah (1) kelompok intelektual kelas menengah dalam masyarakat; mereka umumnya terdiri dari kelompok elit politik senior yang dihormati. (2) Lapisan kedua di belakangnya ialah kelompok pemuda aktivis dan pemuda yang mendapat pendidikan militer pada Zaman Jepang, khususnya *Giyugun* dan *Heih, dan* (3) Kelompok-kelompok dominan di kota dan pedesaan, khususnya dengan latar belakang ideologi Islam.

Sebelum pendudukan Jepang Daerah Bengkulu merupakan suatu Keresidenan yang terdiri dari daerah Kotapraja Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong ditambah dengan daerah Kerui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Setelah pendudukan Jepang dan masa Revolusi Bersenjata, daerah-daerah Kerui, Tanjung Sakti dan Muara Sindang dimasukkan ke dalam Keresidenan Palembang dan Lampung. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, maka daerah-daerah seluruh Indonesia menanti keputusan dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.<sup>3</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 20 September 1945, Sumatera dijadikan sebuah Provinsi dengan Mr. Teuku Muhammad Hassan Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat yang diberi kuasa penuh untuk mengurus segala sesuatu di Sumatera. Adanya Provinsi Sumatera ini, maka satu per satu daerah diberi tanggung jawab dan secara resmi pemerintahan di bawah kekuasaan Republik Indonesia mulai berjalan.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2....

<sup>2</sup> Peneliti Madya pada BPSNT Padang

<sup>3</sup> Arsyik Hawab, *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hal. 196.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengangkat Residen Se-Sumatera, termasuk pula Keresidenan Bengkulu dengan Residen-nya Ir. Indracaya dan dilanjutkan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) Keresidenan. Pembentukan KNI, maka Keresidenan Bengkulu sebagai daerah administrasi mendapat hak mengatur rumah tangga sendiri, yang mendapat dukungan sepenuhnya dari KNI Keresidenan.<sup>4</sup>

Pada tanggal 12 Oktober 1945, Residen Bengkulu mengangkat pegawai negeri yang diperlukan dan menyusun pemerintahan di daerah. Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan dari Gubernur Sumatera yang memberi kuasa penuh kepada Residen untuk mengangkat pegawai negeri. Dengan adanya pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah, maka dengan sendirinya roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Pegawai negeri yang diangkat ini, kebanyakan diambil dari para pejuang yang sudah lama ikut mengabdikan diri dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Residen Ir. Indracaya diganti oleh Mr. Hazairin, sebagai Residen Kedua antara bulan April 1946 sampai dengan ujung bulan Februari 1950.<sup>5</sup>

Antara tahun 1947 – 1950 Keresidenan Bengkulu tetap sebagai daerah Administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan KNI (Komite Nasional Indonesia) mengalami perubahan menjadi DPR Keresidenan. Pembentukan DPR Keresidenan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 12 April 1946 No. 8/m.g.s. yang menetapkan peraturan dasar untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat di tiap-tiap Keresidenan.

Pada masa ini Keresidenan Bengkulu mencetak uang sendiri, sebagai biaya untuk mengatur perekonomian di daerah. Hal ini dilakukan mengingat hubungan dengan Pusat Pemerintahan sangat sulit. Meskipun uang yang dicetak hanya untuk Bengkulu, ternyata sampai keluar daerah uang tersebut laku. Malahan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera mencoba mencontoh dari Bengkulu untuk mencetak uang sendiri.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada setiap Provinsi ini dijadikan Pemerintahan militer. Pertimbangan diadakan daerah militer adalah bahwa situasi daerah dalam keadaan perang, instansi-instansi Pemerintah terpisah-pisah. Sedangkan persoalan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 197.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 198.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 198-199.

banyak yang harus dipecahkan dan diputuskan dengan cepat dan tegas, terutama yang menyangkut pemerintahan. Pemerintah militer ini dibantu oleh para penasehat yang terdiri dari anggota-anggota DPD (Dewan Pertahanan daerah), Badan Eksekutif dan pemimpin-pemimpin rakyat.<sup>7</sup>

Keresidenan Bengkulu yang masih termasuk di dalam Pemerintahan militer Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan Pusat Komando Perjuangan daerah Sumatera Selatan. Pucuk pimpinan pun beralih tempat ke Bengkulu. Gubernur Militer Sumatra Selatan adalah Dr. A.K. Gani. Sebagai pusat perjuangan, maka pada waktu Agresi Militer Kedua, serdadu Belanda baru dapat memasuki Bengkulu sekitar bulan Februari 1949. Dalam peperangan melawan Belanda, pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mundur ke daerah selatan dan utara Bengkulu. Daerah penghabisan dari pertahanan di Kabupaten Bengkulu Selatan pasukan TNI berkedudukan di dusun Fajar Bulan Kecamatan Masmambang Kabupaten Bengkulu Utara berpusat di tambang emas Lebong Tandai. Daerah terakhir ini sangat dipertahankan, mengingat emas yang ada dapat digunakan sebagai dana perjuangan melawan Belanda.<sup>8</sup> Belanda tidak dapat menembus pertahanan rakyat, sehingga daerah tambang emas tersebut dibom Belanda dengan menggunakan pesawat terbang mustang.

Lintasan sejarah Bengkulu memperlihatkan kontinuitas sejarahnya yang terus berinteraksi dengan struktur sosial. Gerak sejarahnya sejalan dengan perputaran roda zaman dari masa ke masa. Bengkulu mengalami penjajahan kolonialisme yang keras meliputi rentang waktu yang sangat panjang. Kaum imperialis yang pernah menjajah Bengkulu adalah Inggris, Belanda dan Jepang. Kekejaman mereka mendapat perlawanan dari rakyat Bengkulu, meski dalam perjuangannya tidak pernah berhasil mengusir kaum penjajah tersebut, karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan belum bersatu melibatkan wilayah lain yang tersebar di seluruh Nusantara.

Meski sering gagal dalam mengusir kaum penjajah, masyarakat Bengkulu memperlihatkan karakteristik yang pantang menyerah, seperti toponimi Bengkulu sendiri yang berasal dari kata, “empang ke hulu”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 202-203.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 203-204.

<sup>9</sup> Tidak diketahui secara persis kapan slogan “Empang ke hulu” mulai populer di kalangan masyarakat. Dalam perkembangannya kemudian “Empang ke hulu” mengalami perubahan dalam penyebutannya “Penghulu”. Kata itu kemudian bergeser menjadi “Bengkehulu”, dan akhirnya menjadi “Bengkulu”, seperti yang kita kenal Semarang. Kata “Empang ke hulu” hanya salah satu saja dari toponimi yang ada. Ada yang menyebut kata Bengkulu dari “Banten Kulon”, yaitu bagian negeri Banten yang berada di cébela Barat, dan Abang Kulon”, yang artinya *abang* (sinar merah) yang berada di *kulon* (cébela barat). Untuk lebih jelasnya mengenai Cerita tentang “Empang



(hambat ke hulu), ketika pasukan Sungai Serut berhasil menghancurkan tentara Aceh yang hendak menyerang. Semangat perlawanan yang demikian pada akhirnya melahirkan kisah heroik yang terus dikenang dalam ingatan kolektif masyarakat Bengkulu hingga kini. Tidak saja dalam pengertian sejarah sebagai ingatan masa lalu, tetapi bagaimana masa lalu kemudian memantulkan kesadaran tentang pemahaman orang Bengkulu untuk mengerti tentang eksistensi sejarah komunitasnya. Pemahaman tentang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Bengkulu harus dilihat dari perspektif pembebasan.<sup>10</sup>

Penulisan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bengkulu kebanyakan belum dilakukan secara obyektif, dalam arti masih mencerminkan kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Penulisan sejarah perjuangan juga banyak dilakukan demi kepentingan kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Selanjutnya tulisan tulisan yang bias tersebut juga disebabkan karena hanya didasarkan pada informasi penulis asing dengan berbagai latar belakang profesi dan pekerjaan.<sup>11</sup> Masa revolusi 1945-1950 di Bengkulu merupakan periode transisi yang penuh dinamika perjuangan. Ada banyak tokoh pemimpin yang berjuang bersama rakyat bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan di Bengkulu.

Dinamika politik menjelang kemerdekaan terjadi begitu keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah revolusi yang dramatis selalu menemukan saluran-salurannya. Perjuangan di tingkat lokal tidak terlepas dari spektrum perjuangan yang lebih besar yang dipayungi nasionalisme. Para pejuang di daerah sadar bahwa momentum proklamasi merupakan puncak perjuangan. Perlawanan rakyat di daerah Bengkulu, terjadi sangat sengit. Perlawanan-perlawanan yang heroik terjadi tanpa komando. Akan tetapi apa pun maknanya, revolusi selalu merupakan pergumulan antara fakta dan mitos, perpaduan antara yang rasional dan irasional, keterpecahan antara kebingungan dan ketidakpastian. Hal itulah yang menjadi prakondisi yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah perlawanan rakyat Bengkulu.<sup>12</sup>

---

ke hulu” dapat dilihat pada tulisan Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 67.

<sup>10</sup> Achmaddin Dalip dkk., *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialismo dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*, (Yakarta : IDSN Depdikbud, 1983), hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>12</sup> Iim Imaduddin, dkk., *Masa Revolusi di Bengkulu 1945-1950 (Inventarisasi Sumber Sejarah Lisan)*, (madang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradicional Padang, Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Padang, 2003), hal.2.

Faktor yang menjadi kekuatan citra revolusi yang dikembangkan oleh kaum revolusioner Bengkulu ada tiga komponen, yaitu kekerasan, pembaharuan, dan perubahan secara menyeluruh. Proses revolusi dipahami sebagai proses yang sangat luar biasa, sangat sukar, dan merupakan gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan sosial apapun.<sup>13</sup> Dalam bahasa Alexis de Tocqueville, revolusi merupakan diskontinuitas yang relatif (pemutusan hubungan dengan masa lalu).<sup>14</sup> Revolusi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah klimaks dari puncak-puncak perjuangan yang terjadi di daerah-daerah, termasuk di Bengkulu. Meskipun demikian, perjuangan di tingkat lokal selalu memperlihatkan kekhasannya yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Berita tentang proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai di Bengkulu dalam waktu yang tidak serentak dan dengan bermacam-macam cara. Pada minggu ke-empat bulan Agustus 1945 Di kota Bengkulu tersiarlah berita dari mulut ke mulut tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi kepastiannya belum ada, karena tidak ada penjelasan apa-apa. Segera setelah berita yang jelas diterima, tanpa ragu-ragu sedikitpun rakyat di tempat masing-masing bergerak menurut caranya sendiri-sendiri tanpa menunggu instruksi, petunjuk dan lain-lain dari manapun<sup>15</sup>.

Mereka berkumpul secara berkelompok, untuk menampilkan pimpinan mereka, menyebar-luaskan berita proklamasi sampai ke pelosok-pelosok, menyiapkan sendiri segala sesuatu yang diperlukan, terutama senjata-senjata yang ada pada mereka, mengatur penjagaan-penjagaan dan bersiap-siap untuk dapat menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Proklamasi kemerdekaan telah merangsang jiwa dan raga mereka yang telah lama menanggung derita karena kekejaman kaum imperialisme/penjajah, untuk mengobarkan api yang senantiasa membara, yang hanya menunggu kesempatan tiba. Genderang perang telah dibunyikan, bendera perlawanan telah dikibarkan, maka berduyun-duyunlah seluruh rakyat Bengkulu terjun ke medan laga untuk membela hak "pusaka".

Berita kemerdekaan yang sampai di kota Manna dibawa untuk pertama kali oleh Buldani Masik, seorang bekas komandan regu Senapan Mesin Berat (M 23) di Markas Besar Gyugun di Pagar Alam

---

<sup>13</sup> S.N. Eisendadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, (Yakarta : Rajawali, 1986), hal. Hal. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>15</sup> M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 47.

(Gyu Dai Tai Honbu). Pada tanggal 30 Agustus 1945 diadakan musyawarah dengan para bekas Gyugun dan Heiho yang pada waktu itu berada di kota Manna dan sekitarnya<sup>16</sup>. Hasil dari pertemuan itu terbentuklah satu organisasi yang bernama Pembela Tanah Air.

Pada tanggal 3 September 1945 salah seorang bekas pimpinan dalam Gyugun bernama Rahim Damrah datang dari kota Palembang dan menginap di rumah Hadis Lani di Bengkulu. Ia membawa dua surat kabar "Palembang Shinbun", yang terbit di kota Palembang. Satu lembar diberikan kepada Hadis Lani. Di dalam surat kabar itu terdapat berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang diucapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Surat kabar itu dibawa oleh Hadis Lani sambil mencari hubungan dengan kawan-kawannya bekas pimpinan Gyugun dan Heiho yang berada di kota Bengkulu.

Mulai saat ini terjadilah kesibukan-kesibukan yang tidak henti-hentinya, siang dan malam dan secara beranting berita tersebut di sampaikan ke seluruh pelosok kota Bengkulu dan sekitarnya. Lebih jelas lagi persoalannya setelah diterima berita kawat dari Adinegoro, Bukit Tinggi, tanggal 5 September 1945, yang isinya mengatakan bahwa berdasarkan Atlantic Charter, San Francisco, berkenaan dengan maklumat Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945, dinyatakan Indonesia telah merdeka. Untuk itu seluruh rakyat di Sumatera diwajibkan mengibarkan bendera Merah Putih dan bersiap siaga untuk menghadapi ancaman musuh yang ingin menjajah Indonesia kembali.

Pada waktu itu, tentara Jepang di Bengkulu masih bersenjata lengkap, meskipun mereka sudah tidak berkuasa lagi. Rakyat menyambut proklamasi dengan semangat yang meluap-luap. Mereka tidak lagi memperdulikan tentara Jepang, seolah-olah dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu terkikis habislah semua "kengerian" mereka, malahan timbul keberanian yang sering kali sulit dikendalikan. Segera terlihat Sang Merah Putih secara berangsur-angsur dipasang oleh rakyat di depan rumah masing-masing. Selain itu, para pemuda memasang lencana merah putih di kopiah dan di dada, mobil-mobil memasang bendera kecil, demikian juga delman dan gerobak ikut memasang bendera. Pekik "Merdeka" terdengar di mana-mana, bersahut-sahutan sambil mengacungkan tinju ke atas.

Atas inisiatif beberapa orang bekas perwira Gyugun yang sedang berada di kota Bengkulu, maka pada tanggal 7 September 1945 diadakan pertemuan dengan beberapa bekas Gyugun dan Heiho di rumah yang terletak di dekat Mesjid Jami (sekarang Jalan Let. Jen.

---

<sup>16</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 48.

Suprpto No. 222 Bengkulu). Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya yaitu : Zikri Ja'far, Badrun, Sanni Ja'far, Ilyas Khalik, Annas Marzuki, A. Rusdi, R. Iskandar, Hadis Lani, Ismail Ranni, Tarmizi, Taher Akib, M.Z. Ranni, Zahari Tani, Innuh Mustafa dan lain-lain. Pertemuan tersebut dipimpin oleh A. Rusdi<sup>17</sup>.

Meskipun pertemuan mereka diintai oleh orang-orang yang setia pada Jepang, namun pertemuan berjalan dengan tenang sampai selesai. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Umar Said dan Cipto, yang baru tiba dari kota Palembang. Mereka menceritakan tentang segala sesuatu yang telah dilakukan dan berjalan di Palembang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah mereka berikan dan kesimpulan-kesimpulan dalam pertemuan tersebut, maka pertemuan itu telah menghasilkan keputusan sebagai berikut : (1) Secepat mungkin menghubungi semua bekas Gyugun, Heiho dan para pemuda untuk membentuk barisan-barisan bersenjata. (2) Bergerak dengan cepat, dan tepat. (3) Mengadakan pertemuan lengkap pada tanggal 10 September 1945 untuk menyusun organisasi.

Pada pertemuan kedua yang diselenggarakan tanggal 10 September 1945 di rumah Nawawi Manaf di Jalan Pintu Batu. Pertemuan ini telah menghasilkan organisasi yang bernama Barisan Pemuda Indonesia. Selesai pertemuan, semua yang telah mendapat tugas, pada saat itu juga harus memulai segala sesuatunya untuk tugas masing-masing.

Pada tanggal 10 September 1945, bertempat di rumah Nur Arifin di Curup juga berlangsung musyawarah yang menelorkan organisasi yang bernama BPRI (Barisan Perjuangan Republik Indonesia. Demikian juga di Kepahyang juga bergerak membentuk organisasi serupa di bawah pimpinan M. Yunus, mantan Pasirah/Gyu Syoi dari Pagar Alam. Hal yang serupa juga terjadi di tempat-tempat lain di wilayah Propinsi Bengkulu, masing-masing bergerak menurut inisiatif, kesempatan dan kemampuan setempat, meskipun koordinasi untuk seluruh wilayah belum terjadi.

Perlu dijelaskan bahwa sejak semula barisan-barisan yang ada di seluruh wilayah sampai ke kampung-kampung didukung dengan segala spontanitas terutama dari para pemuda, pelajar, petani, pegawai, mantan Gyugun/Heiho dan sebagainya. Tidak berapa lama sebagian besar dari organisasi-organisasi ini berkembang menjadi pasukan-pasukan bersenjata dengan nama Penjaga Keamanan Rakyat atau disingkat menjadi PKR. Setiap orang yang bersedia menjadi anggota PKR harus mengucapkan sumpah setia kepada Merah Putih dan rela berkorban

---

<sup>17</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 49.



jiwa raga untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rakyat Bengkulu yang secara spontan rela berkorban jiwa raga membela Tanah Air, tanah tumpah darah, tanpa digaji tumbuh jiwa semangat nasionalisme yang tinggi membuat penulis bangga sekaligus tertarik untuk meneliti, sampai sejauh mana perjuangan dan pengorbnanan mereka dalam menghadapi kehadiran tentara Belanda yang ingin menjajah kembali. Pada hal persenjataan militer Belanda jauh lebih canggih dan lebih lengkap dengan organisasi militer yang juga jauh lebih baik dari mereka yang hanya mengandalkan keberanian dan semangat juang yang tinggi tanpa dibekali peralatan tempur yang memadai dengan latihan militer yang kurang. Mereka hanya rakyat yang secara spontan berani membela kedaulatan negara dari ancaman musuh.

Pada masa-masa perjuangan inilah terpatri semangat nasionalisme yang tinggi dan rela berkorban jiwa raga dan harta untuk mempertahankan kedaulatan negara. Semangat yang pantas dicontoh bagi generasi sekarang yang sedang berjuang membangun negeri, mengisi kemerdekaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang hendak dilihat adalah perjuangan rakyat dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu 1945-1950. Untuk membantu mengungkapkan permasalahan tersebut, dibantu oleh beberapa pertanyaan, antara lain yaitu : Siapakah yang ikut berjuang dan bagaimana bentuk perjuangannya? Di mana sajakah kawasan perjuangannya? dan mengapakah rakyat berjuang?

Tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan penulisan sejarah lokal di Bengkulu, khususnya mengenai sejarah perjuangan rakyat di masa perang kemerdekaan, antara lain menjelaskan orang-orang yang ikut berjuang, bentuk-bentuk perjuangan, dan daerah yang menjadi tempat perjuangan. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah khasanah penulisan sejarah lokal kontemporer di Provinsi Bengkulu, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda/generasi penerus yang nota bene adalah tunas-tunas bangsa yang harus dipersiapkan untuk mengisi kemerdekaan yang nantinya akan berkiprah dalam memajukan bangsa dan negara menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dalam menjembatani generasi muda untuk belajar melalui sejarah patriotisme di daerahnya.

#### 4. Kerangka Konseptual

Perjuangan rakyat dalam perang kemerdekaan (1945-1950), selain di Bengkulu juga dilakukan rakyat dari daerah-daerah lain di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kata lain, perjuangan ini merupakan perjuangan rakyat semesta, dari Sabang sampai Merauke. Mereka bersatu padu melawan kaum penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat di seluruh Indonesia tidak sudi lagi dikuasai atau dijajah oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Belanda. Kehadiran tentara Inggris dan Belanda di Indonesia setelah Jepang menyerah disambut dengan semboyan “merdeka atau mati”. Artinya mereka rela berkorban jiwa dan raga untuk menentang kehadiran bangsa asing yang ingin menjajah kembali. Semboyan “merdeka atau mati” ini juga merasuki darah rakyat Bengkulu.

Perjuangan rakyat Bengkulu pada masa perang kemerdekaan merupakan bagian dari perang rakyat semesta, atau perjuangan rakyat semesta. Mereka berjuang untuk memperebutkan kedaulatan atau kemerdekaan, meski harus dibayar mahal. Harus dibayar dengan tetesan darah dan linangan air mata para syuhada. Berjuang di sini dapat berarti memperebutkan sesuatu dengan berperang. Meski berjuang tidak harus berperang. Ada juga yang bermakna memperebutkan sesuatu dengan mengadu kepandaian, tenaga, keahlian dan sebagainya.<sup>18</sup>

Jadi konsep perjuangan di sini tidak dapat terlepas dari peperangan; perkelahian atau usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari kaum imperialis yang ingin menjajah kembali. Sedangkan berjuang identik dengan berperang. Menurut salah satu pendapat tidak ada perjuangan jika tidak ada perang. Perang artinya pertempuran bersenjata antara dua pasukan. Atau dapat diartikan sebagai permusuhan antara dua negara. Namun perjuangan bisa juga dalam bentuk lain tanpa peperangan, misalnya diplomasi, emansipasi wanita, memajukan pendidikan anak bangsa, dan sebagainya.

Mengingat musuh (Belanda dan Inggris) memiliki senjata yang lebih canggih dan lebih lengkap dengan organisasi militer yang rapi dan disiplin tinggi dari pada rakyat, maka rakyat Bengkulu berperang dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi mereka. Dengan mencari kelengahan dan kelemahan lawan, kemudian serbu dan menghilang atau lari bersembunyi. Dalam

---

<sup>18</sup> Peter Salim dan Jenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, edisi kedua, 1995), hal. 626.

perang gerilya ini mereka terdiri dari kelompok kecil yang tersebar di daerah perang. Jadi perang gerilya adalah perang yang dilakukan oleh sekelompok rakyat melawan pasukan musuh dengan taktik kucing-kucingan. Bergerilya artinya berperang dengan cara sembunyi-sembunyi dan menyerbu musuh secara tiba-tiba. Sedangkan perang kemerdekaan adalah perang yang bertujuan membebaskan diri dari penjajahan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, rakyat Bengkulu juga melakukan siasat perang total. Perang total artinya perang tidak terbatas dengan menggunakan dan mengikut sertakan seluruh kekuatan yang nasional dimiliki.<sup>20</sup> Jadi perang total ini bisa dikatakan sebagai perang habis-habisan. Perang yang melibatkan seluruh kekuatan rakyat tanpa kecuali, besar kecil, tua muda, laki perempuan semua bahu-membahu dan berjuang untuk memenangkan perang.

Dalam perang kemerdekaan Indonesia, rakyat Bengkulu berani dan nekat untuk melawan musuh yang jauh lebih lengkap persenjataannya dari pada mereka karena diilhami oleh semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, nasionalisme artinya ajaran untuk mencintai bangsa sendiri. Juga dapat berarti kesadaran anggota suatu bangsa yang secara aktual bersama-sama memiliki dan mempertahankan identitas dan integritas bangsa. Nasionalisme juga berarti semangat kebangsaan. Sedangkan nasionalis adalah orang yang mencintai nusa dan bangsa sendiri; pecinta perjuangan untuk bangsanya.<sup>21</sup>

Sedangkan patriotisme berarti kecintaan terhadap tanah air; sikap yang mengandung nilai pengorbanan dan kecintaan kepada bangsanya. Dengan demikian patriot juga berarti nasionalis, karena mempunyai makna yang sama, yaitu sebagai pahlawan bangsa atau kusuma bangsa, artinya pembela dan pecinta tanah air. Seseorang akan dikatakan sebagai patriot jika orang tersebut gigih dalam membela negara dalam menghadapi para penjajah.

## 5. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul di atas, ada beberapa karya pustaka yang relevan dan dapat menjadi bahan penunjang untuk melengkapi data pustaka, sehingga tidak ada jeleknya jika di sini perlu ditelaah. Pertama buku hasil karya tim peneliti yang terdiri dari Arsyik Hawab, M. Ikram dan Achmaddin Dalip, yang berjudul : *Sejarah Daerah Bengkulu*, Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978. Dalam

---

<sup>19</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Ibid.*, hal. 1132-1133.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 471.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 1026.

buku tersebut memang menceritakan sejarah Bengkulu mulai dari zaman pra sejarah, zaman kuno (abad 1 – 1500 M), zaman baru (1500 – 1800), Abad ke-19, zaman kebangkitan nasional (1900-1942), zaman pendudukan Jepang (1942-1945), zaman kemerdekaan (1945-1975). Pada zaman kemerdekaan ini dikisahkan secara ringkas mengenai keadaan pemerintahan dan kenegaraan, penyelenggaraan hidup, kehidupan pendidikan dan seni budaya, alam pikiran dan kepercayaan dan hubungan ke luar. Jadi secara keseluruhan belum banyak membicarakan mengenai masalah perjuangan rakyat pada masa revolusi fisik (1945-1949) dalam menentang kaum penjajah. Meskipun demikian, buku ini dapat dijadikan acuan mengingat ada sedikit membahas masalah politik dan pemerintahan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Buku lain yang lebih relevan dari penelitian ini adalah buku hasil karya M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990. Dalam buku tersebut menceritakan tentang Bengkulu selayang pandang. Kemudian juga mengisahkan tentang Bengkulu pada zaman penjajahan Inggris, Belanda dan Jepang. Selanjutnya pada zaman kemerdekaan dikisahkan tentang perang kemerdekaan periode 1,2,3,4 dan 5. Kemudian juga diceritakan tentang pengadaan persenjataan, logistik dan terakhir bicara tentang pengakuan kedaulatan.

Buku ketiga yang dapat dijadikan acuan adalah tulisan Muhammad Nur, dkk., *Nawawi Manaf : Dalam Perjuangan Kemerdekaan Bengkulu*, Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2003. Buku ini merupakan biografi seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Bengkulu yang pernah berjuang dengan gigih dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Bengkulu. Nawawi Manaf adalah seorang patriot sejati, yang berjuang untuk mengusir keinginan kembalinya Belanda untuk menjajah Indonesia.

Buku keempat yang dapat dijadikan penunjang dalam tulisan ini adalah karya Iim Imaduddin dkk., *Masa Revolusi di Bengkulu 1945-1950 (Inventarisasi Sumber Sejarah Lisan)*. Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2003. Uraian dalam buku ini hanya menginventarisasi perjuangan masa revolusi di Bengkulu mulai tahun 1945-1950. Tebal buku hanya 67 halaman. Jadi hanya mengisahkan secara ringkas perlawanan rakyat Bengkulu dalam perang kemerdekaan.

Meskipun keempat buku tersebut di atas dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, namun papartannya masih belum lengkap. Hanya disinggung secara sepintas perjuangan rakyat Bengkulu dalam perang kemerdekaan. Untuk itu maka penelitian yang lebih mendalam



dan detail mengernai keterlibatan rakyat dalam perang kemerdekaan di Bengkulu perlu dilakukan.

## 6. Metode

Penulisan sejarah lokal Bengkulu ini menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dengan menempuh proses rekonstruksi tentang masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan data yang diperoleh<sup>22</sup>. Metode dan proses penelitian semacam ini juga disebut historiografi.

Menurut Gilbert J. Garraghan, seorang tokoh sejarawan, mengatakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis, serta menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dipakai dalam bentuk tertulis.<sup>23</sup> Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu : heuristik, kritik, analisis-sintesis dan penulisan.

1. Heuristik, yaitu pengumpulan sumber terhadap obyek yang diteliti. Kemudian sumber yang ada diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berhubungan dengan informasi dari pelaku atau orang sezaman yang hadir pada saat peristiwa itu terjadi dan dokumen sezaman. Sumber sekunder lebih bersifat melengkapi sumber primer. Sumber sekunder dapat berupa buku-buku penunjang dan literatur lainnya. Penelitian literatur dilakukan di Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Bengkulu. Wawancara dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber lisan dengan melakukan wawancara dari pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup.
2. Kritik sumber. Sumber-sumber baik tertulis maupun lisan, kemudian diseleksi dan dipilah-pilah berdasarkan keakuratan dan keotentisitasan sumber. Sumber primer menjadi acuan utama dalam penulisan, sedangkan sumber sekunder sebagai bahan pelengkap atau penunjang.

---

<sup>22</sup>Louis Gotschal, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press, 1975), hal. 34.

<sup>23</sup>Muh. Nur, "Metodologi dalam Ilmu Sejarah dan Pendekatan Sejarawan", *Historia : Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 4, Vol. II (Desember 2001).

3. Interpretasi, yaitu tahap untuk menginterpretasikan atau menafsirkan data-data yang telah diseleksi untuk diuraikan.
4. Historiografi. Pada tahap terakhir dari metode sejarah ini, fakta-fakta yang telah dikukuhkan masih berupa kepingan-kepingan kejadian dan penggalan peristiwa yang belum menjadi informasi yang utuh. Agar menjadi karya ilmiah, fakta-fakta itu dideskripsikan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi cerita sejarah yang utuh, kronologis dan sistematis<sup>24</sup>.

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menggunakan ilmu bantu lain, seperti antropologi budaya, sosiologi dan ilmu politik.

## **B. BENGKULU PADA PRA KEMERDEKAAN**

### **1. Bengkulu pada Pra Kolonial**

Daerah Bengkulu pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-15 masih tertutup tabir misteri yang menyelimutinya sehingga suasana sejarahnya menjadi gelap dan tidak diketahui. Hal ini bukan berarti tidak ada peristiwa sejarah di daerah tersebut, tetapi banyak faktor-faktor yang menyebabkan, seakan-akan sejarah yang terjadi di daerah tersebut tidak ada atau kurang sama sekali terbetik beritanya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan minimnya pengetahuan kita tentang Bengkulu pada zaman kuno, di antaranya yaitu : Pertama, belum adanya penelitian dan penulisan tentang sejarah daerah Bengkulu yang dilakukan oleh para ahli sejarah secara teliti dan mendalam. Kedua, letak daerah Bengkulu pada waktu itu kurang begitu beruntung. Keadaan geografisnya merupakan alam yang sukar ditempuh, tanahnya yang bergunung dan berlembah, hutannya lebat, sungai-sungai tidak dapat dilayari. Pantainya banyak yang landai tetapi gelombang samudra Indonesia yang terbentang dihadapannya cukup membahayakan. Tidak ada satu pulau pun yang dapat diandalkan sebagai perlindungan terhadap pantai dari badai dan taupan. Lautnya banyak berkarang dan komunikasi merupakan persoalan yang sulit diatasi.

Kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Bengkulu tidak terkenal seperti kerajaan lain yang ada di pulau Sumatera, seperti Kerajaan Tulang Bawang, Melayu, Pagar Ruyung dan Sriwijaya.<sup>25</sup> Peranannya yang kecil dan berada dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar tersebut, mengakibatkan kegiatan kerajaan-kerajaan di Bengkulu dalam

---

<sup>24</sup> Louis Gotschal, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>25</sup> Arsyik Hawab dkk, *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hal. 48.

sejarah sudah terserap dan terwakilkan dalam berita-berita dari kerajaan besar terdekat. Selain itu, dapat dibandingkan dengan lukisan M.J. Krom tentang Sejarah Indonesia pada zaman Belanda yang banyak mengandung hipotesa-hipotesa.

Di antara penghipotesa masalah Sejarah Indonesia adalah : Buku Yunani yang bernama *Periblous tes Erything thalasses* yang ditulis kira-kira tahun 70 Masehi. Buku tersebut melukiskan tentang hubungan India dengan Nusantara dan menyebut tiga buah bandar di India Selatan berdagang dengan negeri : *Chryse* (negeri Mas) yang terletak di antara Sungai Gangga. Buku Ptolemaeus seorang ahli sejarah Iskandariyah menyebut nama negeri *Chryse Chersonesos*, *Barousai*, dan pulau-pulau *Sabadeibai*, *labadiau* dengan ibu negerinya *Argire*.<sup>26</sup>

Kemungkinan negeri-negeri yang disebutkan tadi adalah Semenanjung, Barus dan Yawa Dwipa. Yang jelas pada kurang lebih tahun 150 Masehi daerah Nusantara sudah dikenal ditanah Hindu. Pada sekitar abad ke-5 seorang Musafir Cina yang beragama Budha bernama Fa-Hian, dalam perjalanannya pulang, kapalnya diserang angin taupan dan terdampar di Ye po ti di mana letak Ye po ti tidak jelas. Di antara pendapat para ahli belum ada yang menemukan kesepakatan pendapat. Ada yang mengira pulau Jawa sekarang, ada yang mengira Andalas, dan ada pula yang mengira Kalimantan dan Semenanjung.

Sedangkan nama Sriwijaya sudah lama dikenal oleh pedagang-pedagang Cina dengan nama Chelifot'se atau Sanfotse dan orang Arab mengenalnya dengan nama Zabang. Dengan demikian negeri Nusantara sudah lama dikenal oleh beberapa negeri kawasan Benua.

### **a. Pertumbuhan Negara-Negara**

Pertumbuhan negara-negara pada tiap daerah di muka bumi ini banyak terdapat perbedaan, baik dalam bentuk organisasi maupun dalam perkembangannya. Namun jika pertumbuhan negara-negara tersebut kita tinjau dalam garis besarnya, maka terdapat persamaan proses perkembangannya. Memperhatikan perkembangan masyarakat dan kondisi daerah Bengkulu, maka bentuk dari "Negara" yang pernah tumbuh di sana adalah Negara Suku.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 48.

<sup>27</sup> Negara Suku merupakan suatu sistem pemerintahan yang ada di daerah Bengkulu pada zaman dahulu. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang mendiami bumi Bengkulu, terdiri dari banyak suku dan masing-masing suku mempunyai seorang pemimpin atau kepala suku. Masing-masing kepala suku tersebut mempunyai kekuasaan dan berhak mengatur suku yang dipimpinnya. Antara suku satu dengan suku yang lain ada semacam kesepakatan untuk tidak ikut campur urusan masing-

Negara Suku pada umumnya mempunyai daerah kekuasaan yang tidak luas, rakyatnya sedikit, kepala pemerintahannya yang berdaulat dipegang oleh kepala suku. Tujuan pokok adalah untuk memelihara tata tertib ke dalam dan juga melaksanakan peperangan keluar baik bersifat defensif maupun agresif.<sup>28</sup>

Negara suku mempunyai rakyat yang merupakan masyarakat yang masih mempunyai ikatan yang kuat berupa asal keturunan, kepercayaan dan kebutuhan ekonomi yang sama pula. Perpindahan kekuasaan dalam negara berdasarkan pada azas warisan keturunan dan ada pula yang dipilih secara bebas oleh kepala negara suku. Pusat kerajaan negara timbul di dekat muara sungai. Adapun kerajaan-kerajaan yang pernah disebut dalam tambo dan sejarah di antaranya yaitu : Kerajaan Manjuto di Muko-Muko, Kerajaan Empat Petulai di daerah Rejang Lebong<sup>29</sup>, Kerajaan Pinang Berlapis di Ketahun, Kerajaan Serdang di daerah Lais, Kerajaan Sungai Lemau di daerah Pondok Kelapa (sekarang merupakan daerah kecamatan), Kerajaan Sungai Serut di Bengkulu, Kerajaan Selebar di daerah Selebar, Kerajaan Serawai di Manna dan Bintuhan daerah Bengkulu Selatan.<sup>30</sup>

## **b. Perkembangan**

Daerah-daerah ini terletak di pinggir-pinggir sungai. Sebagian besar dari penduduk kerajaan tersebut hidup sebagai petani, nelayan dan pedagang. Dari hasil pertanian dan perdagangan inilah menaikkan penghasilan (*income*) kerajaan-kerajaan tersebut. Daerah pinggir dan muara sungai menjadi pelabuhan tempat menambat perahu-perahu, rakit-rakit yang datang dari laut dan hulu sungai. Selanjutnya barang-barang dagangan dibawa pula melalui darat dengan gerobak, bubut dan jalan kaki. Barang-barang dagangan yang dijual belikan di antaranya yaitu : kelapa, beras, kopi, cengkih, lada, kemiri, rotan dan hasil bumi lainnya. Sedangkan negeri luar yang diperdagangkan adalah barang keramik/pecah belah, minyak harum, kain cita, perkakas logam dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

---

masing, sehingga seolah-olah mereka mempunyai kemerdekaan sendiri. Maka masing-masing suku dapat dikatakan sebagai negara tersendiri atau negara suku.

<sup>28</sup> Achmaddin Dalip,dkk., *Bengkulu Ditinjau dari segi Geografi Budaya, sejarah dan Antropologi*,(Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, 1972), hal. 47.

<sup>29</sup> Hoesein, Moh. H., *Tambo Rejang Empat Petulai*, Disusun kembali oleh H. Harun ar Rasyid SH, 1932, hal. 6.

<sup>30</sup> Ismaun Muh, *Naskah Pusaka Tanah Serawai*, 1970), hal. 19.

<sup>31</sup> Hoesein Muh. H., *Op.cit.*, hal. 49.

Pada umumnya kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Bengkulu berada di bawah kekuasaan atau takluk pada kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Aceh, Melayu, Pagar Ruyung, Banten dan Kerajaan Palembang. Pengaruh kekuasaan ini lebih bersifat diplomatis dan upeti. Kebebasan bergerak masing-masing kerajaan tetap di tangan kerajaan-kerajaan kecil yang berkembang di daerah Bengkulu. Hanya pengaruh Kerajaan Melayu dan Pagar Ruyung yang nampak lebih menonjol.<sup>32</sup>

Mengingat potensi masing-masing kerajaan itu semakin mundur dan tidak ada lagi raja yang kuat untuk mengganti dan berwibawa, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar daerah yang menghambat lajunya perkembangan kerajaan tersebut, maka sebagian kerajaan itu mulai memencilkan diri dan akhinya hilang sama sekali dan tinggallah kenangan riwayat saja. Kecuali tinggal kerajaan-kerajaan seperti Selebar, Bengkulu, Empat Petulai dan Serawai. Keempat kerajaan ini masih eksis dan berperan hingga datangnya bangsa Barat di daerah Bengkulu.

## **2. Bengkulu pada Masa Kolonial**

### **a. Masa Kolonial Inggris**

Bengkulu dalam kesejarahan Indonesia dikenal sebagai satu-satunya daerah yang mengalami penjajahan Inggris paling lama, karena telah mengukuhkan kekuasaannya di Bengkulu sejak tahun 1685.<sup>33</sup> Pada tahun 1717, pos dagang East India Company (E.I.C) yang sebelumnya berada di Inderapura dipindahkan ke Muko-Muko. Pos ini diperkuat dengan sebuah benteng yang dibangun dari tembok yang kokoh dan diberi nama *Fort* (benteng) Ana yang didirikan pada tahun 1798. Beberapa sumber sejarah juga dapat diketahui bahwa orang-orang Inggris berbenteng di Pasar Muko-Muko pada tahun 1810. Selain Benteng Ana, juga pernah dibangun Benteng Victory. Kedua benteng ini terletak di sebelah kanan dan kiri Sungai Selagan yang bermuara ke Samudera Hindia. Keberadaan kedua benteng di Muko-Muko ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Muko-Muko telah dikuasai Inggris sejak tahun 1685.

Setelah Inggris menetap dan duduk di Bengkulu, kemudian Raja Muda bermufakat dengan Kompeni Inggris, untuk mengangkat Raja Sungai Hitam, depati Khalipah menjadi Pangeran, karena Baginda Pangeran Raja Muda ingat akan amanat perjanjian tuanku Baginda

---

<sup>32</sup> Ahmaddin Dalip, dkk., *Op.cit.*, hal.51.

<sup>33</sup> Khatirithamby-Wells, J. *A Survey of The Effects of British Influence on Indigenous Authority in Shouthwest Sumatra (1685-1824)*, BKI, 129, 1973), hal. 77-81

Sebayam kepada Suanda dahulu, dan beliau takut akan termakan sumpah. Setelah itu diangkatlah Depati Khalipah menjadi Pangeran dengan gelar Pangeran Raja Khalipah, karena beliau adalah Khalipah dari raja Sungai Lemau.

Pemerintahan Inggris di Bengkulu banyak mengalami kesulitan, di antaranya karena Inggris tidak memahami adat-istiadat rakyat, dan hendak menerapkan sistem kekuasaan yang berbeda dari konsepsi pemerintahan kerajaan di Bengkulu. Mereka ingin memperlatah pemimpin-pemimpin rakyat atau Kepala Adat menjadi raja feodal yang berfungsi sebagai perantara saja dari Pemerintah Kolonial dengan rakyat, atau sebagai penangkis petir belaka.

Pada tahun 1701, bangsa Inggris yang berada diperbentengannya yang pertama, Fort York (Pasar Bengkulu)<sup>34</sup> menyadari bahwa letak benteng itu tidak strategis untuk pertahanan serta tidak sehat keadaan sekelilingnya. Mengingat hal itu, kemudian mereka memilih Tapak Paderi<sup>35</sup> (dahulu penduduk Bengkulu menamakan : Ujung Karang) sebagai lokasi untuk mendirikan gudang bagi kompeni. Pada tahun 1714, di dekat pergudangan ujung Karang itu pula, mereka membangun kompleks perbentengan yang kokoh dan amat termashur, yang kemudian diberi nama Fort Marlborough. (rakyat Bengkulu menyebutnya Benteng Malabero).<sup>36</sup>

Pada tahun 1714, Inggris mulai membangun fondamen perbentengan Fort Marlborough, kemudian dibangun bagian-bagian pentingnya dari perbentengan tersebut.

Kekejaman dan keserakahan Inggris<sup>37</sup>, membuat rakyat Bengkulu memberontak pada tahun 1719. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Pangeran Mangku Raja dari Kerajaan Sungai Lemau. Pemberontakan ini juga ada kaitannya dengan perjanjian tahun 1695 dengan Pangeran Selebar yang isinya menyebutkan bahwa tunjangan yang diberikan kepada putera mahkota jika menggantikannya akan

---

<sup>34</sup> Rees, W.A. van, *DE ANNEXATIF der Rejang, Eene vrodelievende militaire expeditie*. (Róterdam, H. Nijgh. 1860, hal. 20.

<sup>35</sup> Mungkin yang dimaksud dengan Tapak Paderi di sini adalah bekas tempat perjuangan rakyat dalam pertempuran melawan kehadiran orang-orang Inggris.

<sup>36</sup> Achmaddin Dalip dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme di Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984), hal. 21.

<sup>37</sup> Bentuk kekejaman dan keserakahan Inggris dapat dilihat pada tindakannya yang ingin memonopoli perdagangan hasil bumi Bengkulu. Inggris dengan seenaknya mematok harga sesuai dengan keinginannya sehingga para pedagang setempat (Bengkulu) sangat dirugikan. Di samping itu Inggris juga melakukan pungutan pajak atas hasil bumi rakyat.

diberikan jika ia menunjukkan sikap setia kepada kompeni Inggris. Ketika sedang paceklik merica di Kerajaan Selebar, Inggris menganggap sebagai pengingkaran perjanjian.

Pangeran Selebar kemudian disingkirkan dan digantikan oleh Pangeran Intan Ali yang dinilai lebih setia kepada Inggris. Pada tahun 1710, Inggris mengundang Pangeran Jenggalu untuk berkunjung ke Fort York, setelah tiba ia ditangkap dan dibunuh. Saudara beliau yang menyertai sang Pangeran ditangkap dan dipenjara di benteng tersebut. Keluarga bangsawan Bengkulu yang lain dipaksa Inggris meninggalkan kampung halamannya dan mencari perlindungan ke pedalaman Bengkulu.<sup>38</sup> Tindakan Inggris ini menimbulkan kebencian rakyat.

Fort Marlborough didirikan ketika Bengkulu diperintah oleh Wakil Gubernur Inggris Joseph Collet (1712-1716). Collet merupakan tokoh kolonial yang merasakan bahwa kekuatan senjata dan kekuasaan adalah di atas segala harkat dan martabat manusia beradab. Dengan mengundang pedagang Cina masuk ke Bengkulu, sambil memberikan kepada mereka kemudahan, Inggris menghina raja-raja Bengkulu yang dianggapnya sebagai mandor yang tidak punya jurai, silsilah dan tradisi.

Raja Bengkulu marah menerima hinaan atas leluhur yang bersumber pada Puteri Gading Cempaka, Baginda Maharaja Sakti, anak Dalam Muaro Bengkulu dan Ratu Agung. Sejabur-kaburnya kenangan mereka akan keagungan Majapahit, Pagar Ruyung, bara api itu kini mendapat minyak untuk mengobarkan api perlawanan. Tujuannya pasti, ikrar teguh : Inggris harus enyah dari bumi nenek moyang orang Bengkulu, baik ia suku Lembak, Rejang, Pasemah, Serawai, Muko-Muko atau Pasar-Pasar Bengkulu mereka merasakan satu kemanunggalan cita dan rasa, diberi hati jangan pula diminta jantung.

Pucuk pimpinan *East India Company* (EIC) di Madras, sadar situasi yang amat tegang dengan raja Bengkulu. Pada tahun 1718 ia mengutus duta ke Bengkulu untuk meredakan hubungan yang memburuk itu, tetapi nasi telah menjadi bubur. Thomas Cook yang berusaha menengahi kemelut itu gagal total.

Pada bulan Maret 1719 berkobarlah perang besar antara Inggris dengan rakyat Bengkulu yang dipimpin para kepala suku (raja-raja kecil) yang ada di seluruh Bengkulu. Salah satu yang menonjol adalah dari suku Lembak yang dipimpin oleh putera dari Pangeran Jenggalu yang mati disiksa Inggris tahun 1710. Pimpinan tangguh lainnya berasal dari Kerajaan Sungai Lemau yang bernama Mangku Raja. Pertahanan

---

<sup>38</sup> Smulders, *Ceschiedenis en verklaring van het tractaat van 1824*, hal. 28. De Stuers, *De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Weskust van Sumatra*, hal. 37.

Inggris yang kuat yang dilindungi tembok tebal dengan meriam dan dipertahankan oleh serdadu terlatih itu, jebol diterjang amukan rakyat yang kemudian membakar kantor-kantor dagang. Sisa-sisa orang Inggris yang selamat melarikan diri ke kapal-kapal mereka dan berlayar menuju Madras (India).

Dua tahun bumi Bengkulu menikmati kemerdekaan kembali. Inggris menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada raja-raja Bengkulu. Mereka berjanji untuk menghormati adat-istiadat, pranata sosial dan lembaga peradilan yang ada di Bengkulu. Dua tahun kemudian, Inggris diperbolehkan kembali bermukim di perbentengan mereka, Fort Marlborough pada tahun 1720.

Tetapi kompeni Inggris yang berazaskan moral dagang, merebut tanah jajahan, ibarat “jerat yang tidak lupa kepada pelanduk, meskipun pelanduk sudah lupa sama jerat”. Pimpinan pribumi Bengkulu masih berprasangka baik, tetapi Inggris memainkan taktik telunjuk lurus kelingking berkait. Mereka diam-diam membangun pertahanan yang kuat dengan tentara yang terlatih dan disiplin tinggi lengkap dengan senjata yang lebih modern.

Semenjak tahun 1685, setelah Inggris semakin kuat bercokol di Bengkulu, perlawanan sering terjadi. Seringnya terjadi perlawanan ini disebabkan karena kerajaan-kerajaan di Bengkulu sedang dalam bertumbuh dan masing-masing kerajaan mengembangkan hukum adat sendiri yang selaras dengan sifat dan watak daerahnya masing-masing.

Dari pengalaman dan cara mendapatkan kedudukan yang kuat di India dan Afrika, di mana beberapa ribu orang Inggris asli mampu menguasai dan membuat berjuta-juta penduduk pribumi merasakan perkasanya kekuasaan penjajah. Inggris menerapkan resep psikologis yang manjur, yaitu politik adu domba di antara pribumi dengan pribumi, dan menggunakan sistem sogok atau hadiah, meskipun itu didapat dari kantong bangsa pribumi. Dengan cara seperti ini, Inggris dapat menaklukkan beberapa kerajaan kecil di Bengkulu, di antaranya pada tahun 1685 dapat menguasai kota Manjuto dan tahun 1695 Muko-Muko dan Inderapura berhasil dibeset jadi bancaan.

Tidak berhenti sampai di situ, Inggris bergerak terus. Tahun 1692 hingga tahun 1700 secara berturut-turut mendirikan pos di Triamang, Lais, Ketahun, Seblat, Ipuh dan Bantal yang semuanya berada di Bengkulu Utara. Selanjutnya di kawasan Bengkulu Selatan 1701 Inggris berhasil menganeksasi daerah Seluma, Manna, Kaur (Bintuhan) dan Kroei.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Achmaddin Dalib, dkk., *Op.Cit.*, hal. 24.



Dengan motif dan alasan yang menghalalkan segala cara, Inggris pun mencari tempat yang strategis di seluruh tanah Bengkulu. Orang kuat yang dijadikan “robot” untuk memberi pengabdian tunggal kepada “Yang Mulia” Kompeni Inggris (*The Right Honourable English East India Company*) adalah Sultan Selan Gelar Daeng Mabella, anak lelaki hasil perkawinan dari laki-laki asal Tuwajjo (Wajo) di Sulawesi bernama Lampu Lana gelar Daeng Maruppa dengan saudara perempuan dari Sultan Inderapura.

Pada masa inilah, Inggris di Bengkulu memanfaatkan Daeng Mabella sebagai kaki tangan untuk melawan rakyat Bengkulu yang memberontak kepada Inggris. Setelah Daeng Mabella<sup>40</sup> bersama pasukan Inderapura dibantu oleh tentara bayaran<sup>41</sup> milik Inggris, berhasil menumpas perlawanan Kerajaan di Bengkulu, Daeng Mabella kembali ke Inderapura.

Mengingat orang Bengkulu tidak mudah ditaklukkan oleh Inggris untuk dijadikan serdadu Kompeni Inggris (EIC), sebagaimana Bloome berulang kali melaporkan ke Madras, maka diperintahkanlah Daeng Mabella berlayar ke Sulawesi, membujuk raja Bugis agar bersimpati kepada Kompeni Inggris dan kemudian mengajak orang-orang Sulawesi untuk dijadikan anak buah Daeng Mabella.

Pasukan ini setelah tiba di Bengkulu dilantik dengan nama *The Bugis Corps (Vreemdenlegioen)*. Daeng Mabella diangkat sebagai Kapten pasukan. Selain pasukan Bugis, pasukan Benggala juga digunakan secara efektif oleh Inggris. Hal ini dapat dilihat pada peperangan yang dipimpin oleh Kolonel Clayton tahun 1808. Pasukan Inggris ini terdiri dari 300 orang Benggala (India) dalam menumpas perlawanan penduduk Ulu Mannak.

Untuk mencegah terjadinya penyerangan-penyerangan aparat Kompeni Inggris, pada tahun 1815, Residen Inggris di Manna, bernama Steele menuju Pasemah Ulu Mannak untuk melakukan perundingan dengan para kepala adat. Isi dari perundingan ini nampaknya memberikan perlindungan kepada rakyat, sehingga mereka dapat menerima kehadiran Inggris. Bahkan banyak Kepala adat yang bersedia mengantarkan Residen Steele kembali ke posnya di Mannak. Untuk menyatakan rasa puasny, Residen Steele melakukan kenduri dengan

---

<sup>40</sup> Raffles, Thomas Stamford, “*The History of Java*”, Vol. I and II, (London : 1836), hal. 64.

<sup>41</sup> Tentara bayaran merupakan tentara yang direkrut oleh Inggris. Biasanya Inggris merekrut tentara bayaran berasal dari wilayah Benggala, negeri bagian India yang merupakan tanah jajahan Inggris. Tentara bayaran yang berasal dari Benggala ini dikenal dengan nama tentara Sepai. Untuk lebih jelasnya lihat Ahmadi Dalia, dkk., *Op. Cit.*, hal. 26.

memotong hewan untuk menjamu para Kepala Adat dan memberi mereka hadiah beberapa potong kain.

Apapun belaian sejuk yang diberikan kepada luka yang diderita rakyat, tidak dapat menentramkan keadaan selanjutnya. Mengingat monopoli Inggris dan kecurangan pegawainya, ditambah adanya paksaan untuk menanam tanaman yang hasilnya untuk Inggris, serta perlakuan yang kurang menghargai rakyat akhirnya dapat menjebol bendungan semu yang mengempang arus kewajaran. Kemelut dan serang-menyerang berlanjut kembali. Dalam penumpasan pemberontakan petani selalu melibatkan pasukan Bugis (*Bugis Corps*) yang tidak hanya terdiri dari orang-orang sulawesi, tetapi juga orang-orang Madura.

Persenjataan Inggris dalam menumpas pemberontakan rakyat Bengkulu dan sekitarnya yang telah disiapkan sejak berdirinya Fort Marlborough terdiri dari senapan, meriam, mortir dan howitzer.<sup>42</sup>

Penumpasan perlawanan dari Fort Marlborough ke Ipuh, Serampai dan lain-lain adalah sebagai berikut : Pasukan Inggris pada tanggal 22 Nopember 1804 diperintahkan bergerak dari benteng Fort Marlborough menuju Ipuh. Sultan Asin dibantu Sultan Muko-Muko, Pamuncak dan Sultan Sidi yang berdiam di daerah pedalaman di Pekalang dan Jambi melakukan perlawanan terhadap Inggris. Mereka juga dibantu oleh penduduk Ipuh sehingga pertahanan Inggris di Ipuh dapat dengan mudah dihancurkan dan dibakar. Kaki tangan Inggris juga dibinasakan.

Kekalahan ini menyebabkan Inggris mengirim Letnan Hastings Dare bersama pasukan yang lebih besar lagi. Pasukan Inggris tiba di Ipuh pada tanggal 3 Desember 1804. Para pemberontak dari Muko-Muko telah mencium pergerakan pasukan besar Inggris, sehingga mereka telah menghilang dari Ipuh. Pada tanggal 4 Desember 1804, Residen Inggris di Muko-Muko – Ipuh bernama Howthorne, mendapat informasi dari mata-matanya bahwa barisan perlawanan bertahan di Tabek si Kadi kemudian mencari tempat yang strategis di pegunungan dalam wilayah Sungai Tenang, tepatnya di Koto Tengah, sebuah dusun yang merupakan tempat pelarian para pejuang perlawanan yang datang dari daerah pesisir.

Pada tanggal 18 Desember 1804, pasukan Inggris bergerak ke arah timur laut menyeberangi beberapa sungai. Yang menderita dan jadi korban menggotong barang-barang mereka yang berat adalah ratusan orang kuli. Perjalanan mereka sampai ke tepi sungai Ipuh. Tanggal 19

---

<sup>42</sup> Marsden., F.R.S., William, *The History of Sumatra, the third edition*, (London : 1811), hal. 308.

Desember 1804 rombongan Kompeni pimpinan Letnan Hastings Dare yang terdiri dari orang sipai, Benggali, Bugis dan para pekerja paksa itu bergerak ke utara. Di sepanjang jalan rakyat memasang ranjau lebih ketat sehingga lebih banyak serdadu Inggris yang terluka. Mereka agak sulit bergerak karena beratnya mortir dan peluru dan barang-barang lainnya. Mereka menyusur sepanjang tepian sungai Ipuh yang amat deras airnya menuju ke arah utara. Pada pertemuan sungai Ipuh dan sungai Simpang tentara Inggris bermalam di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon puar yang buahnya dapat dimakan. Rasanya asam-asam manis.

Perbekalan yang menipis mulai disatukan antara serdadu Benggala, Sipai, dan Bugis. Tanggal 28 Desember 1804, mereka mendaki Bukit Padang ke arah timur laut sampai ke air terjun kecil bernama Pondok Kubang. Pada tanggal 29 Desember 1804 pasukan bayaran Inggris menuruni bukit. Perjalanan jauh melintasi jurang dan bukit hutan yang lebat dan ranjau yang siap menancap telah menyebabkan banyak kuli dan beberapa orang pasukan Inggris tewas.

Pada tanggal 30 desember 1804, mereka menangkap seorang lelaki dan seorang perempuan yang terpaksa menunjukkan bahwa para barisan perlawanan yang sedang dicari Inggris, tiga belas hari yang lampau bergerak ke Koto Tanggoh, dua hari perjalanan ke sana. Letnan Inggris mengirimkan pasukan Bugis dan kuli-kuli serta beberapa serdadu India ke Ranna Ali mencari perbekalan dan berhasil mendapatkannya.

Penduduk dipaksa untuk membuka mulut dengan ancaman, sehingga mengatakan bahwa barisan perlawanan rakyat telah membuat lubang perangkap, dan menanamkan tombak di dalamnya, panah melenting sedangkan jalan penuh ditaburi ranjau-ranjau, dan berhimpun di Koto Tanggoh untuk menyongsong pasukan Inggris.

Pada tanggal 3 Januari 1805, pasukan bayaran Inggris mendapat tembakan beberapa senapan kuno dari arah tebing. Di sinilah mulai terjadi pertempuran sengit. Korban tewas berjatuhan dari kedua belah pihak. Mengingat persenjataan yang tidak seimbang, maka pasukan pemberontak melakukan taktik mundur

Mereka mengejar kaum pemberontak. Sesampai di sebuah danau, mereka mengetahui bahwa barisan perlawanan rakyat berada di seberang tempat itu. Pasukan kompeni Inggris segera melakukan serangan tembakan senapan dan mortir, kemudian berusaha mendekati lawannya. Serangan mortir yang bertubi-tubi memaksa rakyat meninggalkan pertahanan mereka.

Keadaan tidak memungkinkan pasukan bayaran Kompeni Inggris meneruskan penaklukan terhadap dusun lainnya yang lebih jauh. Mereka kemudian kembali ke pos kompeni Muko-Muko untuk mengganti tenaga serdadu dan kuli serta mempersiapkan perbekalan selama peperangan. Pada tanggal 22 Januari 1805 pasukan pimpinan Letnan Hastings Dare tiba di Muko-Muko. Fort Ann, benteng kompeni Inggris terletak pada seberang sebelah selatan sungai Si Lagan. Sedangkan settlement Kompeni terdapat di seberang utaranya, dan Muko-Muko terletak lebih ke atas.

Rakyat Muko-Muko menyiapkan penyerangan besar-besaran terhadap perlawanan rakyat yang bertahan wilayah di Sungai Tenang. Pada tanggal 24 Februari 1805 pasukan Inggris sampai di pertahanan Danau Pauh yang tampaknya sudah diperkuat. Setelah seluruh pasukan kompeni sampai di situ, mulailah Letnan Dare mengadakan penyerangan. Banyaknya ranjau menyebabkan serangan pertama mengalami kegagalan karena banyak serdadu Sipai dan Bugis yang terluka sehingga menimbulkan semangat rekan-rekannya pun jatuh moril.

Pertahanan rakyat tidak mungkin diserang dari depan, dan karena itulah Letnan Hastings Dare memerintahkan perintis bangsa India<sup>43</sup> menyerang dari samping dan dari belakang. Untuk mengelabui perhatian rakyat agar mereka tidak mengetahui gerak-gerik serdadu bayaran yang telah menyebrang rawa-rawa secara sembunyi-sembunyi, pasukan sipai memalu genderang perang secara non stop dan menembakkan peluru secara membabi buta dari muka. Taktik ini berhasil, karena pasukan rakyat yang meberontak tidak menduga adanya lawan mereka yang berada di belakang dan samping. Serangan tak terduga dari belakang dan samping menyebabkan pasukan rakyat banyak yang gugur dan terdesak mengundurkan diri.

Dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1805, pasukan Inggris berhasil mematahkan perlawanan rakyat, sehingga Koto tagoh berhasil direbut Inggris. Depati minta berdamai dengan Inggris. Tanggal 14 Maret 1805, Inggris setelah memaksakan perjanjian sepihak di Muko-Muko. Dengan kemenangan tersebut, tentara Inggris pada tanggal 22 Maret 1805 kembali ke Bengkulu dan sampai di Fort Marlborough pada tanggal 30 Maret 1805.

Letnan Gubernur Inggris Raffles meresmikan peleburan kerajaan Sungai Lemau yang disebutkan dalam perjanjian antara Raffles dan Pangeran Linggang Alam pada 4 Juli 1818. Kerajaan sungai Lemau

---

<sup>43</sup> Istilah khususnya waktu itu di kalangan Inggris adalah subedar, diikuti oleh sejumlah 30 serdadu bangsa Sipai (Sipahi) dan pasukan Bugis.

diserahkan oleh Pangeran Linggang Alam kepada pemerintah jajahan Inggris, yang diwakili oleh Raffles. Pangeran Linggang Alam dijadikan pegawai pemerintah jajahan Inggris dengan pangkat Regent dan bertempat di kota Bengkulu. Sebagai pegawai beliau menerima gaji tiap bulan 706 ringgit. Gaji ini diberikan sebagai ganti rugi bagi beliau yang telah melepaskan hak-haknya atas kerajaan sungai Lemau.

Dalam tahun 1807 terjadi suatu peristiwa bersejarah yang dikenal dengan gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat petani sebagai protes<sup>44</sup> terhadap dominasi Inggris di Bengkulu. Dalam catatan sejarah, gerakan ini dikenal dengan nama peristiwa *Mount Felix* yang terjadi pada tanggal 23 Desember 1807. Peristiwa *Mount Felix* merupakan rangkaian perkembangan politik yang menciptakan ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewer (1800 – 1805), yang terus berlanjut hingga masa Pemerintahan Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama dua tahun, yaitu dari tahun 1805-1807, yang berakhir dengan kematiannya secara tragis.<sup>45</sup>

Selama masa pemerintahan Thomas Parr, ketegangan semakin meluas ke wilayah kekuasaan Sungai Itam. Menurut J. Kathirithamby-Wells, disebutkan bahwa di wilayah Sungai Lemau, Pangeran Linggang Alam mampu memobilisasi rakyatnya yang terdiri dari suku Rejang dalam melaksanakan sistem perkebunan bebas. Sementara di wilayah Sungai Itam, rakyatnya yang berasal dari suku Lembak terkenal keras dan sulit dikendalikan, sehingga pelaksanaan sistem perkebunan bebas mengalami kegagalan. Di samping itu, kegagalan Pangeran Kalipa Raja dalam memobilisasi rakyatnya lebih disebabkan hubungan *patron-klien* yang sangat lemah, artinya antara rakyat dan pimpinan kurang serasi, kurang bisa diajak bekerja sama.

Pangeran Kalipa Raja dari Sungai Itam merasa iri terhadap Pangeran Linggang Alam dari Sungai Lemau yang secara menyolok telah menikmati keuntungan dalam bentuk material.<sup>46</sup> Akhirnya Pangeran Sungai Itam meminta bantuan Inggris, Thomas Parr untuk mengenakan denda terhadap rakyatnya yang membangkang. Permintaan

---

<sup>44</sup> Michaiel Adas, *Ratu Adil Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, Terj. M. Tohir Effendi, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hal. 93; James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Terj. Hasan Basri, (Jakarta : LP3ES, 1989), hal. 69.

<sup>45</sup> Thomas Parr secara resmi menggantikan Walter Ewer pada tanggal 27 September 1805. Untuk lebih jelasnya lihat John Bastin, *The Britishin West Sumatra (1685-1825)*, (Kuala Lumpur University Press, 1965), hal. 128.

<sup>46</sup> J. Kathirithamby-Wells, *A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Soutwest Sumatra (1685-1824)*. BKL, dee, 129, 'Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973), hal. 225.

bantuan tersebut ditanggapi Thomas Parr dengan menerapkan kebijakan sistem tanam kopi. Meskipun Pangeran Sungai Itam sudah mencoba melunakkan anak buahnya (rakyatnya) dengan menggantikan sistem tanam kopi, tetapi tetap tidak berhasil, bahkan membawa akibat yang sangat fatal.

Sementara itu, konflik antar orang besar Bengkulu di wilayah Sungai Itam juga semakin tajam akibat intervensi dari Pemerintah Thomas Parr. Kekuasaan Pangeran Kalipa Raja yang lemah ini dimanfaatkan oleh para *depati* (kepala dusun/kampung). Di antara para depati yang menolak secara terang-terangan antara lain yaitu : Depati Dusun Besar, Depati sukarami, Depati Lagan dan Depati Pagar Dewa.<sup>47</sup>

Depati Dusun Besar pernah mengadili penduduk dari Marga Dua Belas dan Marga Salapan, dengan menyelesaikan *bayar bangun* tanpa melalui proses adat yang berlaku di wilayah kekuasaan Pangeran Sungai Itam. Akibatnya, Depati Dusun Besar diajukan ke pengadilan *dewan pangeran*. Kemudian ditahan dalam penjara di kota Bengkulu, dengan alasan telah melanggar hukum undang-undang pengadilan pangeran.<sup>48</sup>

Ketegangan sosial di wilayah kekuasaan Pangeran Sungai Itam terus meningkat akibat berbagai tekanan keras yang dilakukan Thomas Parr. Di samping itu telah terjadi keretakan hubungan antara Pemerintah Thomas Parr dengan Kapten Bugis, Daeng Mabella yang merupakan sekutu Inggris yang terpercaya. Thomas Parr telah memecat Daeng Mabella dengan tuduhan melakukan korupsi dana keuangan yang seharusnya dikirim untuk wilayah keresidenan luar. Daeng Mabella tidak hanya dipecat, tetapi juga didepak dari keanggotaannya di *dewan pangeran*, sebuah dewan paling bergengsi di antara dewan-dewan pengadilan pribumi yang lain.<sup>49</sup>

Pemecatan Daeng Mabella dari jabatan Kapten Kepala dan keanggotaan *dewan pangeran* membawa implikasi hilangnya jabatan Daeng Mabella sebagai *Penghulu Oprang Asing* dan *Peranakan*. Menurut salah satu sumber, disebutkan bahwa alasan Thomas Parr menghapus kedudukan Daeng Mabella sebagai *Penghulu* (Kepala) *Orang Asing* dan *Peranakan* itu karena bukan merupakan suatu jabatan pemerintahan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 256-257.

<sup>48</sup> Agus Setianto, *Orang-Orang Besar Bengkulu*, (Yogyakarta : Ombak, 2006), hal. 125.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Memorie Betrekkelijk de Bezitting Benkoeloe Omt Dienen tot Leiding van de Ambtenaar, Welke Nu of en de Vervolgde met het Gezag Aldaar zal Worden Belast*, (Arsip Nasional B:6/5).

Tindakan keras yang dilakukan oleh Thomas Parr terhadap Daeng Mabella sangat merugikan, baik dari segi material maupun spiritual, karena jabatan tersebut telah diperolehnya secara turun-temurun. Keputusan tersebut sangat memukul Daeng Mabella karena harga dirinya telah merosot. Intervensi Thomas Parr terhadap kehidupan tradisional para kepala adat, terutama dalam peradilan pribumi, sering dilakukan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat.<sup>51</sup> Hal ini menyebabkan semakin kompleks ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr.

Akibat adanya ketegangan sosial tersebut, tanggal 22 Desember 1807, Kantor Kompeni Inggris yang terletak di Bintunan dirusak dan dibakar oleh penduduk setempat yang juga berasal dari suku Lembak.<sup>52</sup> Rasa tidak puas tersebut juga disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap sistem tanam kopi yang dipaksakan.

Sebagai puncak ketidakpuasan tersebut, maka pada malam tanggal 23 Desember 1807 Thomas Parr dibunuh dikediamannya di *Mount Fellix*, yang lokasinya sekitar 3 mil sepanjang garis pantai dari Fort Marlborough. Siapa pembunuh Thomass Parr tidak diketahui. Kemungkinan salah satu atau beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Memang sangat menggemparkan, namun apa dikata, nasi telah jadi bubur. Meski ada pembunuhan, Inggris tidak dapat membuktikan siapa pembunuhnya, hingga Inggris berkuasa di Bengkulu sampai saatnya digantikan oleh Belanda.

Kedudukan Residen Inggris di Lais, yang dimulai dengan Richard Wyatt pada awal abad XVIII, oleh Raffles dihapuskan. Residen Inggris yang terakhir bernama H.W. Hayes (1815-1820). Sebagai pengganti Hayes diangkat oleh Raffles seorang anak bumi putera bernama Raden Mohammad Zain (1820 – 1833) tetapi tidak dengan sebutan residen, melainkan dengan sebutan Kepala divisi Lais. Kekuasaan Inggris di Bengkulu mulai berakhir setelah Thomas Raffles menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dengan imbalan Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggris.

Pada waktu penyerahan pemerintahan jajahan Inggris atas daerah Bengkulu kepada pemerintah jajahan Belanda tanggal 6 April 1825, berdasarkan Traktat London<sup>53</sup> tertanggal 17 Maret 1824, Kabupaten Sungai Lemau yang berada di bawah Regent Pangeran Linggang Alam dengan wilayahnya Lais, Kertopati, Air Besi, air Padang, Padang

---

<sup>51</sup> Firdaus Burhan, *Bengkulu Dalam Sejarah*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia, 1980), hal. 117.

<sup>52</sup> J. Kathirithamby-Wells, *A Survey ...*, *op.cit.*, hal. 257.

<sup>53</sup> Ahc madin Dalip, dkk., *Op.cit.*, hal. 87.

Betuah, Sungai Lemau Ulu Bengkulu, terdiri dari 143 dusun dan berpenduduk 12.817 jiwa. Juga Kabupaten sungai Hitam tetap bertahan dengan wilayahnya Lembak VIII, Proatin XII, Tepi air dan di darat, yang terdiri dari 42 dusun dan berpenduduk 4.122 jiwa.<sup>54</sup> Demikian juga kabupaten silebar yang terdiri dari 50 dusun dan berpenduduk 6.962 jiwa.

## **b. Masa Kolonial Belanda**

Setelah Belanda datang dan menjajah Bengkulu, rakyat mulai tersinggung, karena Belanda dengan cepat melakukan perubahan mendasar menurut kehendaknya sendiri tanpa melihat apakah perubahan tersebut sesuai atau tidak dengan adat dan tradisi rakyat Bengkulu. Seluruh peraturan yang dikeluarkan beserta hal-hal yang menekan perasaan rakyat mengakibatkan luka lama yang ada menjadi kambuh kembali.

Kesewenang-wenangan Belanda menumbuhkan rasa kebencian di kalangan masyarakat. Akhimya rasa marah yang tidak dapat dibendung lagi menyebabkan terjadilah pembunuhan terhadap Residen Knoerle<sup>55</sup> pada tahun 1833. Kejadian ini disusul pula dengan penyerangan terhadap serdadu Belanda yang sedang mengantarkan makanan dan minuman ke pos Belanda di dusun Keban<sup>56</sup> pada bulan Mei 1833.

Jika pada zaman penjajahan Inggris, kekuasaan para raja dikurangi dengan memberikan kedudukan kepada mereka dalam lingkungan pemerintahan Inggris, maka pada zaman penjajahan Belanda agak berbeda. Semua kedudukan itu secara berangsur-angsur dihapuskan. Hal semacam ini telah terjadi sejak tahun 1861, yaitu ketika Pangeran Muhammad Syah II dari Sungai Lemau diberhentikan dengan satu keputusan Pemerintah Jajahan Belanda.

Pada tahun 1862 Pangeran Bangsa Negara dari Sungai Itam dan tahun 1864 Pangeran Nata Diraja dari Selebar juga mendapat perlakuan yang sama, harus berhenti dari kekuasaannya. Kemudian pada tahun 1870 Sultan Takdir Khalifatullah Syah dari Muko-Muko juga diberhentikan.<sup>57</sup>

Peristiwa pemberhentian semacam itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi rakyat. Hal ini dapat dimengerti mengingat

---

<sup>54</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), hal. 84-85.

<sup>55</sup> *Memorie van Overgave Westenenk*.

<sup>56</sup> *Hukum Adat Rejang*, hal. 89.

<sup>57</sup> *Hukum Adat Rejang*, hal. 85-86.



rakyat pada waktu itu sangat hormat kepada para pemimpinnya. Mereka menganggap pemimpin mereka bukan saja sebagai Kepala Pemerintahan dan Ketua Adat, tetapi juga kepada siapa mereka mengikut dan berlindung, sehingga apa pun yang terjadi terhadap pimpinan mereka, mereka ikut merasakan.

Ketegangan yang sudah memuncak menimbulkan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan rakyat dipimpin oleh Bumiat dimulai di kota Bengkulu dan sekitarnya. Kota Bengkulu adalah pusat pemerintahan jajahan Belanda di daerah Bengkulu. Dalam peristiwa ini, Asisten Residen Humme mati dibunuh. Kemudian disusul pula dengan pembunuhan terhadap Asisten Residen H.C. Van Amstel dan Controlier Lais Castens pada tanggal 2 September 1873. Peristiwa ini terjadi ketika ia sedang menyeberangi Sungai Bintunan yang mengalir ke laut di sebelah utara kota Lais, menuju Muko-Muko.<sup>58</sup>

Dalam laporan singkat tertanggal 29 September 1873 mengenai keadaan di daerah Asisten Residen Bengkulu selama bulan September 1873, Asisten Residen Laging Tobias mengatakan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai berikut : “Pada tanggal 2 September 1873, Asisten Residen Bengkulu H. Van Amstel dan Kontrolier kelas dua pada Pemerintahan Dalam Negeri di daerah ini, C.C.W. Casten, telah dibunuh secara keji di Bintunan, *Afdeling* Lais oleh 30 orang Pasirah dan Proatin. Mengenai pembunuhan keji tersebut, berupa huru-hara yang meletus di beberapa *Afdeling* Bengkulu, telah dibuat laporan khusus kepada Pemerintah dan pelapor mempersilahkan untuk menelaah isinya dari surat tersebut.”<sup>59</sup>

Meskipun berita mengenai peristiwa pembunuhan itu dan langkah-langkah tindakan yang dikerjakan sebagai akibatnya, dengan bantuan dari kekuatan ketentaraan yang dikirim dari Batavia dan Padang, juga gejolak yang ditimbulkan dalam masyarakat di wilayah *Afdeling* Seluma yang berbatasan dengan ibu kota Bengkulu, namun keadaan keamanan dan ketertiban dalam *afdeling* tersebut tidak terganggu. Demikian juga dalam wilayah *Afdeling* Manna, Pasemah, Ulu Manna, Kaur dan Kroi.<sup>60</sup> Peristiwa tersebut telah menimbulkan pertempuran yang berkobar pada tanggal 9 September 1873 di berbagai tempat di Bengkulu, di antaranya yaitu perang di Lais, Seluma, Seblat, Bintunan, Tanjung Terdana, Ketahun dan di sekitar kota Bengkulu.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 86. Lihat juga *Memorie van overgave Westenenk*.

<sup>59</sup> Ranni, M.Z., *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, cet. 1. (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 34-35.

<sup>60</sup> *Asistensi Bengkoelen, Algemeen Administratief Verslag 1873*, Terjemahan oleh F. Burhan, 9 Februari 1989.

Dalam menghadapi kenyataan ini, Belanda berusaha untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun demikian, perlawanan rakyat tersebut tidak mudah dipadamkan. Pada awalnya agak berat juga Belanda menghadapinya, apalagi pada saat itu pecah pula Perang Aceh (1873-1903). Akhirnya perang antara rakyat Bengkulu dengan penjajah Belanda dapat diselesaikan pada tahun 1878.<sup>61</sup>

Belanda melanjutkan penjajahan di Bengkulu dengan membentuk suatu daerah administratif Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen, yang membawahi secara berturut-turut sampai pemerintahan yang terendah. Adapun hirarkhinya sebagai berikut. Daerah dibagi-bagi dalam *Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Kemudian *Afdeeling* dibagi lagi menjadi *Onder Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang *Controlier*. *Onder Afdeeling* dibagi menjadi Distrik yang dikepalai oleh seorang Demang. Distrik dibagi lagi menjadi *Onder Distrik* yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang. *Onder Distrik* dibagi lagi menjadi Marga yang dikepalai oleh seorang Pangeran/Pasirah. Terakhir Marga dibagi menjadi Dusun yang dikepalai oleh seorang Ginde/Depati.<sup>62</sup>

Khusus mengenai Pemerintahan Marga diatur dengan satu peraturan yang disebut IGOB (*Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura. Sedangkan di Jawa dinamai IGO (*Inlandse Gemeente Ordonantie*). Dalam struktur pemerintahan seperti ini, kedudukan untuk bangsa pribumi, khususnya di Bengkulu kedudukannya hanya sampai pada Kepala Distrik, yaitu sebagai seorang Demang. Lebih tinggi dari seorang Demang, hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda sdaendiri. Tugas dan kewajiban dari para pejabat dari kalangan pribumi dititik beratkan pada keamanan dan ketentraman bagi pemerintah Belanda. Agar ada kelancaran, kepada mereka ini diberi keistimewaan seolah-olah mereka ini dihormati dan dihargai oleh Pemerintah Belanda.

Politik Etis yang dicanangkan Belan adalah membangun sekolah-sekolah untuk pribumi. Adapun sekolah yang dibangun Belanda di antaranya yaitu E.L.S (*Europesche Lagere School*) pendidikan bagi anak-anak pegawai Pamong Praja, H.C.S (*Hollandsch Chinese School*) sekolah untuk keturunan Cina di kota Bengkulu, HIS (*Hollandsch Inlansche School*) sekolah rendah untuk golongan penduduk keturunan Indonesia asli (Bumiputera), Sekolah Kelas Dua, *Volks School* (Sekolah Desa), *Vervolg School*, *Schakel School*. Hal ini berakibat di kalangan rakyat pribumi muncul golongan terpelajar, sehingga pada awal abad

---

<sup>61</sup> *Hukum Adat Rejang*, hal. 87.

<sup>62</sup> Ranni, M.Z., *Op. Cit.*, hal. 36.

XX muncul kaum intelektual muda di berbagai daerah di Indonesia. Di Pulau Jawa muncul perkumpulan-perkumpulan/organisasi-organisasi, maka pergerakan dan organisasi pemuda tersebutpun muncul pula di daerah Bengkulu.

Pada tahun 1915 di Bengkulu berdiri untuk pertama kali Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Muhammad.<sup>63</sup> Kemudian muncul pula Insulinde, Muhammadiyah, Yong Islamieten Bond (JIB), Parendra, Taman Siswa dan lain-lain organisasi pemuda yang semua berhembus dari tanah Jawa menjalar sampai ke luar Jawa, termasuk juga di Bengkulu.

Bersamaan dengan itu, tidak pula ketinggalan organisasi yang bersifat kepanduan antara lain Hisbul wathan, Nationale Padvinderij (Natipij), Al Hilal, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan Surya Wirawan. Di samping itu, organisasi yang sifatnya lokal pun didirikan oleh rakyat Bengkulu dengan nama Persatuan Pendidikan Bengkulu (PPB), yang dipelopori oleh Dr. Mochtar.<sup>64</sup> Selanjutnya rakyat Bengkulu yang dipelopori dan didukung oleh seluruh kepala marga mendirikan Semarak Bengkulu, yang merupakan satu lembaga untuk membantu kemajuan pendidikan di daerah ini. Semua yang telah disebutkan di atas, baik yang bergerak langsung dalam bidang politik, maupun yang bergerak di bidang pendidikan, agama dan kepanduan telah bersama-sama ikut menaburkan dan menanamkan benih-benih rasa kebangsaan, sekaligus persatuan bangsa dan tanah air untuk mencapai Indonesia Merdeka. Mereka yang mengabdikan pada Pemerintah Belanda yang tergabung dalam PID (*Politieke Inlictingen Dienst*) Baik berpakaian resmi atau menyamar berkeliaran di sekitar perkumpulan-perkumpulan/organisasi ini untuk mencari mangsanya.

Penerbitan koran lokal ikut mewarnai keadaan daerah Bengkulu. Meski Bengkulu hanya merupakan kota kecil, tetapi di kota tersebut telah muncul pula dua surat kabar, yaitu Surat kabar Penabur yang dipimpin oleh Semaun Bakry dan surat kabar Sasaran yang dipimpin oleh A. Khahar.<sup>65</sup> Isi surat kabar ini selalu “membakar” semangat rakyat Bengkulu, maka Belanda pun berusaha untuk membendung atau menghalang-halangi penerbitannya, yaitu dengan *persdelict* dari Pemerintah Belanda dengan mempergunakan pasal-pasal (*haatzaaiartikelen*) yang terdapat dalam WVS (KUHP Belanda).

---

<sup>63</sup> *Men van Overgave Westenenk.*

<sup>64</sup> M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 36.

<sup>65</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 37.

Salah seorang wartawan dari salah satu surat kabar yang bernama Ibnu Hajar Rasyid dengan nama samaran Ibhara adalah salah satu penulis di Surat Kabar Penabur dan Surat Kabar Penanahan. Kedua surat kabar itu menjadi langganan penjara Bengkulu karena tulisan-tulisannya yang tidak berkenan di hati Pemerintah Belanda.<sup>66</sup> Pada perang kemerdekaan kedua Ibnu Hajar Rasyid gugur, karena sewaktu ditangkap Belanda ia langsung mengadakan perlawanan.

Kehadiran Bung Karno ke daerah Bengkulu pada tahun 1938 menambah suasana politik di kalangan kaum muda Bengkulu menjadi semakin mantap. Pergerakan-pergerakan politik menjadi semakin berani. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Belanda, sehingga perlu diambil tindakan tegas. Langkah yang diambil Belanda di antaranya yaitu dengan memindahkan dr. Woworuntu ke Padang<sup>67</sup> dan Dr. Sugiri seorang tokoh Parindra Bengkulu dibuang ke daerah lain.

Meskipun tujuan Belanda mengirim Sukarno ke Bengkulu untuk memencilkan beliau agar tidak dapat memimpin pergerakan politik di Jawa, namun di Bengkulu ini justru membuat rakyat Bengkulu menjadi semakin bergairah untuk berpolitik menentang Belanda. Yang membuat gembira dan menghibur rakyat Bengkulu ketika Bung Karno memimpin *debating club*, memimpin perkumpulan sandiwara "Monte Carlo" dan sebagainya, meskipun gerak-gerik beliau selalu diawasi oleh anggota PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*). Beliau juga rapat berteman dengan beberapa pegawai yang bekerja pada pemerintah Belanda, tetapi yang mempunyai pendirian. Salah seorang tokoh Parendra di Bengkulu yang bernama Rivai Darwis, hampir tiap malam rumahnya disediakan untuk para tokoh politik di daerah ini. Ia juga salah seorang aktivis dari Gapi dalam rangka tuntutan Indonesia berparlemen. Kedatangan dr. A.K. Gani ke Bengkulu sebagai salah seorang dari Gapi, disambut di rumah pribadinya. Meskipun dia tahu selalu diintai oleh anggota PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*).

Gapi (Gabungan Politik Indonesia) yang dibentuk tahun 1939 dan dalam konggresnya telah mengambil keputusan yang isinya sebagai berikut : Pertama, segera dibentuk Parlemen untuk Indonesia (Hindia Belanda) dengan pemilihan langsung dalam satu pemilihan umum. Kedua, Segera membentuk satu pemerintahan dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.<sup>68</sup> Kedua tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh Pemerintah Belanda.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Sekitar tahun 1939 suasana di Eropa, sudah semakin panas. Nazi Jerman menyambar ke kiri dan ke kanan diawali dengan menduduki Austria pada tahun 1938, menduduki ceko-slowakia tahun 1939. Pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia, sehingga pada tanggal 3 September 1939 Inggris dan Perancis menyatakan perang kepada Jerman. Pernyataan Inggris dan Perancis tersebut menandai dimulainya Perang Dunia II. Pada tanggal 9 April 1940 Jerman melakukan perang kilat (*blitzkrieg*), sehingga Denmark dan Swedia diduduki. Selanjutnya Jerman pada tanggal 10 Mei 1940 menduduki Belanda, Belgia dan Perancis.<sup>69</sup>

Pada tanggal 7 Desember 1941 armada perang Jepang menyerang basis pertahanan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, sehingga hancur total. Setelah itu, Jepang melancarkan serangan kilat ke kawasan Asia Tenggara untuk merebut tanah jajahan dari tangan AS, Inggris, Perancis dan Belanda. Akibatnya Amerika Serikat marah dan menyatakan perang kepada Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jhr. Alidius W.L. Tjarda van Starkenborch mengumumkan perang terhadap Jepang tanggal 18 Desember 1941.<sup>70</sup>

Dengan keadaan semacam ini, maka seluruh jajaran Pemerintahan Belanda, baik di Negeri Belanda sendiri, maupun di daerah jajahan (Hindia Belanda) sudah terlibat dalam kancah perang. Pengaruh dari semua ini dirasakan benar, terutama dengan ditutupnya sekolah-sekolah yang mempunyai guru-guru berkebangsaan Belanda. Banyak siswa yang belajar di luar daerah Bengkulu antara lain di Bukittinggi, Kayutanam, Padangpanjang, Palembang, Lahat, Jakarta, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Malang kembali ke daerah asalnya di Bengkulu.<sup>71</sup>

Hal ini dilakukan karena mereka khawatir akan terputus atau sulit perhubungan akibat peperangan. Sebagian dari mereka mengambil tempat tinggal di kota Curup, Manna dan Bengkulu. Di tempat mereka masing-masing belajar mereka memasuki bermacam-macam organisasi pemuda, dan ada pula yang menjadi pimpinan atau pengurus dari organisasi tersebut.

Didorong oleh keinginan tetap berada dalam suatu organisasi, agar komunikasi dan diskusi dapat selalu dilakukan antar sesama. Maka secara berangsur-angsur para siswa/pelajar ini bersama-sama mereka yang telah berada di Bengkulu dengan berbagai cara

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

membentuk organisasi-organisasi yang pada awalnya berupa organisasi olah raga, musik dan sebagainya.

Lama-kelamaan mengingat pesertanya terus bertambah, organisasi ini menjadi semakin besar, kemudian mereka bergabung dan terbentuklah misalnya di kota Bengkulu satu organisasi yang bernama Pemuda Angkatan Baru (PAB) yang dipimpin oleh M.Z. Ranni, Maurice Umar, Tabarani Kader, Amin Kaum dan Kemas Anwar Sulaiman.<sup>121</sup> Pada lahirnya organisasi ini hanya bergerak pada bidang kesenian, olah raga, sosial dan ekonomi saja, tetapi secara terselubung organisasi ini telah dapat mengikat hubungan antar sesama pemuda dan pelajar agar dapat saling memberi informasi dan berdiskusi tentang berbagai hal yang dianggap perlu.

Demikian pula di Curup dan di Manna terjadi hal serupa, meskipun satu sama lain organisasi-organisasi tersebut tidak mempunyai hubungan organisatoris. Ketika di Bengkulu terbentuk organisasi yang diberi nama Penolong Korban Peperangan (Pekope) yang dipimpin langsung oleh Bung Karno,<sup>122</sup> para pemuda dan pelajar ini ikut di dalamnya dalam memberikan pertolongan kepada para pelarian dan pengungsi. Dari para pelarian inilah dapat dikumpulkan informasi bahwa tidak ada satu pertahanan Belanda lagi yang masih tersisa dan semuanya telah melarikan diri ke arah selatan daerah Bengkulu menuju Bintuhan, dan dengan kapal mereka lari menyelamatkan diri ke Australia. Di kota Bengkulu tidak kelihatan serdadu-serdadu Belanda, malahan pasukan bersenjata yang dibentuk Belanda sebelumnya seperti Stadswacht dan Landwacht tidak diketahui lagi ke mana perginya.

Ada banyak pernyataan yang dilontarkan mengenai Pemerintah Hindia Belanda, seperti *Koninklijke Nederlands Indisch Leger* (KNIL), yang awalnya pemberani dan ditakuti rakyat pribumi yang tidak bersenjata, setelah tentara Jepang membayangi kehadirannya, Belanda tampak ciut nyalinya dan tidak berani bertempur langsung melawan Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1942, saat tentara Jepang memasuki kota Bengkulu, tentara Belanda tidak berkulit menghadapi serangan Jepang yang kemudian menyerah kalah pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan tanpa syarat tersebut telah mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia dan mulailah babak baru penjajahan Jepang di Bengkulu.

### c. Masa Kolonial Jepang

Tentara Jepang memasuki Bengkulu dalam formasi perang. Sebagian pasukan Belanda sudah terlebih dulu lari keluar menuju

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Australia, tetapi sebagian lain karam di tengah laut karena dihantam meriam Jepang. Di samping itu, banyak penduduk sipil Belanda yang ditawan Jepang.

Ada sebuah kapal Belanda yang mencoba mengangkut orang-orang Belanda yang ingin lari ke Australia, namun sebelum mereka masuk kapal keburu dibom oleh meriam Jepang. Untunglah tidak banyak membawa korban karena belum sempat menaikkan penumpang. Mereka menjadi tawanan Jepang. Akan tetapi kapal "Peulau Brass" yang dibuat pada tahun 1929 bertonase 9279 ton, terkubur bersama penumpangnya di perairan dekat Pulau Enggano.<sup>74</sup>

Bala tentara Jepang datang di Bengkulu pada bulan Juni 1942 dari Palembang, melalui jalan darat lintas Lahat – Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu. Pada saat Jepang datang, Bengkulu telah dikosongkan oleh Belanda. Hanya terdapat beberapa pejabat di antaranya Residen Belanda yang bernama Groenneveld.

Tanpa perlawanan yang berarti Jepang berhasil menguasai Bengkulu dengan mudah. Pada awalnya rakyat menerima dengan baik kedatangan Jepang. Hal itu disebabkan karena pada awalnya Jepang bersikap ramah tamah, bahkan bersikap sebagai saudara tua. Terutama organisasi pergerakan waktu itu di antaranya Parindra berorientasi cukup baik pada Jepang, bahkan menganjurkan supaya masyarakat menerima baik kedatangannya.

Untuk menarik hati rakyat, maka jika pada zaman Belanda untuk masuk kantor Residen terlalu formal, maka pada zaman Jepang setiap orang bebas untuk masuk ke dalamnya. Tentara Jepang menanamkan kepada rakyat tentang jahatnya Pemerintahan Kolonial Belanda dan membujuk rakyat supaya membantu peperangan Jepang melenyapkan Belanda dan sekutunya. Jepang juga mempropagandakan gerakan 3 A (Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia). Sisa-sisa Pemerintahan Belanda dan kaki tangannya yang tidak sempat melarikan diri kemudian ditawan. Residen Belanda dan seorang kepala penjara asli Bengkulu dihukum mati.

Kedatangan Jepang diperlancar berkat jauh sebelum pasukan-pasukannya diterjunkan di Bengkulu, di daerah ini sejak zaman Belanda telah banyak orang-orang Jepang membuka usaha. Bahkan menurut perkiraan mereka ini bukanlah pedagang tulen, namun ada yang berstatus sebagai mata-mata atau spionase yang bekerja untuk negaranya. Hal ini dapat disebutkan, seorang bernama Matsukawa yang

---

<sup>74</sup> Bijkerk, *Selamat Berpisah* (1888), hal. 251. Untuk lebih jelasnya lihat juga Badan Pemurnian Sejarah Indonesia – *Minangkabau, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan ... Jilid I* (1978), hal. 70.

sejak lama tinggal di Bengkulu, pada zaman Belanda membuka kedai minuman es kacang. Bung Karno erat hubungannya dengan Matsukawa dan kerap kali terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan rahasia. Tentunya tanpa sepengetahuan polisi rahasia yang selalu mengawal Bung Karno dengan ketat. Pertemuan mereka sering kali ditemani Inggit Gamasih.

Bung Karno sendiri tidak menyaksikan kehadiran Jepang di Bengkulu sebab beberapa hari sebelum Jepang masuk, ia telah “diamankan” oleh Belanda dan diungsikan ke Padang dengan jalan darat arah Muko-Muko. Sedangkan Matsukawa oleh penguasa Pemerintah Jepang diberi fungsi sebagai penterjemah, kemudian secara berturut-turut nasibnya terangkat menjadi Kepala P dan K, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

Orang Jepang lainnya yang turut berjasa dalam memperlancar kedatangan Jepang di Bengkulu bernama Mikasa dan Yokomoto Aso. Orang ini pada zaman Belanda membuka usaha kelontong serba ada yang terbesar di Bengkulu. Kehadiran Jepang telah mengakhiri kekuasaan Belanda di Bengkulu dan mulailah penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Meski kekuasaan Jepang di Bengkulu hanya tiga setengah tahun, penjajahan Jepang dirasakan jauh lebih berat dan lebih kejam dari pada Inggris dan Belanda. Yang menjadi komandan pasukan Jepang di Bengkulu adalah Kolonel Kangki. Di hotel Centrum milik seorang berkebangsaan Belanda bernama De Witt, Kolonel Kangki menerima penyerahan dari Residen Bengkulu.

Saat bala tentara Jepang memasuki kota Bengkulu, sebagian orang belum berani ke luar rumah. Perasaan ragu dan curiga penduduk Bengkulu menyambut juga kedatangan Jepang dipinggir jalan. Jepang datang dengan iringan kendaraan mobil militer dan ada juga dengan konvoi sepeda dan ada juga yang berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel : “Banzaai, Banzaai, Banzaai, Banzaai Dai Nippon, Banzzai Indonesia! (Hidup, Hidup, Hidup, Hidup Jepang, Hidup Indonesia !). Orang banyakpun mengikuti dengan sorak sorai. Bukankah propaganda Jepang pada waktu itu di mana-mana meneriakkan slogan “Asia untuk Asia” dan ingin mengusir penjajahan Belanda.

Sejak itu banyak yang menaruh harapan kepada Jepang, bahwa Indonesia akhirnya akan merdeka. Rakyat pun segera terbius dengan propaganda Jepang yang menggugah. Lebih-lebih karena sejak kedatangan Jepang orang diperbolehkan menaikkan bendera merah putih. Begitu juga lagu “Indonesia Raya” boleh dikumandangkan. Sementara pada zaman Belanda, kedua simbol kebangsaan ini dilarang dan mendapat hukuman berat jika diketahui oleh PID (intelijen)



Belanda. Ketika itu kaum pergerakan melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau di tempat terpencil, misalnya pada saat mereka mengadakan “kampeeren” (Inggris : *camping*). Kebiasaan berkemah ini umumnya ditemukan di kalangan anak-anak muda yang tergabung dalam kepanduan dari partai-partai tertentu dan anak-anak sekolah.<sup>75</sup>

Hanya segelintir para pemimpin Bengkulu yang menerima propaganda Jepang dengan hati-hati. Mereka tetap curiga dengan maksud-maksud tersembunyi dibalik kebaikan Jepang. Jauh sebelum Jepang menduduki Hindia-Belanda (Indonesia) Bung Karno yang waktu itu berada di Bengkulu karena menjalani masa pembuangan (1937-1942) telah mencurigai fasisme Jepang akan datang di Indonesia, termasuk juga di Bengkulu. Di awal kedatangannya di Bengkulu tahun 1937 bahkan beliau sudah memperingatkan bahaya atas perkembangan militerisme Jepang. Peringatan itu kemudian menjadi kenyataan. Ternyata “bulan madu” eforia kemerdekaan gaya Jepang itu hanya berlangsung sebentar. Beberapa bulan setelah Jepang berkuasa segera keluar pengumuman larangan menyanyikan lagu “kebangsaan” Indonesia dan juga bendera “kebangsaan” merah putih. Sebaliknya hanya bendera Jepang *Hinomaru* (matahari terbit) yang boleh dikibarkan, dan lagu kebangsaannya saja, *Kimigayo*, yang boleh diperdengarkan. Pengumuman Jepang itu ditempel di pohon-pohon, di depan toko-toko, di kedai-kedai dan melalui media radio Jepang.

Selanjutnya koran-koran pun ikut dibungkam. Koran Indonesia yang diterbitkan di Bengkulu dibekukan. Koran yang ada sejak zaman Belanda dimerger atau digabungkan dengan nama baru, yaitu “Bengkulu Nippo” di bawah kontrol langsung pihak Jepang. Dengan demikian, fungsi koran sebagai media informasi publik digeser atau diarahkan untuk menyuarakan kepentingan Jepang. Sejumlah anggota redaktornya yang lamatetap dipertahankan, tetapi kini mereka bekerja untuk “Bengkulu Nippo”

Kontrol Jepang terhadap segala sesuatu yang berbau politik juga semakin ketat. Siapa saja yang ketahuan melanggar peraturan pemerintahan militer Jepang ditindak dengan keras. Jepang mulai menunjukkan sikap fasisnya, suatu sikap kediktatoran yang cenderung menyelesaikan urusan dengan kekerasan. Orang mulai bergidik takut untuk berbeda pendapat, apalagi menentang secara terbuka segala peraturan dan instruksi yang datang dari penguasa baru itu. Sebab ujung-ujungnya adalah perlakuan kasar dan semena-mena.

---

<sup>75</sup> Kepanduan yang terkenal misalnya, “Surya Wirawan” dari Partai Parindra; Hisbul Wathan dari kelompok Islam. Ada juga yang berasal dari aktivis organisasi Muhammadiyah.

Sesuai dengan strategi perang Jepang, maka untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, dibangun kubu-kubu pertahanan di sepanjang pantai. Bekas-bekasnya sampai sekarang masih terdapat di Pasar Bengkulu, pantai Panjang dan lain-lain. Pembangunan kubu-kubu pertahanan Jepang sepanjang jalur pantai telah menyerap banyak tenaga kerja, terutama yang menjadi momok bagi rakyat jika diromushakan di Pulau enggano. Pulau tersebut yang letaknya terpencil, oleh Jepang dibangun kubu-kubu pertahanan terkuat, sekaligus sebagai gudang perbekalan perangnya. Rakyat yang diromushakan ke Pulau Enggano sedikit sekali kemungkinan dapat meloloskan diri dengan selamat. Atau kalau dapat kembali ke rumah, keadaannya sudah sangat menyedihkan, keadaan fisik dan mentalnya sudah rusak sama sekali.<sup>76</sup> Pangkalan-pangkalan udara dibangun pula di daerah Bengkulu, yaitu di kota Curup, Bengkulu dan Padang Panjang di kota Manna. Lapangan terbang Padang Kemiling dibangun pada zaman Jepang.

Jepang dengan kaki tangannya mulai memasuki kampung-kampung penduduk di Bengkulu. Kegelisahan yang dialami rakyat pedesaan adalah karena gudang-gudang beras mereka dirampas, atau dijual dengan harga sangat rendah. Musim panen berikutnya hampir 85 % beras rakyat masuk ke gudang-gudang pemerintah Jepang, dengan dalih untuk kepentingan bersama, harus rela dan patriotik, untuk kemenangan dan kemakmuran Asia Timur Raya. *Hodohan* (Badan Propaganda Jepang) terus-menerus meniupkan semangat militerisme. Roda pemerintahan hanya menggelincir pada satu arah, yaitu untuk kemenangan Asia Timur Raya. Perang di atas segala-galanya. Dalam situasi demikian kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan otomatis beku.

Kekuasaan Jepang kian hari kian angkuh dan angker. Sedemikian angkuhnya penguasa baru itu, sehingga mereka secara sewenang-wenang dapat meminta apa saja yang dikehendakinya. Jepang, misalnya, bisa meminta secara paksa sepeda atau mobil yang sedang dikendarai oleh pemiliknya di tengah jalan. Mereka juga bisa menyita gedung-gedung dan rumah untuk dipergunakan sebagai kantor. Bahkan lebih mengerikan lagi, Jepang bisa meminta secara paksa “anak gadis orang”. Maka orang tua yang mempunyai anak gadis paling menderita dan sangat tertekan dengan kelakuan Jepang ini. Demikian juga jebakan-jebakan untuk mencekal orang-orang di jalan atau dalam bioskop untuk dijadikan buruh *romusha* sering kali dilakukan

---

<sup>76</sup> Arsyik Hawab, dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hal. 171.

mendadak. Siapa saja, asal pemuda atau setengah baya, jika tertangkap langsung dinaikkan ke atas truk. Sejak itu kebanyakan mereka tidak pernah kembali lagi.

Rasia-razia politik terhadap gerakan “bawah tanah” sewaktu-waktu dilakukan Jepang. Maka dalam pemerintahan fasis zaman Jepang, penangkapan dan penyiksaan atas seseorang atau kelompok sering kali tidak dengan alasan yang jelas, baik karena difitnah maupun karena alasan-alasan kecil sekalipun. Kaum politisi yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang pastilah terancam jiwanya. Karena itu, banyak di antara mereka yang menghindar dengan cara meninggalkan kota. Lagi pula, pada masa Jepang partai-partai politik dihapuskan. Yang ada hanyalah perkumpulan-perkumpulan sosial dan pendidikan seperti Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang disesuaikan dengan tuntutan Jepang. Sementara itu, pusat kegiatan pemerintahan militer Jepang lebih terfokus ke kota Bengkulu. Dengan demikian praktis hanya organisasi propaganda pro-Jepang yang masih bersuara seperti Hokokai dan lembaga penyiaran seperti Domai dan surat kabar Jepang *Soematra Sinbun*.<sup>77</sup>

Keadaan ekonomi rakyat di zaman Jepang semakin parah. Sekarang sorak “Banzaai ...”, Asia untuk Asia ...” tidak kedengaran lagi. Demikian pula slogan Jepang yang mengobral kata-kata “Nippon – Indonesia sama-sama ...” tidak berlaku lagi. Pada hal sebelumnya bangsa Indonesia yang dijajah Belanda diajak Jepang untuk bekerja sama guna mengusir kolonialisme Barat di Asia. Dalam hal ini Jepang menganggap dirinya sebagai “Saudara Tua” bagi orang Indonesia sebagai “Saudara Muda”. Sekarang bujuk rayu bahwa “Nippon – Indonesia sama-sama ...” berubah seratus delapan puluh derajat. Pada kenyataan tidak lagi “tegak sama tinggi, duduk sama rendah”, seperti yang dibayangkan dalam ide-ide demokrasi rakyat Bengkulu. Kini keadaan jauh berbeda, tidak lagi sama dan bahkan terjadi diskriminasi.

Perbedaan itu amat dirasakan, misalnya, dalam mendapatkan bahan-bahan makanan dan keperluan rumah tangga. Hampir semua bahan-bahan kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk Jepang atas nama kepentingan perang Asia Timur Raya. Sementara itu, rakyat yang mayoritas petani itu dianjurkan untuk tetap rajin bekerja di sawah ladang mereka. Namun sebagian besar hasilnya harus diserahkan untuk keperluan perang Jepang. Bayangkan saja kalau kebanyakan orang Bengkulu sudah terbiasa makan nasi tiga kali sehari (pagi, siang dan petang) atau

---

<sup>77</sup> Sebagian dari koleksi surat kabar Jepang ini masih dapat ditemukan dalam koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta.

sekurang-kurangnya dua kali sehari, maka di masa pendudukan Jepang banyak yang tidak pernah melihat nasi. Kalau pun ada, sering kali beras bercampur pasir dan kotor. Beras telah jauh berkurang atau bahkan menghilang sama sekali. Maka tidak mengherankan jika terjadi kelaparan di mana-mana. Banyak orang yang terpaksa memakan beras bercampur jagung atau dengan ubi kayu, ketela, pisang muda dan apa saja yang bisa dimakan. Bahkan di kampung-kampung ada yang terpaksa memakan umbi gadung yang beracun. Tentu setelah unsur racunnya dibuang dengan cara pengolahan tertentu.

Selain kesulitan terhadap bahan makanan, bahan kain pun amat sulit ditemukan. Akibatnya banyak orang yang menyulap bahan kain kasur atau kain gordien pintu yang masih dipakai jadi baju atau celana. Lebih banyak lagi yang terpaksa memakai karung goni atau kulit kayu *tarok* (sejenis pohon tananam tua yang tebal serat kulitnya). Hal ini bisa ditemukan dalam pakaian penduduk sehari-hari, begitu juga pakaian buruh di pelabuhan. Pakaian itu tidak pernah diganti dan kotor, sehingga banyak tuma ((kutu)nya).

Pada zaman Jepang, anak-anak sekolah di Bengkulu setiap minggu dikerahkan untuk bergotong royong. Mereka disuruh mengeluarkan batu kali di sebuah sungai untuk dibawa ke tepi pantai dan seterusnya disusun menjadi benteng pertahanan Jepang. Kadang-kadang ada beberapa kali dalam seminggu sehingga proses belajar di sekolah nyaris terlantar. Kegiatan belajar mengajar bagi Jepang tidak terpikirkan oleh Jepang. Tidak menjadi masalah apakah anak-anak Indonesia akan tetap bodoh yang penting bagi mereka adalah “menang perang”.

Dalam hal ini para kepala kampung yang mendapat instruksi, apakah untuk bergotong royong atau untuk memungut iuran dan bahan makanan, paling menderita perasaannya. Jika mereka tidak mampu mengerahkan tenaga kerja gotong royong atau menyerahkan pungutan sebanyak yang ditetapkan Jepang, pasti mendapat bentakan dan makian dengan teriakan *bagero* (ungkapan kemarahan ala Jepang). Namun bagi mereka yang siap dan dapat melayani Jepang sesuai dengan yang diminta mendapat pujian dan adakalanya hadiah beberapa helai kain sarung atau dua tiga meter kain belacu. Masih untung kalau hanya mendapat panggilan bergotong royong di sekitar kota. Jika terpanggil untuk dikirim ke proyek pembangunan jalan dan jembatan atau pembangunan lapangan terbang, ada bayangan kematian dan kisah buruh *romusha* yang dikirim ke daerah lain adalah kisah darah dan air mata.

Bagaimanapun warisan zaman Jepang tidak melulu kisah sedih tanpa makna. Dalam beberapa hal pengalaman pahit di zaman Jepang

membuat para pemimpin semakin insyaf betapa beratnya penderitaan menjadi rakyat terjajah. Dan yang lebih penting pengalaman buruk itu telah semakin mempersatukan mereka menyusun barisan untuk tujuan merdeka. Lagi pula, zaman Jepang juga memberi mereka kesempatan dan tantangan yang tak pernah diperoleh dari pendahulunya, Belanda dan Inggris.

Salah satu contoh ialah pengalaman pemerintahan dan pendidikan militer bagi pemuda Indonesia. Pada zaman Jepang Bukittinggi berperan sebagai pusat pemerintahan Jepang di Sumatera dan Semenanjung Malaya di bawah Tentara ke-25. Jadi Sumatera dan Jawa berada di bawah kesatuan administratif yang terpisah sama sekali. Sumatera bukan lagi merupakan bagian atau subordinasi dari Jawa dalam model pemerintahan ciptaan Belanda yang berpusat di Batavia, melainkan ke Bukittinggi di bawah Tentara ke-25. Sedangkan Jawa di bawah Tentara ke-16.

Penetapan Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan Jepang untuk Sumatera dan Semenanjung Malaya, sedikit banyak, mencerminkan pentingnya Sumatera sebagai bagian dari “daerah inti” (*nuclear zone*) dalam kebijakan pendudukan Jepang di Asia Tenggara. Di mata Jepang, “kehilangan pulau Sumatra berarti kehilangan Indonesia”.<sup>78</sup> Bagi pemimpin Bengkulu khususnya, kedudukan Bukittinggi semacam itu mempunyai arti penting karena ada banyak kesempatan yang ditawarkan Jepang, baik dalam pelatihan pegawai tingkat tinggi, maupun pendidikan calon perwira.

Erat kaitannya dengan kebijakan administratif di atas ialah pengalaman pemerintahan. Meskipun Jepang pada dasarnya meneruskan pembagian administrasi yang ditinggalkan Belanda, mereka memberi kesempatan yang lebih luas pada pejabat bumiputra untuk mengisi jabatan-jabatan penting. Hal ini tidak terjadi di zaman Belanda. Kedudukan pemerintahan di tingkat daerah *Afdeeling* dan daerah distrik warisan Belanda ke bawah, setingkat pejabat kontrolir, di zaman Hindia Belanda semuanya dipegang oleh pejabat-pejabat kulit putih (Belanda). Sementara pada masa Jepang semua posisi pemerintahan yang setingkat dengan itu dipegang oleh pejabat bumiputra.

Dalam susunan pemerintahan semacam itu, hampir semua pejabat lama pribumi seperti Demang (*Gunco*) tetap dipertahankan, tetapi tugas mereka sekarang tentu untuk melayani kepentingan pemerintahan militer Jepang. Selain itu, banyak pos-pos di instansi

---

<sup>78</sup> Dari dokumen Belanda tentang posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, “Japan’s Positie en Oorlogvoering in het Verre Oosten, 1943-1944,” DZ, H.51, doos 90, LA, MvBz, Den Haag.

pemerintahan yang tadinya hanya dipercayakan pada pejabat kulit putih, seperti kepada PTT, radio dan bidang-bidang ekonomi dan lain-lain di zaman Jepang dipercayakan pada pejabat bumiputra. Dalam hal ini Jepang memberikan kesempatan luas kepada putra-putra Bengkulu untuk dilatih sebagai calon pegawai tingkat tinggi lewat kursus *Joiku Kanri Gakko* di Bengkulu selama 6 bulan. Tamatan kursus ini kemudian memegang jabatan penting di zaman Jepang dan menjadi orang penting dalam jajaran pejabat Indonesia di zaman kemerdekaan.

Dalam menjalankan pemerintahan di Bengkulu hampir tidak ada perubahan yang dilakukan Jepang sebagaimana pada pemerintah jajahan Belanda, kecuali tempat kedudukan orang-orang Belanda digantikan oleh orang-orang Jepang. Kedudukan-kedudukan sebagai pejabat bagi bangsa Indonesia masih tetap sebagaimana biasa, hanya sebutannya dalam bahasa Jepang. Di samping itu tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban mereka yang diberikan Pemerintah Jepang jauh lebih berat, berkenan atau tidak, semua disanggupkan saja. Semua persoalan pemerintah diarahkan dan dititik beratkan hanya untuk tercapainya kemenangan untuk Jepang Raya (*Dai Nippon*) dalam melawan Sekutu. Menurut Jepang, bahwa peperangan yang sedang mereka laksanakan adalah peperangan “Asia Timur Raya” dan mereka selalu bersemboyan “Asia untuk bangsa Asia”.

Jika pada zaman Belanda para “pejabat” bangsa Indonesia diberikan sedikit “keistimewaan” yang kemudian diperas untuk melaksanakan kehendak-kehendak penjajah, maka pada zaman Jepang berkuasa di daerah ini, semuanya itu tidak berlaku lagi, malahan berlaku sebaliknya, yaitu “pejabat-pejabat” bangsa Indonesia itu diperlakukan dengan segala kekerasan dan penghinaan.

Tidak kurang pentingnya adalah manfaat tersembunyi dari larangan Jepang menggunakan bahasa Belanda. Sebaliknya, bahasa resmi dalam pertemuan dan dalam media massa adalah bahasa Jepang dan bahasa Melayu/Indonesia. Sejak itu bahasa Indonesia dengan sendirinya “naik daun” dan mendadak tampil sebagai bahasa penghubung yang utama. Tokoh-tokoh pergerakan yang tidak mendapat tempat dalam forum-forum resmi atau forum terbuka dapat menyuarakan asosiasi nasionalisme keindonesiaan melalui pers. Dengan begitu, larangan penggunaan bahasa Belanda membawa keuntungan tersendiri dalam memupuk rasa kebangsaan lewat bahasa atas dasar semangat ke-Indonesiaan dan bukan berdasarkan ke-Jepangan.

Meskipun penguasa Jepang tetap bersikeras menolak semua ideologi dan gerakan politik lokal, apapun haluannya, orde baru Jepang lambat-laun mulai membuka kesempatan dalam bidang tertentu, di

mana bekas tokoh-tokoh politik diperbolehkan bergerak dalam batas tertentu untuk menyalurkan aspirasi “ke-Indonesiaan” secara terbuka.

Dalam hubungan itu perlu pula disebutkan *Hokoo Kai* (Badan Kebaktian Rakyat; BKR), suatu badan propaganda Jepang yang dibentuk sejak Maret 1944. Badan itu dibentuk untuk menghimpun semua pimpinan dari setiap golongan masyarakat, termasuk kelompok etnik asing, seperti cina, India dan Arab. Mereka diserap dalam suatu “front” yang luas, sehingga hampir tidak dapat dibedakan dengan badan-badan pemerintahan sendiri. *Hokoo Kai* di Jawa dipimpin oleh Sukarno dan mempunyai 4 departemen : Urusan Umum, Urusan Praktis, Urusan Propaganda dan Urusan Kebudayaan dengan bermacam bagian yang lebih kecil, misalnya, urusan pemuda, pers dan sebagainya.

Berbeda dengan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang didirikan sebelumnya, yang hanya terdapat di Pulau Jawa dan memasukkan unsur pejabat Jepang di dalam organisasi ini, *Hokoo Kai* sepenuhnya terdiri dari orang Indonesia dan cabangnya terdapat di setiap *Shu*.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah Bengkulu hampir tidak ada perubahan yang dilakukan Jepang sebagaimana pada pemerintah jajahan Belanda, kecuali tempat kedudukan orang-orang Belanda digantikan oleh orang-orang Jepang. Kedudukan sebagai pejabat bagi orang-orang pribumi masih tetap sebagaimana biasa, hanya sebutannya dalam bahasa Jepang. Di samping itu, tugas-tugas dan kewajiban mereka yang diberikan Pemerintah Jepang jauh lebih berat, berkenan atau tidak semua disanggupkan saja. Di samping segi-segi negatif yang ditimbulkan oleh Pemerintah Jepang terdapat pula segi positifnya. Penderitaan telah menyuburkan semangat berjuang untuk mengusir penjajahan dari tanah air. Rakyat bagai dicambuk untuk maju merebut hak-haknya, setelah selama ini dinina-bobokkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tempaan disiplin yang keras menimbulkan jiwa tangguh dan tidak mengenal menyerah.

Kehidupan para remaja terlihat adanya usaha Jepang untuk menanamkan doktrin militer dan semangat anti Eropa, khususnya Sekutu. Hal ini terlihat dari berdirinya organisasi ala Jepang, seperti : *Seinendan*, *Keibodan*, *Geigun*, *Fujimkai*, *Heiho* dan lain-lain, yang melatih mereka untuk berdisiplin militer dan memompakan semangat pantang menyerah.

Anak-anak sekolah, setiap pagi diwajibkan melakukan senam pagi (*Tai-so*) membungkukkan badan ke arah matahari dan menyanyikan lagu ciptaan Jepang. Mata pelajaran di sekolah hanya 30 %, selebihnya dimanfaatkan untuk latihan kemiliteran dan berkebun

palawija dan pohon jarak.<sup>79</sup> Penanaman palawija dan tanaman jarak ini telah mendidik anak-anak sekolah untuk dapat bercocok tanam secara baik dengan menggunakan teknologi pemupukan dan pengolahan tanah yang teratur.

Jepang pada dasarnya mempunyai watak dasar yang positif. Orang Jepang dikenal sebagai bangsa yang rajin, senang belajar, ulet dalam mewujudkan cita-cita, disiplin, cinta yang mendalam kepada tanah air dan mempunyai rasa kehormatan diri yang tinggi serta tidak kenal arti menyerah. Peranan Jepang tidak kecil dalam menambah atau mempermatang situasi yang hangat di Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk pemuda dan pemudi Indonesia seperti *seinendan* untuk pemuda umur 14 – 25 tahun, *Keibodan* untuk orang yang berumur di atas 25 tahun, *Fujinkai* adalah pendidikan watak disiplin menjadikan rakyat bersifat pemberani, hal ini merupakan modal pertama untuk mencapai kemerdekaan. Juga pemuda-pemuda yang tergabung dalam *Gyugun*, *Heiho* berkat gemblengan Jepang dan disiplin akhirnya menjadi prajurit-prajurit pilihan.<sup>80</sup>

## C. BENGKULU PADA AWAL KEMERDEKAAN

### 1. Persiapan Menjelang Kemerdekaan

Ketika Jepang mengalami kekalahan terus-menerus dalam perangnya melawan Sekutu pimpinan Amerika Serikat, Jepang berusaha mengambil hati lagi pada bangsa Indonesia. Jepang mengumumkan melalui Deklarasi Koiso tanggal 7 September 1944, janji kemerdekaan bagi sebuah negara Indonesia di masa depan, yang wilayahnya mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Namun, muncul keberatan dari Tentara ke-25 terhadap penyatuan Sumatra ke dalam negara yang dijanjikan itu. Mereka mengusahakan pemisahan sebelum jatuhnya Jepang, dengan membentuk *Chou Sangi In* (Dewan Penasehat Daerah) untuk seluruh Pulau Sumatra di awal tahun 1945. Akhirnya Tentara ke-25 melunak untuk bekerja sama dengan mengizinkan ketiga pemimpin Sumatra mengikuti pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Seolah-olah seperti efek domino yang terus berjatuhan, hancurnya kekuatan Jepang tampaknya sudah di depan mata. Iwojima direbut Amerika Serikat pada bulan Maret 1945 dan berlanjut dengan

---

<sup>79</sup> Arsyik Hawab, dkk., *Op.cit.*, hal. 175.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 189.



kota-kota lainnya. Dari Iwojima yang direbutnya, Amerika melakukan pemboman siang malam ke kota-kota industri Jepang. Sementara itu, kekalahan Jerman di Eropa pada bulan Mei 1945 menambah kekuatan Sekutu untuk konsentrasi menghadapi Perang Pasifik Barat Daya. Puncaknya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Korban yang tewas mencapai 78.000 orang.<sup>81</sup> Hal inilah yang menyebabkan Jepang harus berfikir untuk mengakiri perang.

Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi memanggil Sukarno, Hatta dan Rajiman ke Dallath, Timur Laut kota Saigon. Kepada ketiga pemimpin Jawa *Hookookai* tersebut, Terauchi berjanji bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya Sukarno dan Hatta ditunjuk untuk memimpin Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang sepertinya memberi angin agar Indonesia segera memerdekakan diri. Menurut Aiko Kurasawa, hal tersebut tidak lebih sebagai taktik untuk menarik dukungan terhadap tentara Jepang yang semakin terpuruk. Sebenarnya, Jepang lebih suka menguasai Indonesia selama mungkin untuk kepentingan perang Jepang.<sup>82</sup>

Pada bulan-bulan terakhir masa pendudukan, sikap dan tindakan Jepang di Sumatera, termasuk di Bengkulu, semakin tidak menentu. Tekanan-tekanan ekonomi yang semakin parah serta kebencian dan penderitaan yang meluas di sebagian besar anggota masyarakat sejak satu tahun terakhir mengakibatkan posisi Jepang semakin sulit. Keadaan tidak aman dan suasana tak menentu menjelang kejatuhan Jepang mengingatkan orang kembali pada masa-masa awal pendudukan Jepang.

Dulu Jepang yang mengancam kedudukan Belanda dengan serangan-serangan mendadak lewat kapal terbang dan bom berjatuhan di mana-mana. Sekarang kebalikannya yang terjadi. Serangan balik Sekutu terhadap kedudukan Jepang setiap saat dapat terjadi. Pada akhir pendudukan Jepang, paling tidak ada dua serangan bom sekutu. Pertama, pada akhir tahun 1944 dan awal tahun 1945, Pulau Enggano jadi sasaran, karena di sanalah terletak salah satu pusat pertahanan Jepang di Bengkulu. Dari arah Pulau Enggano, tentara Sekutu juga menyerang pusat pertahanan Jepang di Manna. Saat itu juga, dua pesawat pemburu Jepang dengan "berjibaku" (nekad) langsung memburu pesawat Sekutu, yang segera menghilang setelah melintas dalam sekejap mata.

---

<sup>81</sup> Iim Imaduddin, *Masa Revolusi di Bengkulu 1945 - 1950*, (Padang : Inventarisasi Sumber Sejarah Lisan, Proyek PPST BKSNT madang, 2002), hal. 14.

<sup>82</sup> Aiko Kurasawa Inomata, "Persiapan Kemerdekaan Pada Hari-Hari Terakhir Pendudukan Jepang", dalam *Denyut Nadi Revolusi Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1997), hal. 116.

Kedua, serangan beruntun Sekutu dari laut dan udara terjadi lagi pada bulan Februari 1945 dengan sasaran Pantai Panjang. Kapal induk sekutu yang untuk sementara waktu berpangkalan di Pulau Pagai mengirim armadanya ke dekat Pantai Panjang dan meriam kapal selamnya mengenai sasarnya, yaitu kapal-kapal Jepang yang bersandar di dermaga, termasuk di antaranya sebuah tanki penyimpanan minyak BPM.

Tidak ayal lagi bahwa dalam kedua serangan Sekutu tersebut di atas, rakyat ikut menjadi kurban. Selain kurban dari pihak *Kaygun* angkatan laut Jepang, dikahabarkan banyak “kuli” pelabuhan yang sedang bekerja memuat batu bara ikut jadi kurban tak berdosa. Serangan sekutu itu juga berhasil menenggelamkan dua buah kapal Jepang yang sedang sandar di sana.<sup>83</sup> Sebelumnya, di tempat yang sama, satu buah kapal Belanda yang terakhir, juga terkena serangan meriam Jepang saat bersiap-siap meninggalkan Bengkulu pada tahun 1942. Sekutu juga mengarahkan serangannya ke pertahanan Jepang di Pelabuhan Manna.

Pada saat-saat kritis menjelang kejatuhannya, pertahanan Jepang sudah mulai lemah. Cepat atau lambat, mereka tidak mungkin mempertahankan kekuasaannya. Sejak itu, seperti juga tragedi Sukarno di akhir kejatuhan Belanda, tindakan pengamanan darurat untuk melindungi diri mereka jauh lebih dipentingkan dari pada lain-lain tindakan rutin apa pun juga.

Jepang dalam hal ini, misalnya, memindahkan secara mendadak gudang senjata dan amunisi mereka di kota Bengkulu ke Kepahyang. Pesawat radio yang dipasang setiap persimpangan jalan, yang biasanya menyiarkan berita-berita gegap gempita tentang kemenangan-kemenangan Jepang di medan pertempuran, kini dihentikan. Pada hal biasanya propaganda Jepang membahana dengan diselingi acara olah raga atau hiburan gembira.

Anehnya koran *Bengkulu Shimbun* terbitan Januari 1945 di Bengkulu masih tetap meyakinkan pembacanya dengan pernyataan optimistik bahwa “kemenangan terakhir pasti di pihak kita”. Namun pada saat yang sama Jepang tampak kebingungan. Yang lebih menyolok lagi ialah, secara mendadak mereka mengobral barang-barangnya. Barang kali karena tidak mungkin dibawa pulang ke negerinya atau akan jatuh ke tangan musuh. Maka sambil mengambil hati rakyat, penguasa Jepang membongkar gudang-gudang dan toko-toko sandang pangan, ada kalanya juga seng, ban mobil dan sepeda. Mereka menjualnya kepada rakyat dengan harga banting.

---

<sup>83</sup> Rekaman tentang “Pertempuran di Kota Bengkulu dan sekitarnya” (Naskah tidak diterbitkan, koleksi DHC 45 Kodya Bengkulu, tanpa tahun), hal. 1.

Pemandangan di kantor-kantor Jepang juga memperlihatkan suasana yang lain dari biasa. Soalnya sejak seminggu sebelum kekalahannya, Jepang meliburkan pegawai Indonesia. Begitu pula siaran pers, pemancar Radio Sumatera (*Sumatera Hosokyiku*) di Bengkulu tidak lagi mengudara. Kantor berita Jepang, "Domei", secara mendadak menghentikan kegiatannya. Semua pegawainya juga disuruh pulang tanpa penjelasan apa-apa. Praktis selama seminggu setelah kekalahannya, Jepang masih tetap menutup rapat informasi penting ini. Pada hal tanggal 14 Agustus 1945 Kaisar Tenno Heika di Tokyo telah mengeluarkan pernyataan bahwa Jepang bersedia menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan satu hari kemudian, Sekutu menerimanya dengan mengumumkan penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak.

Untuk sementara, pembicaraan politik tingkat tinggi menjadi perbincangan tertutup di kalangan para pemimpin. Mereka selalu memantau berita dari hari ke hari tentang jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tentang ultimatum terhadap Tokyo agar menyerah, tentang kemenangan Sekutu atau Amerika Serikat di Pasifik dan Asia Tenggara dan seterusnya apa yang terjadi dengan Sukarno – Hatta di Jakarta. Sebagian pemimpin yang menangkap berita ini masih belum berani membocorkannya.

Demi untuk memperoleh kepastian mengenai berita penting ini, maka beberapa orang tokoh di Bengkulu, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat mencoba mendatangi *chokan* (Residen Jepang) di kantornya. Secara diplomatis mereka langsung menyampaikan maksud dan tujuan. "Rakyat Bengkulu, tetap berdiri teguh di belakang Jepang, walaupun Rusia telah menduduki Jepang."<sup>84</sup>

Tahu lawan bicara mereka enggan dan menghindar untuk membicarakan soal kekalahannya, maka soal itu sama sekali tidak disinggung. Kedatangan mereka hanya untuk sekedar memperoleh konfirmasi atau untuk mengecek sejauh mana kesahihan berita radio yang pernah mereka dengar. Paling tidak dapat pula diketahui apa rencana-rencana Jepang selanjutnya.

Untuk tidak menimbulkan salah pengertian, para pemimpin Bengkulu sudah memiikirkan masak-masak sebelum mereka menghadap ke kantor penguasa Jepang itu. Pernyataan "setia" yang dikemukakan para pemimpin Bengkulu itu hanyalah merupakan siasat

---

<sup>84</sup> Rusia termasuk kelompok Negara-negara Sekutu dalam Perang Dunia Kedua berhadapan dengan lawannya Jerman di Barat dan Jepang di Timur. Posisi Jepang semakin sulit karena dijepit oleh serangan ofensif dari arah Pasifik oleh gabungan pasukan Amerika Serikat dan Australia dari arah Pasifik dan Rusia dari arah barat.

belaka. Mengapa ? Konon salah satu alasannya ialah karena “kita” harus berbuat demikian karena jika tidak memperlihatkan sikap kegembiraan secara spontan, bisa dianggap memusuhi Jepang, sedangkan kekuasaan dan senjata sepenuhnya masih di tangan mereka.<sup>85</sup>

Memang membeberkan kekalahan Jepang secara langsung dihadapan pemimpin Jepang sendiri yang masih berkuasa, tetapi sedang dilanda frustrasi itu, bisa menimbulkan resiko. Bahkan amat membahayakan keselamatan jiwa para pemimpin dan rakyat. Jika hal ini dilakukan Jepang akan segera bertindak cepat dan brutal atau memberi kesempatan kepada mereka untuk menjalankan “*black-list*” (daftar hitam), yang direncanakan sebelumnya. *Chokan* Jepang tidak mau menyinggung soal kekalahan, kecuali hanya mengatakan dengan bahasa diplomatis bahwa “perang sudah berhenti; Jepang berdamai dengan Sekutu”, walaupun pada wajahnya kelihatan sedih dan muram.<sup>86</sup>

Beberapa hari kemudian, berita tentang kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 masih berada dalam desas-desus di kalangan umum warga kota. Begitu juga berita yang maha penting berikutnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada umumnya juga masih berada di luar jangkauan pengetahuan publik,<sup>87</sup> kecuali di kalangan segelintir para pemimpin. Jepang sengaja menutup-nutupi berita kekalahannya. Untuk sebagian karena takut akan balas dendam rakyat terhadap mereka dan sebagian yang lain mereka terikat dengan keharusan mematuhi instruksi Sekutu untuk tetap menjaga *status quo*, dalam arti tetap mempertahankan keadaan apa adanya seperti semula. Itu berarti tidak boleh melakukan tindakan apa-apa. Apalagi untuk menyerahkan kekuasaan kepada pihak Indonesia, di samping tetap menjaga tanggung jawab keamanan.

Bala tentara Jepang kini tidak lagi berani mundar-mandir secara bebas karena takut akan balas dendam rakyat. Kebanyakan mereka terkonsentrasi di kamp militer di kota Bengkulu. Sebagian menghabiskan waktu mereka minum-minum di tempat hiburan Jepang.

---

<sup>85</sup> Dikutip dari Catatan “Pertempuran di Kota Bengkulu dan Sekitarnya” (Naskah tidak diterbitkan, Koleksi DHC 45 Kodya Bengkulu, tt), hal. 2..

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Salah satu sumber mengatakan, bahwa siaran radio gelap tentang kapitulasi Jepang telah terpantau di sebuah rumah salah seorang pemimpin perjuangan di Bengkulu dan seorang berkebangsaan Swis yang sebelumnya dipekerjakan Jepang pada bagian “*eleltris*” (listrik) kantor Balai Kota. Keterangan Noersoe’oed Achir, “Kota Bengkulu sekitar Keruntuhan Jepang ...” (Bengkulu, naskah tidak diterbitkan, 1981), hal. 3.

Ada juga yang sibuk mengobrol timbunan barang-barang Jepang yang masih tersimpan di gudang-gudang peninggalan Belanda di Bengkulu<sup>88</sup>.

Sebaliknya, para pemimpin di Bengkulu dan kota-kota lainnya seperti Curup, Kepahyang, Lais, Tais, Muko-Muko, Manna, Kaur dan lain-lain daerah menghadapi kendala yang lebih sulit lagi. Akibat terputusnya hubungan komunikasi sesama pemimpin baik di Provinsi Bengkulu atau di Sumatera secara keseluruhan maupun dengan yang di Jawa. Perhubungan kian hari kian buruk. Yang terlihat mondar-mandir dalam kota atau antar kota hanyalah kendaraan militer Jepang. Kendaraan umum boleh dibilang tidak ada. Jika ada satu dua bus yang masih mencoba mengangkut penumpang umum, keadaannya sudah sangat parah, sehingga selain tidak dapat melaju dengan cepat, juga sering rusak di tengah jalan. Bayangkan bahan bakar kendaraan umum bukan bensin, melainkan tetesan getah pohon yang diolah menjadi fungsi bensin. Hal ini berarti mengambil resiko mempercepat kerusakan mesin. Sumber minyak di Palembang dan Pangkalan Brandan praktis sudah tidak beredar lagi di kalangan umum.

Masih untung bagi mereka yang mempunyai sepeda, meskipun roda sepeda dari "ban mati", artinya karet penuh tanpa angin, mirip roda *andong/dokar* (kereta kuda). Keadaan perhubungan yang buruk sangat menghambat kelancaran komunikasi sesama pemimpin antar kota. Hal ini dipersulit lagi akibat politik pemencilan yang diterapkan Jepang sebelumnya. Kebijakan politik Jepang untuk memblokir hubungan antar daerah, termasuk dengan Jawa, masih amat terasa pengaruhnya pada hari-hari terakhir menjelang kejatuhan kekuasaannya.<sup>89</sup>

Tidak terkecuali anggota *Gyugun* yang relatif terbaure langsung dengan sistem Jepang, saat dibubarkan pada tanggal 18 – 20 Agustus 1945, mereka tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa dari Jepang. Keadaan di barak-barak *Gyugun* lebih tidak terurus. Sejak satu bulan terakhir tidak ada latihan perang lagi. Para *Gyugun* dibiarkan bebas begitu saja, tetapi mereka tidak diperbolehkan keluar dari asrama. Sekitar tanggal 18 Agustus mereka dibubarkan secara mendadak oleh komandan Jepang mereka.<sup>90</sup> "*Wakare... umai wakare, wakare'...*"

---

<sup>88</sup> Catatan Noersoe'od Achir (Bengkulu, 1981), hal. 3.

<sup>89</sup> Lihat Anthony Reid, "The Birth of The Republik in Sumatera", *Indonesia*, 12 (Okt. 1971), hal. 31ff.

<sup>90</sup> *Gyugun* Sumatera dibubarkan dalam waktu yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Sejas bulan terakhir sebelum kealahannya, Jepang tidak lagi mengurus *Gyugun* secara teratur, bahkan sensata mereka sudah dilucuti saat Divisi Osaka dipindahkan ke Asia daratan awal 1945. Menurut Propinsi Sumatera Tengah (1954 : 54), *Gyugun* dibubarkan Jepang tanggal 14 Agustus 1945. Di Curul dan Manna kekuatan ini dibubarkan lebih kemudian, yaitu sekitar tanggal 19 Agustus

(Pulang, kamu boleh pulang, bubar ...!), demikian Jepang “mengusir” mereka dengan kasar.<sup>91</sup> Kebanyakan anggota *Gyugun* masih diliputi kebingungan dan nyaris kehilangan arah, tidak tahu apa yang mau dilakukan.

Semua anggota *Gyugun* yang terkonsentrasi di barak-barak mereka di beberapa tempat seperti di Curup, Kepahyang, Lais, Muko-Muko, Tais, Manna dan Kaur “dikembalikan ke masyarakat”. Saat itu mereka tiba-tiba seolah-olah diusir begitu saja setelah Jepang tidak lagi memerlukan mereka. Lebih parah lagi, bagi mereka yang berasal dari daerah yang jauh di pedalaman tidak disediakan alat pengangkutan untuk pulang ke kampung mereka masing-masing, sehingga terpaksa berjalan kaki secara terlunta-lunta.

Sebagian di antara mereka masih memerlukan tenggang waktu selama satu atau dua minggu untuk menunggu dan melihat-lihat situasi sebelum mereka benar-benar dapat mengkonsolidasikan diri sebagai bagian dari kelompok-kelompok kekuatan revolusi pada minggu-minggu terakhir bulan Agustus 1945 nanti.

Hal ini sangat kontras situasi yang mereka hadapi secara mendadak. Sebagai generasi muda “terpilih” dan mendapat latihan militer dan cara berorganisasi sekedarnya selama masa pendudukan Jepang, kebanyakan perwira *Gyugun* mendadak terhenyak. Tadinya mereka mendapat perlakuan istimewa oleh Jepang dan menjadi “pujaan” di tengah-tengah masyarakat. Sekarang mereka tiba-tiba dilepas begitu saja dan merasa amat terhina. Namun tidak berdaya menentang Jepang yang mengusir mereka dari asrama. Beberapa orang bekas perwira *Gyugun* masih memerlukan tenggang waktu berminggu-minggu sebelum dapat mengumpulkan teman-teman lama, sambil berhubungan dengan para pemimpin politik untuk kemudian membentuk organisasi pemuda.

Situasi keamanan dan ketertiban pada awal tahun 1945 semakin tidak menentu. Jepang mulai mengambil hati para pemimpin Indonesia. Salah satu taktik pendekatan adalah mengundang para pemuda Indonesia ke Tokyo untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia.

---

1945, sedangkan di Palembang baru tanggal 22 Agustus 1945. Naskah wawancara dilakukan Abdul Halim tinggal di Jakarta.

<sup>91</sup> Wawancara dilakukan dengan Ranni, Bengkulu 9 April 1991. Ranni bekas *Gyugun* yang lahir tahun 1925 di Curup. Saat-saat menjelang *Gyugun* dibubarkan di asramanya, ia juga bingung melihat komandannya (tentara Jepang) bingung, lalu menanyakannya mengapa “muram”. “Perang sudah berakhir”, jawabnya dalam bahasa Jepang. Entah bagaimana, si Jepang itu, menurutnya, mau juga bercerita sekedarnya. “Tiap sepuluh tahun”, dia bercerita, “selalu ada perang”. katanya, “mungkin sepuluh atau tiga puluh tahun lagi Jepang tiba di sini lagi.”

Bengkulu mempunyai tokoh yang sangat briliyan dan diperhitungkan di tingkat nasional yaitu Ir. Indra Caya. Ia adalah salah satu undangan dalam pembicaraan Indonesia merdeka yang berasal dari Bengkulu. Mereka membicarakan tentang konsep Indonesia merdeka dengan memperjelas wilayah yang merdeka dari Jepang. Marsekal Terauchi Pimpinan angkatan Perang Dai Nippon mengumumkan bahwa yang disebut Indonesia Merdeka itu adalah bekas Hindia Belanda. Sukarno dan Hatta juga diundang ke Saigon untuk membicarakan Indonesia merdeka.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan masa kehancuran bagi Jepang, sebab Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945 barulah Sukarno – Hatta kembali ke Jakarta. Sementara itu kondisi tentara Jepang sudah semakin lemah sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945, menyerah kepada Sekutu. Secara otomatis Indonesia terlepas dari jajahan Jepang dan berada di bawah pengawasan Sekutu.

Janji yang pernah disampaikan Jepang kepada tokoh-tokoh Indonesia tentang kemerdekaan tentunya tidak bisa direalisasikan. Namun Jepang berpikir bahwa Indonesia bisa merdeka dengan memanfaatkan organisasi *Gyugun* dan *Heiho*. Akhimya kedua organisasi militer ini dibubarkan pada tanggal 16 Agustus 1945 supaya tidak bergerak mencapai Indonesia merdeka. Anggota organisasi yang dibubarkan Jepang itu disuruh pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan persenjataan. Bekas anggota khusus *Gyugun* dan *Heiho* yang terdapat di Bengkulu juga disuruh pulang ke kampung masing-masing.

Nawawi manaf adalah salah satu dari anggota *Gyugun* dan *Heiho*. Ia menunggu saat-saat yang baik untuk mengambil langkah yang tepat ke arah usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin yang didengar suaranya, Nawawi Manaf meminta kepada teman-temannya anggota *Gygun* dan *Heiho* agar jangan mau dibubarkan Jepang. Tujuan Jepang sudah jelas agar supaya anggota organisasi itu tidak bergerak dan menggalang kekuatan. Nawawi Manaf menginstruksikan supaya tetap tinggal di asrama masing-masing dan siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Seruan Nawawi Manaf tersebut ditanggapi oleh anggota *Gyugun* dalam dua perspektif; pertama, menerima dan yakin bahwa mereka bisa menjadi kekuatan yang besar. Kedua, mereka tidak yakin bahwa kemerdekaan akan terjadi. Akan tetapi yang lebih penting bagi mereka adalah bisa pulang ke rumah yang telah lama ditinggalkan dan sangat merindukan kampung halaman. Sementara itu, di tingkat nasional masih diupayakan bagaimana mempersiapkan rancangan kemerdekaan yang

akan diwujudkan. Tokoh-tokoh Indonesia membicarakan tentang kemerdekaan yang pernah dijanjikan Jepang kepada Indonesia.<sup>92</sup>

Nawawi Manaf mencoba untuk menyelamatkan aset-aset Indonesia yang ditinggalkan Jepang. Aset-aset tersebut di antaranya yaitu gudang beras dan gudang senjata Jepang yang terdapat di Bengkulu. Nawawi Manaf mengusahakan supaya aset itu diserahkan kepada rakyat Bengkulu. Keinginan dari Nawawi Manaf dapat disetujui oleh pejabat Jepang. Keberhasilan ini adalah akibat hubungan baik antara Nawawi Manaf dan Jepang. Akan tetapi, baik Jepang maupun Nawawi Manaf tidak ingin hubungan baik itu diketahui oleh Sekutu. Yang penting bagi Jepang adalah adanya satu jaminan keamanan dari rakyat Bengkulu.

Sementara itu anggota *Gyugun* memang sudah terlalu rindu pada keluarganya di kampung. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, mereka langsung menuju rumah masing-masing. Akibatnya, asrama *gyugun* menjadi kosong dan hanya tokoh-tokoh Bengkulu yang masih bertahan, di antaranya Nawawi, Berlian dan Safii Ibrahim. Mereka menunggu kesempatan yang baik untuk mengambil gudang beras dan senjata yang diserahkan Jepang. Kedua gudang itu ternyata sangat berguna bagi Nawawi Manaf dan teman-temannya di Bengkulu.<sup>93</sup>

Detik-detik proklamasi kemerdekaan akhirnya datang juga. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Sukarno – Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 terdengar sampai ke Bengkulu, pemuda-pemuda Bengkulu langsung menyusun tenaga perjuangan dan membentuk kesatuan-kesatuan laskar dan tentara yang bergerak di garis depan. Mereka menjadi kekuatan utama dalam mengisi kemerdekaan dan siaga untuk menghadapi bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia kembali.

## 2. Detik-Detik Kemerdekaan

Akhirnya kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kaum pergerakan selama puluhan tahun untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, yaitu Republik Indonesia, sekarang telah tiba. Peristiwa yang maha penting itu terjadi pada hari Jum'at di Bulan Ramadhan, tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Sukarno – Hatta, proklamator, atas nama bangsa Indonesia, membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dalam sebuah acara resmi yang sederhana. Pembacaan teks proklamasi itu sendiri hanya berlangsung

---

<sup>92</sup> Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 134.

<sup>93</sup> Nawawi Manaf, "Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu", *Diktat*, Tidak diterbitkan, Bengkulu : 30 Oktober 1979, hal. 5.



sekian detik. Namun upaya untuk mencapai detik-detik pembacaan teks itu dan konsekuensi yang ditimbulkan berikutnya, mengandung konsekuensi dan persoalan-persoalan yang maha berat.

Sangat sulit untuk dapat membayangkan bagaimana mayoritas penduduk Indonesia yang masih buta huruf di zaman proklamasi itu mampu menerima dan mencemakan kata “Indonesia” sebagai kata ganti “Hindia Belanda”, kata “merdeka” sebagai kata ganti “penjajahan” dan kata-kata “teman-teman seperjuangan dan setanah air” sebagai kata ganti “inlander” (pribumi – dengan konotasi penghinaan, sebab bukankah di hampir setiap tempat hiburan dan kolam renang tuan “*Meneer Belanda*” dengan enteng bisa membuat pengumuman *honden en inlander verboden* – anjing dan pribumi dilarang masuk!) dan seterusnya.<sup>94</sup>

Rakyat Bengkulu menerima berita itu dengan suka cita dan harapan supaya ada perubahan nasib dari kondisi negara terjajah menjadi negara merdeka. Berita itu pada mulanya disampaikan oleh Ali Hanafiah kepada Nawawi Manaf. Menurutnya kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan oleh Sukarno – Hatta. Ali Hanafiah telah menghubungi dan berkoordinasi dengan Adinegoro untuk meminta petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mempersiapkan segala sesuatu di Bengkulu. Sementara itu, Nawawi Manaf menghubungi Gubernur Jepang Suchokan Inumata dan wakilnya untuk menyampaikan perkembangan situasi dan berita proklamasi. Para pembesar Jepang memaklumi berita yang disampaikan Nawawi Manaf dan menyarankan kepada Nawawi Manaf agar rakyat Bengkulu turut memelihara keamanan di sekitar Bengkulu. Tuntutan Nawawi Manaf kepada tentara Jepang adalah meminta bantuan makanan dan senjata dalam memelihara pasukan yang berjaga di garis depan.<sup>95</sup>

Para pemimpin di Propinsi Bengkulu mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan ide-ide proklamasi dan perjuangan kepada rakyat mereka. Tak dapat disangkal lagi, bahwa proklamasi berikut persoalan-persoalan yang menyertainya mengandung titik gawat yang luar biasa. Periode ini, khususnya masa antara kekalahan Jepang dengan kedatangan Sekutu bulan Oktober 1945, adalah periode yang paling menegangkan. Proklamasi pada gilirannya menuntut keberanian dan kesediaan pengorbanan jiwa dan raga, darah dan air mata serta beban psikologis dan material yang tidak terperiikan.

---

<sup>94</sup> Dikutip dari Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle*. PDRI, Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan, (Jakarta : Grafiti, 1997), hal. 13.

<sup>95</sup> Nawawi Manaf, “Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu”, *Diklat*, tidak diterbitkan, Bengkulu : 30 Oktober 1979.

Rentetan peristiwa-peristiwa dramatis, yang mengiringi kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945, disusul dengan berita yang maha penting tentang proklamasi berada di luar jangkauan pengetahuan publik di Sumatera. Pada hari yang sama, tiga orang wakil Sumatera diberangkatkan Jepang ke sidang PPKI di Jakarta.<sup>96</sup> Mereka adalah Mr. T. Moh. Hasan,<sup>97</sup> dr. Moh. Amir<sup>98</sup> dari Medan dan Mr. A. Abbas dari Lampung. Dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan; Sukarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden R.I.; Undang-Undang Dasar ditetapkan. Sumatera ditetapkan sebagai salah satu dari 8 propinsi di Indonesia, dan Mr. T.M. Hasan ditunjuk sebagai Gubernurnya, yang berkedudukan di Medan.<sup>99</sup>

Beberapa hari kemudian, berita tentang kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 masih berada dalam desas-desus di kalangan

---

<sup>96</sup> PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk tidak lama sebelum proklamasi, merupakan sebuah panitia kerja yang untuk menjalankan program yang dirumuskan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk atas restu Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. Anggota PPKI meliputi utusan daerah-daerah di Indonesia. Tiga tugas pokok mereka adalah untuk melaksanakan keputusan hasil sidang PPKI di daerah ahila (1) Pembentukan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) yang akan bertindak menjalankan peranan Dewan Perwakilan Rakyat sementara di setiap daerah. (2) Membentuk organ (badan) pemerintahan di daerah-daerah lewat KNID; (3) Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai tenaga keamanan dan sekaligus dipersiapkan sebagai cikal bakal "tentara kebangsaan" (istilah dari sumber). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI), 28 Mei – 22 Agustus 1945, (Jakarta : Diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI, 1995), khusus Lampiran Bagian II, hal. 404-512.

<sup>97</sup> Mr. Teuku Muhammad hasan lahir tahun 1906 adalah anak *ullebalang* Pidie, Aceh. Memperoleh gelar sarjana hokum (Mr) dari Leiden. Tahun 1938 bekerja pada kantor Gubernur Sumatera di Medan. Pada awal proklamasi menajdi salah seorang utusan Sumatera ke sidang PPKI di Yakarta, kemudian menjadi Gubernur Sumatera yang pertama.

<sup>98</sup> Dr. Amir (1901-1949) lahir di Talawi, sumatera Barat, menyelesaikan kuliahnya di kedokteran STOVIA (1918-1923), kemudian melanjutkan pada bagian psikiater di Utrecht (1924-1928). Sejas masa mahasiswa, ia sudah menjadi penulis 'essay' dan pernah menjadi editor "Peninjauan", Bulletin "Jong Sumatera". Meskipun istrinya adalah seorang Belanda, ia adalah simpatisan Partai Parindra Sejas sebelum perang. Pindah ke Medan tahun 1934, di sana ia bekerja sebagai dokter pribadi Kesultanan Langkat, Sumatera Timar. Ia adalah salah seorang tokoh Sumatera yang Sangat dihargai Jepang terutama karena hubungannya dengan kaum pergerakan, dan Kesultanan Deli. Pada awal revolusi pernah diangkat sebagai Deputy Gubernur Hasan, dan Menteri Negara tanpa "portafolio".

<sup>99</sup> *Risalah Sidang Padan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI), 28 Mei – 22 Agustus 1945, (Yakarta : Diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI, 1995), Khusus Lampiran Bagian II, hal. 404-512. Lihat juga Mohammad Jamin (1959), 451-2.

warga kota. Begitu juga berita yang maha penting sesudahnya, yaitu proklamasi kemerdekaan RI. Semua ini masih berada di luar jangkauan pengetahuan publik, kecuali di kalangan segelintir pemimpin. Jepang sengaja menutup-nutupi berita kekalahannya. Untuk sebagian disebabkan karena takut akan aksi balas dendam rakyat terhadap mereka. Sebagian lain karena Jepang waktu itu terikat dengan perintah mematuhi instruksi Sekutu agar tetap menjaga *status quo*, dalam arti tidak menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Indonesia, di samping tugas dan tanggung jawab keamanan.

Namun demikian, para pemimpin di provinsi Bengkulu lebih siap menyambut proklamasi kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Mengapa Bengkulu merasa lebih siap menyelesaikan persoalan-persoalan kritis yang dihadapi Indonesia umumnya dan Sumatera khususnya pada hari-hari pertama proklamasi? Salah satu alasannya adalah, bahwa pada awal proklamasi, kebanyakan daerah di Sumatera,<sup>100</sup> dan bahkan juga tidak terkecuali di Jakarta sendiri,<sup>101</sup> terlihat dengan konflik intern dalam kepemimpinan Republik. Benturan-benturan akibat perubahan radikal pada awal proklamasi ternyata telah menimbulkan kekacauan politik di mana-mana. Hal ini tidaklah terjadi di Bengkulu. Dengan demikian para pemimpin Bengkulu dapat dan mampu mengambil inisiatif sendiri.

Kemampuan para pemimpin Bengkulu untuk bertindak lebih cepat dan terbuka dalam upaya mereka mendirikan Pemerintahan Republik yang berpusat di kota Bengkulu. Hal ini dimungkinkan adanya beberapa faktor, antara lain karena lemahnya kekuatan Jepang di daerah ini, sehingga penguasa “orde lama” yang telah kalah itu merasa enggan mencegah tindakan-tindakan pemuda Republik yang bersatu padu di

---

<sup>100</sup> Tentang gambaran umum mengenai revolusi di Sumatera lihat Anthony Reid, “The Birth of The Republic in Sumatera”, *Indonesia*, 12 (Okt. 1971), hal. 31 ff; Lihat juga kumpulan studi tentang revolusi di berbagai daerah oleh Audrey Kahin (ed.), *Regional dynamics of the Indonesian Revolution*. Honolulu, University of Hawaii Press, 1985, pp. 145-176. Palembang khususnya lihat Mestika Zed, “Persaingan dan Aliansi. Peranan Kepialangan dalam Revolusi Indonesia di Palembang, 1945-1950”, *Prisma*, No. 6 (1993), hal. 23-46.

<sup>101</sup> Jakarta tentunya merupakan kasus khusus mengingat kedudukannya sebagai ibukota pemerintahan sejak zaman kolonial, dan kedudukan Republik di sana sejak awal proklamasi sangat rawan. Bahkan telah terjadi konflik antara pemuda dan kalangan tokoh senior menjelang proklamasi. Lagi pula ancaman kekuasaan Jepang dan kemudian Sekutu telah mengakibatkan situasinya menjadi panas sehingga rapat-rapat umum baru bisa diadakan jauh belakangan setelah proklamasi, seperti yang tampak, misalnya, dari rapat akbar di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Monas) pada 19 September 1945. Lihat Robert B. Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949*, terjemahan, (Jakarta : Grafiti, 1990).

kota ini.<sup>102</sup> Di samping itu juga karena ketakutan mereka terhadap sasaran balas dendam rakyat setempat. Lebih-lebih lagi karena suasana yang tidak menentu menjelang kejatuhannya, maka tentara Jepang di beberapa daerah malah tidak berani melaksanakan perintah Sekutu untuk mencegah aksi-aksi pemuda dalam gejolak revolusi.

Jepang segera mengungsikan tentaranya di daerah-daerah pedalaman ke kota tanpa mau memberi tahu penduduk bahwa perang telah selesai. Meskipun demikian, tentara Jepang juga tidak begitu membantu dan sangat sedikit senjata yang diserahkan kepada orang Indonesia di Bengkulu dibandingkan dengan yang mereka lakukan di Jawa. Ini kemudian menjadi faktor pemicu dalam aksi-aksi penyerangan pemuda merebut senjata Jepang.

Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sampai di Bengkulu tidak serentak dan dengan bermacam-macam cara. Di kota Bengkulu pada minggu keempat bulan Agustus 1945 tersiarlah berita dari mulut ke mulut tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu, tetapi kepastiannya belum ada, karena tidak ada penjelasan apa-apa. Segera setelah berita yang jelas diterima, tanpa ragu-ragu sedikit pun rakyat di tempat masing-masing bergerak menurut caranya sendiri-sendiri tanpa menunggu instruksi, petunjuk dan lain-lain dari mana pun. Mereka berkumpul membuat kelompok-kelompok, menyiapkan sendiri segala sesuatu yang diperlukan, terutama senjata-senjata yang ada pada mereka, mengatur penjagaan-penjagaan dan bersiap-siap untuk dapat menghadapi segala kemungkinan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah merangsang jiwa dan raga, mereka yang telah lama menanggung derita karena angkara murka, untuk mengobarkan api yang senantiasa membara, yang hanya menunggu kesempatan tiba. Genderang perang telah dibunyikan, bendera perlawanan telah dikibarkan, maka berduyun-duyunlah seluruh bangsa Indonesia terjun ke medan perang untuk membela hak pusaka.<sup>103</sup>

Berita yang sampai di kota Manna dibawa untuk pertama kali oleh Buldani Masik, seorang bekas komandan regu Senapan Mesin Berat (M 23) di Markas Besar *Gyugun* di Pagaralam (*Gyu Dai Tai Honbu*). Pada tanggal 30 Agustus 1945 diadakan musyawarah dengan

---

<sup>102</sup> Jumlah tentara Jepang di Sumatera adalah sekitar 75.680 orang pada akhir September 1945. Hanya terdapat 26.000 tentara Jepang di Sumatera Selatan (Palembang, Lampung dan Bengkulu) pada saat mereka mendarat pada pertengahan Oktober. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan yang terdapat di Sumatera Tengah yang hanya berjumlah 12.500 orang tentara Jepang. Laboran yang ditanda tangani oleh Mayor General A.I. Spits (Gubernur, Chief C.O. Amacab Sumatera), Bengkulu 17 Januari 1946, hal. 39, *Algemene Secretarie Batavia, Tweede Zending*.

<sup>103</sup> *Ibid.*

para bekas *Gyugun* dan *Heiho* yang waktu itu berada di kota Manna dan sekitarnya. Hasil dari pertemuan itu terbentuklah satu organisasi yang diberi nama Pembela Tanah Air. Susunan dan personalia dari organisasi yang baru terbentuk ini adalah sebagai berikut : Bertindak sebagai ketua ditunjuk Buldani Masik; Sebagai Wakil Ketua ditunjuk Merahnuddin Taya; kemudian yang menangani bidang politik ada tiga orang yaitu Haji Abdul Said, Ismail Rahman dan Barsian.

Kemudain yang menjadi pembantu-pembantunya yaitu Jahiddin, Ubadi, Jakfar Semau, M. Taha, Umar Gafur, Maskasa, Tajuddin Sabri, Tahir Yahya, Tukiran, Sulik, Chalik Bangsa, Mustafa Padang Guci, Suul Senapan, Zakaria Mahyat, Hamzah Juria, Rani Tahir, Yusirana, Majid Padang Manis Jeranglah, Junusi dan lain-lain.

Pada tanggal 3 September 1945 salah seorang bekas pimpinan dalam *Gyugun* bernama Rahim Damrah datang dari kota Palembang dan menginap di rumah Hadis Lani di Bengkulu. Yang bersangkutan membawa dua lembar surat kabar "*Palembang Shinbun*", yang terbit di kota Palembang. Satu lembar diberikan kepada Hadis Lani. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terdapat di dalam surat kabar menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Hadis Lani memegang surat kabar itu dan mencari hubungan seperlunya terutama dengan kawan-kawan bekas pemimpin-pemimpin *Gyugun* dan *Heiho* yang diperkirakan berada di kota Bengkulu. Mulai saat ini terjadilah kesibukan-kesibukan yang tidak henti-hentinya siang dan malam, selanjutnya secara beranting berita tersebut disampaikan ke seluruh pelosok kota Bengkulu dan sekitarnya. Lebih jelas lagi persoalannya setelah diterima kawat dari Adinegoro, Bukittinggi tanggal 5 September 1945, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan Antlantic Charter, San Fransisco, berkenaan dengan maklumat Sukarno – Hatta tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Kibarkanlah di seluruh Sumatera di hari Raya Mulia ini Merah Putih saja. Lambang agama dan raja-raja Sumatera dibolehkan. Keamanan sempurnakan. Selamat Hari Raya. Selamat merdeka."

Adinegoro

5 - 9 - 45

Rakyat Bengkulu menerima berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan rasa sukacita dan harapan supaya ada perubahan kondisi Negara terjajah menjadi merdeka. Berita itu pada awalnya disampaikan oleh Alihanafiah kepada Nawawi manaf. Menurutny

kemerdekaan Indonesia telah diproklamsikan oleh Sukarno – Hatta. Ali Hanafiah telah menghubungi dan berkoordinasi dengan Adinegoro untuk meminta petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mempersiapkan segala sesuatu di Bengkulu.<sup>104</sup>

Sementara itu, Nawawi Manaf menghubungi Gubernur Jenderal Jepang Suchokan Inumata dan wakilnya untuk menyampaikan perkembangan situasi dan berita proklamasi. Para pembesar Jepang memaklumi berita yang disampaikan oleh Nawawi Manaf dan menyarankan kepada Nawawi Manaf agar rakyat Bengkulu turut memelihara keamanan di sekitar Bengkulu. Tuntutan Nawawi Manaf kepada tentara Jepang adalah meminta bantuan makanan dan senjata dalam memelihara pasukan yang berjaga di garis depan.<sup>105</sup>

Kelebihan pribadi Nawawi adalah bisa mempertahankan hubungan baik dengan Jepang, meskipun kondisi Jepang sudah sangat terjepit. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat ketika pada tanggal 20 Agustus 1945 Jepang memberitahukan kepada Nawawi manaf bahwa pasukan Sekutu akan datang ke Bengkulu. Pejabat Jepang yang menyampaikan informasi bernama Inumata. Ia menyarankan supaya Barlian, Syaffi Ibrahim, dan Nawawi Manaf menyingkir dulu ke Tanjung Sakti untuk menyelamatkan diri. Sambil mengungsi, mereka berusaha untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari Jakarta atau Bukittinggi sebagai pusat berita nasional. Sementara itu Ali Hanafiah mengabarkan kepada Nawawi Manaf bahwa di Jakarta telah terjadi gerakan massa pendukung kemerdekaan dengan melakukan rapat – rapat. Ali Hanafiah tidak menyarankan supaya Nawawi Manaf tetap berkomunikasi lancar dengannya meskipun mengungsi jauh di Tanjung Sakti. Pengungsian Nawawi Manaf di Tanjung Sakti berlangsung selama lima hari. Kebetulan di sana ada rumah milik Barlian sendiri yang juga teman seperjuangannya. Selama berada di pengungsian Nawawi Manaf di Tanjung Sakti, ali Hanafiah tetap mengirimkan berita ke Tanjung Sakti. Berita terakhir yang dikirim ke sana adalah supaya Nawawi manaf lekas kembali ke Bengkulu untuk menyusun kekuatan Pemuda dalam menyambut kemerdekaan yang telah diproklamirkan.

Aktivitas pemimpin Indonesia di Jakarta diikuti pula oleh pemimpin di daerah. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan modal dasar untuk memulai Indonesia baru yang diidam-idamkan sejak zaman penjajahan.

---

<sup>104</sup> M.Nur, dkk., *Nawawi Manaf Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, (Madang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Madang, 2003), hal. 17.

<sup>105</sup> Nawawi Manaf, “Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu”, *Diklat*, Tidak diterbitkan, Bengkulu, 30 Oktober 1979.

Proklamasi Indonesia adalah suatu momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai pengumuman ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Sebaliknya, proklamasi adalah suatu pengumuman pula bahwa tidak ada lagi hak bangsa asing untuk menjajah Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh belanda dan jepang. Informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang telah diumumkan oleh Sukarno – Hatta tidak menyebar ke seluruh Indonesia secara merata. Daerah-daerah yang menerima berita itu dalam waktu yang berbeda.<sup>106</sup> Ada daerah yang mendapatkan berita itu secara langsung dan ada pula yang mendapatkan dari daerah lain. Bahkan ada suatu daerah mendapatkan berita dalam waktu yang lebih panjang yakni sekitar sebulan kemudian. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua daerah mempunyai alat komunikasi yang baik. Salah satu daerah yang dapat menerima berita Proklamasi secara baik adalah Bengkulu. Berita Proklamasi yang diterima oleh masyarakat Bengkulu disambut dengan riang gembira tanpa ragu-ragu. Mereka bersyukur dan berusaha mempertahankan kemerdekaan itu menurut caranya masing-masing. Salah satu langkah konkrit mereka adlah memberitahukan saudara-saudara mereka yang berada di daerah pedalaman. Tekad mereka adalah membela kemerdekaan untuk mempertahankan Proklamasi dan seluruh daerah harus menikmati kemerdekaan itu. Mereka menyusun kekuatan dan barisan mempertahankan Proklamasi dengan memanfaatkan sisa-sisa anggota *Gyugun* pada masa Jepang.

Para tokoh masyarakat Bengkulu mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana menyusun barisan dengan mengikut-sertakan seluruh rakyat. Nawawi Manaf dan kawan-kawan berusaha untuk membangkitkan semangat rakyat Bengkulu supaya turun tangan untuk membela kemerdekaan melalui perjuangan fisik dan mental. Nawawi Manaf dan kawan-kawan menyadarkan rakyat bahwa penderitaan dan penyiiksaan Belanda dan Jepang telah berakhir.

Salah satu yang sangat penting dibangun masyarakat adalah menciptakan pemerintahan yang formal dan menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Sambil mempersiapkan sistem pemerintahan untuk mengatur Negara, maka rakyat pun harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Nawawi Manaf menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ia membagi tugas kepada seluruh tokoh Bengkulu tentang penyampaian berita Proklamasi ke daerah-daerah di sekitar Bengkulu, seperti manna, Muko-Muko, Curup, Lais, Tais, Kepahyang dan sebagainya. Tokoh yang membawa kabar ini ke kota

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

Manna adalah Buldani Masik. Ia adalah tokoh yang ahli dalam mengangkat senjata, terutama senapan mesin berat (M 23).

Masyarakat Manna (Bengkulu Selatan) sangat bersukacita mendengar berita proklamasi. Mereka langsung mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat Manna lainnya. Musyawarah mengambil keputusan untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Pembela Tanah Air. Struktur organisasi ini adalah sebagai berikut : Ketua Buldani Masik, Wakil Ketua Merahnuddin Taya, Bidang Politik Haji Abdul Sahid, Ismail Rahman dan Barsian. Selain itu dibentuk pula Pembantu Pembela Tanah Air. Selain melalui Radio Republik Indonesia (RRI), berita proklamasi juga didapat kan masyarakat Bengkulu melalui surat kabar. Media ini didapatkan melalui salah seorang bekas pimpinan dalam *gyugun* bernama Rahim Damrah. Ia dengan sengaja mengantarkan surat kabar itu ke Bengkulu, yaitu surat kabar "Palembang Shinbun". Surat kabar itu diberikan Rahim Damrah kepada Hadis Lani. Selanjutnya Hadis Lani membagi berita kepada kawan-kawannya di sekitar Bengkulu. Masyarakat Bengkulu menyampaikan berita itu ke pelosok kota Bengkulu dan sekitarnya. Sealnjutnya mereka mulai sibuk untuk mempersiapkan pemerintahan yang mendesak. Berita selanjutnya diterima oleh masyarakat Bengkulu melalui kawat yang dikirim oleh Adinegoro dari Bukittinggi pada tanggal 5 September 1945, yang mengucapkan selamat merdeka dan agar supaya mengibarkan bendera merah putih.<sup>107</sup>

Sementara itu, kondisi Bengkulu belum bersih betul dari ancaman tentara Jepang. Mereka masih mempunyai senjata untuk menyerang rakyat secara mendadak. Meskipun tentara Jepang mempunyai senjata lengkap, namun masih kuatir atas kekuatan rakyat Bengkulu yang bersenjata ala kadarnya. Modal semangat persatuan yang mereka miliki menjadi tenaga yang potensial untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang datang. Rakyat Bengkulu telah yakin bahwa tentara Jepang tidak berpengaruh terhadap apa pun dan tidak berdaya auntuk bangun kembali. Emosi rakyat Bengkulu yang meluap-luap menimbulkan keberanian yang luar biasa. Mereka sangat menjunjung instruksi dari pusat dan melambaikan Sang Merah Putih di mana-mana. Suasana kegembiraan ini terlihat juga di rumah-rumah penduduk Bengkulu. Bahkan semua aktivitas sehari-hari, baik di rumah, di jalanan dan sebagainya diwarnai dengan merah putih.

Masyarakat Bengkulu berusaha untuk menggalang kekuatan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka melakukan musyawarah kembali untuk mencari kata sepakat.

---

<sup>107</sup> M. Nur, dkk., hal. 18.



Musyawarah tersebut dipimpin oleh A. Rusdi. Kegiatan mereka itu selalu dikontrol oleh Jepang. Dalam suasana seperti itu, sebenarnya sudah tidak ada lagi hak tentara Jepang untuk mengawasi aktivitas rakyat Bengkulu. Namun Jepang tetap mengawasi melalui kaki tangannya dan bekerja sama dengan orang-orang tertentu. Pertemuan bersifat alot dan semua peserta memberikan pendapatnya dalam diskusi untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia. Setelah pertemuan selesai dilanjutkan dengan menghimpun semua tenaga yang terdapat di lapangan, baik sebagai tentara, petani, pedagang, pemuda, pelajar dan kekuatan lainnya untuk bergabung dalam kesatuan bersenjata. Secara spontan rakyat ambil bagian dalam menyusun kekuatan. Tanpa ragu sedikitpun mereka terjun ke medan juang demi membela nusa dan bangsa.<sup>108</sup>

Meskipun telah ada antisipasi dari rakyat Bengkulu untuk membentuk kekuatan organisasi, namun belum semua daerah di Bengkulu yang telah menerima informasi kemerdekaan itu. Masih ada rakyat yang mendapat berita secara sepotong-sepotong. Bahkan mereka mendapatkan informasi dari mulut ke mulut. Kebebasan telah merangsang jiwa dan raga untuk hidup lebih tenang dan melupakan masa lalu yang pahit.

Suatu kota kecil sebelum Curup terdapat Kepahyang, kota yang sejuk karena terletak di punggung Bukit Barisan. Berita proklamasi yang didapatkan di kota ini adalah melalui M. Yunus seorang mantan *Pasirah/Gyu Syoi* dari Pagaram. Berita itu disebarkan ke seluruh Kepahyang sehingga seluruh rakyat bisa mengetahui berita itu. Rakyat Kepahyang memanfaatkan berita tersebut. Mereka menyusun kekuatan untuk menghadapi kedatangan tentara Sekutu. Para tokoh masyarakat dan pejuang Kepahyang muncul sebagai pendobrak dan berada di garis depan. Mereka pun berkoordinasi dengan para pejuang yang berada di Bengkulu dan daerah lainnya sehingga terbentuk perencanaan untuk menyerang musuh secara serentak. Akan tetapi yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana memanfaatkan momen proklamasi dan menikmatinya. Sebagai tnda sukacita yang mendalam mereka mengibarkan bendera merah putih di setiap pelosok.<sup>109</sup>

Penyambutan kemerdekaan di Bintuhan dan sekitaryapun dimanfaatkan oleh para tokoh setempat. Di antara mereka yang aktif di beberapa daerah di sekitar Bengkulu adalah Syamsul Bahrin, Ali Hanafiah, Nahip, Kenadi dan lain-lain. Seluruh masyarakat Bengkulu

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>109</sup> Iim Imaduddin, dkk., *Masa Revolusi di Bengkulu 1945-1950*, (Padang : Inventarisasi Sumber-Sumber Sejarah Lisan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang , 2002), hal. 31.

dapat dikoordinasi oleh Nawawi Manaf secara serentak. Ada berbagai bentuk pernyataan syukur rakyat Bengkulu terhadap kemerdekaan, di antaranya diwujudkan dengan penghiasan desa, sosialisasi dan sebagainya. Semua yang disebutkan tadi membuat lingkungannya sendiri-sendiri menjadi bergairah baik desa maupun di kota. Perubahan wajah desa dan kota dalam menyambut kemerdekaan berjalan secara spontan tanpa instruksi dari siapapun. Masyarakat yang telah membentuk kelompok-kelompok perjuangan diberi persenjataan ala kadarnya dan akhirnya menjadi pasukan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR).

### 3. Mobilisasi Umum

Pada waktu itu tentara Jepang di Bengkulu masih bersenjata lengkap, meskipun mereka tidak berkuasa lagi. Rakyat menyambut proklamasi dengan semangat yang meluap-luap. Mereka tidak lagi memperdulikan tentara-tentara Jepang, seolah-olah dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu terkikis habislah semua “kengerian” mereka, malahan timbul keberanian yang kadang-kadang sukar dapat dikendalikan. Segera terlihat Sang Merah Putih mulai berangsur-angsur dipasang oleh rakyat di depan rumahnya masing-masing. Selain dari itu para pemuda memasang lencana merah putih di kopyah dan di dada, mobil-mobil memasang bendera kecil, demikian pula delman-delman dan gerobak-gerobak juga memasang bendera kecil. Pekik “merdeka” terdengar di mana-mana, bersahut-sahutan sambil mengacungkan tinju ke atas.

Atas inisiatif beberapa orang bekas perwira *Gyugun* yang sedang berada di kota Bengkulu, maka pada tanggal 7 September 1945 diadakan pertemuan dengan beberapa orang bekas *Gyugun* dan *Heiho* yang telah dihubungi. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sebuah rumah, yang terletak berdekatan dengan Mesjid Jami', kota Bengkulu (sekarang Jalan Let. Jen. Suprpto No. 222 Bengkulu). Yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain : Zahari Tani, Hadis Lani, Innuh Mustafa, Ismail Rani, R. Iskandar, A. Rusdi, M.Z. Ranni, Tahir Akib, Anas Marzuki, Tarmizi, Zikri Ja'far, Badrun, Sami Jafar, Ilyas Khalik dan lain-lain.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh yang tertua yaitu A. Rusdi. Meskipun selama pertemuan itu telah dibayang-bayangi dan diintip oleh petugas-petugas yang masih setia kepada Jepang, namun pertemuan dapat berjalan dengan tenang sampai selesai. Tidak terlihat rasa gelisah dari mereka yang hadir dan setiap orang ikut berbicara. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Ummar Said dan Cipto yang baru saja datang

dari Palembang. Berdasarkan uraian yang telah mereka berikan dan kesimpulan dalam pertemuan tersebut, maka pertemuan telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Secepat mungkin menghubungi bekas *Gyugun, Heiho* dan pemuda-pemuda lainnya untuk membentuk barisan-barisan bersenjata.
2. Bergerak dengan cepat, tepat dan semua resiko ditanggung sendiri.
3. Mengadakan pertemuan lengkap pada tanggal 10 September 1945 untuk menyusun organisasi.

Apa yang telah diputuskan dalam pertemuan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran, keinsyafan dan tanggung jawab, mengingat apa yang akan dihadapi bukanlah soal yang kecil dan remeh, sebab akan menentukan nasib bangsa selanjutnya.

Untuk mendapatkan berita-berita dari luar daerah, kantor kawat merupakan satu tempat yang sangat penting pada waktu itu. Peranan R. Hadi dan kawan-kawannya, yang menjadi pegawai di tempat itu sangat menentukan. Meskipun kantor tersebut masih ketat diawasi Jepang, namun mereka dapat melakukan tugas yang diserahkan kepada mereka dengan baik. Hubungan-hubungan dapat dilakukan dengan Padang dari tempat tersebut, seperti Bukittinggi, dan tempat lain seperti Palembang dan Bandung, sehingga berita-berita dari luar daerah diterima dengan baik.

Waktu berjalan dengan sangat cepat dan situasi pun makin hari makin meningkat. Pada tanggal 10 September 1945 menyusul pertemuan yang kedua sebagaimana yang telah diputuskan bersama pada pertemuan tanggal 7 September 1945. Pertemuan kali ini mengambil tempat di rumah Nawawi Manaf di Jalan Pintu Batu. Yang hadir pada waktu itu bertambah banyak, antara lain yaitu Nawawi Manaf, Rivai Aris, Umar Kader, Rezak Ishak, M.Z. Ranni, Kiagus M. Toha, R. Hadi, Syafei Ibrahim, A. Rusdi, Hadis Lani, Zahari Tani, Imuh Mustafa, Ismail Ranni, Tarmizi, Zikri Za'far, Badrun, Sani Ja'far, Ilyas Khalik, Anas Marzuki, Zainul Gafur, Taher Akib, Hamid Lakena, Hamid Amat, Razali Hadi dan lain-lain.

Dalam pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Barisan Pemuda Indonesia dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut :

Ketua : Nawawi manaf  
 Wakil Ketua : M.Z. Ranni  
 Sektretaris : Hadis Lani  
 Wakil Sektretaris : Inuh Mustafa  
 Pasukan Rahasia : R. Iskandar  
 Ruang Penyelidik : Zahari Tani/Kiagus M. Toha, A. Abiddin Gafur  
 Perhubungan : R. Hadi  
 Kontak Biro : A. Rusdi  
 Pimpinan Pasukan : M. Syafei Ibrahim  
 dibantu oleh Badrun, Razali Hadi, Tarmizi, Zikri Ja'far, Hamid Amat, Hamid Lakena, Rivai Aris, Umar Kader, Rezak Ishak, Sani Ja'far, Anas Marzuki, Taher Akip, Ilyas Khalik, Inuh Mustafa, Ismail Ranni.

Setelah selesai pertemuan, semua yang telah mendapat tugas, pada saat itu harus memulai segala sesuatunya untuk tugas masing-masing. Pada tanggal 10 September 1945 di Curup, bertempat di rumah Nur Arifin berlangsung musyawarah dan pada saat itu pula terbentuk satu organisasi yang bernama BPRI (Barisan Perjuangan Republik Indonesia) dengan susunan personalia sebagai berikut : yang menjadi Ketua Umum Nur Arifin; Wakil Ketua Muchtar Latif; Bagian Propaganda Mas Sareh Baidin, Buchori Jacob dan Badaruddin Jamal; Sekretaris dijabat oleh Nawawi Bahusin; Bagian Pemuda ditunjuk empat orang yaitu Z. Anwar Duramin, Mustafa, Jacob Umar dan Syarif; Anggota Pengurus Syabirin Burhani, H. Kohar, A. Manaf Rahim dan A. Hamid Asfar.

Berita proklamasi di Kepahyang pertama kali dibawa oleh M. Yunus, mantan *Pasirah/Gyu Syoi* dari Pagaram. Segera pula tempat ini bergerak menyusun barisan di bawah pimpinan : Santoso Surioatmodjo, Murjadi Prijatmo, Zamhari Abiddin, M. Daud Mustafa, Rahman Rahim, Kiagus Abdullah, Ishak Taufik dan Syahriar Abiddin.

Tempat-tempat lain di dalam wilayah Bengkulu, terjadi hal yang serupa, masing-masing bergerak menurut inisiatif, kesempatan dan kemampuan setempat. Koordinasi untuk keseluruhannya belum terjadi. Namun seluruh daerah Bengkulu bergerak untuk menyambut Proklamasi.

Penyambutan Proklamasi di Bintuhan dan sekitarnya digerakkan oleh Ismail, Ali Hanafiah, Nahip dan Kenadi. Selanjutnya di Tais digerakkan oleh Husein dan di Kerkap oleh Abu Hanafiah; Di Lais oleh Amin Kaum, Syofyan Abureira, Umran Harun; Di Lebong Tandai oleh Usman Makruf; di Seblat oleh Aburazal; di Muko-Muko oleh Saidina Ali dan Majid; di Taba Penanjung oleh Sulaiman Wahab dan R.

Sulaiman. Di Muara Aman oleh A. Razik, Bachtiar S, Badaruddin Nasution. Di Kabawetan oleh M. Arif, M. Nud, Nur Sasdi, I. Singe. Di Perkebunan ini atas inisiatif dari M. Arif segera dibentuk Laskar Buruh dengan anggota 150 orang, yang langsung dipimpinnya sendiri. Setelah itu ia dibantu oleh M. Hud dan kawan-kawannya mengambil alih kekuasaan atas Perkebunan Kabawetan menjadi milik Republik Indonesia. Di kebun Agung oleh M. Thoib.

Semua yang disebutkan tadi membuat lingkungannya sendiri-sendiri, nama dan cara yang berbeda-beda, namun tujuannya satu, yaitu membentuk barisan-barisan untuk satu kekuatan dalam merebut, membela dan mempertahankan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di kota-kota saja, tetapi juga sampai ke marga-marga dan dusun-dusun pun dilakukan kegiatan serupa.

Sejak semula barisan-barisan ini didukung dengan segala spontanitas terutama dari para pemuda, pelajar, petani, pegawai, mantan *Gyugun/Heiho* dan sebagainya. Tidak berapa lama sebagian besar dari organisasi ini segera berkembang menjadi pasukan-pasukan bersenjata dengan nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR). Setiap orang yang bersedia menjadi anggota PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) terlebih dahulu mengucapkan sumpah. Adapun teks asli dari sumpah setia tersebut sebagai berikut :

### **Penjaga Keamanan Rakyat (PKR)**

“Saya bersumpah di bawah MERAH PUTIH, bahwa mulai hari ini jiwa saya kepunyaan REPUBLIK INDONESIA MERDEKA. Kalau saya mungkir maka Tuhan mengutuki saya serta KETURUNAN SAYA dunia akherat.

Nama .....

Dengan perkembangan ini maka organisasi-organisasi yang berbentuk barisan-barisan, disusun mendekati susunan di dalam ketentaraan :

Bengkulu kota dengan daerah tanggung jawab : Kota Bengkulu, Kawedanan Bengkulu dan Seluma, Kawedanan Lais dan Kawedanan Muko-Muko, dengan 4 (empat kompi yang tersebar di daerah ini di bawah pimpinan M. Safei Ibrahim, sedangkan susunan pengurus PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) seperti pada Barisan Pemuda Indonesia.

Manna dengan daerah tanggung jawab : Kewedanan Manna dengan pasukan berbentuk kompi di bawah pimpinan Buldani Masik dan wakilnya Meranuddin Taya. Sedangkan pengurus di bawah pimpinan Rahim Damrah.

Bintuhan dengan daerah tanggung jawab Kewedanan Kaur dengan pasukan berbentuk kompi di bawah pimpinan Syamsul Badrun.

Kepahyang dengan daerah tanggung jawab Kecamatan Kepahyang dengan pasukan berbentuk kompi di bawah pimpinan Zamhari Abiddin.

Curup dengan daerah tanggung jawab Kecamatan Curup dan Padang Ulak Tanding dengan pasukan berbentuk kompi di bawah pimpinan Z. Arifin Jamil. Muara Aman dengan daerah tanggung jawab Kewedanan Lebong dengan pasukan berbentuk kompi di bawah pimpinan A. Ranni Talib. Di perkebunan-perkebunan besar yang terdapat di daerah Bengkulu dibentuk laskar perkebunan terdiri dari karyawan-karyawan perkebunan.

Sebelum terbentuknya PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) di kota Bengkulu, terlebih dahulu diadakan suatu musyawarah di salah satu rumah di Pasar Tebek oleh sejumlah pemuda, yang pada awal Perang Pasifik bergabung dalam satu organisasi Pemuda Angkatan Baru (PAB). Di dalam musyawarah tersebut telah diambil satu keputusan, membagi tugas para pemuda. Sebagian dimasukkan ke dalam Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di bawah pimpinan Nawawi Manaf dan sebagian lagi masuk ke dalam organisasi yang dinamakan Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan Maurice Umar. Ke daerah-daerah kecamatan, marga dan dusun dikirim tim-tim untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terlebih-lebih lagi mengenai tugas beserta kewajiban yang harus dipikul oleh setiap Warga Negara Indonesia dan mengkongkritkan sepak terjang yang akan ditempuh.

Salah satu tim yang agak lengkap dikirim ke daerah Masmambang, mengingat di situ terdapat keadaan yang agak kurang serasi antara pimpinan kecamatan di tempat itu dengan pihak PKR (Penjaga Keamanan Rakyat). Pada permulaan keadaan itu nampaknya sangat tegang dan dapat berubah menjadi satu keadaan yang sukar dapat dikendalikan. Setelah diadakan musyawarah, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Persoalannya hanya terletak pada kekurangan pengertian dari kedua belah pihak.

Selanjutnya terjadi hal yang menggembirakan karena para pemuda di daerah ini dengan segala spontanitas meminta agar mereka dapat memperkuat PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) di kota Bengkulu. Dengan membawa sendiri segala keperluan dan perbekalan mereka masing-masing, berangkatlah sekitar 75 orang pemuda ke kota Bengkulu. Sebagian dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) Masmambang ini adalah bekas *Gyugun dan Heiho* dan secara kebetulan, salah seorang anggota tim yang berangkat ke Masmambang adalah salah seorang bekas pimpinannya

sewaktu masih dalam kesatuan *Gyugun* pada masa sebelumnya. Ikatan batin yang terjalin pada masa yang sudah-sudah nampaknya masih ada juga pengaruhnya.

Pada umumnya anggota PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) masih sangat muda belia, bahkan ada di antaranya yang masih duduk di bangku sekolah rendah. Demikian juga para pemimpin mereka yang jika dilihat dari segi umur belumlah pantas untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dibebankan kepada mereka. Tetapi apa boleh buat, karena Bangsa dan Tanah Air telah menghendaki.

Sekolah Jamiatulchair adalah markas yang pertama dari Barisan Pemuda Indonesia dan Penjaga Keamanan Rakyat di kota Bengkulu, sedangkan di depannya, rumah pribadi orang tua Hadis Lani merupakan dapur umum yang pertama. Pemuda Republik Indonesia di bawah pimpinan Maurice Umar mengambil tempat sebagai markasnya di gedung yang terletak di depan bekas sekolah MULO (kemudian sesudah pengakuan kedaulatan menjadi SGA). Setelah membanjirnya para pemuda untuk menjadi anggota PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) sehingga sekolah Jamiatulchair tidak cukup lagi, maka staf dan pimpinan PKR Bengkulu berpindah tempat ke sebuah rumah pribadi di depan Sekolah Taman Siswa di Tengah Padang. Sedangkan Sekolah Taman Siswa itu sendiri dipergunakan sebagai asrama. Kemudian tempat ini ditambah lagi dengan gedung KPM di Pondok Besi, Sekolah PPB di Anggut dan gudang-gudang di Pelabuhan Bengkulu.

Semua berjalan bukannya tanpa tantangan dan hambatan. Banyak ejekan dan cemoohan dari beberapa gelintir manusia, yang telah dapat merasakan hidup yang manis sebagai pembesar-pembesar di zaman Hindia Belanda dahulu dan nampaknya mengharapkan kembalinya Belanda ke Indonesia. Salah seorang pernah mengeluarkan ucapan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu hanya merupakan satu langkah politik dari Sukarnodan kawan-kawannya, yang diucapkan dalam bahasa Belanda (ucapan asli "*dat is maar een politieke zet van Sukarno en zijn kormuiten*"). Selanjutnya dengan tarikan muka yang sinis ia berkata lagi, "Sedangkan Jepang yang bersenjata lengkap masih kalah. Kita mau melawan dengan apa?" Selain dari itu, masih banyak terdapat bekas pegawai Jepang yang masih setia terhadap majikannya, seolah-olah mereka buta tuli terhadap keadaan sekitarnya.

Salah seorang yang masih menganggap dirinya sebagai anggota *Syu Sangi Kai* (semacam dewan daerah keresidenan) di Curup dalam salah satu rapat umum di gedung bioskop Curup menyatakan, bahwa ia tidak setuju dengan penaikan bendera Merah Putih. Bukan hanya sampai di situ, ia pun mengirim kawat kepada *Syucokang* (Residen Jepang) di

Bengkulu menanyakan tentang penaikan bendera Merah Putih, yang jawabannya tidak kunjung datang.

Di samping itu terdapat pula mereka yang “pintar” melihat dan menunggu ke arah mana angin baik berhembus, kemudian bergabung dengan pihak yang menguntungkan baginya dan akhirnya ikut keluar sebagai “pemenang” dan sebagai “pahlawan”. Jumlah mereka seperti yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil, hampir-hampir tidak dihiruk dan akhirnya lenyap dilanda “air bahnya” revolusi Kemerdekaan Indonesia. Pada hari ketiga Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 10 September 1945, di Curup baru berkibar 15 bendera Merah Putih.

Pada tanggal 15 Nopember 1945 PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) Bengkulu dijadikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Untuk seluruh Karesidenan Bengkulu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) hanya berbentuk satu Batalyon. Pemerintah Daerah Bengkulu mengangkat Santoso sebagai Komandan Batalyon TKR Karesidenan Bengkulu dengan pangkat Mayor. Susunan dari Batalyon Bengkulu hampir sama dengan susunan waktu masih PKR (Penjaga Keamanan Rakyat), hanya terjadi pergeseran dalam pimpinan : Komandan Batalyon dijabat oleh Mayor Santoso; Wakil Komandan oleh Nawawi Manaf; Kepala Stafnya adalah M.Z. Ranni; Kepala Sekretariat ditunjuk Hadis Lani. Sedangkan yang lainnya masih sama dengan susunan dalam PKR, demikian juga pimpinan-pimpinan PKR tiap-tiap tempat menjadi pimpinan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) setempat.

Untuk menjaga keamanan rakyat, Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk melakukan memobilisasi Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia. Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan jiwanya, bekas prjurit PETA, prajurit Hindia Belanda, dan *Heiho*, *Keigon Heiho*, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dan sebagainya, baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya lekas-lekas mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibukota Kabupaten masing-masing, atau pada badan lainnya yang ditunjuk oleh Residen (Kepala Daerah) atau wakilnya.

TKR di daerah Bengkulu ini agak terlambat sedikit terbentuk. Hal ini disebabkan kesibukan yang terdapat di daerah ini. Pelaksanaan pembentukan sendiri hanya didasarkan inisiatif setempat, garis yang menghubungkan secara hirarkis ke atas belum ada, sehingga untuk sementara Komandan Batalyon TKR adalah pimpinan tertinggi. Apa yang telah diatur di Palembang dan di Yogyakarta pada saat itu belum dilaksanakan di daerah Bengkulu. Yang telah diatur di sini hanya tugas



dan petugas-petugasnya seperti Komandan Kompi dan sebagainya. Jadi yang menjadi pedoman bagi para anggota TKR adalah para komandan dari bawah sampai ke atas atau para kepala menurut susunannya masing-masing. Walaupun belum ada pangkat-pangkat, namun hubungan antara yang dipimpin dengan yang memimpin berjalan baik, masing-masing ikhlas berada di tempatnya masing-masing.

Upaya untuk kekuatan segera disiapkan. Tidak kurang dari dua puluh ribu orang dalam sebuah barisan sepanjang 5 km bergerak di kota Curup. Sambil berteriak “Allahu Akbar” dan pekik “Merdeka” barisan terus bergerak mulai dari Pasar Bang Mego. Penangkapan Zainal Bakti menjadi pertanda kewaspadaan tentara Jepang di Curup semakin meningkat. Asrama Jepang dijaga ketat di bawah pengawalan serdadu-serdadu yang siap tempur.

#### **4. Konflik dengan Jepang**

Pada tanggal 10 September 1945 keluar maklumat dari Jepang, yang isinya mengatakan, bahwa Jepang masih tetap mengurus segala sesuatunya mengenai pemerintahan di daerah Bengkulu. Hal ini merupakan satu tekanan dari pihak Sekutu dengan keharusan berbuat seperti itu. Dengan keluarnya maklumat itu keadaan bukannya menjadi kendor, tetapi suasana malah terjadi sebaliknya. Menyusul maklumat tersebut, terlihat Jepang mengadakan patroli-patroli bersenjata lengkap dengan memakai tanda PM di lengan bajunya. Ada pihak-pihak tertentu, yang setia kepada “Ratu”, yang setelah residen Belanda Meyer menyatakan takluk kepada Jepang di Bengkulu, langsung berpihak dan setia pula kepada pemerintah Dai Nippon, kini pun setelah Jepang takluk, masih tetap tunduk di bawah kekuasaan sementara militer Jepang untuk menyerahkan pemerintahan di daerah Bengkulu kepada tentara Sekutu yang diperkirakan akan segera datang.

Kenyataan ini benar-benar pahit dan menegangkan bagi PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) yang masih muda belia, belum berpengalaman dan tidak bersenjata itu. Mereka harus berkelit dan berbuat sesuatu di bawah ancaman mesin perang Jepang yang masih utuh serta pihak-pihak tertentu seperti yang tersebut tadi. Tentara Jepang mendapat angin dengan harapan besar untuk mendapatkan “keringanan” sebagai penjahat perang dari pihak Sekutu, berbuat sebaik-baiknya. Jepang berkeliling kota di mana-mana untuk mengajak anggota-anggota PKR (Penjaga Keamanan Rakyat), untuk mengumpulkan anggotanya dengan teriakan, *pe ka er kumpul, pe ka er kumpul*” (PKR kumpul, PKR kumpul).

Kejadian dan peristiwa ini sangat penting artinya, karena bersamaan dengan maklumat Jepang tersebut dilakukan pula pemasangan secara menyolok potret “Sang Ratu”, yang sudah diharamkan oleh para pejuang kemerdekaan. Tempat pemasangannya sangat strategis di Lobi Hotel Centrum di tengah-tengah kota Bengkulu kepunyaan seorang Belanda bernama De Witt dan ditempat ini pula Residen Bengkulu Meyer menyerahkan tanpa syarat daerah Bengkulu beserta rakyatnya kepada Kolonel Kangki, pimpinan pasukan Jepang yang memasuki Bengkulu.

Tidak jauh dari tempat itu, terdapat tempat *Kenpeitai* Jepang dan tempat ini terang benderang disinari oleh lampu-lampu besar. Masyarakat yang lalu lalang di depan hotel tersebut dapat menyaksikan dengan jelas potret berukuran raksasa itu dari jalan raya. Segelintir manusia yang sejak awal mempunyai “harapan” lain mulai menepuk dada karena berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah “ilusi kosong”. Dengan sinis mereka berkata, “Siapa yang berani menurunkan gambar keramat yang dijaga oleh Singa dan Samurai ?!” selain dari itu, mereka berkeyakinan pula, bahwa Pemerintah Republik Indonesia di Bengkulu beserta PKR akan segera tamat riwayatnya.

Jika sampai pada keesokan harinya gambar itu tetap saja berada di tempat itu, desas-desus pasti secepat kilat menyebar dan pendukung-pendukung proklamasi 17 Agustus 1945 di Bengkulu akan kehilangan muka dan kepercayaan rakyat. Bukan itu saja yang dikhawatirkan, juga dengan terpasangnya potret monumen penjajah itu seolah-olah hendak dinyatakan, “Kami kembali berkuasa di tempat ini.” Dengan itu tentunya Jepang dan mereka yang masih setia akan lebih berani bertindak sewenang-wenang, bahkan kemungkinan akan berusaha mengguling seluruh PKR dan aparat pemerintahan yang masih muda ini untuk dilemparkan ke dalam terali besi. Inilah yang merupakan salah satu tantangan.

Tepat tengah malam, beberapa pemuda anggota PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) Bengkulu melaksanakan rencana kilat dengan tekad : “esa hilang dua terbilang” untuk menurunkan dan menghancurkan gambar monumen kolonial itu. Begitu cepat dan tegasnya serta yakin akan diri sendiri, mereka bergerak dari markas, menghindari senter lampu mobil-mobil patroli Jepang beserta antek-anteknya dan akhirnya tiba di Hotel Centrum. Penjaga-penjaga yang ada tidak berkutik, terpesona dan terkejut. Dengan segala kesigapan dan waktu yang sangat singkat gambar berhasil diturunkan, di bawa bersama-sama ke tempat lain dan dihancurkan dengan kaki telanjang dan tangan kosong. Kepingan-kepingannya dihamburkan ke jalan raya agar rakyat mengetahuinya. Inilah salah satu jawaban jantan dan pernyataan

kebulatan tekad dengan perbuatan!. Pengaruhnya besar sekali. Mereka yang ragu-ragu segera tutup mulut dan berbalik percaya akan tekad dan kemampuan Republik Indonesia. Anggota-anggota PKR segenggam bertambah keberanian dan pengalamannya. Sementara itu berita-berita dari luar berdatangan terus.

Pada tanggal 13 September 1945 diterima pula kawat dari Lampung yang dikirim oleh Mr. Abbas tentang Indonesia Merdeka. Pihak PKR meningkatkan terus segala usaha, tetapi masih kurang puas terhadap mereka yang masih berpangku tangan tanpa dapat berbuat sesuatu. Mulailah bertebaran pamflet-pamflet dengan tulisan-tulisan dan karikatur-karikatur berwarna-warni besar dan kecil, yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh orang banyak, yang isinya membangkitkan semangat, mendorong aktivitas, menggalang persatuan, meningkatkan kewaspadaan dan membasmi segala keraguan. Kelihatan satu mobil yang dipergunakan oleh Pasukan Rahasia mundar-mandir melakukan tugasnya tak henti-hentinya siang dan malam dengan misi tertentu.

Pengibaran bendera Merah Putih di daerah Manna berlangsung di Padang Sialang pada tanggal 29 September 1945 di bawah pimpinan Merahnuddin Taya. Demikian pula di Kepahyang dengan inspektur upacara Muryadi Priyatmo. Kawat yang dikirim oleh Mr. T.M. Hasaan yang telah diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Gubernur Sumatera memberitahukan tentang pengangkatan Ir. Indera Caya sebagai Residen Bengkulu, membawa kelegaan dan kegembiraan di kalangan rakyat Bengkulu, karena dengan demikian terasa sekali keresmian Pemerintah Republik Indonesia di daerah Bengkulu. Kawat tersebut sampai di Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 1945. Tetapi kegembiraan rakyat itu menjadi hilang timbul, karena masih banyak yang mengganggu, berhubungan masih adanya Jepang di daerah Bengkulu. Meskipun ganjalan-ganjalan seperti tersebut di atas masih ada, namun makin hari semangat kemerdekaan semakin meningkat.

Pada tanggal 3 Oktober 1945 di kota Curup jumlah bendera yang dipasang di rumah-rumah penduduk bertambah banyak. Pada tengah hari keadaan menjadi hangat, karena dari pihak Kepolisian Jepang melarang pemasangan bendera tersebut. Dalam hal ini yang sangat disayangkan, bahwa yang bertindak agak berlebihan adalah polisi-polisi Jepang yang direkrut dari orang-orang bangsa sendiri. Setelah beberapa orang yang terdiri dari Nur Arifin, sabirin Burhani, Bukhari Yacob dan Mustafa Guru mendatangi Kepala Polisi di Benteng Curup, hal ini buat sementara waktu dapat diselesaikan dan keadaan menjadi reda kembali.

Dalam kawat Gubernur Sumatera pada tanggal 3 Oktober 1945, diperintahkan juga agar bendera Merah Putih dikibarkan secara

keseluruhan pada tanggal 4 Oktober 1945 dimulai pukul 7.00 pagi. Semua anggota PKR ditugaskan untuk menggerakkan ini sesuai dengan isi kawat Gubernur Sumatera tersebut dan selanjutnya mengawasi pelaksanaan itu sendiri. Secara serentak para pemuda, terutama yang tergabung dalam PKR berpencar-pencar sampai ke pelosok-pelosok, menaiki setiap rumah sampai menjelang waktu subuh dengan satu pesan, yaitu agar pada tanggal 4 Oktober 1945 pada setiap rumah penduduk berkibar bendera Merah Putih. Siang harinya pada tanggal 4 Oktober tersebut para pemuda ditugaskan keliling untuk mengetahui rumah mana yang belum memasang bendera Merah Putih.

Pada beberapa rumah yang penghuninya termasuk kaum “terpandang” bukan tidak sering terjadi perang mulut antara para pemuda dengan penghuninya. Kantor Residen yang sampai pada saat itu masih dikuasai Jepang, ditemplei dengan pamflet-pamflet. Kantor-kantor pemerintah hanya beberapa saja yang berani memasang bendera Merah Putih. Di Kantor Pos Bengkulu terjadi insiden kecil pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada hari itu setelah para pegawai kantor tersebut pulang, kepala kantor pos, yang masih orang Jepang, atas perintah Syu Cho Kang, secara lancang telah berani menurunkan bendera Merah Putih di kantor tersebut, yang telah sejak lama dipasang pegawai-pegawai Indonesia sejak lama, jauh sebelum ada kawat dari Gubernur Sumatera pada tanggal 3 Oktober 1945.

Kantor Pos inilah yang merupakan kantor pertama yang menaikkan bendera Merah Putih di Bengkulu. Akibat dari penurunan bendera Merah Putih, terjadilah pemogokan oleh pegawai Kantor Pos tersebut. Akhirnya setelah melihat keadaan seperti itu, Jepang, Kepala Kantor Pos tersebut meminta berunding. Hasil perundingan adalah bendera Merah Putih boleh dikibarkan di kantor pos tersebut, sehingga pemogokan juga dihentikan. Pemogokan di kantor pos ini dilakukan atas inisiatif para pegawai sendiri, tanpa instruksi atau anjuran dari siapa pun, mereka bertindak sendiri dengan menanggung resiko sendiri. Pada waktu itu kantor pos tersebut masih merupakan satu kantor pos yang disebut PTT, gabungan dari Kantor Pos, Telegram dan Telepon. Yang menjadi pelopor dan penggerak kantor PTT Bengkulu adalah R. Hadi, Abu Hasan Pungut, Zen, Ibrahim Fattah, Makmun Dasir, Marzuki Alisebana.

Keesokan harinya peminan PKR tertinggi di Bengkulu, Nawawi Manaf beserta beberapa orang lainnya, mendatangi *Suchokang* Bengkulu, Z. Inomata di tempat kediamannya. Setelah melakukan pembicaraan langsung, ia kemudian menurunkan bendera Jepang yang masih terpasang di halaman gedung Keresidenan dan segera menggantikannya dengan bendera Merah Putih di bawah ancaman dan

bidikan senapan mesin *Kempetai* yang berkantor tidak jauh dari tempat itu.

Perundingan-perundingan dengan pihak Jepang terjadi di kota Manna, tetapi perundingan-perundingan itu senantiasa mengalami kegagalan. Pada tanggal 10 Oktober 1945 suasana tidak terkendalikan lagi, sehingga mulai pukul 22.00 sampai pukul 02.00 tanggal 11 Oktober 1945 meletuslah pertempuran antara pihak PKR Manna dengan pihak Jepang. Pertempuran itu dipimpin sendiri oleh pimpinan PKR Manna : Rahim Damrah, Merahnuddin Taya, Haji A. Said, Ismail Rahman, Ustadz Bersian, Buldani Masik dan lain-lain. Dalam pertempuran tersebut terdapat beberapa orang tentara Jepang yang tewas dan beberapa senjatanya dapat dirampas di antaranya oleh Merahnuddin Taya sendiri. Di antara anggota PKR ada yang gugur antara lain Bakhsir dan yang mendapat luka-luka adalah Zakaria Mahyat, Maskasa, Buldani Masik dan Merahnuddin Taya. Pada keesokan harinya Jepang menggeledah seluruh kota Manna dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pimpinan PKR di tempat itu, termasuk Rahim Damrah sendiri, Hasan Usman dan Ibu Merahnuddin Taya.

Pada tanggal 12 Oktober 1945 kantor-kantor Pemerintah di daerah Bengkulu secara resmi menaikkan bendera Merah Putih. Sebagai kelanjutan dari pertempuran yang terjadi di Manna pada tanggal 13 Oktober 1945 di Manna diadakan suatu perundingan dengan pihak Jepang. Perundingan tersebut dipimpin oleh Demang Umar Siregar dan didampingi oleh Demang Meralmat dan Abdullah Pasirah Kedurang. Perundingan tersebut mengalami kegagalan.

Dalam suatu musyawarah, untuk dapat menempuh satu taktik perjuangan selanjutnya, maka diambil keputusan sebagai berikut : (1) Anggota PKR yang telah diketahui oleh pihak Jepang ikut dalam pertempuran tanggal 10 Oktober 1945 bergerak di bawah tanah dalam arti bergerak terus secara tidak resmi; (2) Susunan pengurus diperbaharui. Pengurus yang baru dibentuk itu diketuai oleh Bahmada Rustam dengan anggota-anggotanya terdiri dari : Jamaluddin Z.A. Syahril, Rahim Harun, Alimuddin, Aidin, Junusi, Jusirana, Suardi Naum dan lain-lain.

Resminya pengurus baru PKR ini terjadi pada tanggal 18 Oktober 1945. Untuk melakukan peninjauan di Manna dikirim A. Rusdi, Kepala Contactbureau pada kantor Residen Bengkulu. Kemudian menyusul pula satu rombongan dari Bengkulu di bawah pimpinan Zahari Tani yang terdiri dari : Inuh Mustafa, Raden Hadi, Salim Bayan, Sultan Yakub, Zairun, Indra Mahadi, Sulaiman Kayum, Mik (Botak) dan lain-lain yang jumlahnya ada 20 orang. Perundingan kedua antara PKR dan tentara Jepang diadakan lagi. Dari pihak PKR diwakili oleh

Ismail Rahman, Zen (dari rombongan Bengkulu), Suwardi Naum, Hasan Baksin sebagai juru bahasa. Sedangkan dari pihak Jepang diwakili oleh Kapten I No Ue dan Kapten Mera Kame.

Perundingan ini mengalami kegagalan, yang mengakibatkan suasana menghangat kembali. Untuk kedua kalinya terjadi penyerangan terhadap Jepang. Beberapa orang tentara Jepang tewas dalam pertempuran dan dari pihak PKR yang gugur adalah Jamil dan Sebanis. Yang luka berat bernama Saham. Setelah penyerangan PKR ini, Jepang melakukan penangkapan terhadap anggota PKR di kota Manna, termasuk beberapa orang anggota rombongan yang datang dari kota Bengkulu. Yang ditahan Jepang di antaranya yaitu : Nusirwan, Herman Abusahab, Basulana, Ahmad Mahyuddin, Alimuddin, Basri Said, Siurana, Zen, aliteman, Yusirana, Yasin, Zain, Amat Bugis.

Sampai awal minggu keempat bulan Oktober 1945, pemerintah daerah Bengkulu secara resmi masih dipegang oleh Jepang. Jepang hanya bersedia membentuk satu Dewan Administrasi dengan kepalanya seorang Indonesia. Untuk secara resmi menyerahkan pemerintahan daerah Bengkulu kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Bengkulu, Jepang masih belum bersedia melakukannya. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Jepang di satu pihak dan bangsa Indonesia di pihak lain, sehingga suasana makin panas.

Pihak Indonesia sudah mengeluarkan ancaman. Untuk pertama kali siasat diambil dengan melakukan pemogokan umum secara serentak di seluruh daerah Bengkulu. Ke seluruh daerah yang masih terdapat orang-orang Jepang, dikirim utusan-utusan untuk memberikan penjelasan seperlunya dalam pelaksanaan pemogokan itu nanti. PKR ditugasi untuk mengawasi hal tersebut agar berjalan sebaik mungkin sesuai dengan rencana. Pada tanggal 25 Oktober 1945 isyarat diberikan, bahwa pelaksanaan pemogokan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1945 dimulai pada jam 00.05 pagi sampai selesai.

Dalam instruksi yang diberikan kepada seluruh masyarakat dijelaskan, bahwa yang harus dilakukan adalah pemogokan umum dan blokade total terhadap Jepang. Dalam pelaksanaan pemogokan itu seluruh masyarakat secara bulat melaksanakan semua instruksi yang telah diberikan. Semua hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Jepang diputuskan, tidak ada satu orang Indonesia yang masuk kerja di tempat Jepang, tidak sepotong kayu api atau seikat sayur yang dijual kepada Jepang, warung-warung dan toko-toko tetap buka, tetapi jika ada orang Jepang yang ingin membeli apa saja, dikatakan tidak dijual. Hal inipun terjadi pada warung-warung dan toko orang Cina. Begitu ketatnya pelaksanaan pemogokan ini sampai-sampai jika ada orang Jepang yang mau bicara dengan orang Indonesia, dia ditinggalkan

begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata. Perlawanan rakyat tanpa kekerasan di Bengkulu dapat berjalan dengan baik.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 di serambi depan gedung kantor Residen Bengkulu terjadi upacara penyerahan resmi dari Jepang kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Bengkulu. Bekas Residen Jepang (*Syucokang*), Z. Inomata sendiri yang melakukan penyerahan / timbang terima tersebut. Sedangkan dari pihak Republik Indonesia diwakili oleh Residen Bengkulu Ir. Indera Caya beserta beberapa pimpinan rakyat di daerah Bengkulu dan salah seorang yang ikut menandatangani penyerahan itu adalah Ketua PKR Bengkulu, Nawawi manaf.

Selama upacara berlangsung PKR beserta seluruh rakyat berjaga-jaga dan bersiap untuk segala kemungkinan. Selesai upacara ini, saat itu pula diisyratkan ke seluruh daerah Bengkulu, bahwa pemogokan berakhir. Upacara ini terjadi pada pukul 08.00 (pagi) sampai jam 10.00 (pagi). Dengan berakhirnya pemogokan, maka segera pula semua hubungan dengan Jepang dipulihkan kembali untuk melihatkan kepada Jepang, bahwa bangsa Indonesia menepati janji.

## **5. Perang dengan Jepang**

Setelah pengangkatan sebagai Komandan Batalyon TKR Bengkulu, Mayor Santoso datang ke Bengkulu. Ia mengambil tujuh pucuk senapan dari kantor Polisi Bengkulu dan meninggalkan pesan kepada staf TKR di Bengkulu agar bersiap di tempat sampai ada berita dan instruksi lebih lanjut dari dia dan untuk sesuatu keperluan penting ia harus segera berangkat ke Curup dan Padang Ulak Tanding. Apa yang diuraikan di atas terjadi pada tanggal 21 Nopember 1945. Dari staf TKR di Pondok Besi (ex gedung KPM) ia segera meninggalkan Bengkulu menuju Curup dengan didampingi Iskhak Taufik, dari Kepahyang ke Curup oleh Muryadi Priyatno.

Mayor Santoso mengadakan pembicaraan dengan Z. Arifin Jamil bertempat di rumahnya di Curup. Hubungan dengan Mayor Santoso ke staf TKR Bengkulu di Pondok Besi terputus. Pada malam hari tanggal 22 Nopember 1945 di kota Kepahyang ada keramaian Pasar Malam Amal. Dari Curup, Zainal Arifin Jamil membawa 20 orang pasukan ke Kepahyang.0 Anggota pasukan di antaranya yaitu Nawawi Bahusin, Parijo, Idris Usman, Hasan Husen, Buyung Efendi, syarif Ansori, Zainuddin dan lain-lain.

Pasukan tersebut selain bersenjata tajam, juga mempunyai dua pucuk senapan, dan sebuah pistol. Kepada pasukan ini oleh Mayor Santoso diperintahkan untuk melakukan penyerangan terhadap Jepang

yang berada di kantor Tozan Noji Shiki Kaisah di Kampung Pendiunan. Kepada lain pasukan diperintahkan pula untuk melakukan penyerangan di "hombu" Jepang. Pada tengah malam sekitar jam 01.00 tanggal 23 Nopember 1945 terdengar lonceng panjang dibunyikan dengan diiringi pekik panjang "Merdeka". Mayor Santoso dengan pedang terhunus melakukan penyerangan terhadap Jepang yang berada di rumah orang Cina bernama Kimbeng. Mayor Santoso dapat melumpuhkan pengawal, tetapi Jepang membalas dengan tembakan beruntun. Mayor Santoso dalam pertempuran itu akhirnya gugur dan dimakamkan di pemakaman umum Kepahyang.

Setelah peristiwa tersebut, Jepang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pejuang. M. Daud Mustafa tertangkap, namun lewat perundingan, ia berhasil dibebaskan.

Pusat TKR dipindahkan dari Bengkulu ke Curup. Barlian menyusun kembali staf TKR. Rumah A.M. Rahim menjadi markas TKR. Ia didampingi R.I. Ismail, R. Iskandar dan Zakaria kemudian yang baru pulang setelah mengikuti Kongres Pemuda di Yogyakarta. Tindak-tanduk *kempetai* (polisi militer) Jepang yang berlebihan membuat rakyat semakin anti pati. Jepang terus melakukan penangkapan. Tangsi polisi di Curup diserang sekelompok orang bertopeng dan bersenjata api pada tanggal 15 Desember 1945. Beberapa pucuk senjata dan kunci tahanan berhasil dirampas. Dalam keadaan panik, Jepang meminta pimpinan BPRI datang ke tangsi pada tanggal 16 Desember 1945. Jepang menanyakan siapa pelaku perampasan tersebut. Pimpinan BPRI secara tegas menyatakan bahwa Jepang tidak berhak bertanya soal itu. Terjadi perang mulut yang menyulut ketegangan.

Minimnya senjata membuat para pejuang mencoba mencuri dari Jepang. Zainul Bakti dikenal sebagai spesial pencuri senjata Jepang. Ia dan teman-temannya berhasil mencuri satu senjata mesin dan 27 senjata Australi. Beberapa kali percobaan Zainul Bakti berhasil, untung tak dapat diraih Zainul Bakti gugur ditembak tentara Jepang. Demikian pula Z. Arifin Jamil dan kawan-kawan sering mencuri senjata Jepang. Kenyataan tersebut membuat mereka menjadi incaran Jepang. Akibatnya, untuk menghindari kejaran Jepang, Z. Arifin Jamil terpaksa berpindah-pindah.

Sekitar bulan Nopember 1945, kantor PKR dipindahkan ke Dusun Curup. Salah seorang pemuda yang menjadi ajudan Z. Arifin Jamil ditangkap. Ia diinterogasi dan dipaksa untuk memberi tahu di mana Z. Arifin Jamil berada. Ketika itu ia diutus Burhanuddin ke Muara Aman. Para pemuda meminta agar pemuda yang ditawan dibebaskan. Ultimatum segera disampaikan pada tanggal 20 Nopember 1945. Jika



tidak segera dibebaskan akan diambil tindakan keras. Jepang tidak mau membebaskan pemuda tersebut, sehingga terjadilah pertempuran tanggal 21 Nopember 1945. Keesokan harinya Jepang membalas serangan tersebut, dan menimbulkan korban jiwa. Pemuda Arifin dan Sutan Jamil gugur dibunuh Jepang di Pasar Tengah. Beberapa orang lainnya mengalami luka-luka, seperti Amin Soman dan yang lainnya.<sup>110</sup>

Pada hari Sabtu, 23 Nopember 1945, Jepang mengutus Datuk Kuris, H. Abdullah dan H. Abdul ali ke Tabarena agar TKR menyerahkan senjatanya. Permintaan tersebut ditolak. Akibatnya Jepang marah dan pada hari minggu 24 Nopember 1945 Jepang melakukan penyerangan ke Tabarena. Para pejuang dipimpin Mayor Berlian bertekad untuk menghadang kedatangan tentara Jepang.

Akhirnya pertempuran berlangsung dengan sengit. Orang-orang yang datang dari Lebong ikut membantu perjuangan. Mereka ditempatkan di sekitar sungai yang dipenuhi pohon bambu. Memang Tabarena berada di antara tepi hutan dan sungai. Tentara Jepang menyeberangi sungai mengejar pejuang. Para pejuang sudah menunggu di tepi hutan. Terjadi pertempuran jarak dekat menggunakan sangkur, pedang dan keris. Korban jatuh di pihak pejuang sebanyak 38 orang, sedangkan pihak Jepang lebih banyak lagi.<sup>111</sup> Tentara Jepang mengamuk membakar sembilan belas rumah karena jatuh korban yang cukup banyak di pihak mereka. Karena kekuatan yang tidak seimbang, para pejuang mundur ke Rimba Pengadang.

Rencana penyerangan terhadap kepentingan Jepang dirancang. Bala bantuan dari Lebong tiba dengan 4000 orang dan berkarung-karung beras yang dibawa truk. Sasaran dibidik, *Katakura Butai*, *Hikotai*, asrama-asrama dan *Teikoku* rayon akan diserang. Dalam kesaksian Zakaria Kamidan tidak kurang dari 10.000 orang yang berasal dari Curup, pasukan TKR dan 50 orang Jawa pilihan tergabung di dalamnya. Tepat jam 12 malam serangan dimulai. Melalui sawah-sawah dengan beberapa obor, pasukan bergerak. Lampu di kota Curup jam 12 malam padam. Bersamaan dengan itu asrama Jepang diserbu laskar BPRI dan

---

<sup>110</sup> Siti Rohanah, dkk., *Perjuangan Rakyat Rejang Lebong Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1945-1949*, (Padang : Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Padang, 2004), hal.56.

<sup>111</sup> Z. Arifin Jamil, "Perjuangan Fisik dalam Perlawanan Rakyat PKR/TKR Tahun 1945 Terhadap Jepang dan Perlawanan Terhadap Agresi Belanda Tahun 1949 di Daerah Rejang Lebong (Curup) dan Sekitarnya oleh Pasukan Kompi I Batalyon 28 STB di bawah pimpinan Kapten (Pur.) Z. Arifin Jamil Sebelum dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945", *Makalah dalam Seminar Sehari Rencana Penerbitan Buku sejarah Daerah dan Pendirian Tugu Pahlawan*.

API. Terjadilah kontk senjata yang sengit di tengah malam. Sementara itu, pasukan pejuang yang lain menyerang *Katakura Butai*. Karena diserang secara mendadak, Jepang membuat pertahanan *Egel Stelling* (melingkar sekeliling). Jepang menembak secara membabi buta ke arah cahaya senjata pejuang diletuskan. Kuatnya pertahanan Jepang di *Katakura Butai*, sasaran dialihkan ke *Hongbu* (markas pimpinan tentara) yang pertahanannya relatif lemah.

Malam yang kelam menjadi terang benderang oleh percikan api dan bau mesiu. Kontak senjata jarak dekat terjadi saling menusuk. Begitu fajar, pasukan mundur diam-diam karena tidak mungkin dengan senjata seadanya mampu menghadapi Jepang dalam keadaan tidak gelap lagi. Pasukan Zakaria Kamidan dan R. Iskandar mundur di dusun Simpang Empat. Dalam keadaan lelah, mengantuk dan lapar, mereka membuat pertahanan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut. Mereka yang kelelahan langsung tertidur di bawah rumah-rumah dan pohon-pohon. Tempat itu sebenarnya rawan karena merupakan area persawahan yang terbuka. Yang ada hanya sebuah bukit kecil yang menjadi tempat peninjauan dan pos senapan mesin. Pada siang harinya Jepang melakukan pembersihan di kota Curup mencari para pejuang. Untungnya para pejuang dan rakyat sudah mengungsi. Jepang hanya menemukan kota yang sudah kosong ditinggalkan penduduknya.

## 6. Persenjataan dan Logistik

Sesuai dengna tingkatan perjuangan pada waktu itu, di mana pertempuran senjata dipandang sangat perlu, dan dalam hal inilah dianggap satu-satunya jalan untuk melaksanakan atau meneruskan tegak atau runtuhnya Negara Republik Indonesia yang telah didirikan, maka tiap-tiap organisasi pemuda pada galibnya membentuk bagian kelasykaran. Dapat dikatakan bahwa perhatian pemuda pada umumnya tercurah untuk melengkapi diri dengan mengusahakan adanya alat-alat perjuangan yang berupa senjata<sup>112</sup>.

Pertempuran yang terjadi di sana-sini, baik karena pertempuran karena usaha untuk merebut senjata dan kekuasaan yang ada di tangan Jepang, maupun usaha untuk mempertahankan kemerdekaan, karena serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara NICA/Sekutu dihadapi para pemuda pejuang dengan segala kekuatan yang ada. Pertempuran terjadi di mana-mana dan kapan saja.

Setelah tentara Jepang dan orang-orang tawanan di daerah pedalaman, dipusatkan di kota Palembang, kejadian pertempuran di

---

<sup>112</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1954), hal.275.

seluruh wilayah Keresidenan Bengkulu hampir tidak ada lagi, tetapi sebaliknya di kota Palembang keadaan pertempuran justru semakin memuncak. Selanjutnya melihat gelagat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan segala cara, maka kita bangsa Indonesia juga harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk perang terbuka melawan Belanda. Untuk itulah maka perjuangan bersenjata menjadi keharusan, sehingga lasykar rakyat berpadu dengan tentara resmi. Sudah tentu pusat komando berada di tangan tentara, namun begitu kita tak dapat melupakan bahwa tenaga lasykar rakyat itupun merupakan salah satu unsur penyusunan tentara resmi dan merupakan tenaga pembantu yang vital. Dalam membantu pengadaan alat-alat perang dan bahan perbekalan makanan dan logistik.

Dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu, sudah barang tentu senjata adalah kebutuhan vital yang tidak dapat ditawar lagi. Mengingat senjata menjadi kebutuhan penting, maka harus diusahakan dan didapatkan dengan segala cara. Usaha-usaha yang dilakukan untuk keperluan pengadaan senjata adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyiapkan terlebih dahulu senjata-senjata yang telah ada. Sebagian senjata milik perseorangan berupa senjata tajam seperti sewar, kerambit, tombak, pedang, kelewang, belati dan lain-lain. Selain itu juga terdapat beberapa senjata api yang disembunyikan ketika Jepang masih berkuasa, berupa senapan lantak (kecepek), senapan karaben dan pistol bekas peninggalan *stadswacht* dan *landwacht*.
2. Mencari senjata yang disimpan disembunyikan atau dibuang Belanda dan Jepang pada saat kekalahan mereka, baik yang dikuburkan dalam tanah, maupun yang dibuang ke dalam laut dan sungai. Hasilnya pun tidak berarti dan kalaupun didapat semuanya dalam keadaan rusak/karat. Namun demikian masih bisa diperbaiki. Untuk itu harus diperbaiki di bengkel-bengkel milik pemerintah maupun swasta.
3. Mencuri senjata Jepang, meskipun hasilnya tidak seberapa.
4. Merampas senjata Jepang. Pertempuran yang terjadi dengan Jepang di beberapa tempat di wilayah Bengkulu pada hakekatnya untuk mendapatkan senjata.
5. Pembelian senjata dari luar, yang merupakan hasil selundupan dari Singapura lewat Jambi. Inipun tidak memuaskan. Selain jumlahnya yang sedikit, keadaannya sudah mengecewakan karena ada senjatanya tetapi pelurunya tidak ada.
6. Melakukan pembuatan senjata sendiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya bengkel-bengkel pemerintah, seperti : (a) Di

galangan kapal Bengkulu (dok) di bawah pimpinan Letnan II Zulkifli Mezan dan Letnan Muda Bakhaidir. (b) Pertambangan emas (bekas MMS) di Lebong Tandai, yang pada awalnya dipimpin oleh Usman Makruf, kemudian digantikan oleh Letnan I Kapingrun. (c) Sentral listrik di Tes, di bawah pimpinan Letnan II Sulaiman Nazir dan Letnan Muda M. Damsyik. (d) Pabrik pengolahan teh di Perkebunan Teh Kabawetan, yang semula dipimpin oleh M. Arif (Kepala Perkebunan Teh) kemudian digantikan oleh Buldani Masik. (e) diperkebunan karet *Weskust*, Kepahyang di bawah pimpinan Kapten Anwar Karim/Letnan II Bahauddin. Perkebunan ini tidak berjalan lagi, sehingga dimanfaatkan untuk membuat senjata dan berada langsung di bawah Bagian Persenjataan Resimen/STB.<sup>113</sup>

Pada masa Agresi Militer Belanda, di Dusun Masmambang dilakukan pembuatan senjata di bawah pimpinan Letnan Muda A. Rivai Bakri. Bengkel ini merupakan bengkel STB yang dibuat ketika berlangsungnya agresi Belanda. Perkembangan pembuatan senjata dalam Sub Teritorium Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada awal ketika pasukan masih berbentuk Penjaga Keamanan Rakyat, di Lebong Tandai telah dibuat granat sumbu.
2. Dalam perkembangan selanjutnya ketika Belanda datang menyerang, dibuat pula ranjau darat (*landmijn*) dengan kode P1 ditingkatkan lagi menjadi P2 dan seterusnya. Dalam percobaan pertama dilakukan oleh Letnan I Kapingrun bertempat di Kebun Karet van der Vossen, ikut dihadiri Komandan Divisi I, Kolonel M. Simbolon.
3. Jenis-jenis senjata yang dibuat bertambah terus dan dibuat di seluruh bengkel yang ada. Adapun senjata yang dibuat antara lain granat bulu ayam, standgun, mortir dan ranjau gantung.<sup>114</sup>

Senjata-senjata yang menyebabkan terjadi ledakan dapat dibuat karena persediaan bahan peledak, dinamit (campuran  $C_3H_5(NO_3)_3$  dengan tanah diatomeae) dalam jumlah yang cukup banyak terdapat di pertambangan emas Lebong Tandai. Mulai tahun 1947 pembuatan senjata dikoordinasi oleh Mayor Ir. Syafwan Gatam. Senjata yang dibuat di daerah ini bukan saja dipergunakan oleh pasukan yang berada di daerah Bengkulu, tetapi juga sampai jauh ke luar daerah.

---

<sup>113</sup> M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.214-216.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 216

Di samping senjata-senjata tersebut, dibuat pula sejenis senjata Meriam Kecepek (MK). Pada dasarnya cara kerja meriam kecepek ini sama dengan senjata-senjata rakyat yang telah dikenal sejak dahulu kala untuk menjaga sawah, ladang, perkebunan dan untuk berburu ke dalam hutan. Bagian-bagian senjata meriam kecepek ini adalah :

1. Badan, yang terdiri dari laras, kaki dan pelatuk. Semuanya terbuat dari besi. Khusus laras dipakai tiang telepon yang dipotong, diambil bagian ujung atas.
2. Mesiu, adalah campuran kalisalpeter, belerang dan arang. Kalisalpeter didapat dengan cara mengolah tanah di bawah kandang kambing yang sudah lama dipakai. Tiga unsur bahan tadi, yaitu  $\text{KNO}_3$ , S dan C secara bersama-sama diolah lagi dan hasilnya adalah mesiu. Cara pengolahan seperti ini sudah lama dikenal dan dilakukan oleh orang sejak dahulu. Bahan untuk membuat mesiu ini mudah didapat, karena banyak terdapat di sekitar pemukiman penduduk.
3. Pengisi laras, yang akan lepas dari badan menuju sasaran tembakan, terdiri dari : potongan-potongan besi, timah, perunggu, batu. Kemudian dibutuhkan pula sabut kelapa sebagai pemadat dan pelengkap.
4. Kep, yang terbuat dari gelatine dicampur dengan kepala korek api atau dapat pula dipakai mesiu. Kemudian dibungkus dengan kertas timah rokok dalam bentuk gepeng sebesar kacang kedelai.
5. Kayu yang diikatkan pada tali yang agak panjang sebagai penyangga pelatuk sebelum MK itu ditembakkan.<sup>115</sup>

Pada saat peledakan, mesiu dasarnya terjadi perbandingan sebagai berikut :  $2 \text{KNO}_3 + 3\text{C} + \text{S} \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + \text{N}_2 + \text{K}_2\text{S}$

Kesemua senjata ini dibuat secara sederhana, dan tidak dapat dibuat seperti yang dilakukan di pabrik senjata yang menggunakan alat-alat yang lengkap dan modern. Namun tidak dapat disangkal bahwa senjata buatan sendiri secara sederhana ini ikut dipergunakan dalam perjuangan untuk membela Republik Indonesia menghadapi tentara Belanda yang bersenjata lengkap dan modern.<sup>116</sup>

Bengkel senjata di Lebong mempunyai banyak dinamit yang sebelumnya dipakai untuk penambangan emas. Karena itu granat dan ranjau dapat dibuat di tempat tersebut. Upaya untuk mendapatkan senjata dilakukan dengan cara meampas dari tentara Jepang. Senjata juga

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 217.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 218.

diperoleh melalui barter kopi, teh, karet, dan kina dari *onderneming-onderneming* Curup dengan Singapura.<sup>117</sup>

Perjuangan bersenjata ini tidak dapat dielakkan dengan kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu logistik dan bahan makanan serta biaya lain yang berhubungan dengan perjuangan/peperangan. Kebutuhan penunjang logistik di antaranya yaitu Makanan (beras, sayur, lauk pauk dan lain-lain). Bengkulu merupakan daerah yang subur, sehingga tidak mustahil jika sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan. Selain menghasilkan bahan-bahan tanaman perdagangan, juga bahan-bahan makanan seperti beras, sayur dan lain-lain. Oleh karena itu, baik sebelum Belanda menyerang ke daerah ini dengan tentaranya, maupun sesudahnya, bahan-bahan makanan ini banyak membantu perjuangan.<sup>118</sup>

Sejak Bengkulu bergerak menyambut Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di mana saja dipandang perlu, terutama ke daerah-daerah pertempuran dikirim bahan makanan secukupnya. Bahan makanan yang dikirim bukan hanya yang masih mentah, tetapi juga yang sudah masak dan siap untuk dimakan. Bahkan Pemerintah Sipil di masing-masing daerah, seperti Curup, Lebong, Kepahyang, Manna, Bintuhan, Muko-Muko, Lais, Ketahun dan lain-lain juga turut membantu menyediakan uang, beras dan kebutuhan lainnya.<sup>119</sup>

Ketika bergerilya tidak ada dapur umum khusus yang tersedia, akan mendapat jatah sebungkus nasi. Setiap rumah secara sukarela menyediakan makanan. Hal semacam ini sudah berlangsung sejak awal dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai pada saat pengakuan kedaulatan.

Untuk kebutuhan alat penukar atau uang, di Bengkulu telah dikeluarkan bermacam alat penukar. Ada yang berbentuk bon, mandat pemerintah, tanda penerimaan beras (PMR) dan sebagainya. Kemudian dikeluarkan pula uang yang berbentuk meterai dan oleh Gubernur Militer Istimewa Sumatera selatan dikeluarkan uang Republik Indonesia untuk Daerah Istimewa Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Gubernur Militer Dr. A.K. Gani.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Zakaria Kamidan, "*Harga Diri Sekelumit Sejarah Perang Dunia di Asia Timar Raya/Pasific dan Perjuangan di Daerah Bengkulu Tahun 1945*". Catatan. Bengkulu : tp, hal. 40. Untuk lebih jelasnya lihat juga Iim Imadudin, dkk., *Masa Revolusi di Bengkulu 1945-1950*, (Madang : Inventarisasi Sumber Sejarah Lisan, Proyek PPST BKSNT Madang, 2002), hal. 40

<sup>118</sup> M.Z. Ranni, *Op.cit.*, hal. 218.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 218.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 219.

Di samping kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, Bengkulu juga kaya emas. Tambang emas di Lebong Tandai telah dieksploitasi sejak penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda sekitar 100 kilogram emas keluar dari pelabuhan Bengkulu tiap bulannya. Begitu pentingnya arti emas ini bagi Belanda, maka para pembesar tertinggi Hindia Belanda datang berkunjung ke daerah ini untuk meninjau tambang emas yang ada. Pada tahun 1917 Johan Paul Graaf van Limburg Stirum (Gubernur Jenderal 1916 – 1921) datang ke pusat pertambangan emas di Lebong Tandai. Kemudian tahun 1927 datang pula Simon de Graaf. Beberapa perusahaan Belanda membuka pertambangan emas di daerah ini.

Pada tahun 1941 yang masih meneruskan usahanya ada dua buah, yaitu *Mijnbouw Maatschappij Simau* dan *Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong*. Yang terakhir ini pada masa pendudukan Jepang tidak diusahakan lagi, tetapi pertambangan itu diteruskan oleh Jepang. Ketika Jepang menyerah, pertambangan emas di Lebong Tandai diusahakan oleh Republik Indonesia di bawah pimpinan Usman Makruf, tetapi karyawan teknik sudah sangat berkurang. Namun demikian, tambang tersebut masih menghasilkan emas.<sup>121</sup>

Setelah Resimen I/Divisi I/Komandemen Sumatera diresmikan pada bulan maret 1946, telah datang utusan dari atasan untuk mengambil emas yang akan dipergunakan untuk perjuangan, jumlahnya ada 10 kilogram. Mulailah dari saat itu emas Lebong Tandai digunakan untuk kepentingan perjuangan membela Republik Indonesia. Apalagi pada saat agresi militer Belanda yang terakhir, emas yang dihasilkan Lebong Tandai merupakan salah satu bahan penunjang yang sangat besar dalam membela Republik Indonesia.<sup>122</sup>

## 7. Peleburan Laskar dari TRI menjadi TNI

Adanya dekrit dari Panglima Tertinggi, bahwa Badan-Badan Kelasykaran dan TRI harus melebur dirinya masing-masing menjadi TNI, maka di Sumatera Selatan, termasuk juga di Bengkulu segera diusahakan pelaksanaan dekrit tersebut. Keadaan di Sumatera Selatan menunjukkan tidak adanya suatu Badan Perjuangan atau Badan Kelasykaran yang tidak menjadi bagian dari Gerakan Pemuda. Yang ada adalah Lasykar Napindo yang menjadi bagian dari Gerakan Pemuda “Napindo”, Laskar Hisbullah dan Pesindo.

Dekrit Panglima Tertinggi tersebut disambut baik oleh pihak lasykar dan segera membentuk Dewan Kelasykaran yang bertugas

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal. 219.

<sup>122</sup> *Ibid*.

mengadakan perundingan dalam pelaksanaan peleburan tersebut. Sebaliknya dari pimpinan ketentaraan juga membentuk suatu panitia yang bertugas untuk mengadakan perundingan dengan Dewan Kelasykaran. Perundingan berjalan dengan lancar, segera berhasil dengan terwujudnya peleburan semuanya menjadi TNI.<sup>123</sup>

Pengaruh dari peleburan ini adalah, bahwa gerakan pemuda harus menyerahkan sebagian dari tenaga pimpinannya untuk masuk ke dalam ketentaraan yang berarti mengurangi tenaga pimpinan dalam gerakan pemuda sendiri. Para pemimpin gerakan-gerakan Pemuda itu tidak repot lagi untuk bekerja mencari bahan makanan, pakaian dan lain-lain untuk para laskar.

BPKR (Badan Perjuangan Keamanan Rakyat) diresmikan berdirinya pada tanggal 4 September 1945 di bawah pimpinan Hasan Kasim dan merupakan suatu badan yang pada awalnya digunakan untuk membantu Pejabat Kepolisian Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat di Sumatera Selatan.<sup>124</sup>

Pada tanggal 12 Oktober 1945 BPKR (Badan Perjuangan Keamanan Rakyat) dilebur menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan berada di bawah pimpinan Hasan Kasim dan Muhammad Nuh. Sebagai lambang resmi TKR, maka oleh Markas Besar TKR Daerah Karesidenan Palembang, dengan persetujuan Residen Palembang ditetapkan tiga macam lencana :

1. Untuk opsir : gambaran jantung dari kain merah-putih yang potongan serongterletak di atas dasar 4 segi yang terbuat dari kain warna kuning (dasarnya diperkeras dengan alas kertas tebal untuk disematkan dibaju.
2. Untuk opsir muda : sama seperti di atas, tetapi dasamya hijau muda.
3. Untuk prajurit : sama seperti di atas, tetapi dasamya hitam.

Untuk memakai lencana tersebut disematkan di dada sebelah kiri, di atas kantong baju. Oleh Residen Palembang dikeluarkan sebuah maklumat pada hari tersebut, agar para pemuda mendaftarkan diri menjadi TKR.

TKR di daerah Bengkulu dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945. Pada tanggal 25 Januari 1948, TKR dilebur menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Sebelum ada peleburan Tentara Keamanan Rakyat ke dalam TRI, maka TKR berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tanggal 27 Januari 1946 ada 104 opsir telah dilantik, di

---

<sup>123</sup> *Republik Indonesia Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1954), hal. 276.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 277.



antaranya yaitu : Hasan Kasim, Kolonel Kepala Divisi II Palembang; Bambang Utoyo, Litnan Kolonel; NS Effendi, Letnan Kolonel Tituler. Kemudian disusul pelantikan 52 opsir TRI Resimen II di Jambi tanggal 17 Maret 1946. Bertindak sebagai Komandan Resimen ditunjuk M. Insyah dengan pangkat Letnan Kolonel TRI, dilantik di Bengkulu tanggal 24 Februari 1946.<sup>125</sup>

Mengingat kebutuhan opsir yang harus mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran sangat mendesak, maka perlu dibuka Sekolah Opsir Muda di Palembang. Murid-murid yang masuk pada sekolah opsir ini berasal dari Bengkulu, Jambi dan Bangka. Tanggal 22 Maret 1946 dibangun Makamah Tentara Propinsi Sumatera Selatan di Palembang. Bertindak sebagai presidennya adalah Mr. A. Siddik. Pada tanggal 21 Mei 1946, oleh Bambang Utoyo sebagai Komandan Resimen I Divisi II Palembang dikeluarkan maklumat, bahwa Tentara Republik Indonesia tidak boleh disebut dengan T.R.I., atau TRI dan harus lengkap dengan sebutan Tentara Republik Indonesia.

Ketika keadaan semakin hari semakin panas dan setelah mendengar, bahwa pasukan Belanda "Divisi 7 Desember" akan tiba di Sumatera Selatan, maka sebagai tandingan dibentuklah "Divisi 17 Agustus" pada tanggal 12 Oktober 1946 di kota Palembang yang terdiri dari segenap Badan Perjuangan dan Tentara. Divisi 17 Agustus ini didirikan dengan tujuan untuk menghadapi Divisi 7 Desember Belanda. Keberadaan Divisi 17 Agustus ini maka pertahanan kita bertambah kuat. Pemuda-pemuda yang tadinya masuk organisasi, Badan-Badan Perjuangan yang berlainan coraknya, kini berkumpul menjadi satu dalam satu Divisi 17 Agustus.<sup>126</sup>

Pada tanggal 24 Oktober 1946 di Bengkulu dibentuk panitia Divisi 17 Agustus. Tujuannya untuk menyiapkan Resimen 4 Daerah Bengkulu yang berpusat di Palembang, di bawah penilikan panitia Divisi 17 Agustus Sumatera Selatan. Meskipun persenjataan dari Divisi 17 Agustus ini sangat sederhana, tetapi semangat perjuangan sangat kuat dan hal ini menjadi jaminan dalam mempertahankan wilayah ketika Belanda menyerang kedaulatan negara. Hanya semangat inilah yang dapat menjadi pegangan dalam menghadapi agresi musuh.

Adanya agresi Militer Belanda yang pertama yang diumumkan tanggal 21 Juli 1947, di mana Belanda menggempur pusat pertahanan TRI, di simpang dan menerobos memasuki daerah Republik, sub Komando TRI dipindahkan dari Lahat ke Lubuk Linggau. Di Linggau

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 278.

<sup>126</sup> *Ibid.*

ini kemudian diadakan perubahan nama dari TRI menjadi TNI. Peristiwa perubahan nama ini terjadi pada bulan Januari 1948.<sup>127</sup>

#### **D. PERJUANGAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN**

##### **1. Pendaratan Tentara Sekutu**

Setelah Jepang menyerah kalah pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia pada dasarnya berada di bawah *South East Asia Command* (SEAC) yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Akan tetapi oleh Amerika Serikat Indonesia diserahkan kepada Inggris dengan membentuk *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christion.<sup>128</sup> AFNEI berkekuatan tiga divisi yang bertugas melaksanakan perintah gabungan kepala-kepala staf sekutu yang diberikan kepada SEAC, di antaranya : (1) Menerima penyerahan dari tangan Jepang; (2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu; (3) Melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang untuk kemudian dipulangkan; (4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Padang, Palembang) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sipil; (5) Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.<sup>129</sup>

Untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi politik di Indonesia, Sekutu mengirimkan satu misi di bawah pimpinan Mayor AC Greenhalgh pada tanggal 9 September 1945. Mereka diterjunkan di Bandara Kemayoran dengan tugas mempersiapkan pembentukan Markas Besar Sekutu. Namun perkiraan Sekutu meleset, sebab bangsa Indonesia telah memanfaatkan situasi "*vacuum of power*" untuk memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun demikian, mereka tetap melaporkan situasi keamanan kepada atasannya Laksamana Muda Patterson, yang intinya mereka telah berunding dengan Mayor Jenderal Yamaguchi tentang tugas yang harus dilakukan oleh pihak Jepang sebelum pasukan Sekutu datang.

Misi Greenhalgh ini diikuti oleh misi kedua yang tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dengan menggunakan kapal penjelajah Cumberland, yang dikawal ketat kapal penjelajah Belanda Tromp yang membawa rombongan yang terdiri dari RAPWI, Palang Merah Inggris

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Anhar Gonggong, et.al., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 3, (Yakarta : Depdikbud Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1993), hal. 49.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 49.

dan pejabat-pejabat penting Belanda seperti Van Der Plas dan Van Straten. Kapal tersebut juga membawa rombongan Skuadron Penjelajah V Inggris Laksamana Muda WR Patterson dan mendaratkan pasukan Sekutu yang ditugaskan di Indonesia.

Pendaratan Sekutu juga diboncengi tentara NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang secara terang-terangan ingin mengembalikan dan menegakkan kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia. Keadaan tersebut menjadi rumit, sebab tentara Inggris sebagai wakil tentara Sekutu yang berkuasa saat itu lebih cenderung berpihak kepada Belanda.<sup>130</sup> Hal ini mengakibatkan sering terjadi kontak senjata antara Indonesia melawan Sekutu. Kenyataan itulah yang menjadikan jalan perjuangan bangsa Indonesia semakin berat.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 di Bengkulu, Kapten William sebagai wakil tentara Sekutu dengan tugas mengurus tawanan perang serta mengawasi gerakan kemerdekaan. Kedatangan tentara Sekutu di Bengkulu disambut para pejabat daerah setempat seperti Ir. Indera Tjaya (Residen Bengkulu), R. Abdullah dan MA Chanafiah (Pimpinan KNI). William berada di Bengkulu selama dua hari. Pada tanggal 30 Oktober 1945, PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) yang tengah mengadakan konsolidasi mengadakan rapat raksasa untuk mendeklarasikan berdirinya TKR di Bengkulu. Tanggal 3 Nopember 1945 terbetik berita bahwa beberapa perwira Inggris dengan kekuatan satu pleton akan ke Bengkulu melalui Palembang. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Bengkulu mengeluarkan perintah yang isinya "Rakyat dan PKR harus waspada dan hati-hati, selalu berjaga-jaga dan mencurigai pasukan Sekutu yang datang ke daerahnya, jangan sampai orang-orang NICA dan antek-anteknya turut dalam rombongan Sekutu tersebut".<sup>131</sup>

Akhirnya diketahui bahwa tentara Sekutu yang datang dengan kekuatan satu brigade di bawah pimpinan Mayor Fordice, kemudian digantikan oleh Mayor Hutchinson, di mana Belanda telah membonceng dengan AMACAB-nya beserta segala tindakan yang telah mereka lakukan, membuat setiap gerak-gerik yang mencurigakan, mendapat perhatian khusus dari pihak PKR. Sebagaimana diketahui, bahwa nama AMACAP (*Allied Military Administration - Civil Affairs Branch*) digunakan Belanda untuk Jawa dan Sumatera sebagai pengganti NICA, karena nama yang terakhir ini sangat dikenal dan dibenci rakyat. NICA

---

<sup>130</sup> Zusneli Zubir, dkk., *Muko-Muko Dalam Gejolak Revolusi Fisik (1945-1950) : statu Tinjauan Sejarah Local di Bengkulu*, (Madang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai tradisional madang, Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Madang, 2004), hal.46-47.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 47.

(*Netherlands Indies Civil Administration*) itu sendiri didirikan Belanda semasa Perang Dunia Ke II di Australia untuk menerima kembali pemerintahan di Indonesia setelah pendudukan Sekutu.

Pada tanggal 1 November 1945 terlihat di Curup sebuah sedan kecil berwarna hitam berisi seorang Belanda bernama Smit, bekas pegawai listrik di Tes. Hal ini menjadi perhatian PKR, karena di samping diketahui, bahwa ia adalah seorang Belanda, ia juga membawa senjata dan sedan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi menuju Lubuk Linggau. Setelah keluar dari *interneringskamp* di Belalau, diduga ia diam-diam kembali ke Tes dan kemungkinan akan mengambil simpanannya di tempat tersebut. Segera PKR (Penjaga Keamanan Rakyat) Padang Ulak Tanding diberi tahu dan kemudian kendaraan beserta orang di dalamnya ditahan. Sebuah pistol mauser dan sepucuk senapan milik Smit disita. PKR membawa sedan dan penumpangnya ke Lubuk Linggau, kemudian Smit dan dua orang penumpangnya digiring ke Palembang.

Pada tanggal 3 November 1945 ada kejadian lain. Kira-kira pukul 19.00, terlihat pula satu sedan biru yang datang dari arah Lubuk Linggau. Di dalam sedan itu terlihat 3 orang kulit putih. Sampai di Kota Curup, sedan tersebut ditahan. Setelah diketahui ke mana mereka akan pergi, maka PKR Curup menilpon markas PKR Bengkulu untuk memberitahukan hal tersebut. Kebetulan Piket Tinggi di markas PKR Bengkulu sedang melakukan pembicaraan dengan seorang API yang baru tiba dari Jakarta, bernama Ismail. Setelah mendapat berita dari Curup itu, segera PKR Kepahyang dihubungi dan dari Kepahyang dapat diketahui, bahwa sedan tersebut beberapa menit sebelumnya telah melintasi Kepahyang menuju Bengkulu.

Piket tinggi kemudian memerintahkan agar Bagian Ruang Penyelidik segera menyiapkan beberapa orang anggota untuk pergi ke Pokok Keroya (terkenal dengan nama Pos IV), yang waktu itu merupakan satu-satunya pintu masuk ke kota Bengkulu. Para pemuda yang pergi antara lain Firdaus, Burhan, Hasani, Manan dan lain-lain. Dengan dipimpin sendiri oleh Piket Tinggi, regu ini menyebar di sekitar penjagaan polisi. Beberapa waktu kemudian, sean yang ditunggu-tunggu tersebut tiba dan berhenti di Pos Polisi. Mendengar ada sebuah kendaraan yang berhenti, seorang polisi yang berada di dalam keluar. Orang yang ada di dalam sedan menanyakan jalan menuju kota Bengkulu dan dijawab oleh polisi tersebut dengan isyarat mengacungkan tangan ke arah Pelabuhan Bengkulu. Sedan kemudian meluncur ke gedung Karesidenan yang dihuni oleh Z. Inomata, bekas Residen Jepang di Bengkulu, beserta stafnya. Di Markas PKR Pondok Besi diputuskan untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai

tiga orang kulit putih tersebut. Margono mendapat tugas untuk melakukannya.

Berdasarkan laporan yang diterima pada malam itu diketahui bahwa ketiga orang itu adalah orang Inggris yang pada keesokan harinya akan menemui Residen Ir. Indera Caya dan mereka bermaksud akan pergi ke Lebong Tandai, salah satu tambang emas di Bengkulu. Kemudian data tentang orang Inggris tersebut dilaporkan kepada pimpinan PKR Tertinggi, Nawawi Manaf. Pada tanggal 5 November 1945, sekitar pukul 07.00 Ketua PKR Bengkulu beserta wakilnya mendatangi markas PKR di Tengah Padang untuk menemui M. Syafei (pimpinan umum PKR) agar menghalang-halangi kepergian ketiga orang Inggris itu ke Lebong Tandai, karena di Lebong Tandai tidak ada tawanan perang dan orang intemiran, juga tidak ada tentara Jepang, malahan orang Jepang sipil telah pergi dari tempat itu.

Kepergian orang Inggris tersebut ke Lebong Tandai tidak ada sangkut pautnya dengan tugas tentara Sekutu, sebagai mana yang diucapkan Letnan Jenderal Sir Philip Christison sebagai Panglima AFNEI (*Allied Forces in the Netherlands East Indies*) adalah bagian dari SEAC (*South East Asia Command*) di bawah pimpinan Marskal Lord Louis Mountbatten).<sup>132</sup>

Perintah yang telah disampaikan oleh ketua PKR diterima oleh M. Syafei. Ia kemudian menuju kantor Residen. Ketika pembicaraan sedang berlangsung antara Ketua PKR dengan Residen Bengkulu, sedan biru yang membawa tiga orang Inggris sedang mengisi bensin. M. Syafei kemudian menuju Pasar Bengkulu. Setiap pos penjagaan, dimulai dari pos terdekat di Sekolah Jamiatulchair, kemudian yang terdapat di Sekolah Muhammadiyah Pasar Bengkulu, diperintahkan untuk menjaga keamanan secara ketat dengan memasang penghalang di depan penjagaan. Tidak ada satupun mobil yang boleh lewat. Di Pasar Bengkulu, para anggota PKR telah berkumpul dan mendapat tugas sebagai berikut : (1) Menambah penghalang dimulut jembatan (dulu namanya Jembatan Nippon Basyi). (2) Menambah jumlah anggota PKR pada penjagaan di depan jembatan; (3) Memasang penjagaan di seberang jembatan; (4) Anggota lainnya harus berpencar dan mengambil perlindungan.

M. Yunus Muhammad ditunjuk sebagai pimpinan di depan jembatan. M. Syafei berada di depan jembatan dan temannya berada di seberang jembatan dengan catatan jika orang Inggris tersebut lolos di pokok jembatan, maka kata terakhir berada di ujung jembatan. Di

---

<sup>132</sup> J. Leimena, "Perselisihan Indonesia – Belanda" (Jakarta : Grafika, 1949), hal. 6-7.

samping itu juga diinstruksikan hanya pos penjagaan di depan jembatan yang boleh menampakkan diri. Hal ini dimaksudkan, memudahkan pembicaraan dengan orang Inggris untuk membatalkan kepergian mereka ke Lebong Tandai. Kemudian secara tiba-tiba sedan Inggris tersebut telah tiba di pokok jembatan, setelah terlebih dahulu menerobos penghalang. Sedan tersebut berhenti di depan jembatan tepat di depan M. Syafei berdiri. Orang yang duduk di belakang stir membuka pintu seraya menodongkan pistol ke arah M. Syafei. Di belakang M. Syafei berdiri Daud seorang anggota PKR. Melihat gelagat yang tidak baik tersebut, M. Syafei menghardik Daud : “Mana tombak”. Hardikan tersebut membuat kawan-kawan PKR mengepung sedan biru dan menyerangnya. Dua orang Inggris tewas dan kemudian dikubur di dekat jembatan. Satu orang Inggris lolos dan lari ke arah laut, kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Jepang.

Sebanyak 3 buah F.N. kaliber 4,5; 3 buah jungle riffle dan beberapa kotak peluru dapat disita dari ketiga orang Inggris tersebut, terutama peluru F.N. dan peluru Jungle riffle. Beberapa blok kain berwarna merah, putih, dan biru. Semua senjata diserahkan kepada pimpinan M. Syafei Ibrahim dan barang-barang lain disimpan di markas PKR Tengah Padang.

Berdasarkan dokumen yang disita dapat diketahui bahwa ketiga orang itu bernama (1) Trevoro, seorang bekas employe pada tambang emas MMS di Lebong Tandai. Ia seorang Inggris berkewarganegaraan Belanda (naturalisasi). (2) Kapten Smit, anggota pasukan Inggris; (3) Kapten Dr. Mycree, anggota pasukan Inggris. Mereka akan pergi ke tambang emas di lebong Tandai.

Insiden di jembatan Pasar Bengkulu tersebut berbuntut panjang. Pada awalnya Jepang meminta agar para pembunuh dan senjata yang disita dari ketiga orang Inggris tersebut diserahkan kepada mereka. Hal ini diajukan Jepang kepada Residen Bengkulu pada tanggal 5 November 1945, jadi pada hari kejadian itu juga. Menurut kehendak Jepang, penyerahan seperti yang diuraikan dapat dilakukan pada besok harinya, tanggal 6 November 1945. Yang dilakukan Jepang itu bukan saja merupakan permintaan, tetapi langsung diikuti satu ancaman, jika permintaan itu tidak dipenuhi mereka akan bertindak sendiri. Karena apa yang dilakukan Jepang itu merupakan suatu penghinaan, maka ancaman dan gertakan Jepang tidak dihiraukan, sehingga pada tanggal 7 November 1945 sore hari Jepang mengulangi kembali permintaannya dan sekali ini dengan tegas dikatakan bahwa jika pada tanggal 8 November 1945 pukul 24.00 senjata-senjata dan para pembunuh tidak diserahkan, maka Jepang akan melakukan penyerangan baik untuk

melakukan penangkapan terhadap para pembunuh maupun untuk mengambil kembali senjata orang Inggris.

Bagi PKR ultimatum Jepang itu menjadi isyarat untuk melakukan segala kesiap-siagaan di seluruh kota Bengkulu. Hampir seluruh anggota PKR tidak berada lagi di rumah-rumah atau di markas, seluruhnya bersebar dengan senjata di tangan. Bukan hanya anggota PKR yang berbuat demikian, tetapi juga sebagian besar rakyat kota Bengkulu berbuat serupa dengan membawa senjata seadanya dan ikut bergabung dengan kelompok PKR. Melihat keadaan ini dan tentunya ada juga orang suruhan Jepang yang melaporkan, rupanya Jepang agak berfikir panjang, karena mereka tidak dapat menentukan sasarannya. Sementara itu waktu telah menunjukkan pukul 24.00 tanggal 8 November 1945. Sampai pada batas waktu ultimatum Jepang belum juga bergerak. Begitu juga regu-regu peninjau yang dikirim untuk mengawasi tempat-tempat konsentrasi tentara Jepang sampai saat ini belum mengirimkan laporannya. Namun kesiap-siagaan berjalan terus, sehingga pada akhirnya pihak Jepang pada pukul 00.03 mengirim utusan ke Markas PKR di Tengah Padang. Mereka datang hanya dengan satu pesan, yaitu untuk berdamai.

Perdamaian dengan pihak Jepang ini dipandang agak aneh karena : (1) pihak PKR tidak ada persoalan dengan Jepang karena yang dihadang dan dibunuh itu adalah orang Inggris; (2) Jika Jepang diperintahkan untuk menjaga keamanan, mengapa sejak kedatangan di Bengkulu orang-orang Inggris itu tidak dikawal oleh Jepang; (3) Jepang waktu itu masih bersenjata lengkap, sedangkan pihak PKR hanya bersenjatakan parang, sewar, kerambit yang semuanya hanya merupakan senjata tajam.

Pekerjaan yang dilakukan Jepang hanyalah perintah dari pihak Inggris yang datang ke Indonesia dengan tugas tertentu atas nama Sekutu. Tetapi dalam melaksanakan perintah itu, pihak Jepang juga memikirkan keselamatan mereka sendiri, khawatir bahwa : (1) Perdamaian dari pihak Jepang itu sebagai suatu taktik sekedar untuk melengahkan, kemudian menyerang dengan mendadak; (2) Jepang akan bergerak menjelang subuh, maka kesiap-siagaan diperintahkan untuk terus dilakukan. Pada pukul 08.00 tanggal 9 November 1945 perintah untuk beristirahat dilakukan.

Pada tanggal 10 November 1945 datang dua buah kapal Inggris merapat di pelabuhan Bengkulu. Kepada pemerintah di Bengkulu diberikan ultimatum dari kapal tersebut untuk segera menyerahkan para pembunuh beserta semua yang telah disita dari orang-orang Inggris pada kejadian tanggal 5 November 1945 kepada tentara Jepang yang ada di Bengkulu. Oleh Pemerintah di Bengkulu dikembalikan semua barang-

barang yang diambil dari mobil. Mengenai senjata, dikatakan masih dicari oleh pihak yang berwajib dan mengenai pembunuh masih dilakukan penyelidikan, karena jumlah orang yang berada di tempat kejadian cukup banyak, maka pembunuhnya sulit diketahui.

Jepang hanya untuk memperlambat proses saja. Pada hakekatnya permintaan untuk menyerahkan 10 orang yang diminta Inggris itu, ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kepada pihak Jepang sekali lagi diperintahkan oleh pihak Inggris yang berada di kapal untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang terlibat pada kejadian tanggal 5 November 1945.

Akhirnya dari kapal perang Inggris turun beberapa orang, langsung menuju ke sebuah rumah yang dihuni oleh orang penting di Bengkulu. Di tempat itu mereka mengadakan rapat bersama penghuni rumah dengan pintu tertutup. Setelah orang-orang dari kapal perang Inggris itu kembali ke kapal, malam harinya rumah yang bersangkutan tadi dikepung oleh PKR dan tuan rumah dibawa ke markas PKR.

Beberapa orang PKR masih berada di rumah itu untuk memeriksa dan menginterogasi nyonya rumah. Apa yang dibicarakan dalam rapat itu tidak diketahui, tetapi nyonya rumah memperlihatkan isi lemari yang berisi sejumlah uang Belanda dan sejumlah bendera si “tiga ama”. Nyonya rumah memberikan anggota PKR untuk mengambil uang Belanda, tetapi ditolak. Tidak selebar pun yang diambil, tetapi seluruh bendera “tiga warna” itu disita.

Pihak yang tidak menyetujui dan menyesalkan kejadian tanggal 5 November 1945 melemparkan kesalahan kepada pimpinan PKR di Bengkulu. Dari pihak pimpinan itu tidak ada reaksi apa-apa malahan mereka bersikap tenang-tenang saja, karena diketahui benar, bahwa pihak-pihak yang tidak setuju dan menyesalkan peristiwa itu : (1) Tidak tahu atas berita di tempat lain seperti di medan, Palembang, Surabaya dan tempat-tempat Inggris atas nama Sekutu mendarat, ikut membonceng pula Belanda, baik tentara maupun sipilnya, sedangkan Belanda ini berkeinginan untuk menjajah kembali. Ikut membonceng tentara Inggris, berarti di bawah perlindungan tentara Inggris, jadi bukan tidak mungkin Inggris melakukan misi untuk membantu kembalinya Belanda di Indonesia. (2) Tidak mau mempelajari kejadian tanggal 5 November 1945. Jika mereka itu sedikit saja berfikir, maka mereka akan menyadari, bahwa bukan pihak kita yang memulai, tetapi provokasi datangnya dari pihak Inggris itu sendiri dengan menodongkan pistol ke arah pimpinan PKR di depan sekian banyak anggotanya, yang setidaknya merupakan penghinaan dan ancaman langsung. (3) Enggan ikut bertanggung jawab pada hal-hal yang tidak enak, tetapi senang sekali jika mendapat bagian yang lumayan.



Residen Bengkulu, Ir. Indera Tjaja turun tangan menyelesaikan peristiwa tersebut. Pada malam hari diadakan sidang pleno TKR yang dihadiri oleh Santoso. Keputusan diambil untuk mengirim Syarif Saleh dan teman-teman ke Yogyakarta dan menemui Presiden untuk melaporkan kejadian di Bengkulu, termasuk kejadian di Pasar Bengkulu. Sekutu mendesak koordinator TKR seluruh Sumatera Dr. AK Gani untuk mengganti pimpinan TKR di Bengkulu.

Kawatnya berbunyi bahwa Nawawi dan Syafii Ibrahim diganti sebagai Komandan TKR, hubungan dengan dengan pihak Sekutu harus terpelihara dengan baik.<sup>133</sup> Pada tanggal 27 Nopember 1945 terjadi serah terima Komando TKR dari Nawawi Manaf kepada Berlian. Dua hari setelah itu Nawawi Manaf dan Syarif Ibrahim ditangkap. Belum lagi Berlian mengetahui situasi seluruhnya, pada malam harinya mereka tertangkap lalu dibawa berlayar satu hari satu malam, setelah itu dimasukkan ke dalam truk sekitar 30 jam. Dalam perjalanan mereka dibawa ke penjara Muaro Padang, lalu ditahan selama 9 bulan.<sup>134</sup> Ada sepuluh orang yang ditangkap, di antaranya yaitu Nawawi Manaf, Syafei Ibrahim, Syofyan Kasim, Z. Asyikin, Annas Marzuki, M. Yunus Muhammad, Nawawi Zakirun, Amir Aker, Ilyas, Bhaktif dan M. Daud Awam. Di penjara Muaro Padang mereka bergabung dengan 12 orang tahanan dari padang, sehingga mendorong mereka untuk menyusun rencana melarikan diri. Tanggal 14 Agustus 1946 rencana tersebut dapat terlaksana, mereka lolos dari penjara jam 2 malam melalui laut ke jurusan Tabing.

Pihak rakyat Bengkulu tidak ada pengaruh negatif berkenaan dengan insiden tersebut, terutama para pemudanya baik yang bergabung dalam PKR maupun yang berada dalam PRI. Malahan semua kegiatan ditingkatkan dalam segala hal. Di bawah pimpinan dan bimbingan para bekas *Gyugun* dan *Heiho* kepada para anggota diberikan latihan-latihan secara kilat. Dalam garis kebijaksanaan pimpinan PKR, latihan-latihan ini sangat diperlukan, karena sangat diperlukan dalam perjuangan selanjutnya dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>133</sup> Dalam sidang Pleno KNIP mengenai insiden di Pasar Bengkulu Nawawi dikritik habis-habisan yang menyudutkan beliau sebagai Komandan TKR saat itu. Beliau dianggap tidak mampu memimpin laskar-laskar dan pemuda, yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di Pasar Bengkulu. Mujurlah seorang pembicara dalam rapat tersebut mengatakan kawat Dr. AK Gani dianggap sebagai sandiwara diplomasi untuk pihak Sekutu. Kemerdekaan ini harus dicapai, meskipun harus mengorbankan darah dan air mata para suhada. Kita dapat berkompromi kepada siapa saja. Baik dan buruk proses jalannya revolusi di Bengkulu ini adalah tanggung jawab bersama, hal yang begini tidak dibebankan kepada Nawawi sendiri.

<sup>134</sup> Nawawi Manaf, *Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, (Bengkulu : tulisan tidak diterbitkan, 1979), hal. 8.

## 2. Perjuangan Pada Masa Agresi Militer I

Pasukan Serikat atau disebut *Alleid Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang bertugas “menerima” penyerahan Jepang di Indonesia, semula diterima dengan netral. Akan tetapi, lama kelamaan menjadi sebuah kecurigaan setelah AFNEI diketahui juga membawa orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda.

Keamanan yang semula hampir baik seketika berubah menjadi sangat buruk. Dalam waktu yang bersamaan, tentara NICA mempersenjatai kembali orang-orang dari KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Hal ini menimbulkan pertikaian yang secara kecil-kecilan berubah menjadi teror-meneror. Kerusakan terjadi di mana-mana dan serentak terjadi di seluruh daerah baik Jawa maupun Sumatera.<sup>135</sup>

Kenyataan ini diperpanas dengan sikap pasukan Serikat yang tidak mau menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Bersamaan dengan merosotnya ketahanan Republik Indonesia, merosot pula harga diri para pemimpin Republik Indonesia baik yang berada di pusat maupun di daerah. Percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin baik pimpinan pertahanan maupun politik dapat diselamatkan. Banyak cara yang licik dilakukan oleh kolonial penjajah Belanda untuk memenuhi ambisinya.

Sementara itu, perlawanan dari pihak Republik Indonesia, terutama dari para pemuda semakin meningkat hingga akhir tahun 1945. Adanya perlawanan dari pihak Republik mengakibatkan Pasukan Serikat menuduh balik dengan mengatakan Indonesia tidak aman. Untuk itu maka pihak Belanda perlu mengambil tindakan pengamanan keadaan dengan mengirimkan pasukan keamanan. Atas perintah Panglima Angkatan Perang Belanda Laksamana Helfrich, pasukan keamanan berdatangan ke Indonesia dan memenuhi tempat-tempat penting yang berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.

Tuduhan pimpinan Pasukan Serikat, Jenderal Cristion mengenai ketidak-stabilan keamanan yang disebabkan oleh kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pihak Republik Indonesia tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia. Dengan tegas pimpinan Indonesia menuduh balik pemerintahan serikat. Adanya teror dan kerusakan itu disebabkan oleh

---

<sup>135</sup> Siti Rohana dkk., *Perjuangan Rakyat Rejang Lebong Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1945-1949*, (Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004), hal. 62.

gerombolan NICA yang haus akan kekuasaan dan daerah jajahan dengan cara merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk mengatasi adanya saling tuduh dan adanya Pasukan Serikat, maka pihak Republik Indonesia mengeluarkan sebuah maklumat politik pada tanggal 1 Nopember 1945. Isi maklumat tersebut adalah agar pihak Serikat dan Pemerintah Belanda bersedia mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai imbalannya, pihak Republik Indonesia akan mengembalikan milik asing yang dikuasai serta menyetujui terbentuknya partai-partai politik untuk membantu perjuangan.<sup>136</sup>

Pemerintahan Belanda membalas maklumat Pemerintah Republik Indonesia dengan cara sepihak dan menguntungkan Pemerintahan Belanda tanpa mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia sepenuhnya. Meskipun Pemerintahan Indonesia telah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri sukar diterima.

Perundingan demi perundingan telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan guna menengahi pertikaian namun Pemerintah Belanda tetap pada pendiriannya. Hanya menganggap Republik Indonesia sebatas Jawa– Madura. Sementara itu daerah-daerah lainnya tetap berada di bawah kekuasaan Pasukan Serikat. Di sisi lain, Republik Indonesia masih dianggap bagian dari Nederland.<sup>137</sup>

Kekacauan politik yang terjadi di dalam negeri diperparah lagi oleh gejolak persaingan di antara golongan politik sendiri. Pro dan kontra yang terjadi atas dasar keputusan Pemerintah mengenai hubungan dengan Belanda menimbulkan masalah baru. Gejolak politik ini menjadi fatal sebab dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda. Tekanan politik dan militer dilancarkan oleh Pemerintah Belanda. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi yang hasil keputusannya menguntungkan pihak Belanda. Konferensi itu antara lain **Konverensi Malino** yang pelaksanaannya tanggal 1 Oktober 1946. Sementara itu, tekanan militer Belanda terhadap Indonesia adalah dengan jalan terus-menerus mengirimkan pasukan ke Indonesia.<sup>138</sup>

Demikianlah, perundingan demi perundingan telah dilakukan dan beberapa keputusan telah dibuat. Namun perundingan dan keputusan tidak bisa berjalan sebagai-mana mestinya. Kendalanya,

---

<sup>136</sup> Nogroho Notosusanto, dkk., *Sejarah Nasional Jilid VI*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 124, sebagaimana dikutip dari Berita Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1, 17 Nopember 1945 : 3.

<sup>137</sup> Siti Rohana, dkk., *Op.cit.*, hal. 64.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Belanda terlalu memperlakukan Republik Indonesia sebagai “Boneka” yang bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, keputusan yang telah dibuat oleh Syahrir menjadi bahan pro kontra bagi rakyat Indonesia dan partai politik. Pada hal Syahrir sendiri telah memperjuangkan semaksimal mungkin kearah perbaikan dan di bawah tekanan Pemerintahan sendiri maupun Belanda. Adanya pro dan kontra untuk kesekian kali nya, maka Syahrir mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Hal yang sama terjadi di wilayah Sumatera. Pasukan Serikat mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1946 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichael. Kedatangan Pasukan Serikat pada awalnya beralih untuk mengurus para tawanan Jepang, namun kenyataannya mereka membentuk koalisi dengan Belanda guna merebut kembali Republik Indonesia. Tanpa sepengetahuan pimpinan Wilayah Sumatera, Pasukan Serikat menyerahkan Wilayah Palembang kepada Belanda. Kedatangan pihak Sekutu dan penyerahan Wilayah Palembang kepada Belanda telah menjadi sasaran kemarahan rakyat Palembang. Apalagi pihak Sekutu memerintahkan agar wilayah Palembang dikosongkan. Terjadi penolakan terhadap Pemerintah Daerah dan pada saat yang sama para pemuda menyerang Belanda dan Sekutu.<sup>139</sup>

Agresi Militer Belanda yang pertama dilakukan pada tanggal 10 Juli 1947 terhadap sasaran Republik Indonesia. Serangan ini tidak berlangsung lama karena tanggal 5 Agustus 1947 datang perintah *cease fire* (gencatan senjata). Agresi Belanda I berlangsung dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948. Pada agresi militer Belanda I, di daerah Bengkulu tidak terjadi kontak senjata karena tentara Belanda belum sampai di kawasan Bengkulu.

Pasukan TNI yang berada di daerah Bengkulu lebih banyak terlibat di Sumatera Selatan (Sukarami, Bunga Mas, Baturaja, Sekayu/Muara Lakitan, Lahat, Prabumulih) dengan kendali di bawah Komando Divisi I Sub-Komandemen Sumatera, Brigade Garuda Mas. Ada juga yang dikirim ke Sumatera Tengah Bagian Timur (Payakumbuh, Tapan, Inderapura, Kerinci, Lunang, Silaut).

Realisasi Belanda dalam pelanggaran terhadap keputusan bersama adalah dengan melakukan agresi militer terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Agresi Militer pertama terjadi beberapa kali, setelah tanggal 10 Juli 1947 kemudian dilancarkan lagi serangan militer tanggal 21 Juli 1947. Serangan militer ke pusat-pusat pertahanan Republik Indonesia oleh Belanda disebut sebagai aksi *polisional* dan secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>139</sup> Sekretariat Negara, *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta : ....

Untuk membendung gerakan agresi pasukan Belanda di Sumatera Selatan,<sup>140</sup> pasukan TNI dari Bengkulu termasuk kompi istimewa dikirim ke front-front daerah Sumatera Selatan antara lain ke Betung, Madong, Indra Jaya dan Lahat.

Selain tentara ikut pula laskar yang tergabung dalam PKM (Persatuan Keamanan Masyarakat) yang pemberangkatan dan pengirimannya dikoordinasikan oleh Mustafa. Laskar ini ikut bertempur terutama di front Air Keruh Lahat. Para pahlawan yang gugur sebagai kusuma bangsa pada saat itu antara lain Mayor Iskandar di Front Indra Jaya Palembang. Kapten Syahrial gugur di front Martapura, Tukiran dan Abadi tewas di front Muara Dua Palembang. Pada tanggal 7 Juli 1947 dalam satu pertempuran di front Sukarame gugur pula Letnan Zainal Abiddin dari kompi Istimewa.<sup>141</sup>

Penyelesaian terhadap agresi militer Belanda adalah dengan melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Pada tanggal 4 Agustus 1947 terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan aksi serangan, namun bagaimana sifat Belanda yang sesungguhnya, pelaksanaan gencatan senjata tersebut tidak dapat berjalan semestinya. Belanda tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran dan secara sepihak menentukan sendiri garis *demarkasi* yang dikenal sebagai *garis Van Mook*. Sementara itu di Sumatera Selatan, Belanda tetap berada di Palembang hingga masa agresi militer yang kedua.

Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan sejak awal Januari 1947 secara total telah dikuasai Belanda yaitu setelah peristiwa lima hari lima malam yang membawa korban banyak di antara kedua belah pihak. Gencatan senjata yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 6 Januari 1947 tidak mempunyai fungsi bagi Belanda dan juga tidak ditaati. Pihak Belanda tetap memperlakukan rakyat dan daerah yang berada di bawah kekuasaannya secara sewenang-wenang. Gangguan dan teror yang dilakukan oleh Belanda semakin memuncak hingga memasuki bulan Juli 1949 dalam masa agresi Belanda kedua.

Demi berlanjutnya Pemerintahan dan administrasi negara, maka mulai sejak Desember 1947 secara berangsur-angsur, baik pemerintah sipil maupun militer dipindahkan ke luar kota. Pertama kali di Lubuk Linggau kemudian pindah ke Curup sampai akhir tahun 1949. Sedangkan untuk militer telah terlebih dahulu mengungsi keluar Palembang, yaitu pada bulan Oktober 1947. Menyusul pula

---

<sup>140</sup> Sumatera Selatan dengan ibukotanya di Palembang pada waktu itu wilayahnya meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Jadi seluruh kawasan Bengkulu merupakan bagian dari Sumatera Selatan.

<sup>141</sup> Siti Rohanah, *Op.cit.*, hal. 66.

Pemerintahan sipil memasuki daerah Rejang Lebong, yaitu Curup dan Muara Aman.

Pada tanggal 22 Juli Baturaja dibom oleh pihak Belanda dengan tiga belas buah bom, kemudian disusul pula dengan pemboman jalan kereta api di Baturaja pada tanggal 23 Juli 1947 dengan 17 bom. Dengan adanya pemboman yang dahsyat ini maka pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Juli 1947 jam 4.30 fajar Belanda terus ke Maetapura, tetapi mereka belum dapat mendudukinya karena mendapat perlawanan yang hebat dari Badan Perjuangan dan TRI. Barulah pada tanggal 27 September 1947 Martapura diduduki oleh tentara Belanda. Dalam bulan Agustus 1947 diadakan serangan yang hebat oleh Barisa Sabilillah yang dipimpin oleh seorang Kyai dari Lampung terhadap tentara Belanda yang berada di Baturaja, hingga banyak mendatangkan korban jiwa di kedua belah pihak.

Dengan adanya Agresi Militer Belanda yang pertama ini hampir 2/3 dari Karesidenan Palembang diduduki musuh. Kedudukan Sub Komando SS yang berada di Lahat terpaksa pindah ke Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau Sub Komando SS diganti namanya menjadi Teritorium SS.<sup>142</sup> Pada bulan Januari 1948, maka dibentuklah satu panitia TNI yang tugasnya untuk menyelenggarakan peleburan laskar-laskar Napindo, Pesindo, dan Hisbullah menjadi Batalyon 36 dan 38.

Panitia ini diketuai oleh Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Kemudian dalam bulan Februari 1948 dibentuk satu panitia yang bernama "*Committe Urusan Truce agreement* (CUTA), yang kemudian dirubah menjadi Panitia Truce Agreement, yang diketuai oleh Kolonel Hasan Kasim. Panitia ini beberapa kali mengadakan perundingan dengan pihak Belanda di Tebing Tinggi dan Sungai Laru. Tetapi perundingan ini tidak mendatangkan hasil.

Tempat-tempat yang diduduki oleh tentara Belanda bukanlah menjadi aman dan tentram tetapi malah menjadi kacau karena rakyat hidup dalam ketakutan. Tentara Belanda telah bertindak sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Banyak sekali dilakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap rakyat yang tidak bersalah. Meskipun demikian, Belanda tidak merasa aman karena sering mendapat serangan dari pihak TRI dan Badan-Badan Perjuangan. Di Sirih Pulau Padang dan Kayauagung telah menewaskan 21 orang tentara Belanda. Di dusun-dusun yang diduduki Belanda telah dikosongkan karena penduduknya telah mengungsi.

---

<sup>142</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1954), hal. 267.

Meskipun pada Agresi Militer yang pertama ini Belanda telah berhasil menguasai hampir 2/3 wilayah Sumatera Selatan, tetapi untuk daerah di kawasan Bengkulu, Belanda belum berhasil melakukan penyerangan dan baru dimulai pada agresi militer yang kedua. Pada saat agresi militer pertama, sebagian dari tentara rakyat di Bengkulu dikirim ke daerah-daerah lain, seperti Lubuk Linggau dan Lahat untuk membantu menahan arus serangan Belanda. Di samping itu juga untuk membendung gerakan pasukan Belanda yang akan memasuki wilayah Curup melalui Lubuk Linggau.

Agresi militer Belanda yang pertama ini secara nasional membawa implikasi yang besar, terutama setelah diadakan perundingan Linggarjati antara Republik Indonesia dengan Belanda yang berlangsung tanggal 15 Nopember 1946 yang ditandatangani tanggal 23 Maret 1947. Di dalam negeri suasana politik mengalami perubahan, di mana banyak partai politik yang kecewa terhadap kinerja kabinet Syahrir dalam menangani perundingan Linggarjati, yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Syahrir. Secara teritorial wilayah Reupli menjadi kian sempit, sebab berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah RI secara de facto hanya meliputi Pulau Jawa, Madura dan Sumatera.

Di lain pihak perjanjian Linggarjati membawa posisi Belanda lebih baik. Tetapi karena tujuan Belanda ingin menguasai Indonesia, maka dalam pidati radio Belanda mengatakan bahwa : *"Jangan menerima Linggarjati, hancurkan Republik Indonesia secara terang-terangan atau dengan serangan di bawah tanah"*.<sup>143</sup>

Sejak tanggal 26 September 1946 Belanda mempekuat pasukannya di Indonesia dengan mendatangkan Divisi 7. Pada tanggal 30 Nopember 1946 Pasukan Inggris meninggalkan Indonesia setelah diakuinya kekuasaan *de facto* Republik Indonesia terhadap Jawa, Madura dan Sumatera sebagai hasil perjanjian Linggarjati. Kekuasaan dan tanggung jawab Inggris diserahkan kepada NICA (*Netherland Indies Civil Administration*).

Di sisi lain, posisi Republik Indonesia justru bertambah kuat di mata internasional. Hal ini menyebabkan Belanda menjadi jengkel, mengingat posisi militer mereka di Indonesia justru berada di atas angin, sehingga secara sepihak membatalkan perjanjian Linggarjati. Pembatalan itu diikuti serangan militer untuk menguasai kembali wilayah Republik Indonesia.<sup>144</sup> Hal ini menjadi salah satu alasan

---

<sup>143</sup> Zusneli zubir, dkk., *Op.cit.*, hal. 51.

<sup>144</sup> Belanda menyebut aksi militernya dengan istilah *"aksi Polisional"* yang maksudnya tindakan untuk membasmi para pengacau keamanan (kaum ekstremis). Sedangkan bagi bangsa Indonesia gerakan militer Belanda samadengan penyerangan secara militer (Agresi Militer I).

pembenaran Belanda untuk melakukan tindakan militer terhadap kekuatan Republik Indonesia yang baru merdeka.

### 3. Perjuangan Pada Masa Agresi Militer II

Pertikaian antara Belanda dan Indonesia semakin meruncing dan dalam kondisi yang semakin kritis, maka pada tanggal 13 Desember 1948 Bung Hatta meminta kembali Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda. Namun uluran tangan tersebut dijawab oleh pihak Belanda pada tanggal yang sama pula bahwa perundingan tidak akan ada jika tidak didasarkan pada tuntutan yang diajukan Belanda.<sup>145</sup>

Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, Belanda melalui Dr. Van Mook memberitahukan kepada Republik Indonesia dan KTN (Komisi Tiga Negara) bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 16.00 Belanda mulai melancarkan agresi militernya yang kedua. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung ditujukan ke ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Presiden Sukarno diterbangkan ke Prapat Sumatera Utara dan Wakil Presiden M. Hatta dibuang ke Bangka. Beberapa bulan kemudian Presiden Sukarno dipindahkan ke Bangka.<sup>146</sup>

Sebagai daerah penghasil beras dan hasil bumi lainnya yang terpenting, maka daerah Rejang Lebong juga mendapat incaran Belanda. Pada saat Palembang dikuasai, maka Belanda meneruskan langkahnya dengan melancarkan serangan ke berbagai daerah untuk menguasai daerah secara penuh. Pada akhirnya daerah Rejang dan Lebong menjadi pusat logistik Belanda di Sumatera Bagian Selatan.

Pada tanggal 3 Januari 1949 dari Lubuk Linggau Belanda melancarkan serangan yang pertama untuk memasuki Rejang Lebong. Namun Belanda pun harus berhadapan dengan TNI dalam kesatuan Kompi I dan Batalyon 28 STB yang bertanggung jawab atas Curup dan sekitarnya.

Sebagai tanggapan atas tindakan Belanda terhadap bangsa Indonesia maka pimpinan Angkatan Darat merencanakan konsepsi

---

<sup>145</sup> Nograho Notosusanto, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 156-157. Baca juga Firman, DS., *Perjuangan Rakyat Tanah Rejang Sebuah Fragment Sejarah Perjuangan Fisik Rakyat di Kota Curup dan Sekitarnya*, Penda Rejang Lebong, 2000), hal. 62.

<sup>146</sup> *Ibid.*



pertahanan Republik Indonesia yang disebut Pertahanan Rakyat Republik Semesta (*total people's defence*). Untuk menghadapi serangan agresi militer Belanda yang kedua ini tidak ada cara lain melainkan membentuk persatuan dalam pertahanan dan keamanan. Untuk menandai hal tersebut harus ada satu tekad bahwa perjuangan bukan saja dilakukan oleh pihak militer saja, tetapi juga oleh rakyat Indonesia bersama seluruh komponen bangsa.

Penjabaran pelaksanaan serangan terhadap Belanda didasarkan pada pengalaman saat menghadapi agresi militer Belanda yang pertama. Pengalaman tersebut ditambah pula dengan kenyataan bahwa lebih kurang 35.000 tentara keluar dari kantong-kantong yang berada di daerah pendudukan Belanda, baik di Jawa maupun di Sumatera.<sup>147</sup>

Kiranya Belanda belum puas dengan kenyataan tekad bangsa Indonesia. Mereka masih ingin menyerbu ke daerah-daerah yang belum berhasil dikuasainya. Demikianlah pada tanggal 19 desember 1948 mereka pun mulai dengan gerakannya yang terkenal dengan nama agresi Militer yang kedua, dan menyerbu terus ke daerah-daerah pedalaman yang dipertahankan oleh TNI dan badan-Badan Perjuangan. Akibat dari penyerbuan dan serangan tentara Belanda yang kedua kali ini, TNI terpaksa meninggalkan Lubuk Linggau setelah mengadakan perlawanan, karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap dan modern ditambah dengan adanya pesawat udara. Staf Teritorium Sumatera Selatan pindah ke Muara Aman.<sup>148</sup>

Pada tanggal 3 Januari 1949 Belanda melakukan serangan lagi dengan tembakan yang dilakukan dari kapal perang ke kota Bengkulu. Penembakan ini terjadi sejak pagi hari hingga sorenya. Sementara Belanda mengadakan tembakan dari kapal perang, mereka berusaha mendarat ke pantai dengan perahu-perahu motor. Tetapi belum sempat mereka mendarat telah disambut serangan balasan oleh TNI, sehingga akhirnya mereka kembali ke pangkalannya.

Keesokan harinya, tanggal 4 Januari 1949 dua pesawat tempur Belanda menembaki kota Bengkulu untuk melindungi tentara Belanda yang akan mendarat di pelabuhan Bengkulu. Dalam pertempuran ini pihak Belanda banyak jatuh korban, meski akhirnya berhasil menguasai kota Bengkulu. TNI yang dipimpin Kapten Nawawi dan Kesatuan ALRI yang dipimpin Letnan Wim Tanawiwi terpaksa meninggalkan kota Bengkulu sampai sejauh 10 km dari kota. Pusat pertahanan TNI di Dusun Taba Jambu sekitar 10 km dari kota Bengkulu diserang Belanda.

---

<sup>147</sup> Nogroho Notosusanto, *Op.cit.*, hal. 159.

<sup>148</sup> "Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan", *Op. Cit.*, hal. 268.

Belanda telah berkuasa dengan kekerasan, namun rakyat tidak akan merobah tekadnya untuk tetap memusuhi Belanda. Serangan balik dari TNI datang secara tiba-tiba dan sulit diduga oleh Belanda sehingga mereka tidak merasa aman. Jika siang hari Belanda yang berkuasa, tetapi di malam hari justru TNI yang lebih berkuasa karena TNI melakukan taktik perang gerilya dan taktik perang malam.

Pada tanggal 7 Januari 1949 tentara Belanda dapat menduduki Curup dan beberapa hari kemudian mereka juga menduduki Kepahyang, yang pada akhirnya ditinggalkan lagi.<sup>149</sup>

Tanggal 30 Januari 1949 hari Sabtu jam 12 siang tentara Belanda memasuki Muara Dua. Masuknya tentara Belanda di kota ini dilakukan dari tiga jurusan. Jurusan pertama datang dari Martapura melalui Simpang. Pada jurusan ini dipertahankan oleh Kapten Riyakudu dan Mayor Dani. Dari jurusan yang kedua datangnya dari Baturaja melalui Tanjung Kakap dan terus ke jalan Mahanggin. Jurusan ini dipertahankan oleh laskar rakyat yang dipimpin oleh Patih Nawawi. Jurusan yang ketiga datangnya dari baturaja terus ke Ogan Ulu melalui jalan Tenang. Rombongan tentara Belanda yang datangnya dari jurusan yang ketiga ini tidak masuk ke Muara Dua, karena dipukul mundur oleh pertahanan rakyat yang ada di sana.

Pada saat tentara Belanda memasuki Muara Dua, pihak TNI telah melakukan politik bumi hangus, sehingga keadaan di Muara Dua gelap diliputi oleh asap tebal karena Muara Dua telah menjadi lautan api. Bumi hangus ini dilakukan 2 jam sebelum Belanda memasuki Muara Dua.

Ketika Muara Dua terbakar menjadi lautan api, pesawat tempur Belanda melayang di udara dan memberi isyarat agar tentara Belanda segera masuk kota Muara dua dengan harapan api dapat dipadamkan. Ketika pasukan Belanda sampai di pangkal jembatan, mendapat sambutan dari pihak gerilya dengan tembakan yang hebat. Maka terjadilah pertempuran sengit di pangkal jembatan. Akhirnya tentara Belanda dapat masuk ke kota Muara dua dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Pada keesokan harinya melayanglah pesawat udara Belanda B 29 di atas Muara Dua untuk menjatuhkan ransum dan perbekalan makanan. Hal ini dilakukan karena jalan darat tidak aman dan mendapat serangan gerilyawan secara mendadak.

Seminggu setelah Belanda menduduki Muara Dua, pada malam Jum'at jam 24 tengah malam, TNI masuk Muara Dua dan pada jam dua malam terjadi pertempuran sengit antara TNI dengan tentara Belanda. Satu minggu kemudian TNI melakukan serangan mendadak pada malam

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 268.

Jum'at jam 3 sampai jam 7 pagi. Penyerangan ini dilakukan dari dua jurusan, yaitu dari sebelah Ilir Muara Dua dipimpin oleh Mayor Dani bersama laskar rakyat. Dalam pertempuran ini pihak Belanda banyak mengalami korban.

Pada tanggal 15 April 1949 Muara Aman berhasil diduduki oleh tentara Belanda. Staf Teritorium Sumatera Selatan pindah ke Dusun Taba Marga Selupu Lebong dan kemudian ke Lebong Tandai. Tidak lama kemudian, maka daerah Sumatera Selatan dijadikan Daerah Militer Istimewa dengan Dr. AK Gani sebagai Gubernur Militer.

Meskipun sudah banyak kota-kota yang telah diduduki Belanda, semangat perlawanan dari sebagian besar rakyat yang dipimpin dan dipelopori oleh Tentara Nasional Indonesia masih tetap membara, bahkan semakin meningkat.

Kota Kepahyang yang telah diduduki Belanda pada beberapa hari sebelumnya hendak dijadikan oleh belanda sebagai pangkalan untuk batu loncatan agar dapat menembus gunung sesuai dengan rencana mereka untuk dapat mengukuhkan poros Lubuk Linggau – Bengkulu. Oleh karena itu, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengamankan kedudukan mereka di Kepahyang.<sup>150</sup>

Pada tanggal 15 Januari 1949 mereka melakukan geakan ke arah Dusun Permu. Perkebunan Kabawetan mendapat serangan dari segala penjuru. Di daerah ini mereka berhadapan dengan pasukan di bawah pimpinan Van drig Buldani Masik. Pasukan ini terdiri dari : (1) Vandrig Buldani Masik sebagai Komandan; (2) sersan Mayor Ishak azhari sebagai Wakil komandan; (3) Pasukan di bawah pimpinan Sersan Sudi, Kopral Tunip, Kopral Sami'un, Kopral Sardi.

Pada tanggal 15 Januari 1949 bersamaan dengan penyerangan Belanda ke Permu, pasukan ini di bawah pimpinan Wakil Komandannya terlibat pertempuran dengan Belanda di Dusun Karanganyar. Pada tanggal 17 januari 1949, Belanda kembali menyerang dari jurusan Kampung Bogor dan berhadapan dengan pasukan yang sama, langsung di bawah pimpinan kmandannya, di mana dua orang serdadu Belanda dapat ditembak mati. Pada tanggal 19 Januari 1949 pasukan ini terlibat pertempuran di Lahar Kabawetan dan di saat ini ada 4 orang serdadu Belanda tertembak.

Beberapa waktu kemudian terjadi pertempuran di dusun Karanganyar dan saat itu Belanda berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Letnan H.Z. Arifin Mursalin yang dibantu oleh Vandrig

---

<sup>150</sup> M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 170.

affandi abiddin, sersan Mayor M. Saleh Su'ib, sersan Abdul Rani Sayuti, Sersan R. Usman, Kopral M. Yakub Taufik, Laskar Rakyat M. Dudeng. Pertempuran ini berlangsung malam hari dan baru berakhir pada waktu menjelang fajar. Dalam pertempuran ini banyak serdadu Belanda yang tewas terkena tembakan dan pecahan-pecahan landmijn. Selain kehilangan serdadu Belanda juga kehilangan kuda dan sejumlah pelornya.

Kemudian terjadi pula pertempuran di dalam kota Curup dan daerah antara Curup dan Kepala Curup sebagai berikut :

- Penyerbuan pada malam hari dipimpin oleh Letnan 1 Z. Arifin Jamil terhadap sentral listrik di Sukaraja dan Benteng di Curup.
- Penyerbuan malam hari oleh pasukan yang dipimpin Sersan A. Hamid terhadap rumah R. Abdullah di Air Rambai Curup, di mana tempat tersebut dipergunakan Belanda untuk MIDnya.
- Pertempuran yang dipimpin oleh Letnan Muda Ishak di antara Waringin Tiga dan Pelalo. Dalam perang ini, satu orang anggota TNI luka parah dan Belanda satu orang tertembak.
- Pertempuran di Jembatn Waringin Tiga, di mana Kopral Omben terluka dan kemudian meninggal.
- Pertempuran di Mojorejo telah memakan korban seorang gerilyawan bernama Kopral Sur gugur tertembak tentara Belanda.
- Pertempuran di bawah pimpinan Vandrig Nursyirwan dibantu oleh Kopral Sadun di Kampung Jawa Curup, seorang serdadu belanda mati ditembak.semua yang berada di badan serdadu Belanda itu dapat disita, termasuk sebuah standgun dan pelornya.

Di antara kota Curup dan Daspetah terjadi pula pertempuran dengan tentara Belanda oleh Detasemen Markas di bawah pimpinan Vandrig M. Toha Jenangkalam/Sersan A. Dulahan.

Belanda berusaha membawa suplainya dengan pasukan kuda dari Curup ke kota Kepahyang. Semula pada siang hari, tetapi karena seringkali terjadi penghadangan, sehingga mereka mencoba untuk membawanya pada malam hari. Pada akhirnya untuk beberapa waktu mereka mengirim perbekalannya ke Kepahyang terpaksa melalui udara.

Belanda juga melakukan gerakan-gerakan dengan melakukan penyerangan ke arah utara Bengkulu, seperti yang terjadi sebagai berikut : (1) Pertempuran di Sungai Hitam; (2) Pertempuran Pasar Pedati, di mana Belanda membakar rumah penduduk, karena banyak serdadunya mati terkena landmijn; (3) Pertempuran di Pal Delapan; (4) Pertempuran di kerkap; (5) Pertempuran di Pondok Kelapa, yang

membawa korban seorang pejuang bernama Letnan H. Zulkifli gugur terkena peluru musuh.

Pada tanggal 22 Januari 1949, Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan dengan surat perintah No. 47/W.O. memerintahkan semua pegawai Republik Indonesia dengan tidak ada kecualinya, keluar dari tempat-tempat yang diduduki musuh dan meneruskan kewajibannya masing-masing di daerah yang aman dari gangguan Belanda.

Pada hari yang sama, Komandan Sub Teritorium Bengkulu mengeluarkan perintah operasi No. 50/W.G. yang ditujukan kepada komandan-komandan front di daerah Sub Teritorium Bengkulu. Untuk memudahkan hubungan dengan pasukan yang menyebar di daerah Sub Teritorium Bengkulu, maka dibentuklah staf darurat (*noodstaf*) seperlunya.

- Noodstaf I di Masmambang di bawah pimpinan Letnan II Zamhari Abiddin. Staf ini kemudian dipindahkan ke Manna dengan nama Front Manna Kaur (FROMAK), karena Letnan Zamhari Abiddin di samping tugasnya itu, ditugaskan pula untuk mengkoordinir pemerintahan di daerah Manna dan Kaur.
- Noodstaf II di Pagarjati di bawah pimpinan Kapten Kiswoto. Staf ini kemudian dipindah ke Lubuk Durian.
- Noodstaf III di Lubuk Sini di bawah pimpinan Letnan II Alamsyah, kemudian dipindah ke Pagarjati.
- Noodstaf IV di Muara Aman di bawah pimpinan Letnan II Harun Alikera.

Kemudian keluar lagi perintah operasi dari Komandan Sub Teritorium Bengkulu No. 53/WG yang ditujukan kepada seluruh slagorde Sub Teritorium Bengkulu, dan seluruh pimpinan pemerintahan sampai yang serendah-rendahnya yang antara lain isinya : “Taktik tentang kemudahan pelaksanaan gerilya. Memupuk dan mendidik, kalau perlu memaksa rakyat dan penduduk dengan tidak ada kecualinya, agar tidak bekerja sama dengan pihak musuh dan memboikot dalam arti yang seluas-luasnya. Pembatalan perintah gubernur Sumatera Selatan mengenai pegawai-pegawai Republik Indonesia yang harus tinggal di kota-kota. *Snelrecht* yang harus dilakukan kepada tiap-tiap pengkhianat terhadap Republik Indonesia sebagai sangsi dari instruksi pemboikotan. Keharusan meninggalkan tempat-tempat (kota) yang diduduki musuh dan bila perlu membakar rumahnya sendiri. Kegiatan-kegiatan dan gerakan-gerakan ofensif”.

Reaksi yang timbul berkenaan dengan agresi Belanda ini adalah :

1. Pada tanggal 20-23 Januari 1949 Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru mengadakan Konferensi di New Delhi yang dihadiri 19 Negara Asia. Konferensi ini menelorkan satu resolusi untuk menghentikan agresi Belanda dan agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.<sup>151</sup>
2. Pada tanggal 24 Januari 1949 peninjau militer Perserikatan bangsa-Bangsa melaporkan kepada Dewan Keamanan antara lain : (1) Pengembalian ketentraman dan ketertiban umum belum dapat dilakukan ke dalam daerah yang dahulu dikuasai oleh Republik Indonesia; (2) Banyak daerah di mana Belanda tidak mempunyai cukup pasukan untuk melawan dengan cepat taktik yang dipakai Republik Indonesia; (3) Tentara Belanda tidak mempunyai cukup pasukan atau polisi untuk melindungi rakyat di daerah-daerah ini; (4) Keadaan belum stabil benar untuk memungkinkan dibangunnya pemerintahan sipil yang berkuasa.<sup>152</sup>
3. Sesuai dengan resolusi Konferensi New Delhi, maka Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa pada tanggal 28 Januari 1949 telah menerima satu resolusi dewan Keamanan sebagai berikut : (1) Penghentian dari semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian dari semua aktivitas gerilya oleh Republik Indonesia. Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. (2) Pembebasan dengan segera dengan tidak bersyarat dari semua tahanan politik di dalam daerah Republik Indonesia oleh Belanda sejak 9 Desember 1949. (3) Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar-pembesar Republik Indonesia di Yogyakarta dengan segera, agar mereka dapat melaksanakan pasal 1 dilakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan bebas, pada tingkat pertama pemerintahan dalam kota Yogyakarta dan daerah-daerah sekelilingnya. Sedangkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang lain (menurut batas-batas Persetujuan Renville) dikembalikan dengan berangsur-angsur kepada Republik Indonesia. (4) Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati. Persetujuan Renville dan Plan Cochran dan terutama berdasarkan pembentukan satu pemerintahan interim federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>151</sup> J. Leimena, *Perselisihan Indonesia – Belanda*, (Jakarta : Grafika, 1949), hal. 32.

<sup>152</sup> J. Leimena, *Ibid.*, hal. 31.

Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950. (5) Mulai sekarang, maka Komisi jasa-jasa Baik ditukar namanya menjadi Komisi untuk seluruh Indonesia (Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dan pekerjaannya adalah untuk membantu di dalam perundingan-perundingan untuk mengurus pengembangan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengamati pemilihan dan berhak membantu tercapainya penyelesaian.<sup>153</sup>

Pada hakekatnya Belanda menolak resolusi Dewan Keamanan tersebut. Mereka tanpa memperdulikan semuanya itu terus melakukan gerakan militer, seolah-olah tidak ada persoalan apa-apa. Tetapi sebaliknya dari pihak Republik Indonesiaberdasarkan pengalaman-pengalaman pahit di masa yang sudah-sudah, bukan saja melakukan perlawanan yang bersifat bertahan jika diserang, juga melakukan penyerangan dan penghadangan secara rutin. Pada tanggal 28 Januari 1949 terjadi pertempuran di Jembatan Tebat Karai. Dalam pertempuran tersebut, ada tiga orang Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur, yaitu Sersan Fatahul Arifin, Sersan Abubakar dan Prajurit Sa'um.<sup>154</sup>

Pada waktu yang bersamaan juga terjadi pertempuran di Dusun Air Putih Curup di bawah pimpinan Vandrig Z. Anwar Duramin dan Vandrig Nursyirwan. Ikut bergabung pasukan dari Brimob yang dipimpin Arifin Kabri dan Ismawar. Pertempuran terjadi di dekat Jembatan Air Putih sekitar 1 km dari kota Curup. Dengan satu ledakan landmijn dan rentetan tembakan dari para pejuang telah membuat 8 orang tentara Belanda tewas. Pada saat menarik mayat-mayat mereka terkena lagi 5 orang serdadu Belanda tewas di Jembatan Air Putih yang telah miring karena sebelumnya sudah diledakan.

Pertempuran terjadi pula di Dusun Bamoi yang dipimpin oleh Vandrig Abas. Penghadangan terjadi pula di Jembatan Kecil terhadap serdadu Belanda, oleh para pejuang yang dipimpin Vandrig Iskandar Bakhsir dan Vandrig Samsuddin Yauw. Serangan-serangan mendadak dilakukan oleh para pejuang secara tiba-tiba dan tak terduga, sehingga Belanda mengalami kerugian yang besar.

Untuk melakukan blokade total terhadap basis pertahanan Belanda, Gubemur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 29 Januari 1949 mengeluarkan lagi instruksi No. 9 yang isinya memerintahkan untuk menembak mati setiap orang yang ingkar terhadap Republik Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada mereka

---

<sup>153</sup> J. Leimena, *Ibid.*, hal. 32-33.

<sup>154</sup> M.Z. Ranni, *Op.cit.*, hal. 175.

yang masih memasukkan bahan makanan dan keperluan sehari-hari ke kota yang diduduki Belanda.

Pada akhir bulan Januari 1949, Komandan Sub Teritorium Bengkulu menetapkan daerah Kepahyang dan sekitarnya menjadi satu front. Untuk memimpin front ini ditunjuk Kapten Salim Batubara, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Staf Sub Teritorium Bengkulu. Untuk sementara jabatan Kepala Staf ditunjuk Kapten Dr. Y. Rusad merangkap Kepala Jawatan IV/Kepala Kesehatan Sub Teritorium Bengkulu. Dengan terbentuknya Front Kepahyang maka para pejuang yang berada di sekitar Kepahyang dapat ditempatkan dalam satu komando. Tanggal 2 Februari 1949 Kapten Salim Batubara pergi ke Gunung untuk menemui beberapa orang yang ditugaskan di tempat tersebut antara lain Letnan II Hadis Lani. Pada tingkat pertama Kapten Salim Batubara bertemu dengan pasukan yang berada di antara Kepahyang dan Keban Agung.<sup>155</sup>

Pada tanggal 3 Februari 1949 terjadi pertempuran antara TNI yang dipimpin oleh Letnan II Syamsulbahrum dengan serdadu Belanda di Air Sempiang. Ada beberapa orang serdadu Belanda tewas. Pasukan Belanda tersebut baru pulang dari rumah seorang kaki tangannya di Tabasanting. Pada saat penggrebekan di rumah kaki tangan Belanda itu, Letnan II Syamsulbahrum tertikam dari belakang sehingga harus dibawa ke Empat Lawang untuk dirawat. Pimpinan Kompi II/Batalyon XXVIII diambil alih oleh Vandrig Inuh Mustafa.

Pertempuran juga terjadi di kawasan Selatan Bengkulu, di antaranya yaitu : (1) Perang di Jembatan Gedang, sekitar 6 kilometer dari kota Bengkulu. Dalam pertempuran ini gugur tiga orang pejuang bernama Ibnu Hajar Rasyid, Gazali dan Kasim. (2) Ketika serdadu Belanda berangkat dari Pekan Sabtu menuju kota Bengkulu, sampai di Pagar Dewa dihadang oleh pasukan TNI yang dipimpin oleh Vandrig Samsuddin Yau, Gafar dan Wahid. Maka terjadilah tembak menembak. Tidak ada keterangan berapa korban dari kedua belah pihak. (3) Pada hari yang sama terjadi pula pertempuran di Dusun Sukarami, juga tidak ada kejelasan berapa yang meninggal dalam pertempuran tersebut.

Pada tanggal 8 Februari 1949 jam 18.00 terjadi perang di Liku Aur Karang Anyar dipimpin oleh Vandrig Buldani Masik dan wakilnya Letnan Muda R. Iskandar Amran. Dalam pertempuran ini ikut serta pasukan dari PM. Belanda kehilangan 9 orang serdadu, 3 ekor kuda beban, beberapa peti peluru, granat tangan dan obat-obatan. Pertempuran terjadi sepanjang malam sampai pagi. 9 Februari 1949.

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 176.



Pada tanggal 12 Februari 1949, Komandan Front Kepahyang Kapten Salim Batubara memimpin pertempuran di Penajung Panjang. Dalam pertempuran ini Kapten Salim Batubara gugur. Semenjak itu terjadi kekosongan pimpinan yang dapat mengkoordinir para pejuang di sekitar Kepahyang. Komandan Sub Teritorium Sumatera Selatan mengumpulkan para komandan Batalyon XXXVI, Batalyon XXVIII dan komandan Batalyon X bertempat di Semelako, tempat kedudukan staf dan komandan Sub Teritorium Sumatera Selatan untuk mengadakan rapat operasi. Rapat itu membahas masalah rencana serangan umum terhadap kota Curup yang akan dilakukan oleh ketiga pasukan tersebut.<sup>156</sup>

Kepada Batalyon XXXVI dan Batalyon X diperintahkan untuk melakukan persiapan seperlunya di tempat masing-masing. Sedangkan Batalyon XXVIII yang berada di sekitar kota Curup agar melakukan gangguan terhadap Belanda di kota Curup sampai pada saat datangnya serangan umum. Namun entah karena apa serangan umum tersebut tidak menjadi kenyataan, karena ada perintah pembatalan dari Komandan Sub Teritorium Sumatera Selatan.

Pada tanggal 16 Februari 1949 Belanda melakukan penyekatan terhadap pertahanan para pejuang di Tabarenah. Belanda mempergunakan senjata berat, selain senapan mesin besar juga digunakan beberapa buah mortir. Tabarenah merupakan pertahanan untuk menutup jalan ke arah Muara Aman, di mana terdapat Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, Komandan Sub Teritorium Sumatera Sumatera Selatan dan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan. Untuk kawasan pertahanan ini telah ditugaskan Batalyon X di bawah pimpinan Letnan I Hutabarat. Beberapa anggota TNI terkena peluru musuh dan mortir. Belanda tidak berhasil menyeberangi jembatan Musi dan setelah beberapa jam melakukan penyerangan, mereka dipukul mundur kembali ke kota Curup.

Ketika Belanda melakukan serangan ke Tabarenah, Batalyon XXVIII yang dipusatkan di Bumisari, maju ke arah Curup sampai di jembatan Air Rambai Curup. Setelah diperhitungkan jumlah senjata yang ada, di mana tidak ada satu pun senapan mesin di Batalyon ini, untuk memasuki kota Curup pada siang hari yang hanya tinggal beberapa ratus meter lagi, tidak menguntungkan. Oleh Komandan Batalyon dikeluarkan perintah untuk segera menarik pasukan ke tempat semula.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 177.

<sup>157</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 178.

Sementara itu pihak Belanda telah berhasil menyeberangi Sungai Musi di Kepahyang. Tanggal 22 Februari 1949 terjadi pertempuran sengit di Bukit Judi. Ada beberapa orang pejuang gugur, di antaranya yaitu Z. Abidin. Pertempuran berlanjut di Tebek Monok yang telah menewaskan seorang prajurit bernama Zubir. Yang terlibat dalam pertempuran di Bukit Judi adalah Sersan Z. Arifin Tarkus, Kopral Baskah, Kopral Mahasan dan ayah Kopral Mahasan. Pada pertempuran ini dua orang serdadu Belanda tewas, namun dipihak TNI yang gugur adalah ayah Kopral Mahasan.

Belanda berhasil mendesak pasukan pejuang dan maju ke arah gunung dan di Liku Talang Serawai Belanda dihadang oleh pasukan pejuang yang dipimpin oleh Vandrig Afandi Abidin dan Kopral Baskah. Kedua orang tersebut terluka dalam pertempuran kena peluru musuh.

Antara Kepala Curup dan Despetah terjadi beberapa kali pertempuran, di mana sering dilakukan pencegahan terhadap serdadu Belanda :

- Pertempuran di Tebing Tiga Beradik Subanayam dipimpin oleh Mayor Abidin dan Letnan Muda Iskhak. Di tempat ini gugur Kopral Hud dan Sersan Sahri luka parah dan cacat seumur hidup.
- Pertempuran di Simpang Air Panas dipimpin oleh Letnan Muda Iskhak, Vandrig Rahman Rahim, Sersan Mayor Rajab, Sersan Kader Suhud. Belanda terdesak dan kehilangan peluru, topi waja dan lain-lain.
- Pencegatan di bawah pimpinan Kopral Mukmin, Kopral yahya, Kopral Kicei di Sukaraja. Dua orang serdadu Belanda terluka.
- Pertempuran di Tanjung Dalam dipimpin Vandrig Abbas.
- Pencegatan antara Bumisari dan Ujan Mas dipimpin oleh Vandrig M. Toha Jenangkalam, Sersan A. Dulahan.
- Pencegatan di Dusun Pulogeto dipimpin Lettu Abihasan Said dan Lettu Z. Arifin Jamil, Vandrig Abbas dan Sersan A. Dulahan.

Usaha Belanda untuk menyerang Kabawetan dilakukan secara terus-menerus. Tanggal 25 Februari 1949 mereka menyerang Bengko. Di tempat ini Belanda berhadapandengan pasukan (1) Kompi II Batalyon XXVIII dipimpin Vandrig Inuh Mustafa; (2) Pasukan Polisi Militer dipimpin Letnan Muda Nur Sasdi; (3) Pasukan yang dipimpin Letnan Muda Abuhanifah. Dalam pertempuran tersebut gugur Letnan Muda Abuhanifah dan Kopral Rasyid. Setelah pertempuran di Bengko, Belanda menyerang Kabawetan pada tanggal 28 Februari 1949.

Pertempuran terjadi di Tangsi Baru dan Tangsi Duren Kabawetan dipimpin Vandrig Buldani Masik. Dalam pertempuran ini laskar rakyat Agus ditawan Belanda dan kemudian ditembak mati di halaman pabrik. Selanjutnya yang gugur dalam pertempuran adalah Laskar Rakyat Panut, Sopan, Jamin dan Rukiat.<sup>158</sup>

Setelah pertempuran itu, anggota pasukan yang pergi ke kota Bengkulu di antaranya yaitu Kapten Safuan Gatam, Sersan Yusirana, Tentara Pelajar Murman Afandi, TP Emir Hali dengan maksud untuk melakukan peninjauan. Jam 17.00 mereka berangkat dari Tanjung Aur melalui Pulo Baai dan sampai di kota Bengkulu tengah malam. Pada siang hari terjadi pertempuran di Dusun Besar. Dalam pertempuran ini yang gugur adalah TP Kastalani, Zuljifli, dan 6 anggota lainnya. Dari sektor yang mengelilingi kota Bengkulu senantiasa diusahakan untuk memasuki kota untuk mengganggu ketenangan dan ketentraman Belanda.

Komandan Front Utara/Batalyon XXVI dibantu 3 orang TNI bernama Sersan Ibrahim Dahan, Sersan Mayor A. Manaf dan Kopral Hamzah dengan membawa 11 orang rakyat dari Dusun Bintunan, Lubuk Bedil dan Amparan di mana terdapat amun, Pasirah Marga Bintunan sendiri dan seorang imam dari Dusun Amparan, pada sore hari bergerak dari daerah utara menuju kota Bengkulu. Sekitar jam 23.00 mereka menyeberangi Sungai Serut di dekat muaranya dengan sebuah perahu. Dengan berjalan menyusur pantai Pasar Bengkulu mereka sampai di Tanjung Pura, tepat di depan bekas asrama pemeliharaan anak-anak yatim di Bengkulu. Tiba-tiba datang sebuah jip penuh dengan serdadu Belanda langsung menuju ke arah mereka dengan menyorotkan lampu jip dari jarak jauh. Mereka kemudian dihujani dengan tembakan senapan mesin. Akibatnya Imam dari Amparan gugur. Sebelum fajar, pasukan yang dibawa I.M. Syafei Ibrahim ini telah sampai di seberang Sungai Serut dan bergerak mundur ke arah Sungai Hitam.<sup>159</sup>

Batalyon XXVI yang dipimpin Komandan Batalyon Letnan I Nawawi Manaf melakukan serangan serentak dengan melibatkan sejumlah rakyat : (1) Penyerangan terhadap Pos Belanda di Dusun Surabaya dan di Jembatan Gedang dipimpin Vandrig Samsudin Yau. Kemudian dilakukan penyerangan terhadap Pos Belanda di Pekan Sabtu dan Padang Kemiling dipimpin Letnan I Jarab dan Amana. Kemudian dilanjutkan dengan pengecatan terhadap serdadu Belanda yang bergerak dari arah Bengkulu menuju Pekan Sabtu dipimpin oleh Vandrig

---

<sup>158</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 180.

<sup>159</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*

Samsudin Yau dan Supardi. Penghadangan ini terjadi di Dusun Sukarami.

Pada tanggal 1 Maret 1949 terjadi pertempuran di Tangsi Baru Kabawetan. Dalam pertempuran ini Kopral Sama'un gugur. Agresi Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan awal Maret 1949 telah berlangsung selama 2 bulan. Hal ini membuktikan bahwa :

- (1) Republik Indonesia masih eksis lengkap dengan aparat pemerintah;
- (2) Perjuangan berlangsung terus-menerus oleh para pejuang Republik Indonesia, melawan jika diserang dan menyerang pada setiap kesempatan, yang dilakukan diseluruh daerah perang, baik di Bengkulu maupun di seluruh Indonesia. Perjuangan TNI dan gerilyawan mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Tinggi Mahkota (HVK), Dr. Beel dalam pidatonya tanggal 19 Desember 1948 mengantar agresi Belanda, dengan congkak mengatakan antara lain :

“Pembersihan ini akan dijalankan dengan tidak bersyarat dan dengan konsekwen. Kita kan mengejar gerombolan teror itu dengan semua alat militer dan polisi yang ada pada kita tidak akan membiarkan mereka untuk meneruskan pekerjaan mereka baik di daerah yang telah berada di dalam pengawasan kita, maupun di dalam daerah yang sekarang akan dibebaskan”<sup>160</sup>

Mimpi dan angan-angan Dr. Beel tidak menjadi kenyataan. Tanggal 2 Maret 1949 BFO mengirimkan utusan ke Bangka untuk bermusyawarah dengan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda. Dengan suara bulat BFO menerima satu resolusi, yang di dalamnya telah dimasukkan syarat-syarat oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat ikut serta dalam Konperensi meja Bundar (KMB) :

- (1) Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dengan bebas dan merdeka;
- (2) Semua aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kedudukan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.<sup>161</sup>

Kemufakatan tersebut membuat pendirian BFO telah berada sejajar dengan Republik Indonesia.<sup>162</sup> BFO singkatan dari *Bijeenkomsst Federaal Overleg*, yaitu suatu badan untuk pertemuan musyawarah mengenai soal-soal federal yang terdiri dari Kepala-Kepala Negara yang diciptakan oleh Belanda sendiri, melalui konferensi federal pada

---

<sup>161</sup> J. Leimena, *Op.cit.*, hal. 70.

<sup>162</sup> M.Z. Ranni, *Op.cit.*, hal. 182.

<sup>163</sup> J. Leimena, *Op.cit.*, hal. 35.

bulan Mei 1948 di Bandung.<sup>163</sup> Maksud Belanda dengan BFO itu sudah jelas, yaitu untuk memperkecil arti Republik Indonesia dan diharapkan badan ini akan berpihak kepada Belanda.

Meskipun ini merupakan suatu peristiwa untuk ikut juga menentukan sesuatu di belakang hari, namun kekerasan yang telah ditunjukkan Belanda terhadap Republik Indonesia harus dihadapi dengan kekerasan pula. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan FBO. Mereka timbul kesadaran berdasarkan kenyataan yang ada. Pada saat Belanda gagal dengan agresinya dan secara politis terkepung di dunia internasional, maka kesempatan inilah yang digunakan FBO untuk membela Indonesia.

Memasuki bulan Maret 1949 serdadu Belanda bergerak ke arah gunung Kepahyang dan mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Sersan Arifin Tarkus. Terjadilah pertempuran di gunung Kepahyang. Tidak ada keterangan mengenai korban jiwa di kedua belah pihak. Tanggal 3 Maret 1949 terjadi pertempuran lagi di Kebun 10 Kabawetan, yang menewaskan seorang serdadu Belanda dan beberapa orang dari mereka terluka. Pertempuran di Kabawetan berlanjut sampai ke Taba Sating.

Penghadangan terhadap patroli Belanda oleh pasukan yang dipimpin oleh Kopral Yahya terjadi di kampung Jawa Curup. Demikian juga di Tebing Taba Mulan terjadi penghadangan oleh pasukan yang dipimpin Z. Arifin Jamil dan Vandrig M. Toha. Pertempuran juga terjadi di Seguring yang menewaskan Sudirun, seorang anggota laskar rakyat. Secara berturut-turut terjadi pertempuran antara serdadu Belanda dengan para pejuang, di antaranya yaitu pertempuran yang terjadi di Dusun Kota Pagu, Talang IV dan daerah Kandang / Pulo Bai. Tanggal 27 Maret 1949 terjadi pertempuran dengan Belanda, setelah Komando Sektor yang berkedudukan di Tanjung Dalam melakukan penghadangan terhadap Belanda. Korban di pihak kita adalah Vandrig Nursyerwan gugur dan Anwar Duramin luka berat terkena tembakan musuh.<sup>164</sup>

Dalam mencapai tujuan, Belanda selalu menghalalkan segala cara. Di samping pengerahan kekuatan, Belanda juga menempuh cara halus dan terselubung, membujuk, merayu, menipu, adu domba, menyuap dan sebagainya. Untuk melaksanakan ini semua, tentunya mereka telah melakukan penelitian dan penilaian saluran mana dan siapa pelaksana yang dapat mereka pakai untuk tujuan itu. Kemudian mereka

---

<sup>163</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), hal.62.

<sup>164</sup> M.Z. Ranni, *Op.cit.*, hal. 284-285.

memasang dan melebarkan jaringan, sebagaimana sejak awal telah sering diisyaratkan dan diperingatkan.

Pada tanggal 7 April 1949 seorang opsir dari Batalyon 28 membawa beberapa orang pengkut masuk ke kota Curup kemudian disambut Belanda. Setelah itu beberapa pengikut dari yang bersangkutan langsung dibawa ke intemerings kamp di Palembang dan yang bersangkutan dipencilkan sendirian dengan tidak berdaya. Mereka telah terperangkap dalam jaringan yang dipasang Belanda. Akibatnya Batalyon XXVIII terpukul. Namun sebagian besar dari mereka dapat melarikan diri, bergabung dengan induk pasukan. Yang menimpa Batalyon XXVIII ini merupakan kekalahan dalam pertarungan terhadap musuh, mereka lebih unggul karena persiapan, taktik dan peralatan mereka lebih baik.

Peristiwa masuknya beberapa perwira ke daerah/kota yang diduduki musuh dan atau yang mengamankan /menyelamatkan diri sendiri di tempat yang jauh dari daerah pertarungan dengan bermacam-macam dalih juga terjadi pada anggota lain dari Sub Teritorium Bengkulu, Polisi Militer dan lain-lain dengan cara dan motif yang berlainan.

Batalyon X Di Tabarenah digantikan oleh Batalyon XXXVI. Pada tanggal 14 April 1949 Belanda mulai menyerang kembali pertahanan Tabarenah. Mereka berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Letnan 1 Abinasan Said. Dalam pertempuran Tabarenah ini Belanda mengerahkan seluruh kekuatan dengan dibantu pesawat terbang.<sup>165</sup> Setelah Tabarenah dapat diduduki, pertempuran dilanjutkan di Rimbo Pengadang, Kota Donok, sekitar Tes dan Muara Aman.<sup>166</sup> Sentral listrik Tes, sebagai tempat pembangkit listrik seluruh Bengkulu dibumihanguskan oleh gerilyawan pimpinan Kapten Patiasina. Masih dalam bulan April 1949 Kapten Li Hia ditunjuk menjadi Komandan Front Kepahyang menggantikan Kapten Salim Batubara yang telah gugur. Belanda berusaha menembus gunung, tetapi gagal.

Pada tanggal 20 April 1949 Lebong Tandai sebagai tempat kedudukan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan diserang Belanda dengan melakukan pengeboman. Bersamaan dengan itu terjadi pertempuran di di sekitar Palik, Taba Terunjam dan Karang Tinggi. Dari arah Kepahyang, Belanda dapat menembus gunung dan selanjutnya Taba Penanjung dapat diduduki Belanda. Selanjutnya pada tanggal 25 April 1949 kota Muara aman dapat direbut Belanda.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 186.

<sup>166</sup> *Ibid.*, hal. 186.

Pimpinan gerilyawan mundur ke arah desa Taba Atas dan memindahkan pusat pertahanannya di Lebong Tandai.

Pada tanggal 30 April 1949 terjadi pertempuran di Dusun Taba Lagan. Dalam pertempuran ini pasukan kita dipimpin oleh Vandrig Samsuddin Yauw. Belanda diserang dengan meriam kecepek sehingga kerugian dipihak Belanda 6 orang tewas.<sup>167</sup>

Pertempuran terjadi di Lais, Kemumu, dan Lubuk Durian di kawasan Bengkulu Utara. Persenjataan Belanda lebih baik dan sempurna, maka daerah-daerah tersebut dapat diduduki Belanda. Akan tetapi tidak beberapa lama kemudian ditinggalkan lagi, karena kota Bengkulu selalu mendapat serangan dari Batalyon XXVI yang berada di sebelah selatan dan timur Bengkulu. Dalam pertempuran Lais, gugur Vandrig A. Laby.<sup>168</sup>

Seluruh pertempuran yang terjadi pada bulan April 1949 inibersamaan waktunya dengan usaha untuk membawa kembali Republik Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pihak Belanda menunjuk Dr. Van Royen sebagai Ketua Delegasi Belanda untuk menghadapi Republik Indonesia yang dipimpin Mr. Muhammad Roem. Dr. Yan H. Van Royen adalah seorang diplomat Belanda dengan kecerdikannya telah membela dengan gigih pendirian Belanda terhadap Indonesia dalam Dewan Keamanan. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan Roem – Royen Statement, yang isinya sebagai berikut :

Statement Delegasi Republik Indonesia (diucapkan oleh Mr. Moh. Roem pada tanggal 7 Mei 1949)

(1) Penghentian perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. (2) Kerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertibandan keamanan. (3) Turut serta pada Konferensi meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.<sup>169</sup>

Presiden Sukarno dan Wakil Prtesiden Muhammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan ke Yogyakarta.

Statement Delegasi Belanda (diucapkan oleh Dr. Van Royen pada tanggal 7 Mei 1949).

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hal. 187.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*, hal. 188.

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan, bahwa berhubung dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Roem ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Delegasi Belanda selanjutnya juga menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah auspecien UNCI dengan maksud : (a) Mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta; (b) Mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta dan bahwa ini adalah satu langkah yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.
3. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera dari semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditagkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.
4. Tidak mengurangi hak bagian-bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam azas-azas Linggarjati dan Renville, Pemerintah Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di atas daerah yang dikuasai Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik tersebut.
5. Pemerintah Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai satu saat yang nanti akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. Apabila suatu Badan Perwakilan Sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik Indonesia dalam Badan tersebut. Jumlah itu adalah separuh dari jumlah anggota-anggota semua, di luar anggota-anggota Republik.
6. Sesuai dengan maksud dalam petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 mengenai Konferensi Meja Bundar di Den Haag supaya perundingan-perundingan yang dimaksud oleh resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dapat diadakan selekas-lekasnya, maka Pemerintah Belanda akan berusaha sungguh-sungguhnya supaya konferensi itu segera



diadakan sesudahnya Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada konferensi perundingan-perundingan akan diadakan tentang bagaimana cara mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat sesuai dengan azas-azas Renville.

7. Berhubung dengan keperluan kerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, Pemerintah Belanda setuju bahwa dalam semua daerah di luar Keresidenan Yogyakarta di mana pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnya yang masih terus bekerja, akan tetap pada jabatan mereka. Dengan sendirinya pembesar-pembesar Belanda membantu Pemerintah Indonesia dalam hal keperluan-keperluan yang dikehendaknya, menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan semua orang Indonesia, termasuk juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik dan detail-detail teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak di bawah auspecien UNCI.<sup>170</sup>

Pernyataan-pernyataan telah disampaikan, yang baru merupakan persetujuan untuk memulai perundingan perdamaian yang masih dalam runtunan untuk menuju satu penyelesaian. Penyelesaiannya baik yang telah dinyatakan dengan lisan dan tulisan berbeda dengan yang ada di lapangan.

Sub Teritorium Bengkulu terus mengadakan konsolidasi. Pada awal bulan Mei 1949 Letnan I.M. Daud Mustafa ditunjuk sebagai pengganti Kapten Lia Hia. Sejak saat ini Front Kepahyang dibenahi lagi. Staf dari front Kepahyang berkedudukan di Air Kelinsar. Anggota yang dibawa oleh Lettu Daud Mustafa berasal dari Manna, di antaranya yaitu : Letnda Sudarmaji, Letda Z. Asikin Naum dan Serma Suardi Naum.

Front Kepahyang disusun sebagai berikut : Seksi I dipimpin oleh Letnan II Z. Asikin Naum; Seksi II dipimpin Vabdrig Buldani Masik; Seksi III dipimpin Vandrig Inuh Mustafa; Seksi IV dipimpin Sersan Mayor Suardi Naum. Perwira Stafnya adalah Letnan II Sudarmaji dan Letnan Muda Nur Sasdi.

Bidang pemerintahan, untuk Kepala Wilayah ditunjuk Z. Arifin Merana sebagai Camat Perang, menggantikan pendahulunya Camat Taufik. Selain itu Komandan Batalyon XXVI membentuk pula Front Gunung dengan susunan sebagai berikut. Komandan, Lettu Sulaiman Effendi Nawawi; Staf, Serma Ismail Rani; Komandan Sektor I, Letda Z. Arifin Mursalin; Komandan Sektor II, Letda Suwito. Komandan Sektor

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hal. 190.

III, Serma OMM Hud. Front Gunung ini berkedudukan di Taba Padang di seberang Sungai Musi<sup>171</sup>.

Pada bulan Juli 1949, Markas Besar Gubernur Militer Dr. AK Gani di bom oleh tentara Belanda. Untunglah pemboman ini tidak mendatangkan korban jiwa, hanya mengalami kerusakan sedikit. Meskipun Muara Dua telah diduduki dan daerah TNI makin hari makin sempit, sedangkan kedudukannya berpencar, berpisah satu dengan yang lainnya, namun pimpinan dapat dikendalikan dengan baik. Perhubungan dengan luar negeri dapat dilakukan dengan hubungan radio KTSS. Hubungan radio ini berjalan terus, antara lain terdapat kontak dengan India.<sup>172</sup>

Adapun radio Gerilya di Bukit Barisan ini mulai mendengarkan suaranya yaitu pada tanggal 10 Mei 1949. Semenjak pecahnya peperangan tanggal 19 Desember 1949, maka *Intelligence Service* (Jawatan III) memegang peranan mewakili Komandan Teritorial, pun di tiap-tiap posten mewakili Komandan Teritorium dalam melaksanakan sesuatu, baik yang mengenai instruksi komandan maupun yang menjadi tugas kewajiban Jawatan III ditengah-tengah rakyat menurut *volmact* yang telah diberikan oleh Komandan Sub Teritorial Palembang.

Tiap-tiap sektor melakukan tugas kewajibannya bersifat *zelfstanding* disebabkan tempat-tempat kediaman mereka berjauhan dan perhubungan pun sangat sulit. Jawatan III menjadi penghubung pasukan yang terpencar yang bergerilya. Dari tempat kedudukan pusat Komando Batalyon menuju ke arah Staf Komando Perang Palembang dibentuk *estafette* – *Posten* atau anggota rahasia yang tetap untuk memudahkan perhubungan satu sama lain.

Untuk pemusatan tenaga pertahanan, maka dibentuklah pasukan sukarela setempat di daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan di bawah komando TNI setempat. Dengan adanya pemusatan tenaga pertahanan ini, maka pertahanan pun menjadi kuat dan serangan-serangan gerilya yang dilakukan terhadap tentara Belanda dapat berjalan dengan baik. Dalam TNI melakukan serangan, maka berpedoman pada :

Jika tentara Belanda menyerang, TNI mengelak;

Jika tentara Belanda lengah, TNI menyerang;

Jika tentara Belanda mundur, TNI mengejar;

Jika tentara Belanda bersiap, dibiarkan saja.

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal. 190-191.

<sup>172</sup> “Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan”, *Op.cit.*, hal. 270.

Oleh karena TNI bertindak dengan pedoman di atas, maka pihak Belanda menjadi bingung. Keadaan mereka tidak aman dan sering mendapat gangguan yang hebat ketika mereka lengah atau beristirahat. Serangan gerilya ini berjalan terus hingga saatnya persetujuan peletakan senjata.

Pada tanggal 15 Agustus 1949 terjadi perundingan yang pertama antara tentara Belanda dengan Dr. AK Gani cs. Di Muara Aman mengenai peletakan senjata. Selain itu ada beberapa peristiwa di antaranya yaitu, pada tanggal 22 Januari 1949 oleh Gubernur Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan dikeluarkan satu perintah No. 47/W.O., yang memerintahkan, supaya semua pegawai Republik dengan tidak ada kecualinya, yang masih berada di kota-kota yang diduduki musuh harus menyingkir keluar kota dan meneruskan kewajibannya masing-masing di daerah yang aman dari gangguan Belanda.

Adapun GMISS memegang segala kekuasaan dari pemerintahan sipil dan Tentara Nasional Indonesia Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan yang meliputi Karesidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Jambi dan seluruhnya bertanggung jawab tentang pimpinan GMISS (politis, sipil, militer dan keuangan-ekonomi) kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan taktik pertahanan Republik guna menyegerakan kemenangan perjuangan, maka pada tanggal 29 Januari 1949 dikeluarkan pula instruksi No. 9 yang memerintahkan kepada Komandan-komandan Sektor untuk menembak mati semua orang yang ingkar kepada Pemerintah Republik. Ini dilakukan juga kepada orang-orang yang selalu saja memasukkan khusus bahan-bahan makanan dan lain-lain keperluan hidup sehari-hari ke dalam kota-kota (tempat-tempat) yang telah diduduki oleh musuh. Karena sebelum ini, tanggal 13 Januari 1949 dengan pengumuman No. 7 telah diperingatkan kepada seluruh warga Negara Indonesia termasuk bangsa asing (Tionghoa, India dan lain-lain) bahwa akan dijatuhi hukuman Militer yang seberat-beratnya kepada yang mengkhianat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Rupanya peringatan tersebut masih tidak diindahkan oleh mereka yang bersangkutan, sehingga patut dilakukan tindakan yang lebih tegas dan karena inilah maka dikeluarkan perintah No. 9.<sup>173</sup>

Pada tanggal 1 Februari 1949 Belanda membentuk satu pemerintahan boneka di kota Palembang dengan nama Negara Sumatera Selatan dan menyerahkan pimpinan kepada Abd. Malik sebagai Wali

---

<sup>173</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1953), hal. 271.

Negara. Adapun negara tersebut meliputi sebagian daerah Karesidenan Palembang. Daerah Jambi, Bengkulu dan Lampung akan dijadikan Belanda daerah-daerah yang berdiri atas otonomi Pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya dalam lingkaran Negara Sumatera Selatan. Maksudnya tidak berhasil karena Negara Sumatera Selatan (NSS) segera dibubarkan.

Dalam pada itu tentara Belanda terus berusaha memikat hati rakyat, agar memihak kepadanya dan melemahkan perjuangan tentara gerilya Republik Indonesia. Beberapa lembar pamflet telah disebarakan mereka dari atas pesawat terbang “Mustang” di daerah Muara Anam tanggal 21 Februari 1949.

Adapun isi pamflet di antaranya menyebutkan bahwa tentara Kerajaan datang bukan untuk memerangi dan menjajah rakyat, tetapi untuk menumpas kaum pengacau keamanan. Kota-kota besar di seluruh Indonesia telah direbut dari tangan gerombolan pengacau keamanan. Tentara kerajaan menyokong rakyat untuk membubarkan pasukan teror yang menjajah adat dan menghisap darah rakyat. Bantulah memberantas bersama-sama pasukan liar atau serahkan mereka itu kepada pemerintah Belanda, tentu Bengkulu akan makmur dan aman kembali.

Sebagai pembalasan dari propaganda pihak Belanda (propaganda balasan) untuk memberikan keterangan-keterangan kepada rakyat apa yang sebenarnya sedang berlangsung dan untuk memberikan semangat kepada rakyat agar terus melakukan perjuangan. Juga disebarakan beberapa lembar pengumuman yang ditujukan kepada tentara KNIL dan KL, agar mereka insyaf, bahwa peperangan yang dilakukan mereka itu adalah perjuangan yang sia-sia belaka dan lebih baik mereka menghentikan pertempuran, sebelum terlambat.

Di tengah-tengah perang urat saraf dan perang pamflet, pada tanggal 20 April 1949, tambang emas Lebong tandai di bom oleh kapal terbang Belanda, sehingga menjadi bertambah rusak dan roboh. Adapun tambang emas ini pada tanggal 19 Desember 1948 telah dibumi hanguskan oleh tentara Republik Indonesia, selaras dengan perintah atasan. Mesin-mesindan motor besar dirusakkan, parit-parit tambang diledakan dan diisi dengan air. Belum cukup besar rupanya kerusakan yang terjadi, Belanda pun menghancurkannya untuk ketiga kalinya dengan lebih parah lagi.

Pada tanggal 2 Juli 1949, sebuah kapal terbang Belanda bermotor dua telah membom tambang emas tersebut, enam kali serta menembaknya dengan senapan mesin berpuluh kali. Akibat pemboman pesawat tempur Belanda, rumah-rumah dan gudang yang selama ini masih berdiri, hancur total. Pemboman ini dilakukan Belanda untuk

melumpuhkan Pusat Pimpinan Perjuangan Gerilya, karena tempat tersebut menjadi Markas Besar Gubernur Militer Sumatera Selatan. Pemboman tersebut tidak mendatangkan korban jiwa di pihak tentara rakyat.

Pada minggu terakhir bulan April 1949 Belanda telah mengadakan gerakan serentak dan tentaranya telah menduduki beberapa tempat. Kemudian kota Lais dan Lubuk Durian di bagian Pesisir Bengkulu ditinggalkannya, karena kota Bengkulu senantiasa mendapat serangan gerilya dari Selatan dan Timur. Serbuan yang nampak ditujukan ke Muara Aman yang merupakan gudang beras. Di sini Belanda memperkuat kedudukannya, sedangkan keaktifan kapal terbang Belanda sangat luar biasa dalam aksi yang dinamakan sebagai “pembersihan”.<sup>174</sup>

Beberapa orang Pamong Praja Republik dapat disekap, kemudian dibawa ke Muara Aman untuk dipaksa melakukan kehendak Belanda. Kepada rakyat yang telah melarikan diri dan bersembunyi di balik bukit disiarkan ancaman, sekiranya tidak kembali, rumah mereka akan dibakar.

Penangkapan terus dilakukan baik bagi tentara, rakyat, pamongpraja, kepala dusun dan pegawai sipil lainnya. Dengan kekejaman tersebut, bukannya rakyat takut dan gentar, tetapi sebaliknya rakyat menjadi marah dan ini menambah semangat permusuhan terhadap Belanda.

Agresi militer Belanda yang kedua di Sumatera Tengah langsung ditujukan ke Bukittinggi. Pada waktu itu, Bukittinggi tidak saja berfungsi sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat, tetapi juga pusat pemerintahan Sumatera. Sehingga para elit politik dan militer umumnya berkedudukan di kota ini. Oleh sebab itu, Belanda berusaha merebut dan menguasai Bukittinggi. Untuk melancarkan misinya, Belanda melakukan pengeboman dari udara.

Bersamaan dengan itu, Belanda juga melakukan serangan serentak terhadap kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang merupakan salah satu jaringan perdagangan dalam komoditas pertanian dan minyak di Sumatera. Tujuan Belanda memutuskan urat nadi perekonomian, dengan harapan mereka dapat melumpuhkan Republik Indonesia.<sup>175</sup>

Menurut perhitungan Belanda, dengan diduduki ibukota dan kota-kota penting di wilayah Indonesia serta dengan ditawannya

---

<sup>174</sup> Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, *Op.cit.*, hal. 274.

<sup>175</sup> Mestika Zed, et.al., *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1998), hal. 90.

Presiden, Wakil Presiden dan beberapa pemimpin lainnya, serta adanya pembersihan terhadap sisa-sisa pasukan Republik Indonesia, yang dilakukan selama tiga bulan, dianggap negara Republik Indonesia tidak akan ada lagi.<sup>176</sup>

Namun perhitungan Belanda tersebut meleset, justru sebaliknya dengan adanya agresi militer tersebut, makin memperkuat semangat perlawanan rakyat. Rencana untuk mendirikan negara boneka juga gagal. Agresi militer II yang dilancarkan secara offensif oleh Belanda dilawan dengan strategi perang gerilya, serang disaat lengah dan kemudian lari bersembunyi di saat Belanda siaga penuh. Semakin berlarut pertempuran di semua front membuat Belanda semakin frustrasi. Meskipun Sukarno – Hatta telah ditahan di Pulau Bangka, perang gerilya berkobar di mana-mana.

Batalyon 26 mempersiapkan kesatuan-kesatuan perang gerilya yang beroperasi di sepanjang pantai Bengkulu, membagi daerah pertempuran menjadi tiga sektor, yaitu : (1) Sektor utara dipimpin oleh Letnan Satu Syafii Ibrahim. Daerah operasinya dimulai dari pinggir utara sampai Pasar Bengkulu hingga ke wilayah Muko-Muko; (2) Sektor Tengah dipimpin oleh Ahmad Mahyuddin dan Syarif Saleh, Pembantu Letnan Hamid di sekitar Danau Dusun Besar. Sersan Mayor Tabarani Kadir bertugas mengumpulkan makanan di Plaju. Arifin Mursalin bertugas di Taba Pananjung dan Sersan Mayor Miming di Karang Tinggi; (3) Sektor Selatan dipimpin oleh Letnan I Jarab, wakilnya ditunjuk Letnan II Asyikin Naum. Komandan Sub Sektor Vandrigh Syamsuddin You. Komandan Pleton di Selatan ini adalah Pembantu Letnan Ali Hanafiah dan Sersan Mayor Kundai.

Kehadiran Batalyon ke-26 di Bengkulu dan Kompi 5 Batalyon 26 Wim Tamawiji di Bangka adalah penyebab hancurnya negara boneka buatan Belanda di Bengkulu (TBA) dan di Bangka, negara bagian Bangka. Pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1947, telah menamatkan riwayat penjajahan Belanda di Bengkulu dan Indonesia pada umumnya.

Untuk kawasan Muko-Muko, aktifitas perjuangan lebih cenderung ke wilayah Sumatera Barat. Pergerakan kekuatan militer dan rakyat Muko-Muko lebih banyak berperan di daerah Sumatera Barat. Mereka banyak bertempur melawan Belanda di Muara Sakai, Indrapura, Tapan, Lunang dan Silaut. Orang Muko-Muko banyak yang menyusun kubu pertahanan di Talang Kubu Tapan, Pesisir Selatan. Gerilyawan Muko-Muko berasal dari pemuda Muko-Muko, BPNK (Badan

---

<sup>176</sup> Syafroeddin Bahar, *Peranan Elite Sipil Dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Yogyakarta : UGM, 1996), hal. 91-92.

Pengawal Nagari Kota) yang dipimpin oleh Zakaria seorang bekas tentara *Gyugun*.<sup>177</sup> Pasukan yang dipimpin Zakaria ini kemudian menjadi BKR (Badan Keamanan Rakyat), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) tahun 1947. Pada tahun 1949 mereka bergabung dengan TNI masuk dlam Divisi Banteng Sumatera Barat dengan Komandan Dahlan Jambek (Ibrahim Jambek) dan Ismail Lengah.

Akibat Agresi Militer Belanda di Sumatera, Muko-Muko sebagai pintu masuk bagian utara untuk wilayah Bengkulu dijadikan tempat pengungsian bagi daerah sekitarnya seperti Inderapura, Tapan, Kerinci, Muara Sakai, Lunang dan Silaut. Daerah Muko-Muko aman dari jangkauan musuh karena telah dilakukan penghadangan oleh pasukan gerilya.

Pertempuran yang terjadi di mana-mana telah mendorong banyak masyarakat melakukan pengungsian. Untuk wilayah selatan Muko-Muko termasuk daerah yang aman, dibandingkan daerah tetangganya seperti Tapan dan Kerinci. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang berasal dari kota Bengkulu, Lubuk Linggau, Curup, Lebong yang mengungsi ke Muko-Muko untuk menghindari perang.

Demikianlah antara lain beberapa catatan yang dapat dikumpulkan. Semuanya telah berlangsung di saat perundingan-perundingan sedang berlangsung dan pelaksanaan dari hasil persetujuan Roem-Royen mulai diberlakukan. Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda mulai ditarik dari kota Yogyakarta dan saat itu pula Tentara Nasional Indonesia mulai memasuki kembali ibukota Republik Indonesia. Kemudian disusul pula kembalinya Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 1949 dan Panglima Besar Jenderal Sudirman tanggal 10 Juli 1949. Pada hari itu juga pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Mr. Syafruddin Prawiranegara telah berada di Yogyakarta. Sampai akhir bulan Juli 1949, Belanda hanya menguasai beberapa tempat sepanjang jalan : Padang Ulak Tanding – Kota Bengkulu, Curup - Muara Aman, Kepahyang – Keban Agung, Kota Bengkulu – Padang Kemiling, Kota Bengkulu – Lais.

Satu kilometer dari kedudukan Belanda itu terdapat pasukan TNI, yang senantiasa dalam keadaan bergerak. Ke arah selatan Bengkulu mulai dari Padang Kemiling sampai ke Bintuhan, dan ke utara mulai dari Lais sampai ke Muko-Muko, merupakan daerah yang tidak pernah diduduki Belanda. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah

---

<sup>177</sup> Muhammad Iskandar dkk., *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*, (Yakarta : Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1998), hal. 88-89.

yang luas dalam lingkungan wilayah Bengkulu. Sebelum datangnya perintah penghentian tembak-menembak, datang perintah agar seluruh pasukan merapat dan melingkari tempat-tempat kedudukan Belanda.

Pada waktu terjadi persetujuan Roem – Royen Statement antara Indonesia dengan Belanda, maka Presiden Sukarno telah menyampaikan perintah penghentian tembak-menembak dan menghentikan permusuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Wakil Agung Mahkota Belanda Lovink terhadap KNIL dan K.I.nya.

Perintah Presiden itu akan disampaikan langsung oleh Komandan Teritorial Sumatera kepada Gubernur Militer Sumatera Selatan. Tetapi berhubung sulitnya perhubungan, maka kedatangan Kolonel Hidayat terhalang untuk datang di Sumatera Selatan. Meskipun demikian, pedoman yang telah didapat cukup memberikan gambaran apa yang sekiranya mesti dilakukan. Dan oleh Gubernur Militer dan Komandan Subkoss telah diperintahkan agar segera diadakan perundingan dengan Belanda.

## **V. PASCA AGRESI MILITER BELANDA**

### **1. Pengakuan Kedaulatan**

Tekanan yang semakin gencar dari dunia internasional, serta kesulitan-kesulitan militer yang dialami Belanda di Jawa dan Sumatera telah memaksa Belanda untuk memulai perundingan kembali dengan pihak Republik Indonesia. Bagaimanapun, agresi militer Belanda kedua terhadap Republik Indonesia telah menimbulkan sikap antipati banyak negara, dua di antaranya yang bersikap paling keras adalah India dan Australia. Sebaliknya, dukungan terhadap Pemerintah Republik Indonesia semakin bertambah besar. Akhirnya atas desakan PBB Belanda terpaksa bersedia berunding kembali dengan “Pemerintah Bangka” yang *notabene* adalah tahanan mereka.

Pada bulan Januari 1949 perundingan baru kembali dimulai antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya menyangkut tentang penghentian permusuhan dan pemulihan Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, termasuk di Bengkulu Sumatera Selatan. Untuk sementara waktu ketegangan hubungan antara kedua belah pihak dapat diredakan. Pembicaraan informal antara kedua belah pihak segera dilakukan pada pertengahan April 1949.

Untuk kepentingan tersebut masing-masing pihak mempersiapkan delegasinya untuk berunding. Dalam hal ini, Pemerintah Belanda menunjuk Dr. J.H. Van Royen sebagai ketua delegasi, sementara Pemerintah Republik Indonesia mempercayakan pimpinan delegasinya kepada Mr. Muhammad Roem. Akhirnya



perundingan ini berhasil mencapai kesepakatan “Roem – Royen”, yang diumumkan pada tanggal 7 Mei 1949. Persetujuan ini kemudian diikuti dengan pengembalian pemimpin Republik Indonesia Sukarno – Hatta yang ditahan di Bangka untuk dikembalikan ke Yogyakarta.

Pengembalian pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta memudahkan perundingan selanjutnya yang direncanakan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Sampai saat itu, Belanda masih yakin bahwa cita-citanya untuk membentuk negara boneka, sebagaimana dicita-citakan oleh Van Mook akan berhasil. Oleh karena itu mereka memperkuat hubungannya dengan kelompok BFO (Wakil Negara-Negara Federal), yang dibentuk tidak lama setelah agresi.<sup>178</sup> Pada saat bersamaan Pemerintah Republik Indonesia juga menyadari pentingnya kehadiran front Indonesia bersatu untuk menghadapi Belanda, karena itu BFO harus dijadikan sekutu dalam menghadapi Belanda.

Pada tanggal 3 Agustus 1949 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan gencatan senjata secara resmi, yang baru diberlakukan setelah tanggal 11 Agustus 1949 untuk daerah Jawa, dan sejak tanggal 15 Agustus untuk Sumatera. Sementara itu pada waktu bersamaan Belanda segera mempersiapkan serah terima kekuasaan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Persiapan-persiapan lebih lanjut segera dilakukan pada akhir bulan Agustus 1949, dengan membentuk Dewan Pusat Bersama (*Central Joint Board*) untuk tingkat pusat, dan Komite Lokal Bersama (*Local Joint Board*) pada tingkat daerah, termasuk Bengkulu.

Pada tanggal 7 Oktober 1949 oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Tahi Bonar Simatupang, mengeluarkan keterangan tentang hasil-hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 Nopember 1949. Dalam konferensi tersebut, ia duduk sebagai panitia kemiliteran. Adapun hasil Konferensi Meja Bundar yang menyangkut masalah kemiliteran<sup>179</sup> pada khususnya, di antaranya sebagai berikut :

#### **a. Tentang Kerja Sama Militer**

Sejak persetujuan Linggarjati telah disetujui bahwa akan ada Unie antara Indonesia dan Belanda untuk mewujudkan kerja sama

---

<sup>178</sup> Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia, 1945-1950*. (Jakarta : MSI Sumatera Barat dan Corps Tentara Relajar (CTP) Sumatera Tengah, 1997), hal. 313.

<sup>179</sup> M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, (Yakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 199.

militer dan kerja sama bidang pertahanan. Pokok perstujuan ini adalah bahwa masing-masing negara, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kerajaan Belanda bertanggung jawab penuh terhadap daerahnya masing-masing. Kerja sama hanya akan ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak dan berguna bagi masing-masing pihak.

Unie tidak berarti, satu negara akan turut berperang apabila negara lain berperang, masing-masing mengambil putusan terhadap damai atau perang, atas pertimbangan sendiri, dan pertimbangan ini tentu akan berdasarkan kepentingan rakyatnya masing-masing. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa aturan tentang kerja sama dalam lapangan kemiliteran hanya akan memperoleh isi, apabila kerja sama itu oleh rakyat Indonesia yang berdaulat dianggap menguntungkan baginya. Kerja sama itu berupa pertukaran perutusan militer (militer missie), pertukaran pelajar-pelajar militer, bantu-membantu apabila diminta oleh pihak lain dan jika permintaan itu dikabulkan oleh pihak lain.

#### **b. Tentang Masalah Peralihan**

Sebagai akibat dari pemindahan kekuasaan, maka tanggung jawab pertahanan dan keamanan di Indonesia, di darat, laut dan udara akan berada di bahu Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya tanggung jawab Belanda berhenti. Berhubung dengan itu maka angkatan darat, laut, udara Belanda yang ada di Indonesia akan ditarik mundur dan RIS harus memenuhi tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan di Indonesia di darat, laut dan udara dengan alat kekuasaannya sendiri.

Alat-alat kekuasaan di darat, laut dan udara ini akan dibentuk oleh RIS sendiri. Soal pembentukan ini tidak dibicarakan dalam KMB, karena masalah ini adalah masalah intern dari bangsa Indonesia sendiri. Pada masa peralihan ini yang dibahas adalah : (a) Cara dan waktu penarikan tentara Belanda dan pembubaran sebagai organisasi dan pasukan yang tidak dapat ditarik, yaitu KNIL dan organisasi kemiliteran lainnya yang pernah dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda; (b) Tugas yang akan dijalankan oleh militer Belanda jika diminta oleh Pemerintah RIS sebelum penarikan selesai, terutama mengenai angkatan laut.<sup>180</sup>

#### **c. Tentang Aturan Peralihan Angkatan Laut Belanda**

Waktu penarikan angkatan laut Belanda ditentukan satu tahun setelah pemindahan Kedaulatan. Mengingat pada saat pemindahan

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, hal. 199.

kedaulatan RIS hampir tidak mempunyai angkatan laut sendiri, maka RIS dapat meminta Pemerintah Belanda agar dalam waktu sebelum penarikan selesai, kapal-kapal Belanda menjalankan tugas untuk RIS di lautan Indonesia.

Kapal-kapal ini tetap kapal Belanda dan berhak mengibarkan bendera Belanda. Untuk menandakan bahwa kapal Belanda menjalankan tugas atas perintah RIS, maka bendera RIS juga dikibarkan di kapal Belanda tersebut. Opsir-opsir penghubung dari RIS akan ditempatkan di kapal tersebut dan kapal tersebut hanya akan menjalankan tugas menurut perintah RIS. Komandan-komandan yang ada di dalam kapal tersebut harus menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Pemerintah RIS. Oleh karena itu biayanya juga dibebankan pada Pemerintah RIS.

Dalam waktu satu tahun armada RIS akan dibangun secepat mungkin dan sudah ada persetujuan tentang pembelian 4 buah kapal korvet dan satu kapal pemburu torpedo. Tugas-tugas armada kapal Belanda tersebut setelah satu tahun dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kehendak Pemerintah RIS. Artinya jika Pemerintah RIS merasa telah mampu menjalankan tugas-tugas di laut dengan peralatan sendiri, maka bantuan Belanda tidak diperlukan lagi.<sup>181</sup>

#### **d. Tentang Aturan Peralihan Angkatan Darat Pemerintah Hindia Belanda.**

Angkatan Darat Belanda terbagi dalam (a) Tentara Belanda (KL); (b) Tentara bentukan Pemerintah Hindia Belanda (*KNIL*, *Veiligheidsbatalyon*, pasukan federal dan lain-lain). Kedua tentara bentukan Belanda ini pada saat pemindahan Kedaulatan akan dipusatkan pada beberapa tempat (daerah) dan tidak dibenarkan untuk mengadakan gerakan, kecuali jika diminta RIS dan disetujui Pemerintah Belanda. Tentara Belanda (KL) menunggu di tempat pemusatan sampai saatnya diangkut ke negeri Belanda. Suatu komisi yang dibentuk oleh RIS dan Belanda bertugas menyelidiki proses pengangkutan. Jika pengangkutan tidak selesai dalam waktu 6 bulan, maka Pemerintah Belanda akan memberi keterangan kepada Pemerintah RIS.<sup>182</sup>

Pasukan KNIL akan direorganisasi dalam waktu 6 bulan, sehingga setelah 6 bulan tidak boleh ada lagi pasukan KNIL bentukan Pemerintah Hindia Belanda tersebut. Orang-orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL dapat masuk ke dalam tentara RIS. Para mantan KNIL tersebut mempunyai kecakapan kemiliteran yang sangat

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hal. 200-201.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal. 201.

dibutuhkan oleh Pemerintah RIS sehingga kehadirannya di lingkungan tentara RIS akan sangat membantu untuk menyempurnakan kemampuan tentara RIS. Mereka dapat menjadi perwira-perwira patriotis dikemudian hari. Orang Belanda dalam KNIL secara sukarela dapat masuk ke dalam tentara Belanda (KL).<sup>183</sup>

Tentara Nasional Indonesia akan menjadi inti tentara RIS. Tentara RIS ini akan menghadapi tugas yang berat mengingat bahwa waktu yang memisahkan kita dari pemindahan kedaulatan kurang dari dua bulan. Tetapi disiplin dan ketabahan TNI telah terbukti pada saat-saat yang sulit dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

#### **e. Tentang Aturan Peralihan Bagi Angkatan Udara Belanda**

Aturan peralihan ini hampir sama dengan aturan peralihan untuk angkatan darat dan laut. Angkatan Udara Belanda ditarik dan kemudian RIS membangun angkatan udaranya. RIS berusaha dalam waktu paling lama 6 bulan dapat memindahkan kedaulatan.

#### **f. Perutusan Militer (militer misie) Belanda ke Indonesia**

RIS akan mengirim perutusan militer ke negeri Belanda dan sebaliknya Belanda mengirimkan perutusan militer ke Indonesia. Persetujuan mengenai hal tersebut telah dibicarakan setelah RIS berdiri. Mengenai jumlah dan susunan perutusan militer Belanda ke Indonesia akan ditetapkan menurut kebutuhan RIS.<sup>184</sup>

Angkatan perang Indonesia yang masih muda dan belum berpengalaman akan memerlukan beberapa tahun untuk mendapatkan pelatihan dari pendidik Belanda tentang tenaga-tenaga bidang militer. Dalam hal ini tenaga ahli militer Belanda dapat dipergunakan dalam kedudukan sebagai anggota perutusan militer. Mereka tetap anggota militer Belanda dan memakai seragam sendiri, tetapi mereka harus bekerja untuk RIS dan atas permintaan RIS bersedia melatih dan mendidik militer RIS agar mejadi tentara yang terlatih dan profesional.<sup>185</sup> Demikianlah uraian singkat tentang keterangan TB simatupang tentang hasil KMB mengenai masalah militer.

Persetujuan-persetujuan tersebut segera diumumkan dan dihadapkan kepada Badan Perwakilan Rakyat sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyebar berita-berita yang menimbulkan kegelisahan masyarakat. Komisi militer dalam pekerjaannya selalu berpedoman pada

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*, hal. 203.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hal. 203.

kepentingan rakyat dan angkatan perang dan hasil-hasil pekerjaan tersebut segera dipersembahkan kepada Badan Perwakilan Rakyat yang akan menjatuhkan timbangan apakah usaha-usaha dari komisi telah sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia atau tidak.

Pada tanggal 12 November 1949, Kepala Staf Sub Komando Sumatera Selatan, Mayor Dr. Ibnu Sutowo, atas perintah Gubemur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan mengeluarkan petunjuk mengenai penjagaan keamanan dan ketertiban dalam daerah yang akan diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai tindak lanjut dari persetujuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang isinya sebagai berikut :

Petunjuk Mengenai Penjagaan Keamanan dan Ketertiban di Daerah Vacuum yang telah ditinggalkan oleh Kesatuan Militer Belanda.

No. 1 D/RR.

1. Berhubung dengan persetujuan politik/militer yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka di antaranya, kesatuan-kesatuan militer Belanda akan menarik diri dari daerah-daerah tertentu yang telah didudukinya sejak aksi 19 Desember.
2. Daerah-daerah yang akan ditinggalkan oleh militer Belanda yang merupakan daerah vacuum ini harus diover (diduduki) oleh kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tertentu sesuai dengan surat perintah dari yang berwajib.
3. Bahwa kesatuan-kesatuan TNI yang akan ditunjuk oleh atasan untuk mengoper daerah vacuum dimaksud, bertugas semata-mata khusus untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketertiban rkyat di daerah itu.
4. Sudah selayaknya, bahwa kesatuan-kesatuan yang mendapat tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban akan menyesuaikan sikap dan tindakan-tindakan dengan tugas tersebut, sehingga tugas yang telah diberikan itu akan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
5. Sederhana dan pendek kata-kata yang menunjukkan tugas dari kesatuan-kesatuan yang akan mengoper daerah vacuum ini (menjaga keamanan dan ketertiban). Akan tetapi jika kita kaji perkataan-perkataan itu dalam-dalam, maka sesungguhnya kewajiban ini sangat berat adanya. Berbagai kesulitan terutama kesulitan-kesulitan psikologis dan pengorbanan-pengorbanan terutama pengorbanan perasaan akan didapat oleh para anggota kesatuan ini.

6. Pasukan ini akan menunjukkan kepada rakyat di daerah itu, bahwa mereka sebagai kesatuan TNI akan sanggup menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya, sehingga akan terasa oleh rakyat seluruhnya yang terdiri dari berbagai bangsa itu nikmatnya hidup aman dan tertib di bawah lindungan TNI.
7. Ujian yang maha besar bagi kesatuan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keuletan TNI dalam mengabdikan kepada negaranya. Kita akan membuktikan kepada dunia, bahwa kita warga Tentara Nasional Indonesia tidak hanya bisa bergerilya dengan membakar, merusak, menculik, mengacau keamanan dan lain-lain tindakan destruktif terhadap musuh, akan tetapi sanggup pula berbuat yang sebaliknya dari tindakan-tindakan destruktif tadi manakala perintah untuk itu telah diberikan dari atasan. Kita akan turuti berdasarkan suatu keinsyafan bahwa gerakan TNI sangatlah rapat dan langsung hubungannya dengan siasat politik Pemerintah yang menggunakan Tentara nasional Indonesia.
8. Kesulitan psikologis ramalan tersebut dalam pasal 5 di atas, yang kesulitan ini pasti akan menimpa Komandan-komandan Kesatuan vacuum. Apakah tidak mendongkol, jika anak buah kita di dalam daerah ini melihat beberapa orang yang selama ini dicari dan diancam karena di saat TNI melaksanakan gerilya orang-orang itu bertindak sebagai penentang atau pengganggu lancarnya taktik gerilya, sedangkan kini orang-orang itu harus mendapat perlindungan dari TNI. Komandan harus dapat menguasai anak buahnya yang bertindak menyimpang dari aturan, karena sesuatu yang seperti di atas.
9. Mencampuri urusan pemerintahan, perdagangan dan lain-lain bukan lah tugas yang diberikan kepada kita. Tetapi kami sanggup memberikan bantuan sepenuhnya kepada bagian sipil, jika diminta dan bantuan inipun hanya khusus penjagaan ketertiban dan keamanan saja.<sup>186</sup>
10. Agar dalam menjalankan tugas yang telah dipertanggung jawabkan dapat lancar dan sesuai dengan maksud pimpinan, maka pada tanggal 12 November 1949 a/p. Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, Kepala Staf SUBKOSS Mayor Dr. Ibnu Sutowo membuat pernyataan yang ditujukan kepada TNI bawahannya sebagai berikut : (1) Berbuatlah sopan-santun kepada rakyat; (2) Tunjukkan kepada rakyat bahwa TNI adalah tentara yang teratur dan berdisiplin; (3)

---

<sup>186</sup> M.Z. Ranni, *Op.cit.*, hal. 204-205.

Bergaullah ramah-tamah dengan rakyat, dekatilah mereka dan jangan mengucapkan kata-kata yang seolah-olah menyindir atas perbuatan salah seorang dari rakyat yang dilakukan di masa lalu; (4) Jika harus mengambil tindakan kepada seorang yang ternyata mengganggu tata tertib, ambillah tindakan yang tepat, tetapi efektif dan konstruktif; (5) Hormatilah mereka yang mungkin dulu menjadi salah satu dari musuh kita; (6) Jadilah kamu sekalian pelita bagi rakyat yang masih dalam kegelapan dalam menjalankan fase perjuangan; (7) Janganlah kamu sampai terpengaruh oleh seorang atau golongan yang mungkin hanya untuk kepentingan diri atau golongannya yang akan membalas dendam kepada seseorang atau golongan lain; (8) Pegang teguh peraturan tata tertib tentara yang berlaku; (9) Jangan sekali-kali mengambil atau memaksa rakyat untuk memberikan bantuannya kepada kita. Biarlah mereka membantu dengan suka rela. (10) Hormati adat-istiadat yang berlaku di daerah itu.<sup>187</sup>

Setelah mendapat surat-surat, baik yang terdahulu maupun yang tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa hasil-hasil dari persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) benar-benar akan dilaksanakan dan pasukan TNI akan segera kembali ke daerah yang telah ditinggalkannya, maka Sub Teritorium Bengkulu pada tanggal 26 November 1949 mengeluarkan pengumuman harian dengan nomor 40/SM sebagai berikut :

Tentara Nasional Indonesia Sub Teritorium Bengkulu

Pengumuman Harian

No. 40/Sm

Kepada seluruh anggota TNI Sub Teritorium Bengkulu

Saudara-saudara sekalian

Sebentar lagi daerah yang sekarang diduduki oleh Belanda akan dikembalikan menurut status Renville. Rakyat di dalam dan di luar baik lawan maupun kawan merasa, mendengar dan melihat perubahan-perubahan baru.

Daerah-daerah tersebut akan kita duduki kembali dan keamanan ketertiban beserta lancarnya roda pemerintahan terletak di dalam tangan kita. TNI adalah satu Tentara yang akan menjadi inti dari Tentara RIS kelak. Kita berjuang adalah sebagai Warga Negara Indonesia, pemuda, pelopor bangsa, kesatria dan perwira menuntut Kemerdekaan dan kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia.

---

<sup>187</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 205-206.

Sekarang kita berada dalam TNI , kita alat Negara melakukan sesuatu untuk menjamin jangan terlanggarnya kedaulatan, prestise, kesopanan dan ketertiban dari Negara.

Kepada seluruh anggota TNI Sub Teritorium Bengkulu dengan melihat apa yang tertera di atas tadi, supaya menjaga jangan sampai terjadi soal yang akan melanggar kedaulatan, prestise, kesopanan dan ketertiban Negara kita, karena umum melihat dan pandangan dunia tertuju kepada kita, apakah yang sudah kita katakan ke seluruh dunia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan apakah TNI dapat benar-benar menjadi inti Tentara RIS kelak.

Kita tak usah sombong, tak usah melagak, tetapi kita harus menjalankan sesuatu yang tegas dengan peraturan yang telah ditentukan, karena apa yang telah kita dapat belum menentukan selesainya perjuangan Nasional kita.

Kesempatan ini kemungkinan besar akan dipakai oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab untuk memancing kekeruhan dan keonaran dan tidak mustahil memakai TNI sebagai alat mereka. Mereka ini hanya memakai kata hati belaka, tetapi tidak dipikirkan dengan otak yang sehat. Kita harus selalu berfikir, berperasaan dan bekerja untuk seluruh bangsa, bukan untuk sendiri-sendiri.

Jagalah Prestise Pemuda Indonesia, Prestise Tentara Nasional Indonesia dan Prestise Negara kita.<sup>188</sup>

Dikeluarkan di : Staf STB

Tanggal : 26-11-1949

Jam : 11.00

Daerah Militer Istimewa Sumatra Selatan

Komandan Sub Teritorium Bengkulu

Kepala Staf Sub Teritorium Bengkulu

Kapten dto. Zen Ranni

Pada hari itu juga Komandan Sub Teritorium Bengkulu yang baru sampai dari kota Bengkulu, membentuk satu delegasi militer untuk masuk ke kota Bengkulu untuk melakukan serah terima seluruh daerah Bengkulu dari Belanda.

Susunan delegasi ini sebagai berikut :

1. Ketua : Letkol Barlian, Komandan Sub Teritorium Bengkulu;
2. Wakil Ketua, Kapten M. Zen Ranni, KaStaf Sub Teritorium Bengkulu;

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 208.



3. Sekretaris, Letda Johan Aruf, Ka Staf Yon XXVI/STB.
4. Anggota : Letda alamsyah, Ka Jawatan III/STB dan Inspektur Polisi Bakhtiar, Perwira Kepolisian Daerah Bengkulu.<sup>189</sup>

Pada akhir bulan November 1949, delegasi ini memasuki kota Bengkulu. Di seberang Air Sindur, delegasi ini dijemput oleh satu pasukan (KL) Belanda di bawah pimpinan Letnan II Stolpe. Iring-iringan kendaraan yang membawa delegasi ini sampai di simpang empat (dahulu) Pasar Minggu langsung dibelokkan ke kiri dan menempuh jalan pinggir pantai menuju Staf Batalyon IV/Res I dari Tentara Kerajaan Belanda, sehingga rakyat yang menunggu di sepanjang jalan menuju jalan arah ke Mesjid Jamik Bengkulu tidak berkesempatan untuk memberikan sambutan. Delegasi disambut oleh Letnan Kolonel Mouwman sendiri dan setelah berbincang-bincang sejenak, delegasi dipersilahkan istirahat di rumah yang telah ditentukan.

Pada keesokan harinya dari arah Bengkulu Utara masuk pula delegasi Pemerintahan Sipil dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Mr. Dr. Hazairin, Wakil Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan. Wakil Ketua : M. Hasan, fd Residen Bengkulu; Sekretaris : Amri Yara, Sekretaris Karesidenan Bengkulu; Anggota : Inspektur Polisi Ibrahim.

Pada hari berikutnya bertempat di Kantor Karesidenan Bengkulu terjadi pertemuan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Dari pihak Indonesia hadir seluruh anggota delegasi, sedangkan dari pihak Belanda yang hadir adalah :

1. Letkol HGM. Bouwman, Danyon 4 Resimen I AD Kerajaan Belanda;
2. J.C. Winterwerp, Residen Teritorial Bestuurs Adviseur Bengkulu;
3. Letnan Van den Berg, Kepala MID dari Yon 4 Resimen I AD Tentara Kerajaan Belanda.

Di samping itu ada dua kursi yang disediakan untuk orang Indonesia, di mana hanya satu yang berisi, yang kurang jelas tentang kehadirannya pada saat itu, sebab tidak termasuk pihak Republik Indonesia, maupun pihak Belanda, dan duduknya pun di ujung meja perundingan itu. Setelah perundingan selesai, seorang anggota delegasi Republik Indonesia bertanya kepada salah seorang pihak Belanda yang ikut dalam perundingan tersebut, maka yang bersangkutan hanya menjawab dengan senyum pahit. Sejak tanggal 2 Desember 1949 dari kota Bengkulu, Komandan Sub Teritorium Bengkulu memberikan instruksi

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

instruksi seperlunya mengenai segala hal yang menyangkut pengisian daerah-daerah yang akan ditinggalkan pasukan Belanda.

Selain kegiatan untuk mempersiapkan penyerahan kembali daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh Belanda, Komandan Batalyon IV/Res. I dari Tentara Kerajaan Belanda, Letkol Bouwman meminta Komandan Sub Teritorium Bengkulu untuk membantu menentramkan beberapa golongan kecil yang merasa gelisah dengan ditariknya Tentara Belanda dari Daerah Bengkulu dan kembalinya TNI. Pada awalnya yang diminta adalah Komandan STB sendiri, tetapi hal ini ditolak oleh Staf STB. Hal ini cukup diselesaikan oleh salah seorang dari Staf STB yang sudah berada di kota Bengkulu. Dengan diantarkan oleh Letnan I (KL) Wiegman ke Kepahyang, Keban Agung dan Curup, yang ditugaskan oleh Komandan STB itu dengan mudah dapat menyelesaikan persoalan itu. Masalah kegelisahan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, karena kelakuan mereka sebelumnya.

Sesuai dengan instruksi yang diberikan Komandan STB, mulai dari tanggal 7 – 10 Desember 1949 TNI mengisi kembali tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh Belanda, di antaranya yaitu :

1. Kompi pimpinan Lettu Jarab menduduki Muara Aman dan sekitarnya. Dalam Kompi ini tergabung Tentara Pelajar Sub Teritorium Bengkulu.
2. Selebihnya Batalyon XXVI dipimpin Danyon Lettu M. Daud Mustafa menduduki kota Kepahyang dan sekitarnya.
3. Yon XXXVI dipimpin Danyon Lettu Abihasan Said menduduki kota Curup dan sekitarnya. Karena daerah Curup ini sangat luas, maka pengisian daerah dibantu dari Detasemen Markas Sub Teritorium Bengkulu yang dipimpin Letda RM. Jafri Siddik.<sup>190</sup>

Sebelum pelaksanaan tersebut, untuk melancarkan segala hubungan, telah ditetapkan oleh LYC sebagai opsir penghubung Letda Sumaryo dan oleh Komandan STB ditetapkan Vandrig A. Khalik Hasan dan Letda A. Marzuki Alisebana.

Penempatan kembali daerah-daerah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rakyat menyambut dengan segala kegembiraan, karena selama ini mereka telah dipisahkan untuk beberapa lama oleh agresi Belanda. Dalam salah satu upacara menyambut kembalinya TNI, Wadan STB dalam sambutannya menyampaikan antara lain : “Kami telah kembali dengan hati yang suci murni, tetapi beberapa dari kami telah pergi demi Ibu Pertiwi. Tetapi pengorbanan mereka tidak akan sia-sia selama kita yang masih ada akan melanjutkan perjuangan. Tahun 1950

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 210.

merupakan taraf perjuangan baru. "*Het verleden ligt begraven*". Kekhawatiran semula akhirnya tidak sampai menjadi kenyataan.

Untuk menanggulangi keamanan dan ketertiban di seluruh Karesidenan Bengkulu, maka pada tanggal 11 Desember 1949, Residen Bengkulu mengeluarkan maklumat kepada seluruh penduduk dalam Karesidenan Bengkulu ini. Adapun isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut :

1. diberitahukan kepada seluruh penduduk daerah Bengkulu, bahwa mulai tanggal 11 Desember 1949, kekuasaan Belanda dalam wilayah TBA di Karesidenan Bengkulu telah berpindah kembali seluruhnya kepada Negara Republik Indonesia.
2. Dengan pemindahan kekuasaan itu maka sempurnalah sudah pelaksanaan *cease hostilities* (penghentian permusuhan) antara Belanda dan Republik Indonesia bagi daerah Bengkulu (bagi lain-lain daerah Republik sedang disempurnakan), sehingga dengan demikian bersihlah jalan menuju pemindahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda dan NRI (Negara Republik Indonesia) kepada RIS yang akan berlaku beberapa minggu lagi.
3. Dengan pemindahan kedaulatan itu, maka NRI akan menjadi negara bagian dalam RIS dan akan berdiri pula perikatan kerja sama (uni) antara Kerajaan Belanda dan RIS yang merupakan pertalian persahabatan yang sangat akrab.
4. Diperingatkan kepada tiap-tiap orang, bahwa kita bangsa Indonesia tidak lagi bermusuhan dengan orang-orang yang pernah bekerja sama atau membantu Belanda selama perjuangan antara Republik Indonesia dengan Belanda pada masa sedih yang telah silam.
5. Sekarang di seluruh daerah Bengkulu dipertanggung jawabkan kepada TNI buat menjaga dan menjamin ketertiban umum, ketenteraman dan keselamatan bagi semua orang dengan tidak pandang siapa dia, meskipun bekas pengkhianat bangsa sekalipun. Diper maklumkan, bahwa TNI tidak diperbolehkan lagi mencampuri urusan kepolisian biasa dan pemerintahan umum.
6. Keselamatan jiwa, harta benda, rumah tangga dan perekonomian (perusahaan, perdagangan, lalu lintas) dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (NRI) dengan semua alat-alat kekuasaannya.
7. Tidak dibolehkan orang merasa cemas atau takut atau was-was terhadap sesuatunya, jika ada perasaan yang serupa itu hendaklah lekas dikemukakan kepada alat-alat pemerintahan.

8. Sebaliknya tidak diizinkan orang mengadakan provokasi (bisikan-bisikan, hasutan-hasutan, kelakuan dan perbuatan permusuhan) yang akan mendatangkan kekacauan, kecemasan, ketakutan pendeknya yang hendak mengganggu ketentraman dan kerukunan di kalangan penduduk.
9. Barang siapa yang mengadakan provokasi sebagai dimaksud itu, akan dikenakan hukuman berat mungkin sampai hukuman mati.
10. Semua peraturan berlakusaat itu, meskipun aturan-aturan Pemerintah TBA tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian Naskah Timbang Terima Kekuasaan yang telah ditandatangani, tanggal 11 Desember 1949 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI, semuanya berlaku sampai tiba waktunya diubah oleh yang berhak mengatur.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu (DPB) dan Dewan Kota Bengkulu dalam bentuk dan susunannya pada tanggal 19 Desember 1948 diperpanjang usianya sampai ia dibubarkan secara resmi.
12. Dewan-Dewan Marga, Kepala-Kepala Marga, Kepala-Kepala Dusun, Kepala-Kepala Pasar, datuk-datuk di Kota Bengkulu, pemangku-pemangku dan pegawai-pegawai mesjid, berdasarkan aturan yang ditandatangani 11 Desember 1949, meskipun sekalian ada di antaranya yang mendapat pengakuan dari Pemerintah TBA tetap bekerja terus sampai semuanya itu diubah atau diganti (atas alasan-alasan yang syah) menurut peraturan NRI (Negara Republik Indonesia) dalam daerah Bengkulu bagi semua urusan tersebut. Jika di suatu tempat terdapat kebimbangan disebabkan adanya dua orang atau lebih kepada alat (atau pegawai-pegawai agama yang menganggap dirinya sama-sama berkuasa, maka jika tidak ada ukuran yang lain buat menentukan siapa yang berhak benar, akan diadakan pemilihan secepat-cepatnya. Dalam menunggu pemilihan, maka kepala adat (atau pegawai agama) yang ditunjuk oleh TBA itulah yang meneruskan pekerjaan buat sementara waktu.
13. Semua pegawai, meskipun yang diangkat oleh Pemerintah TBA tetap bekerja terus dalam pangkat dan derajatnya sebagai tercantum pada aturan tanggal 11 Desember 1949 sampai saatnya diadakan perubahan menurut "Naskah Timbang Terima Kekuasaan".
14. Uang Belanda, uang NRI, juga uang daerah (DMISS, PROPINSI, dan Keresidenan) dipergunakan bersama-sama

dalam bekas wilayah TBA atas kurs pasaran sampai urusan mata uang diatur lebih lanjut.

15. Rakyat dan semua penduduk dari seluruh lapisan, golongan partai dan kebangsaan, berkasih-kasihan kamu, hiduplah dengan tenteram, tolong-menolong, harga menghargai, hormat-menghormati, hilangkan perasaan dendam, benci dan permusuhan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menurunkan rahmat-Nya atas kita semua.<sup>191</sup>

Kelima belas butir maklumat tersebut kemudian ditandatangani oleh Komandan STB Residen Bengkulu, Letkol Mr. Dr. Hazairin Barlian.

Berdasarkan surat Komandan Sub Komando Sumatera Selatan tanggal 15 Oktober 1949, No. 549/1b/kg, setelah TNI menduduki kembali daerah yang dikosongkan Belanda, barulah dapat dibentuk Batalyon riil di daerah Sub Teritorium Bengkulu (Desember 1949) dengan secepat kilat. Komandan Sub Teritorium Bengkulu mengirimkan Letda Sumaryo menghadap Komandan Subkoss dengan membawa daftar Batalyon riil dan yang berada di luar itu untuk mendapatkan penetapan seperlunya. Dengan surat perintah tanggal 15 Desember 1949, no. 217/11a/kg/49, maka Batalyon riil untuk STB dengan kode nomor Batalyon 24 beserta Komandannya Kapten Nawawi Manaf menjadi kenyataan dan dengan surat perintah Komandan Brigade Sumatera Selatan no. 341/2a/kg/1949 tanggal 19 Desember 1949 terbentuklah staf dan kesatuan-kesatuan Brigade Sumatera Selatan.

Untuk menghadapi pengakuan kedaulatan dan dengan sendirinya terbentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maka semuanya harus berjalan dengan secepat-cepatnya. Mutasi-mutasi terjadi dan harus segera dilaksanakan, baik untuk penyempurnaan Batalyon 24 sendiri, maupun pemindahan ke dalam kesatuan-kesatuan yang lain, seperti yang terjadi misalnya dengan kawat dari LYC di bawah ini :

---

<sup>191</sup> M.Z. Ranni, *Ibid.*, hal. 211-213.

Delegasi Republik Indonesia  
Local Joint Committee No. 4  
Wakil Kom STB Kapten Zenrani Curup.

Nota tanggal 22-12-1949 ttg harap perintahkan let muda wimtamawiji beserta let muda arifinmursalin segera berangkat ke Palembang menghadap kombrig ss.

Kom Bat 24 Kapten Nawawi  
Tanggal 22 Desember 1949  
An. Delegasi Republik Indonesia  
*Local Joint committee.*<sup>192</sup>

Masih banyak terjadi mutasi ke dalam Batalyon 24, maupun keluar dari Sub Teritorium ini dan dengan Surat Perintah Komandan Brigade Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 1949, no. 445/2a/kg, mulai saat itu seluruh Sub Teritorium yang pernah ada di Sumatera Selatan, dihapuskan dan seluruh pertanggungjawaban diserahkan kepada batalyon riil yang telah dibentuk dan disyahkan, sehingga di daerah Kerisidenan Bengkulu, hanya terdapat satu kesatuan, yaitu Batalyon 24.

Setelah ditanda-tangani persetujuan KMB tanggal 27 Desember 1949, maka dilangsungkan pula upacara pengakuan kedaulatan terhadap Kemerdekaan Indonesia. Meskipun secara formal pengakuan terhadap Republik Indonesia Serikat, tetapi pengakuan kedaulatan tersebut adalah pengakuan terhadap seluruh Tanah Air Indonesia. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedaulatan penuh atas Indonesia, yang wilayahnya meliputi Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Daerah Irian Barat baru masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 13 tahun kemudian.

Sesuai dengan pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag ini, maka terbentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Inti kekuatan APRIS adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ke dalam APRIS ini juga dimasukkan bekas KNIL (tentara Hindia Belanda). Kesibukan mengenai pembentukan dan penyusunan APRIS dimulai sejak Tentara Nasional baru saja kembali secara resmi ke dalam daerah yang di duduki Belanda<sup>193</sup>.

Persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag menimbulkan *shock* di kalangan orang-orang yang selama ini bekerjasama dengan Belanda. Mereka menjadi cemas dan takut akan tindakan balas dendam dari penduduk dan para pejuang. Sebagian besar

---

<sup>192</sup> Arsip pada Pusat Sejarah TNI AD.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 203

dari mereka mencoba untuk kembali ke pihak Republik Indonesia dan menjalin hubungan dengan kelompok Republikan. Namun ada juga sebagian kecil yang menyingkir dengan diam-diam dari Bengkulu. Tetapi dengan adanya pernyataan pemimpin perjuangan bahwa mereka yang semula pro Belanda dapat diampuni dan dapat kembali bergabung dengan Republik Indonesia, maka mereka menjadi lega. Orang-orang yang selama ini diduga bekerja sama dengan Belanda, tetap diperbolehkan bertugas pada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian tindakan balas dendam dan perpecahan yang semula diperkirakan akan terjadi di Bengkulu pasca serah terima sama sekali tidak terjadi, sehingga keharmonisan dapat terjalin.

## 2. Demiliterisasi

Setelah diadakan persetujuan Roem – Royen dan Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 serta disepakatinya persetujuan *cease fire* (penghentian tembak menembak), maka keadaan negara secara berangsur-angsur mulai aman. Di daerah-daerah sudah tidak ada lagi pertempuran yang berarti, sehingga tugas para pejuang lasykar rakyat, termasuk juga guru dan tentara pelajar di Bengkulu dalam perjuangan bersenjata sudah tidak diperlukan lagi.

Banyaknya sekolah yang tutup total sebagai akibat dari ancaman perang telah membuat sekolah-sekolah menjadi terbengkelai. Untuk mengisi pelajaran di sekolah-sekolah di Bengkulu, maka melalui Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan, maka para guru dan tentara pelajar didemobilisasi dan dinyatakan bubar. Mereka diminta untuk melanjutkan pelajaran. Sedangkan para guru yang ikut berjuang juga diminta untuk kembali menjadi guru, mendidik dan mengajar anak-anaknya di bangku sekolah. Sekolah-sekolah akhirnya dibuka kembali dan semua pelajar akhirnya kembali ke bangku sekolah untuk belajar seperti biasa.

Mengingat keadaan daerah-daerah masih belum menentu, perintah tersebut baru benar-benar dapat terlaksana setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Untuk mengenang jasa para pelajar pejuang, maka mereka yang kembali ke bangku sekolah mendapat tunjangan bea siswa dari Pemerintah Karesidenan Bengkulu.

Selanjutnya banyak para pejuang dari kalangan rakyat dan para pemuda yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan Sub Teritorium Bengkulu yang tidak ikut lagi berada dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), dari segala jenjang : Perwira, Bintara dan Tamtama. Ada banyak alasan mengenai

hal ini. Ada yang mengemukakan bahwa apa yang telah dilakukan adalah pengabdian semata-mata terhadap bangsa dan tanah air. Kewajiban telah ditunaikan terhadap keselamatan bangsa dan tanah air yang berada dalam ancaman musuh. Selanjutnya mereka menunjuk kepada Bab XII pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, hanya yang dilakukan itu semata-mata berdasarkan kesadaran saja. Mereka kembali kemasyarakat menurut keinginan, kemampuan, profesi sendiri-sendiri dan dengan cara serta usaha sendiri-sendiri, baik ke dalam pemerintahan sipil, swasta maupun berusaha sendiri.

Bagi mereka yang tergabung dalam Tentara Pelajar, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, mengenai Demobilisasi Pelajar, di mana diberikan kesempatan secara luas untuk dapat meneruskan pendidikan dan pelajaran di segala tingkat. Sebagian besar dari mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pengaturan mengenai Tentara Pelajar ini disusul pula dengan satu keputusan Menteri P.P.K. No. 25475/Kb. Tanggal 21 Desember 1950 dan kemudian dengan satu Peraturan Menteri Pertahanan No. F/MP/127/52 tanggal 15 Februari 1952. Hal ini penting artinya bagi kelanjutan Republik Indonesia, karena banyak sekali dari para pelajar telah ikut berjuang antara 1945 sampai dengan pengakuan kedaulatan, sehingga pendidikan dan pelajaran mereka mengalami penundaan. Dengan kebijaksanaan seperti tersebut di atas, hal ini dapat diatasi, meskipun sedikit mengalami kelambatan.<sup>194</sup>

Berkat adanya inisiatif dari seorang mantan anggota Sub Teritorium Bengkulu pada tahun 1951 didirikan Sekolah Pertanian. Sekolah ini merupakan Sekolah Pertanian yang pertama untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang didirikan di Curup. Pada awalnya berdirinya Sekolah Pertanian ini dimaksudkan untuk mendidik para pemuda agar bisa menjadi kader-kader pertanian di desa dan tidak ada pembiayaan khusus, hanya berdasarkan kebijaksanaan dan kemauan saja. Akhirnya sekolah ini dijadikan Sekolah Pertanian Rendah yang pertama di Propinsi Sumatera Selatan.<sup>195</sup> (Keputusan DPD Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Mei 1953, berdasarkan Surat Jawatan Pertanian Rakyat tanggal 31 Oktober 1952, No. 73/L/01). Alumni sekolah ini kemudian dimanfaatkan oleh Jawatan Pertanian Sumatera Selatan.

Melalui surat pengantar no. 731/Iia/SU. II/54, tanggal 18 Maret 1954, kepada 9 orang mantan Perwira Angkatan Perang Republik Indonesia di Sumatera Selatan, Panglima Tentara dan Teritorium II

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hal. 230.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 230.



Sumatera Selatan mengirimkan suratnya no. V069/RHS/TTII/54, tanggal 6 Maret 1954, yang isinya meminta pandangan mengenai<sup>196</sup> :

- Surat kepada Kepala BRN Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 September 1953, no. V-912/SU/TT, II/53;
- Surat Kepala BRN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Oktober 1953, No. 2413/U/XXIV/17; dan
- Surat direktur BRN Pusat tanggal 14 Oktober 1953, no. 555/Rah/13/53.

Ketiga surat pengantar dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tersebut bertujuan untuk menyalurkan mantan pejuang, terutama bagi para pejuang yang masih sangat muda dan memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar.

Hal tersebut di atas, nampaknya untuk daerah bekas Sub Teritorium Bengkulu tidak menjadi masalah, karena para mantan anggota angkatan Perang Republik Indonesia di daerah Bengkulu merasa telah mendapat suatu kepuasan batin setelah dapat menunaikan kewajibannya dalam menegakkan dan membela Republik Indonesia mulai dari awal sampai pada akhir perjuangan bersenjata.

Mengenai segala pengaturan selanjutnya mereka dengan keiklasan, sepenuhnya mempercayakan hal-hal tersebut kepada para pemimpin yang diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana serta penuh kesetia-kawanan. Apa yang telah ditampilkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium II Sumatera Selatan, Letkol Bambang Utoyo, dengan suratnya telah menunjukkan tanggung jawab dan kesetia-kawanan terhadap mantan kawan seperjuangan di Karesidenan Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan.<sup>197</sup> Hal ini menimbulkan kegembiraan dan harapan bagi semua, baik yang jauh maupun yang dekat.

Sering kali juga ditemukan hal-hal yang agak ganjil, aneh, menggelikan dan sering kali juga menekan perasaan. Semua ini dibiarkan berlalu begitu saja dengan segala kebesaran jiwa dan lapang dada, karena hal semacam ini memang sudah menjadi resiko dari suatu perjuangan dan perjuangan itu sendiri telah dilakukan dengan segala kesadaran dan penuh keiklasan. Agar tetap dalam satu ikatan kekeluargaan dan persaudaraan antara sesama kawan seperjuangan, di samping usaha-usaha yang lain, maka para demobilisan di eks daerah Sub Teritorium Bengkulu, juga mengusahakan pembentukan suatu

---

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal. 230

<sup>197</sup> *Ibid.*, hal. 231.

organisasi yang pada awalnya hanya bersifat lokal dan terbatas untuk daerah ini saja, dinamakan Pegra (Persatuan Eks Gerilya).

Kemudian organisasi ini meleburkan diri ke dalam organisasi-organisasi, seperti IBAAPRI (Ikatan Bekas Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia). Kemudian muncul organisasi IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).<sup>198</sup> Setelah tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957, keluarlah satu Undang-Undang mengenai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan ini terbentuk pula Legiun Veteran Republik Indonesia, yang diakui resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Semuanya dengan segala kegairahan bergabung dan menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dengan segala pengharapan, agar persatuan, kesatuan dan kesetia-kawanan yang telah terjalin kuat pada saat-saat perjuangan merebut, menegakkan dan membela kemerdekaan Indonesia pada masa silam, akan tetap dapat terpelihara dengan baik. Pada waktu itu dapat dikatakan : *"Kuah sama diirup, sambal sama dicolek"*.

### 3. Mengisi Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa barisan tentara dibangun dan didirikan untuk menjadi alat perisai bagi pertahanan negara. Di samping itu tentara juga dapat dipakai sebagai tenaga untuk menjaga ketentraman masyarakat di samping tenaga penjagaan sipil berupa kepolisian. Pada masa perang, tentara menjadi tulang punggung dalam mempertahankan kedaulatan negara. Tentara harus berjuang dan berperang melawan musuh negara yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Pada masa revolusi kemerdekaan barisan tentara di samping barisan kepolisian dan Badan Perjuangan lainnya, telah menunjukkan jasanya yang mulia dan tinggi. Jasanya yang agung untuk bersama-sama dengan lain golongan dari rakyat menegakkan, mempertahankan, kemudian memelihara kemerdekaan yang telah dicapai dengan darah dan air mata. Tentara dalam hubungan tubuh satu negara, merupakan alat pertahanan untuk melindungi kesejahteraan negara dan rakyat. Begitu tugasnya di waktu perang. Dan begitu pula di waktu damai.

Dalam masa revolusi bersenjata diakhiri dan masa perjuangan melanjutkan revolusi bermula, tugas tentara tidak kurang berat dan hebatnya terhadap negara. Pada masa itu, ke dalam tentara harus menyusun, memperkuat dan menyempurnakan dirinya sendiri, sehingga selaras dengan tingkatan tentara internasional. Akan tetapi keluar, terutama dalam waktu-waktu yang senggang barisan-barisan ini tidak

---

<sup>198</sup> *Ibid.*, hal. 231.

kurang pentingnya untuk membantu pihak sipil dalam usaha pembangunan fisik dalam usaha pembangunan negara di segala bidang.

Namun demikian bukan tidak ada masalah yang mengganjal selama proses demiliterisasi. Di antara persoalan-persoalan baru yang kita hadapi setelah selesainya perjuangan bersenjata, adalah persoalan pengembalian bekas pejuang ke dalam masyarakat. Telah menjadi kenyataan bahwa jumlah yang terbesar dari para pejuang kemerdekaan nasional, terdiri dari Mantan Angkatan Perang, dan Mantan Badan-Badan Perjuangan Rakyat yang bernama Lasykar Rakyat.<sup>199</sup>

Selama masa revolusi menegakkan kemerdekaan, golongan yang di atas itu, memegang peranan yang penting, tetapi setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, di mana perjuangan Indonesia berubah corak dari perjuangan bersenjata ke arah pembangunan negara. Tidak mengherankan jika ada banyak mantan pejuang Indonesia yang belum mempunyai lapangan pekerjaan, sehingga dapat dengan teratur menyumbangkan tenaganya untuk mengisi kemerdekaan dan membangun negara.

Pemerintah Indonesia insyaf bahwa tenaga-tenaga pejuang itu adalah tenaga yang terpenting, bukan saja dalam menghadapi perjuangan bersenjata, tetapi juga dalam menghadapi pembangunan negara. Hal ini ternyata dari tindakan pihak Pemerintah yang selalu berusaha untuk menyalurkan tenaga-tenaga itu kembali ke dalam masyarakat. Keberadaan Kementerian Pembangunan Masyarakat dalam Pemerintahan Republik Indonesia (RI) di Yogyakarta, kemudian merupakan Biro Demobilisasi dalam Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian usaha ini diteruskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dan Biro Rekonstruksi Nasional dalam Pemerintahan Negara Kesatuan.

Bentuk negara Indonesia telah tiga kali mengalami perubahan, dari Republik Indonesia Yogyakarta ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian dari RIS kembali menuju ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula Pemerintahannya telah berganti-ganti, namun perhatian terhadap masalah mantan pejuang selalu mendapat keistimewaan. Hal ini menunjukkan betapa besar hasrat Pemerintah untuk menyalurkan orang-orang yang telah berjasa ini kembali ke dalam masyarakat dengan membuka jalan bagi mereka agar dapat memperoleh mata pencaharian dan kehidupan yang layak.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1954), hal. 290.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal.290.

Dalam rangka penyaluran mantan pejuang ke dalam masyarakat ini, Sumatera Selatan mengambil peranan yang terpenting, karena Sumatera Selatan dalam hal ini bukan saja menghadapi tenaga pejuang yang ada dalam daerah ini, tetapi juga Sumatera Selatan merupakan tempat penampungan mantan tenaga pejuang yang datang dari Pulau Jawa. Kekayaan alam dan kesuburan tanah daerah Sumatera Selatan selalu menanti kedatangan mereka yang ingin membuka lahan pertanian, termasuk juga di Bengkulu.

Sampai akhir tahun 1952 tenaga-tenaga pejuang yang datang dari Jawa telah mencapai angka 15.000 jiwa, yang kemudian ditampung di Sumatera Selatan untuk membuka lahan tidur yang waktu itu sangat luas. Mereka kemudian disebar ke berbagai daerah di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, di antaranya yaitu ke daerah Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Dengan jalan membuka hutan menjadi daerah pertanian, maka terbukalah sumber-sumber mata pencaharian baru di daerah ini, bukan saja dalam lapangan pertanian, tetapi juga dalam lapangan pertukangan dan perhubungan.

Tenaga pejuang di kawasan Karesidenan Bengkulu, bukan saja disalurkan untuk membuka hutan baru, tetapi juga untuk meneruskan usaha-usaha yang telah ada. Pemerintah telah membeli *onderneming* dari tangan asing seperti *onderneming Westkust*, *onderneming Sindang* dan Dataran dalam daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam beberapa *onderneming* ini telah dapat dikerjakan sekitar 1000 orang mantan tenaga pejuang. Mereka ada yang berasal dari Jawa dan ada pula mantan pejuang yang berasal dari Sumatera Selatan.<sup>201</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada tiga perkebunan di Sumatera Selatan, Pemerintah perlu mendatangkan tenaga kerja lagi. Untuk merealisasinya maka pada tahun 1953 didatangkan tenaga kerja lagi sebanyak 400 jiwa yang berasal dari Jawa. Dengan adanya pembukaan ketiga perkebunan itu, terbukalah kesempatan bagi para mantan pejuang secara organisasi atau perseorangan untuk membuka halaman baru bagi sejarah penghidupannya.

Di samping itu di daerah pertanian Kelilik (Kepahyang) oleh Pemuda Pembangunan Desa yang datang dari Cirebon sebanyak 600 kepala keluarga, telah dapat dibuka tanah-tanah baru dan diharapkan tidak saja dapat merubah tanah yang tidak menghasilkan menjadi tanah yang berguna, tetapi juga memberi manfaat kepada penduduk di sekitarnya dengan bertambahnya jalan-jalan baru untuk perhubungan. Di samping itu juga dibangun saluran irigasi untuk mengairi sawah-

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, hal. 291.

sawah dan ladang pertanian yang dengan cara membendung atau membuat waduk.

Usaha yang telah berjalan bagi para mantan pejuang yang berasal dari Sumatera Selatan di bidang pertanian dan peternakan, dapat dilihat di Sipatuhu daerah Ranau, di mana para mantan anggota AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) telah menunjukkan contoh kepada masyarakat, bahwa mereka bukan saja sanggup berjuang dalam lapangan ketentaraan, tetapi juga mereka telah membuktikan usahanya di bidang pertanian dan peternakan.

Untuk meningkatkan ketrampilan, juga dibuka kursus kader perkebunan di Sindang, di mana 50 orang mantan pejuang mendapatkan pelatihan dalam lapangan pertanian. Demikian juga di Sungai Buah dibuka kursus kehewanan untuk 150 orang mantan pejuang. Kemudian dilanjutkan pula dengan usaha penangkapan ikan di Sungsang.

Kepada yang berminat pada usaha-usaha lainnya, seperti perlengkapan, pengangkutan, pertukangan dan lain-lain, secara perseorangan atau koperatif, telah pula diberi kesempatan oleh Pemerintah dengan bantuan kredit, dengan cara-cara yang agak berbeda dari kredit-kredit yang biasa diberikan oleh Pemerintah.

Adanya lapangan pertukangan dan pengangkutan dan lain-lain usaha, mereka diharapkan dapat ikut dalam rangkaian pembangunan negara di samping mengembangkan usaha perseorangan. Memang harus dimaklumi bahwa bantuan Pemerintah kepada mantan pejuang itu belum mencukupi, tetapi jika diukur dengan kekuatan Pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi, maka apa yang telah diberikan oleh Pemerintah itu, telah maksimal.

Kesulitan yang dihadapi BRN sebagai suatu instansi yang mengurus mantan pejuang ini, di samping masalah-masalah teknik, kekurangan alat dan lain sebagainya, faktor psikologis di kalangan mantan pejuang sendiri, tidak sedikit mendatangkan kesukaran dalam penyelenggaraan pengembalian mantan pejuang ke dalam masyarakat. Karena dari para mantan pejuang itu terdapat dua golongan yang cara berfikirnya berlainan. Di satu sisi mereka ada yang berfikir secara "lunak". Golongan ini hampir sama dengan para penganggur, kebanyakan mereka mau bekerja sebagai buruh biasa dalam perusahaan. Dan usaha untuk pengembalian mereka ini tidak banyak menemui kesulitan.

Pada sisi lain ada juga yang berfikir agak keras, dan tidak suka menjadi buruh orang lain. Keinginan mereka hendak memiliki sendiri perusahaan-perusahaan, di antaranya ada juga yang ingin hidup secara

koperatif dengan kawan-kawannya yang lain.<sup>202</sup> Kesukaran mereka, adalah alat-alat yang agak modern yang dijalankan dengan mempergunakan sedikit mekanisasi. Berhubung dengan adanya keinginan-keinginan yang demikian, maka untuk perusahaan-perusahaan mereka itu, dibutuhkan alat-alat mekanis.

Demikianlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara kita pada waktu itu, yaitu suatu masalah yang timbul atas dorongan revolusi. Secara berangsur-angsur memang dapat diatasi. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, pengembalian para mantan pejuang ke dalam masyarakat dapat mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan para mantan pejuang pada khususnya.

Cepat dan lambatnya usaha penyelesaian masalah ini, tidak hanya bergantung pada keuangan negara saja, tetapi berada pada keinsyafan para mantan pejuang dalam mengisi pembangunan di daerah transmigrasi. Di samping itu juga karena adanya rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menolong di antara warga transmigran mantan pejuang dengan masyarakat setempat (penduduk asli). Keberadaannya saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sepuluh tahun pasca penempatan transmigran di Bengkulu ada 1397 mantan pejuang yang harus disalurkan ke tengah-tengah masyarakat pembangunan. Jika dilihat angka ini, dan menginsyafi angka yang telah disokong dan disalurkan ini sungguh membayangkan suatu pekerjaan yang menghendaki waktu yang panjang. Hanya dengan semangat dan jiwa besar, pekerjaan besar dan mulia itu dapat diselenggarakan dengan baik.

Di samping tenaga pemuda biasa (buruh dan tani), maka terdapat pula tenaga pelajar yang juga harus dikembalikan ke masyarakat. Di samping Angkatan Perang Republik Indonesia dan Barisan Lasykar Rakyat, juga banyak tenaga pelajar yang telah meninggalkan bangku sekolah untuk ikut berjuang membela negara, baik sebagai tentara cadangan, anggota Palang Merah Indonesia (PMI), maupun sebagai penyalur logistik.

Golongan pelajar ini tidak sedikit jasanya dalam perjuangan di masa lalu. Untuk itu harus dipikirkan pula agar mereka dapat kembali ke bangku sekolah menimba ilmu kembali bersama gurunya, agar dapat meraih cita-citanya di masa mendatang. Guru-gurunya di masa perang kemerdekaan juga ikut berjuang terlibat dalam perang gerilya. Setelah pengakuan kedaulatan, mereka kembali mengajar anak-anak didiknya yang dulu bersama-sama dalam perjuangan melawan Belanda.

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hal. 292.

Dalam menghadapi pelajar pejuang ini, Pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Dalam pendaftaran yang telah dilakukan untuk daerah Bengkulu ada 95 orang. Data ini sebenarnya lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, karena sebelum terbentuknya Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar di Bengkulu terlebih dahulu mereka telah banyak yang pergi ke Jawa untuk meneruskan sekolahnya di tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa (Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta).

Kepada mereka yang 95 orang ini setelah diadakan seleksi, berdasarkan surat-surat keterangan lama dari perjuangan mereka, dan menurut Peraturan Pemerintah No. 32, maka penghargaan mereka atas perjuangan mereka itu dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) Penghargaan istimewa sebanyak 1 orang; (2) Penghargaan khusus sebanyak 38 orang; (3) Penghargaan umum sebanyak 2 orang.<sup>203</sup> Ada pula karena tidak cukup keterangan mengenai perjuangan mereka, maka sebagai mana belum dapat diseleksi untuk menentukan penghargaan terhadap mereka.

Usaha pengembalian mereka itu ke bangku sekolah dan menormalisir pelajaran mereka yang terpaksa tertinggal selama ini, telah dimulai semenjak awal tahun 1950, dengan mendirikan asrama-asrama Pelajar Pejuang yang pertama kali didirikan di Bengkulu, kemudian didirikan pula di kota Palembang. Selanjutnya juga diberikan uang tunjangan menurut dasar-dasar penghargaan mereka dan disesuaikan dengan tingkatan sekolah mereka. Bagi pelajar perguruan tinggi mendapat tunjangan sebesar Rp. 150,- sebulan; SMA/Sederajat tunjangannya ada Rp. 125,- per bulan; Untuk sekolah vak tunjangannya sama dengan anak SMA, yaitu sebesar Rp. 125,- per bulan. Sedangkan untuk anak-anak setingkat SMP/ sederajat mendapat tunjangan sebesar Rp. 100,- per bulan.<sup>204</sup>

Selanjutnya Pemerintah juga memberikan bantuan/tunjangan alat-alat dan uang sekolah. Perinciannya, untuk Perguruan Tinggi sebesar Rp. 300,- per tahun; Tunjangan untuk sekolah setingkat SMA/ sederajat sebesar Rp. 25 sebulan; SMP/ sederajat tunjangannya sebesar Rp. 25,- sebulan; dan Sekolah Vak sebesar Rp. 25,- per bulan.<sup>205</sup>

Bagi pelajar yang duduk di sekolah pemerintah tidak dikenakan uang kuliah/uang sekolah. Bahkan mereka malah mendapatkan bantuan

---

<sup>203</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1954), hal.293.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hal. 293.

<sup>205</sup> *Ibid.*

alat-alat pelajaran secara gratis. Pemberian bantuan peralatan belajar secara gratis tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri P.P.K. No. 25475/Kb. Tanggal 21 Desember 1950 Tentang Pembebasan uang kuliah atau uang sekolah.<sup>206</sup>

Pada tahun pelajaran 1952/1953 ada beberapa orang Pelajar Pejuang dari Bengkulu telah duduk di Perguruan Tinggi di Jakarta, di antaranya kuliah di Fakultas Ekonomi (*Faculteit Economie*), dan yang menduduki bangku SMA/ sederajat, ada sekitar 30 orang, Sekolah Vak 18 orang. Selanjutnya yang duduk di bangku SMP/ sederajat berjumlah 40 orang.<sup>207</sup>

Mengingat di antara para pelajar pejuang di Bengkulu ada yang memiliki otak yang sangat brilliant/cerdas, maka ada juga yang dikirim ke Jepang. Pemerintah Pusat mengirim sebanyak 60 orang pelajar pejuang yang berasal dari Sumatera Selatan. Dari jumlah itu ada dua orang Bengkulu yang ikut dikirim ke Jakarta untuk mengikuti *psykotechniek*. Setelah diseleksi, dari jumlah 60 orang tersebut, hanya ada satu orang yang berhasil lolos untuk dikirim ke Jepang.

Untuk menangani pendidikan di sekolah Vak bagi para Pelajar Pejuang, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan terhadap Pelajar Pejuang di Sekolah Vak, yaitu Peraturan Nomor F/MP/127/52 tanggal 13 Februari 1952, maka tercatat di Bengkulu ada 8 orang Pelajar Pejuang yang telah membuat perjanjian Ikatan Dinas menurut peraturan tersebut.

Dalam mengembalikan Pelajar Pejuang ke bangku sekolah, ada persoalan yang menyulitkan Pemerintah. Hal ini terjadi karena ada banyak Pelajar Pejuang yang telah pindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga sulit di data. Tidak sedikit jumlah Pelajar Pejuang yang berasal dari Bengkulu, yang telah pindah ke tempat lain, khususnya ke Jawa. Hal ini mereka dilakukan karena di Bengkulu waktu itu belum ada perguruan tinggi, bahkan sekolah tingkat SMA jumlahnya juga belum banyak, sehingga mereka yang ingin melanjutkan sekolahnya, terpaksa harus pergi ke kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Namun sebaliknya, ada juga Pelajar Pejuang yang berasal dari daerah lain kemudian sekolah SMA/ Sederajat di Bengkulu, maka mereka menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Bengkulu.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, satu demi satu tentara Belanda ditarik dari daerah Bengkulu. Keamanan berangsur pulih kembali. Para petani dan penduduk lainnya mulai

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, hal. 294.

<sup>207</sup> *Ibid.*



kembali ke rumah masing-masing untuk menikmati alam kemerdekaan, setelah berbulan-bulan mengungsi ke hutan-hutan untuk bergerilya.

Mulai tahun 1950, pertanian-pertanian yang tertinggal karena perang, mulai dikerjakan kembali. Kebun-kebun rakyat diperluas dan diremajakan dari tahun ke tahun. Pada masa ini dalam sektor pertanian setapak demi setapak mulai mengalami kemajuan. Dari tahun ke tahun areal persawahan menunjukkan kenaikan yang meningkat. Hutan dan semak belukar mulai dibuka untuk persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah Bengkulu bertambah banyak dengan adanya transmigrasi pejuang dari Jawa. Namun demikian, pasang surut dalam perekonomian di Indonesia juga banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu. Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1957, hasil bumi daerah Bengkulu semakin bertambah meningkat dan bahkan dapat mencapai target yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu.

Dalam bidang perikanan juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Seperti yang terjadi di bagian barat Bengkulu adalah Lautan Indonesia yang sangat luas, sehingga dapat menjanjikan bahwa prospek perikanan laut di Bengkulu sangat baik. Hasil ikan laut sebagian besar dijadikan ikan asin untuk diperdagangkan ke luar daerah. Data tahun 1958 menunjukkan hasil ikan di Bengkulu tiap bulan mencapai 680.945 kg. Hasil lain yang dapat menunjang adalah polowijo seperti jagung, singkong, ubi rambat dan sebagainya.

Secara struktural, Bengkulu merupakan daerah agraris, dengan potensi utama perekonomian terletak pada sektor pertanian dalam arti luas, yang mencakup perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Untuk melengkapi sektor pertanian, maka dibangun saluran irigasi, terutama di daerah-daerah yang memungkinkan untuk daerah persawahan. Kegiatan lain yang cukup menonjol adalah sektor perkebunan. Hasil perkebunan sebagai penggerak perdagangan. Usaha pertanian tanaman perdagangan adalah kopi, cengkih, teh, lada dan karet. Peremajaan terhadap tanaman perkebunan juga dilakukan, terutama terhadap tanaman perkebunan yang sudah tua, yang merupakan tanaman sisa-sisa dari zaman penjajahan Belanda dahulu.

Hasil perkebunan banyak terdapat di daerah Bengkulu Utara sebagai penghasil karet yang dikirim ke Padang, melalui Pelabuhan Muko-Muko atau Pelabuhan Bengkulu. Sedangkan dari daerah Rejang Lebong banyak menghasilkan kopi yang dikirim ke luar daerah melalui Lubuk Linggau atau langsung ke Jakarta melalui Pelabuhan Bengkulu. Daerah Bengkulu Selatan banyak menghasilkan cengkih yang hasilnya dikirim ke Jakarta melalui Pelabuhan Bintuhan.

Proses pembangunan di segala bidang yang dilakukan di seluruh wilayah Bengkulu ini, banyak melibatkan para mantan pejuang, lasykar rakyat, ex anggota TNI yang telah di demobilisasi, sehingga mereka tidak menganggur. Di antara para mantan pejuang tersebut, ada yang telah berhasil menjadi pengusaha sukses, ada yang menjadi petani sukses dan bermacam-macam pekerjaan lainnya yang menempatkan mereka menjadi orang terpandang di daerahnya.

#### 4. Keadaan Pemerintahan 1945-1950

Sebelum pendudukan Jepang, daerah Bengkulu merupakan suatu keresidenan yang terdiri dari Daerah Kotapraja Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong ditambah dengan daerah Krui, Tanjung Sakti dan Muara Sindang. Setelah pendudukan Jepang dan masa revolusi bersenjata, daerah Krui, Tanjung Sakti dan Muara Sindang dimasukkan ke dalam Keresidenan Palembang dan Lampung.<sup>208</sup>

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, maka daerah-daerah seluruh Indonesia menanti Keputusan dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan diri dengan Negara Republik Indonesia yang merdeka. Didahului dengan Keputusan Presiden tanggal 20 September 1945, Sumatera dijadikan Propinsi dengan Mr. Teuku Muhammad Hassan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diberi kuasa penuh untuk mengurus segala sesuatu di Sumatera. Adanya Propinsi Sumatera ini, maka satu-per satu daerah diberi tanggung jawab dan secara resmi pemerintahan di bawah kekuasaan Republik Indonesia mulai berjalan.

Pada tanggal 34 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengangkat Residen se-Sumatera, termasuk pula Keresidenan Bengkulu dengan Residennya Ir. Inderacaya dan dilanjutkan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia) Keresidenan. Dengan adanya KNI ini, maka Keresidenan Bengkulu sebagai daerah administrasi, yang mendapat dukungan sepenuhnya dari KNI Keresidenan.<sup>209</sup>

Tanggal 12 Oktober 1945, Residen Bengkulu mengangkat pegawai negeri yang diperlukan dan menyusun pemerintahan di daerah. Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan dari Gubernur Sumatera yang memberi kuasa penuh kepada Residen untuk mengangkat pegawai negeri. Dengan adanya pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah, maka dengan sendirinya roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar.

---

<sup>208</sup> Arsyik Hawab, dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hal. 196.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hal. 197.

Pegawai negeri yang diangkat ini, kebanyakan diambil dari para pejuang yang sudah lama ikut mengabdikan diri dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Residen Ir. Inderacaya diganti oleh Mr. Hazairin, sebagai Residen kedua antara bulan April 1946 sampai ujung bulan Februari 1950.<sup>210</sup>

Antara tahun 1947-1950 Keresidenan Bengkulu tetap sebagai daerah Administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan KNI mengalami perubahan menjadi DPR Keresidenan. Pembentukan DPR Keresidenan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 12 April 1946 No. 8/m.g.s. yang menetapkan peraturan dasar untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat di tiap-tiap Keresidenan.<sup>211</sup>

Pada masa ini Keresidenan Bengkulu pernah mencetak mata uang sendiri, sebagai biaya untuk mengatur perekonomian di daerah Bengkulu. Hal ini dilakukan mengingat hubungan dengan Pusat Pemerintah sangat sulit. Meskipun uang yang dicetak hanya untuk Bengkulu, ternyata sampai ke luar daerah uang tersebut laku. Malahan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera mencoba mencontoh dari Bengkulu untuk mencetak uang sendiri. Uang yang dikeluarkan sendiri ternyata tidak membawa akibat apa-apa di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 Propinsi Sumatera dipecah menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan. Pada tiap propinsi ini dijadikan Pemerintahan Militer. Pertimbangan diadakannya daerah militer adalah bahwa situasi daerah dalam keadaan perang, instansi-instansi Pemerintah terpisah-pisah. Sedangkan persoalan banyak yang harus dipecahkan dan diputuskan dengan cepat dan tegas.<sup>212</sup> Apalagi yang menyangkut Pertahanan. Pemerintah Militer ini dibantu oleh para penasehat yang terdiri dari anggota-anggota DPD (Dewan Pertahanan Daerah), Badan Eksekutif dan pemimpin-pemimpin rakyat.

Keresidenan Bengkulu yang masih termasuk dalam Pemerintahan Militer Propinsi Sumatera Selatan, dijadikan Pusat Komando Perjuangan Daerah Sumatera Selatan. Pucuk pimpinan pun beralih tempat ke Bengkulu. Pada waktu itu yang bertindak sebagai Gubernur Militernya adalah Dr. A.K. Gani. Sebagai pusat perjuangan, maka waktu agresi kedua Belanda baru dapat memasuki Bengkulu sekitar bulan Januari 1949.

---

<sup>210</sup> *Ibid.*, hal. 198.

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*, hal. 202.

Perang melawan Belanda, sehingga pertahanan Tentara kita mundur ke daerah selatan dan utara. Sebagai daerah penghabisan pertahanan di Kabupaten Bengkulu Selatan kedudukannya di Dusun Fajar Bulan Kecamatan Masmambang dan Kabupaten Bengkulu berpusat di Tambang Emas Lebong Tandai. Daerah terakhir ini sangat dipertahankan mengingat emas yang ada dapat digunakan sebagai dana perjuangan melawan Belanda.<sup>213</sup>

Belanda tidak dapat menembus pertahanan tentara, sehingga daerah-daerah itu oleh Belanda dihujani bom siang malam dengan menggunakan pesawat terbang Mustang. Tambang emas dan beberapa daerah hancur sedangkansarana perhubungan putus sama sekali karena jembatan-jembatan yang ada juga telah dihancurkan. Belanda menduduki Keresidenan Bengkulu setelah kemerdekaan tidak sampai satu tahun. Karena pada akhir tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pasukan Belanda ditarik kembali dari daerah Bengkulu.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Perjalanan sejarah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah Bengkulu, mulai dari menjelang kekalahan Jepang hingga masa pengakuan kedaulatan dipenghujung Desember 1949, kemudian diikuti dengan keputusan untuk melakukan demobilisasi tentara yang prosesnya berlangsung hingga tahun 1950. Meskipun demikian batasan ini tidak kaku, karena masih ada latar belakang yang menyebabkan perjuangan rakyat bergelora menentang penjajahan. Adapun yang melatar belakangi mengapa rakyat berjuang mati-matian menentang penjajahan, karena sejarah telah membuktikan bahwa penjajahan bangsa asing sejak zaman Belanda dan Inggris dan kemudian Jepang, telah membuktikan bahwa kedatangan mereka ke daerah ini hanya ingin menjarah rayah kekayaan alam dan menindas kehidupan rakyat. Oleh karena itulah maka perjuangan rakyat dimulai sejak kehadiran Inggris di Bengkulu hingga kemudian dijajah oleh Belanda dan Jepang.

Pada masa kemerdekaan, para pejuang yang bertempur di garis depan terdiri dari kaum pemuda, guru, pelajar, dan kaum tani, nelayan. Pendek kata hampir seluruh lapisan masyarakat yang merasa kuat mengangkat senjata, ikut terlibat dalam perang gerilya. Didorong oleh semangat juang kemerdekaan, sebagian besar kaum pelajar yang belajar

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, hal. 203.

di Bengkulu bergabung dalam barisan pemuda Indonesia. Sesuai dengan kiprahnya, para pelajar bergerak bersama-sama dengan para pemuda non pelajar memberi penerangan kepada masyarakat tentang situasi tanah air yang sedang bergolak. Pada waktu malam hari mereka menulis di dinding-dinding dalam kota atau di pohon-pohon dengan slogan yang membangkitkan semangat perjuangan. Di samping itu para pelajar ikut berperan dalam perebutan senjata Jepang di Kota Bengkulu, Curup, Kepahyang, Manna, Bintuhan, Muko-Muko, Lais dan kota-kota lain di wilayah Bengkulu.

Pada saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Bengkulu turut serta dan aktif dalam perjuangan membela negara yang baru lahir tersebut. Memang tidak semua lapisan masyarakat terlibat langsung dalam pertempuran di garis depan. Hanya para pemuda, guru, pelajar dan laki-laki yang mampu mengangkat senjata yang ikut bertempur. Sedangkan orang-orang yang telah lanjut usia, kaum perempuan ibu rumah tangga dan anak-anak tidak terlibat. Di antara para pejuang yang bekerja di garis belakang terdiri dari kaum pelajar, guru dan kaum pemudi. Mereka menyediakan logistik, bahan makanan dan obat-obatan yang diperlukan guna menunjang kelangsungan perjuangan di garis depan.

Perjuangan rakyat Bengkulu di awal kemerdekaan lebih banyak tercurah pada usaha untuk konsolidasi dan mobilisasi umum. Di samping itu juga berusaha mendapatkan senjata dan peralatan perang dengan berbagai cara, seperti merampas atau mencuri senjata dari tangan Jepang. Di samping itu juga membuat senjata sendiri. Senjata yang dibuat berupa senapan mesin ringan, seperti kecepek, granat, dinamit dan bahan peledak. Hal ini dilakukan karena rakyat sadar dan tahu bahwa suatu saat Belanda pasti datang untuk mengambil alih kekuasaan seperti sebelum dikalahkan Jepang tahun 1942. Sebelum tentara Sekutu datang, berbagai perselisihan dan konflik dengan Jepang muncul bahkan perang terbuka pun sering terjadi di berbagai tempat, seperti perang di Manna, Tabarenah, Curup, Kepahyang dan kota Bengkulu.

Pada masa agresi militer Belanda, bumi Bengkulu merupakan salah satu medan pertempuran terakhir di Sumatera Selatan dalam melanjutkan perlawanan rakyat semesta. Meskipun rakyat telah lepas dari penindasan Jepang, namun kehadiran mesin perang Belanda telah membuat mereka harus berjuang dengan siasat perang gerilya. Peran serta dan aktif rakyat Bengkulu dengan segala keiklasan dan pengorbanan mampu bertahan sampai saatnya Belanda angkat kaki dari bumi Bengkulu.

Perjuangan rakyat Bengkulu telah menempuh berbagai tantangan dan rintangan serta pengorbanan darah dan air mata dengan korban jiwa, raga dan harta yang tidak sedikit. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya karena gugur dalam perjuangan membela negara, atau anak yang kehilangan ayah dan istri yang kehilangan suami tercinta. Semua itu adalah pengorbanan dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Pada akhirnya kedaulatan Negara Republik Indonesia dapat dipertahankan dan negeri ini tetap tegak berdiri hingga kini. Berkat jasa para suhada dan pengorbanan mereka, kita dapat menikmati kemakmuran di negeri yang merdeka ini.

Agresi Militer Belanda pertama dilancarkan pada tanggal 26 Agustus 1947 ke kota-kota besar di Indonesia. Namun berkat kuatnya persatuan dan kesatuan rakyat Bengkulu dalam membendung agresi militer ini, Bengkulu menjadi daerah yang tidak berhasil ditembus serangan Belanda. Karesidenan Bengkulu yang termasuk dalam Pemerintahan Militer Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan pusat komando perjuangan daerah Sumatera Selatan.

Sebagai pusat perjuangan, maka sewaktu Belanda melancarkan Aksi Militer kedua, serdadu Belanda baru dapat memasuki Bengkulu pada bulan Februari 1949. Pada masa agresi kedua ini, perang terjadi di berbagai daerah di Bengkulu, seperti di Kota Bengkulu, Kepahyang, Curup, Lais dan Tabarenah. Bahkan Tabarenah pernah menjadi medan perang yang sengit. Daerah ini dipertahankan mati-matian oleh para pejuang. Maka tidak heran jika Tabarenah menjadi daerah yang paling banyak menelan korban, baik di pihak pejuang maupun Belanda.

Pusat pertahanan para pejuang di Bengkulu Selatan berkedudukan di Dusun Fajar Bulan, Kecamatan Masmambang dan Kabupaten Rejang Lebong berpusat di Tambang emas Lebong Tandai. Daerah terakhir ini sangat dipertahankan mengingat emas yang ada dapat digunakan sebagai dana perjuangan melawan Belanda. Serdadu Belanda tidak mampu menembus pertahanan rakyat yang sangat kuat, sehingga Belanda menyerang dengan pesawat terbang Mustang dan membom tambang emas tersebut hingga hancur. Namun demikian, berkat kuatnya pertahanan rakyat, Belanda menduduki beberapa tempat di Bengkulu tidak sampai 1 (satu) tahun, karena pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pasukan Belanda ditarik kembali dari daerah Bengkulu.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, maka lasykar rakyat tidak dibutuhkan lagi. Para pejuang yang berasal dari guru dikembalikan fungsinya sebagai guru. Demikian juga para pelajar yang ikut berjuang, juga diminta untuk kembali belajar

seperti semula, menimba ilmu setinggi-tingginya agar kelak dapat mengisi pembangunan di segala bidang.

Pada masa demobilisasi, dilanjutkan dengan pembenahan untuk menyalurkan mereka (eks pejuang) mengisi pembangunan di segala bidang. Bagi yang ingin bertani diberi kesempatan untuk membuka hutan seluas-luasnya. Dan bagi mereka yang ingin bekerja di bidang pertukangan dan usaha lain yang banyak membutuhkan modal, diberi bantuan kredit ringan dari Pemerintah melalui Bank-Bank milik Pemerintah.

Di daerah Keresidenan Bengkulu, tenaga eks pejuang tidak hanya disalurkan untuk membuka hutan baru, tetapi juga meneruskan usaha-usaha yang telah ada. Pemerintah telah membeli *onderneming* dari tangan asing seperti *onderneming westkust*, *onderneming Sindang* dan Dataran yang terletak di daerah Rejang Lebong. Perusahaan-perusahaan asing yang telah dibeli oleh Pemerintah tersebut, tenaga kerjanya diambilkan dari mereka eks pejuang yang telah berjasa dalam perang gerilya mempertahankan kedaulatan negara dari serangan Belanda.

Dengan adanya demobilisasi, mereka dapat bekerja mengisi kemerdekaan untuk membangun negeri menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan dipertahankan dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan yang tiada tara.

## 2. Saran

Kisah perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat memang mengasikkan untuk di simak dan dihayati. Kini era perjuangan itu telah berlalu, yang tinggal hanya kenangan suka dan duka bagi para pelakunya dan itupun akan hilang lenyap bersama kepergian para pelakunya dari muka bumi ini. Tetapi nilai semangat juangnya tidak boleh dibiarkan berlalu. Nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanannya itu harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi penerus dalam rangka mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan kemerdekaan yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran kaum pejuang dari segala lapisan masyarakat Bengkulu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang medan pertempurannya mencakup wilayah sampai ke luar daerah Bengkulu, seperti ke daerah Lubuk Linggau dan daerah-daerah lain di Sumatera

Selatan dan sebagian daerah Sumatera Tengah, seperti Lunang, Silaut, Tapan, Inderapura, Kerinci dan Painan. Perjuangan mereka harus diketahui dan dihayati oleh generasi penerus, terutama bagi para pelajar yang nota bene sebagai pewaris perjuangan di masa mendatang. Penghayatan dan pengetahuan tentang kiprah perjuangan para gerilyawan kita di Bengkulu itu sangat penting artinya untuk pembinaan generasi muda agar tetap konsisten dengan nilai-nilai luhur para pendahulunya, sehingga kelak jika mereka tampil dalam kepemimpinan bangsa, dapat mencontoh dan meneladani para pejuang yang telah rela mengorbankan segalanya sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Generasi mendatang yang akan menerima tongkat estafet dalam segala lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus mengenal sepak terjang dan perjuangan para pahlawan. Tanpa perjuangan mereka di Bengkulu yang berani melawan tentara Belanda yang memiliki organisasi kemiliteran yang lebih baik dan perbekalan persenjataan yang lebih modern, sedangkan para pejuang, lasykar rakyat hanya bersenjatakan seadanya, seperti klewang, tombak, bambu runcing, keris dan senapan ringan seperti kecepek, granat dan dinamit. Keberanian semacam ini jarang dimiliki oleh siapapun di dunia ini.

Generasi muda sebagai generasi pewaris perjuangan, wajib menghargai dan menghayati perjuangan mereka yang telah rela berkorban. Sebagai mana pernah diucapkan oleh mantan Presiden Sukarno dalam pidato politiknya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Lebih dari itu juga dapat meneladani perjuangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik., *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1979.
- Burhan, F., *Bengkulu Dalam Sejarah*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia, 1980.
- Dalip, Achmadin, *sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984
- Dekker, Nyoman., *Sejarah Revolusi Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.
- Dwinanto, dkk., *Hari-Hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 12945*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Gotschal, Louis., *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : UI Press, 1975.
- Hatta, Moh., *Sekitar Proklamasi*, Jakarta : Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1954.
- Hawab, Arsyik dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu*, Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Ikram, M. dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Bengkulu*, Jakarta : Pusat Penelitian sejarah dan Budaza Daerah, 1980.
- Imaduddin, Iim dkk., *Masa Revolusi di Bengkulu 1945-1950, (Inventarisasi Sumber Sejarah Lisan)*, Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2002.
- Indra, Muh. Ridwan., *Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi 17 – 8 – 1945*, Jakarta : sinar Grafika, 1989.
- Inomata, Kurasawa, Aiko., *Persiapan Kemerdedakaan pada Hari Terakhir Pendudukan Jepang dalam Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1997.
- Jamil, Arifin, Z., *Perjuangan Fisik dalam Perlawanan Rakyat PKR/TKR Tahun 1945 Terhadap Jepang dan Perlawanan Terhadap Agresi Belanda Tahun 1949 di Daerah Rejang Lebong (Curup) dan Sekitarnya*, (Makalah)., Curup 7 Maret 1995.
- Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, MSI Cabang

- Sumatera Barat dan Ex. Tentara Pelajar Sumatera Tengah/Pelajar Pejuang Kemerdekaan RI, 1997.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Kem.Pen. R.I., *Sedikit Menjingkap Perdamaian Djepang*, Tanpa Penerbit, 1951.
- Lapian, AB. Dkk., *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, Jakarta : IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Malik, Adam., *Riwayat Perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Jakarta : Wijaya.
- Manaf, Nawawi, *Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, Bengkulu : Dokumen tidak diterbitkan, 1979.
- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*, Jakarta : Yayasan Idayu, 1978.
- Nur, Muh., "Metodologi dalam Ilmu Sejarah dan Pendekatan Sejarahawan", *Historia : Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 4, Vol. II (Desember 2001).
- ....., Nawawi Manaf *Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2003.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- "Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI", dalam *Hari-Hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Ranni, M.Z., *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Reid, Anthony J.S., *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1996.
- Republik Indonesia Bagian Selatan*, Djakarta : Kementerian Penerangan RI, 1954.
- Rohanah, Siti dkk., *Perjuangan Rakyat Rejang Lebong Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Tahun 1945-1949*, Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Padang, 2004.

- Salim, Peter dan Yenny Salim., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, edisi kedua, 1995.
- Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia di Sumatera 1945-1950*, Jakarta : Dinas Sejarah Angkatan Darat, 1972
- Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1950 Daerah Bengkulu*, Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bengkulu, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. P & K, 1979/1980.
- Setiyanto, Agus., *Elit Pribumi Bengkulu Perspektif Sejarah Abad ke-19*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- ....., *Orang-Orang Besar Bengkulu*, Yogyakarta : Ombak, 2006.
- ....., (ed.), *Bengkulu Riwayatmu Dulu*, Palembang : Balai Arkeologi Palembang, 2009.
- Sidik, abdullah, dkk., *Sejarah Bengkulu*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Simatupang, *Laporan dari Banaran*, Djakarta : PT Pembangunan, 1961.
- Soeroto, *Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad ke Abad*, Djakarta : Djambatan, 1966.
- Sutjianingsih, Sri., *Perekonomian Indonesia dalam Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik Antara Tahun 1945-1949)*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Suherly, Tanu, *Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta : Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Tirtoprodjo, Soetanto., *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Djakarta : PT Pembangunan, 1970.
- Zubir, Zusneli dkk., *Muko-Muko Dalam Gejolak Revolusi Fisik (1945-1950) : Suatu Tinjauan Sejarah Lokal di Bengkulu*, Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Padang, 2004.

## BAB II

### PASAR KEPAHANG DI PROVINSI BENGKULU : Dari Kalangan ke Pasar Induk (1958 – 2009)

Efrianto A<sup>1</sup>

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang Masalah

Pasar Kepahiang merupakan salah satu pusat ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Sebelum tahun 2003 pasar Kepahiang hanya sebuah pasar di ibukota Kecamatan Kepahiang. Namun pada tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.<sup>2</sup> Mulai saat itulah status Pasar Kepahiang mengalami perubahan dari pasar kecamatan menjadi pasar ibukota kabupaten.

Perubahan status pasar dengan sendirinya berdampak terhadap dinamika kehidupan ekonomi yang berlangsung dalam pasar. Sebelum menjadi ibukota kabupaten jumlah pedagang, jenis komoditi yang diperdagangkan, intensitas ekonomi di pasar Kepahiang masih terbatas sebab keberadaan pasar hanya untuk masyarakat di Kecamatan Kepahiang. Ketika pasar berubah status menjadi pasar ibukota kabupaten dengan sendirinya Pasar Kepahiang mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari bertambahnya areal pasar dan bertambahnya orang-orang yang terlibat dalam sektor ekonomi di Pasar Kepahiang.

Perubahan status pasar dari pasar kecamatan menjadi pasar kabupaten telah merubah bentuk dan fasilitas yang dimiliki oleh pasar Kepahiang. Bahkan pada tahun 2009 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melakukan perbaikan terhadap bangunan di pasar Kepahiang.<sup>3</sup> Saat ini pasar telah bertambah luas dan dilengkapi oleh *minimarket* dan *swalaya*, walaupun dalam skala

---

<sup>1</sup> Peneliti Muda pada BPSNT Padang

<sup>2</sup> Lembaran Beritan Negara tentang Undang-undang No.39 Tahun 2003 yang menjelaskan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kepahiang hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong.

<sup>3</sup> Depkop "Revitalisasi Pasar Tradisional dan Peningkatan Peran Koppas" Artikel diambil dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) pada tanggal 4 Juli 2011

kecil. Namun sebagian besar orang yang terlibat di pasar adalah pekerja sektor ekonomi informal.

Perubahan pasar ternyata berdampak terhadap aktifitas dan jumlah orang yang terlibat di dalam Pasar Kepahiang. Dahulu, orang yang terlibat sebagai pedagang di pasar Kepahiang didominasi oleh satu etnis yaitu orang Minang, namun saat ini pedagang telah terdiri dari berbagai etnis yang terdapat di Kepahiang. Di samping itu unit usaha baru banyak bermunculan di sekitar pasar tradisional, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak, tukang parkir dan sektor informal lainnya.

Dewasa ini pasar tradisional terus mengalami “*serbuan*” dari pasar modern berdasarkan laporan dari AC Nielsen menyebutkan bahwa semenjak tahun 2000 s.d 2004 jumlah pasar tradisional cenderung menurun. Pada tahun 2000 jumlah pasar tradisional 78,3 %, angka tersebut menurun menjadi 70,5 % pada tahun 2004. Data tersebut menjelaskan bagaimana kondisi pasar tradisional terus mengalami penurunan sebanyak 2 % pertahunnya.<sup>4</sup> Kondisi sebaliknya terjadi pada supermarket dan minimarket yang cenderung meningkat, bahkan saat ini supermarket dan minimarket telah masuk ke wilayah pedesaan.

Pasar tradisional sesungguhnya dapat ditingkatkan daya saingnya, misalnya dengan sedikit sentuhan gaya arsitektur tradisional, promosi barang-barang souvenir, keramah-tamahan pramuniaga, kekhasan dialek setempat, kandungan komponen lokal, panggung kesenian lokal, kearifan lokal, dan sebagainya. Satu hal yang jelas, pembinaan pasar tradisional tidak mungkin berhasil bila dilakukan sendiri, harus dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif dengan pembinaan pasar modern, dengan pembinaan sektor lainnya khususnya kebudayaan dan kepariwisataan.

Aktifitas ekonomi yang berlangsung di Pasar Kepahiang dan bentuk bangunan yang dimiliki pasar Kepahiang menyebabkan pasar ini termasuk dalam kelompok pasar tradisional,<sup>5</sup> sebab transaksi jual beli berlangsung secara langsung dengan bertemunya pedagang dan pembeli. Antara keduanya terlibat saling tawar menawar harga, transaksi

---

<sup>4</sup> H.M. Djumantri, Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol I, no 6 (Desember), hal 237-254

<sup>5</sup> Berdasarkan bentuk bangunan Pasar di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang memiliki bangunan relative bagus dan rapi. Pada pasar ini juga tidak terdapat aktifitas tawar menawar antara pembeli dan penjual. Baca tulisan H.M Djumantri MSI “ Pasar Tradisional Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan” dan Rahmat Widiyanto (2008) “Indonesia Culture” Jakarta : Elex Media Komputindo, hlm 9

berlangsung setelah ke dua pihak sepakat tentang harga. Sebagaimana lazimnya pasar tradisional, bangunan Pasar Kepahiang terdiri dari los-los yang terbuka dan pengelompokan orang berdasarkan jenis dagangan yang diperjualbelikan. Kondisi pasar cenderung tidak terawat dan kotor, namun sebagai sebuah pranata sosial kedudukan Pasar Kepahiang sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai sebuah pasar tradisional yang telah berdiri lama di Kabupaten Kepahiang. Sebagai sebuah pasar tradisional, Pasar Kepahiang tentu saja memiliki dinamika tersendiri yang menarik untuk dikaji dan dilihat. Faktor-faktor utama yang dijadikan sasaran studi adalah mengkaji bagaimana perkembangan Pasar Kepahiang, identifikasi pedagang dan pengunjung dan komoditas barang yang diperdagangkan. Kajian ini perlu dilaksanakan untuk mencari model dan solusi untuk menjadikan Pasar Tradisional Kepahiang menjadi sebuah objek wisata di Propinsi Bengkulu. Di samping itu penelitian ini diharapkan bisa mencari solusi bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat yang terlibat di Pasar Kepahiang.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas tulisan ini ingin melihat bagaimana perkembangan di Pasar Kepahiang. Fokus kajian untuk melihat perkembangan pasar kepahiang, indetifikasi pedagang dan komoditi barang yang diperdagangkan. Untuk lebih jelasnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

- a. Bagaimanakah Perkembangan Pasar Kepahiang ?
- b. Siapakah yang berdagang di Pasar Kepahiang ?
- c. Komoditi apakah yang diperdagangkan di Pasar Kepahiang ?

Batasan temporal dalam penelitian ini, diawali dari tahun 1958, awal pembangunan los dan kios di pasar Kepahiang oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>6</sup> Setelah kota Kepahiang hancur akibat agresi militer ke 2 pada tahun 1948. Tahun 2009 dijadikan batasan akhir dari penelitian untuk melihat dan memperbandingkan dinamika kehidupan para pekerja di pasar Kepahiang saat menjadi ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Batas spasial penelitian ini adalah Pasar Kepahiang di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sayuti pada tanggal 23 April 2009 di Koto Panjang Kota Padang

### 3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan perkembangan Pasar Kepahiang di masa bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong maupun ketika telah menjadi Kabupaten sendiri. Di samping itu juga mengungkapkan aktifitas yang berlangsung di Pasar Kepahiang pada masa periode tersebut. Tujuan lainnya adalah menjelaskan perkembangan Pasar Kepahiang, komoditi, pedagang di Pasar Kepahiang.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dari sebagian masyarakat tentang aktifitas di Pasar Kepahiang dan persoalan yang menghambat kemajuan pasar Kepahiang. Disamping itu penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam memahami kondisi pasar Kepahiang, serta mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kehidupan orang yang terlibat di pasar Kepahiang dan mengatasi persoalan yang menghambat berkembangnya Pasar Kepahiang.

### 4. Kerangka Analisis

Pasar Kepahiang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Kepahiang. Kondisi ini muncul karena letak pasar yang berada di ibukota kabupaten. Berdasarkan definisi pasar adalah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli sehingga terjadi transaksi antara keduanya.<sup>7</sup> Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Pasar mempunyai lima fungsi utama. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai dan Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang efisien. Di samping itu pasar juga berfungsi untuk mendistribusikan barang dan menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Pasar juga bertugas untuk mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang.

Pasar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pasar nyata, pasar abstrak. Pasar nyata adalah antara pembeli dan penjual bertemu secara langsung dan barang yang diperdagangkan jelas wujudnya. Sedangkan pasar abstrak antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan juga tidak wujudnya, seperti pasar saham, pasar modal dan pasar online.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Budi Soetedjo dkk (2003) "ICRM Membina Relasi dengan Pelanggan.Com." Yogyakarta: Andi, hlm 6

<sup>8</sup> Sudarman, A. 1989. Teori Ekonomi Mikro. BFE. Yogyakarta. Hlm 27

Pasar dilihat dari bentuk transaksi dan model bangunannya dapat dibagi menjadi pasar tradisional dan modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Pasar modern atau disebut juga gerai modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta. Arti modern disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga profesional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Beberapa potensi dan ciri pasar tradisional, yaitu: Kemampuan pasar tradisional dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya. Berfungsi sebagai *supplier* untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Pasar tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen. Potensi pasar akan semakin penting karena *market turn over* yang cukup cepat dengan sistem pembayaran tunai.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pasar Kepahiang tergolong sebagai pasar nyata dan masuk dalam kelompok pasar tradisional, karena antara pembeli dan penjual bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan jelas. Sebuah kelaziman dalam kehidupan masyarakat di pasar tradisional bermunculan sektor ekonomi informal. Ekonomi informal merupakan sebuah pilihan yang banyak diambil oleh masyarakat ketika laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja.

---

<sup>9</sup> Fitri, Novrita Andriana. 1999. "Analisis Sikap Konsumen Terhadap Atribut-Atribut Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol I, no 3 (Desember), hal 237-254



Pasar tradisional umumnya diisi oleh para pekerja sektor ekonomi informal berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sektor ekonomi informal termasuk dalam unit usaha kecil. Dalam UU tersebut dijelaskan yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum. sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.<sup>10</sup>

Ada kesepakatan, bahwa ciri-ciri sektor ekonomi informal terdiri dari 11 ciri pokok yaitu : Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor. Teknologi yang digunakan bersifat primitif. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota Berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.<sup>11</sup>

Berdasarkan sebelas (11) ciri di atas Pasar Kepahiang memenuhi segala aspek tersebut. Kondisi semakin memperjelas bahwa Pasar Kepahiang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Kepahiang. Sebagai pasar yang berada di ibukota kabupaten maka kedudukan pasar Kepahiang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat di Kepahiang.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diambil [http://hukum.unsrat.ac.id / uu / uu\\_9\\_1995.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf) pada hari jum'at 17 Juni 2011.

<sup>11</sup> *Ibid*

## 5. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Sesuai dengan metode penelitian sejarah, tulisan ini dimulai dengan tahap pertama yaitu pengumpulan data yang disebut heuristik. Tahap berikutnya adalah melakukan kritik terhadap data-data yang telah diperoleh baik kritik ekstern maupun intern, guna menjamin otensitas dan kredibilitas dari data. Setelah melalui tahap kritik, maka dilanjutkan dengan interpretasi dan penulisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka akan dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Kepahiang, Kantor Dinas Pasar Kabupaten Kepahiang dan mencari data-data primer seperti, arsip-arsip dan dokumen yang menyangkut perkembangan Pasar Kepahiang. Di samping itu sumber-sumber juga diambil dari dalam surat kabar lokal maupun nasional maupun website, serta laporan penelitian yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga lain. Dalam penelitian pustaka juga dicari sumber-sumber sekunder yang bisa menunjang penelitian ini.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan jalan wawancara, yang lazim dalam kajian sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer menurut Nugroho Notosusanto adalah sejarah yang jarak kejadiannya relatif dekat dengan masa sekarang, sehingga para pelaku dalam suatu peristiwa banyak yang masih hidup dan bisa diwawancarai.<sup>12</sup> Wawancara ini akan lebih difokuskan kepada pihak yang terkait dengan dinamika yang terjadi di Pasar Kepahiang. Terutama dengan masyarakat yang terlibat baik sebagai produsen, pedagang dan konsumen yang terlibat di Pasar Kepahiang

## 6. Gambaran Umum Kabupaten Kepahiang

### a. Topografis

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupaten yang berdiri di Propinsi Bengkulu. Kawasan ini berdiri semenjak tahun 2003, dengan keluarnya Undang-undang RI No. 39 yang menyatakan bahwa telah disetujui pemekaran Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukota di Curup, Kabupaten Lebong dengan Ibukota Muara Aman dan Kabupaten Kepahiang dengan Ibukota Kepahiang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nugroho Notosusanto, **Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer**, (Jakarta: Inti Idayu Press.1984), hal.6-8.

<sup>13</sup> Undang-undang No 39 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di ambil dari [www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl22131/parent/17875](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl22131/parent/17875)

Kabupaten Kepahiang secara geografis terletak pada posisi 101.055. 19 sampai dengan 103.001.29 bujur timur (BT) dan 020.43. 07 sampai dengan 030.46.48 Lintang Selatan (LS). Kondisi ini menyebabkan tekstur tanah yang dimiliki Kabupaten Kepahiang menjadi beragam, tanah dengan tekstur halus memiliki luas 35.604 Ha atau 53.54%. bertekstur sedang seluas 22.639 Ha atau 34.03 % dan bertekstur kasar seluas 8.266 atau 12.43 %.<sup>14</sup> Sebagian besar lahan di kabupaten Kepahiang adalah Kompleks padsolik coklat, padsol dan Lotosol dan berstruktur sedang serta 44,47 % wilayahnya masih hutan, waduk rawa atau danau. Di samping itu kondisi alam Kepahiang merupakan kawasan perbukitan yang berada pada ketinggian 500 -1000 M diatas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Kepahiang merupakan kawasan berhawa sejuk dan sentral pertanian di Propinsi Bengkulu.<sup>15</sup>

Secara administratif, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong dengan rincian sebagai berikut. Pada bagian Utara Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan Kecamatan Curap, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang termasuk dalam Kabupaten Rejang Lebong. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penunjang Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.<sup>16</sup>

Kabupaten Kepahiang pada awalnya terdiri dari 4 kecamatan dengan luas wilayah 66.480 Ha. Kecamatan Bermani Ilir dengan luas wilayah 30.896 Ha atau 46 % dari luas kabupaten merupakan kecamatan terluas. Kecamatan Kepahiang dengan luas wilayah 10.176 Ha atau 15 % merupakan kecamatan terkecil. sedangkan dua kecamatan lainnya adalah Kecamatan Tebat Karai dengan luas wilayah 13.680 Ha atau 21 % dan Kecamatan Ujan Mas dengan luas wilayah 11.728 Ha atau 18 % dari luas Kabupaten Kepahiang.<sup>17</sup> Untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Kepahiang, maka pemerintah melakukan pemekaran terhadap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang dari 4 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan yakni Kecamatan Muara

---

<sup>14</sup> BPS "Monografi Kabupaten Kepahiang" Beppeda : Kabupaten Kepahiang

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> BPS " Kabupaten Kepahiang dalam Angka tahun 2006" Kepahiang : Kerjasama BPS Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang

<sup>17</sup> ibid

Kemumu, Bermani Ilir, Seberang Musi, Tabat Karai, Kepahiang, Kabawetan, Ujan Mas, dan Marigi.

Pemekaran kecamatan telah merubah memberikan perubahan terhadap komposisi wilayah dan jumlah penduduk. Kecamatan Bermani Ilir tetap menjadi kecamatan terluas sama seperti sebelum pemekaran, walaupun luas berkurang dari 30.896 Ha menjadi 163.91 KM. Sedangkan Kecamatan Marigi menjadi kecamatan dengan luas wilayah terkecil 22.18 KM menggantikan posisi Kecamatan Kepahiang yang selama ini menjadi kecamatan terkecil.

## **b. Penduduk**

Penduduk yang mendiami Kepahiang merupakan gabungan antara penduduk asli dan masyarakat pendatang. Penduduk asli Kepahiang adalah orang Rejang dan Melayu Bengkulu sedangkan masyarakat pendatang umumnya adalah orang Minang, Jawa, Sunda dan suku lainnya. Komposisi penduduk asli dan pendatang yang hampir seimbang menyebabkan penyebaran penduduk asli dan pendatang terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. Mayoritas penduduk asli banyak mendiami Kecamatan Ujan Mas, Bermani Ilir, Seberang Musi dan Tebat Kerai. Sedangkan masyarakat pendatang banyak bermukim di Kecamatan Kepahiang, Kabawetan, Muara Kemumu dan Marigi. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah penduduk asli dan pendatang di Kepahiang relatif seimbang. Untuk menjaga hubungan masyarakat pendatang dan penduduk asli maka dalam hubungan masyarakat Kepahiang unsur etnis dan suku bangsa tidak terlalu menonjol.<sup>18</sup>

Kabupaten Kepahiang dalam angka tahun 2010 memperlihatkan bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Kepahiang dari tahun 2007 sampai dengan 2009 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kepahiang 116.882 Jiwa. Pada tahun 2008, berjumlah 117.916 Jiwa sedangkan tahun 2009 berjumlah 118.910 Jiwa.

Penduduk terbanyak di Kepahiang berada di Kecamatan Kepahiang dengan jumlah penduduk 30.083 jiwa. Hal ini sejalan dengan keberadaannya kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Kepahiang. Di masa lalu Kecamatan Kepahiang merupakan pusat aktifitas masyarakat di Kepahiang dan kawasan ini berada di pinggir jalan lintas yang menghubungkan kabupaten dengan ibukota Provinsi

---

<sup>18</sup> BPS " *Monografi Kabupaten Kepahiang tahun 2005*" Kepahiang : Kerjasama BPS Kabupaten Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang

Bengkulu sehingga banyak penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Sedangkan Kecamatan Marigi dengan jumlah penduduk 9279 merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Kepahiang. Kondisi ini disebabkan karena kecamatan ini baru terbentuk pada tahun 2007 dan terletak di kawasan jauh dari pusat pemerintah. Setelah pemekaran, komposisi penduduk Kabupaten Kepahiang terbanyak berada dalam kelompok umur 20 tahun ke bawah dengan jumlah penduduk 57.815 Jiwa. Hal itu menyebabkan bahwa sebagai besar penduduk Kepahiang merupakan penduduk yang masih duduk di bangku sekolah atau menjadikan orang tua sebagai sumber kehidupan mereka. Kelompok ke dua terbanyak di Kabupaten Kepahiang adalah masyarakat dengan kelompok umur 20 – 44 tahun. kelompok 20 -44 tahun inilah yang menjalankan aktifitas ekonomi dan menjadikan pasar sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagai konsumen, produsen dan pedagang.

### **c. Mata Pencarian**

Penduduk yang mendiami Kabupaten Kepahiang umumnya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Laporan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang menyebutkan bahwa 42.235,05 Ha dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang telah dijadikan oleh penduduk sebagai arel perkebunan rakyat. Dari luas lahan tersebut 24.017 Ha dijadikan lahan perkebunan kopi, 11.859,7 Ha ditanam kakao dan 4.134,25 Ha lada. Sedangkan sisinya dijadikan penduduk sebagai lahan perkebunan kemiri, kelapa, aren, kapuk dan lain-lain. Laporan tersebut menjelaskan bahwa produksi terbesar dari masyarakat Kabupaten Kepahiang adalah kopi, masa panen kopi yang terjadi pada bulan September sampai Desember merupakan hari yang dinanti oleh sebagian besar masyarakat Kepahiang terutama bagi petani dan pedagang di pasar Kepahiang.<sup>19</sup>

Padi dan Jagung di samping hasil pertanian lainnya merupakan hasil pertanian terbesar di Kabupaten Kepahiang. Padi yang terdapat di Kepahiang dihasilkan melalui sawah dan ladang, laporan dinas pertanian menyebutkan bahwa luas areal padi sawah dan ladang di Kabupaten Kepahiang adalah 9.667 Ha. Dengan komposisi padi sawah seluas 8.965 Ha dan padi ladang seluas 702 Ha. Hasil yang bisa diperoleh dari padi sawah dan ladang selama tahun 2008 adalah 37.239 Ton.

---

<sup>19</sup> BPS “ Indikator Ekonomi Kabupaten Kepahiang tahun 2006” Kepahiang : Kerjasama BPS Kabupaten Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang

Sementara untuk usaha palawija seperti jagung dalam satu tahun menghasilkan sebanyak 6145 ton dengan luas lahan 1.946 Ha.<sup>20</sup>

Topogarfis dan tekstur tanah di Kabupaten Kepahiang menyebabkan kawasan ini cocok dijadikan sebagai sentral buah-buahan dan sayuran. Seluruh kebutuhan masyarakat tentang sayur mayur telah dibudidayakan oleh masyarakat Kepahiang seperti cabe, bawang, buncis dan lain-lain. Kecamatan Kabawetan, Marigi dan Ujan Mas dikenal sebagai daerah penghasil sayuran di Kabupaten Kepahiang. Sedangkan buah-buah ditemukan hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Kepahiang.<sup>21</sup>

Usaha lainnya yang dijadikan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang adalah usaha perternakan, perikanan, perdagangan dan pegawai negeri sipil. Sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang menyebutkan bahwa usaha perternakan yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Kepahiang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini yang menyebabkan pada tahun 2008 jumlah daging domba yang dihasilkan 11, 2 Ton, daging Sapi sebanyak 43.11 ton. Sedangkan jumlah kulit domba dan lembu sebanyak 1120 lembar.<sup>22</sup>

Perikanan merupakan salah satu produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang, terutama ikan yang dibudidayakan. Budidaya kolam air tenang memiliki lahan seluas 247 Ha, mina padi / sawah seluas 201,4 Ha. Dengan memanfaatkan sungai-sungai kecil di Kabupaten Kepahiang maka usaha budidaya ikan air deras bermunculan di sekitar kawasan tersebut, seperti keramba, jala apung dan lain-lain. Untuk mendukung usaha tersebut maka pemerintah telah mendirikan 44 buah tempat pembibitan ikan di Kabupaten Kepahiang. Sebagian kecil dari penduduk Kabupaten Kepahiang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2009, jumlah PNS 1333 dari total penduduk yang mendiami Kabupaten Kepahiang.<sup>23</sup>

Produksi pekebunan, pertanian, perternakan dan perikanan yang dihasilkan oleh penduduk di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepahiang dibawa ke pasar-pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Kepahiang. Konsentrasi terbesar transaksi antara petani, pedagang dan konsumen terjadi di Pasar Kepahiang. Di sinilah letak

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

penting peranan Pasar Kepahiang dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.

#### **d. Sosial Budaya**

##### **Kepahiang dari Kecamatan menjadi Kabupaten**

Membicarakan dinamika dan perkembangan Pasar Kepahiang aspek yang tidak bisa dipisahkan adalah perkembangan dari Kepahiang sendiri. Pada masa penjajahan Belanda Kepahiang dikenal sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 hingga 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Mulai pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan, yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI), semuanya berpusat di Kepahiang.<sup>24</sup>

Pada masa ini kedudukan pasar kepahiang sangatlah penting sebagai pusat aktifitas segala lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Apa lagi letak pasar Kepahiang yang menjadi penghubungan antara Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau dan Lahat di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menyebabkan kedudukan pasar Kepahiang sangat penting sampai dengan berakhirnya kedudukan Kepahiang sebagai Ibukota Kabupaten Rejang Lebong.

Perubahan besar terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kepahiang karena pada akhir tahun 1948, menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara dan jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara kolonial Belanda yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.

Selama masa agresi militer Belanda yang ke II, seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan. Se tahun kemudian, ketika terjadi penyerahan kedaulatan

---

<sup>24</sup> “ Sejarah Ringkas Kabupaten Kepahiang (*catatan ringkas*) ” Kepahiang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang

dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang disebut *kembali ke kota*, terjadilah keharuan yang sulit dibendung, sebab seluruh fasilitas pemerintahan di Kepahiang telah dihancurkan oleh pejuang kemerdekaan. Namun, semangat mereka pantang surut. Dengan sisa-sisa kekuatan, serta semangat yang membaja, seluruh aparat pemerintah daerah terpaksa menumpang ke kota Curup, karena di sini masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan (kini tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup).<sup>25</sup>

Keputusan untuk membumihanguskan seluruh fasilitas yang dimiliki di Kepahiang, merupakan kejadian yang paling disesalkan oleh masyarakat Kepahiang. Ketika Belanda meninggalkan Kabupaten Rejang Lebong, maka pusat pemerintah harus dipindahkan sementara ke Curup, karena fasilitas di Kepahiang telah hancur. Terjadi perubahan kebijakan oleh pemerintah, Curup yang pada awalnya dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara karena hancurnya fasilitas pemerintahan di Kepahiang. Pada tahun 1956, kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong. Sejak itu pula, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut kejayaan Kepahiang telah surut. Sebab, dengan penetapan Curup sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah kabupaten Rejang Lebong.

Peranan dan kedudukan Pasar Kepahiang pada fase ini hanyalah sebuah pasar kecamatan yang buka pada hari pasar dan aktifitas ekonomi masyarakat di Kepahiang lebih banyak mengandalkan Curup dan Kota Bengkulu yang saat itu menjadi sentral ekonomi. Kondisi ini jelas tidak diharapkan oleh masyarakat Kepahiang lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota provinsi dan kota administratif. Sayangnya, perjuangan mulia tersebut kandas di tengah jalan lantaran pemerintah pusat tak merespons keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

Ketika era reformasi bergulir pada 1998, gaungnya pun sempat menggema ke bumi Kepahiang. Oleh masyarakat Kepahiang, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Situasi kian terbuka lebar, setelah pemerintah dan DPR RI menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga lazim disebut sebagai undang-undang tentang otonomi daerah. Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid



Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang, baik yang berdomisili di Kepahiang sendiri maupun yang berada di luar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut, maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran kabupaten.<sup>27</sup>

Perjuangan untuk memekarkan Kepahiang menjadi kabupaten sendiri tak semulus yang diharapkan. Meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada era reformasi, tapi kabupaten Rejang Lebong tidak serta-merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) justru keberatan melepas Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerjasama serta diplomasi yang intensif, akhirnya kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan.

Pada 7 Januari 2004, Kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh Jenderal TNI (purn) Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri RI. Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di provinsi Bengkulu. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Kepahiang terdiri dari Kecamatan Bermani Ilir, Kepahiang, Ujan Mas dan Tabat Karai.<sup>28</sup> Untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah yang baru dimekarkan maka pemerintah menunjuk Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M. sebagai penjabat kepala daerah kabupaten Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-8 Tahun 2004. Pelantikannya sendiri dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004.<sup>29</sup>

Perubahan status dari Kepahiang dari kecamatan menjadi kabupaten mendatangkan dampak yang luar biasa bagi aktifitas ekonomi di Pasar Kepahiang. Sebab perubahan status memberikan dampak

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang ketua PPKK di Kepahiang tanggal 10 Agustus 2011

<sup>28</sup> Undang-undang No 39 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di ambil dari [www.hukumonline.com/pusatdata/download/f122131/parent/17875](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/f122131/parent/17875)

<sup>29</sup> Ibid

kepada peranan dan fungsi pasar Kepahiang. Walaupun harus diakui semenjak tahun 1990-an hari pasar di Kepahiang telah berkembang menjadi tiap hari, namun aktifitas ekonomi masih terbatas. Setelah menjadi pasar ibukota kabupaten aktifitas yang berlangsung di Pasar Kepahiang menjadi lebih ramai. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar Kepahiang disetiap periodenisasi akan dijelaskan pada bab berikutnya.

### Asal Usul Penduduk di Kepahiang

Penduduk Kepahiang dapat dikelompok menjadi dua kelompok yaitu penduduk asli yang didominasi oleh orang Rejang dan Malayu Bengkulu sedangkan masyarakat pendatang di dominasi oleh orang Minang, Jawa, Sunda. Menarik untuk diketahui bagaimana migrasi dan kedatangan suku bangsa tersebut sampai ke Kepahiang. Suku Rejang memiliki wilayah terluas di Propinsi Bengkulu hal ini terlihat dari sebaran dari suku Rejang yang ditemukan pada empat kabupaten di Propinsi Bengkulu.<sup>30</sup>

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di Pulau Sumatera selain suku bangsa Melayu. Sejarah asal-usul Suku Rejang yang sebenarnya sudah sangat tidak memungkinkan diriwayatkan secara benar. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mengakibatkan sejarah asal-usul Rejang yang terhapus dan hilang ditelan ketidaktahuan generasi masa lalu sehingga tidak bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Meskipun demikian, masih ada satu peninggalan yang masih diwariskan secara nyata dan masih ada hingga sekarang. Warisan tersebut adalah bahasa Rejang, sebuah bahasa yang unik yang belum punah. Walaupun bukti-bukti arkeologi belum ada yang membuktikan tentang eksistensi Suku Rejang, secara fakta, bahasa Rejang dapat dijadikan pedoman menelusuri sejarah Rejang dan kebesaran Suku Rejang di masa lampau.<sup>31</sup>

Suku Rejang mendiami Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbesar di provinsi Bengkulu, namun secara sumber daya manusia, agaknya suku ini kurang begitu adaptif terhadap perkembangan di luar daerah. Ini dikarenakan kultur

---

<sup>30</sup> Turita Indah Setyani “*Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa*” Makalah yang disajikan pada: Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia Di Yogyakarta Sabtu-Minggu, 8-9 Agustus 2009 Oleh: Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

<sup>31</sup> Richard McGinn “*Asal Bahasa Rejang*” Ohio University

masyarakat Rejang yang sulit untuk menerima pendapat di luar dari pendapat kelaziman menurut pendapat mereka, dan masih rendahnya tingkat pendidikan.

Hal ini menggambarkan bahwa pada umumnya sifat dan watak dari suku Rejang yang masih primitif. Mayoritas Sumber Daya Manusia suku Rejang masih relatif lamban dalam berkembang. Apalagi sifat iri dan dengki yang menjadi tradisi dan ciri khas dari sifat primitif itu sendiri mengakibatkan proses kemajuan semakin terhambat. Pada sekarang ini, beberapa putra-putri suku Rejang telah menempuh pendidikan tinggi seperti ilmu pendidikan keguruan, ilmu kesehatan, ilmu hukum, ilmu ekonomi, sastra, dan lain lain. Banyak yang telah menekuni profesi sebagai pegawai negeri, pejabat teras, dokter, pegawai swasta, pengacara, polisi, dan berbagai profesi yang lebih tinggi statusnya ketimbang petani ataupun sekadar tukang ojek.

Suku Melayu Bengkulu merupakan suku yang dikelompokkan sebagai penduduk asli di Kepahiang. Sulit untuk memastikan kapan orang-orang Bengkulu telah mendiami kawasan ini. Namun diperkirakan bahwa orang-orang Melayu Bengkulu telah hadir di Kepahiang seiring berkembangnya kawasan ini sebagai pusat pemerintahan di masa kolonial baik masa Inggris maupun Belanda. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa Bengkulu pernah menjadi pusat kekuasaan tentara Inggris, maka untuk membangun kekuasaannya Inggris akan membawa orang-orang Bengkulu untuk di tempatkan di daerah kekuasaannya.

Kelompok penduduk pendatang terbanyak di Kabupaten Kepahiang adalah Orang Jawa. Bahkan untuk jumlah populasi penduduk etnis Jawa merupakan etnik dengan populasi terbanyak ke-dua di Kabupaten Kepahiang. Membicarakan tentang bagaimana proses kedatangan orang Jawa ke Kepahiang sama dengan menceritakan program kolonisasi dan transmigrasi yang dijalankan mulai masa kolonial Belanda sampai saat ini. Walaupun Sebelum pemerintah Belanda membuka daerah kolonisasi, orang dari Jawa telah ada, orang-orang Jawa tersebut membuka pemukiman di sekitar perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Mereka menetap atas kemauan sendiri dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Beberapa kampung Jawa yang telah terbentuk, seperti di sekitar perkebunan Kepahiang, terdapat Kampung Pensiunan, Kampung Jawa di dekat Perkebunan Soeban Ajam, dan Kampung Jawa di Lebong Donok.

Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk menyelenggarakan percobaan kolonisasi di Bengkulu, khususnya di daerah Rejang-Lebong. Pertimbangan lain, di Lebong Donok tersedia lahan hutan belukar muda bekas ladang penduduk asli seluas 3.000

bau. Persiapan pembukaan kolonisasi ini dimulai dengan perundingan antara *Aspirant-contoleur* Lebong dengan kepala marga di Rejang Lebong mengenai rencana pembukaan kolonisasi orang dari Jawa di Rejang-Lebong. Akan tetapi tidak semua kepala marga dan penduduknya bersedia menerima kedatangan penduduk dari luar dan memiliki pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh orang dari Jawa sendiri. Para kepala marga dan penduduk setempat hanya dapat memberikan lahan berpengairan dan memperbolehkan penduduk pendatang hidup sesuai dengan kebiasaan. Para kepala marga tidak mau kedudukannya disejajarkan dengan pimpinan tertinggi orang dari Jawa. Mereka meminta agar desa migran yang akan dibentuk bergabung dalam pemerintahan marga setempat. Hal itu menyebabkan rencana kolonisasi terhambat.<sup>32</sup>

Kelompok peserta kolonisasi pertama ini sampai di Bengkulu pada bulan Maret 1908. Mereka adalah orang Sunda yang berasal dari daerah Bogor, Sukabumi dan Tasikmaya dan berjumlah 122 orang, terdiri dari 66 orang dewasa dan 56 anak-anak.<sup>33</sup> Dari Bengkulu mereka harus berjalan kaki selama 3 hari menuju lokasi kolonisasi di Kepahiang yang jaraknya 60 km. Selama perjalanan mereka mendapat jatah makan dan bahan makanan mereka diangkut dengan gerobak. Pada malam hari mereka diinapkan di rumah-rumah penduduk orang Melayu. Baru setelah 3 hari perjalanan mereka sampai di Kepahiang. Disini mereka ditempatkan di bekas tangsi militer yang atapnya sudah bocor dan bila malam hari tiba angin masuk melalui sela-sela dinding bambu yang sudah rusak. Hal diatas merupakan sekelumit bagaimana kedatangan orang Jawa pada masa kolonisasi.

Fase kedatangan orang Jawa selanjutnya kembali datang ketika pemerintah menjalankan program transmigrasi. Populasi orang Jawa di Kepahiang semakin bertambah, bahkan saat ini banyak ditemukan desa dan kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dihuni oleh mayoritas orang Jawa. Berapa jumlah pasti orang Jawa di Kabupaten Kepahiang sangat sulit untuk ditentukan sebab data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS tidak ada yang berdasarkan marga atau suku.

Kelompok pendatang ke dua terbanyak di Kabupaten Kepahiang orang Minang / Minangkabau. Kapan orang minang pertama kali datang ke Kepahiang sulit untuk menentukannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sesepuh masyarakat Minang di Kabupaten Kepahiang di dapat informasi bahwa beliau merupakan

---

<sup>32</sup> Lindayanti Kuli Kontrak Menjadi Penduduk Bengkulu : Sejarah Bengkulu 1908-1941 diambil dari [adimarhaen.multiply.com](http://adimarhaen.multiply.com)

<sup>33</sup> *Ibid*

generasi ke tiga yang lahir di Kepahiang. Sebelum neneknya datang ke Kepahiang, orang minang telah menghuni kawasan ini.

Orang Minang merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang dikenal memiliki tradisi *merantau* yang merupakan salah satu penyebab orang Minang banyak ditemukan dikawasan manapun di Indonesia, bahkan dunia. Rantau secara tradisional adalah wilayah ekspansi, daerah perluasan atau daerah taklukan. Namun perkembangannya belakangan, konsep rantau dilihat sebagai sesuatu yang menjanjikan harapan untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi dan bukan dalam konteks politik. Berdasarkan konsep tersebut, merantau adalah untuk pengembangan diri dan mencapai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Tujuan merantau sering dikaitkan dengan tiga hal: mencari harta (berdagang/menjadi saudagar), mencari ilmu (belajar), atau mencari pangkat (pekerjaan/jabatan).

Tradisi merantau orang Minang terbangun dari budaya yang dinamis, egaliter, mandiri dan berjiwa merdeka. Ditambah kemampuan bersilat lidah (berkomunikasi) sebagai salah satu ciri khas mereka yang membuatnya mudah beradaptasi dengan suku bangsa mana saja. Banyak hasil studi para sarjana asing maupun ilmuwan nasional menunjukkan bahwa budaya merantau orang Minang sudah muncul dan berkembang sejak berabad-abad silam. Merantau bisa dikelompokkan sebagai sebuah pola migrasi (perpindahan penduduk) secara sukarela, atas kemauan sendiri, maka merantau orang Minang berbeda dengan, katakanlah, merantau orang Jawa yang melalui proses transmigrasi –diprogramkan dan dibiayai pemerintah. Orang Minang merantau dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. Mereka melihat proses ini semacam penjelajahan, proses hijrah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Sepanjang sejarahnya, orang Minang di perantauan tidak pernah terlibat konflik dengan masyarakat di manapun mereka berada. Ini karena budaya dan perilaku hidup mereka yang terbuka, tidak eksklusif, dan hidup membaur dengan masyarakat setempat. Di mana pun rantainya, orang Minang tidak pernah membuat “kampung”. Tidak ditemukan ada Kampung Minang di kota-kota di mana perantau Minang jumlahnya cukup banyak.

Di samping orang Jawa dan Minang, etnis Batak, Aceh dan Cina juga ditemukan di Kabupaten Kepahiang. Namun populasi mereka masih sedikit. Proses kedatangan mereka ke Kepahiang berkait erat dengan tumbuhnya Kepahiang sebagai sebuah kota perdagangan. Dalam konteks Pasar Kepahiang, hampir seluruh etnis yang terdapat di Kepahiang terlibat dalam usaha perdagangan di kawasan pasar baik sebagai konsumen, produsen dan pedagang.

## B. PASAR TRADISIONAL KEPAHANG

### 1. Pasar-pasar Tradisional di Kabupaten Kepahiang

Pasar dalam setiap masyarakat dikenali dan diistilahkan berbedabeda sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat yang bersangkutan. Orang Jawa menyebut dengan *peken atau pasar*. Orang Minangkabau menyebutnya dengan *pasar, pasa atau balai*, dan sebagainya. Sementara di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Maluku dan Manado, disebut dengan istilah *pasar*. Dalam kehidupan masyarakat di Bengkulu dan Kepahiang khususnya istilah yang digunakan adalah hari *Kalangan*, dalam perkembangan selanjutnya jumlah *Kalangan* di Kepahiang berkembang sering dengan bertambahnya jumlah penduduk.<sup>34</sup>

*Kalangan* dalam kehidupan masyarakat di Kepahiang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Sebab pada hari *Kalangan* terjadi pendistribusian atau pertukaran barang, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah *Kalanganan*. Berdasarkan observasi lapangan di Kepahiang dapat disimpulkan bahwa semua *Kalangan* yang terdapat di Kepahiang termasuk dalam kelompok Pasar Tradisional, Karena pola manajemen yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar menawar harga), penempatan barang dijual kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan. Kondisi ini jauh berbeda dengan Pasar Modern yang sudah memakai pola-pola manajemen modern, dengan ciri-ciri jenis barang dagangan yang dilakukan oleh satu pedagang, harga fixed (tetap), tata letak barang dagangan teratur dengan baik dan rapi, kenyamanan dan keamanan sudah menjadi prioritas utama.<sup>35</sup>

Perkembangan *Kalangan* di Kepahiang terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan pusat-pusat pemukiman baru di Kepahiang. Berbicara tentang perkembangan pusat-pusat pemukiman baru tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem pemerintah di Kepahiang. Sebelum menjadi kabupaten tersendiri, Kepahiang merupakan salah satu nama kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu jumlah *Kalangan* di Kecamatan Kepahiang hanya

---

<sup>34</sup> Nursyirwan Effendi *Keberadaan dan Fungsi Pasar Tradisional* diambil dari <http://www.simpopdf.com>

<sup>35</sup> Andri Suryadinata *Analisis Kritis Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Alternatif Solusinya* Bogor : Institut Pertanian Bogor 2008

satu buah. Pada tahun 2004, Kepahiang yang mengalami perkembangan dari nama kecamatan menjadi nama kabupaten, maka saat itu jumlah *Kalangan* di kabupaten Kepahiang berkembang berdasarkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Undang-undang No. 39 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kabupaten Kepahiang terdiri dari Kecamatan Ujan Mas, Tabat Karai, Bermani Ilir dan Kepahing.<sup>36</sup> Kondisi ini menyebabkan jumlah *Kalangan* yang terdapat di Kabupaten Kepahiang bertambah banyak. Pertambahan *Kalangan* yang terdapat lebih disebabkan karena bergabung beberapa kecamatan menjadi satu kabupaten, sebab pada masing-masing kecamatan telah memiliki *Kalangan* masing-masing. Perubahan besar terjadi pada *Kalangan* di Kecamatan Kepahiang, pada awalnya kedudukannya sama dengan *Kalangan* di Kecamatan Ujan Mas, Bermani Ilir, dan Tabat Karai. Ketika Kepahiang menjadi ibukota kabupaten, kedudukan *Kalangan* Kepahiang berubah menjadi pasar induk untuk kecamatan lainnya di kabupaten Kepahiang.

Pada tahun 2005, pemerintah kabupaten Kepahiang mengeluarkan perda No 11 tahun 2005 tentang pembentukan dan pemekaran kecamatan di Kabupaten Kepahiang.<sup>37</sup> Perda ini menyebabkan di Kabupaten Kepahiang munculnya 4 (empat) kecamatan baru yaitu Kecamatan Seberang Musi, Kabawetan, Marigi dan Muaro Kemumu. Kondisi ini dengan sendirinya menambah jumlah *Kalangan* yang terdapat di Kabupaten Kepahiang.. Sebab ada kecenderungan bahwa munculnya kecamatan baru akan mendorong munculnya *Kalangan* baru atau meningkatnya status sebuah *Kalangan* di kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang melakukan pengawasan terhadap semua *Kalangan* yang terdapat di Kabupaten Kepahiang. Inventarisasi dan wawancara yang dilakukan mengelompokkan *Kalangan* di Kepahiang menjadi 2 kelompok yaitu *Kalangan* resmi yang ditandai dengan hari *Kalangan* yang tetap, lokasi *Kalangan* yang telah permanen, sehingga pemerintah kabupaten menjadikan *Kalangan* sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan restribusi yang diambil kepada pedagang. Sedangkan kelompok berikutnya adalah *Kalangan* tidak resmi atau kaget yang ditandai dengan hari *Kalangan* tidak tetap, berlangsung sebentar dan lokasi *Kalangan* yang belum permanen sehingga pemerintah daerah tidak melakukan pengambilan

---

<sup>36</sup> BPS. *Kabupaten Kepahiang dalam Angka Tahun 2006 Kepahiang* : Kerjasama BPS Rejang Lebong dengan Beppeda Kepahiang,. 2007

<sup>37</sup> BPS. *Monografi Kabupaten Rejang Lebong Kepahing* Kerjasama BPS Rejang Lebong dengan Beppeda Kepahiang

distribusi pada hari tersebut.<sup>38</sup> Berikut sebaran hari *Kalangan* resmi di Kabupaten Kepahiang berdasarkan hari :

**Tabel 1**  
**Sebaran Hari *Kalangan* Resmi**  
**Di Kabupaten Kepahiang**

No	Hari <i>Kalangan</i>	Nama <i>Kalangan</i>	Kecamatan
1	Hari Senin	Air Selimang	Sebarang Musi
2	Hari Selasa	Kaban Agung Cinta Mandi	Bermani Ilir Bermani Ilir
3	Hari Rabu	Batu Bandung	Muara Kemumu
4	Hari Kamis	Penanjung Panjang Bukit Barisan	Tabat Karai Marigi
5	Hari Jum'at	Suka Sari Pulau Geto	Kabawetan Marigi
6	Hari Sabtu	Sosokan Tabah Ujan Mas Batu Kalung	Muaro Kemumu Ujan Mas Muaro Kemumu
7	Hari Minggu	Lubuk Saung	Seberang Musi

Data di atas menjelaskan diseluruh kecamatan di Kabuapten Kepahiang terdapat hari *Kalangan*. Hari *Kalangan* terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Kemumum, kondisi ini muncul karena kawasan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bermani Ilir yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kepahiang. Ketika terjadi pemekaran lokasi *Kalangan* banyak tergabung di Kecamatan Muara Kemumu. Sedangkan *Kalangan* Kepahiang berlangsung setiap hari, walaupun hari *Kalangan*nya adalah hari selasa dan hari sabtu.

Di samping *Kalangan* resmi di kabupaten Kepahiang banyak terdapat *Kalangan* tidak resmi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Di Kecamatan Kabawetan terdapat *Kalangan* yang ada pada setiap hari gaji, yaitu *Kalangan* yang diperuntukan untuk pekerja pada perkebunan yang terdapat di Kecamatan Kabawetan. Uniknya *Kalangan* ini terjadi dua kali sebulan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Prapto Plh. Kepala UPTD Pasar Kepahing di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011



yaitu setiap 5 dan tanggal 20 atau menyesuaikan dengan hari gaji buruh perkebunan.<sup>39</sup>

*Kalangan* yang terdapat di Kepahiang, bisa dibandingkan dengan pengelompokan pasar tradisional di Sumatera Barat. Dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat pasar tradisional dapat dibagi atas 3 kelompok misalnya Pasar A di dikategorikan sebagai pasar milik satu nagari, Pasar B adalah pasar milik beberapa nagari dan Pasar C milik Pemda. Pasar *Kalangan* di Kepahing bisa dikelompokkan menjadi pasar tipe A terdiri dari *Kalangan* tidak resmi dan *Kalangan* hari gajian di Kecamatan Kabawetan. Yang tergabung dalam pasar B adalah *Kalangan-Kalangan* resmi yang telah tersebar di masing-masing kecamatan. Tipe C adalah *Kalangan* Kepahiang karena pasar ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Kepahiang

Catatan sejarah memperlihatkan bahwa *Kalangan-Kalangan* yang terdapat di Kabupaten Kepahing ternyata ada yang telah berumur ratusan tahun seiring dengan dibukanya kawasan ini sebagai lokasi perkebunan dan pusat pemerintahan oleh pemerintah kolonial Belanda. *Kalangan* Kepahiang dan Kabawetan termasuk *Kalangan* yang telah dimanfaatkan dalam waktu lama. Pada awal abad ke 19 pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan politik kolonilsasi. Pertumbuhan ekonomi di Bengkulu terutama terjadi setelah tahun 1904 dengan dimasukkannya daerah subur Rejang-Lebong ke dalam wilayah Bengkulu. Daerah Rejang-Lebong memiliki banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan baik milik swasta Barat maupun milik pemerintah. Perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan tersebut menjadi motor penggerak ekonomi Bengkulu.<sup>40</sup>

Pada saat di Bengkulu telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan, pemerintah Bengkulu mulai memikirkan untuk dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sendiri, pemerintah berusaha memajukan pertanian padi rakyat. Para petani diperbolehkan membuka tanah-tanah milik negara (*domeingrond*) untuk dijadikan persawahan. Selain menanam padi (*Oryza*), mereka juga membuka hutan untuk ditanami tanaman ekspor, misalnya kopi (*Coffea canephora* L.), kelapa

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>40</sup> Lindayanti "Perekonomian Bengkulu : Sejarah Bengkulu 1908 – 1941" diambil dari [http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

(*Cocos nucifera* L.), cengkeh (*Eugenia aromatica* L.), karet (*Hevea brasiliensis* L.), gambir (*Uncaria gambir* L.), dan tanaman palawija.<sup>41</sup>

Kondisi diatas jelas menggambarkan bahwa *Kalangan* akan terbentuk dengan sendirinya, sebab ada sekelompok masyarakat yang membutuhkan sebuah barang. Di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Hal ini merupakan faktor alamiah dari terbentuknya sebuah *Kalangan* yaitu adanya orang yang menghasilkan barang dikenal dengan produksi dan ada kelompok masyarakat yang membutuhkan barang dikenal dengan konsumen.

Masa penjajahan Belanda, Kepahiang merupakan pusat pemerintah afdeling Rejang Lebong. Kondisi ini menyebabkan di Kepahiang menjadi pusat pemukiman, sebagai pusat pemukiman dikawasan ini juga terdapat *Kalangan* yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teh merupakan salah satu hasil perkebunan yang terkenal di Rejang Lebong, ketika pemekaran wilayah, perkebunan tersebut masuk dalam kabupaten Kepahiang. Kondisi ini menyebabkan *Kalangan* yang terdapat di Kabawetan merupakan salah satu *Kalangan* tertua di Kabupaten Kepahing, sebab kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang didiami oleh penduduk dalam jumlah besar.<sup>42</sup>

Pihak-pihak yang terlibat pada setiap *Kalangan* pada intinya hampir sama yaitu pedagang, konsumen dan pedangan perantara. Pola yang dilakukan oleh para pedagang yang terlibat pada masing-masing *Kalangan* sama dengan pasar tradisional yang terdapat di Sumatera Barat yaitu pedagang *babelok*. *Pedagang babelok* adalah pedagang yang dapat menentukan jadwal perdagangan dan menghadiri *Kalangan* yang berbeda di berbagai *kecamatan* atau desa. Keputusan apakah akan bekerja atau tidak pada hari tertentu, adalah sangat subjektif dan kondisional. Namun, mereka memiliki komitmen untuk menghadiri pasar-pasar dalam periode waktu tertentu.<sup>43</sup>

Kecenderungan yang berlaku pada pedagang yang terlibat dalam hari *Kalangan* adalah mereka akan meningkatkan voleme perdagangan mereka pada hari hari tertentu dan mengurangi volemennya pada waktu selanjutnya. Untuk masyarakat Kepahiang voleme perdagangan akan meningkat ketika musim panen datang. Pada masa panen kopi

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Nursyirwan Effendi *Keberadaan dan Fungsi Pasar Tradisional* diambil dari <http://www.simpopdf.com>

merupakan hari-hari yang ditunggu oleh para pedagang, sebab pada saat itu daya beli masyarakat meningkat.<sup>44</sup>

Transportasi merupakan bagian terpenting untuk mobilisasi para pedagang dari satu *Kalangan* ke *Kalangan* berikutnya. Pada awalnya alat transportasi yang digunakan disesuaikan dengan zaman yaitu kuda beban dan tenaga manusi. Saat ini para pedagang yang pindah dari satu *Kalangan* ke *Kalangan* berikutnya telah menggunakan angkutan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Observasi yang dilakukan menjelaskan, dalam satu mobil terdiri dari pedagang yang menjual berbagai jenis barang dagangan dan pedangan yang menjual barang sejenis. Biaya yang harus dikeluarkan oleh para pedagang tergantung dari jauh-dekatnya *Kalangan* yang dituju. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang untuk transportasi orang dan barang adalah Rp 20.000,- s.d Rp 40.000,-<sup>45</sup>

Di samping pedagang yang bertugas untuk menyediakan kebutuhan penduduk lokal juga terdapat pedagang perantara yang datang ke *Kalangan* untuk mencari komoditi-komoditi yang bisa dibeli untuk dijual pada pihak lainnya. Umumnya pedagang ini datang secara mandiri dengan menggunakan kendaraan sendiri. Komoditi yang dicari adalah Kopi, Kulit Manis dan usaha perkebunan lainnya. Barang yang dibeli biasanya di bawa untuk diperdagangkan di Pasar Kepahiang atau dikirim ke Bengkulu dan Palembang.<sup>46</sup> Sedangkan konsumen yang terlibat pada setiap *Kalangan* adalah orang-orang yang berasal dari wilayah *Kalangan*. Perkembangan zaman memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah sekitar *Kalangan* untuk datang dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda empat.

Masyarakat kabupaten Kepahiang juga memiliki *Kalangan* hadir setiap hari, dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan nama *Kalangan* pagi. Sebuah *Kalangan* yang muncul pada pukul 4 – 7 pagi, setelah pukul 7 pagi *Kalangan* ini akan hilang dengan sendirinya sebab lokasi yang dijadikan sebagai *Kalangan* adalah jalan umum. Para pedagang yang terlibat dalam usaha ini telah datang semenjak jam 12 malam dan mereka tidur dilokasi tersebut, sedangkan transaksi berlangsung semenjak jam 4 pagi.

Mayoritas masyarakat yang terlibat dalam usahan ini adalah kaum perempuan baik yang bertindak sebagai pedagang atau pembeli.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>45</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>46</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

Observasi lapangan menemukan data bahwa kelompok masyarakat yang membeli barang dagangan di *Kalangan* pagi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pedagang yang melakukan transaksi sebelum jam 6 pagi adalah para pedagang perantara yang membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjual lagi kepada orang lain. Sedangkan orang yang belanja setelah jam 7 pagi adalah orang yang membeli barang untuk kebutuhan sendiri.<sup>47</sup>

Pedagang yang terlibat di *Kalangan* pagi sebagai besar merupakan orang-orang yang berasal dari sentral-sentral penghasil sayur mayur disekitar Kepahiang atau pedagang dari daerah tetangga seperti Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Rejang Lebong. Bahkan tidak jarang pedagang pada *Kalangan* pagi berasal dari Pagar Alam atau Lahat yang termasuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar perdagangan yang berjual di pasar Kepahiang tidak terlibat di *Kalangan* pagi karena segman pasar mereka berbeda.<sup>48</sup>

Cerita di atas menggambarkan bahwa kalangan di Kepahiang merupakan sebuah aktifitas kehidupan yang seiring dengan perkembangan masyarakat di kawasan ini. Pada awalnya Kalangan hanya terdapat di daerah-daerah yang dijadikan lokasi perkebunan atau pusat pemerintah kaum kolonial Belanda. Seiring perkembangan zaman jumlah kalangan di Kepahiang juga bertambah, hal ini terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk dan munculnya sentral pemukiman baru. Pedagang yang terlibat pada masing-masing kalangan umumnya adalah orang yang sama, mereka berpindah dari satu kalangan ke kalangan lainnya.

Perkembangan masyarakat yang semakin banyak menyebabkan hari kalangan yang muncul sekali seminggu tidak sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah di Pasar Kepahiang muncul pasar pagi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari Kepahiang. Hal ini terlihat dari karakteristik pembeli yang terlibat dalam pasar pagi, yaitu orang yang belanja sebelum jam 6 pagi adalah orang yang menjadi pedagang perantara yang kembali menjual dagangan pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan pembeli yang Belanja dari jam 6 pagi sampai pasar tutup adalah orang-orang yang membeli untuk kebutuhan pribadi atau usaha mereka.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>48</sup> Wawancara dengan Andi Pedagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

## 2. Perkembangan Pasar Kepahiang

### a. Sejarah *Kalangan* Kepahiang

Kehadiran *Kalangan* di Kepahiang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan kehidupan masyarakat di kawasan ini. Pada tahun 1904, pemerintah Kolonial Belanda melakukan perluasan daerah kekuasaan hingga ke wilayah pedalaman Bengkulu, hal ini ditandai dengan dibukanya wilayah perkebunan dan pertambangan di afdeling Rejang Lebong. Program kolonisasi di Bengkulu dapat terlaksana atas perjuangan Kontrolir Rejang D.G. Hooijer. Pada tahun 1908 percobaan kolonisasi dimulai di daerah Rejang dengan bantuan dana dari para kepala Marga Selupu Rejang, Merigi, dan Bermani Ilir. Migran kolonisasi yang datang pada tanggal 1 Maret 1908, sebanyak 66 orang dewasa dan 56 anak-anak, yang ditempatkan di dekat perkebunan Algemeen Tabak Maatschappij berjumlah 26 orang dewasa dan 18 anak-anak. Para peserta kolonisasi selain bertani, mereka bekerja sebagai kuli di perkebunan Algemeen Tabak Maatschappij.<sup>49</sup>

Migran kolonisasi yang ditempatkan di dekat perkebunan sejak tanggal 3 Maret 1908 sudah harus bekerja membersihkan lahan belukar muda yang dipenuhi alang-alang (*Imperata cylindrica* L.) untuk dijadikan lahan perkebunan tembakau. Setelah itu, lahan ditanami tembakau (*Nicotania tabacum* L.), tetapi penanaman pertama ini mengalami kegagalan karena tanah yang belum cukup asam sehingga belum siap untuk ditanami. Di samping berkebun tembakau, mereka juga harus mempersiapkan lahan untuk membangun rumah dan memotong batang pohon untuk dijadikan kayu bakar dan dijual pada penduduk asli, sehingga mereka bisa mendapat penghasilan tambahan sebesar 50 sen/hari.<sup>50</sup>

Pada bulan pertama kedatangannya, migran mendapatkan jatah makanan, misalnya beras, teh, garam, ikan, sabun, dan minyak. Di samping itu mereka mendapat uang sebesar 25 sen/ minggu/kepala keluarga. Bulan berikutnya mereka hanya mendapat jatah beras dan ikan karena keperluan lain sudah dapat dibeli sendiri dari hasil menjual kayu ataupun bekerja di perusahaan. Setelah empat setengah bulan kebun tembakau sudah dapat dipanen. Mereka menyertorkan daun tembakau (*Nicotania tabacum* L.) ke perusahaan dan sebagai gantinya mereka mendapatkan surat bukti yang dapat ditukarkan dengan bahan

---

<sup>49</sup> Lindayanti "Perekonomian Bengkulu : Sejarah Bengkulu 1908 – 1941" diambil dari :

[http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

<sup>50</sup> *Ibid*

kebutuhan hidup melalui Kontrolir. Pemerintah sengaja mengatur agar administrasi perkebunan tidak memberikan bayaran uang bagi daun tembakau dari para migran karena dikhawatirkan mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang yang tidak perlu. Uang kontan hanya dapat mereka terima apabila mereka bekerja di perkebunan tembakau.<sup>51</sup>

Saat kaum lelaki mengurus kebun tembakau dan membuka lahan untuk berladang, kaum wanita dan anak-anak bekerja di gudang perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya perusahaan kebun tetap mengalami kesulitan mendapatkan kuli karena migran kolonisasi lebih suka berladang daripada kerja di perusahaan. Misalnya, setelah lima bulan kedatangannya, migran orang Sunda yang mau bekerja di gudang hanya tiga orang dan itu pun hanya untuk beberapa hari. Dalam satu minggu pekerja wanita dan anak bisa mendapatkan penghasilan sebesar f. 6,90. Biasanya migran laki-laki hanya bekerja di perusahaan selama dua hari dengan upah sebesar f. 1, setelah itu mereka kembali bekerja di ladang.<sup>52</sup>

Berdasarkan cerita di atas tergambar bahwa sebelum program kolonisasi dalam kehidupan masyarakat telah memiliki *Kalangan* yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sulit untuk memperkirakan dengan pasti tanggal berdirinya *Kalangan* di Kepahiang, namun catatan di atas menjelaskan bahwa ketika membuka perkebunan di daerah Kepahiang Belanda telah membawa para buruh dari Jawa. Para buruh yang bekerja di perkebunan Belanda tersebut mendapatkan gaji. Di sisi lain pemerintah Belanda mewajibkan kepada penduduk asli untuk menanam kelapa, padi dan tanaman lainnya. Kondisi ini dengan sendirinya telah menimbulkan transaksi antara masyarakat pendatang dari Jawa yang bekerja di perkebunan Belanda dengan penduduk asli yang menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat pendatang.

Data di atas menjelaskan bahwa *Kalangan* Kepahiang telah memiliki umur yang cukup lama. Bakarudin salah seorang pedagang yang telah berdagang semenjak tahun 1950 di kawasan ini menjelaskan bahwa ketika beliau datang ke kawasan ini bangunan yang dihuni dan ditempati sebagai lokasi berdagang tertulis tahun 1927.<sup>53</sup> Informasi di atas semakin mempertegas bahwa semenjak tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda telah memfasilitasi sebuah bangunan untuk kepentingan *Kalangan* di Kepahiang. Apalagi pada saat itu pemerintah

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

Kolonial Belanda menjadikan Kepahiang menjadi ibukota keresidenan dengan pertimbangan wilayah ini merupakan jalur transportasi yang menghubungkan dengan wilayah pedalaman seperti ke Lebong, Pagaralam yang saat itu telah mulai dieksplotasi Belanda sebagai wilayah perkebunan dan tambang.

Pada tahun 1948 ketika pemerintah Belanda melakukan agresi militer ke II, kota Kepahiang dibumi hanguskan oleh kaum perjuang, kondisi ini menyebabkan pasar kepahianh menjadi hancur.<sup>54</sup> Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deng Hang. Maka Kepahiang kembali diakui sebagai pusat pemerintah Rejang Lebong, akibat bumi hangus yang dilakukan oleh kaum pejuang menyebabkan Kepahiang tidak memiliki pusat perkantoran dan pemerintahan kabupaten Rejang Lebong. Untuk menjalankan roda pemerintah maka ibu kota rejang lebong pindah ke Curup.<sup>55</sup> Bahkan pada tahun 1956 pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan Curup sebagai ibukota kabupaten rejang lebong.<sup>56</sup> Kondisi ini menambah suram kedudukan *Kalangan* Kepahiang bagi masyarakat rejang lebong.

#### **b. Periode Kabupaten Rejang Lebong**

Perpindahan pusat pemerintah dari Kepahing ke Curup jelas membawa dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan *Kalangan* Kepahiang pada masa – masa bergabung dalam kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini diperparah dengan bergabungnya Kabupaten Rejang Lebong dalam Propinsi Sumatera Selatan yang saat itu memiliki wilayah sangat luas meliputi Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. sehingga dana pembangunan untuk Kabupaten rejang lebong menjadi sedikit, apalagi keuangan negara saat itu masih terbatas. Pada tahun 1968 pemerintah melalui kementerian dalam negeri resmi mendirikan Propinsi Bengkulu yang terpisah dari propinsi Sumatera Selatan, hal ini ditandai dengan keluarnya UU No 9 tahun 1967.<sup>57</sup>

Akibat dari struktur pemerintahan yang begitu luas, dana yang sedikit menyebabkan kondisi *Kalangan* Kepahiang pasca berpindahnya ibukota ke Curup, relatif tidak mengalami perubahan, kondisi ini terlihat jelas dari bangunan yang dimiliki oleh *Kalangan* Kepahiang tidak

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bakaruddin Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>55</sup> “*Sejarah Ringkas Kabupaten Kepahiang (catatan ringkas)*” Kepahiang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

mengalami perubahan yang berarti sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafei seorang pedagang yang telah berdagang di *Kalangan Kepahiang* semenjak tahun 1950, ketika dia datang sampai tahun 1970 *Kalangan Kepahiang* tidak mengalami perubahan.<sup>58</sup>

Pasca berdirinya Propinsi Bengkulu pada tahun 1968, berdampak terhadap perkembangan wilayah-wilayah yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Apalagi Propinsi Bengkulu, hanya terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya sehingga perhatian untuk daerah-daerah lain menjadi terbuka. Hal ini diwujudkan dengan rencana untuk merenovasi pasar Kepahiang. Untuk itu bupati Rejang Lebong mengajak seluruh pedagang pasar, secara bergotong royong mengumpulkan uang untuk merenovasi pasar tersebut.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari seluruh pedagang pasar apalagi Bupati dan mayoritas pedagang pasar Kepahiang memiliki kedekatan emosional sebab sama-sama berasal dari Sumatera Barat.<sup>59</sup> Apalagi para pedagang telah lama menginginkan bahwa pasar Kepahiang harus mengalami perubahan dan adanya janji dari pemerintah bahwa pasar yang akan dibangun akan diserahkan kepada pedagang. Uang yang terkumpul dari pedagang ditambah oleh pemerintah akhirnya berdirilah bangunan pasar yang kemudian dikenal dengan nama pasar inpres. Terbatasnya dana yang dimiliki sehingga bangunan pasar inpres menggunakan baku dari kayu. Namun pasar telah memiliki los-los dan bangunan untuk menyimpan barang. Keuntungan lain yang dirasakan oleh pedagang dan pembeli adalah ketika melakukan transaksi lebih terlindung dari matahari dan hujan.<sup>60</sup>

Pada tahun 1980, pasar inpres yang baru dibangun pada tahun 1970, mendapat musibah dengan terbakarnya pasar tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Rejang Lebong membangun sebuah pasar baru, belum selesai pasar baru di bangun tahun 1981, pasar Kepahiang kembali terbakar. Akhirnya pada tahun 1982, pasar Kepahiang selesai dibangun dengan bentuk tokoh semi permanen. Perubahan bangunan pasar dengan sendirinya menambah keindahan dan kerapian dari pasar Kepahiang, di bandingkan dengan bangunan pasar sebelum terbakar.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>59</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>60</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>61</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011



Perkembangan bangun pasar kembali mengalami perubahan pada tahun 1990-an ketika bangunan pasar terutama kawasan yang berhadapan dengan jalan raya yang menghubungkan antara Curup dengan Bengkulu atau ke Pagaralam telah banyak dibangun bangunan baru permanen. Kondisi ini dipicu dengan telah berkembangnya hari pasar di Kepahiang dari Selasa dan Sabtu menjadi setiap hari. Sebab pada tahun 1990-an tingkat perekonomian masyarakat dan jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan hari pasar berkembang dari 2 kali seminggu menjadi setiap hari walaupun hari pasar tetap merupakan puncak aktifitas masyarakat Kepahiang.<sup>62</sup>

Pada tahun 1990, pemerintah telah melengkapi fasilitas pasar dengan mendirikan bangunan permanen yang diperuntukan bagi pedagang yang memiliki stok banyak. Kondisi ini sejalan dengan kondisi pasar yang semakin ramai. Situasi perubahan bangunan fisik pasar secara prinsip tidak mengalami perubahan sampai terbentuknya kabupaten Kepahiang. Namun aktifitas perdagangan di pasar Kepahiang setiap periode mengalami perubahan namun hal tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

### **c. Periode Kabupaten Kepahiang**

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto memberikan dampak yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu yang fenomena yang muncul pasca orde baru adalah terjadinya pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya terbentuknya Kabupaten Kepahiang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Pembentukan kabupaten Kepahiang dengan sendirinya membawa dampak terhadap masyarakat Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang sebagai sebuah kabupaten baru giat melakukan pembangunan di segala bidang terutama pembangunan sarana dan prasarana di dalam kabupaten Kepahiang. Kondisi ini dengan sendirinya membawa dampak terhadap pembangunan dan penata pasar Kepahiang yang saat itu telah berubah status menjadi pasar ibukota kabupaten. Dalam membangun pasar Kepahiang dibutuhkan perencanaan yang baik sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik, setiap program dan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat harus direncanakan dengan baik. Oleh karenanya, perencanaan tata ruang wilayah dalam penataan pasar sangat penting untuk menghasilkan mekanisme pasar yang baik.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

Perencanaan Tata Ruang wilayah merupakan suatu upaya mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan baik yang bersifat sektoral, daerah, maupun mengajak pihak swasta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks itulah pemerintah kabupaten Kepahiang mencoba mengoptimalkan pasar Kepahiang dalam kerangka tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu caranya adalah membangun pasar Kepahiang menjadi representatif

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penataan terhadap bangunan pasar dan melakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dangan yang mereka jual. Pengelompokan ini terutama untuk pedagang yang menjual kebutuhan hari penduduk Kepahiang, kondisi ini menyebabkan setiap blok dalam pasar diperuntukan untuk perdagangan dengan jenis dagangan yang hampir sama. Pemerintah juga melengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk menjadikan pasar Kepahiang sebagai sentral kehidupan bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten telah memiliki visi bagaimana mengembangkan pasar Kepahiang bukan saja tempat melakukan transaksi jual beli namun juga sarana hiburan bagi masyarakat di kawasan ini dengan mendirikan sebuah taman bermain tepat di depan pasar dengan tujuan untuk menarik minat orang bermain ke Pasar Kepahiang di sore hari. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah juga mendirikan sebuah lokasi kuliner bagi pedagang yang berjualan makanan, yang diharapkan akan meningkatkan kehidupan masyarakat di Kepahiang.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kepahiang untuk menjadikan pasar Kepahiang sebagai pusat aktifitas kehidupan di Kepahiang adalah menggandeng pihak-pihak swasta untuk mendirikan berbagai fasilitas yang diharapkan bisa menarik minat masyarakat. Namun kebijakan ini kontra produktif dengan konsep pasar Kepahiang yaitu sebuah pasar tradisional dalam undang-undang jelas menyatakan bahwa di sekitar pasar tradisional dilarang untuk mendirikan pasar modern. Namun hal ini tetap ditemukan di pasar Kepahiang sebuah bangun mall yang terletak di dekat pasar tradisional

Bangunan di atas merupakan salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan citra pasar Kepahiang dan kabupaten Kepahiang sebagai sebuah daerah baru yang baru berkembang. Pada tahun 2004 pemerintah melalui Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melakukan perbaikan dan menambah fasilitas yang terdapat di Pasar Kepahiang. Usaha ini dilakukan dalam

rangka menambah keindahan dan kenyaman di dalam pasar Kepahiang. Renovasi yang dilakukan oleh pemerintahan adalah bangunan yang terletak ditengah-tengah pasar yang diperuntukan bagi pedagang-pedagang kecil yang membawa barang setiap pagi dan sore hari. Kebijakan ini jelas memberikan kesempatan yang sama bagi pedagang kecil untuk berusaha dengan menempati tempat yang layak dan bagus.

Uraian diatas menjelaskan bahwa perubahan besar yang terjadi di pasar Kepahiang adalah perubahan bangunan yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk melakukan transaksi ekonomi. Terbatasnya data yang dimiliki menyebabkan sulit untuk melakukan rekontruksi terhadap bentuk bangunan pasar pada masa sebelum tahun 1990 sebab pasar ini sempat dua kali mengalami kebakaran dan pada masa revolusi fisik tahun 1948, Kepahiang sempat di bumi hanguskan oleh pejuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Perubahan yang relatif lebih cepat terhadap perkembangan pasar baru terjadi pada masa berdirinya Kepahiang sebagai kabupaten tersendiri.

Keterbatasan data yang dimiliki menyebabkan sulit untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi di pasar Kepahiang pada masa-masa penjajahan Belanda. Perubahan yang bisa dijelaskan ketika Indonesia telah merdeka, persoalan baru muncul sebab ketika Indonesia merdeka Kepahiang pada awalnya tergabung dalam propinsi Sumatera Selatan yang memiliki wilayah sangat luas sehingga perkembangan pasar Kepahiang menjadi terbatas. Apalagi pasar Kepahiang sempat dibumihanguskan ketika revolusi fisik, yang mengakibatkan pusat pemerintahan Rejang Lebong harus dipindahkan ke Curup.

Pembangunan pertama yang dirasakan oleh Pasar Kepahiang pada tahun 1970, ketika Bengkulu telah berdiri menjadi propinsi sendiri. Pembangunan pada masa tersebut juga melibatkan dana para pedagang dan ditambah dengan dana bantuan dari pusat sehingga nama bangunan berubah menjadi Pasar Inpres. Perkembangan pasar Kepahiang dalam jumlah pesat baru terjadi ketika kawasan ini telah menjadi kabupaten sendiri, hal ini terlihat dari berdirinya berbagai sarana dan prasarana penunjang di Pasar kepahing.

### **3. Pengelolaan Pasar Kepahiang**

Sejarah perkembangan pasar Kepahiang yang telah begitu lama menyebabkan pola pengelolaan pasar Kepahiang dari periode ke periode berikutnya berbeda. Namun sulit untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan pasar pada masa awal-awal berdirinya kalangan Kepahiang. Ketika pemerintah kolonial Belanda mengakui pasirah sebagai

pemimpinan tertinggi dalam sebuah marga. Belanda juga mengangkat seorang datuk pasar yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sebuah pasar. Keterbatasan data menyebabkan sulit untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan datuk pasar Kepahiang selama mereka berkuasa. Namun berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada pasar-pasar tradisional di Minangkabau yang juga mengenal datuk pasar, maka dapat diperkirakan bahwa fungsi datuk pasar untuk mengambil uang harian, mengatur para pedagang, kebersihan pasar dan menjaga keamanan dalam sebuah pasar.

Pengelolaan yang dijalankan oleh datuk pasar ini berlangsung sampai tahun 1950, namun pada akhir tahun 1940-an pola pengangkatan datuk pasar mengalami perbedaan. Sebelumnya seorang datuk pasar diangkat dan ditunjuk oleh pejabat pemerintahan kolonial Belanda, namun pada proses selanjutnya seorang datuk pasar diangkat dan dipilih oleh pedagang. Berdasarkan informasi yang didapat, yang menjadi datuk pasar di Kepahiang umumnya adalah kaum pendatang baik dari Bengkulu, Palembang dan Minang.<sup>63</sup> Kondisi ini disebabkan karena ketika sistem penunjukan dari Belanda maka yang diangkat adalah orang-orangnya. Ketika sistem pemilihan dari pedagang, maka yang diangkat adalah orang-orang yang berdagang, saat inilah munculnya orang Minang sebagai datuk pasar di Kepahiang.

Periode selanjutnya ketika Pasar Kepahiang berubah status menjadi pasar kecamatan, ketika pusat pemerintahan berpindah ke Curup. Maka yang mengelola pasar Kepahiang lebih banyak dikelola oleh pihak kecamatan Kepahiang sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat inilah para pedagang telah membentuk serikat dagang yang mana lembaga ini bertugas untuk menjaga keamanan di pasar Kepahiang. Lembaga ini lebih banyak berperan untuk memberikan rasa aman kepada pedagang dalam melakukan transaksi di pasar Kepahiang. Sedangkan petugas yang ditunjukkan pihak kecamatan lebih banyak berperan untuk mengumpulkan uang harian yang digunakan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>64</sup>

Informasi yang didapatkan menjelaskan bahwa pada tahun 1950-an setiap pedagang harus membayar uang harian atau dikenal uang beo sebesar 1 – 3 sen tergantung dari jenis dagangan yang diperjualbelikan. Di samping itu para pedagang juga dimintakan uang kebersihan dan keamanan yang jumlahnya juga bervariasi berdasarkan komoditi yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

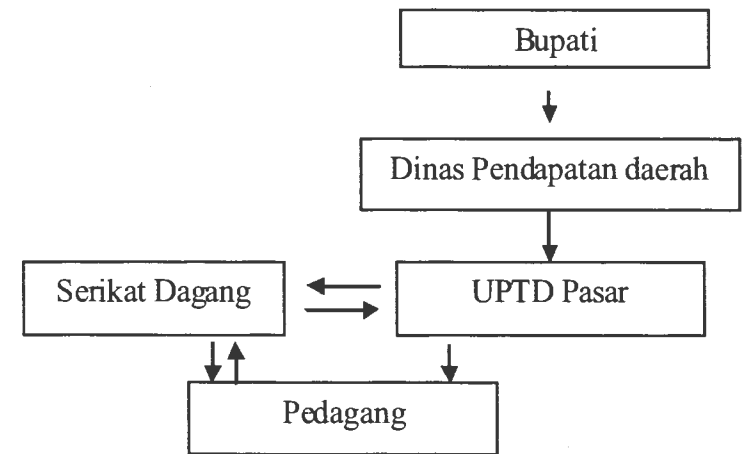
<sup>64</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

diperdagangkan.<sup>65</sup> Kondisi ini menggambarkan bahwa pasar Kepahiang telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang terlibat di pasar Kepahiang.

Perubahan besar dalam pengelolaan pasar Kepahiang terjadi ketika kabupaten Kepahiang berdiri sendiri terpisah dari kabupaten Rejang Lebong. Mulai saat itulah pengelolaan pasar Kepahiang mengalami perubahan yang sangat besar. Kondisi ini muncul karena pemerintah kabupaten Kepahiang telah melengkapi berbagai fasilitas untuk menjadikan pasar Kepahiang sebagai sebuah pasar yang representatif bagi kehidupan masyarakat Kepahiang. Untuk itu berbagai sarana dan prasarana penunjang juga telah didirikan di sekitar pasar Kepahiang.

Dalam konteks itulah untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan Pasar Kepahiang maka pengelolaan Pasar Kepahiang. Bupati Kabupaten Kepahiang mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pasar Kepahiang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang. Untuk itu Bupati menyerahkan pengelolaan pasar Kepahiang kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar sebuah lembaga yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran pasar Kepahiang. Berikut Struktur Bagan Pengelola Pasar Kepahiang :

**Bagan  
Struktur Bagan Pengelola Pasar Kepahiang  
2010 – 2015**



<sup>65</sup> Wawancara dengan M. Syafei Pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada Tanggal 10 Agustus 2011

Bagan di atas jelas menggambarkan bahwa pemerintahan daerah berusaha untuk mengoptimalkan fungsi dari Pasar Kepahing sebagai salah satu sumber dalam pendapatan asli daerah. Untuk itu bupati menyerahkan pengelolaan pasar kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepahiang. Dispenda merespon hal ini dengan membentuk sebuah UPTD Pasar untuk mewujudkan hal ini. Di sisi lain UPTD Pasar mengandeng dan mengoptimalkan serikat dagang sebagai mitra untuk mensukseskan tujuan pemerintah kabupaten Kepahiang. Untuk itu pemerintah memberikan sebuah ruang di kompleks pasar Kepahiang yang digunakan sebagai kantor UPTD Pasar.

Persoalan administrasi pemerintah di Kabupaten Kepahiang menimbulkan persoalan dalam mengoptimalkan peran UPTD Pasar sebab pemerintah sampai bulan Agustus 2011, belum menunjuk seorang kepala UPTD Pasar yang defenitif sehingga peranan UPTD Pasar belum optimal. Pemerintah baru menunjuk seorang pejabat pelaksana harian (PLH) untuk menjalankan fungsi dan tugas UPTD Pasar. Prapto PLH UPTD Pasar menjelaskan bahwa peranan pasar yang bisa dilaksanakan saat ini adalah untuk hanya mengambil sewa harian, bulanan atau tahun dari pedagang yang besarnya tergantung dari jenis tempat yang dihuni oleh para pedagang. Sebagaimana diungkapkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Variasi sewa di Pasar Kepahiang**

No	Distribusi	Jenis	Ket
1	130.000	Bulanan	Toko terletak pada posisi strategis
2	110.00	Bulanan	Toko terletak kurang strategis
3	68.000	Bulanan	Kedia terletak diposisi strategis
4	48.000	Bulanan	Kedai terletak kurang startegis
5	20.000	Bulanan	Los- los kosong
6	200.000 – 300.000	Pertahun	Los daging, ikan /sejenis

Data di atas menjelaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Kepahiang telah mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar distribusi dari toko atau kios kepada pemerintah berdasarkan tempat dan lokasi mereka berdagang. Sedangkan Serikat Dagang Pasar (SDP) pasar Kepahiang bertugas untuk keamanan untuk

itu para pedagang juga dikenakan biaya sebesar 3.000 – 11.000 tergantung dari lokasi mereka berdagang. Uang inilah yang dimanfaatkan oleh membiaya satpam-satpam yang menjaga keamanan pasar Kepahiang dari tangan orang-orang jahil.

Gambaran pengelolaan pasar Kepahiang mulai dari pemerintah kolonial sampai dengan saat ini masih menjadikan pasar sebagai objek untuk menambah uang masuk bagi kas daerah. Belum terlihat kebijakan yang betul-betul menjadikan pasar sebagai sebuah unit yang bisa bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan Kabupaten Kepahiang di masa depan. UPTD Pasar yang dibentuk belum mampu bekerja maksimal karena terkendala persoalan administrasi pemerintah, sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan padahal pemerintah telah mendirikan berbagai sarana dan prasana untuk menjadikan pasar ini representatif.

## **C. AKTIFITAS MASYARAKAT DI PASAR KEPAHIANG**

### **1. Pelaku Pasar**

Aktifitas masyarakat yang terlibat di pasar tradisional, merupakan mekanisme sosial dari masyarakat setempat. Pasar tradisional menampung berbagai elemen masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Kehadiran masyarakat dalam jumlah banyak menimbulkan pola hubungan sosial yang majemuk diantara pelaku pasar. Pelaksanaan aktivitas pasar tradisional, biasanya berdasarkan jadwal, hari dan tempat, umumnya pasar tradisional berlangsung seminggu sekali. Pada pasar tradisional terdapat jaringan sosial dan perdagangan yang sangat kuat dimana mereka saling berhubungan dan mendukung diantara mereka. Pola jaringan yang terbentuk diartikulasikan dalam beberapa bentuk seperti kerja sama, pertemanan, perjanjian dagang, atau amanat.<sup>66</sup>

Jaringan sosial sering juga dibangun atas dasar perasaan senasib sepenanggungan. Jaringan pemasaran berlangsung antara pelaku pasar di pasar lokal, dengan pelaku pasar di kota, dan dengan distributor di pasar lokal dan kota. Fungsi jaringan sosial dan perdagangan dalam konteks pasar tradisional adalah untuk penyediaan yang berkelanjutan akan barang dagangan, mengurangi kompetisi dagang dan memelihara keuntungan usaha. Nursyirwan Effendi dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam sebuah pasar tradisional terdapat beberapa komponen yang terlibat yaitu Petani dan masyarakat desa, Makelar atau toke,

---

<sup>66</sup> Eva Agustinawati *Kehidupan Pasar Tradisional (Studi Struktur dan Organisasi Pedagang Kain Pasar Tradisional Klewer)* Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 2007

Pedagang antar pasar, Pelayan kios., Penyedia jasa. Pengatur transportasi lokal, Aparat keamanan, Pengusaha lokal kelas menengah dan kecil, Pengelola pasar. Komisi pasar.<sup>67</sup> Namun secara garis besar yang terlibat sebagai pelaku dalam sebuah pasar yaitu produsen, pedagang dan konsumen.

Sejarah perjalanan pasar kepahiang yang telah begitu lama menyebabkan dinamika masyarakat yang terlibat sebagai produsen, konsumen dan pedagang di Pasar Kepahiang juga berbeda dari masa ke masa. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat yang terlibat sebagai produsen langsung sebagai pedagang sebab barang yang diperjualbelikan lebih banyak komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada masa penjajahan di Pasar Kepahiang telah terdapat pedagang yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Terbatasnya data yang dimiliki tentang bagaimana dinamika masyarakat di Pasar Kepahiang pada masa penjajahan Belanda menyebabkan sulit untuk mengungkapkan aktifitas pelaku pasar pada masa tersebut.

Data dan informasi tentang siapa-siapa yang menjadi pelaku di Pasar Kepahiang, terutama yang bertindak sebagai pedagang baru bisa diungkap dengan cukup jelas setelah masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari cerita yang disampaikan oleh Bakaruddin seorang pedagang yang telah berjualan di Pasar Kepahiang semenjak tahun 1950. Pada awal kedatangan di Kepahiang, hampir 90% pedagang yang terlibat di pasar Kepahiang merupakan orang Minang. kondisi tersebut berlangsung sampai tahun 1990-an. Setelah periode ini populasi orang minang yang berdagang di pasar Kepahiang terus berkurang, bahkan pada tahun 2010 jumlah pedagang Minang di Kepahiang berjumlah 60%.<sup>68</sup>

Proses kedatangan mereka ke kawasan ini juga beragam sebagaimana diungkapkan oleh Yusra seorang penjahit kain yang berasal dari Muaro Labuh. Dia datang ke kawasan ini pertama kali pada tahun 1962, kedatangannya ke Kepahiang merupakan sebuah kebetulan. Pada awalnya Yusra lari dari kampung halaman karena adanya persoalan keluarga. Tujuan pertama dari Muaro Labuh adalah mencari Mamak di Bengkulu, dari Padang ke Bengkulu naik kapal dari Muaro Padang turun di Tapak Padri Kota Bengkulu. Dari Bengkulu berjalan kaki ke Kepahiang selama 2 hari satu malam. Tahun 1973, beliau kembali ke Muaro Labuh dan menikah dengan wanita Muaro Labuh.

---

<sup>67</sup> Nursyirwan Effendi *Keberadaan dan Fungsi Pasar Tradisional* diambil dari <http://www.simpopdf.com>

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ismail ketua Serikat Dagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011



Pada tahun 1975, beliau kembali ke Kepahiang melalui jalur darat selama 2 hari, dua malam baru sampai di Kepahiang.<sup>69</sup>

Di samping itu ada juga orang Minang yang lahir dan besar di Kepahiang, seperti H. Syafei, yang pertama datang ke kawasan ini adalah ayah dan ibunya berangkat dari Pariaman ke Bengkulu melalui jalur laut. Berdagang dan tinggal di Kepahiang karena pada masa itu Kepahiang merupakan Ibukota *afdeeling* Rejang Lebong. Banyak lagi pola dan proses kedatangan orang Minang untuk menjadi pedagang di Kepahiang.<sup>70</sup> Pada masa ini masyarakat pendatang selain orang Minang yang banyak berdagang di Kepahiang adalah orang Pagaralam, Melayu Bengkulu dan Cina, namun jumlah dan populasi mereka tidak diketahui.

Jenis dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang minang hampir segala aspek aktifitas ekonomi di pasar Kepahiang, namun mayoritas berjualan barang Klontong, Pakaian, Rumah Makan dan kebutuhan harian. Pada periode ini penduduk asli Kepahiang belum terlibat langsung dalam perdagangan di Pasar Kepahiang. mereka lebih banyak bertindak sebagai konsumen dengan membeli barang di pasaran sedangkan hasil pertanian yang mereka hasilkan biasanya dibeli langsung oleh toke ke rumah mereka. Sedangkan pedagang dari etnis lain seperti Cina, Melayu Bengkulu lebih banyak berdagang sebagai pengumpul hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh penduduk Kepahiang.

Pada periode ini sistem perdagangan yang berlaku adalah sistem berdagang *babelok* yang mana seorang pedagang bukan hanya berjualan di Pasar Kepahiang namun mereka berpindah dari satu pasar ke pasar lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bakaruddin, dahulu dia berpindah dari satu pasar ke pasar lainnya. Ketika transportasi dengan mobil belum lancar tidak jarang barang dagangan harus dibawa dengan kuda.<sup>71</sup> Pada saat itu berjualan di Kepahiang sangatlah menyenangkan karena penduduk di kepahiang ketika musim panen kopi atau tembakau sangat gemar membeli. Ketika musim panen hilang tidak jarang barang yang dibeli dijual kembali. Kondisi ini menguntungkan bagi para pedagang.

Perkembangan jalur transportasi dan bertambahnya jumlah penduduk membawa dampak terhadap orang-orang yang terlibat di Pasar Kepahiang. Ketika jumlah penduduk semakin banyak, di sisi lain

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Yusra pedagang Pasar Kepahing di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>70</sup> Wawancara dengan M. Syafei pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bakaruddin pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

jumlah tanah semakin sedikit sehingga banyak masyarakat asli Kepahiang yang tidak lagi mendapatkan tanah dalam jumlah luas. Kondisi ini menyebabkan banyak orang Rejang yang telah memanfaatkan pasar sebagai tempat beraktifitas. Dulu, ketika seorang pemuda rejang menikah, mereka mendapatkan sebidang tanah untuk diolah menjadi kebun kopi. Setiap musim panen mereka bisa bersenang-senang apalagi ketika harga kopi mahal.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan Kepahiang sebagai lokasi transmigrasi berdampak juga terhadap munculnya etnik baru yang terlibat di pasar Kepahiang. kemunculan mereka seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan etniksitas di Kepahiang. Mulai pada tahun 1980-an mulailah orang-orang dari etnik Jawa, Sunda dan Rejang menjadikan pasar sebagai pusat aktifitas ekonomi mereka dan bersaing dengan orang minang yang selama ini menjadi penguasa tunggal di Pasar Kepahiang.

Pertambahan penduduk dan jauhnya ibukota kabupaten, menyebabkan orang-orang di sekitar Kecamatan Kepahiang menjadi Pasar Kepahiang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya pasar Kepahiang yang biasanya hadir setiap hari Selasa dan Sabtu berubah menjadi pasar yang buka setiap hari. Kondisi ini juga didukung dengan keputusan pemerintah mendirikan komplek pertokoan di sekitar pasar. Hal ini menarik minat orang-orang Aceh dan Batak yang selama ini lebih banyak di Kota Bengkulu untuk membuka usaha di Kota Bengkulu bergerak dan membuka usaha di Kepahiang.

Inilah babak baru kehidupan pelaku pasar kepahiang, hal ini ditandai dengan berkembangnya hari pasar dari Selasa dan Sabtu berubah menjadi setiap hari. Komposisi pedagang juga mengalami pergeseran yang sebelum tahun 1990-an jumlah orang minang yang berdagangan hampir 90%, pada tahun 2000-an berkurang menjadi 60 %. Berkurangnya jumlah persentase orang minang di Kepahiang, lebih disebabkan karena munculnya etnis-etnis lain sebagai pedagang di Pasar Kepahiang. Keputusan etnis lain untuk berdagang di pasar Kepahiang merupakan babak baru dalam kehidupan masyarakat di Kepahiang.

Kemunculan etnik lain sebagai pedagang di Pasar Kepahiang dengan sendirinya mendatangkan fokus dagangan yang akan diperjualbelikan oleh masing-masing etnis. fokus ini muncul secara alamiah dan terkondisi tanpa disengaja, hal ini terkait dengan jaring sosial dan perdagangan di Pasar Kepahiang. Kondisi ini juga memberikan dampak dalam memperkuat nilai tawar dan menghindari persaingan dengan etnis yang berbeda. Orang minang sebagai etnis yang menguasai pasar Kepahiang lebih banyak berdagang Baju, Sepatu, Klontong dan Makan, usahan ini dijadikan fokus berkaitan erat dengan

kemampuan alamiah orang minang yang dikenal punya keahlian memasak dan membuat pakaian.<sup>72</sup>

Etnis Rejang dan Sunda lebih banyak bekerja sebagai penjual sayur mayur, kemunculan mereka disebabkan karena kedua etnis ini memiliki banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi arel tanaman palawija.<sup>73</sup> Keputusan orang Rejang dan Sunda untuk berdagang sayuran ke Pasar Kepahiang juga dipicu oleh pertambahan jumlah penduduk pada kedua etnis tersebut tidak sebanding dengan luas tanah yang dimiliki. Sehingga perilaku mereka dalam memanfaatkan produksi yang dihasilkan jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Keputusan ini menyebabkan terputusnya sistem distribusi sayur yang biasanya dari petani ke pedagang pengumpul baru ke tangan konsumen. Saat ini sayuran lebih banyak dari petani langsung ke konsumen. menyebabkan keuntungan yang diraih oleh petani menjadi lebih besar.

Orang-orang Jawa yang berdagang di Kepahiang lebih banyak berdagang bahan-bahan Sembako. Kemunculan mereka diusaha ini terkait dengan tingkat kesulitan dalam berdagang sembako jauh lebih rumit dibandingkan dengan jenis usaha lain. Orang Jawa yang dikenal sebagai masyarakat dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Etnis Aceh dan Batak yang muncul belakangan lebih banyiak bekerja pada sektor-sektor yang belum tergarap dengan maksimal. Orang Aceh banyak berdagang Pupuk, disebabkan karena distribusi pupuk di Propinsi Bengkulu dikuasi oleh etnis Aceh. Sedangkan Etnis Batak tidak memiliki spesifik, hampir segala aspek perdagangan di Pasar Kepahiang mereka juga terlibat walaupun dalam jumlah yang masih terbatas. Lazimnya pasarnya pasar tradisional umumnya orang-orang yang terlibat sebagai pedagang di Pasar Kepahiang adalah pekerja sektor informal.<sup>74</sup>

Cerita di atas menjelaskan bahwa yang telah terjadi pergesaran tentang orang-orang yang terlibat menjadi pedagang di Pasar Kepahiang. Pada tahun 1950-an, hamper 90 % pedagang berasal dari etnis Minang. Namun saat ini seluruh etnis yang terdapat di Kepahiang, telah memanfaatkan pasar sebagai tempat berusaha. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya aktifitas ekonomi di Pasar dan terbatasnya jumlah tanah yang dimiliki sehingga sebagai orang harus mencari pekerjaan lain untuk mempertahankan hidup mereka.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ismail ketua Serikat Dagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ismail ketua Serikat Dagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ismail ketua Serikat Dagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

Kelompok berikutnya yang menjadi bagian terpenting dalam sistem kehidupan masyarakat di Kepahiang adalah produsen<sup>75</sup>. Produsen merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan eksistensi dari pasar Kepahiang. Produsen yang bertugas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu komoditas yang bisa dihasilkan oleh masyarakat Kepahiang itu sendiri seperti Sayur-mayur. Di samping itu ada juga komoditi yang harus didatangkan dari kawasan lain di Kepahiang seperti tekstil, klontong dan lain-lain. Kajian dan penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa jalur yang digunakan oleh pedagang Kepahiang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan ini mengalami pergeseran hal ini terkait dengan terbukanya akses jalan dari dan ke Kepahiang.

Di sisi lain, terbatasnya sumber daya manusia dan alam menyebabkan sebagian besar barang yang dipergunakan oleh masyarakat Kepahiang dikirim dari luar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kepahiang termasuk wilayah yang prospek bagi para pedagang. Komoditi utama yang dihasilkan oleh masyarakat Kepahiang adalah kopi dan teh yang lebih banyak dijual untuk kebutuhan masyarakat di luar Kepahiang. Bagi pedagang dan produsen masa panen kopi merupakan puncak transaksi ekonomi di Kepahiang

Pada masa penjajahan Belanda jalur yang digunakan ke Bengkulu dan Kepahiang adalah dengan kapal laut dan kereta api. Melalui laut pasti masuk lewat Kota Bengkulu, jika jalur kereta api masuk lewat Lubuk Linggau. Pada masa ini juga telah terdapat pedagang dari kawasan sekitar Kepahiang seperti orang Pasemah dan Lintang. Jalur masuk barang mengalami perkembangan ketika akses jalan darat semakin bagus dengan dibukanya jalur barang dari Bukittinggi dan Jakarta untuk memperkuat jalur yang telah ada. Kondisi ini berlangsung sampai saat ini, tidak jarang pedagang Kepahiang yang membeli barang langsung ke Jakarta dan Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

---

<sup>75</sup> Produsen yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang / kelompok yang menghasilkan sebuah komoditi atau barang atau orang yang bertindak sebagai pedagang penghubung yang membawa sebuah barang dari pihak penghasil barang

## JALUR MASUK KOMODITI DARI LUAR KEPAHIANG :

### Masa Penjajahan Belanda

Tapak Padri → Bengkulu → Kepahiang (Jalur Laut)  
Palembang/Tanjungkarang → Lubuk Linggau → Kepahiang (Kereta Api)

### Masa Orde Lama s.d 1975

Tapak Padri → Bengkulu → Curup → Kepahiang (Jalur Laut)  
Palembang/Tanjungkarang → Lubuk Linggau → Curup Kepahiang (Kereta Api/Darat)

### Masa 1975 s.d 2004

Bengkulu → Curup → Kepahiang (Jalur Laut)  
Palembang/Tanjungkarang → Lubuk Linggau → Curup →  
Kepahiang (Kereta Api/Darat)  
Jakarta / Bukittinggi → Lubuk Linggau → Curup →  
Kepahiang ( jalur Darat)

### 2004 s.d 2011

Bengkulu → Kepahiang  
Palembang → Lubuk Linggau → Kepahiang  
Jakarta / Bukittinggi → Lubuk Linggau → Kepahiang

Bagan di atas menjelaskan bahwa jalur distribus dan masuknya sebuah komoditi ke Pasar Kepahiang mengalami perubahan berdasarkan waktu dan sistem pemerintahan yang berlangsung dikawasan tersebut. Ketika mereka menjadi ibukota Afdeling Rejang Lebong maka jalur masuk barang ke kawasan ini lebih banyak dari Bengkulu sebab laut merupakan jalur terpenting dalam sistem perdagangan saat itu. Pada tahun 1911<sup>76</sup>, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Tanjungkarang, Kertapati, Lubuk Linggau dan Kota Padang yang merupakan bagian dari Afdeling Rejang Lebong. Kondisi ini memungkinkan terbukanya akses masuk barang ke Kepahiang selain dari dari Kota Bengkulu.

Jalur distribusi barang ke Pasar Kepahiang mengalami perubahan ketika pemerintah menetapkan ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari Kepahiang ke Curup. Kondisi ini dengan sendirinya

---

<sup>76</sup> -----, *Sejarah Kereta Api di Kertapati-Tanjungkarang* ditulis tanggal 24 Februari 2009 diambil dari [www.dardela.com](http://www.dardela.com) pada tanggal 1 Desember 2011

memberikan perubahan terhadap masuknya barang ke Kepahiang. Ketika menjadi ibukota kabupaten seluruh barang langsung ke Kepahiang. Namun ketika Curup berkembang menjadi sebuah kota, hampir seluruh barang dalam skala besar harus ke Curup baru Kepahiang. Jalur yang digunakan adalah jalur laut dan jalur keretaapi. Pada tahun 1973, pemerintah membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan seluruh kota di Sumatera ke Jawa. Kondisi ini dengan sendirinya membawa dampak terhadap jalur masuk barang ke Kepahiang yang telah memanfaatkan jalur darat.

Periode ini merupakan babak baru dari jalur masuk barang ke Kepahiang yang pada awalnya hanya keretaapi dan laut. Mulai saat itu, tidak sedikit pedagang dari kepahiang yang langsung belanja ke Palembang, Jakarta dan Bukittinggi untuk membeli barang secara langsung ke produsen. Jika selama ini kebanyakan dari pedagang di Kepahiang hanya menanti kiriman barang dengan terbukanya jalur ini mereka langsung membeli barang ke pusat produksi barang.

Data di atas menjelaskan bahwa terjadi pergeseran tentang jalur masuk barang ke Kepahiang. Perubahan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan kedudukan Kepahiang, ketika mereka menjadi pusat pemerintahan maka seluruh barang untuk kebutuhan afdeling Rejang Lebong berkumpul di Kepahiang. Kondisi yang sama kembali terjadi ketika Kepahiang menjadi ibukota kabupaten seluruh barang kebutuhan kabupaten berkumpul di Kepahiang. Perubahan lain yang terjadi adalah terbukanya akses masyarakat / pedagang di Kepahiang untuk membeli barang langsung ke produsen. Kondisi ini terjadi ketika jalur darat dan udara yang menghubungkan Kepahiang dengan sentra produksi barang semakin lancar. Ketika jalur darat dan udara belum optimal, satu-satu jalur adalah laut dan keretaapi, setelah itu dibawa dengan kuda beban ke Kepahiang.

Bagian terakhir dalam pelaku pasar adalah konsumen. Konsumen yang memanfaatkan pasar kepahiang juga mengalami perkembangan dan pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman. Pasca berpindahnya ibukota kabupaten Rejang Lebong dari Kepahiang ke Curup. Fungsi dan peranan pasar Kepahiang lebih banyak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan Kepahiang. Pada tahun 1965 pemerintah merencanakan membangun sebuah pusat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kepahiang. proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 1981, tahap 1 bisa selesai pada tahun 1991. Pembangunan yang dilaksanakan di Kepahiang dengan sendirinya membawa dampak terhadap jumlah orang yang berdiam di Kepahiang.

Pertambahan jumlah penduduk dengan sendirinya berdampak terhadap aktifitas yang berlangsung di pasar. Semakin bertambahnya

jumlah penduduk dengan sendirinya bertambah jumlah konsumen yang menjadikan pasar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan hari pasar kepahiang mengalami pergeseran dari dua kali seminggu menjadi setiap hari. Perubahan ini lebih disebabkan oleh karena bertambahnya jumlah konsumen di pasar Kepahiang dan pola perilaku konsumen di Pasar Kepahiang. Pada awalnya orang yang melakukan transaksi di Pasar Kepahiang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian berkembang untuk kepentingan toko atau warung, berkembang menjadikan pasar kepahiang untuk menjadi tempat berkumpulnya pedagang perantara yaitu orang yang membeli suatu jenis komoditi kemudian barang tersebut dijual kembali pada hari yang sama.

Pertambahan jumlah konsumen di pasar Kepahiang, semakin meningkat ketika pasar ini mengalami perubahan status dari pasar kecamatan menjadi pasar kabupaten. Perubahan ini memberikan dampak terhadap pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi di Pasar, ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong pasar hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepahiang. Ketika menjadi pasar ibukota kabupaten, pasar berubah fungsi menjadi tempat pedagang yang berjualan di *kalangan* sekitar Kepahiang untuk membeli barang dan diperjualbelikan lagi di kalangan.

## 2. Kelompok Pendukung

Aktivitas masyarakat di pasar ternyata tidak hanya dijalani oleh pedagang, konsumen dan produsen. Ada juga kelompok orang yang menjadikan pasar sebagai sarana untuk mempertahankan hidup mereka, walaupun secara prinsip mereka bukanlah kelompok pedagang maupun produsen. Yang tergabung dalam kelompok ini adalah sopir angkot, ojek, becak, parkir, petugas beo, buruh, kebersihan, penjaga keamanan dan lain-lain. Fokus kajian yang diungkapkan pada bagian ini adalah tukang beo, tukang becak, penjaga keamanan dan Petugas Kebersihan.

### Petugas Distribusi

Petugas distribusi merupakan orang yang mendapat perintah dan mandat dari pihak yang berkuasa untuk mengumpulkan uang dari para pedagang yang memanfaatkan pasar sebagai tempat melakukan transaksi. Kehadiran petugas ini memberikan kemudahan bagi pihak berkuasa untuk mengelola keuangan sebuah pasar. Menarik untuk menjelaskan tentang bagaimana perubahan yang terjadi dalam pengelolaan uang yang terdapat di dalam pasar kepahiang. Memhicarakan tentang petugas distribusi pasar, berarti kembali

membicarakan tentang bagaimana pengelolaan pasar Kepahing. Pada zaman Kolonial Belanda yang bertindak sebagai pengelola pasar adalah Datuk Pasar sebuah jabatan yang mulai dikenal bersama dengan system *pasirah* jabatan ini diwariskan secara turun temurun. Datuk Pasar dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh petugas yang bertugas untuk mengambil pajak kepada para pedagang yang melakukan transaksi di Pasar Kepahiang. Terbatasnya data yang dimiliki menyebabkan sulit untuk menjelaskan bagaimana perilaku petugas pengambil distribusi masa penjajahan Belanda dan beberapa besar distribusi yang harus dibayar pedagang kepada Datuk Pasar. Namun bisa dipastikan pada masa tersebut telah ada orang yang bertindak mengumpulkan distribusi atau upeti.

Besaran distribusi yang harus dibayarkan pedagang kepada petugas baru bisa diungkapkan mula tahun 1950, sebagaimana diungkapkan oleh Bakaruddin seorang pedagang yang telah berdagang di Pasar Kepahiang semenjak tahun 1952, beliau menjelaskan bahwa uang yang harus dibayar adalah 1 – 3 sen. Perubahan terhadap pengelolaan pasar terjadi pada tahun 1960, ketika jabatan Datuk Pasar tidak lagi diwariskan turun temurun namun berdasarkan hasil pemilihan dari para pedagang untuk menentukan siapa yang akan mengelola pasar.<sup>77</sup> Semenjak zaman Belanda sampai tahun 1960-an, distribusi yang dibayarkan oleh para pedagang memberikan rasa aman pada para pedagang untuk melakukan transaksi dan terjaganya kebersihan pasar berdasarkan ukuran masyarakat saat itu.

Pengelolaan pasar mengalami perubahan ketika eksistensi dan keberadaan Kabupaten Rejang Lebong semakin kuat. Pasar dipandang sebagai sebuah potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga terjadi perubahan terhadap pengelolaan pasar. Jika selama ini pengelolaan pasar lebih banyak berputar ditangan para pengelola pasar, hanya sebagai kecil yang diserahkan kepada pihak berkuasa. Namun semenjak tahun 1970-an, ketika pemerintah melakukan renovasi terhadap fasilitas yang terdapat di pasar Kepahiang maka pemerintah mulai menetapkan distribusi yang telah ditetapkan jumlah dan besarnya. Teorinya semua uang yang dihasilkan diserahkan kepada pemerintah, kondisi ini menyebabkan para pedagang harus membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Serikat Dagang (SD) yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kebersihan pasar.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bakaruddin pedagang tahun 50-an di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011



Pengoptimalan peranan petugas distribusi di pasar Kepahiang semakin nyata setelah pasar berubah dari pasar kecamatan menjadi pasar Kabupaten. Kebijakan ini diambil untuk menjadikan aktifitas pasar sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang. Untuk itulah pemerintah mendirikan sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar yang berada dibawah Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda). Wawancara yang dilakukan dengan Plh. UPTD Pasar Kepahiang menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan bahwa dari distribusi Pasar Kepahiang diharapkan menghasilkan uang untuk PAD kabupaten sebesar 60 Juta Pertahunan. Untuk itu pemerintah melalui UPTD menunjuk seorang petugas distribusi untuk mengumpulkan distribusi dari para pedagang.

Wawancara yang dilakukan dengan petugas distribusi menjelaskan bahwa jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Kepahiang berjumlah 200 – 400 orang yang berdagang di dua tempat yaitu di pasar pagi yang buka dari jam 4.00 – 7.00 Wib dan pasar utama yang buka dari jam 8.00 – selesai. Masing-masing pedagang yang berjualan dikenakan biaya distribusi Rp. 1.000,- sedangkan bagi pedagang yang berjualan pagi dan siang hari mereka cukup membayar satu kali.<sup>78</sup> Pedagang yang dikenakan distribusi hanyalah pedagang yang tidak memiliki toko, sebab para pemilik toko dikenakan biaya perbulan.

### **Tukang Becak**

Komponen lainnya yang mendukung keberhasilan dan kenyamanan masyarakat melakukan transaksi di pasar Kepahiang adalah tukang becak. Becak pertama kali muncul di kepahiang pada tahun 1990-an, seiring dengan berkembangnya Pasar Kepahiang dari pasar yang dua kali seminggu menjadi pasar tiap hari. Kondisi ini menyebabkan aktifitas masyarakat yang memanfaatkan pasar menjadi lebih banyak. Potensi ini dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk membuka lapangan pekerja baru yaitu sebagai tukang becak. Menariknya orang yang bekerja menjadi tukang becak ternyata melibatkan hampir semua etnis di Kepahiang seperti orang Jawa, Sunda, Rejang dan Minang.

Umumnya orang yang bekerja sebagai tukang becak adalah orang yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan areal perkebunan sehingga mereka harus menjadi tukang becak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keberadaan tukang becak pada fase awal sangatlah menjanjikan sebagai sumber mata pencaharian baru, sebab jumlah mereka yang

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ajo Abbas petugas Beo Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

masih terbatas dan belum menjamurnya sepeda motor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Darman seorang penarik becak dari etnis minang yang mulai menjadi tukang becak pada tahun 1995, ketika usaha berdagang makan-makan kecil selalu merugi, disisi lain kebutuhan keluarga semakin bertambah seiring bertambahnya anak. Ketika itu dia memperhatikan aktifitas pasar yang berlangsung setiap hari dan alat transportasi yang masih terbatas menyebabkan banyak masyarakat menuju pasar harus berjalan kaki, kondisi ini menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian.

Keuntungan utama dari becak adalah mampu membawa barang dalam jumlah banyak. Sehingga becak dimanfaatkan oleh konsumen pasar yang membeli barang dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan kebanyakan becak yang beroperasi di Pasar Kepahiang telah memiliki langganan yang harus mereka layani setiap pagi yaitu para pemilik kedai nasi / warung dan pedagang perantara / toke yang datang ke pasar dengan tujuan membeli barang dalam jumlah besar. Sedangkan kedudukan becak untuk membawa penumpang telah mulai tergantikan dengan menjemurnya sepeda motor dalam jumlah besar

Penghasilan yang didapat tukang becak sangat tergantung dengan jumlah orang yang bisa dibawa dalam satu hari dan banyaknya langganan yang harus mereka bawa. Sebab disamping pedagang kebanyakan becak juga dimanfaatkan oleh para orang tua untuk mengantar dan menjemput anaknya dari dan ke sekolah. Dulu sebelum adanya sepeda motor, seorang tukang becak bisa menghasilkan uang paling kurang Rp. 60.000,- sehari. Pendapatan mereka semakin meningkat ketika hari pasar dan musim panen kopi penghasilan mereka semakin meningkat karena jumlah orang ke pasar. Kondisi ini jauh berbeda ketika sepeda motor telah dimiliki hampir seluruh rumah tangga di Kepahiang, sehingga orang yang memanfaatkan becak menjadi terbatas hanya para pedagang dan toke sedangkan kelompok masyarakat lainnya telah beralih ke ojek sepeda motor atau naik motor sendiri.

### **Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan**

Dua kelompok ini merupakan komponen penting dalam sebuah pasar. Petugas keamanan memberi rasa aman kepada pedagang sedangkan petugas kebersihan menjaga keindahan pasar dan rasa nyaman bagi pedagang dan konsumen. Keberadaan kedua kelompok ini telah berlangsung lama seiring dengan keberadaan pasar, namun keberadaan mereka pada tahap-tahap awal melekat pada pengelola pasar. Sebab ketika Datuk Pasar terbentuk salah satu syarat yang harus

dimiliki oleh Datuk Pasar adalah orang yang ditakuti oleh masyarakat di dalam pasar. Sebagaimana diungkapkan oleh Bakaruddin yang menyatakan bahwa ketika dia berjualan di Pasar Kepahiang yang menjadi Datuk Pasar adalah orang Pelembang yang sangat ditakuti oleh orang di pasar kondisi ini dengan sendirinya memberikan rasa aman kepada pedagang yang telah membayar distribusi kepada Datuk Pasar.

Pada masa tersebut orang yang bertugas untuk membersihkan pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Datuk Pasar. Mereka mulai membersihkan pasar setelah hari pasar yang terjadi, pasar hari sabtu petugas akan membersihkan pada hari minggu dan pasar senin mereka membersihkan pada hari selasa. Pada tahun 1970, pasca pemerintah melakukan renovasi terhadap pasar, pengelolaan pasar beralih dari Datuk Pasar kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk mengumpulkan distribusi kepada para pedagang, maka sistim keamanan dan kebersihan pasar menjadi tanggung jawab dari para pedagang. Untuk itulah organisasi Serikat Dagang (SD) yang merupakan kumpulan dari para pedagang yang terdapat di Pasar Kepahiang mengambilalih untuk menjaga keamanan dan kebersihan pasar.

Serikat Dagang menunjuk 3 orang pemuda Kepahiang untuk menjaga keamanan di pasar kepahiang. Sedangkan untuk kebersihan SD menunjuk 4 orang untuk membersihkan pasar setelah hari pasar berlangsung. Semua pembiayaan untuk petugas keamanan dan kebersihan berasal dari iuran yang dibayar oleh para pedagang ke SD. Perkembangan zaman menyebabkan besaran iuran yang harus dikeluarkan oleh para pedagang untuk membiaya keamaan dan kebersihan semakin meningkatkan untuk tahun 2010 para pedagang dikenakan biaya Rp. 3.000, s.d 11.000,-/perbulan untuk biaya keamanan. Pembagian biaya ini didasarkan dari bentuk dan luas toko yang dimiliki oleh para pedagang sedangkan untuk biaya kebersihan Rp.7000,-. Biaya ini khusus untuk pedagang yang memiliki toko atau kedai sedangkan pedagang yang tidak memiliki toko cukup membayar uang kebersihan Rp.500,- setiap mereka berdagang.<sup>79</sup>

Kebijakan untuk menaikkan biaya keamanan yang dilakukan oleh SD juga berdampak kepada bentuk dan pelayanan yang diberikan oleh petugas keamaan dan kebersihan. Semenjak tahun 2010, setiap petugas keamanan telah memiliki baju seragam sehingga keberadaan mereka mudah dikenal oleh masyarakat lain. Sedangkan untuk uang kebersihan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ismail ketua Serikat Dagang Pasar Kepahiang di Kepahiang Pada tanggal 10 Agustus 2011

langsung diambil oleh Dinas Kebersihan sebab petugas yang bekerja untuk membersihkan pasar adalah orang yang digaji oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Wawancara yang dilakukan dengan ketua SD menyebutkan saat dalam satu bulan organisasi yang dipimpinnya mendapatkan dana lebih kurang Rp. 7.500.000,- yang digunakan untuk membayar 4 orang satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan kapar dan sisinya digunakan untuk kebutuhan organisasi.

### **3. Strategi Pengembangan Pasar**

Aspek Kebijakan Pemerintah dan mengoptimalkan orang-orang yang terdapat di pasar merupakan sesuatu yang urgen dalam pengembangan pasar pada saat ini. Melihat kondisi dan daya dukung Pasar Kepahiang saat ini sudah menampung jumlah pedagang. Namun hal ini harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai serta didukung dengan produk tata ruang yang baik, perangkat hukum berupa peraturan daerah serta itikad baik dari semua pihak untuk dapat mentaati produk tata ruang dan perangkat umum yang sudah ada. Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah seharusnya masyarakat dapat diikutsertakan secara lebih aktif lagi. Berikut adalah beberapa faktor yang harus dilakukan dalam mengoptimal pasar Kepahiang.

Pelibatan masyarakat secara lebih aktif sudah harus dilihat sebagai sesuatu keharusan dalam proses pembangunan. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembangunan seperti yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah yaitu melalui musyawarah pembangunan desa/kelurahan masih perlu didukung lagi dengan pertemuan-pertemuan yang lebih spesifik membahas tentang suatu rencana kegiatan pembangunan. Selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan khususnya dalam pengembangan pasar kepahiang.

Bangunan pasar (los dan kios) serta sistem penunjang seperti kamar mandi/WC dan tempat pembuangan sampah yang ada di Pasar sudah cukup memadai, namun belum ditunjang dengan system utilitas yang baik seperti jaringan air bersih, listrik dan telepon. Air yang merupakan kebutuhan paling vital bagi pedagang masih belum tersedia, sehingga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebersihan pasar tidak bisa dipertahankan secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus mengeluarkan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 112/2007 yang menyebutkan bahwa pasar tradisional berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jalan lokal atau jalan lingkungan pada

pelayanan bagian kabupaten/kota atau lokal, namun bukan lingkungan perumahan di dalam kabupaten/kota. Dengan diterbitkannya Perpres No. 112/2007 tersebut, peraturan zonasi yang disebutkan didalamnya akan menguntungkan keberadaan pasar tradisional. Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membuat tata ruang dan pembagian zona di dalam pasar Kepahiang. Untuk itu pemerintah mencoba melengkapi sarana dan prasarana yang terdapat di pasar Kepahiang. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan baru di dalam dan sekitar pasar kepahiang. Namun bangunan tersebut belum mampu secara optimal untuk meningkatkan fungsi dari pasar.

Kebijakan kebijakan yang selama ini telah disusun oleh pemerintah harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kita berharap, Pasar Kepahiang tidak hanya pasar dalam konteks yang sederhana atau umum, namun pasar ini juga bisa menjadi ikon pariwisata di Kepahiang. Sebab Kepahiang dikenal sebagai sebuah kawasan yang memiliki keindahan alam dan udara yang sejuk sehingga potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Semua bisa terwujud jika seluruh pihak yang terlibat dalam pasar mampu memainkan peranan dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pasar dalam setiap masyarakat dikenali dan diistilahkan berbeda-beda sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat yang bersangkutan. Orang Jawa menyebut dengan *peken atau pasar*, orang Minangkabau menyebutnya dengan *pasar, pasa atau balai*, dan sebagainya. Sementara di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Maluku dan Manado, disebut dengan istilah *pasar*. Dalam kehidupan masyarakat di Bengkulu dan Kepahiang khususnya istilah yang digunakan adalah *Kalangan*.

Perkembangan *Kalangan* di Kepahiang terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan pusat-pusat pemukiman baru di Kepahiang. Berbicara tentang perkembangan pusat-pusat pemukiman baru tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem pemerintah di Kepahiang. Sebelum menjadi kabupaten tersendiri, Kepahiang merupakan salah satu nama kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu jumlah *Kalangan* di Kecamatan Kepahiang hanya satu buah. Pada tahun 2004, Kepahiang yang mengalami perkembangan dari nama kecamatan menjadi nama kabupaten, maka saat itu jumlah *Kalangan* di kabupaten Kepahiang berkembang berdasarkan jumlah kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Kehadiran *Kalangan* di Kepahiang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan kehidupan masyarakat di kawasan ini. Pada tahun 1904, pemerintah Kolonial Belanda melakukan perluasan daerah kekuasaan hingga ke wilayah pedalaman Bengkulu, hal ini ditandai dengan dibukanya wilayah perkebunan dan pertambangan di afdeling Rejang Lebong. Bakarudin salah seorang pedagang yang telah berdagang semenjak tahun 1950 di kawasan ini menjelaskan bahwa ketika beliau datang ke kawasan ini bangunan yang dihuni dan ditempati sebagai lokasi berdagang tertulis tahun 1927. Informasi di atas semakin mempertegas bahwa semenjak tahun 1927 pemerintah kolonial Belanda telah memfasilitasi sebuah bangunan untuk kepentingan *Kalangan* di Kepahiang. Apalagi pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Kepahiang menjadi ibukota keresidenan dengan pertimbangan wilayah ini merupakan jalur transportasi yang menghubungkan dengan wilayah pedalaman seperti ke Lebong, Pagaralam yang saat itu telah mulai dieksplotasi Belanda sebagai wilayah perkebunan dan tambang.

Sejarah perjalanan Pasar Kepahiang yang telah begitu lama menyebabkan dinamika masyarakat yang terlibat sebagai produsen, konsumen dan pedagang di Pasar Kepahiang juga berbeda dari masa ke masa. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat yang terlibat sebagai produsen langsung sebagai pedagang sebab barang yang diperjualbelikan lebih banyak komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada masa penjajahan di Pasar Kepahiang telah terdapat pedagang yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Terbatasnya data yang dimiliki tentang bagaimana dinamika masyarakat di Pasar Kepahiang pada masa penjajahan Belanda menyebabkan sulit untuk mengungkapkan aktifitas pelaku pasar pada masa tersebut.

Data dan informasi tentang siapa-siapa yang menjadi pelaku di Pasar Kepahiang, terutama yang bertindak sebagai pedagang baru bisa diungkap dengan cukup jelas setelah masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari cerita yang disampaikan oleh Bakaruddin seorang pedagang yang telah berjualan di Pasar Kepahiang semenjak tahun 1950. Pada awal kedatangan di Kepahiang, hampir 90% pedagang yang terlibat di pasar Kepahiang merupakan orang Minang. kondisi tersebut berlangsung sampai tahun 1990-an. Setelah periode ini populasi orang minang yang berdagang di pasar Kepahiang terus berkurang, bahkan pada tahun 2010 jumlah pedagang minang di Kepahiang berjumlah 60%.

Pasar Kepahiang saat ini berkembang menjadi pusat aktifitas ekonomi di Kabupaten Kepahiang. Kondisi ini terlihat dari hari pasar

yang berlangsung setiap hari, jumlah orang yang menjadikan pasar sebagai sumber kehidupan bertambah banyak. Proses masuknya barang ke pasar juga mengalami perubahan, sebelumnya barang terlebih dahulu ke Curup atau ke Kota Bengkulu, namun saat ini kebanyakan pedagang di Kepahiang telah langsung membeli barang tersebut ke tangan produsen.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencoba mengoptimalkan Pasar Kepahiang dalam kerangka tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu caranya adalah membangun Pasar Kepahiang menjadi representative. Perencanaan Tata Ruang wilayah merupakan suatu upaya untuk merumuskan dan pemanfaatan ruang secara optimal. semenjak menjadi pasar ibukota kabupaten pembangunan sarana dan prasarana di Pasar Kepahiang giat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2004 pemerintah melalui Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melakukan perbaikan dan menambah fasilitas yang terdapat di Pasar Kepahiang. Usaha ini dilakukan dalam rangka menambah keindahan dan kenyamanan di dalam pasar Kepahiang.

Laporan ini menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan yang luar biasa di Pasar Kepahiang. Mulai dari fasilitas yang terdapat di dalam pasar, orang-orang yang terlibat di Pasar, baik sebagai pedagang dan pengelola. Pasar Kepahiang ternyata telah berdiri semenjak kaum Kolonial Belanda membuka kawasan tersebut sebagai lahan perkebunan teh dan kopi. Perubahan kebijakan juga berdampak kepada kedudukan Pasar Kepahiang, ketika Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten, maka status Pasar Kepahiang menjadi pasar kecamatan. Ketika menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, Pasar Kepahiang tidak mengalami perubahan yang berarti. Kondisi ini terjadi karena luasnya wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dana yang dimiliki tidak mampu menjangkau seluruh wilayahnya. Perubahan besar terjadi di Pasar Kepahiang, ketika Kepahiang berdiri sendiri menjadi kabupaten. Inilah babak baru dalam kehidupan masyarakat di Pasar Kepahiang, mereka mulai menikmati berbagai fasilitas dan sarana penunjang untuk kemajuan Pasar Kepahiang.

## **2. Saran**

Kepahiang merupakan sebuah kabupaten yang memiliki udara sejuk dan panorama alam yang sangat indah. Di samping itu Kepahiang terletak di jalur penghubung antara Kota Bengkulu dengan Lubuk Linggau dan Kota Bengkulu dengan Pagaralam atau Lahat. Kondisi ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di kawasan ini. Dalam konteks Pasar Kepahiang yang berada dipinggir jalan nasional, hal jelas sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Untuk itu diharapkan pemerintah harus melakukan berbagai langkah diantaranya :

1. Membangun sarana dan prasarana penunjang serta mengoptimalkan fungsi dari bangun-bangunan yang telah didirikan untuk menunjang keberadaan Pasar Kepahiang.
2. Adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan tata ruang yang ada di Pasar Kepahiang, observasi lapangan memperlihatkan bahwa tata ruang belum dilaksanakan secara optimal
3. Meningkatkan status Pasar Kepahiang dari pasar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Menjadi pasar yang berorientasi pada Pariwisata sebab Kepahiang memiliki potensi sebagai kawasan wisata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Suryadinata *Analisis Kritis Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Alternatif Solusinya*” Bogor : Institut Pertanian Bogor 2008
- BPS “*Monografi Kabupaten Kepahiang*” Beppeda : Kabupaten Kepahiang, 2009
- BPS “*Kabupaten Kepahiang dalam Angka tahun 2006*” Kepahiang : Kerjasama BPS Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang tahun 2007
- BPS “*Monografi Kabupaten Kepahiang tahun 2005*” Kepahiang : Kerjasama BPS Kabupaten Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang tahun 2006
- BPS “*Indikator Ekonomi Kabupaten Kepahiang tahun 2006*” Kepahiang : Kerjasama BPS Kabupaten Rejang Lebong dengan Beppeda Kabupaten Kepahiang
- Budi Soetedjo dkk (2003) *ICRM Membina Relasi dengan Pelanggan.Com.*” Yogyakarta: Andi,
- Depkop *Revitalisasi pasar tradisional dan peningkatan peran Koppas*  
Artikel diambil dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) pada tanggal 4 Juli 2011
- Djumantri “*Pasar Tradisional Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan*”
- Fitri, Novrita Andriana.1999. “*Analisis Sikap Konsumen Terhadap Atribut-Atribut Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional*”, **Jurnal Bisnis dan Akuntansi**. Vol I, no 3 (Desember).
- Lembaran Beritan Negara tentang Undang-undang No.39 Tahun 2003 yang menjelaskan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kepahiang hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong.
- Lindayanti Kuli *Kontrak Menjadi Penduduk Bengkulu : Sejarah Bengkulu 1908-1941* diambil dari [adimarhaen.multiply.com](http://adimarhaen.multiply.com)
- Lindayanti “*Perekonomian Bengkulu : Sejarah Bengkulu 1908-1941*” diambil dari [http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show\\_interstitia](http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/103?&show_interstitia)
- Nursyirwan Effendi *Keberadaan dan Fungsi Pasar Tradisional* diambil dari [http:// www .simpopdf .com](http://www.simpopdf.com)
- Nugroho Notosusanto (1984), *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press.

- Rahmat Widiyanto (2008) *"Indonesia Culture"* Jakarta : Elex Media Komputindo, hlm 9
- Richard McGinn *"Asal Bahasa Rejang"* Ohio University
- Sudarman, A. 1989. *Teori Ekonomi Mikro*. BFE. Yogyakarta. Hlm 27
- Turita Indah Setyani *"Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa"* Makalah yang disajikan pada: Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia Di Yogyakarta Sabtu-Minggu, 8-9 Agustus 2009 Oleh: Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diambil [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_1995.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf) pada hari jum'at 17 Juni 2011
- Undang-undang No 39 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di ambil dari [www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl22131/parent/17875](http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl22131/parent/17875)
- *"Sejarah Ringkas Kabupaten Kepahiang (catatan ringkas)"*  
Kepahiang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang

### BAB III

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHLANG DI PROVINSI BENGKULU<sup>1</sup>

Ajisman<sup>2</sup>

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Semenjak Undang-undang otonomi diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pada era reformasi, kebebasan berekspresi semakin terjamin guna diapresiasi dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah keinginan berbagai elit daerah untuk memekarkan wilayah kabupaten dan kota untuk menjadi beberapa kabupaten dan kota, dapat diwujudkan, asal sesuai dengan aturan pemekaran wilayah. Sehingga di era reformasi ini, bermunculan wilayah-wilayah kabupaten baru, dengan nama-nama baru pula yang diambil dari salah satu identitas budaya dan sejarah dari daerah yang dimekarkan.<sup>3</sup>

Pada masa Orde Baru, pemekaran pertama terjadi pada tahun 1967 yang ditandai dengan berdirinya Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan.<sup>4</sup> tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Pada tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 Provinsi, dimana dua diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta) dan satu berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Tahun 1975, Timor Timur, yang sebelumnya merupakan jajahan Portugis, berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2011.

<sup>2</sup> Peneliti Madya pada BPSNT Padang

<sup>3</sup> Zusneli Zubir dkk. Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan: Kabupaten Seluma dari Wacana Hingga Realita 2003-2007. Laporan Penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang 2008 hlm. 1

<sup>4</sup> Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1967 yang meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayah 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (Ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Lihat Abdullah Siddik, Sejarah Bengkulu 1500-1990 (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 170-172.

<sup>5</sup> Syahda Gunuh Langkah Samudra. *"Menimbang Otonomi VS Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia"*. Bandung: PT. Renaja Rosdakarya, 2000. hlm. 109.

Berakhirnya Orde Baru ditanda dengan lahirnya Orde Reformasi pada tahun 1998, lahirnya UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah yang luar biasa di Indonesia. Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, sehingga Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Setelah itu muncul tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran Provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 dimulai pada tanggal 4 Oktober 1999 dengan lahirnya Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Ternate yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27. Pada tanggal 17 Oktober 2000 lahir provinsi Banten dengan ibukota Serang, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28. Pada tanggal 4 Desember 2000 lahir Provinsi Bangka-Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-29. Pada tanggal 22 Desember 2002 lahir Provinsi Gorontalo dengan ibukota Gorontalo, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi utara, menjadi provinsi ke-30. Pada tanggal 11 November 2001, lahir Provinsi Irian Jaya Barat kemudian berganti nama Papua Barat) dengan ibukota Monokwari, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, menjadi provinsi ke-31. Pada tanggal 25 Oktober 2002 lahir Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjungpinang, yang merupakan pemekaran dari provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32. Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2004 lahir Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke 33.<sup>6</sup>

Pemekaran daerah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyanggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.<sup>7</sup>

Pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> Zuzneli Zubir dkk, *Op. Cit*, hlm.4

<sup>7</sup> Rozalli Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 16-17.

Pemerintah Daerah. Provinsi Bengkulu yang semula hanya terdiri dari tiga kabupaten (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong), dan satu kotamadya (Kotamadya Bengkulu), setelah dimekarkan menjadi sembilan kabupaten dan satu kota otonom. Kabupaten baru hasil pemekaran adalah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>8</sup>

Zaman perjuangan melawan Kolonial Belanda menjadi sejarah dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah 3,5 tahun lamanya, kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 18 Agustus 1945, seluruh kekuatan perjuangan yang terdiri dari Lasykar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat yang kemudian sebagai cikal bakal TNI semuanya berpusat di Kepahiang.<sup>9</sup>

Pada akhir tahun 1948, merupakan masa yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat Kepahiang. Pada tahun itu, menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas di kota Kepahiang seperti kantor bupati, gedung daerah kantor polisi, kantor pos dan telepon, penjarah dan jembatan yang menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat lainnya, terpaksa dibakar dan dibumi hanguskan.<sup>10</sup>

Setahun kemudian, 1949 seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan. Pada saat itu terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke kota, pada saat itu terjadilah keharuan yang sulit dibendung. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tidak lagi dapat berkantor ke kota Kepahiang, karena seluruh fasilitas pemerintahan daerah telah dibumi hanguskan.<sup>11</sup> Tahun 1956

---

<sup>8</sup> Zusneli Zubir dkk, *Op. Cit.* hlm3

<sup>9</sup> Catatan, Nur Arifin, "Masa Pendudukan Belanda Hingga Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Tanah Rejang", 1976. Nur Arifin salah seorang tokoh BPRI dan yang membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan untuk kota Curup dan sekitarnya.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Konon menurut ceritanya para aparatur pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, berkantor di sebuah gedung di Curup. Tempat bersejarah itu oleh pemerintah daerah kota Curup dibangun tempat sarana olah raga kota Curup/ Gedung Olah Raga (GOR) kota Curup.

kota Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong. Sejak itu pulalah, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut “mahkota kejayaan Kabupaten Kepahiang telah hilang”. Dengan penetapan Curup sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Ketika era reformasi bergulir pada tahun 1998, Kepahiang merupakan daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran, namun saat itu Kabupaten Rejang Lebong tidak serta merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat Kepahiang tersebut. Dengan kata lain, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Kabupaten induk justru keberatan melepas Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kerjasama serta diplomasi yang intensif, akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan.

## **1. Perumusan Masalah**

Judul penelitian ini “Peranan Masyarakat Dalam Pembentukan Kabupaten Kepahiang”. Penekanan tulisan ini adalah mengenai proses lahirnya Kabupaten Kepahiang yang dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memberi peluang terjadinya pemekaran daerah. Masyarakat Kepahiang melihat undang-undang ini sebagai angin segar bagi keinginan mereka untuk memiliki pemeritahan sendiri dalam bentuk daerah otonom Kabupaten Kepahiang.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang salah satu diantaranya telah melahirkan Kabupaten Kepahiang. Untuk itu perlu diajukan beberapa pertanyaan yang sekaligus merupakan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Faktor-faktor apakah yang mendorong timbulnya keinginan untuk mendirikan Kabupaten Kepahiang sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong?
- b. Apakah peranan Masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang ?
- c. Siapakah Perintis/Penggagas Pemekaran ?

Adapun batasan spasial penelitian ini adalah Kabupaten Kepahiang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Batasan temporal tulisan ini adalah tahun 2000 sampai awal 2004 Tahun 2000 dijadikan sebagai batasan awal kajian dalam tulisan ini adalah

berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahun tersebutlah para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang, baik yang berdomisili di Kepahiang maupun yang berada di luar daerah, seperti Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkapkan proses terjadinya pembentukan Kabupaten Kepahiang, faktor-faktor pendorong munculnya keinginan masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Kepahiang dan peranan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang.

Adapun manfaat dari penelitian ini akan menambah khasanah historiografi lokal, khususnya yang berkaitan dengan penulisan sejarah sosial yang berkaitan dengan sejarah pembentukan kabupaten baru. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal dari studi yang mendalam tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang untuk masa yang akan datang.

## **3. Kerangka Konseptual**

Untuk membantu mengarahkan penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan yaitu konsep pemekaran wilayah, Otonomi Daerah, dan peranan masyarakat. Pemekaran berdasarkan kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Pe-mekar-an yang berarti proses menjadikan bertambah besar.<sup>12</sup> Pemekaran wilayah kabupaten berarti menambah jumlah wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi menjadi bertambah, sedangkan pemekaran provinsi berarti menjadikan jumlah provinsi dalam suatu Negara menjadi bertambah banyak. Pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu telah menyebabkan Provinsi Bengkulu yang semula hanya memiliki tiga kabupaten dan satu kota menjadi sembilan kabupaten dan satu kota.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan-pelayanan pemerintah, serta untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui (1) Optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia;

---

<sup>12</sup> Tim penyusun Kamus pusat pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm 642.

(2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya; (3) Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis; (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; (5) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan (6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.<sup>13</sup>

Konsep mengenai daerah Otonom dan Otonomi Daerah merupakan konsep-konsep yang juga hendak dijelaskan dalam tulisan ini untuk memudahkan dalam penulisan. Kata otonomi berasal dari kata sifat *autonomous* yang artinya (1) merdeka secara politik dan mengelola pemerintahan sendiri, (2) mampu mengambil keputusan dan bertindak sendiri secara bebas dan merdeka dari campur tangan pihak lain, dan (3) kondisi, perkembangan suatu organisasi yang mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas dan merdeka.<sup>14</sup>

Konsep otonomi dapat ditafsirkan sebagai kemerdekaan atau kebebasan bagi orang atau kelompok orang dalam mengambil keputusan dan menentukan corak perubahan-perubahan yang diinginkan. Otonomi daerah sebagai istilah politik pun bisa ditafsirkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berupa kewenangan yang lebih luas dalam mengurus sumber-sumber pembangunan. Sering disepadankan istilah otonomi daerah dengan desentralisasi.<sup>15</sup>

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, sama halnya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah meletakkan

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm. 642.

<sup>14</sup> Andri Novi Hendrato & Dani Wahyu Munggoro, *Panduan Menakar Otonomi Komunitas* (Jakarta: Yapikpa, 2002), hlm. 17

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 19



titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsepsi Hatta, mengemukakan bahwa apabila kita mau mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yang tertanam dalam pengertian “perintah dari yang diperintah”, maka sebaik-baiknya titik berat pemerintahan sendiri diletakkan pada kabupaten.<sup>17</sup>

Pemekaran suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru merupakan penjabaran prinsip ekonomi yang seluas-luasnya seperti dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga menjamin keserasian hubungan antara daerah dan daerah lain, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa suatu daerah otonom baru tidak dapat memisahkan diri dari daerah lain dan harus tetap peduli serta bersama-sama dengan daerah lain dalam menjahterakan masyarakat.<sup>18</sup>

Sementara peranan diartikan yang menunjukan pada seperangkat harapan dalam suatu interaksi antara seseorang yang menduduki suatu posisi dalam suatu kelompok dan orang lain yang menduduki posisi yang saling berkaitan. Dengan demikian tidak akan ada peranan seseorang tanpa diikuti oleh peranan orang lain. Berbicara masalah peranan sangat erat hubungannya dengan berbagai konsep antara lain tentang seseorang yang melakukan aksi (aktor) dan orang lain sebagai lawan aksi (*alters*). Dalam suatu interaksi ditentukan atas dasar saling keterkaitan peranan mereka masing-masing.<sup>19</sup>

Berbagai peranan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang dapat dirumuskan sebagai pengambil kebijakan dan sebagai pelaksana. Sebagai pengambil kebijakan berwujud sebagai kegiatan memikirkan bagaimana mengusahakan berbagai keperluan dalam pelaksanaan terwujudnya pembentukan Kabupaten Kepahiang. Dalam

---

<sup>17</sup> Rozali Abdullah, *Op. Cit.* hlm. 12

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 15

<sup>19</sup> *Ibid*

mensukseskan pembentukan Kabupaten Kepahiang, masyarakat sangat berperan dan berkerjasama untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

## 5. Metode

Sebagaimana penelitian tentang sejarah sosial, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan melakukan pendekatan sejarah dengan tinjauan masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Menurut Gillbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.<sup>20</sup> Louis Gottschalk, Dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa *metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau*<sup>21</sup>, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.

Mengingat konteks waktu penelitian ini sifatnya kontemporer, maka pendekatan sejarah lisan (*oral history*) menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Apalagi metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Melalui kerja lisan ini, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu,<sup>22</sup> hal ini jelas memberikan warna pada persepsi peneliti tentang masa lampau.

Pendekatan sejarah lisan dapat membantu dalam menjelaskan kontinuitas kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Kepahiang, yang meliputi empat tahap yaitu: pertama melakukan

---

<sup>20</sup> Gillbert J. Graghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press. 1984), hlm. 54-57. Lihat juga Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah", dalam Teuku Ibrahim Alfian, et al., (eds), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1992), hlm. 409-419.

<sup>21</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32

<sup>22</sup> Bambang Purwanto, ,*Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesia Sentris* dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta* Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarahwan Indonesia 2002), hlm.152.

pendataan dan survey para informan (pengkisah); kedua membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); Ketiga menghubungi informan; dan keempat melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.<sup>23</sup>

Guna memperoleh data lisan, keterangan dari pelaku sejarah dan saksi yang berdomisili di wilayah Kepahiang maupun di luar Kepahiang sangat diperlukan. Berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan dikritik kerelevansinya dengan pokok persoalan penelitian, dengan membandingkan dengan beberapa informan dan sumber lain yang menjelaskan topik yang sama, dengan maksud untuk meng-*crosscheck* apakah informasi yang diperoleh cukup valid atau tidak, termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan menghubungkan dan membandingkan antara beberapa sumber dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah.

Kemudian data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dikombinasikan pula dengan sumber primer tertulis yang ada yaitu arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh melalui catatan harian, Koran se-zaman, foto, dan memori para pelaku sejarah. Guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan sumber primer, digunakan sumber sekunder (bahan “tangan kedua”) yang diperoleh melalui instansi resmi, yaitu: Perpustakaan Daerah, Arsip Daerah. Dan Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

Fakta sejarah yang diperoleh baik dari lisa maupun tertulis diberi arti dan makna, kemudian dirangkaikan satu sama lainnya, sehingga menjadi suatu jalinan cerita yang sistematis. Penelitian ini dimaksud untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para stake holder, masyarakat tentang bagaimana peranan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang. Dari penelitian diharapkan pula muncul ide dan gagasan yang menyangkut tema penelitian dalam bentuk seminar dan diskusi.

## **B. KEPAHIANG SELAYANG PANDANG SEBELUM MENJADI KABUPATEN**

### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Kecamatan Kepahiang sebelum menjadi sebuah kabupaten adalah merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Rejang Lebong dengan status sebagai kecamatan induk. Sebelum menjadi kabupaten, Kecamatan Kepahiang terdiri dari satu kecamatan induk dan tiga

---

<sup>23</sup> *Ibid*

kecamatan perwakilan. Total jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Kepahiang tahun 1999 (sebelum menjadi Kabupaten) adalah 81 desa/kelurahan dengan rincian yaitu 3 kelurahan dan 78 desa. Jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan perwakilan adalah sebagai berikut: di kecamatan perwakilan Ujan Mas terdapat 19 desa, kecamatan perwakilan Tebat Karai terdapat 20 desa dan kecamatan perwakilan Bermani Ilir ada 21 desa.<sup>24</sup>

Secara geografis, wilayah Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'2" Bujur Timur (BT) dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan (LS). Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian di atas 250 meter sampai lebih dari 1.600 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam diatas 40 % terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kecamatan Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21 persen dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C.

Kecamatan Kepahiang dengan luas 70.475 Ha, sebagian besar tanah di Kecamatan Kepahiang adalah kompleks podsolik coklat, podsol dan lotosol serta bertekstur sedang serta 44,49% wilayahnya masih hutan. Letak Kecamatan Kepahiang sangat strategis karena berada di wilayah perlintasan antara Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Seluma (Sekarang Kabupaten Seluma) di Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebelah Timur dengan Kecamatan Ulu Musi Padang Tepong, Kabupaten Lahat, dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Kecamatan Kepahiang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di wilayah perlintasan antara Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan dan perlintasan beberapa kabupaten di Bengkulu. Situasi tersebut sangat berpotensi menjadikan Kecamatan Kepahiang menjadi daerah transit yang memungkinkan munculnya peluang usaha-usaha yang relevan seperti hotel, rumah makan dan restoran atau menjadi salah satu tempat pusat perdagangan yang mengakomodasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri dan daerah-

---

<sup>24</sup> Rejang Lebong Dalam Angka 1998, Badan Pusat Statistik Kab. Rejang Lebong dan Pemerintahan Daerah Tingkat II Rejang Lebong.

daerah sekitarnya. Dalam konteks yang lebih luas, posisi Kecamatan Kepahiang yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan membuka kemungkinan terjadinya kerjasama dan perdagangan regional yang lebih luas di masa mendatang.<sup>25</sup>

Lokasi Kecamatan Kepahiang yang terletak di daerah tropis mempunyai potensi untuk dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Selain itu kondisi iklim dan cuaca Kecamatan Kepahiang yang mempunyai curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan bulan basah selama 9 bulan, mengindikasikan bahwa Kecamatan Kepahiang termasuk kecamatan agraris dengan lahan basah yang banyak menghasilkan berbagai produk pertanian seperti kopi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kondisi yang demikian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Kepahiang untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian. Apabila dilihat dari luas wilayahnya terlihat Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir 30. 896 ha atau 43. 86 % dari total keseluruhan Kecamatan di Kepahiang. Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kepahiang yang merupakan Kecamatan induk yaitu 10. 277 ha atau 14. 58 %. Kecamatan Ujan Mas memiliki luas 15. 097 ha atau 21. 34 % . Kemudian disusul oleh Kecamatan Tebat Karai 14. 187 ha atau 21. 13 % dari luas keseluruhan Kecamatan di Kepahiang.

Jarak kota Kecamatan Kepahiang dengan desa yang terjauh sekitar 43 km dengan jarak tempuh lebih kurang 90 menit. Jarak dari ibu kota Kabupaten Rejang Lebong 25 km dengan waktu tempuh selama 45 menit. Sedangkan jarak ibu kota Kecamatan Kepahiang ke ibu kota Provinsi adalah lebih kurang 60 km, dengan waktu tempuh selama 1,5 jam, dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Jika kita naik mobil dari ibu kota Kabupaten Rejang Lebong ke ibu kota Kecamatan Kepahiang, maka kita akan melintasi kebun kopi yang begitu luas di kiri kanan jalan. Perkebunan kopi merupakan andalan terbesar dari Kecamatan Kepahiang.

## **2. Penduduk**

Kecamatan Kepahiang sebagian besar penduduknya adalah suku bangsa Rejang. Menurut sejarahnya suku bangsa Rejang pada mulanya hidup mengembara dan dalam kelompok yang kecil di sekitar daerah Lebong yang luas. Mereka hidup dari hasil hutan yang subur dan mengambil ikan dari Sungai Ketahun dan sungai-sungai kecil lainnya.

---

<sup>25</sup> Monografi Kabupaten Kepahiang 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Ketika itu mereka hidup berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan.<sup>26</sup>

Pada zaman pemerintahan *Ajai*, mereka mulai hidup menetap di suatu tempat, dan membentuk satu perkampungan dengan hidup secara berkelompok. Selain itu mereka sudah mulai mengatur untuk kebutuhan bersama dan mulai dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut *Ajai*.<sup>27</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan semakin berkembangnya jumlah masyarakat, maka akhirnya suku bangsa Rejang sudah mampu menulis dan membaca. Tulisan suku bangsa Rejang tersebut hingga saat ini dikenal dengan tulisan *Ka ga nga*. Menurut ceritanya, suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai, dan masing-masing petulai dipimpin oleh *Ajai*. Adapun empat petulai tersebut adalah: Rejang Toebuij atau Toebai di dusun Pelabai Lebong, Rejang Bermani di Kota Rukam Lebong, Rejang Jekalang di Sukanegarai Lebong, dan Rejang Selepuh di Batu Lebar.<sup>28</sup>

Perbedaan yang tampak pada keempat kelompok tersebut hanya pada logat atau dialek bahasa sehari-hari. Sedangkan dari segi adat istiadat tidak tampak perbedaan yang mendasar. Setiap kelompok memiliki satu wilayah tersendiri yang disebut *bangmego* atau *marga* dengan seorang pemimpin yang disebut *pesirah*.<sup>29</sup> Seorang *Pesirah* dibantu oleh bawahannya yang terdiri dari *ginde* (setingkat kepala desa), dan *ginde* dibantu oleh *punggawo*. Sistem pemerintahan tradisional seperti ini berakhir pada tahun 1980. Saat sekarang tidak ada lagi sistem pemerintahan *Pesirah*, akibat adanya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, selain itu juga akibat semakin heterogennya penduduk.<sup>30</sup>

Suku bangsa Rejang saat ini menyebar di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu, yakni, di Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Lembak dan Padang Ulak Tanding. Kemudian juga menyebar ke Kabupaten Bengkulu Utara, yakni di Muko-Muko, serta di berbatasan Ulu Musi. Di Kecamatan Kepahiang selain dari suku bangsa Rejang adalah suku bangsa lainnya seperti: Jawa, Cina, Padang, Bali, Serawai

---

<sup>26</sup> Iriani dkk. *Tatakrma Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang 2004, hlm 7

<sup>27</sup> *Ajai* (bahasa Rejang ) yang berasal dari kata *majal* berarti pemimpin satu kumpulan manusia.

<sup>28</sup> H. Harun Nur Rasyid, 1976. *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit, hlm. 7

<sup>29</sup> *Pesirah* berasal dari bahasa Sanskret yaitu “*syirah* “ yang berarti kepala kaum atau kepala kumpulan

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 8

dan Batak, Namun suku bangsa tersebut lebih terfokus di kota Kepahiang. Kondisi penduduk Kecamatan Kepahiang yang heterogen ini sangat memungkinkan terjadinya perubahan pada beberapa unsur kebudayaan masing-masing suku bangsa sebagai dampak dari interaksi yang terus menerus dan berlangsung cukup lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kecamatan Kepahiang yang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di wilayah perlintasan antara Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan dan perlintasan beberapa kabupaten di Bengkulu. Situasi tersebut sangat berpotensi menjadikan Kecamatan Kepahiang menjadi daerah transit yang memungkinkan untuk terjadinya interaksi antar suku bangsa, baik di pasar, terminal, warung atau rumah makan dan di tempat lainnya.

Dengan luas 70. 475 ha Kecamatan Kepahiang tahun 1999 dihuni oleh penduduk dengan jumlah 455. 671 jiwa. Kecamatan Kepahiang adalah yang paling banyak penduduknya sebanyak 375. 844 jiwa. Sedangkan Kecamatan Tebat Karai merupakan yang paling sedikit penduduknya yakni sebanyak 24. 592 jiwa.

Penduduk Kecamatan Kepahiang sebagian besar beragama Islam, selain berbagai macam jenis suku bangsa juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh penduduknya. Namun penduduknya beragama Islam yang paling dominan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid dan mushallah yang tersebar di beberapa tempat. Jumlah penduduk yang beragama Islam menduduki posisi yang jumlahnya paling banyak, kemudian yang kedua adalah penduduk yang bergama Katolik, yang ke tiga adalah penduduk yang beragama Kristen. Selanjutnya penduduk yang beragama Hindu dan yang paling sedikit adalah penduduk yang beragama Budha. Kendatipun jumlah agama ada lima, akan tetapi penduduknya saling toleran antar umat beragama, bahkan dapat dikatakan belum pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kecamatan Kapahiang.

### 3. Sistem Kekerabatan

Setiap suku bangsa memiliki sistem kemasyarakatan, antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain kadang mempunyai kesamaan dan ada juga yang berbeda. Dalam suku bangsa Rejang dapat dikatakan mempunyai kemiripan dengan masyarakat Minangkabau khususnya mengenai sistem kekerabatan, dimana mereka dihitung berdasarkan garis keturunan ibu *matrilineal*. Hal ini dapat dilihat saat mereka telah menikah, kebanyakan keperluan anak yang telah menikah ditanggung oleh keluarga yang perempuan sehingga mereka menganut adat matrilineal yaitu laki-laki tinggal di rumah keluarga perempuan.

Apabila di satu keluarga memiliki anak lebih dari satu orang dan akan menikah, maka anak perempuan yang telah menikah lebih dulu segera diusahakan tempat tinggal yang baru oleh keluarga perempuan. Biasanya yang terjadi di suku bangsa Rejang anak perempuan yang telah menikah tersebut diberi sebidang tanah dan dibuatkan rumah oleh keluarga perempuan dan disitulah mereka tinggal menjelang saudara yang perempuannya menikah. Kalau dipihak perempuan sama sekali tidak sanggup, maka mereka meminta bantuan kepada pihak laki-laki, namun hal semacam ini jarang sekali terjadi. Dalam suku bangsa Rejang juga dikenal dengan keluarga luas, dimana dalam satu buah rumah terdiri dari ayah (datuk), ibu (nenek), anak yang sudah menikah, anak yang belum menikah dan cucu.<sup>31</sup>

Sebagian suku bangsa Rejang adanya adat sesudah menikah wanita tinggal di rumah orang tuannya dengan alasan mereka diajar bagaimana dalam berumah tangga, sehingga jika pisah rumah dengan orang tuanya mereka tidak perlu bertanya lagi pada orang tuannya tentang cara-cara berumah tangga. Oleh sebab itu apabila ada saudara perempuan yang wanita sudah menikah mereka dibolehkan untuk pindah rumah. Atau apabila hanya memiliki satu anak wanita apabila sudah dianggap mampu mandiri, maka dibolehkan untuk pisah rumah dengan orang tua mereka, baik dalam wilayah itu juga maupun diluar wilayahnya. Namun kebanyakan mereka pindah disekitar rumah orang tuannya, seperti disebelah rumah.<sup>32</sup>

## **1. Keadaan Sosial Budaya**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Bertambahnya jumlah penduduk menunjukkan bahwa semakin bertambah pula penduduk usia sekolah, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kecamatan Kepahiang semakin banyak diperlukan. Sebelum menjadi sebuah kabupaten tercatat sebanyak 120 organisasi pendidikan baik negeri maupun swasta.

---

<sup>31</sup> Irani, *Op. Cit*, hlm 21

<sup>32</sup> *Ibid*



Lembaga pendidikan di Kepahiang sebelum menjadi sebuah kabupaten masih terasa sangat kurang memadai, bahkan di masing-masing kecamatan belum terlihat jenjang pendidikan untuk setingkat Taman Kanak-Kanak ( TK ). Dengan demikian masih perlunya meningkatkan sarana prasarana lembaga pendidikan di Kecamatan Kepahiang untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah Kepahiang. Sarana pendidikan yang ada di Kepahiang mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hanya berjumlah 120 sekolah.

Tidak kurang dari 182 buah rumah peribadatan yan tersebar di Kecamatan Kepahiang. Banyaknya sarana peribadantan di Kecamatan Kepahiang tidak terlepas dari veran pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama yang dianutnya. Disamping berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, masjid dan musallah di Kecamatan Kepahiang juga dimanfaatkan oleh anak-anak untuk tempat mengaji dan mempelajari agama Islam.

Selain dari sarana peribadan, ada lagi organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan yang cukup berkembang dan tersebar di beberapa kecamatan. Organisasi kepemudaan dan keagamaan tersebut antara lain Koperasi, Karang Taruna, Remaja Masjid, PKK, Kelompok-Kelompok Pengajian, Ormas dan Orpol dan Organisasi lainnya. Di Kecamatan Kepahiang Induk yang paling banyak organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan adalah sebanyak 48 buah organisasi. Sedangkan Kecamatan Tebat Karai merupakan kecamatan yang paling sedikit organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan yakni sebanyak 43 buah organisasi. Banyaknya organisasi kepemudaan dan organisasi keagamaan di Kecamatan Kepahiang tidak terlepasnya dari veran pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi tersebut, disamping itu Kepahiang adalah merupakan ibokota Kecamatan dan letaknya yang sangat strategis di persimpangan jalan yang menghubungkan ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

Keterbukaan masyarakat Kepahiang merupakan salah satu daya tarik tersendiri untuk kemajuan masyarakatnya. Tidak heran jika Kepahiang memiliki penduduk yang multi etnis seperti: Jawa, China, Padang, Bali, Serawai dan Rejang sendiri. Adat istiadat yang paling dominan adalah budaya Rejang antara lain Batik Jang dan Diwo (Kerajinan Batik), Bugei (Rumah Adat), Panen Suhet, Sihet, Rikung

(Tulisan /Aksara Rejang) dan Ketuh Rajo, Kapak Batu Kalsidian dan Cakap Keringan.<sup>33</sup>

Sementara kesenian mencakup tari-tarian dan lagu daerah. Tarian adat serta kontemporer yang dikembangkan sebagai upaya pelestarian antara lain tarian Sekapur Sirih, Kejai, Mandulah, Semambe Cupik, Petik Kopi, Panen Padi, Bujang Semulen Mengilih Padi. Lagu daerah seperti Lagu Gritan, Lagu Mambak, Lagu Ngerambek dan Lagu Merjung.<sup>34</sup>

## 2. Kepahiang dalam Lintasan Sejarah

Kepahiang memiliki perjalanan sejarah yang hampir sama dengan daerah lainnya. Zaman perjuangan melawan Belanda menjadi saksi sejarah dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu Kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, yang disebut dengan *Afdeling* Rejang Lebong beribu kota di Kepahiang. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi Indonesia 3,5 tahun lamanya, Kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi Kabupaten Rejang Lebong.<sup>35</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 1948 Kepahiang masih tetap menjadi ibukota Rejang Lebong dan sekaligus sebagai basis kota perjuangan. “Dipilihnya Kepahiang sebagai basis perjuangan tidak terlepas dari posisi Kepahiang yang sangat strategis dari segi pertahanan. Kepahiang berada di wilayah perlintasan antara Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan dan perlintasan beberapa kabupaten di Bengkulu. Situasi tersebut sangat potensial dijadikan pusat pertahanan. Dengan demikian, mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BPR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), semuanya di pusatkan di Kepahiang”.<sup>36</sup>

Pada penghujung tahun 1948 merupakan masa yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Kepahiang, dimana tahun itu khususnya menjelang agresi Militer Belanda kedua. Untuk mencegah Belanda

---

<sup>33</sup> *Profil Kabupaten Kepahiang*. Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tahun 2010 (tampa halaman)

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Catatan Zainuri Mayang. *Sejarah Singkat Kabupaten Kepahiang*, 2007, hlm. 2

<sup>36</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang., Kepahiang 13 September 2011. Zainuri Mayang adalah ketua Legyun Veteran Kabupaten Kepahiang ia juga salah seorang tokoh penting dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang.

masuk ke daerah Kepahiang, seluruh jembatan yang menghubungkan Kepahiang dengan daerah lain di robohkan, dengan maksud agar tentara Belanda tidak dapat masuk dan menguasai Kepahiang. Bukan hanya itu saja seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumi hanguskan, mulai dari Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos/Telpon dan Penjara semua dibakar habis, guna mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda khususnya ke kota Kepahiang.<sup>37</sup>

Perkembangan selanjutnya, bagaimanapun antisipasi yang dilakukan oleh para pejuang agar tentara Belanda tidak dapat memasuki kota Kepahiang yang pada akhirnya tidak dapat dibendung. Dengan kecanggihan senjata yang dimiliki oleh tentara Belanda, akhirnya Kepahiang dapat dikuasai oleh tentara Belanda, dengan sendirinya para tentara dan pejuang Republik Indonesia terpaksa menyingkir ke hutan. Tahun 1949 seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingannya di hutan-hutan.

Pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu menyebutnya dengan “kembali ke kota”. Pada saat itu terjadilah keharuan yang sangat mendalam pada aparatur pemerintahan Rejang Lebong, sebab Pemerintah Rejang Lebong tidak dapat lagi menempati kantornya di kota Kepahiang karena seluruh fasilitas pemerintah daerah telah dibumi hanguskan. Akan tetapi semangat mereka tidak mundur, dengan sisa-sisa kekuatan, serta semangat yang tinggi, seluruh aparatur pemerintahan daerah terpaksa menompang ke kota Curup, karena di sana masih tersisa sebuah bangunan Pesanggrahan (sekarang menjadi Gedung Olah Raga Curup). Di Gedung Pesanggrahan itulah aparatur pemerintahan Rejang Lebong menjalankan roda pemerintahannya.<sup>38</sup>

Berkantornya aparatur pemerintahan Rejang Lebong di Curup, membuat Kepahiang semakin luput dari perhatian pemerintah. Pada tahun 1956, kota Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan undang-undang. Semenjak itu pulalah, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang mengatakan “mahkota kejayaan kepahiang telah hilang”. Penetapan Curup sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Zainuri Mayang *Op. Cit.* hlm 2

<sup>39</sup> *Ibid*

Penetapan Curup sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, membuat masyarakat kepahiang menjadi bersedih. Kesedihan itu juga dirasakan oleh salah seorang tokoh masyarakat kepahiang yang pada saat itu ia menjabat anggota DPRD Rejang Lebong, berikut penuturannya:

“Pada saat itu saya menjadi anggota DPRD Rejang Lebong dan saya juga hadir dalam sidang di DPRD untuk membacakan surat keputusan dari Mendagri yang menetapkan Curup sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, hampir semua anggota DPR bertepuk tangan saat itu, namun saya bersedih dan menangis di ruang sidang, karena saya anggota DPRD yang berasal dari Kepahiang merasa sedih, jika Curup telah ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, maka Kepahiang hanya tinggal kenangan saja lagi. Pada saat itulah dalam hati kecil saya berucap “pada suatu ketika kejayaan Kepahiang harus dikembalikan”.<sup>40</sup>

Pada masa-masa berikutnya, lantaran kepahiang memiliki nilai historis yang tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan kepahiang untuk dijadikan ibukota Provinsi dan Kota Administratif. Namun sayangnya perjuangan itu kandas di tengah jalan, lantaran pemerintah pusat tidak merespon keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut. Ketika era reformasi bergulir pada tahun 1998, gaungnya juga sampai ke Kepahiang. Masyarakat Kepahiang tidak menyia-nyiaakan kesempatan tersebut untuk memperjuangkan kebangkitan kembali Kepahiang. Situasi ini kian terbuka, setelah pemerintah dan DPR-RI melahirkan produk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lazim disebut sebagai undang-undang otonomi daerah.

Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Maka sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat kepahiang, baik yang berdomisili di kepahiang sendiri maupun yang berada di luar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, dan kota lainnya, sepakat untuk mengembalikan mahkota kepahiang sebagai kabupaten kembali. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Awal tahun 2000 badan perjuangan tersebut, secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang yang ditujukan kepada : Bupati Kabupaten Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Provinsi

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang , Kepahiang 13 September 2011

Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Akan tetapi, rupanya perjuangan memekarkan Kepahiang menjadi Kabupaten tak semulus diharapkan. Sebab, meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di Provinsi yang memperjuangkan pemekaran era reformasi, Kabupaten Rejang Lebong tak semerta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk justru keberatan melepas kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>42</sup>

Berkat kesabaran dan disertai lobi-lobi serta diplomasi, akhirnya Kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada tanggal 7 Januari 2004 Kepahiang diresmikan sebagai Kabupaten otonomi oleh Menteri Dalam Negeri RI Jend. TNI Hari Sabarno di Jakarta. Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Mahkota Kepahiang yang pernah hilang telah dapat direbut kembali.<sup>43</sup>

Selanjutnya ditunjuk sebagai kepala daerah pertama (caretaker) Kabupaten Kepahiang Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.28-8 Tahun 2004, tentang pengangkatan Pejabat Bupati Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pelantikannya dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 2004. Sampai saat ini, Kabupaten Kepahiang telah dipimpin tiga orang kepala daerah, yaitu:

1. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., periode 14 Januari 2004 hingga 29 April 2005, sebagai pejabat Bupati Kepahiang (caretaker)
2. Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 hingga 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (caretaker)
3. Drs. H. Bando Amin C. Kader Rio Rajo Dipati Junjung, M.M., periode 7 Agustus 2005 hingga 7 Agustus 2010.

### **C. PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHANG**

Sejarah terbentuknya Kabupaten Kepahiang, berbeda dengan kabupaten yang lain di Provinsi Bengkulu. Ketika era reformasi bergulir pada tahun 1998, kepahiang merupakan daerah pertama kali di Provinsi

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang 14 September 2011

<sup>43</sup> *Ibid*

Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran, namun saat itu Kabupaten Rejang Lebong tidak serta merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai kabupaten induk justru keberatan melepas kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Pada hal salah satu persyaratan untuk menjadi sebuah kabupaten adalah kabupaten induk harus bersedia melepas.<sup>44</sup>

Pembentukan Kabupaten Kepahiang mengalami berbagai kesulitan dan melalui proses yang berliku-liku, berbeda dengan pembentukan Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong yang jauh kemudian diusulkan untuk menjadi kabupaten lebih duluan berhasil dari kepahiang, karena lebong mendapat dukungan dari kabupaten induk. Pembentukan Kabupaten Kepahiang memakan waktu yang cukup lama dimulai awal tahun 2000 sampai dengan awal tahun 2004.<sup>45</sup>

## 1. Penggagas

Tokoh penggagas pembentukan Kabupaten Kepahiang ini adalah, H. Zainuri Mayang, H. M Saleh Krikam dan H. Kms Ali Madjid. Ketiga tokoh penggagas ini merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Kepahiang. Sementara H. Zainuri Mayang disamping ia sebagai tokoh masyarakat ia juga salah seorang anggota Legyun Veteran dan ketua pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Kepahiang Dengan demikian ia cukup dikenal oleh masyarakat kepahiang.

Ide atau wacana untuk mewujudkan kepahiang menjadi sebuah kabupaten sebetulnya sudah lama diinginkan oleh masyarakat kepahiang. Berikut penuturan Zainuri Mayang:

“Sebetulnya kepahiang sudah menjadi sebuah ibukota kabupaten dulunya, Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 sampai dengan tahun 1948 kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan. Tahun 1948 itu mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perjuangan Rakyat (BPR) dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang. Waktu revolusi fisik, karena Belanda sudah sampai di Bengkulu, oleh tentara kita yang ada di kepahiang seluruh fasilitas yang ada di kepahiang dibumi hanguskan seperti Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telpon, Penjara serta jembatan-jembatan yang menghubungkan Bengkulu dengan kepahiang dihancurkan. Maksud dihancurkan adalah supaya kepahiang tidak dapat dimasuki atau diduduki oleh Belanda. Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Kepahiang berada dalam pengasingan dan berada di hutan, waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang 12 September 2011

<sup>45</sup> *Ibid*

ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke kota. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke kota kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumi hanguskan. Seluruh staf pemerintahan menumpang di kota Curup dan menempati sebuah bangunan/Pesanggrahan (sekarang menjadi gedung olah raga Curup). Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang, dan sejak itu pulalah kepahiang menjadi ibukota kecamatan”.<sup>46</sup>

Keinginan masyarakat kepahiang dan Zainuri Mayang pada khususnya, untuk merebut kembali kejayaan kepahiang sudah merupakan keinginannya ketika ia menjadi anggota DPRD yang pertama di Rejang Lebong tahun 1956 utusan dari Masumi. Karena Dekrit Presiden Masumi dibubarkan, pada saat itu Zainuri Mayang mengundurkan diri dari anggota DPRD Rejang Lebong, berikut penuturannya:

“Saya termasuk orang yang pertama menjadi anggota DPRD Rejang Lebong diantara yang lainnya, pada saat saya menjadi anggota DPRD Rejang Lebong saya juga ikut hadir dalam sidang di DPRD untuk membacakan surat keputusan dari Mendagri yang menetapkan Curup sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu hampir semua anggota DPRD bertepuk tangan, namun saya bersedih dan menangis di ruang sidang itu, karena saya anggota DPRD yang berasal dari kepahiang merasa sedih, jika Curup telah ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, maka status kepahiang hanya menjadi salah satu kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan kepahiang hanya tinggal kenangan saja lagi. Pada saat itulah dalam hati kecil saya berucap “pada suatu ketika kejayaan kepahiang harus dikembalikan”. Jadi itu juga yang melatar belakangi keinginan saya dan teman-teman untuk memperjuangkan kepahiang menjadi kabupaten. Setiap memperingati ulang tahun Kabupaten Kepahiang selalu dibaca sejarah kepahiang tempo dulu”. Demikian Zainuri Mayang menuturkan.<sup>47</sup>

Lebih kurang hampir lima belas tahun lamanya Kecamatan Kepahiang menjadi bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, perkembangan daerah ini tergolong lamban, pada hal daerah ini merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Bengkulu. Dengan kondisi yang demikian pada tahun 1982 tokoh-tokoh masyarakat kepahiang berkeinginan menjadikan kepahiang sebagai kabupaten dan Kota Administratif. Keinginan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu, namun tidak mendapatkan persetujuan dari Kabupaten Rejang Lebong maupun Pemerintah Provinsi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 21 September 2011

<sup>47</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang 14 September 2011

<sup>48</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang 15 September 2011

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberi peluang terjadinya pemekaran daerah. Masyarakat kepahiang melihat undang-undang ini sebagai angin segar bagi keinginan mereka untuk memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk otonomi Kabupaten Kepahiang. Gagasan atau wacana untuk pembentukan Kabupaten Kepahiang baru dapat dilaksanakan ketika adanya kunjungan Gubernur Bengkulu ke kepahiang akhir tahun 1999. Setelah Gubernur Hasan Zen, SH dilantik menjadi Gubernur Bengkulu periode (1999-2004), kunjungan kerja yang perama dilakukannya adalah di kepahiang. Dalam kunjungannya itu Gubernur Hasan Zen, SH antara lain mengatakan “Pada saat ini terbuka kesempatan bagi kepahiang untuk kembali menjadi kabupaten, karena dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, terbuka bagi daerah-daerah untuk menjadi kabupaten. Apa puas dan senang menjadi kecamatan ini saja terus menerus? kalau umpamanya dari masyarakat kepahiang sepakat bahwa kepahiang dikembalikan menjadi kabupaten, maka saatnya memperjuangkan itu sekarang” demikian yang disampaikan Gubernur dihadapan tokoh masyarakat kepahiang.<sup>49</sup>

Dalam kunjungan perdana yang di pusatkan di Aula Kantor Camat Kepahing Gubernur Bengkulu Hasan Zen, SH mengajak segenap elemen masyarakat untuk mengambil sikap dan langkah kongrit untuk memekarkan Eks Kewedenan Kepahaing menjadi Kabupaten Kepahiang. Hasan Zen, SH juga memberikan contoh daerah-daerah lain yang turut ambil bagian dalam proses pemekaran wilayah. Menurut penilain Gubernur, kabupaten-kabupaten baru yang dimekarkan pada umumnya masih dibawah Kecamatan Kepahiang baik dari segi infrastruktur, pusat layanan jasa, kemampuan ekonominya dan pertimbangan lain.<sup>50</sup>

Setelah selesai acara pertemuan dengan Gubernur Bengkulu tersebut, para tokoh masyarakat kepahiang telah mulai hangat memperbincangkan apa yang disampaikan oleh bapak Gubernur Hasan Zen, SH. Disana sini tokoh masyarakat kepahiang sudah mulai membicarakan apa yang diungkapkan oleh Gubernur Hasan Zen, SH tersebut. Antara lain seperti yang diungkapkan oleh Zainuri Mayang:

“Setelah pulang dari pertemuan dengan Gubernur itu kawan-kawan bilang dengan saya “bagaimana kita ini”?, saya jawab “ya bagaimana dengan kawan-kawanlah”. Kemudian saya katakan “memperjuangkan kabupaten itu tidak mudah tapi kalau kita sepakat dan mau ya tidak apa-apa dan saya siap aja. Sebab berdasar pengalaman memperjuangkan kabupaten tidak gampang dan suatu pekerjaan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 12 September 2011

<sup>50</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang 15 September 2011



yang panjang dan melelahkan, kalau kita siap ya tidak apa-apa kita akan mulai dari sekarang”.<sup>51</sup>

## **2. Rapat-Rapat, Pembentukan Panitia dan Pengajuan Proposal**

Menyikapi pandangan Gubernur Bengkulu tersebut maka para tokoh masyarakat kepahiang mulai bergerak dengan mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Pada tanggal 26 Januari 2000 dilakukan pertemuan resmi pertama di rumah Zainuri Mayang Kelurahan Pensiunan Kepahiang untuk membentuk wadah perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh antara lain H. Zainuri Mayang, H. M. Saleh Krikam, Kadir Nani, Kms Ali Majid, Abdul Rohim, Zainal Arifin, Amwat, Edwardo, Toni Mulyadi, Kemas Muhammad, Hasan Al Azhari, Hasan Arif, Herman Tagar dan Syafri Seregar.<sup>52</sup> Pada pertemuan pertama itu berhasil disusun struktur kepanitiaan dengan komposisi sebagai berikut:

Kordinator	: Camat Kepahiang : Dan Dramil 40904 Kepahiang : Kapolsek Kepahiang
Ketua Umum	: H. Zainuri Mayang
Ketua I	: Kms. Ali majid
Ketua II	: H.M. Saleh Krikam
Sekretaris Umum	: A. Kadir Nani
Sekretaris I	: Drs. Abdul Rohim
Sekretaris II	: Zainal Arifin
Bendahara	: Amwat
Seksi-Seksi:	
Hubungan Masyarakat	: Eduardo, SH : Kemas Muhammad : Hasan Al Azhary
Pendanaan/Keuangan	: Hasan Arif : Herman Tagar : Gusti Santoso
Publikasi/Dokumentasi	: Kemas Syofyan : Toni Mulyadi

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang ,Kepahiang 13 September 2011

<sup>52</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011

Anggota:

- : Syaiful Amri
- : Dra. Nuryana
- : Drs. Hadi Latif, SH
- : Nursyamsu
- : Firdaus Bait, BA
- : Didi Wahyudi, SPd
- : Drs. Rusmedi Hanafi
- : Mulyono, SPd
- : Ujang Supardi
- : Drs. Nimber Sukanto
- : Kms. Azharudin
- : Renudin
- : M. Syafei Rais, BA.

(SK terlampir)

Panitia yang terbentuk ini SKnya ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih yang diketahui oleh Camat Kepahiang. Pada pertemuan itu disepakati nama wadah perjuangan dengan nama “PANITIA PERSIAPAN KABUPATEN KEPAHIANG” yang disingkat PPKK. Sementara Sekretariat Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang berpindah pindah tempat dan juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, Setelah mengadakan rapat yang pertamaka di rumah H. Zainuri Mayang, pertemuan rutin PPKK dilaksanakan secara berpindah-pindah tempat. Sekretariat pertama ditetapkan di Kantor Lurah Pensiunan Kepahiang, pada saat itu salah seorang tokoh pemekaran kepahiang Amwat, ia bukan saja sebagai Pegawai Negeri yang gencar pembentukan Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ia juga menjabat kepala Kelurahan Pensiunan. Namun karena situasi politik pada saat itu yang tidak menguntungkan, Amwat dilenserkan dari ketua Kelurahan Pensiunan, maka sekretariat terpaksa di pindahkan ke gedung SMP Muhamadiyah. Walaupun Sekretariat di pindahkan ke gedung SMP Muhammadiyah, namun papan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) tetap di Jl. Kgs Hasan No. 3 di rumah H. Saleh Krikam Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang. Dalam perjalanannya sekretariat di gedung SMP Muhammadiyah juga tidak berjalan lama hanya beberapa minggu saja, sebab tidak banyak panitia yang mau berkerja disana, hanya Amwat dan Abdul Rohim. Akhirnya sekretariat di tetapkan di rumah Amwat Jl. Bogor No. 385 Kepahiang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011

Setelah terbentuknya susunan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) dalam rapat yang pertama di Rumah H. Zainuri Mayang, maka tersebar ke seluruh lapisan masyarakat serta banyak mendapat respon dari tokoh-tokoh masyarakat baik di kepahiang sendiri maupun diluar kepahiang. Banyak sorotan dan tanggapan dari berbagai kalangan yang memberikan masukan bahwa panitia yang dibentuk pertama kali kurang gemuk.<sup>54</sup> Dengan kondisi yang demikian panitia yang dibentuk pada pertemuan yang pertama melalui rapat ketiga tanggal 11 Maret 2000 di rumah H. Saleh Krikam Jalan Kgs. Hasan No 3 Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang diadakan perubahan susunan kepanitiaan dengan memasukan 9 anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang berasal dari daerah pemilihan kepahiang, tokoh-tokoh masyarakat di Bengkulu dan Jakarta. Dengan pertimbangan agar dapat mempermudah kerja panitia. Hasil perubahan komposisi kepanitiaan itu disempurnakan dengan komposisi ketua umum, 3 Wakil Ketua, 1 Sekretari Umum, 3 Wakil Sekretaris, 1 Bendahara, 1 Wakil Bendahara, 5 Sekretaris Bidang dengan anggota 36 orang dan anggota sejumlah 24 orang.<sup>55</sup> Dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

Panasehat	:	Drs. Sumitro Maskum, MBA
	:	Drs. H.A Razei Yahya
	:	H.M. Da'id
	:	H. Afandi Abidin
	:	Drs. Bando Amin C. Kadir,MM
	:	H. Hamzah AR, SH
	:	Sulaiman
	:	Zamhari Abidin, SH
	:	H.M. Arsyad Thohara, BA
	:	H. Harun Hawab
	:	H. Abd Latif
	:	H. Ibrahim Ismail
	:	Drs. Bakri Durmid
	:	TRIPKA Kecamatan Kepahiang
Ketua Umum	:	H. Zainuri Mayang
Ketua I	:	Kms. Ali Madjid

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang 13 September 2011

<sup>55</sup> Drs. Abdul Rohim dan Amwat, "*Sejarah Terbentuknya Eks Kewedanaan Kepahiang Mejadi Kabupaten Kepahiang*". Disampaikan Kepada Pemda Kabupaten Kepahiang Pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepahiang ke-2 Tanggal 07 Januari 2006. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. 2006, hlm 3.

Ketua	II	: M. Saleh Krikam
Ketua	III	: H. Badarudin
Sekretaris Umum		: A. Kadir Nani
Sekretaris	I	: Zainal Arifin Caye, SPd
Sekretaris	II	: Drs. Abdul Rohim
Sekretaris	III	: Ujang Supardi
Bendahara		: Amwat
Wakil Bendahara		: Dra. Nuryana
Bidang-Bidang:		
Bidang Umum		: Drs. Hadi Latif
		: Sudarisman
		: Renudin
		: Drs. Nimbar Sukanto
		: Jamil Hamzah, SPd
		: Ismail Amir
		: Syamsul Hamid
		: Drs. Lahmudin
Staf Sekretariat		: M. Syafei, BA
		: Sudarisman
		: Drs. Hadi Latif, SH
		: Amrullah Ma'i, Spd
		: Toni Mulyadi, AMd
		: Sigit Arianto, SPd
Bidang Humas/ Publikasi: Km. Muhammad		: Firdaus Bait, BA
		: Drs. Rusmedi Hanafi
		: Drs. Basing Ado
		: Sudirman Mudun, BA
		: Usman Hasan, BA
		: Drs. Riki
		: Syaferil Seregar
		: Drs. Syaiful Amri
Bidang Perlengkapan		
Trasportasi :		: Tomas Suliawan, SE
		: Johan Dirsyah

	: Kms. Murni
	: Kms. Amsori
Bidang Keuangan	: Hasan Arif
	: Herman Tagar
	: Hasan. Al. Azhari
	: Nur Syamsu
	: Mulyono, SPd
	: Haryanto
	: H. Darus Salam
	: Drs. Agus Salim
	: Gusti Santoso. SP
Anggota	: Muktar Hasan
	: Rokip Sa'in
	: Drs. Dewi Aryani, M
	: Cik Aman Bar, Sm.Hk
	: Iskandar Wahid, SH
	: Zukarnaian. R
	: Syamsul Bachri Sangun
	: Syamsul Hamid
	: Didi Wahyudi, SPd
	: M. Dani
	: Kgs. Azharudin
	: Chaidir Chairun
	: Zulkarnaian
	: Saldani
	: Ujang Darmin
	: M. Mat. Amin
	: Mardjunis
	: Kms, Saman
	: Supratman Hara
	: Drs. Mahadi. C
	: Tahmid
	: Drs. Dalimin
	: Kgs. Hsyim
	: Drs. Kasim Idris (SK terlampir)

Untuk menggalang dukungan dari berbagai lapisan, Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) membentuk beberapa panitia perwakilan di setiap kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Ujan Mas, Tebat Karai, Kepahiang (Kecamatan Induk), Keban Agung (sekarang Kecamatan Bermani Ilir), perwakilan di Rejang Lebong, Bengkulu dan Jakarta. Pembentukan panitia perwakilan ini bertujuan untuk dapat memperlancar komunikasi. Adapun tugas dari panitia perwakilan ini adalah untuk menghimpun seluruh dukungan dan menyampaikan kepada pengurus harian di kepahiang. Dukungan dari partai politik dikordinasikan oleh Berlian BK yang menjadi salah satu syarat pemekaran dan dukungan tersebut telah berhasil dihimpun diseluruh wilayah kepahiang. Namun dalam perjalanannya perwakilan-perwakilan tersebut yang aktif tinggal perwakilan Bengkulu dan Jakarta.<sup>56</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu panitia mulai menyusun dan mengajukan proposal, panitia menunjuk tim pembuat proposal melalui rapat panitia, tim pembuat proposal terdiri dari :

Ketua	: Amwat
Sekretaris	: Drs. Abdul Rohim
Anggota	: Zainal Arifin, SPd
	: Drs. Syaiful Amri Sahi
	: Dra. Nuryana
	: Kemas Muhammad,

Dengan kerja keras dan kegigihan tim pembuat proposal berkerja terus menerus, tanggal 13 Mei 2000 proposal yang pertama sudah dapat disampaikan ke Bupati DPR dan Gubernur, namun proposal tersebut belum mengikuti PP 129 tahun 2002. Selanjutnya tanggal 8 Maret 2001, tim penyusun proposal kembali mengajukan proposal yang ke dua, namun juga belum mengikuti PP 129 tahun 2002. Melaui kerja keras Amwat dan Drs. Abdul Rohim dan beberapa orang panitia lainnya, tanggal 21 Mei tahun 2002 kembali menyampaikan proposal ke DPRD Rejang Lebong. Proposal ditolak karena dianggap belum lengkap. Kekurangan terdapat pada peta wilayah Calon Kabupaten Kepahiang, dukungan dari segenap elemen masyarakat dan surat keterangan calon lokasi ibukota Kabupaten Kepahiang.<sup>57</sup> Sesungguhnya secara prinsip panitia menyadari proposal-proposal yang diajukan itu belum adanya tolak ukur suatu daerah dapat dimekarkan menjadi Kabupaten, karena PP 129 tahun 2002 saat itu belum dimiliki oleh PPKK.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>58</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 12 September 2011

### a. Masa-Masa Sulit

Perjalanan panjang yang melelahkan perjuangan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang suatu ketika mengalami masa-masa yang amat sulit. Ditengah-tengah kesulitan itu muncul berbagai persoalan, namun tidak menyurutkan hati panitia yang tetap yakin dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Antara lain kesulitan yang muncul adalah: Keengganan Kabupaten Rejang Lebong untuk melepas Kecamatan Kepahiang, minimnya dana untuk membiayai operasional panitia, sebagian besar wilayah Kecamatan Ujan Mas mendukung, tapi tidak mau bergabung dengan kepahiang, Banyaknya spanduk yang hilang setelah dipasang panitia, openi yang dibentuk dari media massa yang menyatakan bahwa untuk membentuk kabupaten diperlukan dana lebih dari 3 milyar, dan pendapat melalui media (Semarak Bengkulu sekarang RB) yang menyebutkan pembentukan Kabupaten Kepahiang hanya sebatas wacana.<sup>59</sup>

Beberapa kesulitan yang disebutkan diatas membuat rasa pesimis panitia ditambah lagi oleh minimnya dana untuk membiayai kegiatan panitia. Banyak anggota panitia yang enggan hadir rapat bila diundang, jika diadakan rapat yang hadir hanya beberapa orang saja yang masih mau melanjutkan perjuangan pemekaran. Dari beberapa kesulitan tersebut, yang paling berat adalah keengganan Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk untuk melepas Kecamatan Kepahiang. Ketidaksetujuan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepahiang untuk dimekarkan, setelah mengajukan proposal secara resmi ke DPRD dan Bupati. Pada akhirnya tersiar ke khalayak ramai bahwa Rejang Lebong tidak menyetujui kepahiang menjadi kabupaten, walaupun akhirnya secara institusi pemerintah Rejang Lebong menyetujui.

“Yang membuat kabupaten induk tidak mau melepas Kecamatan Kepahiang pertama asset-aset Kabupaten Rejang Lebong banyak berada di kepahiang seperti Rumah Sakit, Perumahan Pemda, BLK, dan asset lainnya. Kemudian daerah kepahiang penghasil kopi terbesar di Rejang Lebong. Beberapa faktor inilah yang mengakibatkan Rejang Lebong tidak mau melepas kepahiang. Ketidaksetujuan Rejang Lebong untuk melepas kepahiang, berakibat besar terhadap perjuangan panitia. Sebab pegawai-pegawai yang dari kabupaten induk pada awalnya mereka mendukung, tapi ketika Pemerintah Rejang Lebong tidak mendukung dan tidak mau menyetujui, mereka akhirnya bebalik tidak mendukung, bahkan mereka takut untuk bergabung dengan panitia pemekaran. Pada awalnya, panitia itu ada sekitar 88 orang, tapi yang berkerja tidak beberapa orang. Yang paling celaknya lagi bukan hanya sekedar takut, tapi mereka balik menyerang dan mengejek panitia yang ada, antara lain ejekanya itu

---

<sup>59</sup> Abdul Rohim dan Amwat, *Ibid*

“tidak gampang dan tidak semudah membalik telapak tangan membentuk Kabupaten Kepahiang, kepahiang tidak akan jadi kabupaten kalau tidak ada uang” Ejekan semacam ini kami dengar dan kami terima dari berbagai orang, termasuk dari para pemuda dan bahkan ada juga pemuka masyarakat, kebanyakan mereka mengejek dan mencemoohkan panitia. Kemudian ada sebagian mereka yang mendukung tapi tidak mau bersuara atau berbuat, tapi kalau diminta dukungan secara tertulis mereka mau menanda tangannya, mulai dari kepala desa, LKMD, PKK, Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>60</sup>

Minimnya dana untuk operasional kegiatan panitia juga menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Pembiayaan pembentukan Kabupaten Kepahiang hanya dengan melalui sumbangan-sumbangan sukarela dari penitia-panitia yang simpati dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang, yang jumlahnya juga tidak banyak. Berdasarkan keterangan dari mantan Bendahara PPKK Amwat, mengatakan:

“Saya bendahara dan rumah saya tempat sekretariat PPKK, jadi saya tahu berapa uang yang dikeluarkan oleh panitia untuk mengantarkan kepahiang menjadi sebuah kabupaten. Uang yang dikasih oleh pemerintah cuma sebanyak 30 juta, 15 juta rupiah untuk menghadirkan tim DPUD dari Jakarta yang berjumlah 12 orang dan 15 juta untuk ketuk palu di Jakarta PPKK menginim 35 orang utusan dari kepahiang. Kemudian dana yang lain ya sumbangan sukarela dari teman-teman ya jumlahnya tidak banyak ada yang 25 ribu, 10 ribu, 30 ribu, 50 ribu. Kemudian donatur tunggal satu-satunya bapak M. Saleh Krikam itu jumlahnya juga tidak banyak, Pak Saleh Krikam mengeluarkan uang hanya ketika ada kebutuhan umpamanya jika ada panitia akan berangkat ke Bengkulu atau Jakarta ya dikasihlah oleh pak M. Saleh Krikam sekedar untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan. Panitia tetap menggalang dana dari para donatur yang peduli dengan upaya pembentukan Kabupaten Kepahiang. Dengan situasi yang demikian banyak cemooh orang pada panitia yang masih setia antara lain “mana bisa kepahiang menjadi kabupaten kalau tidak ada uang”.<sup>61</sup>

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23, 24 dan 29 tahun 2002 disambut baik oleh segenap Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. Karena dalam Peraturan Pemerintah ini ditemukan pemahaman tentang *Tujuan Pemekaran, Pertimbangan Pemekaran, Syarat Pemekaran, Indikator Pemekaran, Kewenangan Derah Otonom dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Dengan keluarnya penjelasan ini dapat mengobati hati segenap panitia untuk tetap melanjutkan perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepahiang.

Melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan panitia, kembali bersemangat melanjutkan perjuangan. Pertama yang dilakukan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011

<sup>61</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 12 September 2011



oleh tim pembuat proposal adalah mengkaji indikator-indikator dan sub indikator pemekaran berdasarkan PP 129 tahun 2001.<sup>62</sup> Pertemuan PPKK dengan Pemda Rejang Lebong di Islamic Centre Curup dan ditindaklanjuti melalui pertemuan di Wisma Kaba Curup, salah satu keputusan rapat itu adalah bahwa Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) harus telah menyampaikan proposal dalam tempo waktu dua minggu kepada Pemerintah Daerah Rejang Lebong sebagai bahan ekspose Bupati Rejang Lebong sebelum kunjungan DPR Provinsi di Kabupaten Rejang Lebong 1 Juli 2002.

Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Pemda Rejang Lebong, maka Jumat malam tanggal 20 Juni 2002 diadakan rapat kilat beberapa orang panitia PPKK, antara lain H. Zainuri Mayang, H. Saleh Krikam, Drs. Abdul Rohim dan Amwat. Pertemuan itu membicarakan langkah apa yang harus diambil untuk 10 hari kedepan, terutama untuk membuat proposal yang memuat indikator-indikator pemekaran yang akan di ekspose oleh Bupati Rejang Lebong dihadapan Pansus DPR Provinsi tanggal 1 Juli 2002. Dalam rapat yang berjalan dengan alok itu terjadi sedikit ketegangan antar sesama panitia. Rapat yang dibuka oleh ketua panitia dan dilanjutkan dengan laporan dari wakil ketua I H. Saleh Krikam. Ketua dan wakil ketua mengajak seluruh panitia PPKK untuk menentukan sikap dalam waktu yang sangat terbatas itu, artinya proposal menurut PP 129 tahun 2002 yang diminta Pemda Rejang Lebong harus terwujud dalam tempo satu minggu kedepan ia juga mengatakan “kalau perjuangan yang telah dirintis bersama teman-teman selama dua tahun ini tidak dilanjutkan, maka habislah sudah riwayat Pemekaran Kabupaten Kepahiang”.<sup>63</sup>

Keputusan rapat pada malam itu yang mengharuskan membuat proposal dalam waktu satu minggu, ternyata tim pembuat proposal terutama Amwat dan Abdul Rohim tidak dapat menyanggupinya, sementara waktu berjalan terus. Antara lain alasannya waktunya sangat terbatas dan singkat, kemudian persoalan dana yang minim. Amwat dan

---

<sup>62</sup> Berdasarkan keterangan dari Amwat selaku ketua tim pembuat proposal mengatakan bahwa pembahasan proposal ini terhenti sementara waktu karena, sebagian besar peserta rapat yang hadir tidak sepakat untuk mengubah proposal yang ke dua dan siap disampaikan kepada DPRD Rejang Lebong. Kemudian juga sebagai panitia yang secara kebetulan banyak yang melakukan dinas di luar daerah. Namun berdasarkan pengkajian Sekretaris Bidang Hukum PPKK Eduardo, SH dan anggotanya memberikan pendapat bahwa meskipun proposal belum memenuhi ketentuan PP 129 tahun 2002 panitia tetap berkesimpulan bahwa secara politis PPKK telah menyampaikan proposal pembentukan Kabupaten Kepahiang ke DPRD Rejang Lebong.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang 13 September 2011

Abdul Rohim menyanggupi untuk membuat proposal dengan beberapa persyaratan antara lain:

1. Jika kami berdua ditugaskan untuk menyusun proposal sesuai dengan PP 129 tahun 2002 dan memenuhi segala indikatornya dalam waktu yang tinggal satu minggu, panitia jangan kecewa atau kesal jika proposal itu tidak dapat diselesaikan.
2. Jangan saling tinggal kalau Kabupaten Kepahiang terwujud
3. Persiapkan dana selama kami melakukan pendataan ke semua instansi dalam Kabupaten Rejang Lebong.<sup>64</sup>

Persyaratan yang diajukan oleh Amwat dan Abdul Rohim tersebut, ternyata disepakati oleh peserta rapat terutama oleh H. Zanuri Mayang dan H. Saleh Krikam. Persoalan dana H. Saleh Krikam menyediakan dana sebanyak Rp. 600.000 untuk biaya pembuatan proposal. Dengan dana yang terbatas tersebut Amwat dan Abdul Rohim terhitung mulai Senin tanggal 23 Juni 2002 melakukan kerja keras siang dan malam. Pencarian data dilakukan di kantor instansi- instansi pemerintah seperti Dispenda, Statistik, Keuangan, Perhubungan dan instansi pemerintah lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, siang hari mencari data dan pada malam hari mengolah dan menganalisa data, agar dapat terwujud proposal yang memmuat data indikator dan sub indikator yang sesuai dengan PP 129 tahun 2002.<sup>65</sup>

Pada hari pertama mencari data dapat mengisi 3 tabel indikator, hari ke dua sudah didapatkan 7 tabel. Hari ketiga keempat dan kelima semua tabel pendataan telah terisi dan dapat memenuhi sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2002.<sup>66</sup> Hari Jum'at tanggal 1

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011. Lihat juga. Abdul Rohim dan Amwat, *"Sejarah Terbentuknya Eks Kewedanaan Kepahiang Mejadi Kabupaten Kepahiang"*. Disampaikan Kepada Pemda Kabupaten Kepahiang Pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepahiang ke-2 Tanggal 07 Januari 2006. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. 2006, hlm 3.

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Menurut Amwat akibat bekerja siang malam bahkan sering sampai pagi, maka hari ketiga mencari data Amwat dan Abdul Rohim jatuh sakit dan segera berobat, namun pencarian data tetap dilakukan. Bukan hanya sekedar itu, suatu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Amwat adalah rumahnya dinaiki maling pada malam pembuatan proposal "kami membuat proposal itu sampai pagi, peristiwanya pas pada saat kami sudah kecapaian semua, saat itu maling naik ke rumah saya. Pada saat itu bapak ketua Zanuri Mayang pulang jam 23.00 Wib, dan pak Abdul Rohim juga pulang jam 24.00 Wib, dan tinggal kami bertiga, saya, Eduardo dan istri saya. Pada malam itu juga saya bilang sama Eduardo "Edo tulislah apa hasil pemikiran kamu yang bagus, jika kepahiang jadi kabupaten ada sumbangsi pemikiran kamu yang berlian silakan tulis". Jam 02.00 Wib beliu Eduardo pulang, dan jam 03.00 maling naik ke rumah saya ini. Pada saat itu saya tidak membayangkan harta saya yang diambilnya oleh maling, tapi saya teringat dengan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang pada

Juli 2002 pukul 16.00 Wib tim pembuat proposal telah dapat menyampaikan satu buah berkas data beserta satu sof kopinya dan dukungan dari DRD Rejang Lebong. Data tersebut diserahkan ke bagian Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong yang diterima oleh Drs. Sumardi, M.Si.<sup>67</sup> Bahan yang disampaikan adalah merupakan bahan substansial ekspose Bupati Rejang Lebong di depan Pansus DPR Provinsi. Sementara penulisan proposal dalam bentuk buku dilaksanakan oleh Amwat, Drs. Abdul Rohim, Ahmad Muslim, H. Zainuri Mayang dan Eduardo, SH. Proposal dalam bentuk buku baru dapat diserahkan pada tanggal 28 Agustus 2002.<sup>68</sup>

## **b. Kepahiang Terwujud Menjadi Kabupaten**

Perjalanan yang panjang yang memakan waktu hampir tiga tahun dan melelahkan akhirnya Kabupaten Kepahiang dapat terwujud. Pengajuan proposal yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2002, maka pada tanggal 15 Juli 2002 keluar surat persetujuan DPRD Rejang Lebong dan tanggal 12 September 2002 kembali menerima Surat Keputusan DPRD Rejang Lebong melalui Pnsus. Bersamaan dengan itu juga menerima surat dari Bupati Rejang Lebong, yang ditujukan pada bapak Mendagri, perihal tentang Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong. Perjalanan panjang yang melelahkan dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang sebagai mana yang diungkapkan oleh ketua Umum panitia PPKK sebagai berikut:

“Kalau saya tidak salah tiga tahun empat bulan lamanya memperjuangkan kepahiang untuk menjadi kabupaten. Proposal yang memenuhi PP 129 tahun 2002 sudah kita penuhi, tapi Kabupaten induk belum juga mau mengeluarkan surat persetujuan. Yang terakhir saya datang ke Bupati Rejang Lebong waktu itu Bupatiya bapak Ijazi, SH, sebetulnya bapak Ijazi itu dari silsilah istrinya dia itu cucu saya artinya ia masih ada hubungan keluarga dengan saya dan ia panggil nenek dengan saya. Pada waktu saya menghadap beliau, saya katakan “Yang menghadap sekarang ini resmi sebagai ketua Presidium bukan nenek kamu dan yang saya hadapi ini adalah Bupati dan bukan cucu saya. Pertama saya ingin menyampaikan pada bapak Bupati, bahwa sudah cukup lama kami mengajukan propoasal untuk menjadi kabupaten, sampai hari ini belum disetujui oleh bapak, untuk ini saya ingin

---

waktu itu masih berantakan dan berserakan, dan semuanya masih pakai tulisan tangan. Itulah peristiwa yang sangat tidak bisa kami lupakan pada saat pembuatan proposal pinal itu”.

<sup>67</sup> Abdul Rohim dan Amwat, “*Sejarah Terbentuknya Eks Kewedanaan Kepahiang Menjadi Kabupaten Kepahiang*”. Disampaikan Kepada Pemda Kabupaten Kepahiang Pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepahiang ke-2 Tanggal 07 Januari 2006. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. 2006, hlm 7.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang 14 September 2011

menyampaikan pada bapak Bupati bahwa kalaulah proposal itu sudah seluruhnya memenuhi persyaratan menurut peraturan pemerintah no 129 tahun 2002, maka saya mohon segera untuk disetujui, kalau tidak saya beri kesempatan selama 14 hari. Kalau sudah lebih dari 14 hari belum juga diberi persetujuan saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah orang akan melakukan demonstrasi ke kantor bapak, apakah orang akan melempar mobil bapak dan lain sebagainya. Setelah ini saya juga akan melapor sama Kapolres dan Komandan Kodim, bapak boleh cek nanti". Setelah itu saya pamit dan terus melapor sama bapak Kapolres dan Komandan Kodim, Pada saat saya menghadap Komandan Kodim ia katakan pada saya "bersabarlah bapak", saya jawab "sabar manusia itu ada batasnya kecoal persyaratannya tidak lengkap". Saya menemui bapak Bupati itu cuma sendirian dan sebetulnya saya terpaksa juga, karena saat itu saya sudah dimarahi oleh anggota tim yang lainya dan yang muda-muda pada saat itu sudah lain maunya, kata mereka "kita lempar aja mobil bapak Bupati itu jika ia lewat ke Bengkulu". Jadi saya selaku ketua tentu akan menanggung resiko yang berat. Sebeb saat itu seluruh pesyaratan untuk menjadi sebuah kabupaten sudah terpenuhi ini yang membuat anggota tim geram, maka saya yang didesak oleh yang muda-muda untuk menemui Bupati. Jadi 10 hari setelah itu keluar persetujuan bapak Bupati. Itulah suka dukanya dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang".<sup>69</sup>

Keluarnya surat persetujuan dari Bupati dan DPRD Rejang Lebong, maka segenap Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepahiang merasa lega dan yakin bahwa kepahiang sudah di depan mata akan terwujud sebagai sebuah kabupaten. Pada tanggal 24 September 2002 Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepahiang menerima surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu tentang Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong menjadi tiga Kabupaten. Dengan diterimanya surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong, maka semua panitia dan masyarakat kepahiang merasa lega dan optimis bahwa Kabupaten Rejang Lebong akan terwujud.

Berikut adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang.

1. Menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) pemekaran dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong
2. Menghadiri rapat paripurna DPD Rejang Lebong dengan agenda pokok Pemekaran Eks Kewedanaan Lebong dan Eks Kewedanaan Kepahiang
3. Menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansusu) Pemekaran dari DPRD Provinsi Bengkulu
4. Menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda pemekaran Eks Kewedanaan Kepahiang dan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 14 September 2011

eks Kewedanaan Lebong menjadi calon kabupaten baru dalam Provinsi Bengkulu. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang mengirim peserta sebanyak 400 orang

5. Menerima kunjungan tim Gabungan Otonomi Daerah (Otoda) yang beranggotakan 12 orang yaitu: Drs. Asmawi Rewansyah, M. Si (Depdagri), Wahyu M. Nadjib, SH (Staf Menpan), Ir. Edison Silaen Dipl. Ph. (Depdagri), Drs. Anwar Malik (Komisi II DPR-RI), Kol. Yohanes Pessy (Dephan), Nugroho Imam Santoso, SE.MM (Depkeu), Taufik Hidayat (Bapenas), Drs. Lukman Nurhakim, M. Si (Depdagri), Drs. Robert D. Megawe, MRP (Depdagri), Fatimah (Depdagri), Saur Panjaitan (Staf Ahli). Mereka adalah melakukan observasi langsung ke lapangan terhadap kesiapan kepahiang untuk menjadi calon kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Kunjungan berlangsung pada tanggal 14 Maret 2003
6. Pada Tanggal 20 Nopember 2003 menghadiri sidang paripurna di gedung DPR/MPR-RI Jakarta dengan agenda pokok pemandangan akhir fraksi-fraksi DPR-RI tentang pemekaran 24 Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang pada waktu itu mengirim 35 orang utusan dari calon Kabupaten Kepahiang
7. Pada Tanggal 7 Januari 2004 atas undangan dari Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang menghadiri peresmian 24 Kabupaten/Kota hasil pemekaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia mengirim sebanyak 14 orang anggota panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. Pendanaan kegiatan ini berasal dari sokongan beberapa orang donatur antara lain: Drs. Ahmad Jajuli Rp. 2.000.000, Mulyono, S. Pd Rp. 1.500.000, Drs. Mahadi CB Rp. 500.000 dan Drs. Dalimin Rp. 250.000. Sementara Drs. Wildan meminjamkan mobil sedan dan menanggung bahan bakarnya untuk pulang pergi.<sup>70</sup> Pengumpulan sumbangan dari beberapa donatur tersebut, maka Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang dapat berangkat ke Jakarta.

Atas keberhasilan Kepahiang menjadi Kabupaten, maka Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang mengadakan acara syukuran. Untuk melaksanakan kegiatan ini dananya digalang dari segenap panitia Kepahiang dan Perwakilan Kepahiang di Bengkulu. Acara syukuran

---

<sup>70</sup> Abdul Rohim dan Amwat, *Ibid.* hlm. 8-9

dipusatkan di lapangan Santoso Kepahiang. Dalam acara syukuran ini juga diadakan acara pelantikan Sekda Drs. M. Alwi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang yang pertama oleh Gubernur Provinsi Bengkulu. Acara yang berlangsung selama 3 hari 3 malam itu juga diramaikan oleh pameran pembangunan yang menampilkan semua potensi Kepahiang sebagai Kabupaten baru di Provinsi Bengkulu. Panitia juga mengadakan sayembara lomba logo Kabupaten Kepahiang.<sup>71</sup> Pemenang logo Kabupaten Kepahiang atas nama karya Ade Irawan, sampai sekarang logo tersebut dijadikan sebagai logo Kabupaten Kepahiang oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang setelah menjadi kabupaten, terhitung Januari 2003 sampai 2004 dijabat oleh Bupati Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. Dalam perjalanannya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) kepala Daerah tahun 2004 digantikan oleh Drs. H. Husni Hasanudin dari Pemerrenrah Daerah Provinsi Bengkulu. Proses selanjutnya Kabupaten Kepahiang memasuki pemeilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Pada pemilihan itu ada lima calon yang maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yang ikut dalam percaturan itu adalah:

1. Bambang Sugianto, M. Hum berpasangan dengan Amwat
2. Darussalam, S.Sos berpasangan dengan Muslim
3. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM berpasangan dengan dr. Hendrapala
4. Drs. Amrullah berpasangan dengan Heri Harjoni
5. Drs. H. Bando Amin C Kader berpasangan dengan Abasri DJ, BA

Dari hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat itu, maka terpilihlah pasangan Drs. H. Bando Amin C. Kadir, MM dengan Abasri DJ, BA, sebagai Bupati difinitif Kabupaten Kepahiang yang pertama periode 2005-2010.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Menurut Amwat Pelaksanaan lomba logo Kabupaten Kepahiang dilaksanakan oleh Panitia PPKK. Panitia memilih 10 besar pemenang. Selanjutnya dipilih tiga logo terbaik untuk ditetapkan sebagai pemenang. Berdasarkan Surat Keputusan PPKK Nomor 09/Kep/PPKK/ 2004, tanggal 28 Pebruari 2003, maka ditetapkanlah tiga orang pemenang masing-masing: Pemenang 1 atas nama karya Ade Irawan, alamat Jl. Bogor No. 385 Kelurahan Pensiunan Kepahiang, pemenang ke dua atas nama Arifky Suhada alamat SLTP I Kepahiang Jl. K.H. Dewantara dan pemenang ketiga atas nama Nira Elia alamat SLTP I Kepahiang Jl. K.H. Dewantara Kepahiang. Masing-masing pemenang diberi hadiah.

<sup>72</sup> Abdul Rohim dan Amwat, *Ibid*, hlm. 10

## **D. PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHANG**

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pembentukan Kabupaten Kepahiang memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Keberhasilan Kepahiang menjadi sebuah kabupaten tidak terlepas dari peranan berbagai elemen masyarakat. Dengan arti kata dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang banyak pihak yang berperan, namun peran mereka masing-masing berbeda dengan kadar yang berbeda pula.<sup>73</sup> Sebab masing-masing orang ada kelebihan dan ada kekurangannya, akan tetapi kelebihan dan kekurangan itu dapat saling melengkapi, itu yang membuat sukses dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang.

“Pada awal pergerakan pembentukan Kabupaten Kepahiang panitia berjumlah 88 orang yang terdiri dari berbagai profesi, Namun setelah panitia memasukan proposal dan pemerintah Rejang Lebong sebagai kabupaten induk tidak menyetujui untuk pembentukan Kabupaten Kepahiang. Panitia-panitia yang tadinya mendukung pembentukan Kabupaten kebanyakan dari mereka berbalik arah, bahkan takut dan tidak mau lagi datang pada acara rapat-rapat. Sehingga yang betul-betul berkerja dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang tidak beberapa orang lagi. Mereka yang tidak lagi mau bergabung terutama mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mereka mundur satu persatu hanya satu-satunya Amwat yang berani, mereka sangat takut sebab Pegawai Negeri Sipil kan harus loyal terhadap atasannya yaitu Bupati Rejang Lebong. Sementara Rejang Lebong tidak setuju dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang, kendatipun secara institusi pada akhirnya mereka menyetujui”,<sup>74</sup>

Walaupun sebagian dari panitia tidak lagi mau bergabung dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang, namun tidak menyurutkan semangat panitia yang lainnya terutama panitia-paniti yang konsen dengan tujuan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Dalam bab IV ini akan dipaparkan peranan elemen masyarakat dalam pemebentukan Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>73</sup> Menurut Zainuri Mayang Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) adalah panitia pelaksana, sementara presidium yang di dibentuk Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hanya bersifat panitia pengarah atau sering komite. Jadi segala sesuatunya jika ada yang kurang, panitia pengarah memberitahukan pada panitia pelaksana, kemudian panitia pelaksana yang mencari data-data yang diperlukan oleh panitia pengarah dan begitulah seterusnya. Sedang panitia di tingkat provinsi hanya sifatnya penguatan-penguatan data. Yang lebih berperan itu adalah panitia di tingkat pusat. Untuk di tingkat pusat itu ada orang kepahiang yang menjadi Dirjen Otonomi Daerah Ir. Sudirman, dialah yang melakukan lobi-lobi politik ke Pemerintah Pusat, ketika tim Otonomi Daerah datang ke kepahiang Ir. Sudirman juga ikut bersama rombongan tersebut.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang 12 September 2011

## 1. H. Zainuri Mayang

H. Zainuri Mayang adalah salah seorang tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan Kabupaten kepahiang. Kedudukan Zainuri Mayang dalam kepanitiaan adalah sebagai ketua umum. Terpilihnya Zainuri Mayang sebagai ketua panitia adalah dengan pertimbangan beberapa hal. Antara lain Zainuri Mayang adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Kepahiang. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD yang pertama di Kabupaten Rejang Lebong 1956 dari Masumi. Disamping ia sebagai tokoh masyarakat ia juga ketua Legyun Veteran kepahiang dan Wakil ketua Muhammadiyah Cabang Kepahiang. Dengan demikian ia cukup terkenal dikalangan masyarakat kepahiang.

“Pada acara rapat pembentukan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang pertama kalinya di rumah saya, saya dipilih untuk menjadi ketua umum, saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan bagi mereka memilih saya sebagai ketua, mungkin kawan-kawan itu berfikir bahwa saya banyak tahu mengenai sejarah kepahiang, jadi pada saat itu pilihan mereka jatuh kepada saya. Saya katakan berjuang itu tidak mudah, tapi kalau kita sepakat dan mau ya tidak apa-apa dan saya siap aja. Sebab berdasar pengalaman memperjuangkan kabupaten itu tidak semuda membalik telapak tangan dan suatu pekerjaan yang panjang dan melelahkan, kalau kita siap ya tidak apa-apa. Dalam acara rapat itu juga saya katakan kepada panitia terpilih lainnya, bahwa saya ini sudah tua dan tidak banyak yang bisa saya perbuat, jadi saya minta dukungan dan dorongan dari yang muda-muda, sebab yang muda yang akan berkerja”.<sup>75</sup>

H. Zainuri Mayang mengatakan bahwa dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang memakan waktu lebih kurang tiga tahun empat bulan, berbeda dengan daerah lain. Karena pembentukan Kabupaten Kepahiang pada awalnya kurang disetujui oleh kabupaten induk untuk dimekarkan. Berdasarkan pengakuan dari Zainuri Mayang, kabupaten induk tidak mau melepaskan kepahiang, antara lain karena kepahiang adalah penghasil kopi terbesar di Kabuapten Rejang Lebong. Kemudian juga aset-aset Rejang Lebong banyak berada di daerah Kepahiang.

“Ketika panitia mengajukan proposal pembentukan Kabupaten Kepahiang ke Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, ternyata Pemerintah Rejang Lebong menolak pembentukan Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu saya katakan dengan kawan-kawan “Ini suatu bukti apa yang saya ucapkan dalam pidato saya pertama kali dalam rapat pembentukan panitia dulu, bahwa ini adalah pekerjaan yang panjang dan melelahkan kita tidak boleh berhenti dan kita harus tahu kalau ditolak apa alasannya dan kita harus maju terus”. Dalam pengajuan itu beberapa kali proposal kita itu ditolak, kalau saya tidak salah sampai tiga kali dirubah dan yang ke empat baru klir proposal itu. Salah satu persyaratan yang paling sulit kita dapatkan adalah persetujuan kabupaten induk. Kalau tidak salah kepahiang yang

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 16 September 2011



paling duluan untuk mengajukan proposal baik kepada Bupati, Gubernur, DPR dan Mendagri, setelah itu baru disusul oleh daerah lain seperti Seluma, Muko-muko dan Kaur. Syarat yang paling sulit kita dapatkan adalah persetujuan kabupaten induk untuk melepaskan, itu syarat utama dalam undang-undang pemekaran sebuah kabupaten. Sebetulnya kalau persyaratan yang lainya kepahiang paling memenuhi syarat untuk dijadikan kabupaten, sebab kepahiang ini penghasil kopi terbesar di daerah ini, barangkali itu salah satu penyebab kabupaten induk tidak mau melepas”.<sup>76</sup>

Selaku ketua umum panitia, H. Zainuri Mayang lebih banyak berperan sebagai kordinator anggota panitia. H.Zainuri Mayang mengaku bahwa dalam memimpin atau mengkordinir panitia hanya dengan rasa saling percaya. Dalam memimpin Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang selama pembentukan Kabupaten Kepahiang Zainuri Mayang banyak mendapatkan pengalaman yang berharga. Pengalaman yang berharga itu ia dapatkan ketika memimpin rapat-rapat serta mengambil keputusan dalam rapat.

“Pada awalnya saya memang agak susah juga saya memimpin anggota-anggota Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang itu, ketua umum saya dan wakil ketua bapak H. Saleh Krikam. H.Saleh Krikam ini orangnya sangat pemaarah dan mau main hantam saja itu, jadi kalau membawa dia lihat-lihat dulu persoalannya apa, kalau persoalan itu membutuhkan dengan cara agak keras ya dia kita bawa, tapi kalau tidak ya jangan dibawa dia,. Kalau dia marah ia tidak peduli apa di depan bupati atau siapanya ia mau saja tepuk meja. Lain lagi dengan bapak Abdul Rohim orangnya lembut dan sopan, jadi enak jika kita membawa dia dalam pertemuan-pertemuan dan tidak jarang pula Abdul Rohim itu sewaktu-waktu saya suruh memimpin rapat. Jadi dalam memimpin kawan-kawan itu ada seni-seninya, lain orangnya lain pula wataknya, jadi masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangan itu bisa saling melengkapi”.<sup>77</sup>

H. Zainuri Mayang selaku ketua pembentukan Kabupaten Kepahiang yang telah berhasil mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kepahiang, mengaku tidak banyak tuntutan pada pemerintah, karena ia memperjuangkan kepahiang berlandaskan keikhlasan demi untuk masyarakat kepahiang. Zainuri Mayang menginginkan, jika kepahiang sudah menjadi kabupaten, berarti ia sudah sejajar dengan daerah-daerah lainnya, artinya kesejahteraan itu adalah untuk masyarakat kepahiang sendiri. Berikut penuturan Zainuri Mayang:

“Secara pribadi saya tidak mengharapkan apa-apa setelah kepahiang itu dimekarkan, menjadi kabupaten, pernah suatu ketika saya diundang oleh Mendagri ke Jakarta saya diwawancarai oleh TVRI Pusat. Orang TVRI itu bertanya pada saya “apa keinginan bapak jika nanti kepahiang menjadi sebuah kabupaten”? saya jawab “yang saya

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 14 September 2011

<sup>77</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 14 September 2011

inginkan itu kalau sekarang ini kami tertinggal dari daerah-daerah lain, tetapi kalau kami sudah menjadi kabupaten kami sejajar dengan kabupaten lain, artinya pembangunan itu untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ia bertanya lagi “apakah ada keinginan bapak umpamanya jika kepahiang menjadi kabupaten apakah bapak mempunyai keinginan anak bapak menjadi bupati” ?, saya katakan “kalau siapa yang akan menjadi bupati di kepahiang itu dari Sabang sampai Meroke silakan asalkan mau membangun kepahiang. Jadi siapapun yang akan menjadi bupati itu boleh, yang penting ia punya keinginan membangun kepahiang”. Kemudian saya pernah diundang oleh Bupati Kepahiang ketika pelantikan DPRD Kepahiang periode yang kedua kalinya. Bupati bilang pada saya dihadapan ketua DPRD pada saat itu “Pak Zainuri saya ingin membangun tugu peringatan Kabupaten Kepahiang dibangun di titik nol (tepatnya disebelah kantor bupati yang sekarang) dan saya ingin meletakkan patung bapak disana”. Saya jawab “saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati dan DPRD tentang penghormatan bapak kepada saya, tapi saya ingin menyampaikan isi hati saya kepada bapak, bahwa saya tidak ingin dibuatkan tugu atau patung saya di sana, jika tugu saya dibuatkan disana itulah awal permulaan diri saya akan menjadi sombong. Suatu ketika barangkali anak-anak saya nanti ia akan katakan pada orang “kalau bukan karena bapak saya mungkin kepahiang tidak akan menjadi kabupaten”, dan kalau itu yang akan dibuat saya akan hancurkan. Barangkali pemberian Allah SWT jauh lebih baik dari segala-galanya. Saya sudah berbuat, sekarang bapak-bapak sudah mendapat kepercayaan dari rakyat bangunlah kepahiang ini dan saya sebagai orang yang memperjuangkan kepahiang ini sudah berbuat untuk kepahiang” itulah yang saya katakan pada bapak Bupati pada waktu itu”.

Dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang banyak suka dukanya, bagi Zainuri Mayang suka duka itu dapat dijadikan pengalaman hidup tersendiri bagi dirinya. Zainuri Mayang sangat bersyukur kepada Allah, karena dengan usianya yang sudah lanjut itu ia masih dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Antara lain duka yang tidak dapat ia lupakan adalah ketika orang sudah banyak yang lari dan tidak mau lagi untuk menjadi panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, maka di saat itulah pertolongan Allah SWT itu datang:

“Pada awalnya anggota panitia itu banyak, tapi setelah kabupaten induk tidak menyetujui, maka orang banyak yang lari dan takut terutama pegawai-pegawai yang dari Curup, akhirnya hanya tinggal 7 orang saja lagi, kemudian para anggota panitia ini tidak punya uang lagi, dalam setiap kali pertemuan untuk membeli kopi dan kue saja kita patungan sesama anggota yang hadir. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah artinya Tuhan itu akan menolong seseorang hambanya tepat pada waktunya, ketika orang sudah para lari dan tidak ada orang yang yakin lagi akan keberhasilan pembentukan Kabupaten Kepahiang, syukur kalau dia lari saja tidak apa-apa, tapi ada yang balik menyerang, dan mencemooh kan panitia yang ada. Allah itu maha kaya Ia berbuat sekehendaknya yang tidak disangka orang bisa

berhasil nyatanya berhasil. Setelah ketuk palu pengesahannya di DPR-RI waktu itu saya hanya bersyukur pada Allah SWT artinya inilah kehebatan Allah SWT, disaat tidak ada orang menolong, dan di saat tidak ada uang sama sekali di saat itu pulalah pertolongan Aallah SWT datang dan akhirnya kita berhasil”.<sup>78</sup>

H. Zainuri Mayang mengatakan, bahwa satu hal yang ia minta pada pemerintah Kabupaten Kepahiang yang sekarang adalah agar panitia-panitia yang dianggap berjasa dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang itu supaya di naikan haji ke Tanah Suci Mekkah. “Mereka memang tidak mengharapkan, cuma saya selaku ketua umum Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang akan memperjuangkan hal itu dan Bupati Kepahiang memang sudah berjanji dengan saya” Demikian Zainuri Mayang mengungkapkan.

## 2. Amwat

Amwat adalah salah seorang tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang, kedudukan Amwat dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang adalah bendahara. Walaupun ia sebagai bendahara, akan tetapi ia juga mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. Menurut Safril Siregar Amwat adalah tokoh dan motor penggerak Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, berikut penuturan Safril Siregar:

“Sebetulnya tokoh dan motor penggerak pembentukan Kabupaten Kepahiang itu adalah pak Amwat walaupun posisinya sebagai bendahara. Kalau ketua tidak hadir dalam acara rapat, rapat tetap bisa berjalan, sekretaris tidak hadir rapat juga tetap berjalan, tapi kalau bapak Amwat tidak hadir dalam rapat, maka rapat tidak bisa berjalan begitu besarnya peran bapak Amwat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang”<sup>79</sup>.

Pada saat pembentukan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang Amwat menjabat sebagai kepala Kelurahan Pensiunan Kepahiang. Amwat satu-satunya Pegawai Negeri yang bertahan sebagai Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang sampai kepahiang menjadi kabupaten, namun karena situasi politik pada saat itu Amwat dilensurkan dari Kepala Kelurahan. Berikut penuturannya:

“Secara institusi pada awalnya Pemerintah Rejang Lebong mendukung, pembentukan Kabupaten Kepahiang, tapi secara pribadi-pribadi mereka tidak mendukung. Apa lagi pegawai-pegawai yang dari Kabupaten induk pada awalnya mereka mendukung, tapi

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Zainuri Mayang, Kepahiang, 14 September 2011

<sup>79</sup> Wawancara dengan Safril Siregar, Kepahiang, 16 September 2011 Syafril Siregar dalam Pimpinan Radio Rapindo. FM Kepahiang.

ketika Pemerintang Rejang Lebong tidak mau menyetujui, yang pegawai tadinya mendukung mereka akhirnya berbalik tidak mendukung, bahkan mereka takut untuk bergabung dengan panitia pemekaran. Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepahiang itu pada awalnya, ada sekitar 88 orang, tapi akhirnya yang berkerja itu tidak beberap orang. Saya satu-satunya pegawai yang bertahan dan pada saat itu saya menjabat Kepala Kelurahan Pensiunan dengan snderinya gedung dan fasilitas kelurahan bisa dipakai untuk sekretariat PPKK, namun akhimya secara politis saya dinonjobkan dan PPKK tidak bisa lagi berkantor di situ”<sup>80</sup>.

Amwat selaku bendahara Panitia Persipan Kabupaten Kepahiang, mengaku banyak tahu mengenai sumber dana untuk operasional panitia. Dana untuk membiayai pembentukan Kabupaten Kepahiang hanya didapatkan dari sumbangan sukarela diantara paitia-panitia yang simpati dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan donatur tetap hanya H. Saleh Krikam satu-satunya yang sering menyumbang untuk keperluan operasional panitia.

“Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang, penuh dengan tantangan yang berliku-liku. Dari segi pendanaan panitia tidak punya dana, banyak orang yang mencemoohkan “mana bisa kepahiang menjadi kabupaten kalau tidak punya dana” dan orang-orang kepahiang yang tinggal di luar kepahiang tidak mau mengorbankan uang atau dana. Jadi saya bendahara dan rumah saya dijadikan tempat sekretariat, saya tahu berapa uang yang dikeluarkan oleh panitia pemekaran. Uang yang dikasih oleh pemerintah cuma sebanyak 30 juta, 15 juta untuk menghadirkan tim DPUD dari Jakarta dan 15 juta untuk ketuk palu di Jakarta. Kemudian dana yang lain ya sumbangan sukarela dari teman-teman ya jumlahnya tidak banyak. Donatur tunggal satu-satunya bapak H. Saleh Krikam itu jumlahnya juga tidak banyak”.

Berdasarkan pengakuan dari Amwat untuk penggalangan dana, panitia dulu pernah membuat semacam kupon, pada awalnya ada juga orang yang mau menyumbang, dengan melalui kupon tersebut tetapi dalam perjalanannya, terutama semenjak Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk tidak menyetujui kepahiang menjadi kabupaten. Semenjak itu orang banyak yang lari dan tidak mau bergabung dengan panitiaterutama panitia-panitia yang pegawai negeri sipil, mereka tidak yakin kepahiang bisa jadi kabupaten. Akhimya kupon yang dibuat itu tidak laku lagi. Kemudian juga pernah dibuka nomor rekning di bank untuk menggalang dana, namun hasilnya juga sama tidak ada orang yang mau menyumbang, berikut penuturan Amwat:

“Untuk penggalangan dana, kami pernah dulu membuat kupon cukup banyak juga kopon itu, namun orang juga tidak mau menyumbang, karena orang tidak yakin akan berhasil pembentukan Kabupaten

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011

Kepahiang. Akhirnya kupon itu tidak kita jalankan. Kemudian pernah juga dulu kita siarkan pada masyarakat melalui radio, terutama Radio Rapindo FM. Ajakannya untuk memberikan sumbangan seperti ini “Dihimbau kepada seluruh masyarakat kepahiang yang ingin membantu pembentukan Kabupaten Kepahiang silahkan masukkan ke no rekening sekian-sekian”. Karena masyarakat merasa pembentukan Kabupaten Kepahiang tidak akan berhasil, maka hasilnya juga tidak ada. Jadi donatur yang agak lumayan pada saat itu satu-satunya hanya pak H. Saleh Krikam, dia yang sering menyumbang”.<sup>81</sup>

Selain tugasnya sebagai bendahara yang mengatur masalah keuangan, Amwat juga mengaku sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pada waktu pembentukan Kabupaten Kepahiang. Tanpa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Kabupaten Kepahiang tidak akan mungkin terwujud. Sosialisasi yang dilakukan bukan saja secara langsung pada masyarakat, akan tetapi melalui wawancara yang disiarkan langsung melalui Radio Rapindo. FM. Berikut pengakuan dari Safril Siregar:

“Bapak Amwat sebagai tokoh penggerak dari pembentukan Kabupaten Kepahiang sering mengadakan bincang-bincang atau dialog yang disiarkan secara langsung melalui Radio Rapindo.FM, dialog itu membicarakan masalah seputar pembentukan kabupaten kepahiang. Dalam acara dialog itu saya yang bertanya lalu bapak Amwat yang menjawab. Umpamanya saya bertanya “Pak Amwat saya selaku pimpinan Radio Rapindo. FM ingin bertanya pada bapak, sudah sejauh mana perkembangan pembentukan Kabupaten Kepahiang?”. Kemudian bapak Amwat menjawab, begitu seterusnya. Tujuan kita mengadakan dialog itu adalah agar masyarakat tahu bagaimana perkembangan pembentukan kabupaten kepahiang”.<sup>82</sup>

Disamping bendahara Amwat juga ditunjuk oleh panitia sebagai ketua perancang dan pembuat proposal Pembentukan Kabupaten Kepahiang. Suatu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Amwat dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang adalah ketika membuat proposal yang sesuai dengan PP 129 Tahun 2002. Dimana pada saat itu ketua dan wakil ketua (H. Zainuri Mayang H. Saleh Krikam) memberi waktu satu minggu pada Amwat dan Abdul Rohim proposal harus siap untuk diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Berikut Amwat menuturkan:

“Sebelumnya kami menerima surat dari Wakil Bupati yang ditujukan pada Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, yang isinya, bahwa proposal yang mengikuti PP harus dimasukkan dalam tempo satu minggu ke depan untuk disampaikan oleh Bupati Rejang Lebong di hadapan Pansus DPRD Provinsi. Untuk menanggapi surat Bupati itu diadakan rapat kilat yang dihadiri oleh 4 orang panitia, H. Zainuri

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 14 September 2011

<sup>82</sup> Wawancara dengan Syafril Siregar, Kepahiang, 15 September 2011.

Mayang, H. Saleh Krikam, Abdul Rohim dan Amwat. Suatu hal yang tidak bisa saya lupakan pada saat rapat di rumah saya adalah, Setelah rapat dibuka oleh ketua, pembahasan selanjutnya adalah menanggapi surat Bupati yang memerintahkan bahwa panitia PPKK harus memasukan proposal yang mengikuti PP dalam jangka 10 hari kedepan. H. Saleh Krikam selaku wakil ketua pada saat itu mengatakan “Pak Amwat dan pak Abdul Rohim tolong dibuat proposal itu secepatnya” Lalu pak Abdul Rohim menjawab “siap pak”. Kemudian saya ngomong “saya tidak siap, terus terang saya tidak siap”. Karena tidak mungkin waktu hanya tinggal satu minggu, sementara proposal yang sesuai dengan PP itu masih nol. Pada saat itu H. Zanuri Mayang dan H. Saleh Krikam menangis. H.Salekh Krikam berkata “buatlah proposal itu semampu kamu, dan uang berapa yang dibutuhkan aku siapkan” . Kemudian saya jawab kalau begitu baik, kami buat proposal itu dengan catatan: 1. Jika kami berdua ditugaskan untuk menyusun proposal sesuai dengan PP 129 tahun 2002 dan memenuhi segala indikatonya dalam waktu tinggal satu minggu, panitia jangan kecewa atau kesal jika proposal itu tidak dapat diselesaikan 2. Jangan saling tinggal kalau Kabupaten Kepahiang terwujud, 3. Persiapkan dana selama kami melakukan pendataan ke semua instansi dalam Kabupaten Rejang Lebong. Panitia yang hadir menyepakatinya. Hari sabtu pak Abdul Rohim di telpon H. Saleh Krikam untuk datang kerumahnya, kemudian di kasih uang sebanyak 400.000. Hari senin kami mulai bekerja untuk mencari data, siang mencari data malam mengolahnya begitulah seterusnya, pas hari jumat setelah selesai jumat proposal itu selesai. Kemudian kita sampaikan ke Pemerintah Rejang Lebong. Tanggal 18 Agustus 2002 kami membuat proposal itu sampai pagi, saat kami sudah kecapaian semua, hari telah larut malam yang lainnya sudah pulang semua tinggal saya, Eduardo dan istri saya. Pada malam itu sekitar jam 03.00 Wib rumah saya dinaiki oleh maling. Pada saat itu saya tidak membayangkan harta saya yang diambil oleh maling, tapi saya teringat dengan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang pada waktu itu masih berantakan dan berserakan, dan semuanya masih pakai tulisan tangan. Itulah peristiwa yang sangat tidak bisa kami lupakan pada saat pembuatan proposal pinal itu”.<sup>83</sup>

Pencarian data untuk membuat paroposal yang sesuai dengan PP 129 Tahun 2002 adalah Amwat dan Abdul Rohim, data-data di cari di Kabupaten Induk di Rejang Lebong dan kepahiang. Data-data yang dicari adalah, data indikator dan sub indikator, yang akan dimuat dalam proposal. Pencarian data dilakukan selama satu minggu, dimulai hari senin sampai hari Jum’at, data dicari ke instansi-isntasi pemeimtah antara lain Dispenda, Statistik, Keuangan, Perhubungan dll. Akhirnya dalam satu minggu proposal yang menurut PP 129 Tahun 2002 dapat diselesaikan dan diajukan pada Pemerintah Rejang Lebong.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Amwat dan Abdul Rohim , Kepahiang, 13 September

Menurut Amwat keberhasilan dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang, bukan semata-mata panitia, tapi banyak pihak yang terlibat baik, langsung maupun tidak langsung. Tapi suatu hal yang perlu dicermati, bahwa keterlibatan atau peran mereka kebanyakan hanya sebatas mendukung dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amwat berikut ini:

“Dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang banyak pihak yang memberikan dukungan dan sokongan. Hampir-hampir seluruh kepada desa, PKK, LKMD dan Karang Taruna di kepahiang mendukung terbentuknya Kabupaten Kepahiang, tapi dukungan itu hanya dalam bentuk tertulis saja, belum lagi dukungan yang diberikan oleh kelompok-kelompok Tani dan kelompok-kelompok pengajian yang ada di daerah kepahiang ini. Akan tetapi semua dukungan itu hanya dalam bentuk tertulis. Namun yang benar-benar berkerja dalam pembentukan kabupaten kepahiang tidak beberapa orang. Sebab Pada awalnya paniti itu ada sekitar 88 orang yang terdiri dari berbagai profesi, namun setelah Pamerintah Rejang Lebong tidak menyetujui pembentukan Kabupaten Kepahiang, banyak panitia-paniti itu yang takut dan tidak mau lagi datang rapat-rapat, lebih-lebih lagi yang berstatus pegawai negeri sipil. Yang paling celaknya lagi bukan hanya sekedar takut, tapi mereka balik menyerang dan mengejek panitia yang ada, antara lain ejekanya itu “tidak gampang dan tidak semudah membalik telapak tangan membentuk Kabupaten Kepahiang” Ejekan semacam ini kami dengar dan kami terima dari berbagai orang, termasuk dari para pemuda. Kemudian ada sebagian mereka yang mendukung tapi tidak mau bersuara atau berbuat, kalau diminta dukungan mereka secara tertulis mereka mau menanda tangannya, jika kita undang rapat mereka juga tidak mau datang”.<sup>84</sup>

Menurut Amwat, ejekan dari sebahagian masyarakat terhadap panitia yang masih aktif dan yakin kepahiang akan terwujud menjadi kabupaten adalah setelah Kabupaten Rejang Lebong tidak setuju dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Sikap Kabupaten Rejang Lebong yang tidak menyetujui itu sangat besar pengaruhnya terhadap semangat panitia, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil, mereka tidak mau lagi bergabung dengan panitia yang ada. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia yang masih yakin kepahiang bisa menjadi kabupaten. Panitia yang masih yakin kepahiang akan terwujud sebagai sebuah kabupaten tidak mepedulikan ejekan dari sebahagian orang tersebut. Tapi ketika kepahiang sudah di depan mata akan menjadi kabupaten mereka kembali berbalik, bagi panitia hal itu tidak menjadi masalah.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011



### 3. Abdul Rohim

Peranan Abdul Rohim dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang adalah sebagai Wakil Sekretaris. Karena sekretaris umumnya tidak berfungsi dan tidak aktif, Abdul Rohim yang menghandel semua pekerjaan sekretaris. Dalam tugas dan fungsinya kepanitiaan Persiapan Kabupaten Kepahiang, tidak harus terpokus pada satu bidang saja, akan tetapi apa yang bisa dikerjakan, mereka kerjakan, kendatipun hal itu tidak merupakan tugas pokoknya. Dalam bekerja panitia saling bantu membantu satu sama lain dan saling memberikan masukan. Menurut Abdul Rohim walaupun ia sebagai wakil sekretaris, namun dalam pekerjaan, ia dapat mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh panitia, bahkan menurut Abdul Rohim ia juga sering disuruh oleh ketua memimpin rapat-rapat dalam kepanitiaan PPKK. Bukan itu saja ia juga salah seorang anggota tim penyusunan proposal, berikut penuturannya:

“Secara struktur kepanitiaan PPKK saya itu wakil sekretaris, karena sekretaris umum atau sekretaris I tidak berfungsi, maka saya wakilnya yang lebih banyak berperan. Jadi saat-saat tertentu saya perlu pormulasikan pekerjaan itu, maka kadangkala kerja sekretaris itu bisa melebihi ketua, karena sekretaris itu harus tahu ke luar dan ke dalam, dengan arti kata skendarionya adalah sekretaris Kalau dari segi tanggungjawab ya jelas ketua lebih besar, dan ketua itu sifatnya lebih mengkoordinir. Tapi saya sering disuruh memimpin rapat dalam kepanitiaan, kalau sudah dibuka oleh ketua, selanjutnya saya lah yang memimpin jalannya rapat itu. Kemudian saya juga anggota tim pembuat proposal, kadangkala ya ada juga melipat amplop, bahkan mengantar surat sekalipun, jadi apa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan. Pada awalnya panitia itu memang banyak, tapi kalau kita mau jujur orang yang berkerja ya tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Lebih-lebih pada saat kabupaten induk tidak menyetujui, maka berguguran panitia itu, terutama yang pegawai negeri mereka lari semua dan takut pada Bupati”.<sup>85</sup>

Menurut Abdul Rohim rangkap kerja dalam kepanitiaan memang tidak bisa dihindari, sebab panitia yang aktif itu tidak banyak orangnya, paling-paling yang aktif itu sebanyak 7 orang, sementara yang lainnya tidak aktif dan mereka juga jarang bahkan ada yang tidak pernah hadir dalam rapat-rapat, sementara nama mereka tercantum dalam struktur kepanitiaan. Kendatipun secara struktur Abdul Rohim adalah sekretaris, namun ia juga menjadi anggota tim pembuat proposal. Berikut ungkapan Abdul Rohim:

“Suatu hal yang tidak bisa saya lupakan adalah saat-saat yang sangat kritis yaitu hanya tinggal saya dengan pak Amwat. Saat itu saya masih ingat, pada persiapan proposal yang terakhir, kata Pemerintah Rejang Lebong harus disiapkan dalam waktu 10 hari, kemudian wakil ketua II H. Saleh Krikam menantang, proposal harus disiapkan dalam jangka 1

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Abdul Rohim, Kepahiang 13 September 2011



minggu kedepan, maka kami berkerja keras untuk menyiapkan proposal yang menurut PP 129 Tahun 2002. Pada hari minggu kami mulai berkerja dan mencari data-data mengenai perkembangan kepahiang yang harus sesuai dengan PP, bayangkan saja 33 tabel yang harus disiapkan, kemudian syarat untuk menjadi kabupaten harus ada minimal 3 kecamatan difinitif. Proposal yang dibuat tahun 2000 belum memenuhi syarat menurut PP 129 Tahun 2002, waktu itu kami mengolah proposal dalam tempo satu minggu selesai proposal yang ditargetkan oleh wakil ketua bapak H. Saleh Krikam. Saat itulah yang sangat kritis, tapi orang tidak banyak tahu, sehingga bapak Bupati bilang sama saya dan Amwat "Lu hanya berdua mempersiapkan proposal ini?".<sup>86</sup>

Kendatipun tugas pokok Abdul Rohim sebagai sekretaris Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ia juga bertugas sebagai pencari dukungan. Pembentukan Kabupaten Kepahiang. Mencari dukungan ini dilakukan dengan cara membawa blangko atau instrumen yang telah disiapkan oleh panitia. Dukungan dicari ke desa-desa seperti kepala desa, LMD, Karang Taruna, Kelompok Tani, Majelis-Majelis Ta'lim, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam tugas mencari dukungan ini panitia membagi perwilayah berdasarkan kedekatan hubungan emosional masing-masing panitia.

"Dalam mencari dukungan ini panitia membawa balangko yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian panitia membagi wilayahn berdasarkan kedekatan hubungan emosional. Untuk wilayah Ujan Mas kecamatan Marigi, Safril Siregar, Kepahiang Kebawetan Mulyono, Amwat, Abdul Rohim, dan Winarto, Bermani Ilir Tebat Karai, H. Saleh Krikam dan H. Zainuri Mayang dan Mulyadi, MD. Cara kerjanya, instrumen disiapkan oleh panitia sehingga formatnya sama. Sebelumnya kami berikan arahan dulu setelah ia paham baru kita minta tanda tangannya. Kadangkala mereka sudah punya format tersendiri ya tidak masalah yang penting bagi kita mereka mau mendukung atau memberikan sokongan secara tertulis. Tenggang waktu yang kami berikan pada mereka selama 4 hari, kemudian kami jeput lagi. Dengan cara seperti itu ternyata hasilnya banyak dapat dukungan dari berbagai organisasi seperti; kepala desa, LMD, Karang Taruna, Kelompok Tani dan Majelis-majelis Ta'lim atau kelompok-kelompok pengajian yang ada di desa-desa, rata-rata format yang kami berikan mereka mau mengisinya dan menandatangani. Kami memang tidak bisa memberikan waktu yang lama pada mereka sebab kami berkerja. Dukungan yang mereka berikan hanya dalam bentuk tertulis saja, sedangkan dalam bentuk dana tidak ada". Demikian Abdul Rohim mengungkapkan.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Abdul Rohim dan Amwat, Kepahiang, 13 September 2011

#### 4. Eduardo

Peranan Eduardo dalam kepanitiaan Persiapan Kabupaten Kepahiang adalah panashat dibidang hukum atau memberikan masukan pada panitia yang berkaitan dengan masalah hukum. Eduardo mengaku pada awalnya ia belum bergabung dengan panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, karena ia belum melihat aturan yang mengacu pemekaran suatu wilayah. Namun setelah Amwat mendapatkan bahan tentang peraturan yang mengatur mengenai pemekaran wilayah, maka ia memberikan pada Eduardo untuk dipelajari. Kemudian Eduardo mempelajarinya, ia dapat menyimpulkan bahwa kepahiang bisa dimekarkan menjadi kabupaten, karena sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur soal pemekaran wilayah. “Saya sebetulnya pada awalnya saya tidak aktif, tapi pak Amwat datang dengan saya dan ia bilang “cobalah kamu aktif untuk menggerakkan panitia pembentukan kabupaten kepahiang ini”. Saya jawab secara gamlang, “bukan saya tidak mau, tapi saya belum bisa menemukan satu dasar pemikiran saya, karena saya berlatar belakang serjana hukum jadi segala sesuatunya saya kaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan”. Lalu pak Amwat bilang “kalau begitu nanti saya berikan bahannya”. Setelah bahan/aturan yang mengatur tentang pembentukan kabupaten ( PP No 129 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pembentukan atau pengabungan Daerah Otonomi Baru). diberikan oleh pak Amwat pada saya, saya bilang sama pak Amwat “ini akan saya belajari satu malam ini”. Setelah saya pelajari ternyata bisa dan mungkin, itulah yang menyebabkan saya yakin kepahiang bisa jadi kabupaten, maka semenjak itu saya aktif di kepanitiaan Persiapan Kabupaten Kepahiang.<sup>87</sup>

Dalam acara rapat-rapat di tingkat kepanitiaan Eduardo sering diminta pendapatnya atau memberikan masukan pada panitia yang menyangkut dengan masalah perundang-undangan yang terkait dengan pemekaran wilayah. Diantarnya Eduardo bersama anggotanya pernah memberikan masukan pada panitia ketika panitia mengalami saat-saat yang sangat sulit. Walaupun panitia telah mengajukan proposal pembentukan Kabupaten Kepahiang pada Pemerintah, namun proposal itu belum sesuai dengan PP 129 Tahun 2002. Saat itu Eduardo dan anggotanya memberikan pendapat bahwa meskipun belum memenuhi ketentuan PP 129 Tahun 2002, secara politis Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan usulan pemekaran kepahiang kepada DPRD Kabupaten Rejang Lebong.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Wawancara dengan Eduardo, Kepahiang 14 September 2011

<sup>88</sup> Abdul Rohim dan Amwat, “*Sejarah Terbentuknya Eks Kewedanaan Kepahiang Menjadi Kabupaten Kepahiang*” . Disampaikan Kepada Pemda Kabupaten Kepahiang Pada Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepahiang ke-2 Tanggal 07 Januari 2006. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. 2006, hlm 3.

Peranan Eduardo bukan hanya dalam bidang hukum, ia juga melakukan sosialisasi secara pribadi pada masyarakat. Hal itu dilakukannya bila ada kesempatan kapan dan dimana saja. Menurut Eduardo, tanpa sosialisasi pada masyarakat tidak mungkin kepahiang terwujud menjadi sebuah kabupaten. Berikut penuturannya:

“Saya sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan meyakinkan masyarakat apa untungnya jika kepahiang jadi kabupaten, kalau tidak demikian mana mungkin kepahiang menjadi kabupaten. Pernah ada orang katakan pada saya “apa sih untungnya bagi kamu jika kepahiang jadi kabupaten?”. Dalam bahasa saya, saya katakan pada masyarakat “paling tidak kalau kepahiang jadi kabupaten, anak saya mau lihat Bupati atau mobil Bupati tidak terlalu jauh, dan kalau saya jualan rokok mungkin ada Ajudan Bupati suatu ketika akan membeli rokok di tempat saya. Kalau kita tidak jadi kabupaten mana mungkin Bupati mampir disini, paling-paling lewat aja ketika ia mau ke Bengkulu”. Sekitar tahun 2002 saya pernah katakan pada istri saya “kalau kepahiang jadi kabupaten sekecil apapun penghidupan saya, saya tetap di kepahiang. Tapi kalau kepahiang tidak menjadi kabupaten, sebesar apapun penghidupan saya di kepahiang ini saya akan pindah dari kepahiang, itu sudah tekat saya dari dulunya”.<sup>89</sup>

Menurut Eduardo sebetulnya dalam kepanitiaan ia tidak terlalu kaku, menurutnya ia akan mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakannya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebab anggota panitia itu tidak banyak lagi yang aktif, jadi panitia yang ada harus serba bisa dan serba mau mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Jika tidak demikian, maka akan sulit melanjutkan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Disamping itu Eduardo di dalam forum tidak terlalu banyak berbicara ia lebih suka berkerja dari pada banyak bicara. Berikut penuturannya:

“Sebetulnya saya ini apa saja yang bisa saya kerjakan saya kerjakan, yang bisa saya sumbangkan ya saya sumbangkan, apa sumbangan pemikiran, kadangkala ya bisa juga ngantar undangan, sesuai dengan yang dibutuhkanlah, jadi tidak terlalu terikat harus begini dan begitu. Kalau di forum saya tidak terlalu banyak ngomong, cuma pada saat-saat tertentu apa yang bisa dilakukan saya lakukan, sefatnya sepontan. Contoh pada waktu akan berangkat menghadiri peresmian di Jakarta di Depdagri, panitia tidak punya uang apa lagi dari pemerintah, saya coba mendekati teman saya yang juga orang Padang ia seorang guru, kebetulan ia punya mobil, saya datangi secara pribadi dan saya katakan padanya “Ini kesempatan bagi kamu untuk berpartisipasi dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang, Kepahiang tidak bakalan urung untuk menjadi sebuah kabupaten, kamu punya mobil, bawa mobil kamu ikut kami ke Jakarta untuk peresmian di Jakarta,

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Eduardo, Kepahiang, 13 September 2011

Alhamdulillah ia tidak menolak. Ada sekitar 11 orang kami yang berangkat ke Jakarta, kalau tidak salah berangkat dengan tiga buah mobil. Kami panitia memang di undang oleh Depdagri ke Jakarta untuk menghadiri peresmian pemekaran wilayah termasuk kepahiang”. Demikian Eduardo menuturkan.

Eduardo juga mengatakan Pembentukan Kabupaten Kepahiang sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak di kepahiang, hal itu dapat dilihat di bundel atau berkas dukungan Kecamatan Kepahiang, mulai dari Kepala Desa dan Perangkatnya, LKMD/LMD, Ormas, Karang Taruna, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Majelis-majelis Ta’lim dan organisasi masyarakat lainnya ( sebagian dari dukungan itu ada dilampirkan). “Sementara dukungan dari partai politik secara formal atau secara organisasi tidak ada, tapi secara pribadi mereka mendukung. Apalagi pada waktu itu DPP ada di Rejang Lebong, sedangkan di kepahiang pada saat itu hanya DPC, artinya hanya cabang. Sementara kebijakan berada di DPP yang berada di Rejang Lebong. Dukungan yang mereka berikan adalah dalam bentuk tertulis, sementara dukungan dalam bentuk dana tidak ada”.<sup>90</sup>

## 5. Safril Siregar

Safril Siregar juga banyak berperan dalam pemebentukan Kabupaten Kepahiang. Dalam struktur kepanitiaan Safril Siregar bagian humas. Kepanitiaan bagian humas banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengakuan Safril Siregar posisinya di bagian humas banyak hal yang bisa ia kerjakan. Antara lain mengantar surat, memasang spanduk, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Radio Rapindo. FM.

“Perinsip saya dalam kepanitiaan Persiapan Kabupaten Kepahiang, apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan, sebab saya bagian humas kerjanya ya macam-macam. Antara lain dulu saya juga pernah mengantarkan surat kemana-mana, kendaraan yang saya gunakan dulu adalah kendaraan roda dua Honda Gren bersama Mslim Hanzah. Dengan itulah saya ngantar surat kemana-mana kalau ada rapat atau apa, pada saat itu orang tidak mau meminjamkan kenderannya, karena orang banyak yang pesimis pembentukan kabupaten kepahiang akan berhasil. Kemudian juga saya pernah memasang spanduk di jalan-jalan untuk mensosialisasikan pada masyarakat, minta dukungan pembentukan kabupaten kepahiang, antara lain bunyi spanduk yang pernah saya pasang bersama kawan-kawan “Masyarakat kelurahan Talang Beni mendukung sepenunhnya

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Eduardo dan Amwat, Kepahiang 13 September 2011

pembentukan kabupaten kepahiang”, kemudian melakukan sosialisasi melalui Radio Rapindo”.<sup>91</sup>

Radio Rapindo yang sudah berdiri dari tahun 1992 ini sangat besar peranannya dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang. Melalui Radio ini dapat mensosialisasikan perkembangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Safril Siregar mengatakan dalam mensosialisasikan melalui Radio ia pernah menerima ancaman dari salah seorang anggota DPRD Rejang Lebong yang tidak setuju dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Namun Safril Siregar tidak takut dengan ancaman tersebut. Karena ia yakin perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang adalah untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepahiang, melalui radio kita melakukan sosialisasi dan mempublikasikan kepada masyarakat. Kita mengajak dan menghimbau masyarakat untuk dapat mendukung pembentukan Kabupaten Kepahiang, kemudian kita juga menginformasikan pada masyarakat sejauh mana perkembangannya. Pernah juga saya mendapat intimidasi dari salah seorang anggota Dewan Kabupaten Rejang Lebong pada saat itu, ia katakan pada saya “untuk apa kau ikut-ikutan pula dalam pembentukan kabupaten kepahiang, tidak akan mungkin itu terwujud”, saya jawab yang jekas begini pak, saya ini kan pendatang dari Tapanuli dan masyarakat Kepahiang sedang berjuang, apa salahnya kalau saya ikut kan tidak menyalahi aturan, untuk itu saya akan tetap ikut berjuang bersama masyarakat kepahiang”. Kemudian kalau ada pejabat yang datang ke kepahiang kita datang ke lokasi dan kita siaran secara langsung, supaya masyarakat tahu sejauh mana perkembangan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Pada saat ketuk palu di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri kita siarkan langsung dari Jakarta. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara langsung. Kemudian setelah ketuk palu di Jakarta kita ulas lagi “Hadirin para pendengar untuk seluruh warga Kabupaten Kepahiang, bahwasanya pada pukul 10,30 Waktu Indoneisa Bagian Barat tadi Menteri dalam Negeri Hari Sabarno telah resmi menyatakan Kabupaten Kepahiang”.<sup>92</sup>

Selain dalam bentuk sosialisasi, Radio Rapindo juga menyiarkan berbagai dukungan dari kalangan masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang. Dukungan datang dari berbagai kalangan terutama dari panitia PPKK. Antara lain bunyinya “Saya selaku panitia dan pimpinan Radio Rapindo, kepada seluruh masyarakat kepahiang mohon doa restu dan dukungannya agar Kabupaten Kepahiang segera terlaksana”. Kemudian ada lagi “Saya (sebut nama) ..... selaku anggota panitia pembentukan kabupaten kepahiang mendukung sepenuhnya pemebntukan Kabupaten Kepahiang”. Kemudian ada juga

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Safril Siregar. Safril Siregara adalah Pimpinan Radio Rapindo.FM. Radio Rapindo adalah sudah berada di kepahiang dari tahun 1991, yang sebelumnya berada di Rejang Lebong bernama Radio Nimora

<sup>92</sup> Wawancara dengan Safril Siregar, Kepahiang, 12 September 2011

dukungan dari pimpinan perusahaan swasta lainnya. Apalagi setelah berhasil terbentuknya Kabupaten Kepahiang banyak yang kepingin mengucapkan selamat atas terbentuknya Kabupaten Kepahiang<sup>93</sup>.

“Ketika ada kunjungan dari tim KPUD Jakarta ke kepahiang dan mengadakan dialog dengan masyarakat yang dipusatkan di lapangan Santoso Kepahiang. Dalam dialog tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat dari Pemerintah Rejang Lebong dan dari Provinsi Bengkulu. Dalam acara tersebut juga mengundang seluruh masyarakat Kepahiang, pada masyarakat diberi kesempatan untuk berbicara, dan menyampaikan pendapatnya tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang. Jadi pada waktu itu masyarakat ada yang menyampaikan pendapatnya tidak setuju dengan pembentukan kabupaten kepahiang dan ada juga yang setuju. Semua pendapat masyarakat itu direkam dan siarkan secara langsung oleh Radio Rapindo”.<sup>94</sup>

Pengalaman yang paling pahit bagi Safril Siregar dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat adalah ketika ia ditugaskan di Kecamatan Marigi (pecahan dari Ujan Mas). Menurut Safril Siregar ia ditugaskan di Kecamatan Marigi karena kedekatan emosional pada masyarakat setempat. Sebeab sebelum Radio Rapindo pindah ke Kepahiang berada di Curup namanya Radio Namora, jadi fans Safril Siregar banyak di Kecamatan Marigi. Berikut penuturannya:

“Saya hanya sendirian dan berjalan kaki dari desa ke desa’ kalaupun saya naik mobil itu pakai uang pribadi. Pengalaman yang paling pahit itu adalah ketika kita berkunjung ke rumah orang untuk mensosialisasikan tentang, pembentukan Kabupaten Kepahiang, kadang kala kita belum ngomong orang itu sudah bilang sama kita “minta sumbangan apa ? saya mau pergi nanti aja”. Kadangkala ia tidak mau sama sekali berjumpa dengan kita, begitulah suka dukanya melakukan sosialisasi pada masyarakat”. Demikian Safril Siregar mengungkapkan.

## 6. Nuriana

Dalam struktur kepanitiaan Nuriana adalah wakil bendahara dan ia juga anak dari ketua umum Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang H. Zainuri Mayang. Pada awal pembentukan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang yang perempuan hanya Nuriana sendiri, tapi setelah beberapa kali pertemuan perkembangan selanjutnya dalam pemilihan panitia Nuriana terpilih sebagai wakil bendahara. Untuk memperdayakan perempuan dalam kepanitiaan Nuriana juga ditunjuk sebagai kordinator di bidang perempuan, karena pada awalnya panitia tidak ada yang perempuan. Setelah beberapa kali pertemuan baru peserta rapat ada yang perempuan, akan tapi pada akhirnya mereka juga tidak aktif. Berikut penuturan Nuriana:

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Safril Siregar, Kepahiang, 13 September 2011

<sup>94</sup> Wawancara dengan Safril Siregar, Kepahiang 13 September 2011



“Saya merasa bangga punya orang tua seperti bapak, jadi mau tidak mau kita harus ikut bersama bapak, sebetulnya itu sudah merupakan panggilan hati nurani bapak untuk mengembalikan kejayaan kepahiang. Memang sudah lama bapak merencanakan, karena bapak dulu pernah duduk sebagai anggota DPRD Rejang Lebong hampir dua periode. Saya masih ingat dulu pernah bapak ngomong “kepahiang yang kabupaten bukan Curup”, Berdasarkan pengalaman beliau menjadi anggota DPRD itu, beliau merasakan pada saat rapat menetapkan Curup sebagai Ibu kota Kabupaten yang diusulkan, dengan demikian Kepahiang hanya tinggal kenangan. Bapak saya juga dapat dorongan dan motifasi dari ibu saya, ibu sangat mensupor kegiatan itu, kalau ada rapat di rumah ini ya kamilah yang menyediakan air minum, kadangkala rapat sampai larut malam uang tidak ada, untuk beli kopi atau kue dalam acara rapat patungan sesama panitia. Kemudian jika ada kegiatan di luar saya mendampingi bendahara kemana ia pergi”.<sup>95</sup>

Menurut Nuriana penggalangan dana dari masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Kepahiang sangat sulit, lebih-lebih setelah kabupaten induk tidak menyetujuinya pembentukan Kabupaten Kepahiang, kebanyakan panitia yang tadinya bergabung mereka berbaik dan tidak aktif lagi di kepanitiaan, akhirnya yang mampu bertahan hanya beberapa orang saja. Mereka bukan hanya tidak aktif akan tetapi ia juga mencemoohkan panitia yang ada. Berikut penuturan Nuriana:

“Panitia yang tidak lagi mau bergabung dengan panitia yang ada terutama dari orang-orang yang tidak yakin akan berhasil pembentukan Kabupaten Kepahiang. Apa mungkin Kepahiang akan berhasil menjadi kabupaten dengan kondisi yang serba keterbatasan?. Bagaimana kita akan menggalang dana dari masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri tidak yakin pembentukan kabupaten kepahiang akan berhasil. Sumber dana pembentukan Kabupaten Kepahiang itu adalah dari kantong pribadi-pribadi, satu-satunya donatur tunggal adalah bapak H. Saleh Krikam, kemudian sumbangan-sumbangan yang diminta secara spontanitas ketika ada rapat-rapat atau pertemuan, yang jumlahnya juga tidak banya”. Kemudian tekanan mungkin dari Bupati Curup yang tidak mau melepas kepahiang pada saat itu tidak ada yang mendukung, termasuk anggota DPR yang berasal dari kepahiang yang duduk di DPRD Rejang Lebong. Jadi pembentukan kabupaten kepahiang itu betul-betul hasil kerja masyarakat kepahiang itu sendiri, semetara dukungan dari pemerintah tidak ada, walaupun secara institusi pada akhirnya mereka mendukung”.

Nuriana mengaku dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang tidak banyak kaum perempuan yang berperan, karena orang sudah banyak yang yakin bahwa Kepahiang tidak akan berhasil menjadi sebuah kabupaten. Kaum perempuan baru banyak yang berperan adalah

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Nuriana, Kepahiang, 14 September 2011

ketika acara syukuran yang diadakan di Lapangan Santoso Kepahiang. Berikut penuturan Nuriana:

“Kalau kaum perempuan yang betul-betul berkerja dalam memperjuangan Kabupaten Kepahiang tidak banyak, tapi kalau acara syukuran banyakkaum perempuan yang aktif. Yang betul-betul berkerja hanya beberapa orang saja, antara lain saya sendiri, ibu saya, istri pak Saleh Krikam, istri pak Amwat itu yang terlibat langsung dan aktif dalam kepanitiaan. Panitia ini kan tidak punya uang, mau tidak mau suka tidak suka ya kami yang perempuan inilah yang membuatkan kopi atau minuman jika ada acara rapat-rapat. Aktifitas panitia itu berpindah-pindah tempat yang pertama di rumah saya kemudian ada di rumah pak Saleh Karikam, terakhir di rumah pak Amwat, jadi mau tidak mau kami yang perempuan ini terlibat langsung dan berperan dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang itu”.<sup>96</sup>

Ketika ditanya suka duka dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang, Nuriana selaku wakil bendahara mengaku banyak suka duka yang ia alami. Namun suka duka itu menjadi pelajaran yang amat berharga dalam kehidupannya. Duka yang tidak bisa ia lupakan adalah ketika kabupaten induk tidak merestui kepahiang menjadi kabupaten, maka saat itu orang banyak tidak percaya kepahiang akan menjadi kabupaten, ditambah lagi dengan kondisi panitia yang ada saat itu, terutama orang tua Nuriana. Berikut penuturannya”

“Kalau suka dukanya banyak. Antara lain dukanya, bapak sebagai ketua pada saat itu HP saja tidak punya, mobil tidak punya, uang tidak punya inilah barangkali yang menyebabkan orang tidak percaya akan berhasil pembentukan Kabupaten Kepahiang, tapi saya yakin karena bapak orang kalau berurusan rekaman masih bagus dan saya yakin itu. Kalau sukanya juga banyak yang namanya berjuang, apa lagi perjuangan itu berhasil, terutama yang dicita-citakan oleh bapak sudah tercapai, saya katakan pada bapak “Bapak dengan usia bapak yang sekarang, bapak mampu dan berhasil mengembalikan kejayaan kepahiang di masa lalu, Insya Allah saya yang bergerak di bidang pendidikan saya kepingin dan bercita-cita ingin memberikan contoh pendidikan di Kabupaten Kepahiang ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini”. Kenapa tidak orang tua kita aja bisa kenapa kita tidak bisa, jadi mungkin di sisi lain bisa kita berjuang, karena bapak adalah guru besar saya dalam kehidupan ini”.<sup>97</sup>

## 7. Darnawati

Peranan Darnawati dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang juga tidak bisa diabaikan begitu saja walaupun peranan itu pada sisi yang berbeda. Darnawati adalah istri dari Amwat (bendahara PPKK). Selain istri dari Amwat rumah Darnawati di Jl. Bogor No. 385 juga

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Nuriana, Kepahiang 15 September 2011

<sup>97</sup> Wawancara dengan Nuriana, Kepahiang 15 September 2011



digunakan sebagai sekretariat PPKK. Dengan demikian segala aktifitas kegiatan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang dilaksanakan di rumah ini. Peranan Darnawati dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang tidak terlepas dari aktifitas panitia yang dilakukan di sekretariat PPKK tersebut. Berikut Darnawati menuturkan:

“Rumah saya ini kan kantor Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, mau tidak mau suka tidak suka pailing tidak membuat kopi panitia-panitia ketika ada rapat di rumah saya ini, karena panitia bekerja sampai larut malam. Kadang kala saya harus bangun tengah malam, sebab di rumah ini ada tidak ada rapat selalu ada orang ngumpul disini, paling tidak ngomong-ngomong aja. Kemudian kalau ada kegiatan di lapangan saya bagian konsumsi. Yang paling berkesan bagi saya adalah waktu Peripurna di DPR Provinsi Bengkulu, saya disuruh mambungkus nasi oleh panitia sebanyak 300 bungkus, uang dikasihnya jam 4 sore, nasi tersebut akan diambil jam 7 pagi dan akan dibawa ke Bengkulu. Kemudian juga pada waktu syukuran disini semua memasak segala sesuatunya, selama 1 minggu rumah saya ini ramai, sedangkan kami tenaganya hanya 3 orang”.<sup>98</sup>

Darnawati selaku istri Amwat yang selalu setia mendampingi suaminya dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang mengaku merasa bangga dan puas kepahiang berhasil menjadi kabupaten. Darnawati tahu persis bagaimana susah dan sakitnya memperjuangkan kepahiang untuk menjadi kabupaten, karena di rumah Emawati segala aktifitas panitia dilakukan. Usaha Darnawati dalam melayani segala kebutuhan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang terutama melayani membuat kopi dan air minum membuahkan hasil. Berikut penuturannya:

“Saya sangat bangga dan merasa puas terutama ketika ketuk palu di Jakarta, begitu suami saya pulang kasih tahu sama saya, bahwa kepahiang sudah disetujui oleh Mendagri menjadi kabupaten. Saat itu tanpa terasa air mata saya menetes. Saya masih ingat pernah dulu waktu membuat proposal hampir satu minggu dulu bapak sampai pagi bekerja dan di depan rumah saya ini kan ada kolam ia muntah-muntah dikolam itu. Kemudian juga kemana-mana jalan kaki pernah juga saya cemoohkan “mana mungkin kepahiang jadi kabupaten ngantar surat dan kemana-mana pakai jalan kaki”.<sup>99</sup>

## 8. Arpan Sapri

Arpan Sapri termasuk salah seorang yang sangat berperan dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang. Arpan Sapri yang tinggal di Desa Ujan Mas Atas, mengaku pada saat memperjuangkan kepahiang menjadi kabupaten ia menjabat sebagai Sekdes Ujan Mas. Arpan Sapri

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Darnawati, Kepahiang 13 September 2011

<sup>99</sup> Wawancara dengan Darnawati, Kepahiang 13 September 2011

menjelaskan bahwa ia mulai bergabung dengan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang semenjak ada masalah penetapan batas wilayah Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong (tepatnya di Desa Ujan Mas, sekarang Kecamatan Marigi). Untuk mengatasi masalah tersebut, Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang membentuk beberapa Panitia Perwakilan di setiap Kecamatan Pembantu salah satunya adalah di Kecamatan Ujan Mas. Dengan diajaknya beberapa orang yang dianggap berpengaruh di Desa Ujan Mas, diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Arpan Sapri mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang. Berikut penturannya:

“Di daerah Ujan Mas ini memang ada masalah pada saat penetapan batas wilayah, karena ada asset Kabupaten Rejang Lebong di daerah Ujan Mas. Jadi pada saat itu dicarilah orang-orang yang bisa untuk mensosialisasikan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Jadi saya diajak oleh panitia dikepahiang untuk bergabung dan posisi saya Wakil Ketua dalam kepanitiaan, namun tugas saya lebih banyak melakukan sosialisasi pada masyarakat di perbatasan itu. Jadi peranan saya adalah mensosialisasikan tentang pemekaran itu kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Ujan Mas. Ada beberapa orang yang mempermasalahkan perbatasan Kepahiang dengan Rejang Lebong. Jadi setelah ketuk palu kami sekretaris desa dan tokoh masyarakat berkumpul di SKB Surau Muncar. Dalam acara pertemuan itu saya katakan pada masyarakat yang hadir “persoalan ini jangan dikembangkan, kalau kita kembangkan artinya kita ini tidak bisa melihat bagaimana daerah lain seperti Provinsi Banten berapa banyaknya asset Jakarta di Banten itu, mulai dari lapangan terbang, Pelabuhan Bangka Huni, Pabrik Baja, dan asset lainnya, tapi Jakarta mendukung, bila dibandingkan dengan kita apa artinya hanya sebuah rumah sakit dan BLK, kalau masalah ini dibesar-besarkan kita akan rugi sendiri nantinya. Jadi kepada kita yang hadir tolong disampaikan pada masyarakat kalau kita mekar nanti ini dampak-dampaknya, tapi kalau kita tetap bertahan dengan masalah batas dengan sendirinya tentu kita tidak akan mekar dan kita akan seperti ini terus. Kalau kita jadi kabupaten kita bisa menentukan diri kita sendiri terutama Bupati dan anggota DPRD di wilayah kita ini, Insya Allah kalau kita sudah menjadi kabupaten kita akan sejahtera”. Itulah bentuk-bentuk sosialisasi yang saya lakukan pada pembentukan Kabupaten Kepahiang ini, khususnya pada masyarakat yang ada di berbatasan.”<sup>100</sup>

Arpan Sapri juga mengaku bahwa banyak suka dukanya dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang. Menurut Arpan Sapri suka

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Arpan Sapri, Desa Ujan Mas Atas Kepahiang 15 September 2011

duka dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupannya, karena ia mengaku duka yang sangat mendalam bagi dirinya adalah ketika ia harus dimutasikan ke daerah lain, berikut penuturannya:

“Suka duka dalam pembentukan kabupaten kepahiang ini memang banyak, sukanya pertama kita sangat bangga kepahiang jadi kabupaten, jadi perjuangan kita tidak sia-sia, apa lagi dengan kemajuan yang dicapai oleh kepahiang sekarang. Dukanya kenapa pemerintah kepahiang tidak pernah sampai saat ini katakanlah memanggil atau berkonsultasi dengan orang atau panitia pembentukan kabupaten kepahiang dalam hal membangun kabupaten Kepahiang. Apa lagi saya terus terang saja, saya dikurung oleh pemerintah, saya dimutasikan ke Muara Aman, saya cuma Sekdes, Sekdes itu ada PP nya, Sekdes yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 6 tahun tidak boleh dimutasikan. Karena gara-gara saya tidak mendukung Bupati yang sekarang, maka saya dimutasikan ke Muara Aman, itu dukanya yang tidak bisa saya lupakan”.<sup>101</sup>

## 9. Hartono Ya’kup

Hartono Ya’kup mengaku ia mulai bergabung dengan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang adalah semenjak ada masalah di kecamatan komplik yaitu di Kecamatan Ujan Mas (sekarang Kecamatan Marigi) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Hartono Ya’kup bergabung dengan Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang tidak terlepas dari kiprah Hartono Ya’kup sebagai ketua Yayasan Cayaha Umat (YCU) Kabupaten Rejang Lebong. Yayasan ini adalah untuk mewadahi orang-orang yang tergusur oleh pembebasan tanah untuk pembangunan PLTA Musi di Kepahiang, Mereka yang tergusur tanahnya mendapat ganti rugi dari PLTA, supaya uang ganti rugi tidak sia-sia, maka Hartono Ya’kup membuat suatu Yayasan yang tujuannya untuk membina masyarakat disekitar PLTA. Yayasan YCU mendapat dana pendampingan dari PLTA, PLTA Musi sebelumnya masuk ke wilayah Rejang Lebong, tapi setelah dimekarkan berada di Kabupaten Kepahiang. PLTA memberikan proyek-proyek peningkatan keterampilan pada masyarakat seperti, perikanan, peternakan, hum industri, pertanian. Desa-desa di Kecamatan Ujan Mas atau kecamatan komplik berbatasan, kebanyakan masyarakatnya adalah anggota Yayasan Cahaya Umat, yang dipimpin oleh Hartono Ya’kup. Dengan demikian Hartono Ya’kup sangat potensial untuk diajak bergabung oleh Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang, ia ditunjuk sebagai Sekretaris

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Arpan Sapri, Desa Ujan Mas Atas Kepahiang 16 September 2011

Panitia Perwakilan Kecamatan Pembantu di Kecamatan Ujan Mas, sementara ketua dan wakil ketua adalah Basing Ado dan Arpan Sapri.

Melalui kegiatan Yayasan Cahaya Umat ini Hartono Ya'kup, Basing Ado dan Arpan Sapri secara berangsur-angsur dapat melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang. Sambil melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar proyek PLTA, dapat memberikan pengertian-pengertian pada masyarakat, antara lain umpamanya "kalau kita jadi kabupaten banyak fasilitas yang akan kita dapatkan, kalau tidak ya kita seperti-seperti ini aja". Melakukan pendekatan pada masyarakat melalui Yayasan ini ternyata memang membuahkan hasil. Berikut penuturan Hartono Ya'kup:

"Saya mulai diajak oleh PPKK semenjak ada masalah di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong. Ketika pemekaran itu ada mengalami kesulitan yaitu belum memenuhi kriteria 4 kecamatan, yang ada Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir. Sementara yang Kecamatan Ujan Mas bermasalah yaitu dari 21 desa hanya 1 desa yang mau bergabung dengan kepahiang. Mereka setuju dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang, tapi mereka tidak setuju untuk bergabung dengan kepahiang, artinya kalau mereka tidak setuju bergabung dengan kepahiang, berarti hanya tiga kecamatan yang akan menjadi kabupaten tentu tidak memenuhi syarat. Desa-desa yang tidak setuju itu berada di kecamatan Ujan Mas sekarang kecamatan Marigi, desa ini sudah sangat dekat dengan Rejang Lebong. Jadi sambil menjalankan Yayasan kita selipkan sedikit demi sedikit mengenai pembentukan Kabupaten Kepahiang. Kita katakan pada mereka kalau kita jadi kabupaten banyak fasilitas yang akan kita dapatkan, kalau tidak ya kita akan seperti ini terus. Sejalan dengan perkembangan waktu kelihatannya ada perkembangan yang baik, jadi sewaktu diadakan pertemuan di Gedung SKB (ruang pertemuan kepala-kepala desa) di Ujan Mas. Kelihatannya dalam pertemuan yang membicarakan masalah dukungan ini sudah berubah petanya. Artinya yang tadinya 21 desa hanya 1 yang setuju, sekarang sudah mendekati 80 persen dan mereka sudah setuju untuk pembentukan kabupaten kepahiang".<sup>102</sup>

Hartono Ya'kup bersama Basing Ado dan Arpan Sapri setiap ada kesempatan, apa dalam forum rapat-rapat atau di warung-warung mereka sampaikan pada masyarakat apa untung ruginya jika kepahiang menjadi kabupaten. Pada saat itu ada dua hal yang diharapkan pada masyarakat di wilayah komplik. Pertama kesepakatan kepala-kepala desa untuk menyatakan mendukung, kedua jangan ada masyarakat yang komplek dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang ketika tim Otonomi Daerah datang berkunjung ke kepahiang. Ternyata dari

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Hartono Ya'kup, Desa Ujan Mas Kepahiang, 15 September 2011

sosialisasi yang dilakuka membuahkan hasil, berikut penuturan Hartono Ya'kup:

“Jadi cara kerjanya, terutama pada masyarakat di desa-desa yang tidak mau bergabung dengan kepahiang itu, kita sampaikan secara beransur-ansur dan setiap ada kesempatan, apa dalam forum rapat, atau di warung-warung kita sampaikan kepada masyarakat, kalau kita jadi kabupaten ini yang akan kita dapatka, tapi kalau tidak ya kita akan tetap seperti ini aja terus. Ketika tim Otonomi Daerah datang dari Jakarta kita menginginkan supaya tidak ada dari masyarakat yang komplek dengan masalah pembentukan Kabupaten Kepahiang. Jadi dari masyarakat di daerah desa-desa itu yang kita inginkan itu ada dua hal pertama kesepakatan kepala-kepala desa untuk menyatakan mendukung, kedua ketika diadakan rapat umum antara masyarakat dengan tim dari Otonomi Daerah dari Jakarta tidak ada yang komplek. Pada saat itu Alhamdulillah ketika diadakan pertemuan antara masyarakat dengan tim dari Pusat di lapangan Santoso Kepahiang tidak ada yang komplek. Semua itu adalah berkat pendekatan yang kami lakukan kepada masyarakat, yang tadinya tidak setuju bergabung dengan Kepahiang, akhirnya mereka bersedia bergabung dan setuju dengan pemekaran itu”.<sup>103</sup>

Dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang Hartono Ya'kup mengaku banyak suka dukanya, namun suka duka itu dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupannya. Harton Ya'kup menilai bahwa setiap memperjuangkan sesuatu pasti ada suka dukannya, akan tetapi bagaiman menyikapinya semua itu. Berikut penuturannya:

“Suka dukanya memang banyak, anantara lain rapat-rapat sampai larut malam di rumah Amwat dikepahiang, kemudian ya kita yang berjuang, tapi orang lain yang menikmati hasilnya, itu dukanya, tapi bagi saya tidak itu yang penting, bagi saya yang penting adalah kepahiang menjadi kabupaten, dan telah dapat menentukan dirinya sendiri. Namun yang agak sulit kita terima ada salah seorang tokoh masyarakat, pada saat pemekaran ia yang mempelopori desa-desa yang 21 itu supaya tidak ikut bergabung ke kepahiang. Pada saat itu ia menjadi kepala desa di desa Suro Baru, dia bukan saja tidak setuju dengan pembentukan Kabupaten Kepahinag, tapi juga dia yang mempelopori desa-desa yang ada di daerah Suro Baru. Bahkan pernah ia katakan di depan forum “Butuh uang 1 miliar untuk pembentukan Kabupaten Kepahiang dan itu jelas memberatkan masyarakat”. Tapi setelah kepahiang menjadi kabupaten, malah ia duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, malah sampai dua periode dari 2004 sampai 2010 sampai sekarang”.<sup>104</sup> Demikian Hartono Ya'kup mengakhiri ungkapannya.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Hartono Ya'kup, Desa Ujan Mas Atas Kepahiang 15 September 2011.

<sup>104</sup>

## 10. H. Badarudin

H. Badarudin adalah anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, ia diangkat menjadi anggota DPRD untuk periode 2009-2014 dari Partai PKPU. H. Badarudin di Komisi II bidang Petanian dan Perekonomian. namun pada waktu pembentukan Kabupaten Kepahiang ia belum menjadi anggota DPRD. Dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang H. Badarudin tidak begitu aktif walaupun ia duduk sebagai ketua III dalam kepanitiaan (SK terlampir). H. Badarudin mengaku ia kerjakan apa saja yang bisa ia kerjakan, bahkan ia pernah pada bidang keuangan di Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang. Menurut H. Badarudin pembentukan Kabupaten Kepahiang kurang mendapat dukungan dari pemerintah yang ada saat itu sehingga prosesnya lama. Berikut penturannya:

“Waktu pembentukan Kabupaten Kepahiang saya belum jadi anggota DPRD, dalam kepanitiaan pembentukan Kabupaten Kepahiang saya pernah duduk di bidang keuangan. Kalau kita mau jujur kepanihang ini menjadi kabupaten betul-betul usaha masyarakat dan rakyat kepanihang, dulu hanya lima kecamatan sekarang sudah 8 kecamatan. Jadi pembentukan kabupaten ini betul-betul keinginan masyarakat kepanihang sendiri. Kenapa saya katakan demikian karena, bukan tidak didukung tapi kurang dukungan dari pemerintah kabupaten Induk. Kepala daerah sendiri Bupati dan Wakilnya sangat tidak sependapat dengan pembentukan Kabupaten Kepahiang, karena alasannya kursial masalah PAD, Infrastruktur dan masalah yang lainnya, jadi kepanihang jadi kabupaten betul-betul semangat dan tekad panitia dan masyarakat untuk menjadikan kepanihang sebagai sebuah kabupaten”.<sup>105</sup>

Menurut H. Badarudin dalam penggalangan dana Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang meminta pada masyarakat yang punya kesadaran, karena donatur tetapnya tidak ada, kadangkala untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak ditutupi dengan uang pribadi panitia. Dana yang stambai tidak ada pada panitia, uang dicari berdasarkan kebutuhan berapa uang yang dibutuhkan sebanyak itulah uang yang harus dicari. Berkaitan dengan dana dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang berikut H. Badarudin mengungkapkan:

“Cara menggalang dana, kita meminta pada masyarakat yang punya kesadaran, karena kan butu biaya untuk administrasi dan lainnya. Kadang kala ya kimi tutupi aja dengan uang pribadi kami, karena kita kan tidak ada donatur tetapnya. Jadi uang itu berdasarkan kebutuhan, dan tidak ada dana yang stambai pada bendahara, Berapa dana yang kita butuhkan ya segitulah dana yang harus kita cari. Jadi karena dukungan tidak ada dari kabupaten induk, maka dana juga tidak mengalir ke panitia. Dana yang diberi oleh pemerintah kabupaten induk mulai dari awal sampai terbentuknya Kabupaten Kepahiang hanya tidak lebih dari 30 juta. Dulunya setiap minggu ada pertemuan di rumah Amwat, waktu

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan H. Badarudin, Kepahiang 15 September 2011

pertemuan itu konsumsinya cuma goreng pisang atau bisang rebus, kacang rebus, tidak ada makan kue dan sebagainya, kalau mau minum kofi ya kita patungan aja sesam-kawan-kawan. Jadi pembentukan Kabupaten Kepahiang ini bermodalkan semangat dan keyakinan dari masyarakat kepahiang. Jadi dukungan dari pemerintah ada, kalau tidak ada mana mungkin kepahiang jadi kabupaten. Jadi terbentuknya Kabupaten Kepahiang memang betul-betul perjuangan dari masyarakat kepahiang sendiri. Bupati Renjang Lebong itu dulu pernah ia katakan dalam forum, pada acara peresmian kantor camat di kepahiang “Secara institusi saya setuju kepahiang jadi kabupaten, tapi secara pribadi saya tidak setuju” alasannya ya berbagai-bagai, antara lain dananya dari mana PAD kecil dan lain sebagainya<sup>106</sup>. Demikian H. Badarudin mengungkapkan.

Ketika diminta pendapat H. Badarudin mengenai Kabupaten Kepahiang untuk ke depannya ia mengungkapkan “Saya Selaku anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, berharap kepahiang ini kedepannya supaya lebih maju baik fisik maupun non fisik dan kehidupan masyarakatnya semakain membaik, baik bidang sosial, ekonomi, pendidikan, jika ketiga hal ini sudah baik maka dengan sendirinya taraf hidup masyarakatnya akan semakin baik. Sebab daerah Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang khususnya, jika dibandingkan dengan daerah lain masih jauh ketinggalan”. H. Badarudin menilai bahwa apa yang dicita-citakan oleh tujuan pembentukan Kabupaten Kepahiang belum sepenuhnya terlaksana, salah satu contoh bidang pendidikan. Sekarang biaya pendidikan tinggi, sehingga tidak semua masyarakat dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke perguruan tinggi. Untuk itu H. Badarudin berharap pada pemerintah yang sekarang untuk lebih memperhatikan dalam masalah pendidikan khususnya di Kabupaten Kepahiang, sehingga apa yang diharapkan masyarakat selama ini dapat terwujud. Walaupun kepahiang ini sebagai penghasil kopi tersebar di daerah Bengkulu ini, namun sebagai masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman, mereka sangat mendambakan pendidikan yang gratis untuk anak-anak mereka, sehingga seluruh anaknya bisa ia sekolahkan. Demikian H. Badarudin mengakhiri ucapannya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu muncul sebagai respon dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan H. Badarudin, Kepahiang 15 September 2011

Undang tersebut memberi peluang bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah, salah satu wilayah yang perlu untuk dimekarkan adalah kepahiang.

Lahirnya Undang-Undang tersebut masyarakat Eks Kewedanaan Kepahiang dan pemerintah telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Kepahiang yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Tujuan pemekaran kepahiang menjadi sebuah kabupaten yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Eks Kewedanaan Kepahiang selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi pemberdayaan yang tersedia.

Beberapa faktor yang mendorong timbulnya keinginan untuk mendirikan Kabupaten Kepahiang sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir di Kabupaten Rejang Lebong sebelum pemekaran mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (*pan of cointrol*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru yaitu Eks Kewedanaan Kepahiang

Faktor lainnya adalah kemampuan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah kepahiang yang sudah memenuhi syarat untuk mengatur diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Penerimaan Daerah Eks Kewedanaan Kepahiang terhadap pengeluaran rutin. Disamping itu juga dilihat dari potensi daerah kepahiang yang diukur dari lembaga keuangan, sarana dan prasarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana sekolah, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, serta ketenagakerjaan.

Untuk merealisasikan pemekaran kepahiang menjadi sebuah kabupaten telah dimulai pada awal tahun 2000. Kepahiang merupakan daerah pertama kali di Provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran, namun saat itu Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk tidak serta merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai kabupaten induk justru keberatan melepas kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Kabupaten Rejang



Lebong. Salah satu persyaratan untuk menjadi sebuah kabupaten adalah kabupaten induk harus bersedia untuk melepas. Pembentukan Kabupaten Kepahiang memakan waktu yang cukup lama dimulai awal tahun 2000 sampai dengan awal tahun 2004. Tokoh penggagas pembentukan Kabupaten Kepahiang adalah, H. Zainuri Mayang, H. M Saleh Krikam dan H. Kms Ali Madjid. Ketiga tokoh penggagas ini merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Kepahiang. Sementara H. Zainuri Mayang yang terpilih sebagai ketua umum disamping ia sebagai tokoh masyarakat ia juga salah seorang anggota Legyun Veteran dan ketua pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Kepahiang.

Pembiayaan pembentukan Kabupaten Kepahiang hanya dengan melalui sumbangan-sumbangan sukarela dari penitia-panitia yang simpati dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepahiang. Sementara uang yang dikasih oleh pemerintah sebanyak 30 juta, uang tersebut digunakan oleh panitia untuk menghadirkan tim DPUD dari Jakarta yang berjumlah 12 orang, kemudian untuk menghadiri ketuk palu di Jakarta, PPKK mengirim 35 orang utusan dari kepahiang. Donatur tunggal satu-satunya bapak M. Saleh Krikam, panitia menggalang dana dari para donatur yang peduli dengan upaya pembentukan Kabupaten Kepahiang.

Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) adalah panitia pelaksana, presidium yang di dibentuk Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hanya bersifat panitia pengarah atau sering komite. Segala sesuatunya jika ada yang kurang, panitia pengarah memberitahukan pada panitia pelaksana, kemudian panitia pelaksana yang mencari data-data yang diperlukan oleh panitia pengarah dan begitulah seterusnya. Sedang panitia di tingkat provinsi hanya sifatnya penguatan-penguatan data. Beberapa orang, orang kepahiang yang tinggal di Jakarta, berperan untuk melobi ke Pemerintah Pusat. Untuk di tingkat pusat itu ada orang kepahiang yang menjadi Dirjen Otonomi Daerah Ir. Sudirman, ia yang melakukan lobi-lobi politik ke Pemerintah Pusat, baik ke Mendagri maupun ke DPR -RI.

Keberhasilan Kepahiang menjadi sebuah kabupaten tidak terlepas dari peranan berbagai elemen masyarakat. Dalam pembentukan Kabupaten Kepahiang banyak pihak yang berperan, namun peran mereka masing-masing berbeda dengan kadar yang berbeda pula. Masing-masing orang ada kelebihan dan ada kekurangannya, akan tetapi kelebihan dan kekurangan itu dapat saling melengkapi, itulah yang membuat sukses dalam memperjuangkan Kabupaten Kepahiang.

Temuan di lapangan menunjukan bahwa panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang cukup banyak, namun yang benar-benar aktif berkerja dan berperan sampai terbentuknya Kabupaten Kepahiang tidak

beberapa orang. Antara lain: H. Zainuri Mayang, Amwat, Abdul Rohim, Eduardo, Sapril Siregar, Nuriana, Darnawati, Arpan Sapri, Hartono Ya'kup dan H. Badarudin. Sementara Harianto dan Basing Ado ketika tim dilapangan ia sedang dinas ke luar kota, sehingga tidak dapat dilakukan wawancara.

## 2. Saran

Pemekaran wilayah terjadi di Indonesia karena peluang yang diberikan oleh produk hukum saat ini. Sudah banyak provinsi, kabupaten dan kota yang dimekarkan menjadi beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diingat dan menjadi sebuah saran bagi daerah yang baru dimekarkan, yaitu:

Terjadinya pemekaran wilayah, diikuti oleh adanya persoalan sosial budaya maupun persoalan ekonomi. Daerah yang baru dimekarkan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memeneg dan mengakomodir semua kepentingan yang mungkin akan menimbulkan persoalan atau konflik, termasuk masalah tapa batas. Selain persoalan tersebut yang perlu dipehatikan oleh daerah yang baru dimekarkan adalah untuk memanfaatkan potensinya untuk kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah, agar melindunginya dari kemungkinan kerusakan nilai-nilai akibat pengaruh nilai budaya luar.

Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk mengadakan seminar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pemekaran Kabupaten Kepahiang yang masih belum dapat diselesaikan seperti persoalan batas wilayah Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong yang sampai hari ini belum diselesaikan secara bijak oleh ke dua pemerintah. Jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik suatu ketika akan menjadi masalah yang rumit bagi generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- UU RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
- Abdullah, Rozali, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Abidin, Affandi, 1973. *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu Menjadi Propinsi Bengkulu*, Bengkulu: Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.
- Asnan, Gusti. 2006 *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Dali, Bustan A. 2007. *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005-Agustus 2007* (Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma)
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press:
- Hendrato, Andri Novi & Dani Wahyu Munggoro. 2002. *Panduan menakar Otonomi Komunitas*, Jakarta: Yappika.
- Koentjaraningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Latief, Ch. N. Dt. Bandaro. 2002. *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, Bandung, Angkasa.
- Purwanto, Bambang. 2002. "Sejarah lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesia sentris" dalam *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- Rohim, Abdul dan Amwat. "Sejarah Terbentuknya Eks Kewedanaan Kepahiang Menjadi Kabupaten Kepahiang". 2006. Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang.
- Samudra, Syahda Guruh. 2000 *"Langkah Menimbang Otonomi VS Federal Megembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat madani Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.

Vasanty, Puspa. 2002. "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Profil Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Rejang Lebong Dalam Angka 1998, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Daerah II Rejang Lebong.

### **Makalah**

Aksa, Iwan N.2001 "Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS)", *Makalah*, Tais.

Herlambang, "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (Sebuah Pengalaman Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah), *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

Nurazi, Ridwan, "Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu Evaluasi Aspek Ekonomi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus di Bengkulu.

Sarwono, Sawit, "Etnik di Bengkulu: Kesatuan dalam Keberagaman" *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

### **Wawancara**

1. H. Zainuri Mayang, Kepahiang, 16 September 2011
2. Amwat, Kepahiang, 12 September 2011
3. Abdul Rohim, Kepahiang, 13 September 2011
4. Eduardo, Kepahiang, 13 September 2011
5. Sapril Siregar, Kepahiang, 12 September 2011
6. Nuriana, Kepahiang, 14 September 2011
7. Darnawati, Kepahiang, 13 September 2011
8. Arpan Sapri, Simpang PLTA Musi Ujan Mas Atas, 15 September 2011
9. Hartono Ya'kup, Ujan Mas Atas Kepahiang, 15 September 2011
10. H. Badarudin, Kepahiang, 16 September 2011

**BAB IV**  
**PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN BENGKULU**  
**SELATAN : KABUPATEN SELUMA DARI WACANA HINGGA**  
**REALITA 2003 – 2007<sup>1</sup>**

Zusneli Zubir<sup>2</sup>

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Semenjak undang-undang otonomi ditampilkan di atas panggung kehidupan bernegara dan berbangsa pada era reformasi ini, kebebasan berekspresi semakin terjamin guna diapresiasi dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah keinginan berbagai elit daerah untuk memekarkan wilayah kabupaten dan kota untuk menjadi beberapa kabupaten dan kota, dengan gampang dapat diwujudkan, asal sesuai dengan aturan tentang pemekaran wilayah. Sehingga di era reformasi ini, bermunculan wilayah-wilayah kabupaten baru bak cendawan tumbuh dengan nama-nama baru pula yang kadang-kadang asing dari telinga, walaupun nama tersebut diambil dari salah satu identitas budaya yang sudah ada di wilayah tersebut.

Pemekaran wilayah yang dilakukan di Indonesia dalam dekade terakhir cukup signifikan dari segi jumlah. Di Provinsi Bengkulu yang semula hanya terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, saat ini telah memiliki delapan kabupaten dan satu kota otonom. Maksud dan tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan otonomi daerah, mendukung dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan memiliki daya guna dan berhasil guna dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemekaran wilayah bukan hal baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemekaran wilayah telah dimulai dari Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki delapan provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (kemudian berubah menjadi Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku,

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2011.

<sup>2</sup> Peneliti Madya pada BPSNT Padang

dan Sunda Kecil.<sup>3</sup> Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan membentuk sejumlah "negara-negara boneka" dalam wilayah negara Indonesia.

Pemekaran wilayah berikutnya terjadi berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, di mana Indonesia terdiri dari 15 negara bagian plus satu Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia. Pada Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950-1966) pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.<sup>4</sup>

Perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950-1966, dimulai pada tahun 1950. Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatra Utara (termasuk di dalamnya Aceh), Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa". Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Sementara Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Pada tahun yang sama pula, Aceh kembali dibentuk provinsi terpisah dari Provinsi Sumatera Utara (pada tahun 1959 Provinsi Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa"). Pada tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah (pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan). Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Pada tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Provinsi Sumatra Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan).<sup>5</sup>

Pada masa Orde Baru, pemekaran pertama terjadi pada tahun 1967 yang ditandai dengan berdirinya berdirinya Provinsi Bengkulu

---

<sup>3</sup> Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 126.

<sup>4</sup> Syahda Guruh Langkah Samudra, *Menimbang Otonomi VS Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat madani Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 107.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan.<sup>6</sup> Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, di mana dua diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan satu berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Tahun 1975, Timor Timur, yang sebelumnya merupakan jajahan Portugis, berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27.

Setelah Orde Baru berakhir yang ditandai dengan lahirnya Orde Reformasi pada tahun 1998, lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah yang luar biasa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, sehingga Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Setelah itu muncul tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 dimulai pada tanggal 4 Oktober 1999 dengan lahirnya Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Ternate yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27. Pada tanggal 17 Oktober 2000 lahir Provinsi Banten dengan ibukota Serang, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28. Pada tanggal 4 Desember 2000 lahir Provinsi Bangka-Belitung dengan ibukota Pangkalpinang, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-29. Pada tanggal 22 Desember 2000 lahir Provinsi Gorontalo dengan ibukota Gorontalo, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30. Pada tanggal 11 November 2001, lahir Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian berganti nama menjadi Papua Barat) dengan ibukota Manokwari, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31. Pada tanggal 25 Oktober 2002 lahir Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjungpinang, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32. Terakhir, pada tanggal 5 Oktober 2004 lahir

---

<sup>6</sup> Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayah 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Lihat Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 170-172; Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 126-129; Rois Leonard Arios, "Kembali ke Marga, Kembali ke Budaya Asal: Refleksi Sistem Pemerintahan Tradisional Bengkulu di Era Otonomi", dalam *Suluah*, Volume 04, Nomor 5, Agustus 2004, hlm. 29.

Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33.

Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.<sup>7</sup>

Pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu yang semula hanya terdiri dari tiga kabupaten (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong) dan satu kotamadya (Kotamadya Bengkulu), setelah dimekarkan menjadi delapan kabupaten dan satu kota otonom. Kabupaten baru hasil pemekaran adalah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus tulisan ini lebih ditiitikberatkan pada Kabupaten Seluma yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Proses terbentuknya Kabupaten Seluma dimulai dengan proposal aspirasi yang diajukan oleh Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) kepada Pemerintah Pusat atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2000. Usulan ini disahkan oleh DPR RI berdasarkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur pada tanggal 27

---

<sup>7</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 16-17; Herlambang, "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (Suatu Pengalaman Pembentukan kabupaten Bengkulu Tengah), *Makalah*, disampaikan Seminar nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008, di Bengkulu.



Januari 2003, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003.<sup>8</sup>

Pemekaran suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru merupakan penjabaran prinsip ekonomi yang seluas-luasnya seperti dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Hal ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu otonomi daerah juga didasarkan pada prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sejalan dengan prinsip tersebut maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga menjamin keserasian hubungan antara daerah dan daerah lain, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa suatu daerah otonom baru tidak dapat memisahkan diri dari daerah lain dan harus tetap peduli serta bersama-sama dengan daerah lain dalam menyejahterakan masyarakat.

## **2. Batasan Masalah**

"Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan : Kabupaten Seluma Dari Wacana Hingga Realita 2003-2007" menjadi fokus tulisan ini, yakni mengenai proses lahirnya Kabupaten seluma yang dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang terjadinya pemekaran daerah. Masyarakat bekas Kewedanaan Seluma yang didominasi oleh etnis Serawai melihat

---

<sup>8</sup> UU RI No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Undang-undang ini sebagai angin segar bagi keinginan mereka untuk memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk daerah otonom Kabupaten Seluma.

Pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu, salah satu di antaranya telah melahirkan Kabupaten Seluma. Untuk itu perlu diajukan beberapa pertanyaan yang sekaligus merupakan batasan masalah dalam tulisan ini, yaitu;

1. Apakah latar belakang munculnya wacana pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimanakah proses terjadinya pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu yang salah satunya melahirkan Kabupaten Seluma?
3. Faktor-faktor apakah yang mendorong timbulnya keinginan untuk mendirikan Kabupaten Seluma sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan?
4. Bagaimanakah kemajuan yang diraih Kabupaten Seluma pasca pemekaran ditinjau dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Adapun batasan spasial penelitian ini adalah Kabupaten Seluma yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, yang sebelumnya merupakan bekas wilayah Kewedanaan Seluma. Batasan temporal tulisan ini adalah tahun 2003 sampai 2007. Pada tahun 2003 dijadikan sebagai batasan awal kajian dalam tulisan ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahun tersebutlah Kabupaten Seluma resmi berdiri dan melepaskan diri dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Tahun 2007 dijadikan sebagai batas akhir penelitian berdasarkan pertimbangan untuk melihat perkembangan Kabupaten Seluma setelah empat tahun berdiri sendiri sebagai daerah otonom.

### **3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan latar belakang munculnya wacana pemekaran pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu, Proses terjadinya pemekaran, faktor-faktor pendorong munculnya keinginan untuk mendirikan Kabupaten Seluma sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dan menjelaskan kemajuan yang diraih Kabupaten Seluma ditinjau dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Adapun manfaat dari penelitian ini akan menambah khasanah historiografi lokal, khususnya yang berkaitan dengan penulisan sejarah sosial yang berkaitan dengan persoalan konflik. Kemudian penelitian ini

diharapkan menjadi langkah awal dari studi yang mendalam untuk masa yang akan mendatang.

#### 4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan masalah pemekaran wilayah tersebut, Tim melakukan penelitian tentang pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang salah satunya telah melahirkan Kabupaten Seluma yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian terhadap latar belakang munculnya pemekaran wilayah, proses pemekaran wilayah, dan dampak dari pemekaran wilayah yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat daerah pemekaran dapat dikatakan belum banyak diteliti oleh para peneliti maupun oleh praktisi. Kalaupun ada tulisan yang membahas masalah konflik daerah perbatasan, itu hanya berupa artikel dari hasil pengamatan tanpa kajian yang mendalam.

Beberapa tulisan yang membahas mengenai pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu di antaranya ialah tulisan Herlambang yang berjudul "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (sebuah Pengalaman Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah)".<sup>9</sup> Tulisan Herlambang ini berusaha untuk melihat landasan hukum yang diperlukan sebagai syarat dilakukannya pemekaran wilayah. Herlambang mendasarkan tulisannya pada pengalamannya dalam upaya memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Tulisan lainnya yang membahas mengenai pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu adalah tulisan Ridwan Nurazi yang berjudul "Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu Evaluasi Aspek Ekonomi".<sup>10</sup> Tulisan Nurazi ini membahas mengenai perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu sejak diberlakukannya otonomi daerah yang menurut Nurazi cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah di Provinsi Bengkulu yang selalu meningkat sejak tahun 2004 sampai tahun 2007.

---

<sup>9</sup> Herlambang, "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (Sebuah Pengalaman Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah)", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

<sup>10</sup> Ridwan Nurazi, "Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu Evaluasi Aspek Ekonomi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

Buku yang juga membahas mengenai pemekaran wilayah adalah buku yang ditulis oleh Affandi Abidin yang berjudul *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu*.<sup>11</sup> Buku ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu, baik yang berada di Bengkulu maupun yang berada di pusat, untuk memperjuangkan berdirinya Provinsi Bengkulu sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya provinsi pemekaran yang lahir pada masa Orde Baru.<sup>12</sup>

Buku yang berisi bahasan mengenai Kabupaten Seluma setelah dimekarkan dari kabupaten Bengkulu Selatan di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Bustan A. Dali berjudul *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 – 3 Agustus 2007*.<sup>13</sup> Buku ini berisi tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai selama dua tahun oleh Kabupaten Seluma setelah melepaskan diri dari kabupaten induk.

## 5. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Dalam membantu mengarahkan penelitian, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan yaitu konsep pekaran wilayah, otonomi daerah, dan etnis. Pemekaran berdasarkan kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Pe-mekar-an yang berarti proses menjadikan bertambah besar.<sup>14</sup> Pemekaran wilayah kabupaten berarti menambah jumlah wilayah kabupaten atau kota dalam suatu provinsi menjadi bertambah, sedangkan pemekaran provinsi berarti menjadikan jumlah provinsi dalam suatu negara menjadi bertambah banyak. Pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu telah menyebabkan Provinsi Bengkulu yang semula hanya memiliki tiga kabupaten dan satu kota menjadi delapan kabupaten dan satu kota.

---

<sup>11</sup> Affandi Abidin, *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu* (Bengkulu: Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, 1973).

<sup>12</sup> Provinsi lainnya yang juga lahir pada masa Orde Baru adalah Timor Timur, tetapi provinsi ini lahir bukan hasil pemekaran, melainkan karena melakukan integrasi dengan wilayah Indonesia setelah melepaskan diri dari jajahan Portugis.

<sup>13</sup> Bustan A. Dali, *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 – 3 Agustus 2007* (Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007).

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 642.

Tujuan dilakukannya pemekaran wilayah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pelayanan pemerintah, serta untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui (1) Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia; (2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya; (3) Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis; (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; (5) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan (6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.<sup>15</sup>

Konsep mengenai daerah Otonom dan Otonomi Daerah merupakan konsep-konsep yang juga hendak dijelaskan dalam tulisan ini untuk memudahkan dalam penulisan. Kata otonomi berasal dari kata sifat *autonomous* yang artinya (1) merdeka secara politik dan mengelola pemerintahan sendiri, (2) mampu mengambil keputusan dan bertindak sendiri secara bebas dan merdeka dari campur tangan pihak lain, dan (3) kondisi, rekasi, atau perkembangan suatu organisasi yang mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas dan merdeka.<sup>16</sup>

Konsep otonomi dapat ditafsirkan sebagai kemerdekaan atau kebebasan bagi orang atau kelompok orang dalam mengambil keputusan dan menentukan corak perubahan-perubahan yang diinginkan. Otonomi daerah sebagai istilah politik pun bisa ditafsirkan sebagai upaya pemerintah pusat memberikan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial bagi pemerintah daerah dalam mengurus rumahtangganya di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berian ini berupa kewenangan yang lebih luas dalam mengurus sumber-sumber pembangunan. Sering disepadankan istilah otonomi daerah dengan desentralisasi.

Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan membuat daerah-daerah itu otonom, otonomi setengah hati, atau bahkan otonomi semu. Termasuk di dalamnya, kewenangan apa saja yang diserahkan dan kewenangan apa saja yang

---

<sup>15</sup> Bustan A. Dali, *loc. cit.*

<sup>16</sup> Andri Novi Hendrato & Dani Wahyu Munggoro, *Panduan Menakar Otonomi Komunitas* (Jakarta: Yappika, 2002), hlm. 17.

tetap dipertahankan. Untuk menjamin keselamatan rakyat dan keselamatan alam, ada lima rute pembangunan yang biasa dilakukan banyak negara, yakni (1) peningkatan pendapatan, (2) perbaikan teknologi, (3) peningkatan kapasitas kapital manusia, (4) reformasi, dan (5) pembaharuan radikal.<sup>17</sup>

Otonomi daerah tidak bisa bebas dari konsep-konsep pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, liberalisasi ekonomi, globalisasi, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang bertumpu pada rakyat. Kenyataan ini menjelaskan otonomi daerah sama sekali tidak menjamin terwujudnya tata pemerintahan daerah yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat, bila jalan-jalan yang ditempuhnya sama persis dengan jalan-jalan yang dilalui rezim pemerintahan yang sentralistik.

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sama halnya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsepsi Hatta, mengemukakan bahwa apabila kita mau mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yang tertanam dalam pengertian "perintah dari yang diperintah", maka sebaik-baiknya titik berat pemerintahan sendiri diletakkan pada kabupaten.<sup>18</sup>

Konsep lainnya yang juga perlu dibahas dalam tulisan ini konsep tentang etnis, karena pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini pada umumnya didasarkan atas pertimbangan etnis yang berbeda yang terdapat di dalam satu kabupaten. Masing-masing etnis yang ada tersebut kemudian menginginkan sebuah kabupaten sendiri

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Rozali Abdullah, *op. cit.*, hlm. 12.

yang terpisah dengan kabupaten induk yang didominasi oleh etnis yang berbeda dengan etnis mereka.<sup>19</sup>

Pengertian etnis atau sukubangsa menurut Koentjaraningrat adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan mereka, sehingga kesatuan tidak ditentukan oleh orang luar (misalnya oleh seorang ahli antropologi, ahli kebudayaan, dan sebagainya, yang menggunakan metode-metode analisis ilmiah), melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri.<sup>20</sup>

Istilah etnis, di Indonesia pada awalnya hanya digunakan untuk suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, serta tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan atau karena secara fisik mereka benar-benar khas. Misalnya etnis Cina, etnis Arab, dan etnis Tamil-India.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etnis juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia, misalnya etnis Bugis, etnis Minangkabau, etnis Dairi-Pakpak, etnis Dani, etnis Sasak, dan ratusan etnis lainnya. Malahan akhir-akhir ini istilah suku mulai ditinggalkan karena berasosiasi dengan keprimitifan (suku dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *tribe*), sedangkan istilah etnis dirasa lebih netral. Istilah etnis sendiri merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sementara etnis merujuk pada orang-orang dalam kelompok. Dalam tulisan ini keduanya akan digunakan secara bergantian tergantung konteksnya.

Pengertian etnis dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnis memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Istilah etnis menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.

---

<sup>19</sup> Sawit Sarwono, "Etnik di Bengkulu: Kesatuan dalam Keberagaman" *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm. 6.

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 166.

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), hlm. 23.

Kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Definisi etnis di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Agama kadangkala menjadi ciri identitas yang penting bagi suatu etnis, tapi kadangkala tidak berarti apa-apa, hanya sebagai kepercayaan yang dianut anggota etnis. Seperti misalnya, etnis Minangkabau menempati wilayah geografis pulau Sumatera bagian barat yang menjadi wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini dan beberapa daerah pengaruh di provinsi sekitar. Masyarakat Minangkabau mengukuhkan agama sebagai identitas kultur mereka sejak animisme ditinggalkan. Islam menjadi tolak ukur ke-minang-an seseorang secara legalitas adat. Karena itu, orang Minangkabau yang tidak lagi beragama Islam dipandang sebagai orang yang tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap adat Minangkabau, sebagaimana ditafsirkan dari “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, kendatipun secara genealogis ia tetap beretnis Minangkabau, yang tentu saja tidak bisa menjadi etnis lain.<sup>22</sup>

Hal ini berbeda dengan masyarakat Jawa. Meskipun demikian orang itu tetap tidak dianggap sebagai orang Jawa. Di Jawa, agama yang dianut tidak menjadi penanda identitas etnis Jawa (kejawaan) seseorang. Selain Islam, yang merupakan agama mayoritas, orang Jawa banyak juga yang menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Kejawaen. Meskipun memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mereka semua tetap diakui ke-Jawa-annya.<sup>23</sup> Demikian juga pada etnis Tionghoa. Orang Tionghoa ada yang beragama Buddha, Taoisme, Kong Hu Chu, Kristen Protestan, Katholik, dan Islam. Meskipun demikian semua orang yang memiliki darah Tionghoa tersebut tetap merasa dirinya sebagai orang Tionghoa dan masyarakat Tionghoa sendiri pun

---

<sup>22</sup> Ch. N. Latief Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 66; Umar Junus, “Kebudayaan Minangkabau” dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 261.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 310-313; Kodiran, “Kebudayaan Jawa”, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 346.



tetap mengakuinya sebagai orang Tionghoa, walaupun memiliki agama yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Lalu etnis Sunda menempati wilayah Pulau Jawa bagian barat, dan etnis Madura menempati Pulau Madura sebagai wilayah geografis asal. Sebuah kelompok etnis pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok etnis tertentu atautkah tidak tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnis tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnis itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut. Seorang Batak akan tetap menjadi anggota etnis Batak meskipun dalam kesehariannya sangat “Jawa”. Orang Jawa memiliki perbendaharaan kata untuk hal ini, yakni “*durung Jawa*” (belum menjadi orang Jawa yang semestinya) untuk orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Jawa dalam keseharian mereka dan menganggap orang dari etnis lain yang menerapkan nilai-nilai Jawa sebagai “*njawani*” (berlaku seperti orang Jawa).

Pada saat anggota kelompok etnis melakukan migrasi, sering terjadi keadaan di mana mereka tercerabut dari akar budaya etnisnya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnik tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etnisnya. Akan tetapi, mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnis yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etnisnya. Jadi, keanggotaan seseorang pada suatu etnis terjadi begitu saja apa adanya, dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa seorang etnis Sunda meminta dirubah menjadi etnis Bugis, atau sebaliknya. Meskipun orang bisa saja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai, entah dari etnisnya sendiri, dari etnis lain, ataupun dari gabungan keduanya. Antara satu etnis dengan etnis lainnya kadang-kadang juga terdapat kemiripan bahasa. Kesamaan bahasa itu dimungkinkan karena etnis-etnis tersebut memiliki kesamaan sejarah tradisi kuno yang satu, yang mewariskan tradisi yang mirip dan juga bahasa yang mirip pula. Seperti misalnya bahasa Jawa memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Bali, lalu bahasa Minangkabau mirip dengan bahasa Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Banjar, dan lainnya.

Pembentukan Kabupaten Seluma tidak lepas dari kenyataan adanya keinginan etnis Serawai yang merupakan penduduk asli bekas

---

<sup>24</sup> Puspa Vasanty, “Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia” dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 367.

Kewedanaan Seluma yang terletak di bagian utara Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mempunyai kabupaten sendiri yang lepas dari Kabupaten Induk yang berpusat di Manna yang penduduknya lebih didominasi oleh etnis Pasemah.<sup>25</sup>

## 6. Metode dan Sumber Penulisan

Sebagaimana penelitian tentang sejarah sosial, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan melakukan pendekatan sejarah dengan tinjauan masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.<sup>26</sup> Louis Gottschalk, Dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa *metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau*<sup>27</sup>, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.

Mengingat konteks waktu penelitian ini sifatnya kontemporer, maka pendekatan sejarah lisan (*oral history*) menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Apalagi metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Melalui kerja sejarah lisan, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu.<sup>28</sup> Ini jelas memberikan warna pada persepsi peneliti tentang masa lampau.

---

<sup>25</sup> Iwan N. Aksa, "Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS)", *Makalah*, Tais, 2001, hlm. 15

<sup>26</sup> Gilbert J. Graghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press. 1984), hlm. 54-57. Lihat juga Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah", dalam Teuku Ibrahim Alfian, et al., (eds.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992), hlm. 409-419.

<sup>27</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32.

<sup>28</sup> Bambang Purwanto, *Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris* dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta* Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia. 2002), hlm. 152.

Pendekatan sejarah lisan, dapat membantu dalam menjelaskan kontinuitas kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Lebong, yang meliputi empat tahap yaitu; pertama melakukan pendataan dan survey para informan (pengkisah); ke dua membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); Ketiga menghubungi informan; dan ke empat melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, keterangan dari pelaku sejarah dan saksi yang berdomisili di wilayah Lebong maupun di luar Lebong sangat diperlukan, mulai dari mantan Birokrat, anggota Legislatif maupun dari pihak-pihak yang paham dengan persoalan konflik perbatasan sehubungan dengan pemekaran wilayah. Berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan dikritik kerelevansinya dengan pokok persoalan penelitian, dengan membandingkan dengan beberapa informan dan sumber lain yang menjelaskan topik yang sama, dengan maksud untuk meng-*crosscheck* apakah informasi yang diperoleh cukup valid ataupun tidak, termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan menghubungkan dan menbandingkan antara beberapa sumber dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah. Kemudian data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dikombinasikan pula dengan sumber primer tertulis yang ada yaitu arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh melalui catatan harian, Koran se-zaman, foto dan memoir para pelaku sejarah.

Guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan sumber primer, digunakan sumber sekunder (bahan "tangan kedua") yang diperoleh melalui instansi resmi, yaitu; Perpustakaan Daerah, Arsip Daerah, dan Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. Fakta sejarah yang telah diperoleh baik dari lisan maupun tertulis diberi arti dan makna, kemudian dirangkaikan satu sama lainnya, sehingga menjadi suatu jalinan cerita yang sistematis.

## **B. WACANA PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI BENGKULU**

### **1. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu**

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567

kilometer. Ditinjau dari keadaan geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 2 derajat 16 menit-3 derajat 31 menit Lintang Selatan dan 101 derajat 01 menit-103 derajat 41 menit Bujur Timur.<sup>29</sup>

Provinsi Bengkulu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan serta diselang-selangi daerah yang bergelombang. Pegunungan Bukit Barisan yang berjajar dari utara ke selatan di Bengkulu penuh dengan lembah dan dataran tingginya yang menghijau dan subur.<sup>30</sup>

Penduduk Provinsi Bengkulu terdiri dari berbagai sukubangsa, yaitu Rejang, Lembak, Serawai, Kaur, Semendo, Pasemah, Pekal, dan Enggano serta dari berbagai macam asal dan keturunan seperti Minangkabau, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis, dan Melayu, bahkan ada juga yang dari India, Cina, dan Afrika. Dari semua etnis yang ada, etnis Rejang yang merupakan penduduk asli Kabupaten Rejang Lebong dan sebagian Bengkulu Utara merupakan etnis terbesar, disusul oleh etnis Serawai yang merupakan penduduk asli Kabupaten Seluma.<sup>31</sup> Semua penduduk ini merasakan dan menampilkan dirinya sebagai “Orang Bengkulu”.

Provinsi Bengkulu menempati sebagian besar lereng bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Di daerah tersebut umumnya mempunyai sungai-sungai yang lebih pendek. Sungai-sungai yang mengalir ke pantai timur dan berpangkal di daerah sekitar Kota Muara Aman antara lain Cabang Atas Air Rawas (Air Rupit), dan di sekitar Kota Curup terdapat sumber air Musi, Lakitan, Air Kelingi, dan Air Beliti. Sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan serta mengalir ke barat adalah Air Seblat yang berhulu di Bukit Bubung,

---

<sup>29</sup> Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. ix; Ramli Achmad et al., *Koleksi Senjata Tradisional Museum Negeri Propinsi Bengkulu* (Bengkulu: Depdikbud, 1991), hlm. 2.

<sup>30</sup> Abdullah Sidik, *loc. cit.*

<sup>31</sup> *Ibid*; *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 4; Firdaus Burhan, *Bengkulu dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia, 1988), hlm. 164.

cabang-cabangnya bersumber dari Gunung Runcing (2.221 meter) dan dari Pematang Seblat (2.383 meter).

Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (dari tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang dan pada masa Revolusi fisik, daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukkan kedalam Keresidenan Palembang dan Lampung.<sup>32</sup> Perkembangan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut,

1. Pada tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Pada tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Pada tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Pada tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Pada tahun 1968- ... , daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur<sup>33</sup>

Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968.<sup>34</sup> Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. *Periode I*, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. *Periode II*, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan

---

<sup>32</sup> Affandi Abidin, *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu* (Bengkulu: Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, 1973), hlm. 28.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muria Herlina, *et al.* "Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu", *Laporan Penelitian* (Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu, 1997), hlm. 18.

Inggris sebagai daerah jajahan. *Periode III*, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. *Periode IV*, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. *Periode V*, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. *Periode VI*, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. *Periode VII*, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.<sup>35</sup>

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan,<sup>36</sup> Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan.<sup>37</sup> Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.

Sebagaimana provinsi lainnya, setelah diresmikan menjadi provinsi sendiri, Provinsi Bengkulu juga mempunyai lambang berbentuk Tameng tulisan kata “Bengkulu” di bawahnya. Di bagian kiri tameng terdapat tangkai buah padi dan di bagian kirinya terdapat tangkai bunga kopi. Di tengah-tengah tameng berturut-turut dari atas ke bawah terdapat bintang bersudut lima, cerana, dua buah senjata rudus yang bersilangan, dan bunga raflesia amoldi. Di luar tameng terdapat ombak berwarna ungu, sedangkan bagian atasnya berwarna hijau. Bintang bersudut lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Cerana melambangkan kebudayaan yang tinggi, senjata rudus adalah kepahlawanan, sedangkan bunga raflesia amoldi merupakan keistimewaan alam Bengkulu. Di alam negeri inilah bunga itu tumbuh indah sekali. Ombak laut berjumlah 18 garis, daun kopi berjumlah 11 lembar, bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6, dan padi setiap tangkai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 17; Rois Leonard Arios, “Kembali ke Marga, Kembali ke Budaya Asal: Refleksi Sistem Pemerintahan Tradisional Bengkulu di Era Otonomi”, dalam *Suluah*, Volume 04, Nomor 5, Agustus 2004, hlm. 29; Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hl, 126-129.

<sup>36</sup> Tanggal 11 Oktober 1986, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1986, ditetapkan perluasan Kotamadya Bengkulu dari 17,6 km<sup>2</sup> menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan penambahan kecamatan dari dua menjadi empat kecamatan. Lihat Abdullah Sidik, *op. cit.*, hlm. 171.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 170-172.

berjumlah 8, menggambarkan hari lahir Provinsi Bengkulu yaitu tanggal 18 November 1968.<sup>38</sup>

Penduduk Bengkulu berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pada akhir tahun 1961 adalah 406.249 jiwa yang tersebar di tiga kabupaten dan satu kotapraja. Dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Keresidenan Bengkulu pada tahun 1961 adalah 21 jiwa per Km<sup>2</sup>. Pada tahun 1980 penduduk Provinsi Bengkulu telah meningkat menjadi 768.046 jiwa,<sup>39</sup> tahun 1990 menjadi 1.178.850 jiwa,<sup>40</sup> tahun 2000 menjadi 1.407.060 jiwa,<sup>41</sup> dan pada tahun 2001 telah menjadi 1.592.926 jiwa.<sup>42</sup>

Sebagian besar penduduk Provinsi Bengkulu menganut agama Islam yang prosentasenya mencapai 98,5% dari keseluruhan jumlah penduduk. Agama lainnya adalah Kristen sebanyak 1%, Hindu 0,16%, dan Buddha 0,22%.<sup>43</sup> Penganut agama selain Islam dianut oleh penduduk pendatang, terutama dari etnis Tionghoa dan Batak. Etnis-etnis yang dianggap sebagai penduduk asli Provinsi Bengkulu adalah Rejang, Pasemah, Serawai, Lembak, Mulak, Pekal, Mukomuko, Melayu Bengkulu, dan Enggano. Setiap etnis memiliki bahasa masing-masing yang satu sama lain masih berkerabat dekat, kecuali bahasa Enggano.<sup>44</sup>

Secara tradisional, masyarakat Bengkulu terbentuk dalam *territorialized kinship-based communities* (komunitas-komunitas yang berwilayah berdasarkan kekerabatan). Komunitas yang bercirikan seperti ini pada umumnya merupakan konfederasi dari marga-marga ataupun suku-suku.<sup>45</sup> Wilayah-wilayah komunitas di Bengkulu pada umumnya juga menggunakan istilah kerajaan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki adat-istiadat tersendiri.<sup>46</sup> Beberapa komunitas

---

<sup>38</sup> Iwan Gayo (ed.), *Buku Pintar Seri Senior* (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002), hlm. 47.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Bengkulu dalam Angka 2001. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu; Lia Nuralia & Iim Imadudin, *Pola Asimilasi Etnis Cina di Kota Bengkulu 1950-1998* (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004), hlm. 23.

<sup>43</sup> Iwan Gayo (ed.), *loc. cit.*

<sup>44</sup> Sawit Sarwono, "Etnik di Bengkulu: Kesatuan dalam Keberagaman" *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

<sup>45</sup> Agus Setiyanto, "Bengkulu dalam Lintas Sejarah: Dari Sistem Pemerintahan Tradisional hingga Birokrasi Kolonial", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm. 4.

<sup>46</sup> Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 62.

yang menggunakan kerajaan antara lain adalah Sungai Lemau, Sungai Hitam, Silebar, dan Mukomuko.<sup>47</sup>

## 2. Faktor Pendorong Pemekaran Wilayah

Keluarnya UU No. 5 tahun 1979 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 141 tahun 1982, tanggal 1 Oktober 1982, menyebabkan sistem pemerintahan marga dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Pejabat camat, kepala desa, dan lurah diangkat oleh gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-670, tanggal 14 Oktober 1982, telah disahkan sebanyak 986 desa dan 79 kelurahan di Provinsi Bengkulu.<sup>48</sup>

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah Daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya UU otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi 33 propinsi dari sebelumnya 26 propinsi. Seiring dengan pemekaran propinsi, kabupaten-kabupaten baru juga telah banyak terbentuk. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu telah dimekarkan menjadi sembilan daerah kabupaten/kota, dari sebelumnya empat kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang.<sup>49</sup> Seiring dengan pemekaraan kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan

---

<sup>47</sup> Agus Setiyanto, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>49</sup> UU RI No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu; Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 140 & 147; Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* Jilid 4 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 222.



di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran. Sampai dengan tahun 2005 di Propinsi Bengkulu telah terbentuk 93 kecamatan, 119 kelurahan, dan 1.120 desa.<sup>50</sup>

Salah satu kabupaten baru hasil pemekaran adalah Kabupaten Seluma yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan. Nama Seluma berasal dari kata “Seluman” atau “Menghilang”. Kata tersebut berdasarkan cerita rakyat Seluma yang diberikan oleh Maharaja Sakti yaitu suami Putri Gading Cempaka, Raja Ketiga dari Kerajaan Sungai Serut Bangkahulu. Disebut dengan Seluman atau Menghilang adalah disebabkan karena pada saat Maharaja Sakti menyaksikan naga yang membendung sungai di antara Bukit Campang dan Bukit Lesung, menemukan dua butir telur naga tersebut sedang menetas. Pada saat itu, anak naga yang baru menetas tersebut langsung “Menghilang” dan Maharaja Sakti mengatakan “Seluman”. Kemudian Maharaja Sakti berkata lagi: “Suatu saat anak naga ini akan datang”. Daerah ini akan menjadi “satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan”. Wilayahnya adalah terletak di antara timbulnya dua ekor anak naga ini. Setelah beberapa tahun kemudian, apa yang dikatakan oleh Maharaja Sakti memang benar. Dua ekor anak naga tersebut menampakkan diri. Satu di Bukit kabu dan satunya lagi di Air Terjun Hulu Alas.<sup>51</sup>

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan yang kemudian didefinisikan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa.<sup>52</sup> Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manna, dan Kewedanaan Kaur.<sup>53</sup>

Luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (*pan of cointrol*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Iwan N. Aksa, “Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS)”, *Makalah*, Tais, 2001, hlm. 17-18.

<sup>52</sup> Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, hlm. 1.

<sup>53</sup> Iwan N. Aksa, *op. cit.*, hlm. 13.

efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Seluma untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.

Dalam perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen J.H. Knoerle (1828-1833), Seluma sudah merupakan satu kabupaten (*landschappen*) yang wilayahnya meliputi Ngallam, Seluma, Tallo, dan Alas, terdiri dari 119 dusun dan berpenduduk 7.832 jiwa.<sup>54</sup> Tahun 1873, daerah Seluma dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai wilayah administrasi pemerintahan dengan nama *Onderafdeeling* Seloema dengan ibukotanya Tais.<sup>55</sup> Tahun 1908, sesuai dengan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima *Afdeelingen* (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah *Afdeeling* Seluma yang dipimpin oleh seorang *controleur* dan berkedudukan di Tais.<sup>56</sup>

Pada tanggal 28 Maret 1910, diadakan musyawarah besar antara *Controleur* dengan para pemuka adat Serawai, pemuka agama, dan para kepala marga, untuk menentukan aturan wilayah (Undang-Undang), akan tetapi keputusan musyawarah tersebut banyak ditentang masyarakat. Musyawarah tersebut dilaksanakan atas perintah *Asistent Resident* Benkoelen, J. Walland.<sup>58</sup> Pada tanggal 3 Maret 1911, Musyawarah Besar kembali digelar. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa hasil musyawarah tanggal 28 Maret 1910 dibatalkan dan diganti dengan hasil musyawarah tanggal 3 Maret 1911. Hasil musyawarah tersebut kemudian dinamakan “Oendang-Oendang Adat Lembaga *Onderafdeeling* Seloema”. Tanggal 7 November 1911,

---

<sup>54</sup> Pembagian wilayah Bengkulu menjadi sembilan kabupaten pada masa pemerinthan J.H. Knoerle ini adalah (1) Sungai Lemau; (2) Sungai Itam; (3) Selebar; (4) Mukomuko; (5) Seluma; (6) Manna; (7) Kaur; (8) Krue; dan (9) Musi Rejang. Lihat Abdullah Sidik, *op. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>55</sup> Iwan N. Aksa, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>56</sup> Lima *afdeeling* yang ada di Keresidenan Bengkulu pada tahun 1908 ini adalah (1) Benkoelen; (2) Lebong yang terdiri atas *onderafdeeling* Lebong, Lais, Rejang, dan Mukomuko; (3) Seluma; (4) Manna; dan (5) Krue. Lihat *Staatsblad 1908* No. 646.

<sup>57</sup> Iwan N. Aksa, *loc. cit.*

“Oendang-Oemdang Adat Lembaga *Onderafdeeling* Seloema” disyahkan dengan *Besluit Resident* Nomor 444, dan ditetapkan ibukotanya Tais.<sup>58</sup> Pada tahun 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah *Onderafdeeling* Seloema. Pemerintahan kemudian diganti dengan Pemerintahan Militer Jepang dengan nama *Gun* Seloema dengan kepala pemerintahannya *Gun Coo* dan ibukotanya tetap di Tais.<sup>59</sup>

Pada awal kemerdekaan Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Pada tahun 1952, daerah Seluma kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Kaur menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kewedanaan Seluma memiliki luas wilayah 2.405,06 Km<sup>2</sup>, yang meliputi (1) Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari Marga Semidang Bukit Kabu, Marga Andalas, dan Marga Air Periukan; (2) Kecamatan Seluma yang terdiri dari Marga Semidang Bunga Emas, Marga Ngalam, Marga Anak Pangi, dan Marga Kota Padang; (3) Kecamatan Talo yang terdiri dari Marga Hulu Talo dan Marga Hilir Talo; (4) Kecamatan Semidang Alas yang terdiri dari marga Semidang Alas; dan (5) Kecamatan Semidang Alas Maras yang terdiri dari Marga Semidang Alas Maras.<sup>60</sup>

Pada tahun 1956, setelah gagal memperjuangkan daerahnya menjadi wilayah Daerah Swatantra Tingkat II dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Bengkulu Selatan, daerah Seluma hanya mengirimkan wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) yang sekaligus sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) yaitu Muhammad Dali nasrun dan Chatam Ralib.

Pada tahun 1966 perjuangan untuk membentuk daerah otonom baru Kabupaten Seluma kembali dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi Daerah Otonom baru Kabupaten Seluma kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.<sup>61</sup> Sebelumnya, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1946 sampai 1968, yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.<sup>62</sup>

Orde Reformasi yang lahir seiring tumbangnya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Seluma untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Seluma. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah.

Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Pada tanggal 24 November 1999, komponen tokoh masyarakat Daerah Seluma berkumpul di Hotel Tiara yang terletak di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 96 Bengkulu untuk bermusyawarah mengenai kemungkinan terbentuknya kabupaten Seluma, yang kemudian membawa hasil dengan keluarnya Peraturan Pemerintah berupa Undang-Undang RI No. 3 tahun 2003 yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.<sup>63</sup>

Tujuan pemekaran daerah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat bekas Kewedanaan Seluma dan Kaur selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui (1) Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia; (2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya; (3) Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang

---

<sup>62</sup> Abdullah Sidik, *op. cit.*, hlm. 169.

<sup>63</sup> UU RI No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

demokratis; (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; (5) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan (6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.<sup>64</sup>

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Seluma ini di antaranya adalah, (1) Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Mempersingkat rentang kendali (*span of control*) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien; (3) Sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja; (4) menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta sistem kehidupan masyarakat yang kondusif; (5) menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan (6) mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.<sup>65</sup>

### 3. Reaksi Masyarakat terhadap Ide Pemekaran Wilayah

Keinginan untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri telah dirintis sejak lama, baik oleh anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka adat daerah bekas Kewedanaan Kaur dan Seluma. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 telah memberi angin segar dan harapan yang kuat untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menjadikan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma.<sup>66</sup>

Pada tanggal 24 November 1999, sekelompok masyarakat Daerah Seluma telah bersepakat dalam pertemuan musyawarah di Hotel Tiara Bengkulu untuk membentuk kabupaten otonom baru. Tanggal 15 Januari 2000 telah ditetapkan oleh tim formatur yang dibentuk untuk itu bahwa nama media perjuangan adalah Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) dengan ketentuan: Nama kabupaten adalah Seluma, ibukota kabupaten adalah Tais. Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili seluruh kecamatan yang ada

---

<sup>64</sup> Bustan A. Dali, *loc. cit.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>66</sup> "Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, hlm. 2.

dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma.<sup>67</sup> Pertemuan lanjutan yang juga di dilaksanakan di Hotel Tiara Bengkulu tersebut dihadiri oleh pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat umum, akademisi, tokoh pemuda, tokoh politik dari berbagai partai politik yang ada, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan tokoh organisasi profesi.

Selanjutnya dibentuk *Team Formateur* pembentukan Kabupaten Seluma dengan Ketua: Drs. Iwan N. Aksa, BE, MBA; Sekretaris: Drs. Bahrullah Abas, MA; dan Anggota yang terdiri dari (1) Drs. Mulkan Tajudin, MM., (2) Drs. Sakum Lair, (3) Ir. Dedy Rosadi, (4) Bustan A. Dali, dan (5) Zulman Syafri. Hasil keputusan *Team Formateur* tersebut adalah;

Pasal 1 : Bahwa Presidium Persiapan Kabupaten Seluma atau disingkat PPKS adalah merupakan wadah penampungaspirasi masyarakat bekas Kewedanaan Seluma, wadah penindaklanjuti aspirasi tersebut, dan wadah perjuangan masyarakat.

Pasal 2 : Komposisi dan Personalia PPKS seperti yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini adalah merupakan personalia yang dipercayai sebagai deklarator dan bersifat independen untuk mendeklarasikan Kabupaten Seluma.

Pasal 3 : Personalia PPKS diberikan wewenang oleh segenap masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Seluma sampai diterbitkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Seluma tersebut.

Pasal 4 : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Di samping Keputusan *Team Formateur* tersebut di atas, terdapat pula kesepakatan dari Forum Rapat pertemuan bahwa Sekretariat Pusat harus berada di lingkungan Rencana Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma. Atas kebijaksanaan dari Sekretaris Umum PPKS (Bustan A. Dali), maka dipergunakan rumah pribadinya yang terletak di jalan Raya Bengkulu – Manna Km 61 Desa Bungamas Kecamatan Seluma. Sekretariat tersebut dilengkapi dengan perangkat sebagaimana layaknya sekretariat organisasi pada umumnya dan dilengkapi dengan satu unit komputer multi media.

Komposisi dan personalia Presidium Persiapan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut;

---

<sup>67</sup> Bustan A. Dali, "Sejarah Daerah Tana Serawai Empat Semidang Kabupaten Seluma, *Synopsis*, Tais, 27 Mei 2008, hlm. 5.

**I. Penasehat**

**: H. Hanafi**

**Drs. H. Salman Rufni, MBA**

**Drs. Chairul Amri Zakaria, MM**

**Drs. Iskandar Z. Dayok**

**Murman Effendi, SE**

**Brigjend. Sudirman Ail**

**H. Amana Nasrun, SE**

**Ir. Budiman Arif**

**H. Muhammad Dali Nasrun**

**H. Muhammad Maliki**

**H. Hasran Syafri**

**H. Muhammad Zuhud**

**H. Thibrani Jauhari**

**II. Ketua Umum**

**: Drs. Iwan N, Aksa, MBA**

**Ketua Bidang Ortala**

**: Drs. Bahrullah Abas, MA**

**Ketua Bidang Keu/Program**

**: Drs. Bustami Syafri**

**Ketua Bidang Operasional**

**: Ir. Dedy Rosadi**

**Ketua Bidang Kemasyarakatan**

**: Drs. Bustami Th.**

**Ketua Bidang Pengemb SDM**

**: Drs. Sakum Lair**

**Ketua Bidang Politik Keamanan**

**: Harmen Kamarsyah**

**Ketua Bidang Adat/Budaya**

**: H. Johar Jaris**

**Ketua Bidang Hukum/Kom**

**: Ahmad Kenedi, SH**

**III. Sekretaris Umum**

**: Bustan A. Dali**

**Sekretaris I**

**: Drs. Rukman Ramli**

**Sekretaris II**

**: Drs. Hartono**

**Sekretaris III**

**: Zulman Syafri**

**IV. Bendahara Umum**

**:Drs. Mulkan Tajudin, MM**

**Bendahara I**

**: Syaiful Anwar D., SE**

**Bendahara II**

**: Harry A.A., MBA**

**Bendahara III**

**: Suparman Maliki**

**Sebagai Kelengkapan Operasional dibentuk Badan Pekerja, yaitu:**

- 1. Komisi Pusat Kajian Strategis Wilayah Daerah Seluma dengan personil Drs. Sohardi sebagai Ketua; Ir. Nopiar Dahari sebagai Wakil Ketua; Drs. Gustianto sebagai**

Sekretaris; Yuvina Kurniati, A.M.Kom sebagai Wakil Sekretaris, serta Marsuis SH, Arben Mukhtar, SE, Bustami Ain, A.Md, Susilawati, B.S.Ag, Zulman Syafri, dan Drs. Silahuddin Yunus sebagai Anggota.

2. Komisi Penampung Aspirasi dan Pengumpul Data dengan personil Nurman Burhan sebagai Ketua; Ridwan Kani sebagai Wakil Ketua; Jahim S.A.Md, sebagai Sekretaris; N. Burhanuddin J. Sebagai Wakil Sekretaris, serta Maskun (Kec. Talo), Hasan (Kec. Talo), Syaiful Anwar S. (Kec. Seluma), Aliundi (Kec. Seluma), Zailan Zulkifli (Kec. Sukaraja), Burzian (Kec. Pembantu Alas barat), Drs. Firmansyah Agus (Kec. Pembantu Alas Barat), Sanusi HG (ex. Transmigran), Drs. Ramlan Riva'i (Manna), Turino Junaidi (Bengkulu Utara), Darsono Tarif (Bengkulu), Drs. Afandi Siamid (Rejang Lebong), Asikin Abidin (Sumatera Selatan), Thabri Amin, BA (Jakarta), H. Zamzami Jahuri (Jawa Barat), Rico Syaiful (Yogyakarta), Zaherman D. (Kuriir), Rusdi (Babatan), Letkol Pol. Drs. Taharuddin Syafri (Jakarta), Letkol Pol. Amril Sais, BSc (Jakarta), Burmansyah Aroef (Bengkulu), Drs. Sul Basrin (Bengkulu), Supenir Edi, BSc (Jakarta), Drs. Thabrani R. (Manna), dan Jhon Ramadan S.Ag (Bengkulu) sebagai Anggota.
3. Komisi Pengadaan Dana Operasional dengan personil Suparman Maliki sebagai Ketua; Edi Mawardi A. sebagai Wakil Ketua; Mustari Ma'in sebagai Sekretaris; Asmara Juita S.Sos sebagai Wakil Sekretaris, dan sebagai Anggota adalah Drs. Gustianto (penerima), Drs. Rukman Ramli (penyeter), Drs. Sumar (pembantu), Zahlul Fitrah (pembantu), dan Drs. Hartono (pembantu).
4. Komisi Persiapan Lahan Lokasi Perkantoran Pusat Pemerintahan dengan personil Hamrah Teman sebagai Ketua; Darmawan Jaya sebagai Wakil Ketua; Zaherman D. Sebagai Sekretaris; Arzan sebagai Wakil Sekretaris; dan sebagai Anggota adalah Nusyirwan (tim survai), Drs. Muhpian A. (tim negosiasi), Drs. Zairin S. (tim kumulasi), Nazarkan Baksin, BE (Pembantu), Syahrul Ikhwani (Pembantu), dan Halimin, SH (Pembantu).
5. Badan Musyawarah Adat
6. Badan Advokasi dan Komunikasi
7. Badan Khusus, merupakan Unit Kerja Otonom dalam hal informasi dan penggalangan massa



8. Sebagai sub-komisi dan sub-badan selanjutnya dibentuk tim-tim pelaksana yang terdiri dari tim penyusun program, tim pelaksana sekretariat, tim pembebasan lahan, tim advokasi, tim publikasi, tim *research* dan survai, tim pengembangan sumberdaya manusia, tim *financial approach*, tim penyiapan perkantoran sementara, tim sosialisasi, dan tim khusus.<sup>68</sup>

Tanggal 23 April 2000, proposal yang disusun Bustan A. Dali selaku konseptor dan disetujui oleh Ketua Umum PPKS (Iwan N. Aksa) serta ketua bidang Ortalala (Bahrullah Abbas) telah disetujui oleh forum rapat PPKS untuk kemudian disampaikan kepada Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan. Aspirasi yang disampaikan oleh Presidium

Persiapan Kabupaten Seluma atas nama segenap masyarakat bekas Kewedanaan Seluma adlah sebagai berikut;

1. Mendesak Bupati Bengkulu Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu agar memroses usulan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk membentuk kabupaten Seluma sebagai implementasi pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan / disetujui dalam bentuk Undang-Undang.
2. Mendesak Bupati Bengkulu Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Gubernur Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu untuk memberi porsi anggaran yang cukup memadai guna pembiayaan Pembentukan Kabupaten Seluma secara swadana sehingga tidak tergantung subsidi / modal dari Pemerintah Pusat.
3. Mendesak Bupati Bengkulu Selatan dan Gubernur Bengkulu untuk mengawali pembangunan struktur fisik sebagai fasilitas untuk kegiatan pemerintah, pelayanan umum, dan penataan lingkungan.
4. Mendesak Bupati Bengkulu Selatan dan Gubernur Bengkulu agar melanjutkan penyediaan tanah / lahan yang sudah disediakan masyarakat seluas 100 Ha bagi kelengkapan pembangunan infra struktur fisik dan lingkungan perkantoran sehingga pelaksanaan pembangunan perkantoran, fasilitas pelayanan umum / sosial dan sarana transportasi serta sarana komunikasi dapat dilaksanakan secara baik dan lancar.

---

<sup>68</sup> Iwan N. Aksa, *op. cit.*., hlm. 32-36.

5. Mendesak Bupati Bengkulu Selatan dan Gubernur Bengkulu untuk menyediakan Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintahan sesuai kebutuhan, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tercipta Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintahan yang benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Seluma.

Setelah dilaksanakan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut, Tim Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Seluma secara umum, baik yang berada di dalam wilayah Seluma maupun yang berada di luar wilayah Seluma atau bahkan yang berada di luar Provinsi Bengkulu dengan lebih gencar. Hal yang sangat menggembirakan adalah sambutan masyarakat yang sangat responsif dan dukungan yang sangat antusias dari semua pihak.

PPKS yang baru terbentuk segera melaksanakan tugas-tugas operasionalnya dengan menerjunkan tim-tim khusus ke lapangan. Sasaran utama adalah untuk melakukan penelitian-penelitian tentang lokasi perkantoran pusat pemerintahan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan kondisi-kondisi obyektif yang ada dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma. Hasil dari rangkaian penelitian tersebut dikaji oleh Badan Pekerja, yaitu Komisi Pusat kajian Strategis Wilayah Daerah Seluma.

Pembentukan Kabupaten Seluma juga mendapat dukungan secara legal –formal dari banyak kalangan, terutama dari segenap lapisan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma. Dukungan tersebut merupakan indikator besarnya aspirasi masyarakat yang menuntut adanya pembentukan Kabupaten Seluma. Dukungan-dukungan tersebut di antaranya datang dari Partai Golongan Karya Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>69</sup> Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>70</sup> Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>71</sup> Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>72</sup> Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>73</sup> Partai Demokrasi

---

<sup>69</sup> Surat Dukungan Partai Golkar No: KEP-25/DPD.BS/GOLKAR/II/2002 tentang Dukungan terhadap Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 19 Februari 2002.

<sup>70</sup> Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

<sup>71</sup> Surat Pernyataan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

<sup>72</sup> Surat Pernyataan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, Februari 2002.

<sup>73</sup> Surat Pernyataan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, Februari 2002.

Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>74</sup> Partai Republik Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>75</sup> masyarakat Kecamatan Seluma yang terdiri dari berbagai kalangan,<sup>76</sup> masyarakat Kecamatan Talo yang terdiri dari berbagai kalangan,<sup>77</sup> masyarakat Kecamatan Semidang Alas yang terdiri dari berbagai kalangan,<sup>78</sup> dan masyarakat Kecamatan Sukaraja yang juga terdiri dari berbagai kalangan.<sup>79</sup> Di samping penduduk asli, dukungan pembentukan Kabupaten Seluma juga datang dari penduduk pendatang yang bertempat tinggal di daerah Seluma, seperti masyarakat etnis Minangkabau yang menetap di Kecamatan Seluma,<sup>80</sup> Kecamatan Talo,<sup>81</sup> dan Kecamatan Sukaraja,<sup>82</sup> masyarakat transmigran di Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>83</sup> masyarakat etnis Bali di Kabupaten

---

<sup>74</sup> Surat Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

<sup>75</sup> Surat Pernyataan Partai Republik Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 20 Februari 2002.

<sup>76</sup> Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Kecamatan Seluma, Tais, 5 Januari 2000; Surat Pernyataan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI – Polri (FKPPI) 070 Rayon Kecamatan Seluma No. 10/II/01/2002, Tais, 25 Januari 2002; Surat Pernyataan Lembaga Sosial Masyarakat “Peduli Masyarakat dan Pembangunan” Kecamatan Seluma No. 017/LSM PMPKS/2002, Tais, 23 Januari 2002; Surat Pernyataan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Seluma No.023/IV.1/B/2002, Tais, 23 Januari 2002; Surat Pernyataan Himpunan Pemberantasan Hama Babi Kecamatan Seluma, Tais, 22 Januari 2002.

<sup>77</sup> Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Talo, Masmambang, 6 Januari 2000; Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Talo, 2002; Surat Pernyataan Organisasi Pemuda Kecamatan Talo, 2002; Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Talo, 2002.

<sup>78</sup> Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Semidang Alas, 2002; Surat Pernyataan LKMD se Kecamatan Semidang Alas, 2002; Surat Pernyataan Organisasi Pemuda Kecamatan Semidang Alas, 2002; Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Semidang Alas, 2002.

<sup>79</sup> Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Kecamatan Sukaraja, Sukaraja, 10 Januari 2000; Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukaraja, 2002; Surat Pernyataan Organisasi Pemuda Kecamatan Sukaraja, 2002; Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Sukaraja, 2002; Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Sukaraja, 2002; Surat Pernyataan Masyarakat Himpunan Keluarga Talo Kecamatan Sukaraja (HKTS), Lubuk Sahung, 15 Januari 2002.

<sup>80</sup> Surat Pernyataan Dukungan Ikatan Keluarga Minang Tais dan Sekitarnya (IKMAT) Kecamatan Seluma, Tais, 25 Januari 2002.

<sup>81</sup> Surat Pernyataan Masyarakat Sumatera Barat di Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

<sup>82</sup> Surat Pernyataan Masyarakat Sumatera Barat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

<sup>83</sup> Surat Pernyataan Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

Bengkulu Selatan,<sup>84</sup> masyarakat etnis Sunda di Kabupaten Bengkulu Selatan,<sup>85</sup> dan masyarakat etnis Batak di Bengkulu Selatan.<sup>86</sup>

Aspirasi masyarakat yang berkembang dan perlu ditindaklanjuti merupakan aspirasi murni dengan basis kondisi *span of control* Pemerintahan yang perlu dipersingkat dan pemerataan pembangunan yang sudah mendesak. Dari data yang diterima oleh PPKS, ternyata pembangunan, baik infra struktur maupun supra struktur sangat tidak seimbang. Mengingat wilayah bekas Kewedanaan Seluma memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dua bekas kewedanaan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Manna dan Kaur. Di samping itu daerah Seluma memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dan *income* per kapita yang lebih tinggi dibanding dua daerah bekas kewedanaan lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **4. Peran Pemerintah Daerah dalam Merespon Pembentukan Kabupaten Seluma**

Peran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembentukan daerah otonom baru sangat signifikan, yaitu secara aktif mendorong, menggerakkan serta memberikan penilaian terhadap kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat di daerah mempunyai fungsi strategis dalam pembinaan desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>87</sup>

Dalam menanggapi aspirasi daerah yang ingin memekarkan diri, pemerintah provinsi juga menjalankan peran dalam menjaga agar pemekaran daerah jangan sampai menjadi sebagai proses pembelahan wilayah secara mudah dengan kepentingan politik sempit sekelompok elite lokal, sehingga perlu dilakukan asesmen terhadap daerah yang akan berdiri sebagai daerah otonom baru.

Dalam pembentukan kabupaten baru, Pemerintah Provinsi Bengkulu senantiasa mendukung aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diukur pada aspek politik dan ekonomi. Dalam perjalanan proses pembentukan kabupaten baru, Pemerintah

---

<sup>84</sup> Surat Pemyataan Masyarakat Bali di Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

<sup>85</sup> Surat Pemyataan Masyarakat Sunda di Bengkulu Selatan, tahun 2002.

<sup>86</sup> Surat Pemyataan Masyarakat Batak di Bengkulu Selatan, tahun 2002.

<sup>87</sup> Agusrin Maryono Najamudin, "Peran dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Merespon Aspirasi Pembentukan Kabupaten Baru", *Makalah*, disampaikan disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm. 3.

Provinsi Bengkulu berperan aktif dalam membantu dan mengawal proses perjalanannya. Peran tersebut secara konkrit terlihat pada bantuan berbentuk fasilitasi, mediasi, maupun supervisi pada saat proses di tingkat pemerintah pusat maupun pada saat terjadi kendala dengan pihak lain, baik dengan calon daerah otonom tetangga maupun dengan kabupaten induk.<sup>88</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom baru, Pemerintah Provinsi Bengkulu selalu berusaha melakukan pembinaan guna menjaga agar tujuan yang diharapkan dapat senantiasa tercapai dan menjaga jangan sampai peran hakiki pemerintah sebagai pihak yang melayani dan memberdayakan masyarakat tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran wilayah di daerahnya kemudian menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 35 tahun 2000 tentang persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya keluar pula keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 101 tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>89</sup> Persetujuan yang diberikan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ini didasarkan atas pertimbangan:<sup>90</sup>

1. Keinginan Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk Daerah Otonom Baru telah muncul sejak lama dan senantiasa dituangkan dalam Pola Dasar dan Repelita Daerah.
2. Pembentukan Daerah Otonom Baru sejak lama telah dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan, sejalan dengan upaya untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di samping untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan yang lebih efektif.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>89</sup> Iwan N. Aksa, *loc. cit.*

<sup>90</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Rencana strategis pembangunan pemerintahan yang mencakup antara lain rencana pembentukan Daerah Otonom Baru merupakan langkah antisipasi yang jangkauannya jauh ke depan sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di daerah.
4. Ketiga Daerah Otonom Baru yang direncanakan pembentukannya tersebut berdasarkan hasil penelitian, cukup mampu untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memenuhi persyaratan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.
5. Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menyetujui pembentukan Daerah Otonom Baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Keputusan.

Aspek hukum yang dijadikan dasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyetujui pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Di samping aspek hukum di atas, beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyetujui pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah setelah memperhatikan:

1. Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor 300/0572/B.1 tanggal 29 Juni 2000 perihal Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Agustus 2000.

3. Jawaban Bupati Bengkulu Selatan atas Pemandangan Umum Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 19 Agustus 2000.
4. Pendapat akhir dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 25 Agustus 2000.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan setelah menimbang, mengingat, dan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya memutuskan dan menetapkan:

1. Menyetujui Rencana Pemekaran Wilayah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk tiga Daerah Otonom Baru, yaitu kabupaten seluma, Kabupaten Manna,<sup>91</sup> dan Kabupaten Kaur.
2. Diusulkan melalui pihak Eksekutif agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Mengenai data pendukung sehubungan dengan Pemekaran Wilayah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membentuk tiga Daerah Otonom Baru.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 Agustus 2000 dan ditetapkan di Manna, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat bekas Kewedanaan Seluma, yakni dari presidium, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan tokoh perempuan yang disampaikan melalui pertemuan atau dialog dan bentuk proposal untuk membentuk Daerah Otonom Baru, didukung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Drs. Bahrullah Abbas, MA, yang memohon kepada Gubernur Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu agar segera

---

<sup>91</sup> Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perbaikan atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000, disebutkan bahwa nama Kabupaten Manna diralat menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan karena dianggap merupakan kabupaten induk bagi dua Daerah Otonom Baru lainnya.

menindaklanjuti proses pemekaran Wilayah Kabupaten Seluma dan Kaur.<sup>92</sup>

Bupati Bengkulu Selatan, Drs. Iskandar Z. Dayok, juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk membentuk Daerah Otonom Baru. Hal ini tercermin dalam Surat yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu berupa permintaan agar Gubernur Bengkulu dapat memproses dan menindaklanjuti usul pengajuan masing-masing calon kabupaten dan dapat meneruskannya kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta.<sup>93</sup>

Dukungan yang diberikan oleh Bupati Bengkulu Selatan untuk pembentukan Kabupaten Seluma didasari oleh:<sup>94</sup>

1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Surat Pernyataan Dukungan dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dukungan yang diberikan Bupati Bengkulu Selatan ini dilakukan setelah memperhatikan:

1. Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dalam wilayah Calon Kabupaten Seluma dan Calon Kabupaten Kaur, yaitu dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pelajar, dan tokoh perempuan bahwa masyarakat dalam wilayah tersebut telah siap menerima dan mendukung sepenuhnya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Segenap potensi yang ada dalam Wilayah Calon Kabupaten Seluma dan Calon Kabupaten Kaur sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kabupaten-kabupaten baru.

---

<sup>92</sup> Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor 136/646/B.1 Perihal Mohon untuk Ditindaklanjuti Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, tanggal 9 April 2001.

<sup>93</sup> Surat Bupati Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor 136/355/B.1 Perihal Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Juli 2001.

<sup>94</sup> Surat Pernyataan Dukungan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 136/565/PEM/2000.



3. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Bengkulu selatan menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tiga kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bengkulu dalam menanggapi adanya keinginan pemekaran wilayah yang diajukan oleh beberapa kabupaten menyatakan persetujuannya.<sup>95</sup> Persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu ini didasari oleh pertimbangan:

1. Berdasarkan pertimbangan aspirasi, potensi, dan administrasi serta letak geografi untuk melaksanakan Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu dari tiga kabupaten dan satu kota menjadi enam kabupaten maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
2. Sesuai dengan proposal usul Pemekaran Wilayah yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara yang menghendaki adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tiga kabupaten dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi dua kabupaten.
3. Hasil rapat Paripurna Khusus DPRD Provinsi Bengkulu tanggal 20 Februari 2002 yang menyetujui Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan wilayahnya menjadi tiga kabupaten dan Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan wilayahnya menjadi dua kabupaten, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

Aspek hukum yang mendasari persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu perihal pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 (L.N. Tahun 1967 No. 19. Tambahan Lembaran Negara No. 2828) tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.

---

<sup>95</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 03/KPTS/DPRD-1/2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bengkulu terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten dan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 2 (Dua) Kabupaten.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya UU Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (L.N. Tahun 1968 No. 34, Tambahan L.N. Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan, pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 34 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001-2005.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propvinsi Bengkulu Tahun 2001-2005.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Bengkulu.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11/KPTS/DPRD-I/2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/DPRD-I/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyetujui pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan setelah memperhatikan:

1. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 136/1947/III/B.1 tanggal 30 Oktober 2001 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara dan Nomor 188.34/6359/B.2 tanggal 8 November 2001 perihal Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Februari 2002.

3. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Februari 2002.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPRD Provinsi Bengkulu memutuskan untuk menyetujui pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tiga kabupaten, yaitu (a) Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibukota Manna; (b) Kabupaten Kaur dengan ibukota Bintuhan; dan (c) Kabupaten Seluma dengan ibukota Tais. Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menindaklanjuti proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara ke Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2002.

## **C. PROSES PEMEKARAN WILAYAH**

### **1. Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu**

Provinsi Bengkulu yang mempunyai luas wilayah 19.780,7 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 1.563.622 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.<sup>96</sup>

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas wilayah 9.585,24 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Mukomuko yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Mukomuko Selatan, dan Kecamatan Mukomuko Utara dengan luas wilayah keseluruhan 4.036,70 km<sup>2</sup>.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai luas wilayah 5.955,59 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Seluma yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras dengan luas wilayah 2.400,44 km<sup>2</sup>; dan Kabupaten Kaur yang terdiri atas tujuh kecamatan yaitu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal,

---

<sup>96</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, dan Kecamatan Tanjung Kemuning dengan luas wilayah keseluruhan 2.369,05 km<sup>2</sup>.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau jika tidak segera dilakukan pemekaran wilayah. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Persetujuan/Pengesahan Pemekaran Wilayah Eks Kawedanaan Mukomuko menjadi Kabupaten Mukomuko, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Terbentuknya Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko serta Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

## **2. Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kabupaten Bengkulu Selatan yang terbentuk dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Bengkulu Selatan, berdasarkan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan Nomor: Gb/30/1950 yang kemudian didefinisikan setelah Pemilihan Umum 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, memiliki wilayah seluas 5.949, 14 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 18 kecamatan dan 397 desa.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Iwan N. Aksa, "Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS)", *Makalah*, Tais, 2001, hlm. 13.

Secara geografis Kabupaten Bengkulu Selatan terletak antara 4°-5° Lintang Selatan dan 102°-103° Bujur Timur.<sup>98</sup> Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada bagian barat Pulau Sumatera bagian selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung; Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu bekas Kewedanaan Seluma, bekas Kewedanaan Manna, dan bekas Kewedanaan Kaur. Pada tahun 2000 berpenduduk 360.693 jiwa,<sup>99</sup> dengan mata-pencarian penduduk yang dominan pada sektor pertanian sebesar 72 persen.<sup>100</sup>

Luas wilayah sekitar 5.949, 14 Km<sup>2</sup>, sekitar 68,78 persen di antaranya merupakan lahan budidaya dan sebesar 31,22 persen merupakan lahan non-budidaya dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah 287.150 Ha, yang terdiri dari hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, kawasan lindung pantai, dan lindung setempat.<sup>101</sup>

Kondisi ekonomi dan pembangunan wilayah ini sangat riskan karena pengalokasian dana pembangunan serta peningkatan ekonomi kerakyatan terlalu rendah dibandingkan dengan luas wilayah yang ada. Hal ini menyebabkan rakyat di wilayah ini harus bekerja keras untuk membangun ekonominya secara swadaya. Kondisi ini menyebabkan terbukanya pemikiran para tokoh masyarakat untuk memikirkan solusi dalam strategi pembangunan ke depan.

Menyikapi hal tersebut, masyarakat bekas Kewedanaan Seluma sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan telah pula memikirkan pembangunan wilayahnya. Dengan merencanakan dan mengkaji kemungkinan berdasarkan koridor hukum serta aspirasi masyarakat, membuka wawasan terhadap kemungkinan pembentukan Daerah Otonom baru Kabupaten Seluma sebagai implementasi pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang salah satunya telah melahirkan Kabupaten Seluma, di samping

---

<sup>98</sup> Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 200, hlm. 6.

<sup>99</sup> Iwan Gayo (ed.), *Buku Pintar Seri Senior* (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002), hlm. 46;

<sup>100</sup> Iwan N. Aksa, *loc. cit.*

<sup>101</sup> Usulan Pemekaran ... *loc. cit.*

Kabupaten Kaur, adalah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan UU No. 22 Tahun 1999 ini adalah berdasarkan atas jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, yaitu:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah Provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah kabupaten atau Daerah kota.

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah banyak peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang mengatur mengenai Pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (*disempurnakan*) tentang Pemerintahan Daerah.
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (*disempurnakan*) tentang DPRD-Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>102</sup>

Terakhir adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang dibuat pada era reformasi. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah lebih mengutamakan asas desentralisasi.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dibagi ke dalam:

1. Daerah Provinsi sebagai daerah Otonom, juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Daerah Provinsi yang dahulu disebut Provinsi daerah Tingkat I sekarang disebut Provinsi.
2. Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang bersifat otonom, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku selama ini diganti dengan sebutan Kabupaten atau Kota.<sup>103</sup>

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat tiga prinsip yang dipakai, yaitu:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Kota.
3. Asas Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa (Penjelasan Undang-Undang Umum Pemda).

---

<sup>102</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 5.

<sup>103</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 14.

Ketiga prinsip di atas terlihat bahwa khusus untuk daerah kabupaten dan daerah Kota, prinsip yang selama ini dijalankan yaitu melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah tidak berlaku lagi, karena penyelenggaraan asas desentralisasi di Daerah kabupaten dan Daerah Kota dilaksanakan secara bulat dan utuh. Hal ini diharapkan akan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara instansi vertikal dengan dinas daerah yang berakibat tidak efisiennya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di samping terjadinya pemborosan.

Beberapa pokok pikiran dan prinsip yang dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, menghendaki agar Daerah kabupaten dan daerah Kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, memiliki otonomi yang utuh dan bulat, sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya semua kewenangan tersebut sudah ada pada Daerah Kabupaten dan daerah Kota, sehingga tidak perlu lagi penyerahan kewenangan secara aktif. Daerah dapat menentukan sendiri, beberapa fungsi pelayanan bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak ada lagi ketergantungan Daerah kabupaten dan daerah kota terhadap daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, sehingga kemadirian Daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat diwujudkan. Asas dekonsentrasi hanya ada pada Daerah Provinsi, sehingga daerah Provinsi di samping sebagai Daerah Otonomi, juga merupakan Wilayah Administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Daerah Provinsi, Daerah kabupaten, dan Daerah Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Dalam hal ini Daerah Provinsi tidak membawahi daerah Kabupaten atau daerah Kota, sehingga Gubernur bukanlah merupakan atasan dari Bupati atau Walikota. Akan tetapi, dalam praktiknya tetap ada hubungan koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten atau daerah Kota, dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Di samping itu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dapat melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten dan daerah kota.

Dalam pembentukan suatu Daerah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang menjadi bahan pertimbangannya adalah beberapa faktor, yaitu (1) kemampuan ekonomi; (2) potensi daerah; (3) sosial budaya; (4) sosial politik; dan (5)



jumlah penduduk dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.<sup>104</sup>

Pembentukan suatu daerah, sekaligus penentuan nama, batas, dan ibukota harus ditetapkan dengan suatu Undang-undang. Sedangkan perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota cukup ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Landasan hukum pemekaran wilayah adalah,

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan daerah otonom baru ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah otonom baru berupa penggabungan daerah atau pemekaran wilayah. Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (4) tersebut batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah untuk dapat dimekarkan adalah:
  - a. Provinsi selama sepuluh tahun; dan
  - b. Kabupaten/kota selama tujuh tahun.<sup>105</sup>
2. Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan daerah otonom harus memenuhi tiga syarat yang meliputi syarat administratif, fisik, dan teknis.

#### **a. Syarat Administratif**

Pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi syarat-syarat administratif sebagai berikut;

- 1) Syarat administratif pembentukan provinsi diatur dalam pasal 5 ayat (2)
  - a). Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota  
Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
  - b). Persetujuan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi.

---

<sup>104</sup> Rozali Abdullah, *Ibid.*, hlm. 17..

<sup>105</sup> Herlambang, "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (Sebuah Pengalaman Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah)", *Makalah*, disampaikan disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm. 2.

c). Persetujuan DPRD Provinsi Induk

Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

d). Persetujuan Gubernur

Persetujuan Gubernur dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan Gubernur berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan terhadap perlunya dibentuk provinsi baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tim yang dimaksud dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

e). Rekomendasi Menteri dalam Negeri

2) Syarat Administratif Pembentukan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004

a). Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota

b). Persetujuan Bupati/Walikota yang bersangkutan

c). Persetujuan DPRD Provinsi

d). Persetujuan Gubernur

e). Rekomendasi Menteri dalam Negeri.

**b. Syarat Teknis** diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Syarat teknis yang menjadi dasar pembentukan daerah mencakup:

1). Faktor Kemampuan Ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Ukuran kedua adalah Penerimaan daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Penerimaan daerah Sendiri terhadap pengeluaran rutin; serta Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap PDRB.

2). Potensi Daerah

Potensi daerah diukur dari lembaga keuangan, sarana dan prasarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana sekolah, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, serta ketenagakerjaan.

3). Sosial Budaya

Diukur dari tempat atau kegiatan institusi sosial serta sarana olahraga yang ada di daerah tersebut.

4). Sosial Politik

Diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik serta jumlah organisasi kemasyarakatan.

5). Kependudukan

Diukur dari jumlah penduduk.

6). Luas Daerah

Dilihat dari luas daerah dengan sub indikator rasio jumlah penduduk urban terhadap jumlah penduduk (khusus untuk pembentukan kota), luas wilayah secara keseluruhan, serta luas wilayah yang secara efektif yang dapat dimanfaatkan.

7). Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan keamanan dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban di masyarakat.

8). Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Yang dimaksud dengan faktor lain dalam hal ini adalah pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rentang kendali yang diukur dari jarak kecamatan ke pusat pemerintahan.

**c. Syarat Fisik** diatur dalam Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004. Syarat fisik meliputi:

- 1). Paling sedikit memiliki 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.
- 2). Paling sedikit memiliki 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten.
- 3). Paling sedikit memiliki 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota.
- 4). Telah menetapkan calon ibukota.
- 5). Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan.<sup>106</sup>

Berdasarkan persyaratan yang disebutkan di atas, Kabupaten Seluma yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

dianggap telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, berupa syarakat administratif, teknis, dan fisik. Kabupaten Seluma diresmikan bersamaan dengan dua kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kaur yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemekaran wilayah ini dilakukan untuk memacu kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya, serta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memandang perlu membentuk Kabupaten Seluma dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Seluma bersamaan dengan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Mukomuko.

Undang-undang pembentukan Kabupaten Seluma lahir didukung oleh peraturan-peraturan lainnya, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959).

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Adanya Undang-undang ini maka dibentuklah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas :

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Seluma;
- c. Kecamatan Talo;
- d. Kecamatan Semidang Alas; dan
- e. Kecamatan Semidang Alas Maras.

Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seluma dan wilayah Kabupaten Kaur. Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kemudian ditetapkan juga bahwa ibukota Kabupaten Seluma berkedudukan di Tais.

Sebagai sebuah kabupaten otonom baru, Kabupaten Seluma perlu memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Kabupaten Seluma dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Jumlah dan tatacara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

Seluma diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten seluma dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan perundang-undangan paling lambat setelah peresmian anggota DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2004.

Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati, Menteri Dalam negeri mengangkat Pejabat Bupati Seluma atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Bengkulu dengan masa jabatan satu tahun. Pejabat bupati ini dapat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Bengkulu untuk masa jabatan berikutnya. Peresmian Kabupaten Seluma serta pelantikan Pejabat Bupati dilakukan paling lambat dua bulan setelah Undang-undang Pembentukan kabupaten Seluma diundangkan. Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Pejabat Bupati Seluma.

Penjabat Bupati Seluma diusulkan oleh Gubernur Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati Bengkulu Selatan, dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu. Penjabat Bupati yang ditunjuk tersebut dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat diangkat kembali atau diganti penjabat lain.

Setelah Pejabat Bupati Seluma dilantik, Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Seluma dibentuk Sekretariat kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seluma, Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

2. Barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Seluma.
3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di kabupaten Seluma.
4. Utang-piutang Kabupaten Bengkulu Selatan yang kegunaannya untuk Kabupaten Seluma.
5. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten Seluma.

Pelaksanaan penyerahan nomor 1-5 di atas diselesaikan selama waktu satu tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan Pejabat Bupati Seluma. Jika penyerahan barang tidak dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melakukan upaya hukum. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seluma.

Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma. Dana tersebut bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Bengkulu Selatan yang diterima dari pemerintah Provinsi dan Pusat. Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Selatan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

Sebelum Kabupaten Seluma menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

### 3. Terbentuknya Kabupaten Seluma

Nama Seluma berasal dari kata “Seluman” atau “Menghilang”. Kata tersebut berdasarkan cerita rakyat Seluma yang diberikan oleh Maharaja Sakti yaitu suami Putri Gading Cempaka, Raja Ketiga dari Kerajaan Sungai Serut Bangkahulu. Disebut dengan Seluman atau Menghilang adalah disebabkan karena pada saat Maharaja Sakti menyaksikan naga yang membendung sungai di antara Bukit Campang dan Bukit Lesung, menemukan dua butir telur naga tersebut sedang menetas. Pada saat itu, anak naga yang baru menetas tersebut langsung “Menghilang” dan Maharaja Sakti mengatakan “Seluman”. Kemudian Maharaja Sakti berkata lagi: “Suatu saat anak naga ini akan datang”. Daerah ini akan menjadi “satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan”. Wilayahnya adalah terletak di antara timbulnya dua ekor anak naga ini. Setelah beberapa tahun kemudian, apa yang dikatakan oleh Maharaja Sakti memang benar. Dua ekor anak naga tersebut menampakkan diri. Satu di Bukit kabu dan satunya lagi di Air Terjun Hulu Alas.<sup>107</sup>

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan yang kemudian didefinisikan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa.<sup>108</sup> Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manna, dan Kewedanaan Kaur.<sup>109</sup>

Luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (*pan of cointrol*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>108</sup> “Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, hlm. 1.

<sup>109</sup> Iwan N. Aksa, *op. cit.*, hlm. 13.



Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur.

Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Seluma untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.

Dalam perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen J.H. Knoerle (1828-1833), Seluma sudah merupakan satu kabupaten (*landschappen*) yang wilayahnya meliputi Ngallam, Seluma, Tallo, dan Alas, terdiri dari 119 dusun dan berpenduduk 7.832 jiwa.<sup>110</sup> Pada tahun 1908, sesuai dengan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima *Afdeelingen* (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah *Afdeeling* Seluma yang dipimpin oleh seorang *controleur* dan berkedudukan di Tais.<sup>111</sup>

Setelah Indonesia merdeka, status *Afdeeling* Seluma kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Kaur menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Keresidenan Bengkulu pada awal kemerdekaan ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Pada tahun 1946 sampai 1968, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.<sup>112</sup>

Orde Reformasi yang lahir seiring tumbangnya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Seluma untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Seluma. Munculnya

---

<sup>110</sup> Pembagian wilayah Bengkulu menjadi sembilan kabupaten pada masa pemerinthan J.H. Knoerle ini adalah (1) Sungai Lemau; (2) Sungai Itam; (3) Selebar; (4) Mukomuko; (5) Seluma; (6) Manna; (7) Kaur; (8) Krue; dan (9) Musi Rejang. Lihat Abdullah Sidik, *op. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>111</sup> Lima *afdeeling* yang ada di Keresidenan Bengkulu pada tahun 1908 ini adalah (1) Benkoelen; (2) Lebong yang terdiri atas *onderafdeeling* Lebong, Lais, Rejang, dan Mukomuko; (3) Seluma; (4) Manna; dan (5) Krue. Lihat *Staatsblad* 1908 No. 646.

<sup>112</sup> Abdullah Sidik, *op. cit.*, hlm. 169.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah.

Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigit berusa untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri.

Keinginan untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri telah dirintis sejak lama, baik oleh anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka adat daerah bekas Kewedanaan Kaur dan Seluma. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 telah memberi angin segar dan harapan yang kuat untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menjadikan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma.<sup>113</sup>

Sebelum dimekarkan, daerah Seluma yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang sangat tertinggal dari daerah lainnya dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Ketertinggalan tersebut disebabkan karena perhatian Pemerintah Kabupaten yang lebih tertuju pada pembangunan wilayah Pusat Pemerintahan, padahal daerah Seluma merupakan wilayah penyangga yang berbatasan dengan Pusat Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Indikator ketertinggalan wilayah ini terlihat dari belum terbukanya isolasi desa-desa pedalaman seperti Hulu Sukaraja (Talang Rais dan Padang Capo), Hulu Tumbu'an (Cawang), Hulu Seluma (Lubuk Resam, Talang Empat, dan Sekalak), Hulu Talo, dan Hulu Semidang Alas. Dari 168 desa/kelurahan yang ada dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma, terdapat 95 desa yang terisolasi atau terpencil.<sup>114</sup>

Berdasarkan luas wilayahnya, daerah bekas Kewedanaan Seluma sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai Daerah Otonom

---

<sup>113</sup> "Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, hlm. 2.

<sup>114</sup> Bustan A. Dali, *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 - Agustus 2007* (Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007), hlm. 21.

Baru karena potensi sumberdaya alam dan manusia yang ada di dalamnya sangat signifikan. Potensi sumberdaya alam yang tersedia berupa sumberdaya mineral, yaitu galian strategis pertambangan, perkebunan, wisata alam, pertanian, perikanan, dan peternakan.<sup>115</sup>

Wilayah bekas Kewedanaan Seluma memiliki wilayah seluas 240.044 Km<sup>2</sup>, yang terletak pada bagian utara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kondisi alam yang hampir sama seperti wilayah lain di kabupaten Bengkulu Selatan. Daerah ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Sumatera Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.<sup>116</sup>

Topografi wilayah Seluma cukup bervariasi, terdiri dari dataran aluvial, aliran sungai, dataran rendah, rawa-rawa, dan sebagian perbukitan dengan ketinggian 100-1.500 meter dari permukaan laut. Secara klimatologi, daerah Seluma beriklim tropis dengan pengaruh angin yang berkecepatan rata-rata 10 Km/jam. Suhu udara maksimum 31-33°C dan minimum 22-23°C dengan kadar kelembaban rata-rata 80%. Kondisi areal lahan adalah; dataran seluas 32,42%, berbukit dengan 5-15° seluas 37%, berbukit dengan kemiringan 15-22,5° seluas 10%, dan berbukit terjal seluas 15%. Di samping itu juga terdapat rawa-rawa seluas 5,58%. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Seluma berbentuk halus sebanyak 46,46%, sedang 22,79%, dan kasar 3,79%. Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Seluma berupa aliran sungai ukuran menengah enam sungai dan sungai kecil yang berjumlah lebih dari 123 sungai.<sup>117</sup>

Penduduk asli Kabupaten Seluma adalah etnis Serawai yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda dengan etnis lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Kelompok etnis Serawai ini terdiri dari; Satuan Adat Marga Semidang Bukit Kabu, Satuan Adat Marga Andalas, Satuan Adat Marga Air Periukan, Satuan Adat Marga Ngalam, Satuan Adat Marga Semidang Bunga Emas, Satuan Adat Marga Anak Pangi, Satuan Adat Marga Kuto Padang, Satuan Adat Marga Hulu Talo, Satuan Adat Marga Hilir Talo, Satuan Adat Marga Semidang Alas, dan Satuan Adat Marga Semidang Alas Maras.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Iwan N. Aksa, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>117</sup> *Ibid.*

Semua satuan adat marga tersebut satu sama lainnya memiliki ikatan emosional karena berasal dari rumpun adat dan budaya yang tunggal, sehingga antara satu dan yang lainnya tetap dalam koridor kebersamaan yang menyebabkan aturan dan tradisi etnis Serawai tetap terjaga dengan baik.<sup>118</sup>

Kondisi politik di Seluma sejak Pemilihan Umum 1999 berjalan sangat baik yang ditandai dengan tidak terjadinya insiden yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Provokasi dari para elite politik, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, tidak mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat. Kerukunan antaretnis dan antaragama tetap terpelihara, sehingga keamanan yang diakibatkan peta perpolitikan tidak terpengaruh. Bahkan masyarakat Seluma menganggap bahwa partai politik hanya sekedar alat komunikasi untuk tujuan penataan demokrasi.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang tersebut memberikan peluang untuk membentuk atau memekarkan wilayah. Menyikapi hal tersebut sejumlah tokoh masyarakat bekas Kewedanaan Seluma melakukan pertemuan di Hotel Tiara Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk kabupaten otonom baru. Tanggal 15 Januari 2000 telah ditetapkan oleh tim formatur yang dibentuk untuk itu bahwa nama media perjuangan adalah Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) dengan ketentuan: Nama kabupaten adalah Seluma, ibukota kabupaten adalah Tais. Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma.<sup>119</sup>

Pada tanggal 23 April 2000, proposal yang disusun Bustan A. Dali selaku konseptor dan disetujui oleh Ketua Umum PPKS (Iwan N. Aksa) serta ketua bidang Ortalala (Bahrullah Abbas) telah disetujui oleh forum rapat PPKS untuk kemudian disampaikan kepada Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan. Tanggal 26 Agustus 2000, DPRD Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 35 tahun 2000 tentang persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya keluar pula keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 101 tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

<sup>119</sup> Bustan A. Dali, "Sejarah Daerah Tana Serawai Empat Semidang Kabupaten Seluma, *Synopsis*, Tais, 27 Mei 2008, hlm. 5.

<sup>120</sup> *Ibid*.

Tujuan pemekaran daerah adalah selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui (1) Optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia; (2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya; (3) Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis; (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; (5) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan (6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.<sup>121</sup>

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Seluma ini di antaranya adalah, (1) Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Mempersingkat rentang kendali (*span of control*) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien; (3) Sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja; (4) menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta sistem kehidupan masyarakat yang kondusif; (5) menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan (6) mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.<sup>122</sup>

Perjuangan untuk mencapai cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat Daerah Seluma tidak sia-sia. Dimulai dari diterbitkannya Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Rencana Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan hingga disusunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan kabupaten Kaur.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

Perjuangan yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dan tak kenal lelah kendatipun menemui berbagai hambatan yang dilalui telah membuahkan hasil yang optimal. Salah satu hambatan yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita ini adalah peristiwa Gempa Bumi yang sangat dahsyat pada tanggal 11 Juni 2000. Meskipun demikian, musibah yang dialami ini tidak menggoyahkan semangat perjuangan para perintis berdirinya Kabupaten Seluma tersebut. Tokoh-tokoh penggagas dan perintis dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Seluma lengkapnya adalah,

Keseluruhan para penggagas dan perintis yang tercantum pada Tabel 3 di atas merupakan pengurus PPKS dan ditambah dengan personalia pengurus lainnya yang direkrut kemudian. Langkah-langkah perjuangan PPKS pada prinsipnya dilaksanakan dengan tujuan *Spin of Control* dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya menyejahterakan masyarakat daerah Seluma yang tertinggal selama lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka. Margin kontribusi yang hendak dicapai sangat jelas, yaitu untuk kepentingan rakyat Daerah Seluma agar dapat sejajar dengan kemajuan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan titik koordinat, Kabupaten Seluma terletak pada 3° - 5° Lintang Selatan dan 102° - 103° Bujur Timur. Berbatas sebelah utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kepahiang, sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Topografinya meliputi 42,32 persen terletak pada ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut, 28,10 persen pada 100 – 500 m di atas permukaan laut, 18,70 persen pada ketinggian 500 -1.000 m di atas permukaan laut, dan 10,88 persen di atas 1.000 m di atas permukaan laut.<sup>123</sup>

Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang termasuk ke dalam kategori Daerah Tertinggal. Indikator ketertinggalan wilayah ini terlihat dengan belum terbukanya isolasi desa-desa pedalaman seperti Hulu Sukaraja (Talang Tais dan Padang Capo), Hulu Tumbu'an (Cawang), Hulu Seluma (Lubuk Resam, Talang Empat, dan Sekalak), Hulu Talo dan Hulu Semidang Alas. Dari 168 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Seluma, 95 desa di antaranya masih terisolir.<sup>124</sup>

Penduduk Kabupaten Seluma mayoritas adalah etnis Serawai yang merupakan penduduk asli yang menurut cerita rakyat penduduk setempat berasal dari Palangkenidai Pagaralam Sumatera Selatan.

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>124</sup> Bustan A. Dali, (2008), *op. cit.*, hlm. 21

Penduduk lainnya berasal dari etnis Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, Bali, dan Batak. Pada tahun 2007 penduduk Kabupaten Seluma berjumlah 190.696 jiwa yang menyebar di seluruh wilayah. Sedangkan luas Kabupaten Seluma adalah 2.400.044 km<sup>2</sup> dengan pemanfaatan ruang 30 persen berupa hutan lindung.

Aspek hukum yang dijadikan dasar pemekaran wilayah bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi Kabupaten Seluma antara lain ialah, (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18; (2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2/2/22 tanggal 22 November 1969, Perihal Pemekaran Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Desentralisasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Umum; (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (5) PP. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; (6) PP. Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (7) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan; (8) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu; (9) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan (10) Surat Pernyataan Dukungan dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru pada tanggal 23 Mei 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Kaur yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian Kabupaten Bengkulu Selatan ini ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati (Bupati Caretaker) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Drs. M. Husni Thamrin. Tugas utama Bupati Caretaker ini adalah menyusun perangkat dan lembaga Pemerintahan daerah Kabupaten Seluma.<sup>125</sup>

Masa Pemerintahan Caretaker merupakan masa yang sangat berat bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Seluma karena kondisi yang bersifat sementara menyebabkan berbagai permasalahan yang juga harus dipikirkan. Kantor bupati pada masa ini menggunakan

---

<sup>125</sup> Bustan A. Dali, (2007), *op. cit.*, hlm. 17.

Kantor Camat Seluma, sementara Kantor Camat dipindahkan ke Kantor Lurah. Demikian pula kantor-kantor Dinas yang lain yang juga terpaksa harus menumpang pada kantor-kantor yang ada dan rumah-rumah penduduk. Di samping itu juga belum tersedianya perumahan bagi pegawai karena para pegawai pada umumnya berdomisili di luar wilayah. Hal ini terjadi karena rekrutmen pegawai mayoritas adalah pegawai pindahan dari berbagai daerah seperti Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk), Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong.

Pada tahun 2003 – 2004 (tahun pertama Caretaker), otomatis Pemerintah Daerah belum dapat membangun infra struktur sarana dan prasarana fisik, karena pelaksanaan tugas hanya bertumpu pada pemantapan struktur pemerintahan, sehingga kesibukan yang terjadi hanya terbatas pada penataan lembaga-lembaga. Pada tahun 2004 – 2005 (tahun kedua Caretaker) Pemerintah daerah Kabupaten Seluma mengemban tugas berat yaitu menyukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif yang prosesnya dimulai dari bulan November 2003 sampai selesai dan terbentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu pada tahun 2004 dilaksanakan pula pelantikan camat Kecamatan Pemekaran sebanyak sembilan kecamatan.

Pembentukan Kecamatan Pemekaran tersebut menjadikan wilayah Kabupaten seluma yang semula hanya terdiri dari lima kecamatan menjadi 14 kecamatan. Desa yang semula hanya 154 dimekarkan pula menjadi 165 desa dan tiga kelurahan. Pengembangan lembaga tersebut telah menjadikan Kabupaten Seluma semakin hari mulai menampakkan diri sebagai Daerah Otonom Baru.<sup>126</sup>

Pada tanggal 31 Agustus 2004 dilantik anggota DPRD sebanyak 25 personil dan selanjutnya dipilih Pimpinan DPRD tersebut. Pada tanggal 3 Agustus 2005 dilantik pula Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berdasarkan SK. MENDAGRI No. 131.28-520. Kepala Daerah Seluma yang baru dilantik tersebut adalah H. Murman Efendi sebagai Bupati dan Drs. H. Bustami.TH sebagai Wakil Bupati.

Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Seluma hasil Pemilu 2004 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu atas nama Presiden Nomor: 309 Tahun 2004. Dengan pelantikan ini, kondisi pemerintahan daerah kabupaten Seluma sudah masuk kategori “semi definitif”. Lembaga legislatif ini sudah mulai menata formasi sekretariatnya kendatipun unsur pimpinannya masih bersifat sementara. Yang menjabat sebagai Ketua DPRD yang bersifat sementara ini adalah

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 26



Alimin Bahrin, SE dan Wakil Ketua adalah Drs. Zaryana Ra'it. Tugas pokok pimpinan sementara adalah menyelenggarakan pemilihan pimpinan DPRD definitif.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2004, dilaksanakan pemilihan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma. Calon dari Fraksi Kerakyatan adalah Rosnaini Abidin, dari Fraksi Golkar, Alimin Bahrin, SE, dan Edison Simbolon. Tanggal 11 November 2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 394 Tahun 2004, dilaksanakan pelantikan Pimpinan DPRD Definitif. Terpilih sebagai Ketua adalah Rosnaini Abidin dengan 14 suara, sedangkan Alimin Bahrin hanya memperoleh 10 suara, dan Edison Simbolon hanya 1 suara.<sup>127</sup> Setelah pelantikan kemudian dilaksanakan Rapat Paripurna pelantikan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma Definitif dengan mengundang para pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Tugas pimpinan DPRD selanjutnya adalah membentuk komisi-komisi dengan komposisi dan personalia yang pertama sebagai berikut,

- KOMISI A : Ketua : Drs. Zaryana Ra'it  
Wakil Ketua : Rusdi Khairudin  
Sekretaris : Sugeng Zonrio, SH
- KOMISI B : Ketua : Toton, SH  
Wakil Ketua : Darmawan Jaya  
Sekretaris : Yunita Suryanie
- KOMISI C : Ketua : M. Dahlan B.  
Wakil Ketua : Tenno Heika  
Sekretaris : Jonaidi Syahri
- KOMISI D : Ketua : H. Asran Syafrin  
Wakil Ketua : Ir. Mukhlis T.  
Sekretaris : Yaziklan

Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Seluma yang pertama berdasarkan hasil Pemilu 2004 lengkapnya adalah sebagai berikut;

Sekretariat DPRD sementara menggunakan bekas mess Pemda yang telah direnovasi untuk kepentingan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sekretariat DPRD sementara ini terletak di Jalan Merdeka Pasar Tais. Dengan adanya Sekretariat sementara ini, efektivitas tugas-tugas DPRD telah mulai berjalan kendatipun belum stabil, namun pelayanan kepada masyarakat telah dapat dilaksanakan. Dalam kondisi

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

yang serba “kurang”, pelaksanaan tugas DPRD harus berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Tokoh yang terpilih sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma adalah Drs. Faizal Tamam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor SK 821.1.208 Tahun 2004 pada tanggal 17 Mei 2004 sebagai pimpinan sekretariat yang membawahi bagian-bagian dan seksi-seksi yang dibutuhkan oleh lembaga legislatif tersebut.

Kendatipun masih menempati kantor yang bersifat sementara, kelengkapan komposisi dan personalia serta alat kelengkapan DPRD lainnya membuat tugas-tugas pelayanan masyarakat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Aktivitas DPRD Kabupaten Seluma telah membuat masyarakat yakin bahwa Kabupaten Seluma akan lebih maju. Sebagai lembaga legislasi, DPRD Kabupaten Seluma berasal dari berbagai elemen komunitas dan berasal dari lingkungan masyarakat, diperlukan loyalitasnya dalam pelayanan masyarakat. Dengan menyandang status “Wakil Rakyat” semestinyalah DPRD Kabupaten Seluma memberikan pelayanan optimal dalam menyikapi kondisi dan situasi di tengah kehidupan dan penghidupan masyarakat itu sendiri.

Setelah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005, terpilihlah H. Murman Effendi, SE sebagai Bupati Seluma dan Drs H. Bustami TH sebagai Wakil Bupati Seluma. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-520 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pngangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Juli 2005. Pelaksanaan pelantikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2005 bertempat di Gedung Serba Guna Pemda kabupaten Seluma dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seluma tersebut merupakan harapan dan amanat rakyat yang harus dilaksanakan. Amanat tersebut dibuktikan dengan pemilihan langsung oleh rakyat melalui Pilkada secara langsung, sehingga amanat tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan Pemerintahan Kabupaten Seluma, sebagai wilayah otonom baru, maka mengemban amanat rakyat tersebut merupakan tugas mulia mengingat kondisi daerah yang masih serba darurat. Sebagai Kepala Pemerintahan Definitif pertama, maka Bupati dan Wakil Bupati harus bekerja keras untuk menyukseskan pembangunan tahap demi tahap.

Bupati Seluma, H. Murman Effendi, SE, dalam mengawali tugasnya meluncurkan suatu program percepatan pembangunan yang

dikenal dengan nama “Program 100 Hari”.<sup>128</sup> Program ini merupakan suatu program spektakuler yang memiliki tantangan yang sangat berat dan sekaligus menguji kemampuan H. Murman Effendi, SE selaku Bupati dan Drs. H. Bustami TH. Selaku Wakil Bupati dalam memimpin masyarakat di daerah Tana Aerawai Empat Semidang tersebut.

Program 100 hari yang diluncurkan oleh Pemerintah kabupaten Seluma tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 560 Tahun 2005 yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dalam mengejar keteringgalan yang diakibatkan oleh aktivitas Pemerintah Kabupaten Seluma dalam masa penyusunan komposisi dan personalia kelembagaan serta pendefinitifan wilayah sehingga sektor pembangunan infrastruktur belum dapat dilaksanakan.

#### **4. Potensi dan Sumberdaya Alam Seluma**

Provinsi Bengkulu di awal tahun 2003 memiliki tiga kabupaten baru. Salah satunya adalah Kabupaten Seluma yang berpisah dari Kabupaten Bengkulu Selatan, induknya. Wilayah Bengkulu Selatan yang luas dan persebaran penduduk kurang merata adalah salah satu alasan pemekaran. Percepatan dan pemerataan pembangunan menjadi tujuan kebijakan yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2003 tersebut.

Sejak masih "dalam asuhan" kabupaten induk, Seluma adalah wilayah yang berpotensi di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kabupaten yang wilayahnya lebih luas daripada kabupaten induk ataupun kembarannya itu juga memiliki areal sawah paling luas. Total 42.000 hektar dengan 30 persen bisa ditanami padi dua kali atau lebih setahun dan lahan yang tidak diusahakan 13 persen. Sisanya ditanami padi sekali setahun. Selain padi, Seluma dikenal sebagai sentra palawija, khususnya jagung. Areal penanaman terluas di Kecamatan Sukaraja.

Kopi, kelapa sawit, dan karet merupakan produk perkebunan unggulan wilayah bekas Keresidenan Seluma ini. Produksi tiga komoditas tanaman perkebunan tersebut paling tinggi daripada dua wilayah lain yang dulu menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Potensi ini cukup menjanjikan dilihat dari tingkat produksi setiap tahun.

Total luas perkebunan kopi rakyat di Seluma 27.000 hektar. Kecamatan yang paling banyak memiliki areal kopi adalah Talo, 58 persen dari total luas lahan kopi di Seluma. Disusul Kecamatan Seluma dan Sukaraja, masing-masing 5.396 hektar dan 4.842 hektar. Potensi

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

kopi yang cukup tinggi itu menjadikan Kabupaten Seluma sebagai salah satu sentra tanaman kopi di Provinsi Bengkulu.

Selain kopi, lahan di kabupaten dengan lima kecamatan ini juga banyak ditanami tanaman keras lain, seperti karet. Dengan luas sekitar 21.000 hektar yang mayoritas lahannya di Kecamatan Sukaraja, Seluma, dan Talo, karet menjadi potensi yang menjanjikan. Pasar distribusi karet mentah Seluma adalah Lampung dan Medan. Semua hasil bumi non-olahan di Seluma disalurkan ke daerah konsumen melalui Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu. Kabupaten ini sedang mengusahakan pelabuhan yang mampu disinggahi tongkang sehingga kelak tak perlu lagi lewat pelabuhan di Kota Bengkulu.

Setelah kopi dan karet, Seluma sejak dulu potensial pada tanaman kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dimiliki rakyat, negara, maupun swasta. Perusahaan yang mengolah kelapa sawit menjadi minyak di Seluma ada dua, dan salah satunya milik negara. Tanaman kelapa sawit banyak diusahakan di Kecamatan Seluma, Sukaraja, dan Kalo. Perkebunan karet dan kelapa sawit di Seluma diharapkan terus bertahan dan menjadi andalan selain kopi, yang meskipun berpotensi tinggi, namun harganya fluktuatif, membuat banyak petani kopi beralih ke tanaman perkebunan lain.

Pada tahun 2003, populasi petani di Kabupaten Seluma mencapai 72 persen dari total penduduk, sedangkan pada tahun 2006 menurun menjadi 69 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena beberapa elemen dalam komunitas etnik beralih profesi ke bidang lainnya setelah daerah ini menjadi kabupaten definitif yang berdampak pada terbukanya peluang kerja yang lebih beragam di luar sektor pertanian.

Penggunaan lahan di Kabupaten Seluma yang memiliki luas 2.400,044 Km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Kabupaten Seluma merupakan wilayah hutan dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang terdapat di kabupaten Seluma terdiri dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan perkebunan rakyat terdiri dari perkebunan kopi, kelapa sawit, karet, kelapa, kulit manis, kakao, cengkeh, kemiri, lada, pinang, nilam, jarak, dan holtikura. Pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian padi sawah, padi darat, kacang-kacangan, jagung, ubi-ubian, sayur-sayuran, dan tanaman pangan lainnya.

Di samping perkebunan dan peratanian tanaman pangan, Kabupaten Seluma juga menyimpan potensi lain. Tanah Seluma selain subur ditanami komoditas perkebunan, juga mengandung bahan tambang, seperti batubara, batu kapur, dan pasir besi. Khusus batu bara, jenis bahan tambang ini diusahakan sebelum Seluma menjadi daerah

otonom. Hasilnya berupa bahan mentah telah didistribusikan hingga Lampung dan Medan. Lokasi penambangan batu bara di Kecamatan Seluma didukung oleh tiga perusahaan penambangan di kecamatan yang sama.

Bahan batubara yang terdapat di Kabupaten Seluma di antaranya adalah (1) Batubara kelas gambut (*peat*) yang berlokasi 1 Km dari Air Pering dalam radius  $102^{\circ}5'$  BT dan  $3^{\circ}24'$  LS dengan kandungan air 80-90%; (2) Batubara kelas muda (*lignit, brown coal*) yang berlokasi di Sekalak, Talang Empat, Kayulilin (Kecamatan Seluma Utara) dalam radius  $103^{\circ}5'$  BT dan  $3^{\circ}24'$  LS dengan kandungan air 10-20%; Batubara kelas Bitumen (*Bituminous Coal*) yang berlokasi di Bukit kabu, Cawang, Sekalak, Talang Empat, Airkeruh SP II, Airpering dalam radius  $102^{\circ} - 103^{\circ}$  BT dan  $3^{\circ} - 4^{\circ}$  LS.

Dalam pengusahaan komoditas batubara, bukannya tak ditemukan kendala. Yang paling terasa adalah jalur pengangkutan ke pelabuhan yang membutuhkan banyak tahapan, tidak terintegrasi di satu tempat alias membutuhkan beberapa kali transit. Batu bara yang telah dieksploitasi dari tambang dibawa ke lokasi penumpukan sebelum ke proses pencucian. Setelah terkumpul, emas hitam itu diangkut ke pos pencucian. Pascapencucian, barulah batubara bersih siap dibawa ke pelabuhan untuk didistribusikan. Beberapa tahapan hingga batu bara siap didistribusikan ini tak menjadi masalah jika dilokasikan di satu tempat. Padahal transportasi yang harus ditempuh dari tambang di perbukitan hingga ke pelabuhan merupakan jalur yang cukup sulit karena kondisi alam yang berbukit-bukit dan penuh tikungan tajam, sementara jarak yang harus ditempuh lebih kurang 45 kilometer.

Hal itu belum ditambah kondisi jalan yang kebanyakan belum diaspal. Kondisi infrastruktur yang serba terbatas bisa menjadi faktor yang menyebabkan daerah ini sulit menjaring modal pengusaha. Padahal Seluma sedang berupaya menggaet investor sebanyak-banyaknya karena selain batubara, masih ada kandungan bahan tambang lain, seperti pasir besi dan batu kapur. Bahkan ada wacana dari sebuah perusahaan nasional untuk membuka pabrik semen karena salah satu wilayah Seluma kaya akan kandungan batu kapur.

Jika kondisi jalan yang kurang mulus bisa menjadi salah satu momok dalam mengundang pengusaha, jaringan listrik adalah masalah terbesar yang dihadapi penduduk Kabupaten Seluma secara keseluruhan. Bisa dikatakan, tiap malam di Seluma adalah hari tanpa cahaya. Hampir setiap kali matahari terbenam, terbenam pula listrik di kabupaten ini. Jam padam listrik tak tentu, tetapi bisa dipastikan hampir tiap malam. Setahun belakangan, keadaan itu diperparah tidak berfungsinya mesin generator diesel pembangkit listrik yang disediakan

PLN. Mesin itu diganti dengan alat pembangkit listrik tenaga air yang tak akan berfungsi saat musim kemarau tiba. Dampaknya adalah hal yang biasa setiap hari di Seluma jika di tengah malam listrik padam. Tahun 2002, total rumahtangga di Seluma lebih dari 36.000, dengan pelanggan listrik hampir 15.000.

Bahan galian strategis lainnya yang terdapat di Kabupaten Seluma adalah (1) Emas yang terdapat di Bukit Sanggul (Padang Capo). Air Rikai (Cawang), Bukit Kabu (Sekalak), Suban Air Panas (Marung / Lubuk Resam) dalam radius  $102^{\circ} - 103^{\circ}$  BT dan  $3^{\circ} - 4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum dipastikan karena penelitian terbatas sehingga masih membutuhkan eksplorasi formal; (2) Besi yang terdapat di antara Pasar Ngalam, Padang Genting, Penago, sampai Pasar Talo dalam radius  $102^{\circ}29' - 102^{\circ}34'$  BT dan  $4^{\circ}6' - 4^{\circ}14'$  LS dengan deposit 50.000.000 metrik ton;<sup>129</sup> (3) Minyak Bumi yang terdapat di Padang capo, Jambak Akar, dan Lepas Pantai Maras dalam radius  $102^{\circ} - 104^{\circ}$  BT dan  $3^{\circ} - 4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum terukur sehingga harus dilakukan eksplorasi; (4) Kapur Gamping yang terdapat di Hulu Seluma dan Hulu Talo dalam radius  $102^{\circ} - 104^{\circ}$  BT dan  $3^{\circ} - 4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum dipastikan sehingga harus dilakukan eksplorasi lanjutan; (5) Koalin yang terdapat di Hulu Seluma (Marung/Bukit Lumut) dalam radius  $103^{\circ}$  BT dan  $4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum dapat dipastikan karena penelitian terbatas; (6) Bentonite yang terdapat di Hulu Seluma, Hulu Talo, dan Hulu Semidang Alas dalam radius  $103^{\circ} - 104^{\circ}24'$  BT dan  $3^{\circ} - 4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum dipastikan; (7) Timbal yang terdapat di Air Simpul (Hulu Talo) dalam radius  $102^{\circ}6'$  BT dan  $4^{\circ}11'$  LS dengan deposit yang belum terukur; (8) Bahan Galian Panas Bumi yang terdapat di Lubuk Resam (Hulu Seluma) dalam radius  $103^{\circ}$  BT dan  $4^{\circ}$  LS dengan deposit yang belum terukur; (9) Bahan Galian lainnya berupa Galian C yang terdiri dari batu kali, batu gunung, pasir, koral, dan batuan lainnya, dan bahan galian non konvensional yang terdiri dari batu akik, batu suseki, dan lain-lain.<sup>130</sup>

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, Kabupaten Seluma memiliki garis pantai sepanjang 116,4 Km yang memanjang dari utara ke selatan. Formasi geologi kawasan pantai Kabupaten Seluma terdiri dari endapan kuartar dan tersier dengan dasar laut bergelombang dan dengan cekungan karang memanjang dari laut Ngalam sampai laut Pasar Talo. Singkapan endapan kuartar yang membentuk morfologi teras aluvial terdiri dari 1) kerikil pada pantai sekitar Kecamatan Semidang Alas Maras; 2) Pasir dan lanau pada

---

<sup>129</sup> Perkiraan sementara, sumber BKPM Provinsi Bengkulu.

<sup>130</sup> Bustan A. Dali, (2007), *op. cit.*, hlm. 105-108.

sekitar pantai Kecamatan Seluma dan Talo; (3) Lempung dan lumpur pada muara Sungai Ngalam.

Dalam wilayah laut Seluma yang memiliki panjang pantai 116,4 Km dan lebar ke tengah 9 mil laut, terdapat biota laut dengan kelompok ikan pinggiran yang terdiri dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, dan udang karang. Berdasarkan pengamatan dari hasil tangkapan para nelayan di Kabupaten Seluma, ternyata kelompok ikan pelagis kecil dan kelompok ikan demersal mendominasi hasil tangkapan. Kelompok ikan tersebut adalah tongkol, kerong, layang, kakap, gebur, kerapu, pari, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula lima jenis udang yang hidup dalam karang, yaitu lobster kulit keras, lobster kulit retas, karang lentik putih (dogol), windu, dan barong.

Dalam bidang peternakan, potensinya di Kabupaten Seluma masih harus dikembangkan dengan pola intensifikasi peternakan, karena sampai akhir 2006, peternakan di Kabupaten Seluma masih dalam ruang kepemilikan pribadi berpopulasi 1 – 15 ekor dan peternakan kelompok yang berpopulasi antara 5 – 50 ekor. Hewan ternak yang berpotensi untuk dikembangkan di kabupaten Seluma di antaranya adalah (1) sapi potong jenis bali/madura dan sapi perah; (2) kambing ottawa dan kambing kacang; (3) ayam bukan ras; (4) itik alabio dan bebek peking; (5) kerbau lokal; (6) kasuari; (7) jenis ternak lainnya yang dapat beradaptasi dengan iklim setempat.

Dalam bidang perikanan air tawar, di Kabupaten Seluma potensinya sangat didukung oleh kondisi alam yang memiliki banyak irigasi dan sungai-sungai kecil. Daerah penghasil ikan darat yang terutama adalah Rimbo Kedui, Pasar talo, Sukasari, dan beberapa daerah lainnya. Jenis Ikan air tawar yang banyak dikembangkan di Kabupaten Seluma di antaranya adalah ikan mas, ikan lele, gabus, dan sepat siam, ikan nila, mujahir, dan gurame, ikan sema, dan beberapa jenis ikan sungai.

Potensi sumberdaya alam lainnya yang terdapat di Kabupaten Seluma adalah potensi pariwisata yang merupakan kebutuhan rohani yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia untuk menghilangkan kejenuhan bekerja, kepenatan, dan keluar dari lingkungan rutinitas keseharian. Kekayaan obyek wisata yang terdapat di kabupaten Seluma sangat signifikan terutama wisata alam dan wisata budaya. Obyek pariwisata yang terdapat di kabupaten Seluma antara lain adalah,<sup>131</sup>

1. Kawasan Wisata Bendung Seluma, terletak di segitiga Desa Bungamas, Lubuk Kebur, dan Lubuk Lintang Kecamatan

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Seluma Kota, di mana terdapat danau yang apabila dikembangkan dan dibangun fasilitas kelengkapannya seperti hotel, restoran, dan komponen penunjang lainnya, diperkirakan akan dapat menjadi tujuan wisata domestik dan mancanegara.

2. Pusat Wisata Alam terpadu yang berlokasi di desa Lubukresam Kecamatan Seluma Utara. Potensi yang dimiliki lokasi ini dapat dikembangkan menjadi desa wisata bernuansa budaya dan bernuansa alami. Pada lokasi wisata ini terdapat lokasi arung jeram, suban air panas, air terjun, tebing batu, dan gua alam.
3. Pusat wisata pantai di Pantai Seluma yang apabila dikembangkan dapat dibangun fasilitas-fasilitas wisata pantai seperti halnya daerah lain.
4. Jaeringan *tour* wisata, yaitu jaringan perjalanan wisata dalam wilayah Kabupaten Seluma seperti wisata pantai pada pantai Kungkai, Pantai Pasar talo, Pantai Ketapang Baru, dan Pantai Maras. Sedangkan jaringan *tour* wisata alam pegunungan adalah Air Terjun Batu Bekinyau, Air Terjun Melancar, dan lain-lain.

Meski cukup banyak potensi yang ditawarkan Kabupaten Seluma, adanya beberapa kendala menjadikan pemerintahan yang baru berjalan lima tahun ini punya pekerjaan rumah cukup banyak. Yang utama adalah pembangunan infrastruktur yang belum tersedia dan pemeliharaan yang sudah ada. Untuk program pembangunan daerah mendatang, Pemerintah Kabupaten Seluma berniat menggalakkan sektor industri dan pariwisata. Khusus industri adalah industri pengolahan karena wilayah ini punya banyak komoditas potensial. Sementara pariwisata hendak digenjot karena Kabupaten Seluma memiliki cukup banyak lokasi menarik, seperti pantai dan air terjun, yang selama ini belum digarap menjadi obyek pariwisata.

Sebagai sebuah daerah otonom baru, Kabupaten Seluma memiliki empat Wilayah Pembangunan, yaitu :<sup>132</sup>

1. Wilayah Pembangunan Seluma A

WP Seluma A dengan pusatnya Cahaya Negeri Sukaraja dengan areal seluas 58.925 ha yang mencakup wilayah-wilayah yang terletak di bagian utara Kabupaten Seluma dan berdekatan dengan Kota Bengkulu. Kegiatan perekonomian

---

<sup>132</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seluma, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma (RTRW)*, 2008.



yang menonjol pada WP Seluma A ini berturut-turut adalah : perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), pertanian lahan basah, dan pertanian lahan kering. Kegiatan perekonomian yang potensial untuk berkembang adalah : perdagangan dan jasa pertambangan, peternakan, pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kecil lainnya.

2. Wilayah Pembangunan Seluma B

WP Seluma B seluas 62.894 ha dengan pusatnya Tais yang merupakan perkotaan dengan fungsi utama sebagai ibukota kabupaten. WP Seluma B ini mencakup wilayah kecamatan Seluma, Seluma Barat, Seluma Timur, Seluma Selatan dan Seluma Utara. Kegiatan perekonomian yang menonjol pada WP Seluma B ini berturut-turut adalah : perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), pertanian lahan basah, dan pertanian lahan kering. Kegiatan perekonomian yang potensial untuk berkembang adalah: perdagangan dan jasa pertambangan, peternakan, perikanan (terutama perikanan laut), pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kecil lainnya.

3. Wilayah Pembangunan Seluma C

WP Seluma C yang luas arealnya 52.475 ha dengan pusatnya Masmambang mencakup wilayah kecamatan Talo, Ulu Talo, Ilir Talo, dan Talo Kecil. Kegiatan perekonomian yang menonjol pada WP Seluma C ini berturut-turut adalah: perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), pertanian lahan kering, dan pertanian lahan basah. Kegiatan perekonomian yang potensial untuk berkembang adalah : perdagangan dan jasa pertambangan, peternakan, perikanan (terutama perikanan laut), pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kecil lainnya.

4. Wilayah Pembangunan Seluma D

Arealnya WP Seluma D adalah seluas 65.850 ha yang berpusat di Kembang Mumpo mencakup wilayah kecamatan Semidang Alas Maras dan Semidang Alas. Wilayah ini merupakan bagian wilayah yang paling selatan Kabupaten Seluma berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan perekonomian yang menonjol pada WP Seluma B ini berturut-turut adalah : perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), pertanian lahan basah, dan pertanian lahan kering. Kegiatan perekonomian yang potensial untuk

berkembang adalah : perdagangan dan jasa pertambangan, peternakan, perikanan (terutama perikanan laut), pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kecil lainnya.

## **5. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seluma Pasca Pemekaran**

Pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma pasca pemekaran di antaranya adalah pembangunan kompleks kantor bupati, pembangunan gedung DPRD, pembangunan jalan pusat pemerintahan, Rehabilitasi Jalan Pasar Tais – Pasar seluma sepanjang 12 km, pembangunan jalan baru dalam kota kabupaten sepanjang 15 km, pembangunan jalan pembuka desa-desa terisolir dan jalan penghubung antardesa sebanyak 43 desa, pembangunan rumah dinas bupati, pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD sebanyak tiga unit, wakil bupati satu unit, Sekda satu unit, Asisten tiga unit, Kapolres satu unit, Kep. Bawasda satu unit, dan Kep. Bappeda satu unit.

Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas kinerja pemerintah dan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting. Fasilitas-fasilitas instalasi, jaringan lajan dan gedung-gedung pemerintah merupakan fasilitas vital yang perlu dibangun untuk percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur tersebut pada prinsipnya dapat dilaksanakan dengan cepat karena hambatan-hambatan yang bersifat internal tidak begitu berarti. Hambatan utama terutama adalah masalah pendanaan yang masih sangat terbatas.

Pembangunan sarana dan prasarana jalan merupakan jalur akses sebagai penghubung antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Pembangunan jalan yang dilakukan di Kabupaten Seluma terdiri dari (1) Jalan dua jalur dalam kota; (2) Jalan arteri dalam kota; (3) Jalan lingkungan dalam kota; (4) Jalan lingkaran sebagai pengalihan kepadatan dalam kota; (5) Jalan menuju desa terpencil; dan (6) Jalan penghubung luar kota.

Pembangunan jalan dua jalur yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah melanjutkan pembangunan jalan akses antara Komplek Perkantoran Bupati Seluma menuju Komplek Perumahan Dinas. Badan jalan tersebut dibangun tahun 2004-2005, dan pada tahun 2006 ditingkatkan dengan pengerasan menggunakan koral. Tahun 2007 dilaksanakan pengaspalan dengan menggunakan aspal *hotmix*. Pada tahun 2007 juga dibangun jalan dua jalur dari Pematang Aur (Komplek Kantor Bupati) menuju Kota Agung melewati Pusat Kota Tais. Desa

Lubukkebur Kcamatan Seluma Kota, Desa Bungamas, Sembayat, dan Selebar Kecamatan Seluma Timur.

Pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan-jalan baru yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dilaksanakan secara merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten Seluma. Pertimbangan yang diambil adalah skala prioritas bagi kebutuhan mendesak dengan memperhitungkan kepentingan kelancaran pembangunan. Pemeliharaan jalan Pajar Bulan – Talang Durian, misalnya, dilaksanakan karena desa pedalaman tersebut merupakan sentra penghasil kopi yang membutuhkan akses ke luar untuk memasarkan produksi kopinya.

Kebutuhan terhadap pembangunan jalan-jalan baru terutama jalan akses menuju desa-desa terpencil merupakan kebutuhan timbal balik antara kepentingan Pemerintah Kabupaten di satu sisi dan kepentingan rakyat di sisi lainnya. Kepentingan Pemerintah Kabupaten adalah apabila roda ekonomi semakin lancar, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Sedangkan kepentingan rakyat adalah terbukanya isolasi dan peningkatan kelancaran transportasi keluar dalam upaya memperlancar pemasaran hasil produk.

Kelancaran akses antarwilayah pedesaan dalam daerah Kabupaten Seluma akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan dapat pula meningkatkan Peningkatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai “*cash back*” yang berguna untuk dana pembangunan daerah itu sendiri. Semakin cepat terbukanya isolasi suatu daerah, akan semakin cepat pula pengaturan “*cash back*” atau pengembalian investasi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi yang bersumber dari hasil-hasil masyarakat pada desa pedalaman, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung.

Gedung-gedung perkantoran yang merupakan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan. Selama masa *Caretaker* atau masa pembentukan Pemerintahan Kabupaten, kondisi prasarana tempat kerja para pegawai pemerintahan masih sangat darurat atau bersifat sementara, sehingga kebutuhan terhadap gedung-gedung perkantoran merupakan kebutuhan yang mendesak.

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan kemudian dianggarkan dalam APBD Kabupaten Seluma tahun 2006 – 2007, di samping dana-dana APBN dan APBD Provinsi Bengkulu. Pembangunan dilaksanakan kontraktor lokal yang ketika Kabupaten Seluma belum terbentuk bekerja di luar Kabupaten Seluma. Pembangunan gedung-gedung perkantoran dan pemukiman yang mendesak pelaksanaannya dan mulai dikerjakan sejak tahun 2006

adalah; (1) Jasa Perencanaan Umum; (2) Jasa *Review Design* Gedung Daerah; (3) Pembangunan Gedung Daerah Tahap III; (4) Pembangunan Gedung kantor Bupati; (5) Pembangunan Gedung Kantor DPRD; (6) Pembangunan Kantor Camat Seluma Selatan; (7) Pembangunan Kantor Camat Seluma Utara; (8) Pembangunan Kantor Camat Seluma Timur; (9) Pembangunan Kantor Camat Lubuk Sandi; (10) Pembangunan Kantor Camat Ulu Talo; (11) Pembangunan Kantor Camat Ilir Talo; (12) Jasa Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung; (13) Pembangunan Pagar Rumah Dinas DPRD; (14) Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bawasda dan Bappeda; (15) Pembangunan Pagar Rumah Dinas Asisten; (16) Pembangunan Pagar Rumah Dinas PU; (17) Pembangunan Pagar Rumah Dinas Sekda; (18) Pembuatan Sumur Bor 11 Unit; (19) Penataan Taman Rumah Dinas Bupati; (20) Penataan Taman Rumah Dinas Wabup, Kadis, dan Pimpinan Dewan; (21) Penataan Kolam dan Air Mancur; (22) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Tahap I; (23) Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU; (24) Pembangunan Gedung Kantor Bappeda, (25) Pembangunan Gedung kantor Dispenda; (26) Pembangunan Gedung Kantor Bawasda; (27) Pembangunan Gedung Kantor KPU; (28) Pembangunan Gedung Kantor BKSDA; (29) Pembangunan Gedung Kantor Kelautan dan Perikanan; (30) Pembangunan Gedung Kantor Pertanian; (31) Pembangunan Mapolres Seluma; (32) Pembangunan Gedung Kantor UPTS Dispenda Provinsi; (33) Pembangunan Masjid Jami' Tais; dan (34) Pembangunan Kantor Kajari Seluma.<sup>133</sup>

Pembangunan jembatan merupakan kebutuhan yang tak kalah mendesak untuk menghubungkan desa-desa dalam Kabupaten Seluma. Pada tahun anggaran 2006-2007 direhabilitasi jembatan penghubung menuju desa terpencil melalui proyek bencana alam dan pembangunan jembatan gantung sebagai jembatan penyeberangan orang. Rehabilitasi jembatan tersebut antara lain di lokasi Kecamatan Semidang Alas yang merupakan akses transportasi dari desa pedalaman. Selain itu dibangun pula jembatan akses pada lokasi-lokasi strategis, jembatan gantung, dan jembatan darurat, misalnya jembatan Air Gasan, jembatan Air Ancing, jembatan Air Penyabungan, dan jembatan Air Pandan.<sup>134</sup>

Pemerintah Kabupaten Seluma di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2006 menerima Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 9.960.000.000,-. Dari dana tersebut dialokasikan untuk bidang irigasi sebesar Rp. 1.480.000.000,-. Untuk infrastruktur jalan

---

<sup>133</sup> Bappeda Kabupaten Seluma, *Dokumentasi Perencanaan Pembangunan 2005-2006*, Tais, Seluma.

<sup>134</sup> Bustan A. Dali, (2007), *op. cit.*, hlm. 79-80.

dialokasikan sebesar Rp. 6.930.000.000,- dan Air Bersih sebesar Rp. 1.550.000.000,-

Kegiatan bidang irigasi meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Lokasi pembangunannya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Seluma berdasarkan skala prioritas yang dianggap penting untuk direhabilitasi atau dipelihara. Proyek pembangunan irigasi yang dilakukan pada tahun 2006 adalah; (1) Pemeliharaan DI Air Seluma; (2) Pemeliharaan DI Air Hitam; (3) Pemeliharaan DI Air Talo Kecil; (4) Pemeliharaan DI Air Merah Kembang Mumpo; (5) Pemeliharaan DI Air Tebat Ndawaran; (6) Pemeliharaan DI Air Siabun; (7) Pemeliharaan DI Air Kungkai; (8) Pemeliharaan DI Air Ngalam; (9) Pemeliharaan DI Air Talo Nanto; (10) Pemeliharaan DI Air Rawa Penago I Zone I-II; (11) Pemeliharaan DI Air Rawa Indah Zone III; (12) Pemeliharaan DI Air Rawa Periukan; (13) Pemeliharaan DI Air Rawa Cahaya Negeri; (14) Pemeliharaan DI Air Rawa Riak Siabun; (15) Pemeliharaan DI Air Pring Masmambang; (16) Pemeliharaan DI Air Pengurungan; (17) Pemeliharaan Air Pring latakan; (18) Pemeliharaan Berkala DI Air Simpang Pandan; (19) Pemeliharaan Berkala DI Air Talo Pagar Banyu; (20) Pemeliharaan Berkala DI Air Talo Lubuk Penantian; (21) Perbaikan Talang BSK 5 Air Seluma; (22) Perbaikan Irigasi Air Hitam; dan (23) Pengerukan Bendung Air Seluma.<sup>135</sup>

Pemerintah Kabupaten Seluma pada tahun 2006 juga telah membangun reservoir dan perpipaan air bersih dengan menggunakan sumber air Bukit Penyabungan. Pemasangan pipa ini mencapai pusat kota Tais sebagai ibukota kabupaten dan jumlah rumah yang terpasang sambungan air bersih mencapai 300 unit. Pembangunan sarana sumber air bersih termasuk dalam skala prioritas Pemerintah kabupaten Seluma karena air bersih merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Sebelum tahun 1978, masyarakat kabupaten Seluma masih mengandalkan sungai-sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun karena kondisi air sungai sudah mulai tercemar, maka dibutuhkan prasarana air bersih yang dialirkan dari gunung atau sumber air lainnya yang belum tercemar.

Selain pembangunan fisik dilakukan pula revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW). Hal ini dilakukan karena Tata Ruang yang ada sebelumnya merupakan konsep pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan (bekas Kabupaten Induk), sehingga tidak sesuai lagi dengan pola pembangunan Kabupaten Seluma. Konsistensi pembangunan di Kabupaten Seluma

---

<sup>135</sup> Bappeda Kabupaten Seluma, *loc. cit.*

memiliki pola yang sangat signifikan dalam menyikapi pertumbuhan pembangunan ke depan.<sup>136</sup>

Tata Ruang merupakan kerangka acuan dalam pemanfaatan lahan dan ruang dalam perencanaan pembangunan suatu kota atau wilayah. Dengan konsistennya Tata Ruang maka pemanfaatan ruang akan menjadi lebih terarah. Sebagai daerah yang memiliki wilayah cukup luas (2.400,044 Km<sup>2</sup>), maka tata ruang Kabupaten Seluma disusun melalui penelitian yang selektif dan teliti yang bertujuan supaya perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

## **D. KEMAJUAN YANG DIRAIH KABUPATEN SELUMA PASCA PEMEKARAN**

### **1. Kemajuan di Bidang Sosial**

Pasca pemekaran, Pemerintah Kabupaten Seluma segera melakukan pembenahan-pembenahan di segala lini. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan sumberdaya manusia yang dilakukan di antaranya adalah pengiriman mahasiswa ke luar daerah untuk melanjutkan studi, program magang bagi pengusaha industri mikro, program pelatihan tenaga kerja, dan program-program peningkatan sumberdaya lainnya. Pembangunan sumberdaya manusia tersebut, tidak hanya dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah saja, melainkan juga dilaksanakan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, sehingga kemampuan atau *skill* dapat ditingkatkan secara optimal.<sup>137</sup>

Di samping pengiriman mahasiswa ke luar negeri, Pemerintah Kabupaten Seluma juga melaksanakan program magang yang terutama ditujukan untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat belajar bekerja. Selain itu program ini dilaksanakan oleh usahawan swasta mikro yang disubsidi oleh Pemerintah kabupaten Seluma. Dengan magang keluar dari daerah maka akan didapat wawasan yang lebih luas untuk kemudian diterapkan di daerah sendiri. Program magang dilakukan antara lain ke Pasuruan Jawa Timur untuk industri perkayuan, ke Cirebon untuk industri rotan, ke Bandung untuk industri garmen, dan ke Tasikmalaya untuk industri anyaman.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>137</sup> Bustan A. Dali, *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 – 3 Agustus 2007* Bungamas: Yayasan Pem.bangunan Kabupaten Seluma, 2007), hlm. 49-50.

Pentingnya pembangunan sumberdaya manusia disebabkan karena pengelolaan sistem terletak pada kompetensi pola pikir manusia itu sendiri. Dengan demikian untuk mengelola manajemen pembangunan di berbagai bidang diperlukan sumberdaya manusia yang handal yang menentukan maju atau tidaknya pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Seluma sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang handal.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Seluma pasca pemekaran meningkat dengan pesat. Jika pada tahun 2000 penduduk Seluma hanya berjumlah 148.416 jiwa,<sup>138</sup> tahun 2003 telah meningkat menjadi 164.672 jiwa, tahun 2004 menjadi 171.535 jiwa, dan tahun 2005 menjadi 182.453 jiwa.<sup>139</sup> Pertambahan penduduk yang pesat tersebut antara lain juga disebabkan oleh banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan ke daerah ini dari daerah lainnya atau Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat ini, di satu sisi menyebabkan bertambahnya kebutuhan penambahan gedung sekolah. Di Kabupaten Seluma, distribusi penduduk yang berusia muda (0-14 tahun ) berjumlah 32 persen dari populasi penduduk secara keseluruhan. Kenyataan ini mengakibatkan sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat diperlukan untuk mendidik generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa kelak. Ketersediaan gedung-gedung sekolah yang memadai merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

Untuk memajukan pendidikan di daerahnya, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan rehabilitasi gedung Sekolah dasar sebanyak 40 unit dengan total alokasi dana sebesar Rp. 3.960.000.000,- yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.600.000,- dan dana *sharing* APBD sebesar Rp. 360.000.000,-. Untuk tingkat SLTP telah dilakukan pembangunan tiga unit Ruang Kelas Baru (RKB) dan satu Unit Sekolah Baru (USB). Untuk Tingkat SLTA telah dilakukan pula dua Unit Sekolah Baru, enam unit pembangunan RKB SMK, empat unit pembangunan RKB SMA, dan tiga unit pembangunan RPL SMA.<sup>140</sup>

Pembangunan beberapa gedung sekolah ini menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga guru juga meningkat. Hasil nyata dari perlakuan pendidikan yang lebih baik adalah tenaga kerja siap pakai

---

<sup>138</sup>Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan ... *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>139</sup>Bastian A. Dali, 2007, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>140</sup>*Ibid.*, lm. 51-52.

yang handal. Margin-margin sebagai daerah maju terus dikejar melalui pendidikan sumberdaya manusia daerah, di amsa yang akan datang akan didapat sumberdaya manusia yang memiliki pola pikir dinamis dan membangun suatu perencanaan yang konsisten. Dengan meningkatnya perlakuan bagi pendidikan sumberdaya manusia, maka diharapkan capaian kemajuan akan dapat diraih lebih cepat pula.

Pada tahun 2005, dua tahun setelah dimekarkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Seluma telah dapat ditekan dibanding sebelum pemekaran.<sup>141</sup> Hal ini merupakan dampak dari langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang mulai berorientasi pada pasar tenaga kerja serta perbaikan mutu tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan dan dukungan dana segar bagi permodalan usaha. Pasar tenaga kerja terutama ditujukan bagi kepentingan daerah sendiri sehingga balancing kebutuhan pasar tenaga kerja dengan penyediaan tenaga kerja dapat tercapai dengan baik. Penekanan terhadap pengangguran tersebut didukung oleh suatu sistem yang menggunakan metoda *Alfa Rotary* atau satu persepsi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih intensif membangun peluang kerja dengan pembinaan Pemerintah Kabupaten Seluma secara serius.

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma ini adalah dalam rangka mewujudkan keinginan supaya Kabupaten Seluma memiliki sumberdaya manusia sendiri, tanpa harus mencari keluar. Para sarjana berbagai disiplin ilmu dan tamatan SLTA yang masih banyak menganggur akan diarahkan untuk lebih mandiri dalam usaha-usaha wiraswasta maupun menjadi pegawai negeri dengan tujuan demi kemakmuran daerah dan kemakmuran individu secara merata. Banyak bidang usaha yang ditumbuhkembangkan sebagai daya dukung pasar tenaga kerja lokal.

Untuk menyejahterakan masyarakat, salah satu sektor yang sangat penting adalah sektor kesehatan. Pada tahun 2003, tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Seluma masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur kesehatan yang masih sangat kurang. Untuk kepentingan peningkatan sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Seluma mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dialokasikan untuk rehabilitasi Puskesmas Tais sebesar Rp. 200.000.000,- dan pengadaan peralatan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Pada tahun 2004 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dialokasikan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 51.



untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C. Tahun 2005 juga didapat dana yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (DAK) dengan dana pendamping APBD sebesar 10 persen dan dialokasikan untuk kepentingan pengadaan Puskesmas Keliling empat unit, pengadaan alat kesehatan satu paket, peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas sebanyak dua unit, Rehabilitasi Puskesmas satu unit, dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu sebanyak delapan unit.<sup>142</sup>

Kebutuhan terhadap prasarana dan sarana kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam kesejahteraan. Selain itu dengan semakin meningkatnya kesehatan masyarakat, maka akan semakin meningkat pula tahanan pelaksanaan aktivitas yang dilakukan, sehingga dengan demikian maka semakin meningkatnya kesehatan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Kesehatan masyarakat tersebut tercermin pada tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam bidang penyerapan tenaga kerja, setelah dimekarkan, kebutuhan Kabupaten Seluma terhadap pegawai sangat signifikan. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2009 kebutuhan terhadap tenaga pegawai sekurang-kurangnya adalah 7.000 orang. Sementara itu sampai akhir tahun 2006 baru terisi sebanyak 3.600 orang. Dengan demikian sampai tahun 2009 masih dibutuhkan pegawai sebanyak 4.400 personil lagi. Kenyataan ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik bagi mereka yang berkeinginan menjadi pegawai negeri untuk mewujudkan cita-citanya, sekaligus dapat menyerap tenaga kerja yang relatif besar, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Seluma.

Kota Tais setelah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Seluma, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan fisik berupa kantor-kantor pemerintahan, jalan, gedung-gedung sekolah, dan rumah sakit. Pasar yang ada di Kota Tais juga mengalami peningkatan yang sangat pesat dilihat dari perputaran uang yang ada di pasar tersebut. Hal ini berdampak pula pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat Kota Tais saat ini yang memiliki bisnis penyewaan kamar kos atau rumah untuk para pegawai dari luar daerah yang berdinasi di Kota Tais. Usaha-usaha seperti rumah makan, usaha fotokopi, salon, rental komputer, wartel, wamet, toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan berbagai usaha lainnya pun mulai bermunculan.

Pengembangan bidang keagamaan, Pemerintah kabupaten Seluma telah melakukan beberapa program yang bertujuan untuk

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

kesejahteraan masyarakat di bidang rohani. Paket bantuan yang diluncurkan pada tahun 2006 antara lain adalah:<sup>143</sup>

1. Pembangunan Rumah Ibadah Baru berupa pembangunan Masjid di Desa Lubuklintang dan Lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah.
2. Rehabilitasi Rumah Ibadah berupa bantuan pada 30 unit masjid yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seluma.
3. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an.
4. Bantuan Ibadah haji.
5. Bantuan bagi pengurus masjid.
6. Bantuan bagi para da'i.

## **2. Kemajuan di Bidang Ekonomi**

Setelah menjadi kabupaten definitif, Pemerintah Kabupaten Seluma sejak tahun 2005 mulai melakukan pembangunan bidang ekonomi rakyat dengan melaksanakan berbagai program, terutama pembangunan ekonomi dengan pembentukan pola industri mikro pedesaan. Dalam meningkatkan industri pedesaan secara umum dilakukan pembinaan-pembinaan secara intensif melalui program sosialisasi dan pelatihan. Pembangunan ekonomi rakyat pedesaan sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menjamin stabilitas sebagai sumber dana pembangunan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperkuat ekonomi rakyat pedesaan pada tahun 2005 di antaranya adalah dengan melakukan pelatihan kerja siap pakai bekerjasama dengan berbagai pihak, di berbagai desa yang dianggap memiliki potensi yang baik. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma melalui dinas-dinas terkait yang terlihat pada Tabel 6 di atas bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu produk sehingga memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi. Penguatan ekonomi pedesaan tersebut juga ditujukan pada akses pasar. Bahan baku yang digunakan terutama adalah bahan baku lokal, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga murah, di samping menggali sumberdaya dan pemanfaatan produk bahan baku dengan mutu yang dapat bersaing di pasaran.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101; Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Seluma mengalokasikan dana sebesar 16 milyar untuk membangun masjid raya terbesar yang mampu menampung sepuluh ribu orang Jemaah, yang berlokasi di desa Talang Saling Kecamatan Seluma, Lihat *Bengkulu Ekspres*, Senin 26 Mei 2008, hlm. 17.

Bahan baku yang diperlukan untuk kebutuhan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Seluma sebagian besar dihasilkan oleh Kabupaten Seluma sendiri. Produk bahan baku tersedia di antaranya adalah:<sup>144</sup>

1. Bahan baku industri perabot seperti kayu, rotan, dan bambu.
2. Bahan baku industri briket seperti batubara dan arang kelapa.
3. Bahan baku industri makanan seperti gula kelapa, kelapa, beras ketan, dan lain-lain.
4. Bahan baku industri bio diesel seperti kelapa sawit, ibu-ubian, jarak, dan lain-lain.
5. Bahan baku industri perikanan, seperti ikan laut dan ikan air tawar.
6. Bahan baku industri kerajinan serat seperti sabut kelapa, serat rami, dan lantung.
7. Bahan baku industri cat dan lem seperti damar, silika, dan lain-lain.
8. Bahan baku industri semen seperti, kapur gamping, kaolin, dan silika.

Produk-produk bahan baku tersebut dapat diproses oleh masyarakat pada tingkat ekonomi mikro di pedesaan. Akan tetapi, untuk menggali bahan baku agar menjadi lebih produktif dan terarah, diperlukan pembinaan-pembinaan secara intensif. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat pedesaan secara umum belum memenuhi standar “sejahtera” maka dibutuhkan peran Pemerintah kabupaten sebagai penggerak dengan memberdayakan teknisi-teknisi lokal.

Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai promotor pembangunan ekonomi, sedangkan para teknisi sebagai penggerak lapangan. Teknisi tidak mutlak berasal pegawai negeri, melainkan lebih efektif menggunakan tenaga kerja yang ada di tengah masyarakat. Hanya saja untuk memberikan imbalan atau penghasilan kepada tenaga kerja tersebut harus disediakan dana dari Pemerintah kabupaten, karena apabila kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang dan maju akan dapat memberikan kontribusi kepada daerah itu sendiri dalam bentuk pajak dan retribusi.

Dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Seluma pola ini sangat efektif dan sudah mulai dilakukan, antara lain dengan membentuk organisasi-organisasi ekonomi masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi. Selain itu telah tumbuh dan

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

berkembang pula koperasi-koperasi sebagai fasilitator keuangan organisasi tersebut. Organisasi-organisasi ekonomi mikro yang sudah ada di tengah masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam menuju kemandirian usaha di tengah masyarakat.

Salah satu organisasi yang sudah mulai mengakses pasar regional adalah Kelompok Usaha Bersama “Himpunan Industri Kerajinan Kayu” atau *Product Wood Furniture*, yang membuat peralatan rumah tangga, *souvenir* kayu, dan lain-lain. Produk-produk yang dihasilkan oleh Himpunan Industri Kerajinan Kayu Kabupaten Seluma (HIKKAS) dapat dilihat pada Tabel 8 berikut;

Seluruh bahan baku utama yang digunakan pada produk yang dihasilkan HIKKAS menggunakan bahan baku lokal seperti kayu sungai, kayu gadis, kayu kelapa, oker, dan lain-lain. Keberadaan asosiasi lokal ini adalah dukungan terhadap Program Pemerintah kabupaten Seluma dalam hal peningkatan ekonomi rakyat.

Selain asosiasi HIKKAS, terdapat pula asosiasi bidang perbengkelan, Diversifikasi Kelapa, Asosiasi Pengrajin Umum, dan lain-lainnya. Keberadaan organisasi tersebut tidak terlepas dari pola pembinaan Pemerintah Kabupaten Seluma melalui dinas terkait. Pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan sentra-sentra industri kecil dan menengah ini akan terus berkembang apabila intensifikasi pembinaan terus menerus dilakukan dan penajakan akses pasar terus diintegrasikan. Kelompok-kelompok usaha rakyat lainnya yang terdapat di Kabupaten Seluma adalah Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Kelompok Perikanan, dan lain-lain.

Perimbangan pembangunan antara sektor pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat kemajuan ekonomi daerah, tidak hanya ekonomi rakyat, tetapi akan dapat mengacu pada ketahanan ekonomi daerah. Apabila sektor swasta sudah mulai maju, maka akan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Sinkronisasi antara kemajuan ekonomi rakyat dengan PDAS merupakan suatu langkah timbal balik yang akan mengacu pada pencapaian internal daerah dalam memajukan seluruh sektor secara komprehensif.

Untuk menyikapi kondisi ekonomi yang semakin rancu, masyarakat Seluma membentuk Kelembagaan Ekonomi Mikro dan Kecil. Lembaga ekonomi masyarakat tersebut terdiri dari (1) koperasi; (2) Asosiasi Kelompok Usaha Bersama (KUB); (3) Kelompok Tani dan Nelayan; (4) Kelompok Peternak; dan (5) *Business Development Service* (BDS). Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri telah menyusun Program Pembangunan Ekonomi dengan mengalokasikan dana berupa

subsidi, pos bantuyuan, dan pembinaan terhadap lembaga ekonomi masyarakat tersebut.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut merupakan respon positif dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Pembinaan yang dilakukan berupa; (1) pelatihan teknis; (2) bantuan modal kerja; dan (3) bantuan mesin-mesin peralatan. Lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat.

Selain Lembaga Ekonomi Mikro dan Kecil yang dibangun oleh masyarakat dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, perekonomian rakyat didukung pula oleh program-program formal seperti;

1. Bengkulu *Regional Development Project* (BRDP)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
3. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P3DTK)
4. Program nasional Pemberdayaan Masyarakat.<sup>145</sup>

Lembaga ekonomi berbentuk koperasi dan kelompok usaha yang terdapat di Kabupaten Seluma di antaranya adalah USP KUD Sia Sekata yang beralamat di Rimbo Kedui, USP KUD Empat Sepakat di Talang Tinggi, USP KUD Dwi Tunggal di Padang kelapo, KSP Tiga Mitra di Lubuk Sahung, KSP Margo Mulyo di Purbosari, USP Kotan Harapan Maju di sendawar, USP KPN Guru-guru SD di Pasar Tais, USP KPN Tut Wuri Handayani di Kembang Mumpo, USP KPN Guru SD Albar/Altim di Masbambang, USP KPN Serasan di Penago II, USP KPK Maju Bersama di Air latak, USP Kop Mekar Jaya Agung di Lawang Agung, USP KUD Hubima di Tumbu'an, KUD Puguk Permai di Puguk, USP Usaha Kita di Bungamas, Koperasi Syari'ah Roudha di Jenggalu, USP Karya Agung di Pagar Agung, USP Koppas Bina Mitra di Pasar Tais, USP Koppas Karya Bersama di Serambi Gunung, USP Kopwan Serawai di Pasar Tais, USP Kopwan UPPKS Serasi di Ilir Talo, KUB HIKKAS di Bungamas, LUB Karya Teknik di bungamas, KUB Irama di Bungamas, KUB FKPI di Bungamas, KUB Forest Ado di Bungamas, Organisasi Motor Ojek di Pasar Tais, *Business Development Service* milik YPKS di Bungamas, Kelompok Tani, Kelompok Peternak Sapi, Kelompok Perikanan Darat, Kelompok Petani Sawit, Kelompok

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

Petani Karet, dan Kelompok Nelayan yang terdapat merata di seluruh Kabupaten Seluma.<sup>146</sup>

Pemerintah Kabupaten Seluma, dalam mendukung pembangunan bidang perekonomian telah mengalokasikan dana bagi kepentingan penunjang operasional pembinaan ekonomi mikro dan kecil. Penunjang operasional tersebut terdiri dari 73 unit motor dinas, 1 unit kantor balai benih ikan, 5 unit tempat pelelangan ikan, 1 unit kolam balai benih ikan, 65 unit mobil dinas, 10 unit *dump truck*, 4 unit bolduzer, ekskavator, vibro, dan gradder, 1 unit mobil sampah, dan 1 unit mobil PBK.

Penunjang operasional tersebut merupakan inventaris yang digunakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Petugas Lapangan, dan petugas pembinaan lainnya demi kelancaran tugasnya. Mesin-mesin yang diserahkan langsung kepada masyarakat ekonomi mikro berupa 7 unit *hand tractor*, 2 unit mesin perontok padi, 2 unit mesin pemipil jagung, 2 unit mesin pengiris singkong, 2 unit mesin pamarut kelapa, 3 unit penyuling minyak atsiri, 5 unit mesin dan peralatan perbengkelan, dan 3 unit mesin dan peralatan permeubelan.

Dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi mikro sebagai penunjang ketahanan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten seluma pada tahun 2006 telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi usahawan ekonomi mikro yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama dengan Asosiasi Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Seluma. Pelatihan-pelatihan yang diadakan di antaranya adalah pelatihan industri perkayuan, perbengkelan, kerajinan industri makanan, industri diversifikasi kelapa, industri kerajinan rotan dan bambu, dan industri tenun yang menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).<sup>147</sup>

Pemerintah Kabupaten Seluma dalam upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat melakukan pemberian bantuan-bantuan, baik modal kerja maupun mesin-mesin peralatan melalui Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Seluma, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan ekonomi rakyat tersebut meliputi usaha-usaha koperasi, industri mikro dan kecil, usaha perkebunan rakyat, usaha perikanan, usaha peternakan, dan usaha-usaha lainnya.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma, *Data Bantuan Koperasi UKM 2006*, Tais Seluma, 2006.

<sup>147</sup> Dinas PERINDAG Kabupaten Seluma, *Profil Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah*, Tais Seluma, 2006.

<sup>148</sup> Bastian A. Dali, 2007, *op. cit.*, hlm. 99.

Melalui Program bantuan Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan bantuan modal kerja bagi usaha mikro dan koperasi simpan pinjam. Bantuan tersebut berupa dana bergulir dan bantuan hibah. Bantuan modal kerja bergulir diberikan pada bulan September 2006 kepada 40 unit usaha mikro dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- atau masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-. Sedangkan untuk USP/KSP Koperasi diberikan pula bantuan sejumlah kepada 23 Unit Koperasi. Bantuan modal kerja tersebut merupakan perangsang bagi pertumbuhan usaha pedesaan yang memiliki sasaran pertumbuhan ekonomi daerah bagi kepentingan yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat secara merata di Kabupaten Seluma.

Untuk pengembangan sentra-sentra usaha mikro dan kecil, Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan pembinaan-pembinaan terhadap usaha mikro pedesaan melalui Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma dengan membentuk *Business Development Service* (BDS), yaitu layanan pembinaan manajemen dan konsultasi. Sentra usaha yang telah dibina di antaranya adalah Sentra Gula Kelapa di Penago II, Sentra Industri Meubel HIKKAS, dan sentra industri makanan khas di Desa Bungamas.

Pada tahun 2006, dilakukan pendataan terhadap Koperasi dan UMKM yang ada di kabupaten Seluma. Semua Koperasi dan UMKM diwajibkan untuk mendaftarkan ulang usahanya dengan memantapkan usaha dan organisasi usahanya. Selain itu diberikan pula kewajiban untuk mengurus perizinan usaha yang diperlukan.

Dalam rangka intensifikasi pembangunan ekonomi pedesaan dan industri berskala mikro dan kecil, pada tahun 2006 telah dilaksanakan suatu sistem pemberdayaan industri mikro dan berskala lokal. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah kabupaten Seluma memberikan pembinaan berupa;<sup>149</sup>

1. Mesin dan peralatan perkayuan sebanyak tiga paket.
2. Mesin dan peralatan bengkel sebanyak lima paket.
3. Mesin dan peralatan penyulingan nilam sebanyak tiga paket.
4. Mesin dan peralatan pengolahan kopi sebanyak dua paket.
5. Mesin dan peralatan press sabut kelapa sebanyak satu paket.
6. Mesin dan peralatan penggilingan cabai sebanyak satu paket.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

### 3. Kemajuan di Bidang Politik

Setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2003, Kabupaten Seluma yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi menjadi Daerah Otonom Baru yang memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Peresmian kabupaten Seluma dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Hary Sabarno, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2003 yang sekaligus pelantikan Bupati *Caretaker*, atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Bengkulu di Kota Bengkulu.

Bupati *Caretaker* Kabupaten Seluma adalah Drs. M. Husni Thamrin yang mengemban tugas untuk menyusun komposisi dan personalia Lembaga-Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seluma dan mengantarkan kabupaten Seluma definitif, yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Masa Pemerintahan *Caretaker* adalah merupakan masa yang sangat berat bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Seluma karena kondisi yang bersifat sementara tersebut mengandung berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut di antaranya adalah belum tersedianya perumahan bagi Pegawai Negeri yang bertugas di Kabupaten Seluma, sedangkan para pegawai tersebut umumnya berdomisili di luar wilayah. Hal ini disebabkan karena mayoritas pegawai yang ada adalah pegawai pindahan yang direkrut dari berbagai daerah seperti Kabupaten Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk), Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat dalam berkiprah dengan satu tujuan untuk melaksanakan tugas membangun masa depan yang lebih di Kabupaten Seluma. Kelembagaan Dinas Instansi yang ada di Kabupaten Seluma pada masa Pemerintahan *Caretaker* beserta pimpinannya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:



Tabel 9.

**Data Lembaga Pemerintahan *Caretaker* di Kabupaten Seluma  
Tahun 2003-2004**

No.	Nama Lembaga	Pimpinan
1	Sekretariat Daerah	Drs. Mulkan Tajudin
2	Bappeda	Syafruddin D.A., S.H.
3	Badan Pengawasan Daerah	Syaiful Anwar Dali, S.E.
4	Dinas KPP	Ir. Zulkarnain Muin
5	Dinas PDK	Drs. A. Salim
6	Dinas Kesehatan	H. Hamdan M.H., SKM.
7	Dinas Perindagkop	Drs. Hendarmin Murman
8	Dinas Hutbun	Ir. Suandi Masri
9	Dinas PKT	Ir. Yuhendri
10	Dinas Pemsos	Drs. Arpan

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

Pada tahun 2003-2004 (tahun pertama *Caretaker*), otomatis Pemerintah Daerah belum dapat membangun infrastruktur sarana dan prasarana fisik. Pelaksanaan tugas hanya bertumpu pada pemantapan struktur Pemerintahan, sehingga kesibukan yang terjadi hanya terbatas pada penataan lembaga-lembaga.

Pada tahun 2004-2005 (tahun kedua *Caretaker*), Pemerintah kabupaten Seluma mengemban tugas berat menyukseskan Pemilihan Umum legislatif yang prosesnya dimulai dari bulan November 2003 sampai selesai Pemilu dan terbentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Selain itu pada tahun 2004 dilaksanakan pula peresmian Kecamatan Pemekaran sebanyak sembilan kecamatan.

Pemekaran jumlah kecamatan dari lima menjadi empat belas yang disertai dengan pemetaan wilayah administrasi 14 kecamatan merupakan kemajuan penting yang diraih Kabupaten Seluma setelah menjadi Daerah Otonom Baru. Jumlah desa yang semula 154 kemudian dimekarkan pula menjadi 165 desa dan 3 kelurahan. Selanjutnya juga telah dibentuk 40 Perda yang antara lain berupa Perda tentang 14 Kecamatan, Struktur Organisasi Kelembagaan, dan Perda lainnya yang mendesak dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>150</sup>

Kelembagaan Pemerintah dalam wilayah Kabupaten Seluma pada masa Pemerintahan Daerah *Caretaker*, masih belum dapat dikembangkan mengingat efisiensi dan efektivitasnya masih harus diperhitungkan. Karena pada masa itu yang penting kelembagaan harus

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

terbentuk, kendatipun masih digabung antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Seluma baru dapat dilakukan pada tahun anggaran 2005-2006, berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2005 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2006-2007 dengan penyesuaian kebutuhan daerah. Revisi kelembagaan tersebut sangat penting mengingat kebutuhan daerah yang semakin berkembang.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, pegawai negeri sebagai penyelenggara pemerintahan harus merasa nyaman dalam bekerja. Dengan kelembagaan yang proporsional, maka tugas-tugas yang dilaksanakan akan dapat pula dilakukan secara profesional. Bidang-bidang tugas akan menjadi lebih tenang dilaksanakan secara efektif serta akan dapat pula menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2003-2005, kelembagaan Pemerintahan Daerah kabupaten Seluma hanya belum ditetapkan dengan PERDA, akan tetapi penyesuaiannya hanya dilaksanakan melalui kepentingan sementara, sehingga kelembagaan hanya merupakan pembuka institusi Pemerintah Daerah yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyesuaian PERDA.

Untuk meningkatkan mutu pegawai negeri dalam wilayah Kabupaten Seluma dibentuk badan Pendidikan dan Latihan (Diklat), sehingga dengan demikian Kabupaten Seluma mampu menyelenggarakan Diklat sendiri. Untuk tingkat yang lebih tinggi atau bersifat nasional seperti PIM I, PIM II, PIM III, dan SPAMEN, Pemerintah Kabupaten Seluma belum dapat menyelenggarakannya.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri, yaitu;<sup>151</sup>

1. Diklat teknis sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Diklat teknis tata usaha pemegang kas daerah dengan jumlah peserta 37 orang.
3. Diklat fungsional analisis kepegawaian tingkat ahli dengan jumlah peserta 32 orang.
4. Diklat kepemimpinan tingkat IV dengan jumlah peserta 31 orang.
5. Diklat kepemimpinan tingkat III dengan jumlah peserta 17 orang (pengiriman Diklat ke Provinsi Bengkulu).

---

<sup>151</sup> Bastian A. Dali, (2007), *op. cit.*, hlm. 87.

Pada tahun 2007 Pemerintah kabupaten Seluma juga melakukan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri, yaitu;<sup>152</sup>

1. Pra Jabatan CPNS untuk Formasi Umum Golongan I dan II, Angkatan I dan II yang terdiri dari 96 orang peserta Angkatan I dan 48 orang peserta Angkatan II.
2. Pengiriman Para jabatan Golongan III dengan jumlah peserta 162 orang.
3. Pra jabatan CPNS untuk Formasi Honorer Golongan I dan II dengan jumlah peserta 274 orang.
4. Pra Jabatan CPNS untuk Formasi Honorer Golongan III dengan jumlah peserta 204 orang.
5. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan jumlah peserta 33 orang.

Tabal batas antara Kabupaten Seluma dan kabupaten induk tidak menemui kendala berarti. Riak-riak kecil terjadi ketika pada akhir tahun 2005, terbuka wacana Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk memperluas wilayah ke dalam wilayah Kabupaten Seluma dengan alasan kesimbangan wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>153</sup> Setelah terjadi pemekaran, luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula 5.949,14 Km<sup>2</sup> menjadi 1.185,7 Km<sup>2</sup> atau hanya 19,93 persen dari luas wilayah semula. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk lebih kecil dari luas wilayah Kabupaten Seluma yang mencapai 2.400,44 Km<sup>2</sup> atau 40,35 persen dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan prapemekaran dan juga lebih kecil dari luas Kabupaten Kaur yang memiliki luas 2.369,05 Km<sup>2</sup> yang merupakan 39,72 persen dari luas kabupaten semula.<sup>154</sup>

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Seluma mengembalikan ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa wilayah pemekaran Kabupaten Seluma adalah daerah bekas Kewedanaan Seluma. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur pada lampiran II terdapat peta Kabupaten Seluma dengan bagan yang sama dengan bekas wilayah Kewedanaan Seluma.

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>154</sup> Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* Jilid 4 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 217-218; Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

Dengan demikian jelaslah bahwa apabila dilakukan perubahan batas wilayah tanpa kesepakatan bersama dan payung hukum yang jelas maka hal ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat vital. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perlu diselesaikan sesegera mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Gubernur Bengkulu berwenang untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

Kepentingan penyusunan tata ruang sangat membutuhkan sinkronisasi tapal batas karena relevansinya adalah pembangunan wilayah perbatasan akan menjadi terhambat apabila tidak segera diselesaikan permasalahannya. Sebagai wilayah Otonom Baru, Kabupaten Seluma berupaya untuk membangun wilayah perbatasan sebagai aplikasi pemerataan pembangunan seluruh wilayah.

Pengaruh ketidakpastian tapal batas sangat fatal karena akan berpengaruh terhadap administrasi, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan tertundanya pembangunan pada seluruh wilayah perbatasan tersebut. Ketidakpastian tapal batas akan membuat keraguan pihak-pihak yang berbatasan untuk membangunnya. Akhirnya yang dirugikan adalah rakyat sebagai obyek pembangunan seluruh wilayah.

#### **4. Kemajuan di Bidang Budaya**

Pembangunan di bidang budaya merupakan pembangunan mental dan spiritual dalam upaya kondusifitas pembangunan fisik yang dilakukan. Melalui paket-paket program budaya dapat dibangun kebersamaan dengan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasa memiliki daerah sendiri.

Sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan budaya Seluma kepada masyarakat luas, Pemerintrah Kabupaten Seluma pada tahun 2006 diselenggarakan gelar budaya Seluma di taman Mini Indonesia Indah (TMII) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan TMII. Acara yang diselenggarakan dengan cukup meriah tersebut dihadiri oleh 27 Duta Besar negara sahabat. Upaya pengenalan budaya Seluma ke mancanegara bertujuan untuk mempromosikan Seluma sebagai salah satu tujuan wisata yang memiliki budaya yang indah, di samping alam yang juga tak kalah indahnya dengan tempat-tempat wisata terkenal di tanah air. Budaya etnik merupakan daya tarik wisata yang sangat diminati oleh pelancong dari mancanegara. Gelar budaya yang dilaksanakan dengan mengundang para Duta Besar negara sahabat

merupakan sarana efektif yang penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Seluma.<sup>155</sup>

Aset budaya Kabupaten Seluma yang spesifikasi dapat dijadikan andalan program wisata terpadu, karena spesifikasi yang demikian merupakan incaran para pelancong mancanegara. Hanya saja untuk pengembangan pariwisata tersebut masih diperlukan waktu mengingat kebutuhan terhadap kelengkapan infrastruktur vital lainnya masih merupakan kebutuhan mendesak sehingga skala prioritas masih bertumpu pada infrastruktur tersebut. Pariwisata sendiri dapat dikategorikan pada skala prioritas kedua, setelah infrastruktur vital sudah terbangun sesuai kebutuhan.

Pemrintah kabupaten Seluma berusaha melestarikan adat istiadat Serawai dengan tujuan supaya kondisi kerancuan akibat pengaruh asing dapat ditangkal. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Tana Serawai. Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat merupakan aturan daerah yang tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, sehingga dengan pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat tersebut Kabupaten Seluma memiliki lapisan hukum yang kental dalam penyelenggaraan perilaku kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat dapat pula memberikan kontribusi bagi tatanan perilaku masyarakat. Dalam hal-hal tertentu dapat pula memberikan perlindungan hukum dalam komunitasnya tanpa harus berurusan dengan penegak hukum yang lebih tinggi yang kadangkala dirasakan masyarakat terjadi penekanan-penekanan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Bengkulu muncul sebagai respon dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah.

Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh

---

<sup>155</sup> Bastian A. Dali, (2007), *op. cit.*, hlm. 96.

masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Tujuan pemekaran daerah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat bekas Kewedanaan Seluma dan Kaur selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya keinginan untuk mendirikan Kabupaten Seluma sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan di antaranya adalah luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (*pan of cointrol*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur.

Faktor lainnya adalah kemampuan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah Seluma yang sudah memenuhi syarat untuk mengatur diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Penerimaan daerah bekas Kewedanaan Seluma terhadap pengeluaran rutin; serta Rasio Penerimaan Daerah bekas Kewedanaan Seluma terhadap PDRB. Di samping itu juga dilihat dari potensi daerah Seluma yang diukur dari lembaga keuangan, sarana dan prasarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana sekolah, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, serta ketenagakerjaan.

Faktor sosial budaya merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dilihat dari tempat atau kegiatan institusi sosial serta sarana olahraga yang ada di Seluma. Dari segi sosial politik, partisipasi masyarakat Seluma dalam berpolitik serta jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Seluma juga memadai. Dari segi kependudukan, jumlah penduduk wilayah Seluma juga sudah mencukupi untuk menjadi kabupaten sendiri, begitu pula jika dilihat dari luas daerah yang mencapai 2.400,44 Km<sup>2</sup> atau 40,35 persen dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan prapemekaran.

Setelah resmi menjadi Daerah Otonom Baru, telah banyak kemajuan yang berhasil diraih Kabupaten Seluma, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam bidang sosial, kemajuan yang berhasil diraih di antaranya adalah pengiriman mahasiswa ke luar daerah untuk melanjutkan studi, program magang bagi pengusaha industri mikro, program pelatihan tenaga kerja, dan

program-program peningkatan sumberdaya lainnya, seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Pembangunan sumberdaya manusia tersebut, tidak hanya dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah saja, melainkan juga dilaksanakan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, sehingga kemampuan atau *skill* dapat ditingkatkan secara optimal.

Kemajuan di bidang ekonomi tercermin melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, terutama pembangunan ekonomi dengan pembentukan pola industri mikro pedesaan. Dalam meningkatkan industri pedesaan secara umum dilakukan pembinaan-pembinaan secara intensif melalui program sosialisasi dan pelatihan. Pembangunan ekonomi rakyat pedesaan sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menjamin stabilitas sebagai sumber dana pembangunan.

Kemajuan di bidang politik di antaranya adalah suksesnya Pemilihan Umum legislatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yang prosesnya dimulai dari bulan November 2003 sampai selesai Pemilu dan terbentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Selain itu pada tahun 2004 dilaksanakan pula peresmian Kecamatan Pemekaran sebanyak sembilan kecamatan. Pemekaran jumlah kecamatan dari lima menjadi empat belas yang disertai dengan pemetaan wilayah administrasi 14 kecamatan merupakan kemajuan penting yang diraih Kabupaten Seluma setelah menjadi Daerah Otonom Baru. Jumlah desa yang semula 154 kemudian dimekarkan pula menjadi 165 desa dan 3 kelurahan. Selanjutnya juga telah dibentuk 40 Perda yang antara lain berupa Perda tentang 14 Kecamatan, Struktur Organisasi Kelembagaan, dan Perda lainnya yang mendesak dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan di bidang budaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma di antaranya berupa upaya untuk lebih memperkenalkan budaya Seluma kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Seluma pada tahun 2006 menyelenggarakan gelar budaya Seluma di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan TMII. Upaya pengenalan budaya Seluma ke mancanegara bertujuan untuk mempromosikan Seluma sebagai salah satu tujuan wisata yang memiliki budaya yang indah, di samping alam yang juga tak kalah indahnya dengan tempat-tempat wisata terkenal di tanah air.

## 2. Saran

Pemekaran Wilayah sudah menjadi model hampir di seluruh daerah di Indonesia, sudah banyak provinsi, kabupaten dan kota yang dimekarkan menjadi beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota. Semuanya itu tentu karena peluang yang diberikan oleh produk hukum saat ini, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diingat dan harapannya ini menjadi sebuah saran bagi daerah yang baru dimekarkan, yaitu :

1. Adanya trend pemekaran wilayah, diikuti dengan adanya persoalan sosial budaya maupun persoalan ekonomi. Oleh sebab itu daerah yang baru dimekarkan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memenag dan mengakomodir semua kepentingan yang mungkin akan menimbulkan persoalan atau konflik, termasuk masalah tata batas.
2. Selain persoalan diatas, yang perlu diperhatikan bagi daerah yang baru dimekarkan adalah memperhatikan masalah pembangunan lingkungan. Kalau persoalan ini tidak dikelola secara hati-hati, maka ini merupakan bom waktu yang akan menjadi masalah besar kelak dikemudian hari. Tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga akan menimbulkan persoalan sosial - ekonomi. Ini tentu saja bukan sekedar asumsi, tetapi merupakan pengalaman sejarah yang sudah dialami oleh banyak daerah yang tidak memperhatikan pembangunan pada aspek lingkungan.
3. Kalau dari sisi budaya yang perlu diperhatikan oleh daerah yang baru dimekarkan, perlu dengan sangat hati-hati untuk memanfaatkan potensinya untuk kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah, agar melindunginya dari kemungkinan kerusakan nilai-nilai akibat pengaruh nilai budaya luar.
4. Banyak hal yang akan saya sampaikan sebagai sebuah saran, tetapi moment dan kondisinya belum mendukung untuk itu, namun pada kesempatan lain tetap akan ada, tentu saja dengan moment yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Arsip

*Bengkulu dalam Angka 2001*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Nomor: 03/KPTS/DPRD-1/2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Bengkulu terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 (Tiga) Kabupaten dan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 2 (Dua) Kabupaten.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perbaikan atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

*Staatsblad 1908* No. 646.

Surat Bupati Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor 136/355/B.1 Perihal Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Juli 2001.

Surat Pernyataan Dukungan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 136/565/PEM/2000.

Surat Dukungan Partai Golkar No: KEP-25/DPD.BS/GOLKAR/II/2002 tentang Dukungan terhadap Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 19 Februari 2002.

Surat Pernyataan Dukungan Ikatan Keluarga Minang Tais dan Sekitarnya (IKMAT) Kecamatan Seluma, Tais, 25 Januari 2002.

Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Kecamatan Seluma, Tais, 5 Januari 2000.

Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Kecamatan Sukaraja, Sukaraja, 10 Januari 2000.

Surat Pernyataan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI – Polri (FKPPI) 070 Rayon Kecamatan Seluma No. 10/II/01/2002, Tais, 25 Januari 2002.

Surat Pernyataan Himpunan Pemberantasan Hama Babi Kecamatan Seluma, Tais, 22 Januari 2002.

Surat Pernyataan Lembaga Sosial Masyarakat “ Peduli Masyarakat dan Pembangunan” Kecamatan Seluma No. 017/LSM PMPKS/2002, Tais, 23 Januari 2002.

Surat Pernyataan LKMD se Kecamatan Semidang Alas, 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Bali di Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Batak di Bengkulu Selatan, tahun 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Himpunan Keluarga Talo Kecamatan Sukaraja (HKTS), Lubuk Sahung, 15 Januari 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Talo, Masmambang, 6 Januari 2000.

Surat Pernyataan Masyarakat Sumatera Barat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Sumatera Barat di Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Sunda di Bengkulu Selatan, tahun 2002.

Surat Pernyataan Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, 2002.

Surat Pernyataan Organisasi Pemuda Kecamatan Semidang Alas, 2002.

Surat Pernyataan Organsasi Pemuda Kecamatan Sukaraja, 2002.

Surat Pernyataan Organisasi Pemuda Kecamatan Talo, 2002.

Surat Pernyataan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, Februari 2002.

Surat Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

Surat Pernyataan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 2002.

Surat Pernyataan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, Februari 2002.

Surat Pernyataan Partai Republik Kabupaten Bengkulu Selatan, Manna, 20 Februari 2002.

Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Semidang Alas, 2002.

Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Sukaraja, 2002.

Surat Pernyataan Pengurus PKK Kecamatan Talo, 2002.

- Surat Pernyataan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Seluma No 023/IV.1/B/2002, Tais, 23 Januari 2002.
- Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Semidang Alas, 2002.
- Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Talo, 2002.
- Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukaraja, 2002;
- Surat Pernyataan Tokoh Agama Kecamatan Sukaraja, 2002.
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Gubernur Bengkulu Nomor 136/646/B,1 Perihal Mohon untuk Ditindaklanjuti Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, tanggal 9 April 2001.
- Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001.
- UU RI No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

## **II. Koran/Majalah**

- Bengkulu Ekspres*, 13 Maret 2008.
- Bengkulu Ekspres*, 29 April 2008.
- Bengkulu Ekspres*, 15 Mei 2008.
- Bengkulu Ekspres*, 26 Mei 2008.

## **III. Buku, Laporan, Makalah, Skripsi, Tesis**

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Abidin, Affandi, *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu*, Bengkulu: Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, 1973.
- Achmad, Ramli, *et al.*, *Koleksi Senjata Tradisional Museum Negeri Propinsi Bengkulu*, Bengkulu: Depdikbud, 1991.
- Affandi, Hakimul Ikhwani, *Akar konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aksa, Iwan N., "Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS)", *Makalah*, Tais, 2001.
- Alfian, Teuku Ibrahim, "Tentang Metodologi Sejarah" dalam Teuku Ibrahim Alfian, *et al.*, (eds.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai*

*Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992.

- Amran, Rusli, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Arios, Rois Leonard, "Kembali ke Marga, Kembali ke Budaya Asal: Refleksi Sistem Pemerintahan Tradisional Bengkulu di Era Otonomi", dalam *Suluah*, Volume 04, Nomor 5, Agustus 2004.
- Asnan, Gusti, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seluma, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma (RTRW)*, 2008.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan*, Tais, Seluma.
- Bappeda Kabupaten Seluma, *Dokumentasi Perencanaan Pembangunan 2005-2006*, Tais, Seluma.
- Burhan, Firdaus, *Bengkulu dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia, 1988.
- Dali, Bustan A., *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 - Agustus 2007* (Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007), hlm. 16.
- \_\_\_\_\_, "Sejarah Daerah Tana Serawai Empat Semidang Kabupaten Seluma, *Synopsis*, Tais, 2008.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Seluma, *Data Bantuan Koperasi UKM 2006*, Tais Seluma, 2006.
- Dinas PERINDAG Kabupaten Seluma, *Profil Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah*, Tais Seluma, 2006
- Gayo, Iwan (ed.), *Buku Pintar Seri Senior*, Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985.
- Graghan, Gilbert J. A., *Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press. 1984.
- Hanafiah, Djohan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*, Palembang: Pemda Tingkat II Kotamadya Palembang, 1998.

- Herlambang, "Pemekaran Wilayah Ditinjau dari Perspektif Hukum (Sebuah Pengalaman Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah), *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.
- Hendrato, Andri Novi & Dani Wahyu Munggoro, *Panduan Menakar Otonomi Komunitas*, Jakarta: Yappika, 2002.
- Herlina, Muria, *et al.* "Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu", *Laporan Penelitian*, Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu, 1997.
- Ichwan A., M., *Sebuah Renungan Konflik Tapal Batas Bengkulu: Batas Wilayah dan Sejarah*, Bengkulu: Rakyat Bengkulu. 2007.
- Jamuin, Ma'arif, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antaretnik dan Agama*, Kartasura: CISCORE Indonesia. 2004.
- Junus, Umar, "Kebudayaan Minangkabau" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Kodiran, "Kebudayaan Jawa", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Lapian, A.B. & Soewadji Sjafei, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.
- Latief, Ch. N. Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 2002.
- Najamudin, Agusrin Maryono, "Peran dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Merespon Aspirasi Pembentukan Kabupaten Baru", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.
- Nuralia, Lia & Iim Imadudin, *Pola Asimilasi Etnis Cina di Kota Bengkulu 1950-1998*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004.

Nurazi, Ridwan, "Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu Evaluasi Aspek Ekonomi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

*Otonomi: Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2001.

Purwanto, Bambang, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris" dalam *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta Fersembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002.

Samudra, Syahda Guruh Langkah, *Menimbang Otonomi VS Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat madani Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Sarwono, Sawit, "Etnik di Bengkulu: Kesatuan dalam Keberagaman" *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

Setiyanto, Agus, "Bengkulu dalam Lintas Sejarah: Dari Sistem Pemerintahan Tradisional hingga Birokrasi Kolonial", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm. 4.

Sidik, Abdullah, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Suharizal. *Konflik Perubahan Batas Wilayah: Studi Atas Perubahan Batas Kota Bukittinggi*. Padang : Anggrek Law Firm. 2004.

Tim Litbang Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* Jilid 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

\_\_\_\_\_, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* Jilid 4, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.

"Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001.

Vasanty, Puspa, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.





SUMATERA SELATAN

LUBUKLINGGAU

ARCAKAMUKH

CUBUK

BENGKULU

MANNA



**BPSNT Padang Press**  
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji  
Padang Sumatera Barat  
Telp./faks. 0751-496151  
[www.bpsnt.padang.info](http://www.bpsnt.padang.info)

**ISBN**  
**978-602-8742-53-5**